BUMN UNTUK INDONESIA

asuransi jasindo
A member of IFG

PENGUATAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN

*STRENGTHENING COMPETITIVE ADVANTAGE TO **ACCELERATE GROWTH***

2023

Laporan Tahunan

Annual Report

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimers and Limitation of Liability

Selamat datang di Laporan Tahunan PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2023 dengan tema "Penguatan Keunggulan Kompetitif untuk Mempercepat Pertumbuhan". Laporan Tahunan ini diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, di samping hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan perkiraan dan hasilnya mungkin berbeda dalam perkembangan aktual.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan, serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Hasil-hasil yang diharapkan dari dokumen-dokumen yang digunakan telah dipastikan keabsahannya, bersifat prospektif dan tidak berlaku sebagai jaminan.

Laporan Tahunan ini memuat data keuangan dan operasional Perseroan hingga 31 Desember 2023, dan disahkan serta diterbitkan pada 31 Mei 2024.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Asuransi Jasindo" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Asuransi Jasa Indonesia yang menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, Laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi Perseroan http://www.jasindo.co.id.

Welcome to the 2023 Annual Report of PT Asuransi Jasa Indonesia with the theme "Strengthening Competitive Advantage to Accelerate Growth". This Annual Report is issued following Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Ministerial Regulation of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, in addition to matters of historical nature. These statements are estimates, and results may differ in actual developments.

Prospective statements in this annual report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of the Company, as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The results expected from the documents used have been confirmed, are prospective, and do not constitute a guarantee.

This Annual Report contains the Company's financial and operational data up to December 31, 2023, and was ratified and published on May 31, 2024.

This Annual Report contains the words "Asuransi Jasindo" and "Company," defined as PT Asuransi Jasa Indonesia, which operates in the field of loss insurance. Mention of the currency unit "Rupiah", "Rp", or IDR refers to the official currency of the Republic of Indonesia, meanwhile, "US Dollar" or USD refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah.

The Report is prepared in two languages, Indonesian and English. In addition to the printed edition, similar Reports can be accessed through the Company's official website http://www.jasindo.co.id.

PENGUATAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN

STRENGTHENING COMPETITIVE ADVANTAGE TO ACCELERATE GROWTH

Penjelasan Tema
About Theme

Sejalan dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) terus melakukan pembenahan agar dapat mengoptimalkan potensi dibalik pemulihan ekonomi tersebut. Asuransi Jasindo memperkuat fondasi bisnis dengan melakukan serangkaian perubahan baik pada organisasi, kebijakan dan strategi Perusahaan.

Selain itu, sepanjang tahun 2023, Asuransi Jasindo berupaya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan bersaing dengan melakukan inovasi dan penyempurnaan produk dan layanan. Salah satu langkah penting yang dilakukan Asuransi Jasindo adalah melakukan transformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada seluruh konsumen antara lain telah menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA), *Virtual Claim Management* (VCM), Sistem *Virtual Account* (SIVA), Sentralisasi dan Otomasi proses *underwriting*, klaim dan keuangan, dan Aplikasi *E-Marine*.

Selain itu, Asuransi Jasindo juga fokus pada pengembangan dan penetrasi di produk-produk yang memiliki potensi besar, di mana Asuransi Jasindo juga memiliki keunggulan di bidang tersebut, antara lain pada produk *Marine Hull*, *Energy Offshore*, *Energy Onshore*, *Satellite*, dan *Liability*.

Tahun 2023, Asuransi Jasindo fokus pada upaya penguatan fundamental Perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui Pilar Strategi Perusahaan, yaitu *Strengthen Core Competencies to Grow Business*. Terbukti, kondisi keuangan Asuransi Jasindo sudah berada pada posisi yang sangat baik di akhir tahun 2023 dan pencapaian laba bersih tahun buku 2023 yang merupakan murni *core competence* Asuransi Jasindo.

In line with the post-pandemic economic recovery process, PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) continues to make improvements in order to optimize the potential behind the economic recovery. Asuransi Jasindo strengthens its business foundation by making a series of changes to the company's organization, policies and strategy.

In addition, throughout 2023, Asuransi Jasindo strives to increase competitiveness and competitive advantage by innovating and improving products and services. One of the important steps taken by Asuransi Jasindo is carrying out digital transformation intended to improve services to all consumers, including implementing Robotic Process Automation (RPA), Virtual Claim Management (VCM), Virtual Account System (SIVA), Centralization and Automation of the underwriting process, claim and finance, and E-Marine Application.

In addition, Asuransi Jasindo also focuses on developing and penetrating products with great potential, where Asuransi Jasindo also has advantages in this field, including Marine Hull, Offshore Energy, Onshore Energy, Satellite and Liability products.

In 2023, Asuransi Jasindo focused on efforts to improve the company's fundamental strengthening. This effort is carried out through the Company's Strategy Pillar, namely Strengthening Core Competencies to Grow Business. It is proven that the financial condition of Asuransi Jasindo is in a very good position at the end of 2023 and the achievement of net profit for the 2023 financial year is purely Asuransi Jasindo's core competence.

Kinerja Jasindo 2023

Jasindo Performance in 2023

351,13%

Hasil *Underwriting* Asuransi Jasindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp240,60 miliar, naik 351,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp53,33 miliar.

Asuransi Jasindo Underwriting results in 2023 were recorded at IDR240.60 billion, an increase of 351.13% from the previous year of IDR53.33 billion.

Rp 103,52 miliar billion

Laba bersih tahun berjalan Asuransi Jasindo tahun 2023 mencapai Rp103,52 miliar. Kendati mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun laba bersih Asuransi Jasindo tahun 2023 murni *core competence* Asuransi Jasindo.

Asuransi Jasindo net profit for the year 2023 reached IDR103.52 billion. Even though it has decreased compared to the previous year, Asuransi Jasindo net profit in 2023 is purely from Asuransi Jasindo's core competence.

Rp 3,31 triliun trillion

Pendapatan premi bruto meningkat menjadi Rp3,31 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,25 triliun.

Gross premium income increased to IDR3.31 trillion from the previous year of IDR3.25 trillion.

Neraca yang Kuat & Sehat

Strong and Sound Balance Sheet

Posisi keuangan Asuransi Jasindo tahun 2023 sangat kuat dan sehat. Kendati aset Perusahaan mengalami penurunan, namun dibarengi dengan penurunan liabilitas yang lebih besar. Sedangkan jumlah ekuitas Perusahaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Asuransi Jasindo's financial position in 2023 is very strong and healthy. Although the Company's assets experienced a decline, this was accompanied by a larger decrease in liabilities. Meanwhile, the Company's total equity increased compared to the previous year.

Rp 3,13 triliun trillion

Jumlah investasi Asuransi Jasindo tahun 2023 meningkat menjadi Rp3,13 triliun dari Rp2,95 triliun di tahun 2022.

The total investment of Asuransi Jasindo in 2023 increased to IDR3.13 trillion from IDR2.95 trillion in 2022.

MMBR Meningkat

MMBR Increased

Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) Asuransi Jasindo tahun 2023 meningkat menjadi Rp922,27 miliar dari tahun sebelumnya Rp850,67 miliar.

Total Risk-Based Minimum Capital (MMBR) of Asuransi Jasindo in 2023 increased to IDR922.27 billion from IDR850.67 billion in the previous year.

Visi dan Misi

Vision and Mission

VISI VISION

Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik

The Best Indonesian General Insurance Company

MISI
MISSION

Menyediakan Jasa Asuransi Pilihan Pelanggan Melalui Layanan Bernilai Tambah dan Menjalankan Peran Aktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Bangsa

Providing Insurance Services of Customers' Choice through Value-Added Services and Playing an Active Role in Improving the Nation's Welfare

Jejak Langkah Jasindo

Jasindo Milestone

1972

Pada tanggal 9 September 1972, penggabungan dua badan usaha milik negara yaitu PT Umum International Underwriters dan PT Asuransi Bendasraya sebagai cikal bakal berdirinya PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

On September 9, 1972, the merger of two state-owned enterprises, PT Umum International Underwriters and PT Asuransi Bendasraya, marked the establishment of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

1973

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi umum yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

The government issued Government Regulation Number 10 of 1973 concerning State Capital Participation for the Establishment of a Company in the General Insurance Sector, which established PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

1987

Memberikan perlindungan asuransi pada kategori proyek-proyek sulit atau langka, yaitu penutupan Asuransi Satelit Palapa B2.

Providing insurance coverage for difficult or rare categories of projects, such as the insurance coverage for the Palapa B2 Satellite.

1997

Pengakuan Badan Pemeringkat Internasional, *Standard and Poor's*, untuk kategori "*Claim Paying Ability*" dengan peringkat BBB dalam melaksanakan kegiatan pokok Perusahaan, utamanya dalam penyelesaian klaim-klaim besar.

Recognition from the International Rating Agency, Standard and Poor's, for the category of "Claim Paying Ability" with a rating of BBB in carrying out the Company main activities, especially in the settlement of large claims.

2008

Membentuk Asuransi Syariah Jasindo Takaful sebagai salah satu unit usaha di bawah pengelolaan/pengawasan Unit Usaha Takaful (UUT) melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Jasindo Takaful.

Asuransi Syariah Jasindo Takaful was established as one of the business units under the management/supervision of the Takaful Business Unit (UUT) through the oversight of the Jasindo Takaful Sharia Supervisory Board (DPS).

2009-2010

Memperoleh pengakuan dari Badan Pemeringkat Internasional, AM Best International Rating, yang memberikan *rating* untuk *Financial Strength Rating* dengan peringkat B++ dan *Issuer Credit Rating* (*Stable Outlook*) dengan peringkat BBB.

Obtained recognition from the International Rating Agency, AM Best International Rating, which gave a rating for Financial Strength Rating with a rating of B++, and Issuer Credit Rating (Stable Outlook) with a rating of BBB.

2011

- **Memperoleh peringkat "AA-" *Stable Outlook* oleh PEFINDO, yang menggambarkan Perusahaan memiliki posisi yang sangat kuat di Industri Asuransi umum, Likuiditas yang sangat kuat dan kinerja operasional yang kuat.**
- **Memperoleh penghargaan *Best General Insurance Company*.**

- Obtained a rating of "AA-" Stable Outlook by PEFINDO, which describes the Company as having a very strong position in the general Insurance Industry, strong liquidity, and strong operational performance.
- Obtained the Best General Insurance Company award.

2012

- **Melakukan perubahan logo sebagai bentuk implementasi transformasi Perusahaan.**
- **Perusahaan melakukan pembayaran klaim satelit Telkom pada tanggal 28 November 2012 sebesar USD185,32 juta atas satelit komunikasi T3 yang gagal orbit pada tanggal 7 Agustus 2012 disaksikan oleh Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk.**
- **Perusahaan melakukan pembayaran klaim sebesar USD50,94 juta atas klaim-klaim dari aset bisnis migas. Asuransi Jasindo adalah *leader* konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur & LNG SKK Migas periode 2012-2014.**

- The logo was changed as a part of the Company's transformation implementation.
- The company paid Telkom's satellite claim on November 28, 2012, amounting to USD 185.32 million for the T3 communication satellite that failed to orbit on August 7, 2012. The payment was witnessed by the Minister of SOE and the President Director of PT Telkom Indonesia Tbk.
- The company paid claims amounting to USD50.94 million for claims related to oil and gas business assets. Asuransi Jasindo is the leader of the SKK Migas Industrial Asset, Well & LNG Insurance consortium for 2012-2014.

2013

- **Berhasil mendapatkan peningkatan pengakuan oleh Lembaga Pemeringkat Indonesia, PEFINDO, dari idAA- (*Stable Outlook*) di tahun 2012 menjadi idAA (*Stable Outlook*) di tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Perusahaan yang sangat kuat di industri asuransi umum dengan likuiditas yang sangat kuat dan kinerja operasional yang kuat.**
- **Mendapatkan peningkatan *rating* untuk *Financial Strength Rating* (*Stable Outlook*) dengan hasil B++ dan *Issuer Credit Rating* (*Stable Outlook*) dengan peringkat BBB+ dari AM Best International Rating.**

- Successfully received an increase in recognition by the Indonesian Rating Agency, PEFINDO, from idAA- (Stable Outlook) in 2012 to idAA (Stable Outlook) in 2013. It demonstrates the Company strong position in the general insurance industry with strong liquidity and operational performance.
- Received rating upgrades for Financial Strength Rating (Stable Outlook) with a result of B++ and Issuer Credit Rating (Stable Outlook) with a rating of BBB+ from AM Best International Rating.

2014

- **Mendapatkan Penghargaan *Good Corporate Governance Award* 2014 dengan kategori *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI).**
- **Mendapatkan peningkatan *rating* untuk *Best's Financial Strength Rating* dengan Hasil B++ (*Good*) dari A.M. Best Company.**
- **Membayarkan Klaim total sebesar Rp2,4 triliun, di antaranya klaim Migas (aset dan proyek konstruksi) sebesar USD107,81 juta dan Klaim atas aset BUMN sebesar USD10,9 juta.**

- Received the Good Corporate Governance Award 2014 with the category of Most Trusted Company Based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
- Received an increase in rating for Best's Financial Strength Rating with B++ (Good) from A.M. Best Company.
- Paid claims totaling IDR2.4 trillion, including USD 107.81 million for oil and gas claims (assets and construction projects) and USD10.9 million for claims on SOE assets.

- Tindak lanjut atas sentralisasi proses akseptasi, klaim dan keuangan telah direalisasikan dalam bentuk perubahan struktur organisasi di mana di *Representative Office* tidak lagi memiliki fungsi teknik dan keuangan. Limit wewenang fungsi teknik dan keuangan menjadi limit kewenangan *Head Office*. Fungsi *Representative Office* yang semula mencakup fungsi pemasaran, akseptasi, klaim dan keuangan berubah menjadi fokus pada fungsi *sales* dan *service*.

- Transformasi bisnis telah dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan *refocusing* bisnis pada segmentasi korporasi sesuai dengan *core competence* Perusahaan. Bisnis pada segmen korporasi utamanya termasuk pada lini bisnis Harta Benda, Pengangkutan, Rangka Kapal, *Energy Offshore*, *Energy Onshore*, Rekayasa, *Aviation*, *Satellite* dan Tanggung Gugat.
- Perusahaan telah melakukan peningkatan layanan kepada *customer* sesuai dengan *core competence* pada bisnis korporasi melalui pembentukan Direktorat Bisnis Strategis yang terdiri dari *Group* Bisnis yang menangani *key account* BUMN, serta melakukan penguatan *Governance, Risk & Compliance* (GRC) dengan dibentuknya unit Kebijakan dan Prosedur yang merupakan bagian dari Grup Manajemen Risiko Perusahaan.
- Perusahaan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pada produk asuransi yang termasuk ke dalam penugasan dan program Pemerintah dan telah memberikan kontribusi premi yang naik signifikan dari tahun sebelumnya. Adapun selama tahun 2023 Perusahaan telah menjalankan 6 (enam) penugasan dan program dari Pemerintah.
- Perusahaan telah melakukan penambahan karyawan melalui program *Officer Development Program* (ODP) untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada fungsi bisnis, *underwriting*, aktuaria, IT, dan legal. Penambahan karyawan pada fungsi tersebut merupakan komitmen Perusahaan dalam menyelaraskan kebutuhan SDM dengan rencana strategis Perusahaan.
- Perusahaan telah melakukan 17 (tujuh belas) *training* yang terstruktur untuk *hard skill*, *soft skill* dan *leadership* untuk meningkatkan dan mengembangan kompetensi karyawan dalam mendukung *core competence* Perusahaan.
- Perusahaan telah melakukan pengembangan Teknologi dan Informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan *customer experience* melalui penyempurnaan dan peluncuran aplikasi yang digunakan oleh internal dan eksternal.

- Follow-up to the centralization of acceptance, claims and financial processes has been realized in the form of changes to the organizational structure where the Representative Office no longer has technical and financial functions. The authority limit for technical and financial functions becomes the authority limit for the Head Office. The Representative Office function originally including marketing, acceptance, claims and finance functions has changed to focus on sales and service functions.
- Business transformation has been carried out by the Company by refocusing business on corporate segmentation in accordance with the Company's core competence. The business in the corporate segment mainly includes the Property, Cargo, Marine Hull, Offshore Energy, Onshore Energy, Engineering, Aviation, Satellite and Liability business lines.

- The company has improved services to customers in accordance with core competence in corporate business through the formation of a Strategic Business Directorate consisting of a Business Group that handles SOE key accounts, as well as strengthening Governance, Risk & Compliance (GRC) by establishing a Policy and Procedure unit which is part of the Corporate Risk Management Group.
- The company has intensified and extensified its insurance products included in Government assignments and programs and has contributed to premiums which have increased significantly from the previous year. Meanwhile, during 2023 the Company has carried out 6 (six) assignments and programs from the Government.
- The company has recruited additional employees through the Officer Development Program (ODP) to meet Human Resources (HR) needs in business, underwriting, actuarial, IT and legal functions. The addition of employees in this function is the Company's commitment to aligning HR needs with the Company's strategic plan.

- The Company has conducted 17 (seventeen) structured trainings for hard skills, soft skills and leadership to improve and develop employee competencies in supporting the Company's core competence.
- The company has developed technology and information to improve operational efficiency and customer experience through improving and launching applications used internally and externally.

2022

- **Memasuki tahun 2022, nilai RBC Perusahaan tidak memenuhi batas minimum yang telah ditentukan oleh OJK, hal ini disebabkan oleh adanya produk Perusahaan (Asuransi Kredit) yang dijalankan secara tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan kondisi tersebut, Perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan berhasil memaksimalkan realisasi atas 6 Inisiatif Utama, yang terdiri dari:**
  1. **Restrukturisasi portofolio Lini Bisnis Asuransi Kredit;**
  2. **Optimalisasi penagihan subrogasi klaim;**
  3. **Pelepasan penyertaan langsung pada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan PT Tokio Marine Indonesia;**
  4. **Revaluasi Aset Tetap Perusahaan;**
  5. **Pelepasan Aset Tetap Perusahaan; serta**
  6. **Dukungan *Shareholder's Loan*.**
- **Sebagai upaya agar Perusahaan tetap *sustain*, maka Perusahaan melakukan perbaikan model dan proses bisnis yang sesuai dengan *risk appetite* Perusahaan dengan upaya-upaya sebagai berikut:**
  1. ***Refocusing Business***
     Fokus pada penjualan produk yang menjadi *core* dan *appetite* Perusahaan, sebagai contoh menghentikan penjualan Asuransi Kredit.
  2. **Sentralisasi Proses Bisnis**
     Melakukan perubahan struktur organisasi dengan tujuan sentralisasi proses akseptasi, klaim dan keuangan yang sekarang dilakukan secara terpusat di *Head Office*.
  3. **Melakukan perubahan Kantor Cabang menjadi *Representative Office* (RO), agar RO dapat fokus dalam melakukan penetrasi bisnis.**
- **Selanjutnya Perusahaan menginisiasi pembangunan sistem *Governance Risk Compliance* (GRC) dan melakukan pengukuran *Risk Maturity Assessment* melalui metode ERMA ISO 31000 dengan hasil capaian skor 3,23 (*managed*) serta melakukan pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis.**
- **Upaya-upaya yang telah dilakukan Perusahaan berhasil memberikan dampak yang nyata, sehingga RBC Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan (*audited*) Tahun 2022 kembali berada diatas batas minimum ketentuan OJK.**

2023

- Entering 2022, the Company's RBC value does not meet the minimum limit determined by the OJK, this is due to the Company's product (Credit Insurance) which is not carried out in accordance with procedures. Based on these conditions, the Company prepared a Financial Restructuring Plan (RPK) and succeeded in maximizing the realization of 6 Main Initiatives, consisting of:
  1. Restructuring the portfolio of Credit Insurance Business Lines;
  2. Optimization of claims subrogation collection;
  3. Release of direct investment in PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and PT Tokio Marine Indonesia;
  4. Revaluation of the Company's Fixed Assets;
  5. Release of Company Fixed Assets; as well as
  6. Shareholder's Loan Support.
- As an effort to ensure that the Company remains sustainable, the Company has made improvements to its business model and processes in line with the Company's risk appetite with the following efforts:
  1. Refocusing Business
     Focus on selling products that are the company's core and appetite, for example stopping sales of Credit Insurance.
  2. Centralization of Business Processes
     Making changes to the organizational structure with the aim of centralizing the acceptance, claims and financial processes which are now carried out centrally at the Head Office.
  3. Change the Branch Office to a Representative Office (RO), so that the RO can focus on business penetration.
- Furthermore, the Company initiated the development of a Governance Risk Compliance (GRC) system and carried out Risk Maturity Assessment measurements using the ERMA ISO 31000 method with the result of achieving a score of 3.23 (managed) and carried out risk management that was integrated with business processes.
- The efforts that have been made by the Company have succeeded in having a real impact, so that the Company's RBC based on the 2022 Financial Report (audited) is again above the minimum limit set by the OJK.

2021

- **Asuransi Jasindo Selesaikan Klaim Sektor Energi Rp2,7 triliun**
- **Jasindo dan Konsorsium Proteksi Aset & Konstruksi SKK Migas-KKKS.**
- **Satelit Telkom Merah Putih dan T3-S Diasuransikan ke Jasindo.**

- Asuransi Jasindo settled IDR2.7 trillion energy sector claims.
- Jasindo and SKK Migas-KKKS Asset & Construction Protection Consortium.
- Telkom Merah Putih and T3-S Satellites Insured by Jasindo.

2020

- **Peralihan kepemilikan saham Asuransi Jasindo yang menjadi salah satu bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).**
- **Asuransi Jasindo memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.**

- The transfer of share ownership of Asuransi Jasindo, which is part of the Indonesia Financial Group (IFG), under Government Regulation (PP) Number 20 of 2020 concerning the Addition of the State Capital of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
- Asuransi Jasindo obtained ISO 37001:2016 certification in Anti-Bribery Management System.

2019

- **Perubahan Struktur Organisasi Asuransi Jasindo yang telah disahkan melalui Addendum 2 Surat Keputusan Direksi No. SK.03.DMA/I/2019 Tanggal 23 Januari 2019, perubahan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pelayanan terhadap pelanggan.**
- **Asuransi Jasindo sebagai *leader* Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN) melakukan penandatanganan kontrak payung penyediaan Asuransi Barang Milik Negara. Penandatanganan ini merupakan langkah baru untuk pemeliharaan aset Negara.**

- Changes in Asuransi Jasindo's organizational structure that have been approved through Addendum 2 of the Board of Directors' Decree Number SK.03.DMA/I/2019 dated January 23, 2019, have been adjusted to meet the needs and demands of customers.
- Asuransi Jasindo, the leader of the State Property Insurance Consortium (BMN), signed an umbrella contract to provide state property insurance. This signing marks a new step in the maintenance of state assets.

2018

- **Perubahan komposisi Direksi yaitu penambahan posisi Direktur SDM dan Umum.**
- **Pembentukan Konsorsium Merah Putih yang diketuai oleh Asuransi Jasindo. Konsorsium tersebut terdiri dari 4 perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi bersama yaitu asuransi ekspor dan impor barang tertentu.**

- Changes in the composition of the Board of Directors include the addition of the HR and General Director position.
- Establishment of the Merah Putih Consortium chaired by Asuransi Jasindo. The consortium comprises 4 insurance companies that sell joint insurance products, namely export and import insurance for certain goods.

2015

- **Melakukan proses pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Takaful menjadi Perusahaan Asuransi Syariah.**
- **Melakukan revitalisasi Budaya Perusahaan dari Asah, Asih, Asuh menjadi *Resourceful, Agility, Integrity, Synergy, Excellent Service* (RAISE) sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan.**
- **Mengeluarkan produk Asuransi Usaha Tani Padi sebagai salah satu dukungan atas program Nawacita di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.**
- **Membayarkan klaim sebesar Rp961,3 miliar untuk klaim *Aviation* (PT Indonesia AIRASIA).**

- Conducted the process of separating (Spin-Off) the Takaful Business Unit into a Sharia Insurance Company.
- Revitalized the Corporate Culture by changing from Asah, Asih, and Asuh to Resourceful, Agility, Integrity, Synergy, and Excellent Service (RAISE) in line with the Company's Vision and Mission.
- Issued Rice Farming Business Insurance products as one of the support for the Nawacita program in the government of President Joko Widodo in realizing economic independence by driving the strategic sector of the domestic economy.
- Paid claims amounting to IDR961.3 billion for Aviation claims (PT Indonesia AIRASIA).

2016

- **Penetapan Budaya Perusahaan baru *Resourceful, Agility, Integrity, Synergy, Excellent Service* "RAISE".**
- **Perusahaan membayarkan Klaim Bisnis Oil & Gas sebesar total USD112,3 juta untuk *Asset* SKK Migas dan total USD16,4 juta untuk Proyek Konstruksi KKKS. Selain itu membayarkan seluruh klaim untuk Asuransi Aviation sebesar total Rp93,1 miliar.**
- **Perusahaan menjadi *leader* dari konsorsium asuransi satelit Bank Rakyat Indonesia (BRISat) dengan nilai pertanggungan sebesar USD200 juta.**
- **Memberikan perlindungan asuransi atas peluncuran satelit Telkom 3S milik PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebesar USD215 juta yang telah sukses diluncurkan di Kourou, Guyana Perancis, Amerika Selatan.**

- Establishment of the new Corporate Culture Resourceful, Agility, Integrity, Synergy, and Excellent Service "RAISE".
- The Company paid Oil & Gas Business Claims totaling USD112.3 million for SKK Migas Assets and USD16.4 million for KKKS Construction Projects. In addition, it paid all claims for Aviation Insurance totaling IDR93.1 billion.
- The Company became the leader of the Bank Rakyat Indonesia (BRISat) satellite insurance consortium with an insured value of USD200 million.
- Providing insurance coverage for the successful launch of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk's Telkom 3S satellite, valued at USD215 million, launched in Kourou, French Guiana, South America.

2017

- **Peluncuran Jasindo *Travel Insurance***
- **Perolehan sertifikat *Information Security Management System*-ISO/IEC 27001:2013 untuk ruang lingkup *The Management of Information Security in Provision of Core Insurance Application* (STAR JASINDO).**
- **Peningkatan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk ruang lingkup Keputusan Akseptasi, Penyelesaian Klaim, Pembayaran Klaim, dan Aktivitas Pendukung Lainnya.**
- **Penghargaan lima tahun berturut-turut Juara I *Annual Report Award* 2016 untuk kategori BUMN Keuangan *Non-Listed*.**
- **Pertanggungan Penutupan satelit merah putih dengan nilai tanggungan sebesar USD150 juta.**

- The launch of Jasindo Travel Insurance
- Obtained Information Security Management System-ISO/IEC 27001:2013 certificate for the scope of The Management of Information Security in Provision of Core Insurance Application (STAR JASINDO).
- Improved ISO 9001:2015 quality management system certification for the scope of Acceptance Decision, Claim Settlement, Claim Payment, and Other Supporting Activities.
- Awarded the first Annual Report Award 2016 for five consecutive years in the category of Non-Listed Financial SOEs.
- Closing coverage of the red and white satellite with an insured value of USD150 million.

Daftar Isi
Table of Contents

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimers and Limitation of Liability	3
Penjelasan Tema About Theme	5
Kinerja Jasindo 2023 Jasindo Performance in 2023	6
Visi dan Misi Vision and Mission	8
Jejak Langkah Jasindo Jasindo Milestone	10

IKHTISAR KEUANGAN
PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	16
Ikhtisar Saham Stock Highlights	19
Ikhtisar Surat Berharga Marketable Securities Highlights	19
Sertifikasi dan Penghargaan Certifications and Awards	20
Peristiwa Penting Significant Events	21

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	32
Laporan Direksi Board of Directors' Report	44

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Informasi Umum Perusahaan General Company Information	62
Sekilas Asuransi Jasindo Overview of Asuransi Jasindo	64
Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Culture Values	67
Makna Logo Perusahaan Philosophy of Company Logo	69
Bidang Usaha Business Field	71
Struktur Organisasi Organization Structure	76
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	78
Profil Direksi Board of Directors Profile	82
Profil Pejabat Eksekutif Senior Executive Profile	90
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition and Structure	91
Entitas Anak Perusahaan Subsidiary Entities	92
Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations	95
Kronologis Penerbitan Saham Chronology of Share Issuance	95
Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance	95
Akuntan Publik Public Accountant	96
Nama dan Alamat Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan Name and Address of Company's Supporting Institutions/Professions	99

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT AND ANALYSIS DISCUSSION

Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2023 National Economic Conditions in 2023	110
Kondisi Industri Asuransi Tahun 2023 Insurance Industry Condition in 2023	112
Tinjauan Operasi Per Lini Usaha Review of Operations Per Line of Business	113
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	122
Tinjauan Keuangan Financial Review	124
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debts and Collectability of Receivables	135
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	138
Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Information Containing Conflict of Interest	142
Prospek Usaha Business Prospect	145

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

Sumber Daya Manusia Human Resources	150
Teknologi Informasi dan Digitalisasi Information Technology and Digitalization	168

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pencapaian GCG Tahun 2023 GCG Achievements In 2023	178
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to Implementing Corporate Governance	180
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism	186
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	188
Dewan Komisaris Board of Commissioners	192
Direksi Board of Directors	216
Transparansi dan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi The Transparency and Independence of The Board of Commissioners and The Board of Directors	242
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi The Nomination And Remuneration Policy of The Board of Commissioners and The Board of Directors	248
Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris Supporting Organs Under The Board of Commissioners	256
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of The Board of Commissioners	280
Susunan Komite Berdasarkan Bagan Composition of Committees Based on Chart	283
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	287
Satuan Pengawasan Internal Internal Monitoring Unit	291
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	300
Manajemen Risiko Risk Management	305
Perkara Penting dan Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan Important Cases and Legal Cases Faced by The Company	322
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	327
Akses Informasi dan Data Perusahaan Company's Information and Data Access	328
Kode Etik Code of Conducts	333
Whistleblowing System Whistleblowing System	337
Pengadaan Barang dan/atau Jasa The Procurement of Goods and/or Services	342
Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)	344
Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Anti-Corruption And Gratification Policy	346
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Organizers' Wealth Statement (LHKPN)	348
Pengungkapan Praktik *Bad Governance* Disclosure of Bad Governance Practices	351

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	356
Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 Social and Environmental Responsibility Program Performance in 2023	365
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Micro And Small Enterprises Funding (MSE Funding) Program	366

01

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Comprehensive Profit (Loss)

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Laba Rugi Profit and Loss					
Premi Bruto Gross Premium	3.308.598	3.250.359	3.978.974	4.303.071	5.391.672
Premi Reasuransi Reinsurance Premium	(2.195.510)	(2.411.020)	(2.499.521)	(2.409.742)	(2.597.095)
Naik (Turun) Cadangan Premi Increase (Decrease) Premium Reserve	(53.192)	(534.513)	(861.466)	(517.654)	461.265
Pendapatan Premi Netto Net Premium Income	1.166.279	1.373.852	2.340.920	2.410.983	2.333.313
Klaim Bruto Gross Claim	2.614.817	3.757.133	2.310.813	2.761.142	3.502.749
Klaim Reasuransi Reinsurance Claim	1.682.209	1.686.084	1.153.882	1.505.231	2.138.587
Naik (Turun) Cadangan Klaim Increase (Decrease) Claim Reserve	(104.998)	(889.231)	539.753	602.250	327.567
Beban Klaim – *Netto* Net Claim Expense	827.610	1.181.818	1.696.685	1.858.161	1.691.728
Beban Komisi – *Netto* Net Commission Expense	(47.573)	(64.750)	(2.512)	33.625	236.654
Biaya *Underwriting* Lain Other Underwriting Expense	145.641	203.451	301.495	368.565	463.755
Hasil *Underwriting* Underwriting Return	240.601	53.333	345.251	150.631	(58.825)
Hasil Investasi Investment Return	221.365	473.113	166.473	211.190	196.918
Beban Usaha Operating Expense	399.058	464.488	437.438	578.728	300.838
Laba Usaha Operating Income	62.908	61.958	74.286	(216.908)	(162.745)
Hasil (Beban) Lain Other Income (Expense) Result	49.879	229.182	96.679	125.579	8.062
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	112.472	290.669	170.964	(91.329)	(154.683)
Pajak Penghasilan Income Tax	8.951	59.074	161.562	161.604	(36.207)
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	103.522	231.595	9.402	(252.933)	(118.476)
Laba Diatribusikan kepada Pemilik: Entitas Induk Profit Attributable to Owners: Parent Entity	102.890	231.059	9.136	(252.007)	(118.216)
Laba Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Profit Attributed to Non-Controlling Interests	632	535	266	(925)	(260)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)	107.948	1.498.652	16.312	(217.623)	(99.083)
Laba Komprehensif Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity	107.299	1.498.081	16.068	(216.685)	(98.791)
Laba Komprehensif Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests	648	570	244	(938)	(293)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Total Investasi Total Investment	3.135.889	2.952.445	2.762.582	1.856.991	2.041.453
Aset Reasuransi Reinsurance Asset	6.526.442	7.324.541	6.446.942	5.726.154	4.937.547
Jumlah Aset Total Asset	15.756.061	16.070.717	14.077.070	13.914.348	13.643.564
Utang Klaim Claims Payable	579.175	298.877	160.068	187.914	126.097
Liabilitas Kontrak Asuransi Insurance Contract Liabilities	8.674.338	9.623.482	10.187.802	9.781.505	8.911.139
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	12.715.496	13.194.190	13.138.202	12.991.791	12.451.010
Modal Disetor Paid-up Capital	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.040.565	2.876.528	938.868	922.557	1.192.554

Premi Bruto
Gross Premium

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

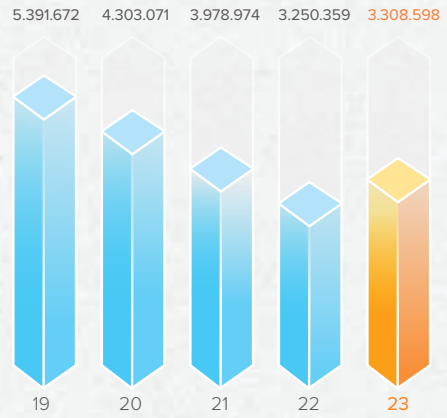

Klaim Bruto
Gross Claim

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

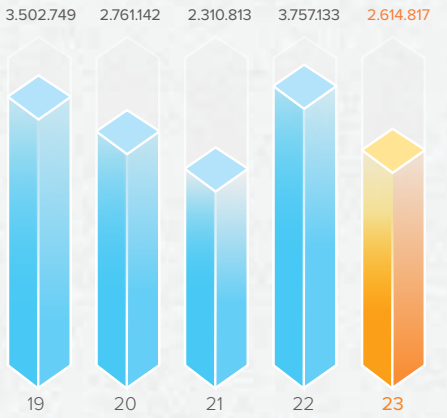

Hasil *Underwriting*
Underwriting Result

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

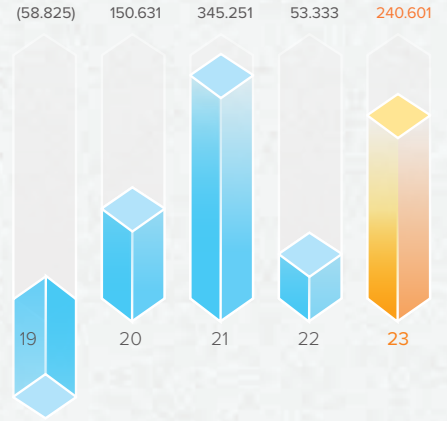

Hasil Investasi
Investment Return

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

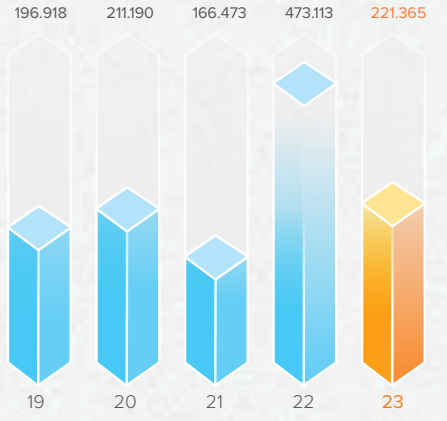

Laba Setelah Pajak
Profit After Tax

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

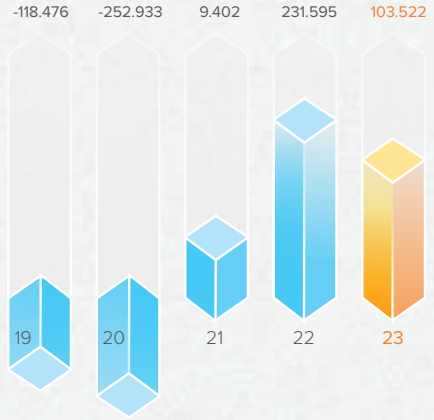

Laba Komprehensif
Comprehensive Profit

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

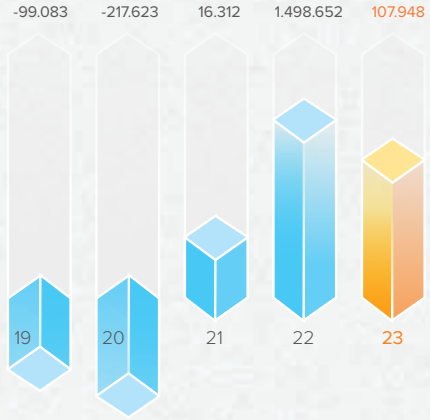

Total Investasi
Total Investment

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

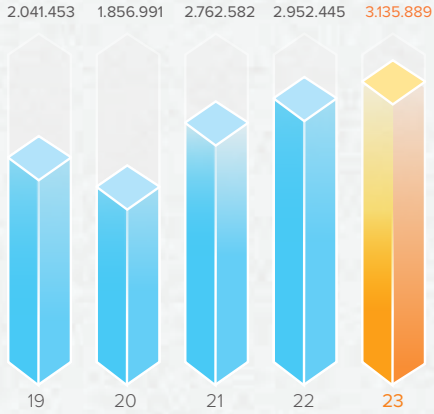

Total Aset
Total Asset

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

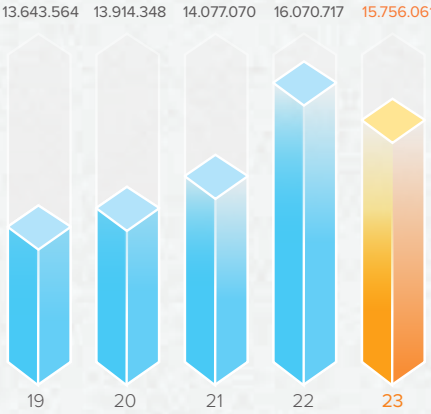

Total Liabilitas
Total Liabilities

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

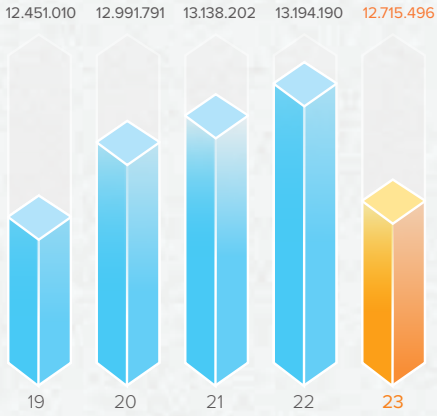

Total Ekuitas
Total Equity

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

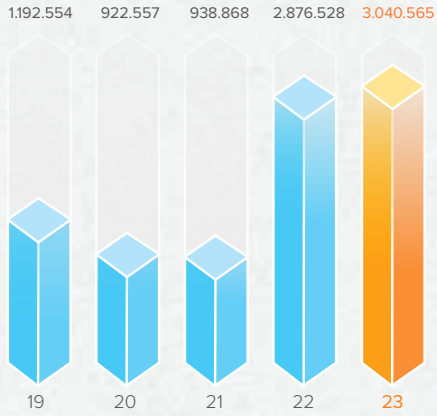

Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Investasi/(Cadangan Teknik + Utang Klaim) Investment/(Engineering Reserves + Claims Payable)	114,99	113,65	70,82	43,76	49,80
RBC	159,10	149,57	(84,85)	(77,01)	(87,26)
ROE (Laba Setelah Pajak/Rata-Rata Ekuitas) ROE (Profit After Tax/Average Equity)	3,55	12,14	1,01	(23,92)	(9,44)
ROA (Laba Sebelum Pajak/Rata-Rata Aset) ROA (Profit Before Tax/Average Assets)	0,71	1,93	1,22	(0,66)	(1,10)
Capital Productivity (Premi Bruto/Ekuitas) Capital Productivity (Gross Premium/Equity)	108,82	113,00	423,81	466,43	452,11
Loss Ratio (Beban Klaim Neto/Pendapatan Premi Neto) Loss Ratio (Net Claim Expense/Net Premium Income)	70,96	86,02	72,48	77,07	72,50
Commision Ratio (Beban Komisi Neto/ Pendapatan Premi Neto + Hasil Investasi) Commision Ratio (Net Commission Expense/Net Premium Income + Investment Return)	(3,43)	(3,51)	(0,10)	1,28	9,35
Expense Ratio (Beban Usaha + Biaya UW Lain + Hasil Beban Lain/Pendapatan Premi Neto + Hasil Investasi) Expense Ratio (Operating Expense + Other UW Costs + Other Expenses/Net Premium Income + Investment Return)	35,68	48,55	33,33	40,92	30,54
Combined Ratio (Loss Ratio + Comission Ratio + Expense Ratio)	103,21	131,06	105,71	119,27	112,39

Ikhtisar Saham

Stock Highlights

Hingga 31 Desember 2023, PT Asuransi Jasa Indonesia tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik, tidak diperdagangkan di bursa mana pun, dan tidak memiliki kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan.

As of December 31, 2023, PT Asuransi Jasa Indonesia does not trade its shares to the public, is not traded on any exchange, and has no share ownership by either management or employees.

Ikhtisar Surat Berharga

Marketable Securities Highlights

PT Asuransi Jasa Indonesia belum pernah menerbitkan Surat Utang, baik dalam bentuk Obligasi maupun Sukuk yang diperjualbelikan.

PT Asuransi Jasa Indonesia has never issued any Letter of Credit, either in the form of Bonds or Sukuk tradable.

Informasi tentang Dividen Saham
Information about Stock Dividend

Dividen Saham Stock Dividend	2023 (untuk Tahun Buku 2022) (for Financial Year 2022)	2022 (untuk Tahun Buku 2021) (for Financial Year 2021)
Dividen kas yang dibagikan (Rp) Cash dividend distributed (IDR)	0,00	0,00
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	0,00	0,00
Tanggal pengumuman Date of announcement	-	-

Sertifikasi dan Penghargaan

Certifications and Awards

Penghargaan | Awards

Top GRC Award
4 Star

Top Digital Implementation
2023

Human Capital
Performance Award
(Best Reward &
Recognition)

Human Capital
Performance
Award (Best Talent
Management)

Sertifikasi | Certification

SMAP ISO 37001:2016
Masa Berlaku | Validity Period:
9 Desember 2020 - 8 Desember 2023
December 9, 2020 - December 8, 2023

Lembaga yang memberikan
Institution (which provides):
TÜV NORD Indonesia

Information Security Management System - ISO/IEC 27001:2013
Masa Berlaku | Validity Period:
12 November 2020 - 11 November 2023
November 12, 2020 - November 11, 2023
Lembaga yang memberikan
Institution (which provides):
PT SGS Indonesia

Pemeringkatan dalam Negeri - PEFINDO
Masa Berlaku | Validity Period:
18 September 2023 - 1 September 2024
September 18, 2023 - September 1, 2024
Lembaga yang memberikan
Institution (which provides):
Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Peristiwa Penting
Significant Events

(24 Januari 2023 | January 24, 2023)

Jasindo dan Kementerian BUMN Dukung Sertifikasi Guru
Jasindo and the Ministry of SOE Supported Teacher Certification

Asuransi Jasindo bersama Kementerian BUMN mendukung Program Bakti BUMN untuk Guru dalam bentuk pemberian apresiasi kepada 405 guru yang lulus sertifikasi pada tahun 2022 di Maluku dan Nusa Tenggara. Program Sertifikasi Guru merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi ini juga merupakan kesempatan baik untuk para guru dalam meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik generasi penerus bangsa.

Asuransi Jasindo, together with the Ministry of SOE, supported the SOE Service for Teachers Program by giving appreciation to 405 teachers who passed certification in 2022 in Maluku and Nusa Tenggara. The Teacher Certification Program is a mandatory initiative by the Ministry of Education and Culture aimed at improving the quality of education in Indonesia. This certification also provides a valuable opportunity for teachers to enhance their skills as educators for the nation's next generation.

(23 Februari 2023 | February 23, 2023)

Jasindo Proteksi Pengunjung F1 *Powerboat* Danau Toba
Jasindo Protected F1 Powerboat Lake Toba Visitors

Asuransi Jasindo siap mendukung perhelatan internasional F1 *Powerboat* (F1 H20) yang berlangsung pada 24 Februari – 26 Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara. Salah satu dukungan Asuransi Jasindo dengan memproteksi pengunjung yang menonton F1 *Powerboat* melalui asuransi untuk memproteksi pengunjung adalah Asuransi Personal Accident. Dengan adanya proteksi Asuransi Personal Accident ini para pengunjung yang menonton langsung F1 *Powerboat* di Danau Toba akan merasa lebih aman dan nyaman.

Asuransi Jasindo was ready to support the F1 Powerboat international event (F1 H20) which took place on February 24 – February 26, 2023 on Lake Toba, North Sumatera. One of Jasindo Insurance's supports for protecting visitors who watched F1 Powerboat through insurance to protect visitors is Personal Accident Insurance. With this Personal Accident Insurance protection, visitors watching F1 Powerboat live on Lake Toba would feel safer and more comfortable.

(25 Februari 2023 | February 25, 2023)

Jasindo Gelar Jalan Sehat di Riau dan Lampung
Jasindo Organized Healthy Walks in Riau and Lampung

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, Asuransi Jasindo mendukung pagelaran "Jalan Sehat Bersama BUMN" yang digelar pada 26 Februari 2023, di Kabupaten Tulangbawang dan Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung, serta Siak, Provinsi Riau. Berdasarkan data Universitas Stanford, Amerika Serikat, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan masyarakat yang malas berjalan kaki. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berjalan kaki untuk meningkatkan kesehatannya.

To increase public awareness of exercise, Asuransi Jasindo supported the "Jalan Sehat Bersama BUMN" event held on February 26, 2023, in Tulangbawang and West Tulangbawang Regencies, Lampung Province, and Siak, Riau Province. Based on data from Stanford University, United States, Indonesia is categorized as a country where people are lazy to walk. This activity is expected to increase people interest in walking to improve their health.

(27 Februari 2023 | February 27, 2023)

Jasindo Bantu Renovasi Asrama Putri HKBP untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Jasindo Helped Renovation of HKBP Girls Dormitory to Improve Education Quality

Asuransi Jasindo mendukung pengembangan pendidikan, khususnya untuk para mahasiswi HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dengan cara merenovasi asrama Putri HKBP yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Asrama ini menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswi dari berbagai daerah di Sumatera Utara, yang tengah menempuh pendidikan di Kota Medan. Hal ini yang mendorong Asuransi Jasindo beserta Indonesia Financial Group (IFG), Askrindo dan Jamkrindo memberikan bantuan sebesar Rp587.500.000,- untuk merenovasi asrama putri HKPB di Medan.

Asuransi Jasindo supports educational development, especially for HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) students by renovating the HKBP Girls dormitory located in Medan City, North Sumatera. This dormitory is a gathering place for female university students from various regions in North Sumatera, who are studying in Medan City. This is what prompted Asuransi Jasindo along with the Indonesia Financial Group (IFG), Askrindo and Jamkrindo to provide assistance amounting to IDR587,500,000.- to renovate the HKBP girls dormitory in Medan.

(22 Maret 2023 | March 22, 2023)

Jasindo Menggelar Literasi Keuangan di Pedesaan

Jasindo Organized Financial Literacy in Rural Areas

Asuransi Jasindo akan kembali menggelar literasi keuangan di 2023 yang menyasar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan masyarakat daerah pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Asuransi Jasindo memanfaatkan jaringan 30 *Representative Office* yang tersebar di seluruh Indonesia. Asuransi Jasindo meyakini bahwa usia anak SMA sangat penting disasar dalam literasi keuangan, karena usia-usia tersebut merupakan waktu yang pas untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik.

Asuransi Jasindo again organized financial literacy in 2023 targeting high school (SMA) students and rural communities working as farmers. Asuransi Jasindo utilizes a network of 30 Representative Offices spread throughout Indonesia. Asuransi Jasindo believes that it is highly important to target high school children in financial literacy, as this age is the right time to instill knowledge about how to manage finances well.

(4 April 2023 | April 4, 2023)

RBC 149,57%, Jasindo Optimistis Perusahaan Berkembang Pesat

RBC 149.57%, Jasindo is Optimistic that the Company is Growing Rapidly

RBC Asuransi Jasindo mencapai angka 149,57%, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*member firm of* PricewaterhouseCoopers). Hal tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran banyak pihak seperti, pemegang saham (IFG dan Kementerian BUMN), regulator (OJK), pelanggan Jasindo, serta karyawan dan keluarga besar Jasindo. Dengan pencapaian RBC tersebut, Asuransi Jasindo optimis dapat meraih pertumbuhan usaha yang pesat di tahun-tahun mendatang.

RBC Asuransi Jasindo reached 149.57%, which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member firm of PricewaterhouseCoopers). This has been reported to the Financial Services Authority (OJK). This success is inseparable from the role of many parties, such as shareholders (IFG and the Ministry of SOE), regulators (OJK), Jasindo customers, as well as employees and Jasindo's big family. With RBC achievements, Asuransi Jasindo is optimistic to achieve rapid business growth in the coming years.

(06 April 2023 | April 06, 2023)

Mobil Sehat Asuransi Jasindo Layani Masyarakat serta Pelajar di Jawa Tengah

Jasindo Insurance Healthy Cars Serve the Community and Students in Central Java

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Asuransi Jasindo menghadirkan fasilitas Mobil Sehat, yaitu layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Mobil Sehat tersebut berkeliling di kota-kota di seluruh Indonesia.

In order to realize its commitment to provide health services to the community, Asuransi Jasindo presents Health Car facilities, namely free health check services and health education to the community. The Health Car travels around cities throughout Indonesia.

(10 April 2023 | April 10, 2023)

Jasindo Bayar Klaim Kapal Milik PT Timah

Jasindo Paid Claims on Ships Owned by PT Timah

Asuransi Jasindo menyetujui klaim ganti rugi asuransi PT TIMAH Tbk (TINS) sebesar Rp24 miliar. Klaim ini untuk kapal milik PT TIMAH Tbk yakni Kapal Isap Produksi (KIP) TIMAH-10 yang tenggelam saat melakukan aktivitas operasi di Perairan Kundur, Kepulauan Riau pada tanggal 31 Agustus 2019.

Asuransi Jasindo has approved PT TIMAH Tbk (TINS) insurance compensation claim of IDR24 billion. This claim is for a ship belonging to PT TIMAH Tbk, namely the Kapal Isap Produksi (KIP) TIMAH-10 which sank while carrying out operational activities in Kundur Waters, Riau Islands on August 31, 2019.

(19 April 2023 | April 19, 2023)

Asuransi Jasindo Lepas Pemudik 2023 di Istora Senayan

Asuransi Jasindo Released Homecoming Travelers 2023 at Istora Senayan

Asuransi Jasindo kembali melaksanakan kegiatan Mudik Gratis dalam rangka menyongsong perayaan Idul Fitri 1444 H. Acara ini diikuti oleh 1.850 pemudik dengan tujuan ke berbagai kota, khususnya di Pulau Jawa. Mudik gratis ini sebagai bentuk kepedulian Perusahaan untuk masyarakat yang kehabisan atau kesulitan membeli tiket mudik. Pelepasan pemudik dilakukan secara simbolik oleh Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel di Istora Senayan, Jakarta.

Jasindo Insurance again carried out the Mudik Gratis activity in celebration of Eid Al-Fitr 1444 H. 1,850 homecoming travelers participated in the event, heading to various cities, especially in Java island. This free homecoming is a form of the Company's concern for people who have run out or have difficulty buying homecoming tickets. The release of the homecoming travelers was carried out symbolically by the President Director of Asuransi Jasindo, Andy Samuel, at Istora Senayan, Jakarta.

(10 Mei 2023 | May 10, 2023)

Asuransi Jasindo Mendukung Program Inkubasi Mitra Unggulan 2023

Asuransi Insurance Supported the 2023 Featured Partner Incubation Program

Asuransi Jasindo memberikan dukungan penuh terhadap program inkubasi mitra unggulan yang diluncurkan oleh Bahana Artha Ventura pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing mitra binaan melalui inovasi bisnis dan perluasan pasar. Program inkubasi mitra unggulan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu asesmen, proses inkubasi, dan evaluasi terukur. Asesmen dilakukan untuk melakukan *screening* terhadap mitra binaan dan mengidentifikasi kebutuhan inkubasi.

Asuransi Jasindo provided full support for the featured partner incubation program launched by Bahana Artha Ventura in 2023. This program aims to increase the competitiveness of fostered partners through business innovation and market expansion. This featured partner incubation program consists of three stages, namely assessment, incubation process and measurable evaluation. The assessment is carried out to screen fostered partners and identify incubation needs.

(11 Mei 2023 | May 11, 2023)

Tingkatkan Kualitas Jaminan Asuransi, Jasindo Terapkan Sistem GRC Terintegrasi

Improving the Quality of Insurance Coverage, Jasindo Implements an Integrated GRC System

Asuransi Jasindo telah membangun aplikasi sistem (*Governance, Risk, & Compliance* (GRC) terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai Perusahaan dalam pencapaian tujuan bisnis serta keberlanjutan usaha. Melalui aplikasi dimaksud, diharapkan dapat mendorong penerapan sikap dan perilaku risiko setiap Insan Jasindo sehingga menjadi budaya Perusahaan serta menjadikan Perusahaan lebih tangguh dalam menghadapi risiko.

Asuransi Jasindo has built an integrated Governance, Risk, & Compliance (GRC) system application. The aim is to increase the Company's value in achieving business goals and business sustainability. This application is intended to hopefully encourage the implementation of risk attitudes and behavior for every Jasindo Personnel so as it becomes the Corporate culture and make the Company more resilient in facing risks.

(5 Juni 2023 | June 5, 2023)

Asuransi Jasindo Gelar Kegiatan Mengajar dan Berbagi Inspirasi

Asuransi Jasindo Organized Teaching and Inspiration Sharing Activities

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-50, Asuransi Jasindo bekerja sama dengan Yayasan 1000 Guru untuk menggelar kegiatan mengajar dan berbagi inspirasi di SDN 1 Cikoneng di Puncak, Bogor. Kegiatan yang diawali dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan relawan pengajar yang merupakan karyawan Asuransi Jasindo ini berjalan seharian pada 1 Juni 2023. Dalam kegiatan tersebut, Asuransi Jasindo juga memberikan dukungan kepada SDN 1 Cikoneng, berupa bantuan tas dan alat tulis bagi seluruh siswa serta renovasi dan pengecatan gedung sekolah.

In commemoration of its 50th anniversary, Asuransi Jasindo collaborated with 1000 Teachers Foundation to hold teaching activities and share inspiration at SDN 1 Cikoneng in Puncak, Bogor. The activity, which began with a ceremony commemorating the Birth of Pancasila, was attended by all students, teachers and teaching volunteers who are employees of Asuransi Jasindo, ran all day on June 1, 2023. In this activity, Asuransi Jasindo also provided support to SDN 1 Cikoneng, in the form of bags and stationery for all students as well as renovation and painting of school buildings.

(7 Juni 2023 | June 7, 2023)

Jasindo Kunjungi Anak-Anak Penderita Kanker dan Adakan Donor Darah

Jasindo Visited Children Suffering from Cancer and Organized Blood Donation

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-50, Asuransi Jasindo melalui komunitas karyawannya, Jasindo Christian Community (JCC), Bekerja sama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia mengadakan kegiatan kunjungan ke Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi Jakarta untuk bertemu dengan anak-anak penderita kanker untuk memberikan dukungan dan hiburan kepada anak-anak penderita kanker. Pada hari yang sama, komunitas karyawati Srikandi Jasindo bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) juga menyelenggarakan kegiatan Donor Darah di Ruang Nusantara Graha Jasindo. Sebanyak 158 orang mendaftar sebagai pendonor, dan terkumpul sebanyak 115 kantong darah.

In the series of commemorations of its 50th anniversary, Asuransi Jasindo through its employee community, Jasindo Christian Community (JCC), in collaboration with Indonesian Child Cancer Foundation held a visit to the MRCCC Siloam Semanggi Hospital, Jakarta, to visit the children suffering from cancer to provide support and entertainment for children with cancer. On the same day, the Srikandi Jasindo employee community in collaboration with the Indonesian Red Cross (PMI) also held a Blood Donation activity at the Nusantara Graha Jasindo Room. A total of 158 people registered as donors, and 115 bags of blood were collected.

(11 Juli 2023 | July 11, 2023)

Asuransi Jasindo Kembali Dipercaya Lindungi Aset dan Liabilitas Krakatau Steel

Asuransi Jasindo is Trusted Again to Protect Krakatau Steel's Assets and Liabilities

Dengan pengalaman dalam melakukan proteksi terhadap *mega-risk* di Indonesia, Asuransi Jasindo kembali dipercaya dalam memberikan perlindungan asuransi terhadap aset dan liabilitas Krakatau Steel di tahun 2023. Kepercayaan ini merupakan sebuah amanah dari tertanggung yang mendorong pihaknya untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan asuransi yang baik. Terdapat beberapa perlindungan asuransi yang diberikan, seperti *Industrial All Risk (IAR), Cargo Insurance, Directors and Officers Liability, dan Comprehensive General Liability*.

Having experience in providing protection against mega-risks in Indonesia, Asuransi Jasindo is again trusted to provide insurance protection for Krakatau Steel's assets and liabilities in 2023. This trust is a mandate from the insured which encourages it to always innovate in providing good insurance services. There are several insurance protections provided, such as Industrial All Risk (IAR), Cargo Insurance, Directors and Officers Liability, and Comprehensive General Liability.

(31 Agustus 2023 | August 31, 2023)

Asuransi Jasindo Bayarkan Klaim Rp10,3 Miliar Kepada Semen Tonasa

Asuransi Jasindo Paid Claims of IDR10.3 Billion to Semen Tonasa

Asuransi Jasindo, membuktikan komitmennya dalam melakukan pembayaran klaim *property* kepada PT Semen Tonasa senilai Rp10,3 Miliar pada Juli 2023. Komitmen ini merupakan bagian dari prinsip perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk mendukung kemitraan yang kokoh dengan mitra bisnis. Melalui pengalaman dan profesionalisme yang telah teruji selama 50 tahun, Asuransi Jasindo memastikan bahwa proses klaim ini telah ditangani dengan tetap mengedepankan *Good Corporate Governance* (GCG).

Asuransi Jasindo proves its commitment to pay property claim to PT Semen Tonasa worth IDR10.3 billion in July 2023. This commitment is part of the company's principle of providing the best service to customers to support strong partnerships with business partners. Through experience and professionalism proven for 50 years, Asuransi Jasindo ensures that the claims process is handled while prioritizing Good Corporate Governance (GCG).

(7 September 2023 | September 7, 2023)

Asuransi Jasindo Raih Top GRC

Asuransi Jasindo Won Top GRC

Asuransi Jasindo meraih penghargaan dalam bidang *Governance*, *Risk*, dan *Compliance* (GRC) dengan nominasi *Top* GRC 4 *Stars* 2023 pada acara *Top* GRC *Awards* 2023 yang diprakarsai oleh para profesional dan asosiasi di bidang GRC. Penghargaan *Top* GRC 4 *Stars* 2023 diberikan kepada Asuransi Jasindo karena prestasi perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan (*Governance*), manajemen risiko (*Risk Management*), dan manajemen kepatuhan (*Compliance Management*) dengan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Asuransi Jasindo won an award in the field of Governance, Risk and Compliance (GRC) with the nomination for Top GRC 4 Stars 2023 at the Top GRC Awards 2023 initiated by professionals and associations in the GRC field. The Top GRC 4 Stars 2023 award was given to Asuransi Jasindo for the company's achievements in implementing corporate governance (Governance), risk management (Risk Management), and compliance management (Compliance Management) with the use of digital technology in order to support sustainable business growth.

(11 September 2023 | September 11, 2023)

Mau Klaim Asuransi Tani Padi? Begini Langkah-langkahnya

Want to claim Rice Farming Insurance? Here are the steps

Asuransi Jasindo terus mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui asuransi ini, para petani akan lebih merasa aman bila terjadi kerugian akibat gagal panen.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan klaim:

1. Peserta didampingi petugas Dinas Pertanian (Petugas Penyuluh Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) menyampaikan laporan klaim kepada pihak Asuransi melalui Aplikasi Sistem Informasi Pertanian (SIAP).
2. Peserta wajib melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan Pedoman Bantuan Premi (PEDUM) AUTP dan selanjutnya mengunggah pada aplikasi SIAP.
3. Setelah dokumen klaim lengkap dan penyebab klaim terjamin polis, asuransi pelaksana akan melakukan analisa serta menyampaikan persetujuan klaim (termasuk *discharge form*).

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, barulah klaim akan dibayarkan ke rekening kelompok tani.

Asuransi Jasindo continues to support government programs related to food security through Rice Farming Business Insurance (AUTP). Through this insurance, farmers will feel more secure if any losses occur due to crop failure.
Steps taken to make a claim:

1. Participants accompanied by Agriculture Service officers (Field Outreach/Plant Pest Organism Control Officers) submit claim reports to the Insurance company via the Agricultural Information System Application (SIAP).
2. Participants are required to complete claim documents in accordance with the provisions of the AUTP Premium Assistance Guidelines (PEDUM) and then upload them to the SIAP application.
3. After the claim documents are complete and the cause of the claim is covered by the policy, the implementing insurance will carry out an analysis and submit claim approval (including a discharge form).

Upon carrying out these steps, the claim will be paid to the farmer group account.

(19 September 2023 | September 19, 2023)

Skema Pooling Fund Bencana untuk Meningkatkan Proteksi Barang Milik Negara

Disaster Pooling Fund Scheme to Increase Protection of State Property

Asuransi Jasindo mendukung skema *Pooling Fund* Bencana (PFB) yang dicanangkan oleh Pemerintah. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan proteksi terhadap Barang Milik Negara (BMN) dari berbagai risiko bencana dan kerugian. Dengan skema PFB, diharapkan objek yang diasuransikan akan bertambah dan merambah kepada aset-aset Negara lainnya yang mendukung kegiatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan premi bagi Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Asuransi Jasindo supports the Disaster Pooling Fund (PFB) scheme launched by the Government. This scheme is expected to increase protection for State Property (BMN) from various disaster risks and losses. With the PFB scheme, the insured objects hopefully will increase and expand to other State assets that support community activities, so as in the end it will increase premium income for the State Property Insurance Consortium (ABMN).

(21 September 2023 | September 21, 2023)

Asuransi Jasindo Serahkan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Senilai Rp1,1 Miliar

Asuransi Jasindo Delivered Rice Farming Business Insurance (AUTP) Claims Worth IDR1.1 Billion

Asuransi Jasindo menyerahkan pembayaran klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp1,1 Miliar kepada 43 Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat. Acara ini berlangsung di Lapangan Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, dalam rangka Upacara Syukur Sumbawa Barat. Asuransi Jasindo dalam mendukung program AUTP dan upaya memastikan keberlanjutan usaha tani padi bagi Kelompok Tani di Sumbawa Barat.

Asuransi Jasindo handed over Rice Farming Business Insurance (AUTP) claim payments of IDR1.1 billion to 43 Farmer Groups in West Sumbawa Regency. This event took place at Graha Fitrah Field, West Sumbawa Regent's Office, as part of the West Sumbawa Thanksgiving Ceremony. Asuransi Jasindo supports the AUTP program and efforts to ensure the sustainability of rice farming for Farmer Groups in West Sumbawa.

(11 Oktober 2023 | October 11, 2023)

Asuransi Jasindo Pastikan Keberlanjutan Program Taman Baca di Ciamis

Asuransi Jasindo Ensures the Sustainability of the Reading Park Program in Ciamis

Asuransi Jasindo pastikan keberlanjutan program taman baca yang telah dibangun pada tahun 2020 lalu untuk tingkatkan literasi anak dan masyarakat di Desa Cibadak, Kabupaten Ciamis. Taman baca yang merupakan hasil kerja sama antara Asuransi Jasindo dengan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) itu, dilengkapi dengan fasilitas 500 buku bacaan dengan tema buku cerita islami, Al-quran, Iqra, pengetahuan umum, buku cerita anak, ilmu geologi dan lain-lain. Dengan hadirnya taman baca yang memiliki koleksi buku beragam ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan anak-anak sekitar untuk berkunjung.

Asuransi Jasindo ensures the sustainability of the reading park program established in 2020 to improve literacy for children and the community in Cibadak Village, Ciamis Regency. The reading park, which is the result of collaboration between Asuransi Jasindo and Bangun Kecerdasan Bangsa Foundation (YBKB), is equipped with facilities of 500 reading books with the themes of Islamic story books, Al-Quran, Iqra, general knowledge, children story books, geology and others. The presence of this reading park with diverse collection of books hopefully will attract the local residents and children to visit.

(12 Oktober 2023 | October 12, 2023)

Jasindo Proteksi Sirkuit Mandalika dengan Asuransi CECR

Jasindo Protected Mandalika Circuit with CECR Insurance

Asuransi Jasindo memberikan proteksi terhadap Sirkuit Mandalika melalui produk Asuransi *Civil Engineering Completed Risks* (CECR), menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2023. Proteksi ini diberikan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Proteksi asuransi CECR ini dirancang khusus untuk menjamin pekerjaan teknik sipil yang sudah selesai dibangun dari berbagai risiko.

Asuransi Jasindo provided protection for the Mandalika Circuit through the Civil Engineering Completed Risks (CECR) Insurance product, approaching the 2023 Mandalika MotoGP event. This protection is provided taking into account any various potential risks. CECR insurance protection is specifically designed to provide coverage for completed civil engineering work from any various risks.

(17 Oktober 2023 | October 17, 2023)

Mobil Sehat Asuransi Jasindo Kembali Hadir di Surabaya dan Probolinggo

Asuransi Jasindo Health Cars were Back in Surabaya and Probolinggo

Bertempat di Surabaya dan Probolinggo, Asuransi Jasindo bersama dengan Yayasan Inspirasi Anak Bangsa hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Pada rangkaian kunjungan tahun ini, setelah memberikan layanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, Mobil Sehat Asuransi Jasindo kembali hadir di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Posyandu Melati, Probolinggo. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dilakukan kepada lebih dari 150 peserta yang telah mendaftar. Selanjutnya, Mobil Sehat bergerak menuju kota Surabaya. Kegiatan ini berlangsung di SD Muhammadiyah 18 dan difokuskan pada pemeriksaan kesehatan mata untuk lebih dari 550 peserta terdaftar.

Located in Surabaya and Probolinggo, Asuransi Jasindo together with Anak Bangsa Inspiration Foundation were present to provide free health and medical services. In the year's series of visits, after providing health services in Central Java Province, the Asuransi Jasindo Health Car was again present in East Java Province, specifically at Posyandu Melati, Probolinggo. Health checks and treatment were carried out for more than 150 participants who had registered. Thereafter, the Health Car moved towards Surabaya city. This activity took place at SD Muhammadiyah 18 and focused on eye health examinations for more than 550 registered participants.

(19 Oktober 2023 | October 19, 2023)

AAUI Surakarta Menggelar Podcast Bincang Sore Spesial Hari Asuransi

AAUI Surakarta Held Special Afternoon Talk Podcast on Insurance Day

Dalam rangka memperingati Hari Asuransi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Surakarta menyelenggarakan *podcast* bincang sore di TA Radio dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Instagram. *Podcast* yang bertemakan "Mendorong Kesadaran Masyarakat Untuk Berasuransi: Kenali - Pahami - Miliki" ini dihadiri oleh tiga narasumber utama, yaitu Ketua AAUI Surakarta, Angling Krisna Adhy, Wakil Ketua I AAUI Surakarta sekaligus Kepala Cabang Asuransi Jasindo Solo, Dani Anggorowati, serta Ketua Forum Otomotif Solo Raya, Saiful Ramadhan turut memeriahkan acara ini.

In commemoration of Insurance Day, the Indonesian General Insurance Association (AAUI) Surakarta held an afternoon talk podcast on TA Radio which was also broadcast live via YouTube and Instagram channels. The podcast with the theme "Encouraging Public Awareness of Insurance: Recognize - Understand - Own" was attended by three main speakers, namely the Chair of AAUI Surakarta, Angling Krisna Adhy, Deputy Chair I of AAUI Surakarta and Head of the Asuransi Jasindo Solo Branch, Dani Anggorowati, and Chair of Solo Raya Automotive Forum, Saiful Ramadhan also enlivened this event.

(24 Oktober 2023 | October 24, 2023)

Bulan Inklusi Keuangan, Asuransi Jasindo Sosialisasi dan Tebar Diskon

Financial Inclusion Month, Asuransi Jasindo Disseminated and Gave Discounts

Asuransi Jasindo menjalankan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan promo diskon untuk masyarakat. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di tahun ini, Asuransi Jasindo melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada petani di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Lampung.

Asuransi Jasindo carries out several initiatives to increase public understanding of insurance and encourage broader financial inclusion. One of them is by dissemination and providing discount promotions to the public. In an effort to increase financial literacy this year, Asuransi Jasindo carried out a series of dissemination activities to farmers in several areas such as West Java, South Sulawesi, Central Kalimantan and Lampung.

(25 Oktober 2023 | October 25, 2023)

Jasindo Perkuat Ekonomi Indonesia Melalui Transformasi

Jasindo Strengthens Indonesia's Economy Through Transformation

Asuransi Jasindo berkomitmen terus memperkuat lini bisnisnya, salah satu cara adalah dengan telah melakukan transformasi. Terdapat 3 (tiga) poin utama transformasi yang telah dilakukan Perusahaan, yaitu dalam hal proses bisnis, sumber daya manusia, serta tata kelola dan manajemen risiko. Pada proses bisnis, saat ini Perusahaan fokus pada pertumbuhan bisnis yang *profitable* dan *sustainable* baik pada bisnis penugasan pemerintah maupun non pemerintah, serta memperkuat *support business* untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah, yang salah satu upayanya adalah melakukan sentralisasi proses bisnis.

Asuransi Jasindo is committed to continuing to strengthen its business lines, one of which is by transformation. The Company has carried out 3 (three) main points of transformation, namely in terms of business processes, human resources, as well as governance and risk management. In business processes, the Company is currently focused on profitable and sustainable business growth in both government and non-government business assignments, as well as strengthening business support to provide excellent service to customers, one of the efforts of which is business process centralization.

(21 Desember 2023 | December 21, 2023)

Lindungi Aset Negara, Asuransi Jasindo dan Konsorsium Beri Layanan Terbaik

Protecting State Assets, Asuransi Jasindo and the Consortium Provide the Best Service

Dalam menghadapi kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim global, penting untuk melakukan mitigasi atas potensi bencana dan risiko-risiko lainnya, terutama pada Barang Milik Negara (BMN). Untuk itu, Asuransi Jasindo melakukan penandatanganan kontrak payung Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) untuk memastikan proses perbaikan atau pembangunan kembali BMN dapat direalisasikan dengan lebih mudah jika terjadi kerugian atau bencana.

In dealing with uncertain natural conditions and global climate change, it is important to mitigate potential disasters and other risks, especially for State Property (BMN). For this reason, Jasindo Insurance has signed an umbrella contract for State Property Insurance (ABMN) to ensure that the process of repairing or rebuilding BMN can be realized more easily in case of any loss or disaster.

02

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Ngalim Sawego

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah penyehatan Perusahaan yang dijalankan Direksi. Hal tersebut menjadi fondasi bagi Asuransi Jasindo untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners appreciates the Company's restructuring measures taken by the Board of Directors. This is the foundation for Asuransi Jasindo to realize sustainable business growth.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kinerja PT asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) yang telah melalui berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam industri asuransi dengan capaian kinerja yang baik. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan serta memberikan nasihat terhadap strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan bisnis Perseroan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perusahaan telah mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan. Kami juga senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris menjaga objektivitas dan independensi. Karena itu, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini, kami akan melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dijalankan Perusahaan selama tahun 2023.

We express our gratitude to the presence of Almighty God for the performance of PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) which has navigated various challenges in carrying out business activities in the insurance industry with good performance achievements. Throughout 2023, the Board of Commissioners fulfilled supervisory functions and duties, while also providing advice on strategies and policies implemented by the Board of Directors in carrying out the Company's business with full responsibility, as mandated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners also ensures that the Company adheres to predetermined work plans and complies with all regulations and legislation. We also always strive to ensure that the Company is managed professionally, in favor with the interests of shareholders and other stakeholders. In performing its role, the Board of Commissioners maintains objectivity and independence. Therefore, the Board of Commissioners is not involved in making any operational decisions for the Company, except for matters regulated and stipulated in the Company's Articles of Association and statutory regulations.

Through this report, we will report the assessment of the performance of the Board of Directors, strategy implementation supervision, outlook on business prospects prepared by the Board of Directors as well as the implementation of good corporate governance carried out by the Company during 2023.

Kondisi Ekonomi dan Industri Asuransi Tahun 2023

Moderasi pertumbuhan ekonomi terjadi di negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok di tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global mendorong inflasi turun sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Tantangan perkembangan geopolitik ke depan tetap harus diwaspadai, seperti eskalasi konflik Palestina-Israel, juga dampak penyelenggaraan pemilihan umum pada 50% populasi dunia termasuk di negara-negara utama mitra dagang Indonesia seperti AS, Uni Eropa, India, dan Taiwan.

Secara umum, sentimen pasar keuangan global cenderung positif akhir 2023. Ekspektasi penurunan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) dan narasi *soft landing* di AS mendorong aliran dana masuk ke *Emerging Markets* (EM) dan penguatan pasar keuangan global, termasuk khususnya pasar keuangan Indonesia. Volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar juga terpantau menurun. *Leading indicators* perekonomian nasional positif, didukung surplus neraca perdagangan dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur yang masih ekspansif. Tingkat inflasi terjaga rendah di level 2,61% *yoy* akhir 2023.

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional selama tahun 2023 dapat terjaga dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa dengan dukungan permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sektor jasa keuangan nasional mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, premi asuransi umum pada tahun 2023 menurut data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencapai sebesar Rp103,86 triliun meningkat 15,3% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp90 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar asuransi umum semakin menarik, ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 yang tumbuh mencapai 5,05%.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai kisaran 5% dan demografi kependudukan usia muda disertai juga peningkatan kesadaran berasuransi yang semakin tinggi, membuka peluang bagi peningkatan perolehan premi asuransi umum di tahun-tahun yang akan datang.

Optimisme pertumbuhan tersebut terlihat dalam perolehan premi bruto Jasindo di tahun 2023 yang mencapai Rp3,3 triliun. Walaupun Jasindo sedang dalam tahapan lebih lanjut untuk penyehatan keuangan perusahaan, dan tingkat RBC yang sudah di atas ketentuan namun belum sepenuhnya tinggi, perusahaan tetap mampu mempertahankan tingkat

Economic and Insurance Industry Conditions in 2023

Moderation in economic growth occurs in European Union countries and China in 2023. Slowing global economic growth pushes inflation down, providing room for central banks to be more accommodative. Attention needs to be taken on challenges of future geopolitical developments, such as the escalation of the Palestinian-Israeli conflict, as well as the impact of general elections on 50% of the world's population, including Indonesia's main trading partner countries such as the US, European Union, India and Taiwan.

In general, global financial market sentiment tends to be positive at the end of 2023. Expectations of a reduction in the Fed Funds Rate (FFR) and the narrative of a soft landing in the US encourages fund flows into Emerging Markets (EM) and global financial markets strengthening, including in particular the Indonesian financial market. Volatility in the stock market, debt securities and exchange rates was also observed to decrease. Leading indicators for the national economy are positive, supported by a trade balance surplus and remaining expansive Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI). The inflation rate was maintained low at 2.61% yoy at the end of 2023.

The stability of the national financial services sector during 2023 can be well maintained. The Financial Services Authority assesses that with the support of strong capital, adequate liquidity and a maintained risk profile, the national financial services sector is able to face the potential slowdown in global economic growth.

Amidst these conditions, general insurance premiums in 2023 according to data from the Indonesian General Insurance Association (AAUI) reached IDR103.86 trillion, an increase of 15.3% compared to IDR90 trillion in 2022. This shows that the general insurance market is increasingly attractive, supported by Indonesia's economic growth in 2023 of 5.05%.

Average economic growth in the last 5 (five) has reached around 5% and young population demographic accompanied by an increasing awareness of insurance opens up opportunities for increasing the acquisition of general insurance premiums in the coming years.

This growth optimism can be seen in Jasindo's gross premium in 2023 reaching IDR3.3 trillion. Even though Jasindo is in an advanced stage of refining the company's finances, and the RBC level is above the provisions but not yet completely high, the company was still able to maintain the level of premium earnings in 2023. Apart from management's continuous

perolehan premi di tahun 2023. Selain dari upaya manajemen yang terus-menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada *key customer*, hal ini juga ditunjang oleh kondisi makro ekonomi Indonesia yang menunjang optimisme perolehan premi bruto dimaksud.

efforts to provide the best service to key customers , this is also supported by Indonesia's macroeconomic conditions which support optimism in obtaining the gross premium in question.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, kami selaku Dewan Komisaris Asuransi Jasindo telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Kami juga telah memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi yang sejalan dengan arahan pemegang saham.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris harus memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dijalankan Direksi sejalan dengan RKAP dan RJPP tersebut.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan *review* atas setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan rencana Perusahaan. Dewan Komisaris menekankan bahwa meskipun terdapat tantangan yang dihadapi Perusahaan, upaya Direksi dalam mempertahankan operasi dan menjaga keseimbangan keuangan perusahaan patut diapresiasi.

Tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang dijalankan Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi terkait langkah untuk melakukan restrukturisasi produk asuransi kredit yang memang menjadi akar permasalahan, lalu melakukan divestasi di dua saham penyertaan, serta melakukan perubahan terhadap proses dan model bisnis.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan secara aktif terhadap upaya Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan premi dan pendapatan investasi. Dewan Komisaris menilai, langkah-langkah yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan RKAP dan RJPP Perusahaan. Dewan Komisaris juga senantiasa memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan operasionalnya sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

Throughout 2023, as the Board of Commissioners of Asuransi Jasindo, we actively supervised the Company management by the Board of Directors. We also provided recommendations and advice to the Board of Directors in accordance with shareholder directives.

Supervision of Strategy Implementation

In supervising, the Board of Commissioners adheres to the Company's Budget Work Plan (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP). The Board of Commissioners must ensure that the strategies and policies implemented by the Board of Directors are in line with the RKAP and RJPP.

The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative carried out by the Board of Directors and assesses its conformity to the Company's plans. The Board of Commissioners emphasizes that despite the challenges faced by the Company, the Board of Directors' efforts in maintaining operations and maintaining the company's financial balance should be appreciated.

In 2023, the Board of Commissioners paid special attention to the implementation of the Financial Restructuring Plan (RPK) carried out by the Board of Directors and which has received approval from OJK. The Board of Commissioners also provided advice to the Board of Directors regarding steps to restructure the credit insurance product which was the root of the problem, then divestment of two investment shares, as well as make changes to the business process and model.

In addition, the Board of Commissioners also actively supervises the Company's efforts to increase premium income and investment income. The Board of Commissioners assesses that the steps taken by the Board of Directors are in accordance with the Company's RKAP and RJPP. The Board of Commissioners also always ensures that the Company has carried out its operations in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengemban tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya memberikan rekomendasi dan nasihat serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan manajemen perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa perusahaan senantiasa menjalankan praktik GCG untuk kepentingan perusahaan dan memenuhi hak para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan pertemuan melalui penyelenggaraan rapat gabungan bersama Direksi, sebagai forum penyampaian nasihat. Dalam forum pertemuan tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari Direksi di antaranya terkait perkembangan kinerja Perusahaan serta sejumlah hambatan yang mungkin dihadapi. Atas dasar keterangan tersebut, Dewan Komisaris kemudian dapat menyampaikan saran serta rekomendasi terkait hal-hal yang perlu dilakukan Direksi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Dewan Komisaris memastikan bahwa fungsi pemberian nasihat senantiasa mampu dilaksanakan dengan kehati-hatian dan penuh rasa tanggung jawab, serta diarahkan pada rekomendasi yang terukur dan realistis. Dewan Komisaris menyampaikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas nasihat yang telah disampaikan, guna memastikan ada atau tidaknya kendala yang dihadapi serta efektivitas tindak lanjut terhadap pengelolaan yang dijalankan.

Saran dan Nasihat Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan saran dan nasihat kepada Direksi tanpa harus terlibat dalam operasional Perusahaan. Saran dan nasihat yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan selama 2023 kepada Direksi secara garis besar:

- Direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal antara lain dengan melakukan tindak lanjut inisiatif strategis yang telah direncanakan sesuai dengan *core* bisnis perusahaan.

Supervision Mechanism and Frequency

The supervisory function carried out by the Board of Commissioners is part of the mandate of shareholders determined through the GMS mechanism. Whether directly or indirectly, the Board of Commissioners represents the interests of shareholders in supervising the Company management by the Board of Directors.

The Board of Commissioners carries out its supervisory function by carrying out its duties and responsibilities, including providing recommendations and advice as well as evaluating the implementation of strategic policies related to business activities and company management. In addition, the Board of Commissioners ensures that the company consistently carries out GCG practices for the benefit of the company and to fulfill the rights of stakeholders. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

The Board of Commissioners regularly holds meetings by holding joint meetings with the Board of Directors, as a forum for providing advice. In this meeting forum, the Board of Commissioners has the authority to request any information from the Board of Directors, including regarding developments in the Company's performance and a number of obstacles that may be faced. Based on this information, the Board of Commissioners can then submit suggestions and recommendations regarding matters that need to be carried out by the Board of Directors. Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors.

The Board of Commissioners ensures that the function of providing advice is always carried out carefully and with a sense of responsibility, and is directed at measurable and realistic recommendations. The Board of Commissioners conveys advice and recommendations to the Board of Directors and supervises the follow-up to the advice provided, in order to ensure whether or not any obstacles faced and the effectiveness of the follow-up to the management carried out.

Advice and Recommendation from the Board of Commissioners

As part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners can provide suggestions and advice to the Board of Directors without having to be involved in the Company's operations. In general, the suggestions and advice conveyed by the Board of Commissioners regarding the company management during 2023 to the Board of Directors are:

- The Board of Directors is expected to be able to improve the company's performance optimally, among others, by following up on strategic initiatives that have been planned in accordance with the company's core business.

- Direksi diharapkan untuk menyediakan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung rencana bisnis di tahun berikutnya dengan tetap menjaga komitmen perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan *Risk Based Capital* (RBC). Direksi juga diharapkan dapat menerapkan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) yang efektif dengan menyelaraskan teknologi informasi dengan proses bisnis didukung kompetensi SDM untuk memastikan kebijakan, keputusan dan tindakan korporasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi diharapkan senantiasa berupaya meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan program kerja dan kegiatan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan pengelolaan risikonya.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat menantang bagi Asuransi Jasindo, setelah beragam upaya untuk penyehatan keuangan Perusahaan dilakukan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menilai Direksi pada tahun 2023 telah mengelola Perusahaan dengan sangat teliti dan tepat sasaran. Program utama untuk kelanjutan peningkatan kesehatan perusahaan menjadi fokus yang dilanjutkan pada tahun 2023. Program Pengendalian Klaim dan Upaya Peningkatan kolektibilitas piutang telah memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan hasil usaha di tahun 2023.

Walaupun pendapatan premi bersih turun 14,6% dari Rp1,37 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1,17 triliun pada tahun 2023, namun Perusahaan justru dapat meningkatkan hasil *underwriting* sebesar 351,2% dari hasil *underwriting* tahun 2022 sebesar Rp53,3 miliar menjadi Rp240,6 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2023 tidak terdapat pendapatan yang tinggi dari hasil penjualan saham sebagai mana yang terjadi pada tahun 2022, namun perusahaan justru dapat meningkatkan laba usaha dari Rp61,9 miliar di tahun 2022 menjadi Rp62,9 miliar pada tahun 2023. Hal ini memperlihatkan kemampuan *resilient* Asuransi Jasindo atas dinamika bisnis yang terjadi di tahun 2023.

Selain itu, kualitas piutang di tahun 2023 terutama untuk Piutang Reasuransi dan Koasuransi menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan pelunasan piutang klaim yang menyebabkan kualitas umur piutang menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas piutang menyebabkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) piutang klaim yang dibentuk pada tahun 2023 menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2022. CKPN piutang reasuransi dan koasuransi yang dibentuk tahun 2023 adalah sebesar Rp653,5 miliar, lebih rendah dibandingkan pembentukan CKPN tahun 2022 sebesar Rp731,9 miliar.

- The Board of Directors is expected to provide adequate infrastructure support to facilitate business plans for the following year while maintaining the company's commitment to maintaining and increasing Risk Based Capital (RBC). The Board of Directors is also expected to be able to implement effective Governance, Risk and Compliance (GRC) by aligning information technology with business processes supported by HR competency to ensure corporate policies, decisions and actions are in accordance with applicable laws and regulations.
- The Board of Directors is expected to always strive to increase prudence in managing the Company's work programs and business activities by considering risk management.

Assessment of Directors' Performance

2023 is a highly challenging year for Jasindo Insurance, after various efforts were made to revitalize the Company's finances so that it could achieve the targets that had been set. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors in 2023 has managed the Company extremely thoroughly and on target. The main program to continue improving the company's soundness is the focus continuing in 2023. The Claim Control Program and Efforts to Increase the collectibility of receivables have provided great benefits for increasing business proceeds in 2023.

Even though net premium income decreased by 14.6% from IDR1.37 trillion in 2022 to IDR1.17 trillion in 2023, the Company was actually able to increase its underwriting results by 351.2% from the 2022 underwriting results of IDR53.3 billion to IDR240.6 billion in 2023. In 2023 there was no high income from the sale of shares as happened in 2022, but the company can actually increase operating profit from IDR61.9 billion in 2022 to IDR62.9 billion in 2023. This shows the ability of Asuransi Jasindo to be resilient to the business dynamics in 2023.

In addition, the quality of receivables in 2023, especially for Reinsurance and Coinsurance Receivables was better than in 2022. This is due to the high receipt of settlement of claim receivables which causes the quality of receivables term to be better. The increase in the quality of receivables causes the allowance for impairment losses (CKPN) for claim receivables formed in 2023 to be lower than in 2022. The CKPN for reinsurance and co-insurance receivables formed in 2023 was IDR653.5 billion, lower than the CKPN formed in 2022 of IDR731.9 billion.

Penilaian Dewan Komisaris juga dilandasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) manajemen yang disampaikan kepada Pemegang Saham Utama. Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan pencapaian IKU dari masing-masing Direktur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja secara regular.

Dewan Komisaris memberdayakan organ Dewan Komisaris untuk melaksanakan telaah atas kinerja bisnis secara lebih mendalam terutama pada area utama yang berkenaan dengan kinerja laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan yang mencerminkan kinerja bisnis Perusahaan, manajemen risiko bisnis dan operasional, pelaksanaan GCG yang baik serta kinerja sumber daya manusia dalam organisasi Perusahaan.

Kinerja bisnis diawasi dan dipastikan Dewan Komisaris mulai dari proses perencanaan dan realisasi *gross premium written*, *underwriting results*, serta hasil pengelolaan portofolio investasi dan laba bersih perusahaan secara berkala, termasuk pemantauan melalui ukuran-ukuran kinerja usaha perasuransian. Dewan Komisaris juga memastikan Direksi untuk selalu mempertimbangkan faktor ekonomi keuangan nasional dan global sebagai *critical driving forces* dalam implementasi strategi serta langkah-langkah taktis untuk mempertahankan kinerja bisnis Perusahaan.

Laporan *Key Performance Indicator* (KPI) Jasindo yang telah di *review* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCopper (PwC) tahun 2023 memperlihatkan pencapaian nilai 95,7 dari skala 100.

Adapun rincian penilaian KPI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai ekonomi dan sosial mencapai 42.61 dari bobot 49.

b. Nilai inovasi model bisnis mencapai 15.35 dari bobot 15.

c. Nilai Kepemimpinan teknologi mencapai 9,9 dari bobot 9.

d. Nilai peningkatan investasi mencapai 11.74 dari bobot 12.

e. Nilai pengembangan talenta mencapai 16.10 dari bobot 15.

Dari uraian tersebut, di tahun 2023 KPI Asuransi Jasindo memang mengalami dinamika untuk pencapaian indikator nilai ekonomi dan sosial serta peningkatan investasi. Namun untuk nilai indikator yang lain, Asuransi Jasindo mencatatkan kinerja yang melebihi bobot penilaian yang ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun Jasindo sedang *struggling* dan berupaya lebih meningkatkan kesehatan Perusahaan, Asuransi Jasindo tetap mampu untuk mencapai kinerja KPI pada tahun 2023 dengan baik.

The Board of Commissioners also assesses based on the management's Key Performance Indicators (KPI) submitted to the Major Shareholders. The Board of Commissioners also supervises the achievement of the KPI of each Director in charge of the implementation and achievement of regular performance targets.

The Board of Commissioners empowers the organ of the Board of Commissioners to carry out a more in-depth review of business performance, especially in the main areas relating to the performance of monthly, quarterly and annual financial reports which reflect the Company's business performance, business and operational risk management, good GCG implementation and human resource performance in the Company organization.

Business performance is monitored and ensured by the Board of Commissioners starting from the planning and realization process of gross premium written, underwriting return, as well as the company's investment portfolio management results and net profit on a regular basis, including monitoring through insurance business performance measures. The Board of Commissioners also ensures that the Board of Directors consistently considers national and global economic and financial factors as critical driving forces in implementing strategies and tactical steps to maintain the Company's business performance.

Jasindo's Key Performance Indicator (KPI) report which has been reviewed by the PricewaterhouseCopper (PwC) Public Accounting Firm (KAP) in 2023 shows an achievement of a score of 95.7 out of a scale of 100.

The details of the KPI assessment are as follows:

1. The economic and social score reached 42.61 out of a weight of 49.
2. The business model innovation score reached 15.35 out of a weight of 15.
3. The technological leadership score reached 9.9 out of a weight of 9.
4. The investment increase score reached 11.74 out of a weight of 12.
5. The talent development score reached 16.10 out of a weight of 15.

From this description, in 2023 Asuransi Jasindo's KPI indeed experienced dynamics in achieving economic and social value indicators as well as increasing investment. However, for other indicator scores, Asuransi Jasindo recorded performance that exceeded the specified assessment weight. This shows that even though Jasindo is struggling and trying to further improve the company's soundness, Jasindo Insurance remains able to achieve good KPI performance in 2023.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi yang telah memungkinkan Perusahaan meraih hasil yang sangat baik tersebut.

For this achievement, the Board of Commissioners gives high appreciation to the Board of Directors who have enabled the Company to achieve these excellent results.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Asuransi Jasindo telah melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan baik. Berlandaskan pada hal tersebut, Dewan Komisaris sangat optimis terhadap prospek usaha Asuransi Jasindo ke depan. Terlebih, Asuransi Jasindo juga telah memiliki struktur permodalan yang kuat dengan *Risk-Based Capital* (RBC) posisi akhir tahun 2023 di level 159,10% sudah berada di atas persyaratan minimum regulasi yaitu 120%.

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2024. Hal tersebut memberikan peluang bagi Asuransi Jasindo untuk meningkatkan kinerjanya seperti peningkatan pendapatan premi, menekan klaim dan biaya serta mengoptimalkan hasil *underwriting*.

Dewan Komisaris optimis Perusahaan dapat mencapai target yang lebih baik di tahun 2024 dengan memperkuat penetrasi pasar asuransi melalui diversifikasi produk walaupun masih terdapat tantangan adanya volatilitas ekonomi global yang masih akan berlanjut di tahun 2024. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga optimis bahwa Perusahaan masih cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada seperti adanya kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi, serta masyarakat yang semakin cermat dalam memilih produk asuransi.

Perusahaan harus dapat beradaptasi dan melakukan transformasi atas perubahan yang cepat di industri melalui penguatan fondasi bisnis Perusahaan (penguatan ketahanan atau kapasitas industri) dan daya saing, peningkatan efisiensi, inovasi produk dan layanan yang inklusif, serta peningkatan sinergi bisnis dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan tentunya disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang efektif. Aspek-aspek tersebut akan senantiasa dikembangkan oleh perusahaan selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027.

Terkait RKAP 2024, Dewan Komisaris mendukung Rancangan RKAP Tahun 2024 yang telah disusun dengan mempedomani Aspirasi Pemegang Saham Seri A Kementerian BUMN dan arahan Pemegang Saham Seri B PT BPUI serta asumsi yang digunakan sebagai dasar menetapkan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja sudah cukup relevan dengan kondisi makro ekonomi, sektor industri perasuransian serta kemampuan dan kondisi Perusahaan. Hal tersebut

Outlook on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Asuransi Jasindo has gone through 2023 which is full of challenges well. Based on this, the Board of Commissioners is very optimistic on Asuransi Jasindo's business prospects in the future. Moreover, Asuransi Jasindo also has a strong capital structure with Risk-Based Capital (RBC) at the end of 2023 at the level of 159.10%, which is above the minimum regulatory requirement, namely 120%.

The government has set an economic growth target of 5.2% in 2024. This provides an opportunity for Asuransi Jasindo to improve its performance, such as increasing premium income, reducing claims and costs and optimizing underwriting return.

The Board of Commissioners is optimistic that the Company can achieve better targets in 2024 by strengthening insurance market penetration through product diversification despite of remaining challenges due to global economic volatility continuing in 2024. Furthermore, the Board of Commissioners is also optimistic that the Company remains strong enough to face any existing various challenges, such as market conditions that can affect investment performance, as well as people who are increasingly careful in choosing insurance products.

Company must be able to adapt and transform rapid changes in the industry by strengthening the Company's business foundations (strengthening industrial resilience or capacity) and competitiveness, increasing efficiency, inclusive product and service innovation, as well as increasing business synergy with adequate infrastructure support and of course accompanied by the implementation of good governance and effective risk management. These aspects will continue to be developed by the company in line with Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, as well as the Roadmap for Development and Strengthening of Indonesian Insurance 2023-2027.

Regarding the 2024 RKAP, the Board of Commissioners supports the 2024 RKAP Draft which has been prepared by referring to the Aspirations of the Series A Shareholders of the Ministry of SOE and the direction of the Series B Shareholders of PT BPUI as well as the assumptions used as a basis for determining targets, strategies, policies and work programs that are quite relevant to macroeconomic conditions, the insurance industry sector and the Company's capabilities

didukung dengan garis besar arahan Dewan Komisaris antara lain untuk mendukung optimalisasi inisiatif strategi yang merupakan strategi bisnis Perusahaan dalam mendukung tema RKAP Tahun 2024 Asuransi Jasindo yaitu "*Growing and Expanding Our Business*", maka dalam pelaksanaannya harus mengedepankan GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif pada seluruh kegiatan dan bidang usaha untuk mencapai target-target RKAP Tahun 2024. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan program kerja, strategi dan kebijakan untuk mencapai target RKAP 2024 dengan inisiatif strategis peningkatan kinerja keuangan dari *underwriting, non-underwriting*, intensifikasi dan ekstensifikasi penugasan pemerintah harus didukung peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, optimalisasi tata kelola IT yang terintegrasi serta intensitas koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk efektivitas penyelesaian permasalahan. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko, perusahaan secara komprehensif menerapkan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung sasaran Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan *risk apptite* dan *risk tolerance* yang didukung organ pengelola risiko sesuai dengan ketentuan dan peningkatan budaya sadar risiko di perusahaan.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) telah terselenggara dalam setiap kegiatan usaha perusahaan. Tidak hanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan *best practice* di lingkungan industri.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di lingkungan Asuransi Jasindo sudah baik, seperti tercermin pada hasil evaluasi efektivitas penerapan GCG yang telah dilaksanakan oleh perusahaan secara berkala. Penilaian dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola sebagai bagian dari penilaian tingkat Kesehatan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, serta SEOJK Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pelaksanaan *self-assessment* tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

and conditions. This is supported by the outline of the Board of Commissioners' direction, among others, to support the optimization of strategic initiatives which are the Company's business strategy in supporting Asuransi Jasindo 2024 RKAP theme, namely "Growing and Expanding Our Business", then in its implementation it must prioritize effective GRC (Governance, Risk and Compliance) and Good Corporate Governance (GCG) in all activities and business fields to achieve the 2024 RKAP targets. Furthermore, in terms of implementing the work program, strategies and policies to achieve the 2024 RKAP target with strategic initiatives to improve financial performance from underwriting, non-underwriting, intensification and extensification of government assignments, it must be supported by improvement in the productivity of superior and competitive human resources, optimizing integrated IT governance and intensity of coordination with relevant stakeholders for effective problem solving. Meanwhile, related to risk management and control, the company comprehensively implements risk management on an ongoing basis to improve performance, encourage innovation and support the Company's overall targets by paying attention to risk appetite and risk tolerance supported by risk management organs in accordance with provisions and risk awareness culture improvement at the company.

Outlook on the Implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners consistently carries out the supervisory function to ensure that the principles of Good Corporate Governance (GCG) are implemented in every company business activity. Not only in accordance with applicable legislation, but also based on best practice in the industrial environment.

In 2023, the Board of Commissioners assesses that the GCG principles implementation within Asuransi Jasindo is good, as reflected in the evaluation results on the effectiveness of GCG implementation which has been carried out by the company periodically. The assessment is made through a self-assessment mechanism on the governance implementation as part of assessmen on the company's soundness level in accordance with OJK Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Company Soundness Level of Non-bank Financial Services Institutions, as well as SEOJK Number 1/SEOJK.05/2021 regarding the Assessment of the Soundness Health Level of Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company. The self-assessment is also made as an effort to ensure that the GCG principles implementation within the company environment has been carried out properly.

Hasilnya, pada *self-assessment* yang dilakukan di Perusahaan terhadap GCG, Asuransi Jasindo mendapatkan skor 2 atau masuk ke dalam kategori "Baik". Secara umum, hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, secara Individual dengan peringkat Komposit adalah 3 (Cukup Sehat), di mana kondisi Perusahaan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG Perusahaan pada tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi melalui Rapat Komisaris dan dituangkan dalam Notulen Rapat, tentang pelaksanaan GCG kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip GCG tercermin dalam setiap kegiatan usaha dan operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris berharap agar Direksi beserta jajarannya dalam menjalankan usaha dan operasional Perusahaan agar senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan budaya AKHLAK sebagai *core values* BUMN. Selanjutnya, Direksi kedepannya agar memperkuat fungsi pengawasan internal dan fungsi manajemen risiko untuk memastikan penerapan aspek dan fungsi pengawasan, kepatuhan dan pengelolaan risiko pada seluruh tingkatan organisasi disertai dengan peningkatan budaya sadar risiko di lingkungan perusahaan.

Pandangan Atas Penerapan *Whistleblowing System*

Sebagai wujud komitmen yang kuat Perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang sehat, perilaku bisnis beretika dan bersih serta penerapan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, Dewan Komisaris dan Direksi mengeluarkan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) yang diberlakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.04/SKB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020. Pedoman WBS merupakan panduan pelaporan yang mengatur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan atau pelanggaran, pengelolaan sistem pelaporan, mekanisme pelaporan, penyampaian dan penanganan laporan, perlindungan pelapor, mekanisme penghargaan, evaluasi dan sosialisasi perihal WBS serta pengaturan pada perusahaan anak.

WBS merupakan sarana pelaporan dan mekanisme kontrol Dewan Komisaris dalam menilai efektivitas implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama dalam memastikan komunikasi visi misi perseroan dari Direksi kepada para pekerja di Perusahaan. Apabila terdapat informasi melalui WBS terkait hal-hal yang belum tercapai kesepakatan penyelesaian antara pekerja dengan

As a result, in the company's self-assessment regarding GCG, Asuransi Jasindo received a score of 2 or fell into the "Good" category. In general, the results of the assessment of the Company's Soundness Level, individually with a Composite rating are 3 (Quite Sound), where the Company's condition is generally quite sound thus it is considered quite capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors.

In order to improve the quality of the Company's GCG implementation in 2023, the Board of Commissioners provides recommendations and/or advice to the Board of Directors through the Board of Commissioners' Meeting and stated in the Meeting Minutes, regarding the implementation of GCG at all levels or tiers of the organization to reflect GCG principles in every business activity and company operations.

The Board of Commissioners hopes that the Board of Directors and their staff in carrying out the company's business and operations will always prioritize the principles of Good Corporate Governance and comply with the applicable statutory provisions and implement the AKHLAK culture as the SOE core values. Furthermore, in the future, the Board of Directors should strengthen the internal supervision function and risk management function to ensure the implementation of supervision, compliance and risk management aspects and functions at all levels of the organization accompanied by an increase in risk awareness culture in the company environment.

Outlook on the Implementation of the Whistleblowing System

As a form of the Company's strong commitment to implementing healthy business practices, ethical and clean business behavior as well as implementing the principles of good governance consistently and sustainably, the Board of Commissioners and Board of Directors issued Whistleblowing System (WBS) Guidelines enforced through the issuance of a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors Number SKB.04/SKB/VII/2020 dated July 30, 2020. The WBS Guidelines are reporting guidelines that regulate actions that can be categorized as deviation or violation, reporting system management, reporting mechanism, submission and handling of report, protection of whistleblower, reward mechanism, evaluation and dissemination regarding WBS and arrangements for subsidiary companies.

WBS serves as reporting tool and control mechanism for the Board of Commissioners in assessing the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, especially in ensuring communication of the company's vision and mission from the Board of Directors to workers in the Company. In case any information through the WBS regarding any matters for which a settlement agreement

manajemen Perusahaan. Dewan Komisaris akan melakukan komunikasi dengan para pihak terkait guna menuntaskan permasalahan yang ada secara berimbang untuk memberikan solusi terbaik atas isu atau permasalahan yang disampaikan melalui WBS.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite, yaitu:

a. Komite Audit
b. Komite Pemantau Risiko
c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris. Komite-komite telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan piagam/*charter* secara memadai.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta memberikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan. Dewan Komisaris berharap kinerja Komite dapat selalu memberikan kontribusi yang optimal sehingga mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan yang semakin intensif, berbobot, dan efektif.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris Asuransi Jasindo mengalami perubahan sesuai keputusan pemegang saham yang memberhentikan dengan hormat Adi Suryanto sebagai Komisaris Perusahaan. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Asuransi Jasindo menjadi sebagai berikut:

Ngalim Sawego	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Ahmad Fuad Rahmany	: Komisaris Independen
Indah Anggoro Putri	: Komisaris

Atas nama Asuransi Jasindo, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Adi Suryanto atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan.

has not been reached between workers and company management, the Board of Commissioners will communicate with related parties to resolve any existing problems in a balanced manner to provide the best solution to issues or problems submitted through the WBS.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In order to increase the active role of the Board of Commissioners when carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has formed 3 (three) committees, namely:

a. Audit Committee
b. Risk Monitoring Committee
c. Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners assesses the Committee performance by considering input from each member of the Board of Commissioners. The committees have carried out their duties and functions according to the charter adequately.

During 2023, the Board of Commissioners assesses that the Committees under the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities effectively and expresses appreciation for the contributions provided. The Board of Commissioners hopes that the Committee's performance can always provide optimal contributions to assist the Board of Commissioners in carrying out increasingly intensive, meaningful and effective supervision.

Changes in the Board of Commissioners Composition

In 2023, the composition of the Board of Commissioners of Asuransi Insurance changed according to the shareholder's decision to honorably dismiss Adi Suryanto as Company Commissioner. Thus, the composition of the Board of Commissioners of Asuransi Jasindo is as follows:

Ngalim Sawego	: President Commissioner concurrent Independent Commissioner
Ahmad Fuad Rahmany	: Independent Commissioner
Indah Anggoro Putri	: Commissioner

On behalf of Asuransi Jasindo, we express our appreciation and gratitude to Adi Suryanto for the dedication and contribution he made while serving as the Company Commissioner.

Penutup

Dewan Komisaris sangat memahami bahwa seluruh kinerja dan pencapaian Asuransi Jasindo di tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, mitra bisnis, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya selama ini.

Kami mengucapkan selamat kepada jajaran Direksi yang telah berhasil menjaga kinerja bisnis dan membukukan kinerja keuangan yang solid, serta kepada karyawan yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan di tengah berbagai tantangan dan ketatnya persaingan.

Dewan Komisaris mengingatkan agar manajemen serta seluruh karyawan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan segenap pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan produk terbaik yang melampaui ekspektasi pelanggan. Dewan Komisaris dalam hal ini berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan untuk mendukung langkah-langkah strategis yang disusun Direksi serta berharap seluruh insan Perusahaan senantiasa bekerja dengan optimis demi kemajuan Asuransi Jasindo.

Closing

The Board of Commissioners truly understands that all of Asuransi Jasindo's performance and achievements in 2023 are inseparable from the support provided by all stakeholders. Therefore, the Board of Commissioners would like to express its deepest gratitude to shareholders, business partners, employees and other stakeholders for their trust and support so far.

We congratulate the Board of Directors who have succeeded in maintaining business performance and recorded solid financial performance, as well as to employees who have contributed to the Company's performance amidst various challenges and intense competition.

The Board of Commissioners reminds management and all employees to work together and synergize with all other stakeholders, to produce the best products that exceed customer expectations. In this case, the Board of Commissioners is committed to increasing supervision and assistance to support the strategic steps prepared by the Board of Directors and hopes that all Company personnel will always work optimistically for the progress of Asuransi Jasindo.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioner

Ngalim Sawego
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrent Independent Commissioner

Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Indah Anggoro Putri
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors' Report

Andy Samuel
Direktur Utama
President Director

Penyehatan Perusahaan merupakan prioritas utama bagi manajemen Asuransi Jasindo untuk dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Direksi dan Dewan Komisaris menjalin sinergi untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Corporate restructuring is a top priority for Jasindo Insurance management to be able to achieve sustainable business growth. The Board of Directors and Board of Commissioners establish synergy to realize this goal.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Mengawali laporan ini, izinkan kami mewakili Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Asuransi Jasindo dapat melalui tahun 2023 yang cukup menantang dengan membukukan sejumlah pencapaian penting. Perusahaan juga telah membangun fondasi yang kokoh untuk dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa mendatang.

To begin this report, allow us to represent the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) to offer praise and gratitude to the presence of Almighty God for His mercy and grace so that Asuransi Jasindo can get through the quite challenging year 2023 by recording a number of important achievements. The Company has also built a solid foundation to be able to achieve sustainable business growth in the future.

Kondisi Ekonomi dan Industri Asuransi Tahun 2023

Bank Dunia telah memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan di tahun 2023. Konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah yang berkepanjangan, inflasi yang tinggi, tingginya tingkat utang negara, dan ketimpangan pendapatan menjadi tantangan utama bagi ekonomi global sepanjang tahun 2023.

Dalam Laporan *Global Economics Prospects*, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 melambat menjadi 3,2% dari sebelumnya sebesar 4,1% pada tahun 2022. Hal tersebut salah satunya disebabkan penghapusan dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia. Demikian juga dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang melakukan pemangkasan perkiraan pertumbuhan ekonomi global karena perang Rusia-Ukraina dan *lockdown* di China untuk mengendalikan COVID-19 serta meningkatnya inflasi. Lonjakan harga komoditas, dipicu oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan perlambatan ekonomi China karena pembatasan COVID-19 yang masih berjalan, juga menghambat pemulihan ekonomi global dari pandemi.

Economic and Insurance Industry Conditions in 2023

The World Bank has predicted that global economic growth would slow down in 2023. Prolonged geopolitical conflicts in Europe and the Middle East, high inflation, high levels of national debt and income inequality becomes the main challenges for the global economy throughout 2023.

In the Global Economics Prospects Report, the World Bank projects that global economic growth in 2023 would slow down to 3.2% from the previous 4.1% in 2022. This is partly due to the elimination of fiscal and monetary support throughout the world. Likewise, the International Monetary Fund (IMF) has cut its global economic growth forecast due to the Russia-Ukraine war and the lockdown in China to control COVID-19 as well as rising inflation. Surging commodity prices, triggered by the Russia-Ukraine geopolitical conflict and China's economic slowdown due to ongoing COVID-19 restrictions, also hinders the global economic recovery from the pandemic.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2023 berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Meskipun terjadi sedikit perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan stabilitas yang relatif baik pada tahun 2023. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Tingkat inflasi nasional pada tahun 2023 mencapai 2,61%, yang merupakan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,51%. Kebijakan peningkatan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) oleh Bank Indonesia menjadi 6,00% dari 5,50% pada akhir tahun sebelumnya berhasil menjaga inflasi inti tetap terkendali.

In the midst various global economic challenges, the Indonesian economy in 2023 managed to record growth of 5.05%. This growth rate was lower than the achievement in 2022 which experienced growth of 5.31%. Despite a slight slowdown in economic growth compared to the previous year, the Indonesian economy continues to show relatively good stability in 2023. This success is inseparable from the efforts made by the government and Bank Indonesia (BI) to keep the inflation rate low. The national inflation rate in 2023 reached 2.61%, a significant decrease from the previous year of 5.51%. Bank Indonesia's policy of increasing the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) benchmark interest rate to 6.00% from 5.50% at the end of the previous year succeeded in keeping core inflation under control.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, industri asuransi mengalami pertumbuhan kembali pada tahun 2023. Berdasarkan siaran pers Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tanggal 31 Maret 2024, pendapatan premi asuransi umum sampai triwulan IV tahun 2023 tercatat Rp103,87 triliun, tumbuh sebesar 15,25% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp90,12 triliun. Sebagian besar lini usaha mencatatkan pertumbuhan positif dan hanya 1 (satu) lini bisnis asuransi umum yang membukukan pertumbuhan negatif sampai dengan triwulan IV tahun 2023. Lini usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Asuransi *Satellite*.

In line with national economic growth, the insurance industry experienced growth again in 2023. Based on a press release from the Indonesian General Insurance Association (AAUI) dated March 31, 2024, general insurance premium income until the fourth quarter of 2023 was recorded at IDR103.87 trillion, growing by 15.25 % compared to the same period in the previous year of IDR90.12 trillion. Most business lines recorded positive growth and only 1 (one) general insurance business line recorded negative growth until the fourth quarter of 2023. The business line that experienced negative growth was Satellite Insurance.

Sementara, untuk klaim industri asuransi umum sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dicatat Rp46,01 triliun atau tumbuh 10,21% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang hanya mencatatkan Rp41,75 triliun. Kenaikan klaim ini terjadi di 9 (sembilan) lini usaha asuransi, tertinggi terjadi pada lini usaha Asuransi *Liability* 158,74% dan Asuransi *Suretyship* 99,52%, sedangkan lini usaha tertinggi yang mencatatkan penurunan klaim yaitu Asuransi *Satellite* dan Asuransi *Property*. Rasio klaim dicatatkan pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 44,30%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar 46,32%.

Meanwhile, claims for the general insurance industry up to the fourth quarter of 2023 were recorded at IDR46.01 trillion or increased by 10.21% compared to the same period in 2022 which only recorded IDR41.75 trillion. This increase in claims occurred in 9 (nine) insurance business lines, the highest occurred in the Liability Insurance business line 158.74% and Suretyship Insurance 99.52%, while the highest business lines that recorded a decrease in claims were Satellite Insurance and Property Insurance. The claims ratio recorded in the fourth quarter of 2023 was 44.30%, a decrease compared to previous year of 46.32%.

Pangsa pasar terbesar pada pencatatan premi dari industri asuransi umum sampai dengan triwulan IV 2023 masih didominasi oleh Asuransi *Property* sebesar 25,50% dan Asuransi *Credit* dengan jumlah proporsi yang dicapai sebesar 21,51%. Kemudian, untuk posisi ketiga yang mengisi pangsa pasar premi asuransi umum selanjutnya adalah Asuransi *Motor Vehicle* dengan proporsi sebesar 18,77%.

The largest market share in premium recording from the general insurance industry up to the fourth quarter of 2023 was still dominated by Property Insurance at 25.50% and Credit Insurance with a total proportion of 21.51%. Then, the third position in the general insurance premium market share was Motor Vehicle Insurance with a proportion of 18.77%.

Kebijakan Strategis Asuransi Jasindo Tahun 2023

Selama tahun 2023, Perusahaan terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional secara tepat dan cepat, serta fokus pada peningkatan pelayanan tertanggung yang sejalan dengan penguatan *Governance, Risk & Compliance* (GRC).

Untuk mencapai tujuan tersebut, di tahun 2023 Asuransi Jasindo berupaya untuk menetapkan fokus pada Segmen *High Priority*, segmen bisnis yang menjadi *core competence* Asuransi Jasindo, yaitu segmen korporasi. Bisnis pada segmen korporasi ini utamanya termasuk pada lini usaha *Property, Marine (cargo & hull), Energy Offshore* dan *Onshore, Engineering, Aviation and Satellite*, serta *Liability*. Selanjutnya atas segmen Korporasi tersebut, Perusahaan membagi fokus bisnis dengan kategori *high priority* ke dalam 2 (dua) segmen yaitu segmen korporasi BUMN dan segmen korporasi Non BUMN.

Transformasi bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan dengan memfokuskan kembali pada segmen korporasi sebagai *core competence* didorong oleh beberapa faktor. Pertama, Perusahaan memiliki pengalaman yang panjang dalam memberikan proteksi terhadap risiko-risiko korporasi dan *mega risk*, serta segmen korporasi dinilai mampu menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Kedua, segmen korporasi memiliki kebutuhan perlindungan risiko yang lebih kompleks dan spesifik, sehingga Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan keahlian dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Lalu ketiga, pembagian fokus bisnis berdasarkan kategori prioritas seperti BUMN dan Non BUMN dilakukan agar Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih tepat dan spesifik sesuai dengan kebutuhan khusus dari masing-masing segmen.

Di tahun 2023, Asuransi Jasindo juga melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Penugasan dan Program Pemerintah. Sejalan dengan aspirasi dari pemegang saham, Perusahaan menargetkan agar Penugasan dan Program Pemerintah dapat memberikan hasil yang *profitable* dan *sustainable*. Program pemerintah sering kali menciptakan peluang pasar baru bagi Perusahaan, sehingga dalam rangka memanfaatkan peluang ini, Perusahaan melakukan intensifikasi dengan mengupayakan penilaian kembali terhadap nilai premi untuk menyesuaikan dengan risiko yang ditanggung, penambahan kerja sama, perbaikan *terms and conditions*, dan peningkatan jumlah kepesertaan. Di sisi lain, ekstensifikasi terhadap Penugasan dan Program Pemerintah juga dilakukan dengan menawarkan produk atau layanan baru yang sesuai dan perluasan jaminan terhadap produk eksisting.

Asuransi Jasindo Strategic Policy in 2023

During 2023, the Company continues to strive to adapt to changing economic conditions and take advantage of the momentum of national economic growth appropriately and quickly, as well as focus on improving insured services in line with strengthening Governance, Risk & Compliance (GRC).

To achieve this goal, in 2023 Asuransi Jasindo will strive to focus on the High Priority Segment, the business segment which is the core competency of Asuransi Jasindo, namely the corporate segment. Business in this corporate segment mainly includes the Property, Marine (cargo & hull), Energy Offshore and Onshore, Engineering, Aviation and Satellite, and Liability business lines. Furthermore, regarding the Corporate segment, the Company divides its business focus with the high priority category into 2 (two) segments, namely the BUMN corporate segment and the Non-BUMN corporate segment.

The business transformation carried out by the Company by refocusing on the corporate segment as a core competency was driven by several factors. First, the Company has long experience in providing protection against corporate and mega risks, and the corporate segment is considered capable of offering more sustainable growth potential. Second, the corporate segment has more complex and specific risk protection needs, thus the Company can allocate resources more efficiently and optimize the use of the expertise and capabilities of its resources. Then third, the division of business focus based on priority categories such as SOE and Non SOE is carried out so as the Company can provide more precise and specific services according to the special needs of each segment.

In 2023, Asuransi Jasindo also intensified and extensified Government Assignments and Programs. In line with the shareholders aspirations, the Company targets that the Government Assignments and Programs can provide profitable and sustainable results. Government programs often create new market opportunities for the Company, thus, to capitalize on these opportunities, the Company has intensified its efforts by seeking to reassess the premium value to adjust to the risks borne, increase cooperation, improve terms and conditions, and increase the number of participants. On the other hand, extensification of Government Assignments and Programs is also carried out by offering appropriate new products or services and expanding warranties for existing products.

Langkah Asuransi Jasindo melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Penugasan dan Program Pemerintah juga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan dalam pertumbuhan bisnis, sehingga Perusahaan dapat terus memberikan perlindungan asuransi secara berkesinambungan dalam mendukung setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Asuransi Jasindo steps are to intensify and extensification of Government Assignments and Programs are also part of efforts to maintain sustainability in business growth, so that the Company can continue to provide insurance protection on an ongoing basis to support every program launched by the Government.

Selain melakukan *refocusing business* pada segmen korporasi, Perusahaan juga melakukan *worksite marketing* dan *cross selling* kepada karyawan-karyawan nasabah korporasi baik di ekosistem BUMN dan Non BUMN untuk memperluas penjualan produk *simple risk* seperti lini usaha Properti, Kendaraan Bermotor, dan Asuransi Perjalanan.

Apart from refocusing business on the corporate segment, the Company also carries out worksite marketing and cross selling to employees of corporate customers in both the SOE and Non-SOE ecosystems to expand sales of simple risk products such as the Property, Motor Vehicle and Travel Insurance business lines.

Latar belakang dilakukannya *worksite marketing* dan *cross selling* kepada karyawan-karyawan nasabah korporasi baik di ekosistem BUMN dan Non BUMN adalah didorong oleh potensi pasar yang besar dan strategi pemasaran yang relatif lebih sederhana. Karyawan korporasi sering kali menjadi segmen pasar yang menarik karena memiliki kebutuhan asuransi yang beragam dan seringkali memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, dengan memanfaatkan ekosistem BUMN dan Non BUMN, Perusahaan dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan visibilitas mereknya di pasar yang luas. Dengan menargetkan produk *simple risk* seperti asuransi properti, kendaraan bermotor, dan asuransi perjalanan, Perusahaan dapat menjangkau karyawan-karyawan yang membutuhkan perlindungan dasar terhadap risiko sehari-hari dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan bagi mereka.

The background for conducting worksite marketing and cross selling to employees of corporate customers in both the SOE and Non-SOE ecosystems is driven by large market potential and relatively simpler marketing strategies. Corporate employees are often an attractive market segment as they have diverse insurance needs and often have a high level of trust in the products offered by the companies where they work. In addition, by utilizing the SOE and Non SOE ecosystem, the Company can expand its marketing reach and increase its brand visibility in a wide market. By targeting simple risk products such as property, motor vehicle and travel insurance, the company can reach employees who need basic protection against everyday risks with an approach that is easy to understand and relevant to them.

Tujuan dari strategi *worksite marketing* dan *cross selling* ini adalah untuk memperluas penjualan produk-produk *simple risk* kepada karyawan nasabah korporasi dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan berfokus pada produk *simple risk*, Perusahaan dapat menyediakan solusi asuransi yang sederhana namun penting bagi kebutuhan perlindungan finansial karyawan-karyawan tersebut.

This worksite marketing and cross selling strategy aims to expand sales of simple risk products to employees of corporate customers in an efficient and effective way. By focusing on simple risk products, the Company can provide simple yet important insurance solutions for the financial protection needs of these employees.

Agar dapat memperoleh hasil yang optimal, Perusahaan juga melakukan penguatan *support business* melalui *underwriting*, klaim dan *reinsurance strategy* guna mencapai hasil *underwriting* yang positif dan *underwriting* yang *prudent*. Sebagaimana diketahui bagi sebuah perusahaan asuransi, proses *underwriting*, klaim dan perencanaan reasuransi merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi tertanggung. Tentunya, hal ini menjadi fokus Perusahaan di tahun 2023 agar dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada seluruh tertanggung dan profitabilitas jangka panjang.

In order to obtain optimal results, the Company also strengthens business support through underwriting, claims and reinsurance strategies to achieve positive underwriting returns and prudent underwriting. As is known for an insurance company, the underwriting process, claims and reinsurance planning are the main things in providing satisfactory service for the insured. Surely, this is the Company's focus in 2023 to provide sustainable services to all insured and long-term profitability.

Melalui penguatan *support business*, Perusahaan memiliki tujuan untuk selektif dan hati-hati dalam pemilihan risiko, menetapkan premi yang tepat sesuai *risk exposure*, melakukan manajemen klaim yang efisien, dan penggunaan reasuransi yang cerdas. Perusahaan berharap dapat mengoptimalkan profitabilitas terhadap setiap portofolio bisnis, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar dan juga meminimalisir risiko yang bersumber dari luar (eksternal). Dengan demikian, Perusahaan berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan serta memberikan *added value* yang lebih besar kepada pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya.

By strengthening business support, the Company aims to be selective and careful in assessing risks, setting appropriate premiums according to risk exposure, carrying out efficient claims management, and utilizing smart reinsurance strategies. The company hopes to optimize the profitability of each business portfolio, increase resilience to market changes minimize any external risks. In this way, the Company strives to create a more stable and sustainable business environment and provide greater added value to policyholders and other stakeholders.

Untuk mendukung strategi bisnis guna tercapainya target dan sasaran yang ditetapkan Pemegang Saham kepada Perusahaan, Perusahaan menerapkan strategi *enablers* yang terdiri dari:

1. Pengembangan Tata Kelola & Manajemen Risiko melalui *Risk Control Self Assessment* (RSCA), pengembangan sistem GRC dan penerapan *risk appetite* serta *risk tolerance* untuk proses bisnis;
2. Pengembangan teknologi informasi yang dilakukan secara jangka panjang untuk peningkatan efisiensi operasional;
3. Fokus persiapan implementasi PSAK 74 yang wajib di implementasi di Perusahaan pada tahun 2025;
4. Peningkatan kinerja keuangan Perusahaan yang tidak hanya dilakukan dari sisi biaya namun juga dari sisi investasi melalui penyempurnaan sistem investasi (INVESTPRO); dan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan untuk mendukung *core competence* Perusahaan.

To support business strategies to achieve targets and targets set by Shareholders for the Company, the Company implements enablers strategy consisting of:

1. Governance & Risk Management Development through Risk Control Self Assessment (RSCA), GRC system development and risk appetite and risk tolerance implementation for business processes;
2. Long-term development of information technology to increase operational efficiency;
3. Focus on preparations for the PSAK 74 implementation which must be implemented in the Company in 2025;
4. Improving the Company's financial performance not only from the cost but also from the investment through the investment system (INVESTPRO) enhancement; and
5. Human Resources Development through increasing and developing employee competencies to support the Company's core competencies.

Dalam hal strategi investasi, tahun 2023 Perusahaan melakukan penempatan dana pada instrumen investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kondisi pasar yang tidak pasti dan potensi risiko yang terkait dengan volatilitas ekonomi global maupun nasional. Perusahaan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi eksposur terhadap risiko dan melindungi nilai aset yang dimiliki. Selain itu, fokus pada instrumen investasi yang lebih menguntungkan juga diarahkan untuk mendukung peningkatan Aset Yang Diperkenankan (AYD) Perusahaan, yang merupakan komponen penting dalam perhitungan *Risk Based Capital* (RBC) Perusahaan.

In terms of investment strategy, in 2023 the Company places funds in safer and more profitable investment instruments. This decision is motivated by uncertain market conditions and potential risks associated with global and national economic volatility. The Company makes efforts to reduce exposure to risk and protect the value of its assets. Additionally, the focus on more profitable investment instruments is also aimed at supporting the increase of the Company's Allowable Assets (AYD), which is an important component in calculating the Company's Risk Based Capital (RBC).

Peran Direksi dalam Perumusan, Implementasi dan *Monitoring* Kebijakan Strategis Perusahaan

Direksi memiliki peran yang sangat sentral dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Sebagai penanggungjawab pengelolaan Perusahaan, Direksi harus dapat menerjemahkan arahan dari pemegang saham dan menuangkannya dalam bentuk strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Strategi dan kebijakan strategis tersebut juga harus sejalan dengan visi dan misi Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan setiap tahun disusun dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tidak hanya berisikan strategi dan kebijakan strategis, tetapi juga target-target Perusahaan. RKAP yang disusun Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena itu Direksi perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Komisaris sebelum mengajukan persetujuan kepada Para Pemegang Saham.

Dalam menyusun RKAP, Direksi melibatkan seluruh unit kerja untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kekuatan dan kelemahan Perusahaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Penyusunan target Perusahaan dilakukan secara *bottom up*, dimana masing-masing unit kerja ditugaskan untuk menyusun target dan strategi pencapaian target baik untuk satu tahun ke depan maupun untuk jangka panjang, yang diselaraskan dengan Arahan Pemegang Saham. Selanjutnya rencana target dan strategi pencapaian target tersebut dilaporkan kepada Direksi untuk bersama-sama dilakukan *review*. Secara paralel dilakukan pengumpulan semua data, baik operasional maupun keuangan dari seluruh entitas anak.

Direksi memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP dilaksanakan sesuai rencana. Direksi secara berkala melakukan rapat koordinasi bersama seluruh unit kerja yang ada untuk melakukan *monitoring* serta mengetahui sejauh mana strategi dan kebijakan strategis yang ditetapkan Perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana, dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala atas implementasi strategi tersebut.

The Role of the Board of Directors in Formulating, Implementing and Monitoring the Company's Strategic Policy

The Board of Directors has a very central role in formulating the Company's strategy and strategic policies. As the person in charge of the Company management, the Board of Directors must be able to translate directions from shareholders and express them in the form of Company's strategies and strategic policies. The strategy and strategic policies must also be in line with the Company's vision and mission as well as the Company's Long Term Plan (RJPP).

The Company's strategies and strategic policies are prepared and outlined every year in the form of a Company Work Plan and Budget (RKAP) which not only contains strategies and strategic policies, but also the Company's targets. The RKAP prepared by the Board of Directors must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS), therefore the Board of Directors needs to first consult with the Board of Commissioners before submitting approval to the Shareholders.

In preparing the RKAP, the Board of Directors involves all work units to obtain a complete picture of the Company's strengths and weaknesses and the steps that must be taken to optimize existing potential. The preparation of Company targets is carried out in bottom-up manner each work unit is assigned to develop targets and strategies for achieving targets both for the next year and for the long term, aligned with Shareholder Directions. Furthermore, the target plans and target achievement strategies are reported to the Board of Directors for joint review. In parallel, all data is collected, both operational and financial, from all subsidiaries.

The Board of Directors has a very strategic role in ensuring that the Company's strategies and strategic policies that have been set out in the RKAP are implemented according to plan. The Board of Directors regularly holds coordination meetings with all existing work units to carry out monitoring and find out to what extent the strategies and strategic policies set by the Company are running according to plan, and what are the obstacles to the implementation of these strategies.

Tantangan yang Dihadapi Perusahaan

Tahun 2023, Perusahaan mengalami *loss* bisnis pada beberapa *key account* yang disebabkan dampak rasio solvabilitas Perusahaan yang berada di bawah ketentuan pada tahun 2022. Kondisi ini diawali oleh adanya produk Perusahaan (Asuransi Kredit) yang dijalankan secara tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan kondisi tersebut, Perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan berhasil memaksimalkan realisasi atas 6 inisiatif utamanya. Upaya-upaya yang telah dilakukan Perusahaan berhasil memberikan dampak yang nyata, sehingga rasio solvabilitas Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan (*audited*) Tahun 2022 kembali berada diatas ketentuan.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih di tahun 2023 dan kondisi Perusahaan yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan utama bagi Asuransi Jasindo sepanjang tahun 2023.

Selain itu, kondisi pasar reasuransi sedang mengalami *hardening* serta terdapat penurunan kapasitas reasuransi dalam negeri yang membuat kapasitas reasuransi menjadi terbatas sehingga Perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan di antaranya dengan melakukan optimalisasi kinerja *underwriting* serta kapasitas reasuransi dalam rangka peningkatan kinerja keuangan Perusahaan.

Kinerja Asuransi Jasindo Tahun 2023

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023, Asuransi Jasindo dapat membukukan pendapatan premi - neto sebesar Rp1,17 triliun, turun Rp207,57 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,37 triliun. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan cadangan Teknis dan turunnya premi reasuransi. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan cadangan Teknis dan turunnya premi reasuransi, khususnya dari lini usaha Property dan Aviation yang mengalami penurunan produksi premi. Adapun sebagian besar premi reasuransi bersumber dari segmen bisnis korporasi yaitu lini usaha *Property, Energy Offshore, Satellite* dan *Marine Hull*. Hal tersebut sesuai dengan arah bisnis Perusahaan yang akan fokus pada segmentasi korporasi.

Kendati pendapatan premi - neto Perusahaan mengalami penurunan, namun Asuransi Jasindo dapat meraih beberapa kesuksesan di tahun 2023, antara lain peningkatan *premium rate* pada lini bisnis *energy*, penambahan objek pertanggungan pada Asuransi Barang Milik Negara, peningkatan sinergi BUMN, di mana Perusahaan menjadi bagian dalam asuransi peluncuran satelit Merah Putih 2 milik PT Telkomsat, dan Perbaikan petunjuk teknis dan *terms and conditions* pada asuransi Penugasan dan Program Pemerintah.

Challenges Faced by the Company

In 2023, the Company experienced a business loss in several key accounts due to the impact of the ratio The Company's solvency is under the provisions in 2022. This condition was initiated by the Company's product (Credit Insurance) which was not implemented in accordance with procedures. Based on these conditions, the Company prepared a Financial Restructuring Plan (RPK) and succeeded in maximizing the realization of its 6 main initiatives. The efforts that have been made by the Company have succeeded in having a real impact, so that the Company's solvency ratio based on the 2022 Financial Report (audited) is once again above the provisions.

In the midst of economic conditions that have not fully recovered in 2023 and the Company's condition which has experienced a decline in the last few years, this is the main challenge for Asuransi Jasindo throughout 2023.

In addition, conditions in the reinsurance market are experiencing hardening and there is a decline in domestic reinsurance capacity which makes reinsurance capacity limited so that the Company continues to make improvements, including by optimizing underwriting performance and reinsurance capacity in order to improve the Company's financial performance.

Asuransi Jasindo Performance in 2023

In the midst of various challenges faced throughout 2023, Asuransi Jasindo was able to record a net premium income of IDR1.17 trillion, down IDR207.57 billion from the previous year's of IDR1.37 trillion. This decrease was mainly caused by an increase in Technical reserves and a decrease in reinsurance premiums. This decrease was mainly caused by an increase in Technical reserves and a decrease in reinsurance premiums, particularly from the Property and Aviation business lines which experienced a decrease in premium production. The majority of reinsurance premiums come from the corporate business segment, namely the Property, Energy Offshore, Satellite and Marine Hull business lines. This is in line with the Company's business direction which will focus on corporate segmentation.

Even though the Company's net premium income has decreased, Asuransi Jasindo achieved several successes in 2023, including increasing the premium rate in the energy business line, adding insurance objects to State Property Insurance, increasing BUMN synergy, where the Company is part of the insurance launch PT Telkomsat's Merah Putih 2 satellite, and improvements to technical instructions and terms and conditions for Government Assignments and Programs insurance.

Sesuai neraca keuangan per 31 Desember 2023, Perusahaan berhasil memaksimalkan pencapaian target RKAP tahun 2023, di antaranya premi bruto dan total aset. Perolehan premi bruto tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,31 triliun atau 83% dari RKAP 2023, atau 102% dibandingkan tahun 2022.

Realisasi pendapatan (beban) *underwriting* sebesar Rp240,60 miliar atau 62% dari RKAP 2023, atau 351,13% dibandingkan tahun 2022 dan pencapaian hasil investasi tercatat sebesar Rp221,37 miliar atau 125% dari RKAP 2023, atau 47% dibandingkan tahun 2022.

Dengan kinerja tersebut, laba bersih Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp103,52 miliar atau 85% dari RKAP 2023, atau 45% dibandingkan tahun 2022. Kendati laba bersih Perusahaan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun laba bersih tahun 2023 seluruhnya berasal dari *core business* Perusahaan, sedangkan laba tahun 2022 sebagian berasal dari divestasi saham entitas anak.

Di tahun 2023, aset Perusahaan tercatat sebesar Rp15,76 triliun atau 99% dari target atau 98% dari tahun 2022.

Prospek Usaha Asuransi Jasindo

Tantangan bagi ekonomi global dan nasional akan terus berlanjut di tahun 2024 seiring masih berlanjutnya konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia tetap optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil di atas 5%.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan kinerja ekspor dan investasi yang diharapkan akan kembali meningkat.

Pada tahun 2024, Perusahaan berupaya meningkatkan *market position* di industri asuransi umum nasional melalui peningkatan *market share* di seluruh lini bisnis dengan tetap mempertimbangkan *risk appetite* Perusahaan dan tetap fokus pada peningkatan *market position* pada segmen korporasi sebagai *core competence* sehingga Perusahaan menargetkan kenaikan realisasi pendapatan premi sebesar Rp5,62 triliun di tahun 2024 di mana target pendapatan premi ini meningkat 69,86% dari realisasi pendapatan premi tahun 2023 yang sebesar Rp3,31 triliun.

According to the financial balance as of December 31, 2023, the Company succeeded in maximizing the achievement of the 2023 RKAP targets, including gross premiums and total assets. Gross premium income in 2023 was recorded at IDR3.31 trillion or 83% of the 2023 RKAP, or 102% compared to 2022.

Realization of underwriting income (expense) was IDR240.60 billion or 62% of the 2023 RKAP, or 351.13% compared to 2022 and achievement of investment return was recorded at IDR221.37 billion or 125% of the 2023 RKAP, or 47% compared to 2022.

With this performance, the Company's net profit in 2023 is IDR103.52 billion or 85% of the 2023 RKAP, or 45% compared to 2022. Even though the Company's net profit in 2023 has decreased compared to the previous year, the net profit in 2023 comes entirely from the Company's core business, while profit in 2022 will partly come from the divestment of shares in subsidiaries.

In 2023, the Company's assets was recorded at IDR15.76 trillion or 99% of the target or 98% of 2022.

Asuransi Jasindo Business Prospects

Challenges for the global and national economy will continue in 2024 as geopolitical conflicts continue in Europe and the Middle East. Amidst these conditions, the Indonesian government remains optimistic that the Indonesian economy will grow stably at above 5%.

In the 2024 State Revenue and Expenditure Budget (APBN), the Indonesian government targets economic growth of 5.2%. This economic growth is supported by strong domestic consumption and export and investment performance which is expected to increase again.

In 2024, the Company seeks to increase its market position in the national general insurance industry by increasing market share in all business lines while taking into account the Company's risk appetite and remaining focused on increasing market position in the corporate segment as a core competency thus the Company targets an increase in realized premium income of IDR5.62 trillion in 2024, where the premium income target increases by 69.86% from the realized premium income in 2023 of IDR3.31 trillion.

Berdasarkan sasaran Perusahaan tahun 2024, Perusahaan akan fokus kepada tema yang telah ditetapkan yaitu: "*Growing and Expanding Our Business*" yang didukung oleh inisiatif-inisiatif strategis Perusahaan yang terbagi menjadi 2 (dua) strategi yaitu strategi bisnis dan strategi perbaikan *enablers* yang akan dijalankan Perusahaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. *Customer Engagement & Strong Relationship*
   Perusahaan berupaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024, sehingga diperlukan strategi untuk melakukan *re-engage key account customer* melalui strategi bisnis yaitu *customer engagement & strong relationship* yang diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan GWP yang bersumber dari segmen *large account* dan segmen *mid-market*.

   Selain itu, Perusahaan juga akan berusaha memberikan nilai tambah (*added value*) kepada tertanggung dengan memperkuat *salesforce* berkonsep *risk management partnership*. Sehingga peran tim bisnis Perusahaan cukup penting, karena menjadi fasilitator yang harus paham dengan kondisi proteksi yang dibutuhkan oleh tertanggung.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penugasan dan Program Pemerintah
   Menjaga keberlanjutan inisiatif strategis Perusahaan di tahun sebelumnya, Perusahaan di tahun 2023 tetap berupaya mempertahankan agar Penugasan dan Program Pemerintah dapat memberikan hasil yang *profitable* dan *sustainable*. Untuk mengakomodir hal dimaksud, Perusahaan akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Penugasan dan Program Pemerintah. Inisiatif strategis tersebut akan diupayakan melalui *improvement* layanan, evaluasi *terms and conditions*, pengembangan lini bisnis baru, dan optimalisasi terhadap produk eksisting.

3. Penetrasi Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)
   Selain melakukan peningkatan penetrasi pada segmen korporasi *large account* dan *mid market*, Perusahaan akan melakukan peningkatan penetrasi pada segmen pasar kecil dan menengah dengan fokus utama pada penggarapan lini bisnis Harta Benda, Kendaraan Bermotor, dan Kecelakaan Diri. Perusahaan berkomitmen untuk tetap menerapkan *prudent underwriting* dalam setiap penggarapan bisnis di setiap segmen.

4. Peningkatan *Underwriting Performance & Reinsurance Capacity*
   Dalam rangka memaksimalkan perolehan laba Perusahaan, Perusahaan akan meningkatkan hasil *underwriting* dan pendapatan *underwriting* dengan cara meningkatkan *market share* serta *risk retention* atas lini bisnis yang merupakan *risk appetite* Perusahaan.

Based on the Company's targets for 2024, the Company will focus on the predetermined theme, namely: "Growing and Expanding Our Business" supported by the Company's strategic initiatives which are divided into 2 (two) strategies, namely business strategy and enablers improvement strategy that will be implemented by the Company to achieve the targets set, including:

1. Customer Engagement & Strong Relationship
   The company strives to achieve the targets set in 2024, thus strategy is needed to re-engage key customer accounts through business strategies, namely customer engagement & strong relationships which are expected to maximize GWP revenue sourced from the large account segment and mid-market segment.

   In addition, the Company will also seek to provide added value to the insured by strengthening its sales force with a risk management partnership concept. Therefore the Company's business team plays quite important role, as serving as facilitators who must understand the protection required by the insured.

2. Intensification and Extensification of Government Assignments and Programs
   Maintaining the sustainability of the Company's strategic initiatives in the previous year, in 2023 the Company continues to strive to ensure that Government Assignments and Programs can provide profitable and sustainable results. To accommodate this matter, the Company will intensify and extensify Government Assignments and Programs. This strategic initiative will be pursued through service improvement, terms and conditions evaluation, developing new business lines, and optimizing existing products.

3. Small Medium Enterprise (SME) Segment Penetration
   In addition to increasing penetration in the large account and mid market corporate segments, the Company will increase penetration in the small and medium market segments with a main focus on developing the Property, Motor Vehicle and Personal Accident business lines. The Company is committed to continuing to implement prudent underwriting in every business development in every segment.

4. Increasing Underwriting Performance & Reinsurance Capacity
   In order to maximize the Company's profit, the Company will increase underwriting returns and underwriting income by increasing market share and risk retention for business lines which constitute the Company's risk appetite. Some of the efforts that the Company will make

Beberapa upaya yang akan dilakukan Perusahaan adalah melakukan *review* dan *monitoring* terhadap setiap faktor risiko, tersedianya kapasitas reasuransi untuk mendukung penetrasi bisnis, serta melakukan peningkatan retensi dan *share* Perusahaan dengan tetap memperhatikan *risk appetite*, *prudent underwriting* dan *exposure risk*.

Untuk mendukung strategi bisnis guna tercapainya target dan sasaran yang ditetapkan Pemegang Saham kepada Perusahaan pada tahun 2024, Perusahaan menerapkan strategi *enablers* yang terdiri dari:

1. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko;
2. Penguatan infrastruktur IT dan IT *Business Support*;
3. Pelaksanaan *Dry Run* PSAK 74;
4. Optimalisasi Penagihan Piutang dan Subrogasi;
5. Mewujudkan SDM Unggul yang Produktif dan Berdaya Saing; dan
6. Optimalisasi Kinerja Anak Perusahaan.

Tahun 2024, Perusahaan menargetkan pendapatan Premi Bruto sebesar Rp5,62 triliun, meningkat 69,86% dari realisasi pada tahun 2023. Peningkatan terbesar adalah pada lini bisnis *Property*, dengan adanya asumsi *winning back* atas *key account* yang tidak didapatkan di tahun 2023 serta terdapatnya pertumbuhan kinerja anak perusahaan di tahun 2024. Hasil *Underwriting* ditargetkan sebesar Rp618,33 miliar, naik sebesar 156,99% dari pencapaian Perusahaan di tahun 2023. Adapun Perusahaan menargetkan perolehan Hasil Investasi sebesar Rp226,56 miliar, meningkat 2,35% dari perolehan tahun 2023. Selain peningkatan pada posisi investasi, Perusahaan memproyeksikan peningkatan pada hasil investasi yang bersumber dari obligasi pemerintah dan hasil dari penyertaan saham. Target Laba Bersih adalah sebesar Rp226,43 miliar, meningkat sebesar 118,73% dari realisasi tahun 2023. Selain itu, Perusahaan telah menetapkan target *Risk Based Capital* (RBC) sebesar 160,21% dan Rasio Kecukupan Investasi sebesar 134,17%.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan teknologi informasi dalam jangka panjang sesuai dengan *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) yang telah disusun. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, *customer/producer experience*, dan manajemen informasi. Fokus utama adalah pada standarisasi model operasional, memastikan bahwa sistem teknologi yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan secara menyeluruh dan memberikan dampak positif dalam semua aspek bisnis.

are reviewing and monitoring each risk factor, providing reinsurance capacity to support business penetration, as well as increasing the Company's retention and share while still paying attention to risk appetite, prudent underwriting and risk exposure.

To support the business strategy to achieve the targets and objectives set by Shareholders for the Company in 2024, the Company implements enablers strategies consisting of:

1. Strengthening Governance & Risk Management;
2. Strengthening IT infrastructure & IT Business Support;
3. Implementation of PSAK 74 Dry Run;
4. Optimization of Receivables Collection & Subrogation;
5. Creating Superior, Productive and Competitive Human Resources; and
6. Optimizing Subsidiary Performance.

In 2024, the Company targets Gross Premium income of IDR5.62 trillion, an increase of 69.86% from the realization in 2023. The biggest increase is in the Property business line, due to the assumption of winning back for key accounts that were not obtained in 2023 as well as growth of subsidiary performance in 2024. Underwriting Return is targeted at IDR618.33 billion, an increase of 156.99% from the Company's achievements in 2023. The Company targets Investment Return of IDR226.56 billion, an increase of 2.35% from the return in 2023. In addition to the increase in investment position, the Company projects an increase in investment return originating from government bond and return from equity investment. The Net Profit target is IDR226.43 billion, an increase of 118.73% from the realization in 2023. In addition, the Company has set a Risk Based Capital (RBC) target of 160.21% and an Investment Adequacy Ratio of 134.17%.

Information Technology Development and Digitalization

The Company is committed to develop information technology in the long term in accordance with the Information Technology Master Plan (MPTI) prepared. This step is taken to improve operational efficiency, customer/producer experience, and information management. The main focus is on standardizing operational models, ensuring that the technology systems implemented can satisfy the Company's overall needs and provide a positive impact in all aspects of the business.

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap aplikasi utama STAR yang merupakan aplikasi internal Perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dengan melakukan perubahan yang mendukung strategi bisnis dan dapat menjadi *enabler* terhadap strategi tersebut. Berkenaan dengan digitalisasi, dilakukan pengembangan aplikasi dalam rangka *reengineering* proses bisnis yang ada, terutama untuk melanjutkan proses sentralisasi, simplifikasi dan percepatan layanan kepada semua *stakeholder*.

Sejalan dengan penguatan sistem TI dan digitalisasi, Perusahaan juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap gangguan sistem dan keamanan siber. Perusahaan telah menetapkan prosedur pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai pedoman bagi pengguna layanan TI untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana pada layanan Teknologi Informasi serta langkah pemulihannya. Penerapan DRP diuji setiap tahun melalui kegiatan *drilling test* dari *Data Center* ke *Disaster Recovery Center* (DRP) serta *exercise* pelaksanaan DRP.

Sebagai upaya preventif, Perusahaan telah melakukan kegiatan peningkatan keamanan data dan informasi meliputi:
a. *Managed service Security Operation Center* (SOC);
b. Melakukan *penetration testing*;
c. Melakukan *renewal tools security* yang sudah jatuh tempo;
d. Implementasi *Previleged Access Management* (PAM);
e. *Managed services email provider* dan *mail server security*; dan
f. Melakukan *zero trust assessment* sesuai dengan kerangka kerja *National Institute of Standard and Technology* (NIST).

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Asuransi Jasindo berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional. Bagi Asuransi Jasindo, penerapan GCG merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi pemegang saham namun juga segenap pemangku kepentingan. Adapun komitmen terhadap penerapan prinsip GCG diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

In 2023, the Company makes adjustments to the main application STAR, which is the application internal by the Company to carry out all its operational activities by making changes that support the business strategy and can become an enabler for the strategy. With regard to digitalization, application development is carried out in the context of reengineering existing business processes, especially to continue the process of centralization, simplification and acceleration of services to all stakeholders.

In line with strengthening IT systems and digitalization, the Company also prepares anticipatory steps for system interference and cyber security. The Company has established procedures for Disaster Recovery Plan (DRP) implementation as a guideline for IT service users to determine the steps that must be taken in case of any disaster in Information Technology services as well as the recovery steps. The DRP implementation is tested annually through drilling test activities from the Data Center to the Disaster Recovery Center as well as DRP implementation exercises.

As a preventive measure, the Company has carried out activities to improve data and information security including:
a. Managed service Security Operation Center (SOC);
b. Conducting penetration testing;
c. Renewal of any due security tools;
d. Privileged Access Management (PAM) implementation;
e. Managed services email provider and mail server security; and
f. Conducting a zero trust assessment in accordance with the National Institute of Standards and Technology (NIST) framework.

Implementation of Corporate Governance Principles

Asuransi Jasindo is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably as an inseparable part of operational activities. For Asuransi Jasindo, GCG implementation is one of steps to increase value and sustainable long-term business growth, not only for shareholders but also all stakeholders. The commitment to implementing GCG principles is realized through the following:

a. The Company implements the Good Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct consistently.

b. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
c. Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan sertifikasi ISO 37001:2016.
d. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*Whistleblowing System*).

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/2023"). Di samping sosialisasi secara berkala terkait penetapan peraturan perundang-undangan dimaksud, Perusahaan melakukan tindak lanjut berupa penyesuaian terhadap kebijakan internal yang mengatur pengadaan barang dan/atau jasa, kerja sama, penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap, serta penilaian tingkat kesehatan Perusahaan terhadap PER-02/2023.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2023, komposisi Direksi Asuransi Jasindo mengalami perubahan sesuai keputusan pemegang saham di luar RUPS yang memberhentikan dengan hormat Bayu Rafisukmawan sebagai Direktur Keuangan dan Investasi dan Linggarsari Suharso sebagai Direktur SDM dan Umum serta mengangkat Jhon Harlen Butar-Butar sebagai Direktur Keuangan dan Investasi dan Dewi Utari sebagai Direktur SDM dan Umum. Dengan demikian, komposisi Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Andy Samuel	: Direktur Utama
Diwe Novara	: Direktur Pengembangan Bisnis
Syah Amondaris	: Direktur Bisnis Strategis
Ocke Kurniandi	: Direktur Operasional
Jhon Harlen Butar-Butar	: Direktur Keuangan dan Investasi
Dewi Utari	: Direktur SDM & Umum

Atas nama Asuransi Jasindo, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bayu Rafisukmawan dan Linggarsari Suharso atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Asuransi Jasindo.

b. The Company coordinates the management and administration of the State Administrator's Wealth Report (LHKPN).
c. The Company has implemented an Anti-Bribery Management System in accordance with ISO 37001:2016 certification.
d. The Company implements a gratification control program in accordance with applicable regulations.
e. The Company implements a policy regarding reporting system for suspected irregularities in the Company (Whistleblowing System).

In 2023, the Company made ratification on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises ("PER-02/2023"). In addition to regular dissemination regarding the stipulation of statutory regulations, the Company carries out follow-up actions in the form of adjustments to internal policies governing the procurement of goods and/or services, cooperation, write-offs and transfers of fixed assets, as well as assessing the Company's soundness level against PER-02/2023.

Changes in the Board of Directors Composition

In 2023, the composition of the Board of Directors of Asuransi Jasindo changed according to the shareholder decision outside the GMS which honorably dismissed Bayu Rafisukmawan as Director of Finance and Investment and Linggarsari Suharso as Director of HR and General Affairs and appointed Jhon Harlen Butar Butar as Director of Finance and Investment and Dewi Utari as Director Director of HR and General Affairs. Thus, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Andy Samuel	: President Director
Diwe Novara	: Director of Business Development
Syah Amondaris	: Director of Strategic Business
Ocke Kurniandi	: Director of Operations
Jhon Harlen Butar-Butar	: Director of Finance and Investment
Dewi Utari	: Director of HR & General Affairs

On behalf of Asuransi Jasindo, we express our appreciation and gratitude to Bayu Rafisukmawan and Linggarsari Suharso for their dedication and contributions while serving as members of the of Asuransi Jasindo.

Penutup

Direksi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pelanggan atas kepercayaan, loyalitas, dan dukungannya, yang telah menopang kinerja Perusahaan sehingga mendapatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2023. Direksi juga berterima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah kondisi tahun 2023 yang dinamis. menggembirakan di tahun 2023.

Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas dukungan dan nasihat yang sangat membantu manajemen untuk mencapai target. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk OJK dan Kementerian BUMN.

Akhir kata, segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk senantiasa memberikan nilai yang berkelanjutan serta hak-hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan, sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Closing

The Board of Directors expresses its highest appreciation to customers for their trust, loyalty and support, which has supported the Company's thereby achieving encouraging results in 2023. The Board of Directors also thanks all employees who have worked hard amidst the dynamic conditions of 2023.

The Board of Directors would like to thank the Board of Commissioners for the support and advice which has really helped management to achieve targets. We also thank all stakeholders, including the OJK and the Ministry of BUMN.

Finally, the entire Board of Directors is committed to always providing sustainable value and the rights of shareholders and stakeholders, in line with the Company's values and the principles of Good Corporate Governance.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024
Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Andy Samuel
Direktur Utama
President Director

Diwe Novara
Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Development

Syah Amondaris
Direktur Bisnis Strategis
Director of Strategic Business

Jhon Harlen Butar-Butar
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Ocke Kurniandi
Direktur Operasional
Director of Operations

Dewi Utari
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia

Declaration Letter of the Board of Commissioners regarding Responsibility for Annual Report 2023 of PT Asuransi Jasa Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2023 ini telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Asuransi Jasa Indonesia for the year 2023 has been accurately presented and we take responsibility for the accuracy of the content of the Annual Report, as long as the information and facts contained therein do not contradict applicable laws and regulations.

We hereby make this statement sincerely.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Ngalim Sawego
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrent Independent Commissioner

Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Indah Anggoro Putri
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia

Declaration Letter of the Board of Commissioners regarding Responsibility for Annual Report 2023 of PT Asuransi Jasa Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2023 ini telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Asuransi Jasa Indonesia for the year 2023 has been accurately presented and we take responsibility for the accuracy of the content of the Annual Report, as long as the information and facts contained therein do not contradict applicable laws and regulations.

We hereby make this statement sincerely.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Direksi
Board of Directors

Andy Samuel
Direktur Utama
President Director

Diwe Novara
Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Development

Syah Amondaris
Direktur Bisnis Strategis
Director of Strategic Business

Jhon Harlen Butar-Butar
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Ocke Kurniandi
Direktur Operasional
Director of Operations

Dewi Utari
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs

03

Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Umum Perusahaan

General Company Information

Nama Perusahaan Company Name	PT Asuransi Jasa Indonesia
Nama Singkatan Abbreviated Name	Asuransi Jasindo
Bidang Usaha Business Field	Asuransi Umum General Insurance
Status Perusahaan Company Status	Anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Indonesia Financial Group (IFG) Subsidiary of State-Owned Enterprises (SOE) of Indonesia Financial Group (IFG)
Kepemilikan Ownership	• 1 lembar saham seri A dwiwarna milik Negara Republik Indonesia • 424.999 lembar saham Seri B milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • 1 share of series A Dwiwarna owned by the State of the Republic of Indonesia • 424,999 shares of series B owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Dasar Hukum Kepemilikan Legal Basis of Ownership	Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Tanggal Pendirian Date of Establishment	2 Juni 1973 June 2, 1973
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/321/19 tanggal 26 Oktober 1973 Decree of Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A.5/321/19 dated October 26, 1973
Akta Pendirian Deed of Establishment	Akta Pendirian Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973 diubah terakhir dengan Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 15 November 2022. Deed of Establishment Deed of Notary Mohamad Ali No. 1 dated June 2, 1973 last amended by Notarial Deed of Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn Number 13 dated November 15, 2022.
Produk Products	Asuransi Jasindo memiliki beragam produk yang dikelompokkan ke dalam 15 lini usaha, yaitu Asuransi Pengangkutan, Asuransi Harta Benda, Asuransi Aviation, Asuransi Satelit, Asuransi Rekayasa, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Aneka, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kredit, Asuransi Keuangan, Asuransi Energy Onshore & Asuransi Energy Offshore. Asuransi Jasindo offers various products which are categorized into 15 lines of business: Cargo Insurance, Property Insurance, Aviation Insurance, Satellite Insurance, Engineering Insurance, Marine Hull Insurance, Motor Insurance, Liability Insurance, Miscellaneous Insurance, Personal Accident Insurance, Health Insurance, Credit Insurance, Financial Insurance, Onshore Energy Insurance & Offshore Energy Insurance.
Jaringan Kantor Office Network	Jaringan dan operasional Asuransi Jasindo dilakukan melalui 30 *Representative Office* yang tersebar di seluruh Indonesia. Asuransi Jasindo network and operations are conducted through 30 Representative Offices spread throughout Indonesia.
Kelompok Usaha Business Group	Entitas Anak Perusahaan | Subsidiaries: • PT Mitracipta Polasarana • PT Asuransi Jasindo Syariah Entitas Asosiasi | Associates: • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia • PT Asrinda Arthasangga • PT Asuransi Maipark Indonesia • PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Jumlah Karyawan Number of Employees	630 orang 630 people
Kantor Pusat Head Office	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21, RW. 10, Kebon Sirih, Kec. | District Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 Telepon | Telephone : (021) 3924737 *Contact Center* : 1500073 Surel | E-mail : contactcenter@asuransijasindo.co.id Situs Elektronik | Website : www.jasindo.co.id
Jejaring Sosial Social Network	Facebook : Asuransi Jasindo Twitter : @JasindoID Instagram : jasindo.id Youtube : Asuransi Jasindo
Hubungan Investor Investor Relations	Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary Telepon | Telephone : (021) 3924737

Sekilas Asuransi Jasindo

Overview of Asuransi Jasindo

Kehadiran PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang dikenal dengan nama "Asuransi Jasindo" tidak dapat dilepaskan dari bagian sejarah perjalanan bangsa dan Tanah Air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1945 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Inggris yang berkedudukan di Jakarta. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, ditempuh melalui Perpu No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1967, Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983.

Asuransi Jasindo merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Namun demikian, pada tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 di mana kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebesar 424.999 lembar saham Seri B pada Perseroan dialihkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Pengalaman Asuransi Jasindo selama 50 tahun dalam mengelola Asuransi dibuktikan dengan kepercayaan yang diperoleh dalam penutupan *mega risk* seperti peluncuran asuransi satelit BRISat dan satelit Telkom 3S. Selain itu Asuransi Jasindo juga mendapatkan kepercayaan dalam pengelolaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Program ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu program yang diandalkan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian nasional di bidang pangan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan pangan nasional, serta membantu perekonomian para petani. Pengelolaan risiko yang baik didukung oleh sistem teknologi informasi yang sangat memadai. Asuransi Jasindo dapat terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan kepada Tertanggung.

The existence of PT Asuransi Jasa Indonesia, or known as "Asuransi Jasindo", cannot be separated from the history of the Indonesian nation and homeland. This history began in 1945 when the nationalization of NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, a Dutch colonial-owned insurance company, and Bloom Vander, a British colonial-owned general insurance company based in Jakarta, was carried out. The Dutch company was nationalized through Presidential Regulation No. 19 of 1960 concerning State Companies, Presidential Instruction No. 17 of 1967, and Law No. 9 of 1969 until Government Regulation No. 3 of 1983 was issued.

Asuransi Jasindo is a business entity established based on Government Regulation Number 10 of 1973 concerning State Capital Participation for the Establishment of a Company in the General Insurance Field. However, on March 16, 2020, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation Number 20 of 2020, in which the Republic of Indonesia share ownership of 424,999 shares of Series B in the Company was transferred to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Asuransi Jasindo has 50 years of experience in managing insurance is proven by the trust it has gained in covering mega risks such as the launch of BRISat satellite insurance and the Telkom 3S satellite. In addition, Asuransi Jasindo has also gained trust in managing the Rice Farming Business Insurance (AUTP) and Cattle/Buffalo Livestock Business Insurance (AUTS/K) programs. These programs hopefully will become one of the programs that the Government relies on in stimulating the national economy in the food sector by increasing the quality and availability of national food, as well as helping the farmers' economy. Good risk management supported by a highly adequate information technology system. Asuransi Jasindo can continue to maintain its commitment to providing services to the Insured.

Asuransi Jasindo merupakan salah satu *market leader* dalam industri Asuransi Umum. Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan transformasi dan revitalisasi visi misi Perusahaan. Perubahan yang dilakukan Perusahaan dilandasi semangat transformasi untuk merespon tuntutan pasar dan lingkungan guna mewujudkan tujuan menjadi perusahaan asuransi umum Indonesia yang terbaik yang mampu menyediakan jasa asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Perusahaan melakukan transformasi pada tahun 2021 melalui tiga pilar transformasi utama yang dilakukan Perusahaan yakni: *Customer Centric Focus*, Revitalisasi Model Operasi *Branch Office*, dan Restrukturisasi Organisasi . Di tahun 2019 Asuransi Jasindo juga mencatatkan sejarah sebagai leader Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) dengan melakukan penandatanganan kontrak payung penyediaan Asuransi Barang Milik Negara (ABMN). Penandatanganan ini merupakan langkah baru untuk pemeliharaan aset Negara.

Asuransi Jasindo is one of the market leaders in the General Insurance industry. In 2021, the Company transformed and revitalize the Company's vision and mission. The changes made by the Company are based on the spirit of transformation to respond to market and environmental demands in order to realize the goal of becoming the best Indonesian general insurance company capable of providing customers' preferred insurance services through value-added services and playing an active role in improving the nation's welfare. In order to achieve this goal, the Company carried out transformation in 2021 through three main transformation pillars, namely: Customer Centric Focus, Revitalization of the Branch Office Operating Model, and Organizational Restructuring. In 2019, Asuransi Jasindo also made history as the leader of the State Property Insurance Consortium (ABMN) by signing an umbrella contract for the provision of State Property Insurance (ABMN). This signing serves as new step for the maintenance of State assets.

Perubahan Nama Perusahaan

Nama Asuransi Jasindo memiliki sejarah yang cukup panjang. Diawali dengan pendirian PT Asuransi Bendasraya (Persero) yang didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Mohammad Ali No. 8 tanggal 11 Oktober 1971 dan yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman pada tanggal 31 Januari 1972 No. J.A.5/22/24, beralih bentuk menjadi PT Asuransi Bendasraya (Persero) dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1971.

Sebelumnya, PT Umum International Underwriters (PT UIU) telah berdiri di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Soelaeman Ardjasasmita No. 27 tanggal 21 November 1967 dan diperbaiki dengan naskah No. 48 tanggal 27 Desember 1967 serta mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 28 Desember 1967 No. J.A.5/98/12, setelah mendapat penyertaan modal Negara kemudian menjadi PT UIU dengan PP No. 20 tahun 1971. PT UIU yang semula untuk menampung asuransi dengan valuta asing erat bekerja sama dengan PT Reasuransi Umum Indonesia, bahkan berkantor di gedung yang sama milik PT RUI. Untuk menjaga kemurnian PT RUI sebagai usaha reasuransi profesional dan sehubungan adanya kebijaksanaan baru di bidang perekonomian (TAP MPRS tahun 1966) yang memberi keleluasaan di bidang valuta asing maka akhirnya PT UIU disatukan (*merger*) dengan PT Asuransi Bendasraya dalam satu badan hukum baru. Penggabungan ini dalam rangka pelaksanaan SK Menteri Keuangan No. KEP.764/MK/IV/12/1972.jo.PP No. 10/1973. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, berdasarkan

Change of Company Name

The name Asuransi Jasindo has a long history. It began with the establishment of PT Asuransi Bendasraya (Persero) in Jakarta, based on Notarial Deed of Mohammad Ali No. 8, dated October 11, 1971, approved by the Minister of Justice on January 31, 1972, through No. J.A.5/22/24. It changed its form to PT Asuransi Bendasraya (Persero) based on Government Regulation No. 4 of 1971.

Previously, PT General International Underwriters (PT UIU) was established in Jakarta, based on Soelaeman Ardjasasmita Notary Deed Number 27 dated 21 November 1967 and revised with manuscript Number 48 dated 27 December 1967 and received approval from the Minister of Justice on 28 December 1967 Number J.A.5/98/12, after receiving State capital participation it then became PT UIU with PP Number 20 of 1971. PT UIU, which originally accommodated insurance in foreign currency, closely collaborated with PT Reinsurance General Indonesia, even having an office in the same building owned by PT RUI. To maintain the purity of PT RUI as a professional reinsurance business and in connection with the new policy in the economic sector (TAP MPRS in 1966) which provided flexibility in the foreign exchange sector, PT UIU was finally merged with PT Asuransi Bendasraya in one new legal entity. This merger is in the context of implementing Minister of Finance Decree Number KEP.764/MK/IV/12/1972.jo.PP Number 10/1973. In accordance with Article 5 paragraph (2) of the PP, based on Mohamad Ali's Notarial Deed Number 1

Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 Tanggal 2 Juni 1973, nama Perusahaan yang didirikan sesudah peleburan itu adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). tahun 1971. PT UIU yang semula untuk menampung asuransi dengan valuta asing erat bekerja sama dengan PT Reasuransi Umum Indonesia, bahkan berkantor di gedung yang sama milik PT RUI.

Untuk menjaga kemurnian PT RUI sebagai usaha reasuransi profesional dan sehubungan adanya kebijaksanaan baru di bidang perekonomian (TAP MPRS tahun 1966) yang memberi keleluasaan di bidang valuta asing maka akhirnya PT UIU disatukan (*merger*) dengan PT Asuransi Bendasraya dalam satu badan hukum baru. Penggabungan ini dalam rangka pelaksanaan SK Menteri Keuangan No. KEP.764/MK/IV/12/1972.jo.PP No. 10/1973. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 Tanggal 2 Juni 1973, nama Perusahaan yang didirikan sesudah peleburan itu adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mengalami perubahan nama pada tahun 2020 seiring dengan ditetapkannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai BUMN *Holding* Perasuransian dan Penjaminan, di mana Asuransi Jasindo menjadi salah satu anak perusahaan. Dengan status tersebut, Asuransi Jasindo tidak lagi menggunakan kata Persero sebagai nama resmi Perusahaan.

On June 2, 1973, the name of the company established after the amalgamation was PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). in 1971. PT UIU, which originally accommodated insurance in foreign currency, closely collaborated with PT Reinsurance General Indonesia, even having an office in the same building owned by PT RUI.

To maintain the purity of PT RUI as a professional reinsurance business and in connection with the new policy in the economic sector (TAP MPRS in 1966) which provided flexibility in the foreign exchange sector, PT UIU was finally merged with PT Asuransi Bendasraya in one new legal entity. This merger is in the context of implementing Minister of Finance Decree Number KEP.764/MK/IV/12/1972.jo.PP Number 10/1973. In accordance with Article 5 paragraph (2) of the PP, based on Mohamad Ali's Notarial Deed Number 1 On June 2, 1973, the name of the company established after the amalgamation was PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) underwent a name change in 2020 in line with the establishment of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as a BUMN Holding Insurance and Guarantee, where Asuransi Jasindo became a subsidiary. With this status, Asuransi Jasindo no longer uses the word Persero as the official name of the Company.

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Corporate Culture Values

Budaya perusahaan Jasindo dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini, dijalankan dan menjadi perilaku keseharian serta kebiasaan seluruh insan Jasindo. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut adalah AKHLAK.

Jasindo's Corporate Culture is built on values that are believed, practiced, and become the daily behavior and habits of all Jasindo people. The values of the corporate culture are AKHLAK.

AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

HARMONIS
Saling peduli menghargai perbedaan
Care for each other, respect differences

ADAPTIF
Terus berinovasi dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovate in driving or facing changes

KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuously learn and develop capabilities

LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Dedicated and prioritize the interests of the nation

KOLABORATIF
Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation

Adapun panduan perilaku dari masing-masing *core values* AKHLAK, sebagai berikut:

Amanah:
- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Kompeten:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

The behavioral guidelines for each of AKHLAK's core values are as follows:

Trustworthy:
- Fulfill promises and commitments
- Responsible in tasks, decisions and actions taken
- Adhere to moral and ethical values

Competent:
- Increase personal competence to answer ever-changing challenges
- Assist others in learning
- Complete tasks with the best quality

Harmonis:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal:
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik

Adaptif:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Kolaboratif:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Harmonious:
- Respect everyone regardless of background
- Love to help other people
- Build a conducive work environment

Loyal:
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOE and the State
- Willing to make sacrifices to achieve greater goals
- Obey the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics

Adaptive:
- Quickly adapt to be better
- Continuously make improvements following technological developments
- Act proactively

Collaborative:
- Provide opportunities for various parties to contribute
- Open to working together to produce added value
- Mobilize the utilization of various resources for common goals

Makna Logo Perusahaan

Philosophy of Company Logo

Logo Asuransi Jasindo sebagai identitas merupakan rekayasa artistik inisial dua huruf "A" dan "J" sebagai kependekan dari Asuransi Jasindo, yang di dalamnya terkandung harapan dan cita-cita Perusahaan. Logo Asuransi Jasindo adalah sebuah simbol yang terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu:

Logomark

Picture Mark lengkungan warna gradasi biru tua biru muda merupakan modifikasi huruf "J" inisial dari ASURANSI JASINDO. Lengkung ini diinspirasi dari planet bumi, melambangkan kepedulian pada lingkungan atau bumi.

Picture Mark lengkung kuning keemasan, dari bawah ke atas kanan melambangkan pertumbuhan, peningkatan, kemajuan terus menerus.

Picture Mark lengkung kuning keemasan melewati lengkung biru juga melambangkan inovasi, kejayaan, kemakmuran, semangat, kehangatan dan persahabatan.

Penggabungan *Picture Mark* dua bentuk lengkung menghasilkan kombinasi huruf "A" dan "J" sebagai kependekan dari ASURANSI JASINDO.

Titik berwarna kuning keemasan adalah tujuan dan cita-cita yang sudah dicanangkan untuk dicapai.

Asuransi Jasindo's logo as an identity includes an artistic design of the initials of two letters, "A" and "J", as an abbreviation of Asuransi Jasindo, which contains the hopes and ideals of the Company. Asuransi Jasindo logo includes a symbol consisting of 3 (three) elements as follows:

Logomark

Picture Mark of arch color gradation of dark blue and light blue is a modification of the letter "J" initials of ASURANSI JASINDO. This curve is inspired by the planet Earth, symbolizing concern for the environment or Earth.

Picture Mark of the golden yellow arch, from bottom to top right, symbolizes growth, improvement, and continuous progress.

Picture Mark of the golden yellow arch passing through the blue arch symbolizes innovation, glory, prosperity, passion, warmth, and friendship.

The merger of Picture Mark's two curved shapes produces a combination of letters "A" and "J" as the abbreviation of ASURANSI JASINDO.

Golden yellow dots are goals and ideals that have been set to achieve.

Logotype

Logotype, adalah bagian logo yang berbentuk huruf yakni tulisan ASURANSI JASINDO.

Letter Mark ASURANSI JASINDO merupakan *nickname* (nama familiar) dari Asuransi Jasindo yang cukup popular di kalangan masyarakat umum.

Letter Mark ASURANSI JASINDO dengan huruf kecil (*undercast*) melambangkan kerendahan hati, ramah, terbuka dan pelayanan yang tulus.

Penulisan ASURANSI JASINDO tanpa titik pada huruf "j" dan "i" mempunyai maksud fokus pada pokok persoalan, dan tidak terjebak pada masalah yang tidak penting.

ASURANSI JASINDO ditulis menggunakan *font* yang sederhana, tegas agar mudah dibaca, dan modern sebagai simbol profesionalisme.

Logotype

The logotype is part of the logo in the form of letters: ASURANSI JASINDO.

Letter Mark of ASURANSI JASINDO is a nickname (familiar name) of Asuransi Jasindo, which is quite popular among the general public.

Letter Mark of ASURANSI JASINDO with small letters (undercast) symbolizes humility, friendly, open, and sincere service.

Writing ASURANSI JASINDO without a dot on the letters "j" and "i" means focusing on the subject matter and not getting caught up in unimportant issues.

ASURANSI JASINDO uses a simple, firm font for easy reading and is modern as a symbol of professionalism.

Logo Color

Warna standar logo ASURANSI JASINDO adalah warna kuning keemasan dan biru. Warna tersebut sebagai *Logo color* ASURANSI JASINDO. Adapun warna-warna tersebut mempunyai makna simbolis (nilai-nilai yang dikembangkan) oleh ASURANSI JASINDO sebagai berikut:

- Warna biru melambangkan pengalaman, ilmu pengetahuan, panutan, kepercayaan, kedamaian, keamanan, ketenangan, ketentraman.
- Warna biru dengan gradasi biru muda ke biru tua menggambarkan regenerasi berkesinambungan.
- Warna kuning keemasan menampilkan semangat yang didasari oleh harapan untuk selalu maju, dengan integritas yang tinggi disertai antusiasme dalam menjalankan tugas pelayanan.

Logo Color

The standard colors of the ASURANSI JASINDO logo are golden yellow and blue. This color is the Logo color of ASURANSI JASINDO. The colors have symbolic meanings (values developed) by ASURANSI JASINDO as follows:

- The Blue symbolizes experience, science, role model, trust, peace, security, serenity, and tranquility.
- The Blue with light blue to dark blue gradation illustrates continuous regeneration.
- The Golden yellow color displays a spirit based on the hope to always progress, with high integrity accompanied by enthusiasm in carrying out service duties.

Bidang Usaha
Business Field

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 08 tanggal 9 September 2008, maksud dan tujuan Asuransi Jasindo adalah "melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas". Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menerima pertanggungan langsung dari segala macam jenis asuransi kerugian dan sejenisnya serta mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
2. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya untuk di tahan sendiri serta mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
3. Menerima pertanggungan baik langsung maupun tidak langsung atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya untuk ditahan sendiri serta mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk jasa pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang asuransi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana.

Produk dan Layanan Utama

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta No. 08 tanggal 9 September 2008 dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, S.H., pasal 3, maksud dan tujuan Asuransi Jasindo adalah melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Secara garis besar produk-produk yang ditawarkan Asuransi Jasindo selama tahun 2023 yang dikelompokkan dalam 15 lini usaha (minus Asuransi Kredit):

Based on the Company's Articles of Association No. 08, dated September 9, 2008, the purpose and objective of Asuransi Jasindo are "to conduct business in the field of loss insurance and the like with the prevailing laws and regulations as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality services and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies". To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

1. Receive direct coverage from all types of loss insurance and reinsure the insurance risks by considering the Company's ability.
2. Receive indirect coverage from insurance/ reinsurance companies at home and abroad for all types of loss insurance and the like to be retained by itself and reinsure the insurance risks by considering the Company's ability.
3. Accept direct or indirect coverage of all types of loss insurance and the like to be retained by itself and reinsure the insurance risks by considering the Company's ability based on Sharia principles.
4. To carry out other activities commonly carried out by insurance companies with due observance of the provisions of laws and regulations.

In addition to the main business activities referred to in paragraph 2, the Company may conduct business activities to optimize the utilization of the Company's resources for human resource competency development services in the field of insurance, leasing services, and exploitation of facilities and infrastructure.

Main Products and Services

In accordance with the Company's Articles of Association article 3 as concluded in Deed No. 08 dated September 9, 2008, by Notary Sovyedi Andasasmita, S.H., the purpose and objective of Asuransi Jasindo is to conduct business in the field of loss insurance and the like in accordance with the prevailing laws and regulations as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies. Generally, the products offered by Asuransi Jasindo in 2023, which are grouped into 15 lines of business (excluding Credit Insurance):

1. Asuransi Pengangkutan
   Jenis Asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan barang selama pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara di dalam maupun luar negeri. Asuransi Pengangkutan antara lain:
   - *Marine Cargo*
   - Asuransi Pengangkutan Darat
   - Asuransi Pengangkutan Udara
   - Asuransi Pengangkutan Antar Pulau
   - Asuransi Pengangkutan Ekspor Impor
   - Asuransi Ekspor dan Impor Barang Tertentu

2. Asuransi Keuangan
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan terhadap keberlangsungan suatu usaha atau proyek. Asuransi Keuangan antara lain:
   - *Custom Bond*
   - *Surety Bond/Bid Bond*
   - *Surety Bond/Performance Bond*
   - *Surety Bond/Advance Payment Bond*
   - *Surety Bond/Maintenance Bond*
   - *Surety Bond/Payment Bond*
   - Kontra Bank Garansi*/Bid Bond*
   - Kontra Bank Garansi*/Performance Bond*
   - Kontra Bank Garansi*/Advance Payment Bond*
   - Kontra Bank Garansi*/Maintenance Bond*
   - Kontra Bank Garansi*/Payment Bond*
   - LC/SKBDN

3. Asuransi Harta Benda
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran dan risiko-risiko lain yang dijamin di dalam Polis terhadap aset harta benda/properti yang dimiliki tertanggung. Asuransi Harta Benda antara lain:
   - Asuransi Kebakaran PSAKI
   - Asuransi *Property All Risks*
   - Asuransi Usaha Tani Padi
   - Asuransi Gempa Bumi
   - Asuransi Usaha Tani Jagung
   - Asuransi Usaha Budidaya Udang
   - Asuransi Industrial *All Risk*
   - Asuransi Barang Milik Negara
   - Asuransi Terorisme & Sabotase (Kebakaran PSATSI)
   - Asuransi Kebakaran Karisma

1. Cargo Insurance
   A type of insurance that provides coverage for loss or damage to goods during transportation, either by land, sea, and air at home or abroad. Cargo Insurance includes:
   - Marine Cargo
   - Land Cargo Insurance
   - Air Cargo Insurance
   - Inter-Island Cargo Insurance
   - Export and Import Cargo Insurance
   - Export and Import Insurance of Certain Goods

2. Financial Insurance
   A type of insurance that provides coverage for a business or project continuity. Financial Insurance includes:
   - Custom Bond
   - Surety Bond/Bid Bond
   - Surety Bond/Performance Bond
   - Surety Bond/Advance Payment Bond
   - Surety Bond/Maintenance Bond
   - Surety Bond/Payment Bond
   - Counter Bank Guarantee/Bid Bond
   - Counter Bank Guarantee/Performance Bond
   - Counter Bank Guarantee/Advance Payment Bond
   - Counter Bank Guarantee/Maintenance Bond
   - Counter Bank Guarantee/Payment Bond
   - LC/SKBDN

3. Property Insurance
   A type of insurance that provides coverage for financial losses incurred by fire and other risks covered in the Policy against property assets owned by the insured. Property Insurance includes:
   - PSAKI Fire Insurance
   - Property All Risks Insurance
   - Rice Farming Business Insurance
   - Earthquake Insurance
   - Maize Farming Business Insurance
   - Shrimp Cultivation Business Insurance
   - Industrial All Risk Insurance
   - State Property Insurance
   - Terrorism & Sabotage Insurance (PSATSI Fire)
   - Karisma Fire Insurance

4. Asuransi Rangka Pesawat (*Aviation*)
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan atas seluruh aspek industri penerbangan meliputi asuransi rangka pesawat, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kecelakaan diri atas penumpang dan kru pesawat.
   Asuransi *Aviation* antara lain:
   - *Aircraft Hull and Liability Insurance*
   - *Airport Owner Liability*
   - *Loss of License Insurance*
   - *Aviation Hull War And Allied Perils Insurance*
   - *Personal Accident Crew Insurance*

5. Asuransi Kesehatan
   Memberikan manfaat bagi jaminan kesehatan yang komprehensif dan dikemas dalam model *indemnity* maupun *manage care*. Asuransi Kesehatan antara lain:
   - *Travel Insurance*
   - Asuransi Tenaga Kerja Asing (TKA)
   - Asuransi Kesehatan (Jasindo *Health Care*)

6. Asuransi Rekayasa
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan dalam lingkup kegiatan industri teknis/rekayasa pada saat pembangunan, pemasangan mesin dan pada saat operasional. Asuransi Rekayasa antara lain:
   - Asuransi *Contractors All Risk*
   - Asuransi *Erection All Risks*
   - *Contractors Plant Machinery Project*
   - Asuransi *Machinery Breakdown*
   - Asuransi *Civil Engineering Completed Risk*
   - *Electronic Equipment Insurance*

7. Asuransi Rangka Kapal
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi pada rangka kapal laut termasuk mesin dan peralatannya. Selain itu, asuransi ini memberikan jaminan pada saat pembangunan kapal. Asuransi Rangka Kapal antara lain:
   - *Builder Risks Insurance*
   - Jasindo *Protection and Indemnity Insurance*
   - Asuransi Rangka Kapal

4. Airframe Insurance (Aviation)
   A type of insurance that provides coverage for all aspects of the aviation industry, including airframe insurance, third-party legal liability, personal accident for passengers and crew.
   Aviation insurance includes:
   - Aircraft Hull and Liability Insurance
   - Airport Owner Liability
   - Loss of License Insurance
   - Aviation Hull War And Allied Perils Insurance
   - Personal Accident Crew Insurance

5. Health Insurance
   Provides comprehensive health insurance benefits packaged in indemnity and managed care models. Health Insurance includes:
   - Travel Insurance
   - Foreign Labor Insurance (TKA)
   - Health Insurance (Jasindo Health Care)

6. Engineering Insurance
   A type of insurance that provides coverage within the scope of technical/engineering industrial activities during construction, machinery installation, and operations. Engineering Insurance includes:
   - Contractors All Risk Insurance
   - Erection All Risks Insurance
   - Contractors Plant Machinery Project
   - Machinery Breakdown Insurance
   - Civil Engineering Completed Risk Insurance
   - Electronic Equipment Insurance

7. Marine Hull Insurance
   A type of insurance that provides coverage for losses incurred to the frame of a marine vessel, including its machinery and equipment. In addition, this insurance provides coverage at the time of ship construction. Marine Hull Insurance includes:
   - Builder Risk Insurance
   - Jasindo Protection and Indemnity Insurance
   - Marine Hull Insurance

8. Asuransi Kendaraan Bermotor
   Jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian karena kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan santunan terhadap pengemudi dan penumpangnya. Asuransi Kendaraan Bermotor antara lain:
   - Jasindo Oto Plus
   - Kendaraan Bermotor Alat Berat
   - Kendaraan Bermotor Roda Dua

9. Asuransi Aneka
   Terdiri dari sejumlah produk asuransi yang memberikan jaminan di antaranya risiko terhadap pengiriman/kehilangan uang, kecelakaan diri, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kesehatan dan lainnya. Asuransi Aneka antara lain:
   - Asuransi Usaha Tani Bawang Merah
   - Asuransi Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (IHPPBA)
   - Asuransi Pengiriman Uang *(Cash In Transit)*
   - Asuransi Penyimpanan Uang *(Cash In Safe)*
   - Asuransi Uang Kotak Penyimpanan Kasir *(Cash In Cashier Box)*
   - Asuransi Kebongkaran
   - Asuransi *Hole In One*
   - Asuransi *Advertising Sign*
   - *Public Liability Jasindo Insurance*
   - Jasindo *Micro Insurance* (Jamin)
   - Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
   - *Moveable All Risk*

10. Asuransi Satelit
    Jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan atau kehilangan yang terjadi pada satelit pada saat sebelum peluncuran, saat peluncuran, dan saat di orbit:
    - Asuransi *Satellite Launch In and* ORBIT

11. Asuransi Kecelakaan Diri
    Memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan, kecelakaan dalam penerbangan dan pelayaran yang mengakibatkan kematian, cacat tetap sebagian atau seluruh tubuh serta biaya perawatan/pengobatan, kecelakaan bagi siswa/pelajar/mahasiswa termasuk pengajar dan administrasi, dan jaminan atas asuransi nelayan. Asuransi Kecelakaan Diri antara lain:
    - Kecelakaan Diri
    - PA Perjalanan Lintasan
    - PA Perjalanan Pelangi
    - Asuransi Nelayan

8. Motor Insurance
   Type of insurance that provides coverage for losses due to damage or loss of motor vehicles, legal liability to third parties, and compensation for drivers and passengers. Motor Insurance includes:
   - Jasindo OTO Plus
   - Heavy Equipment Motor Vehicles
   - Two-Wheeled Motor Vehicles

9. Miscellaneous Insurance
   Consists of some insurance products that provide coverage, including risks against delivery/loss of money, personal accidents, legal liability to third parties, health, and others. Miscellaneous Insurance includes:
   - Red Onion Farming Business Insurance
   - Area-Based Rice Yield Index Insurance (IHPPBA)
   - Remittance Insurance (Cash In Transit)
   - Cash In Safe Insurance
   - Cash In Cashier Box Insurance
   - Demolition Insurance
   - Hole-In-One Insurance
   - Advertising Sign Insurance
   - Public Liability Jasindo Insurance
   - Jasindo Micro Insurance (Jamin)
   - Fishery Insurance for Small Fish Farmers (APPIK)
   - Moveable All Risk

10. Satellite Insurance
    A type of insurance that provides coverage for losses incurred due to damage and or loss incurred to a satellite before launch, during launch, and while in orbit:
    - Satellite Launch In and ORBIT Insurance

11. Personal Accident Insurance
    Protects against risks caused by accidents, accidents in aviation and shipping resulting in death, permanent disability of part or all of the body and treatment/medical expenses, accidents for students/college students including teachers and administration, and coverage for fisherman insurance. Personal Accident Insurance includes:
    - Personal Accident
    - Lintasan Travel PA
    - Pelangi Travel PA
    - Fisherman Insurance

12. Asuransi Tanggung Gugat
    Memberikan perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (*third party*). Asuransi Tanggung Gugat antara lain:
    - Asuransi Tanggung Gugat Direksi dan Pejabat Perusahaan (Jasindo D&O *Insurance*)
    - *Professional Indemnity* Jasindo *Insurance*
    - Asuransi *Fidelity Guarantee*
    - *Product Liability Insurance*
    - *Comprehensive General Liability Insurance*
    - *Bailee's & Warehousemen's Liability Insurance*

13. Asuransi *Energy Onshore*
    Memberikan jaminan atas risiko yang timbul dari kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi atas aset-aset *Onshore* yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, serta distribusi. Asuransi *Energy Onshore* antara lain:
    - *Onshore Construction All Risk Insurance*
    - *Onshore Operational Insurance*
    - *Land Rig Insurance*

14. Asuransi *Energy Offshore*
    Memberikan jaminan atas risiko yang timbul dari kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi atas aset-aset *Offshore* yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, serta distribusi. Asuransi *Energy Offshore* antara lain:
    - *Offshore Operational Insurance*
    - *Offshore Construction All Risk Insurance*
    - *Industrial Asset And Well Control Insurance*
    - *Offshore Exploration Insurance*
    - *Energy Comprehensive General Liability Insurance*

12. Liability Insurance
    Provides protection for the insured against lawsuits from third parties. Liability Insurance includes:
    - Directors and Officers Liability Insurance (Jasindo D&O Insurance)
    - Professional Indemnity Jasindo Insurance
    - Fidelity Guarantee Insurance
    - Product Liability Insurance
    - Comprehensive General Liability Insurance
    - Bailee's & Warehousemen's Liability Insurance

13. Onshore Energy Insurance
    Provides coverage for risks arising from upstream and downstream oil and gas activities on Onshore assets, including exploration, construction, exploitation, and distribution activities. Energy Onshore Insurance includes:
    - Onshore Construction All Risk Insurance
    - Onshore Operational Insurance
    - Land Rig Insurance

14. Offshore Energy Insurance
    Provides coverage for risks arising from upstream and downstream oil and gas activities on Offshore assets, including exploration, construction, exploitation, and distribution activities. Energy Offshore Insurance includes:
    - Offshore Operational Insurance
    - Offshore Construction All Risk Insurance
    - Industrial Asset And Well Control Insurance
    - Offshore Exploration Insurance
    - Energy Comprehensive General Liability Insurance

Struktur Organisasi

Organization Structure

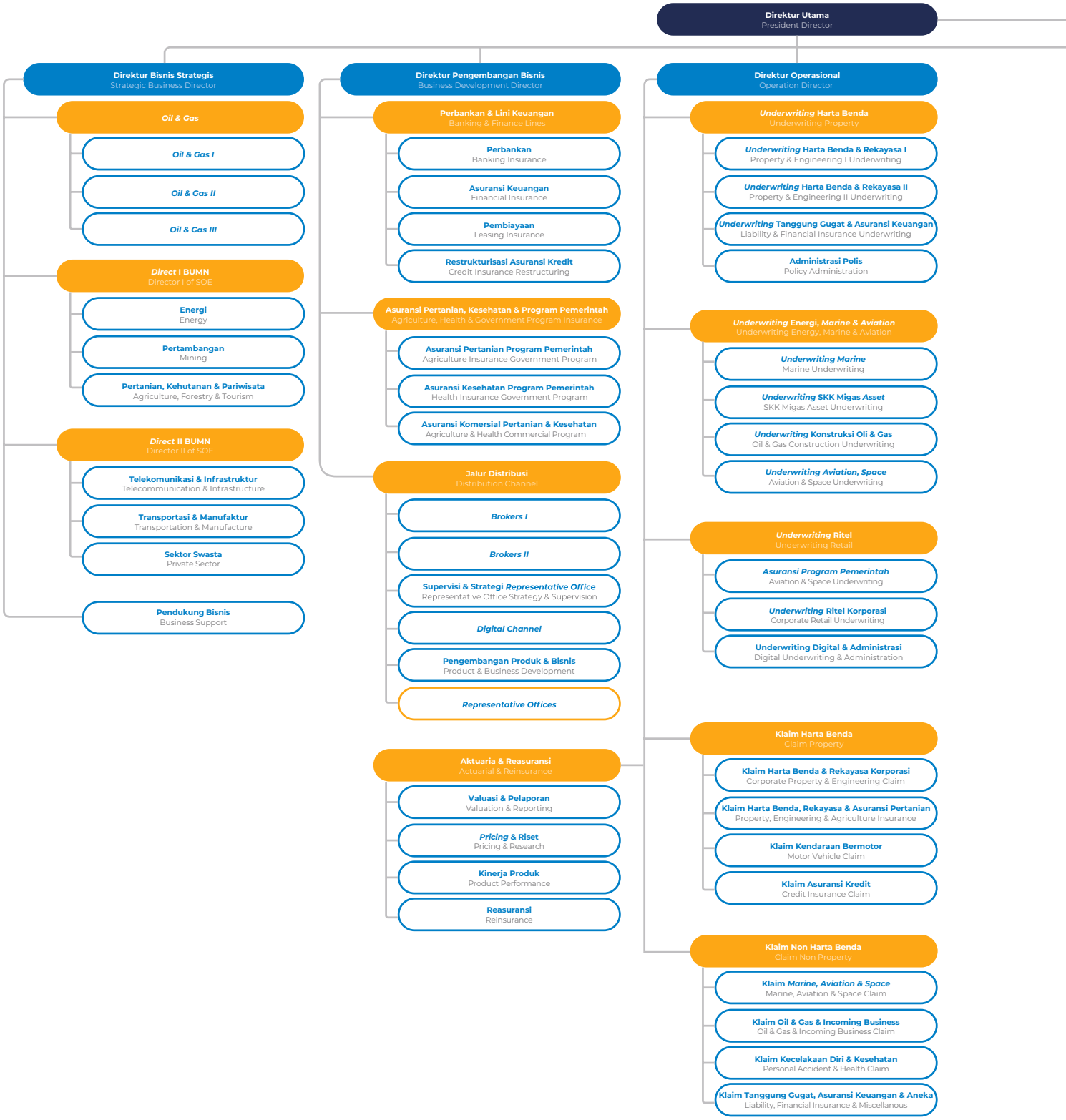

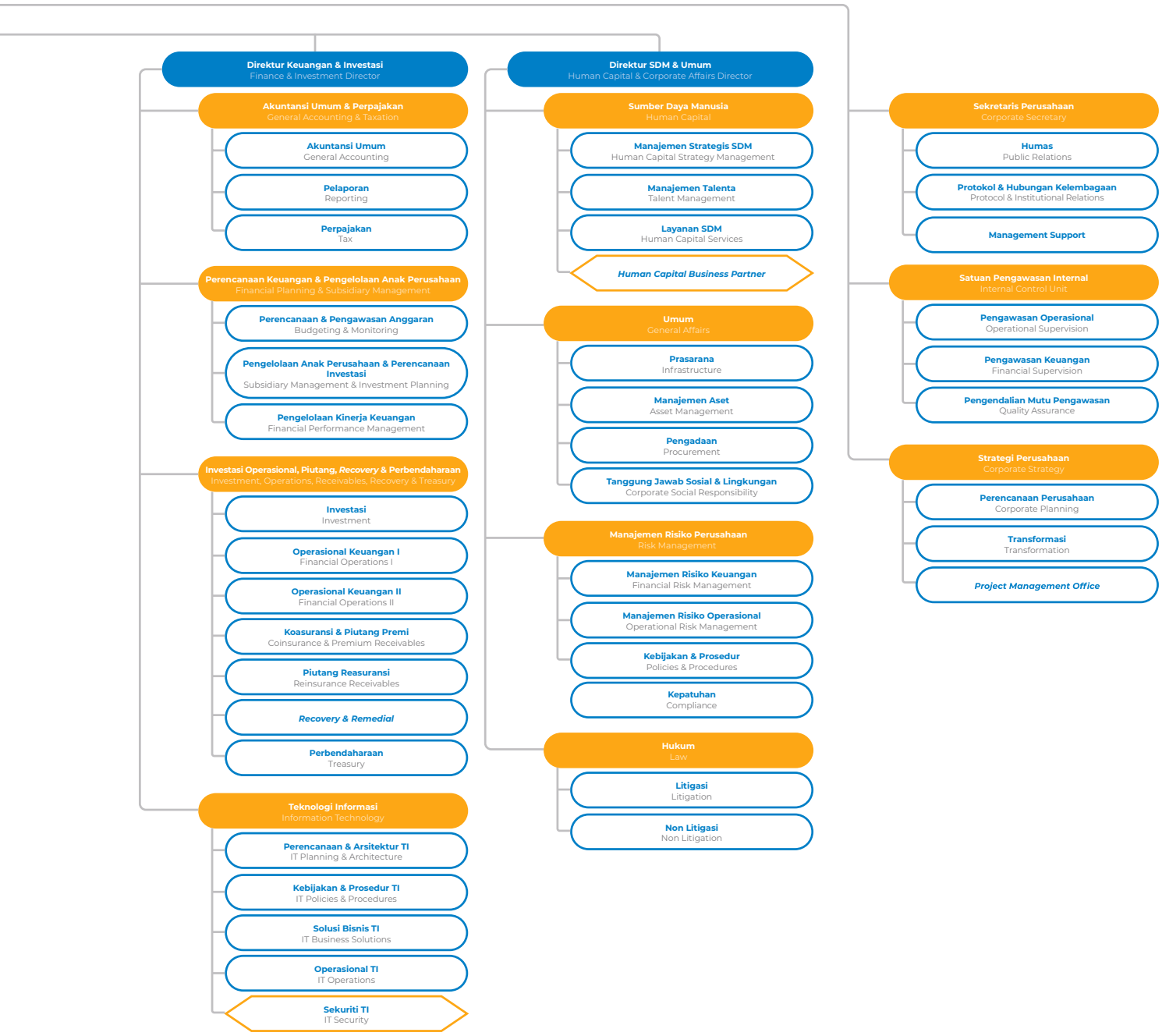
Direktur Keuangan & Investasi
Finance & Investment Director
Akuntansi Umum & Perpajakan
General Accounting & Taxation
Akuntansi Umum
General Accounting
Pelaporan
Reporting
Perpajakan
Tax
Perencanaan Keuangan & Pengelolaan Anak Perusahaan
Financial Planning & Subsidiary Management
Perencanaan & Pengawasan Anggaran
Budgeting & Monitoring
Pengelolaan Anak Perusahaan & Perencanaan Investasi
Subsidiary Management & Investment Planning
Pengelolaan Kinerja Keuangan
Financial Performance Management
Investasi Operasional, Piutang, Recovery & Perbendaharaan
Investment, Operations, Receivables, Recovery & Treasury
Investasi
Investment
Operasional Keuangan I
Financial Operations I
Operasional Keuangan II
Financial Operations II
Koasuransi & Piutang Premi
Coinsurance & Premium Receivables
Piutang Reasuransi
Reinsurance Receivables
Recovery & Remedial
Perbendaharaan
Treasury
Teknologi Informasi
Information Technology
Perencanaan & Arsitektur TI
IT Planning & Architecture
Kebijakan & Prosedur TI
IT Policies & Procedures
Solusi Bisnis TI
IT Business Solutions
Operasional TI
IT Operations
Sekuriti TI
IT Security
Direktur SDM & Umum
Human Capital & Corporate Affairs Director
Sumber Daya Manusia
Human Capital
Manajemen Strategis SDM
Human Capital Strategy Management
Manajemen Talenta
Talent Management
Layanan SDM
Human Capital Services
Human Capital Business Partner
Umum
General Affairs
Prasarana
Infrastructure
Manajemen Aset
Asset Management
Pengadaan
Procurement
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan
Corporate Social Responsibility
Manajemen Risiko Perusahaan
Risk Management
Manajemen Risiko Keuangan
Financial Risk Management
Manajemen Risiko Operasional
Operational Risk Management
Kebijakan & Prosedur
Policies & Procedures
Kepatuhan
Compliance
Hukum
Law
Litigasi
Litigation
Non Litigasi
Non Litigation
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Humas
Public Relations
Protokol & Hubungan Kelembagaan
Protocol & Institutional Relations
Management Support
Satuan Pengawasan Internal
Internal Control Unit
Pengawasan Operasional
Operational Supervision
Pengawasan Keuangan
Financial Supervision
Pengendalian Mutu Pengawasan
Quality Assurance
Strategi Perusahaan
Corporate Strategy
Perencanaan Perusahaan
Corporate Planning
Transformasi
Transformation
Project Management Office

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ngalim Sawego
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Indah Anggoro Putri
Komisaris
Commissioner

Tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris Asuransi Jasindo mengalami perubahan sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK-242/MBU/08/2023 dan 24/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia yang mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Anton Mart Irianto sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023. Adapun salah satu anggota Dewan Komisaris, yaitu Adi Suryanto meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023.

In 2023, the composition of the Board of Commissioners of Asuransi Jasindo will undergo changes in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-242/MBU/08/2023 and 24/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 dated August 23, 2023 concerning the Dismissal of Members of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia which confirmed the honorable dismissal of Anton Mart Irianto as Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia as of May 25, 2023. As for one of the members of the Board Commissioner, namely Adi Suryanto, passed away on December 15, 2023.

Ngalim Sawego

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Usia Age	68 tahun 68 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang
Riwayat Pendidikan Education Background	• *Master of Science in Policy Economics* di University of Illinois Urbana-Champaign, USA • S1 Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia • Master of Science in Policy Economics at the University of Illinois Urbana-Champaign, USA • Bachelor Degree in Law-Economics at the University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Staf Ahli Menteri Keuangan RI, Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal • Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) • Deputi Komisioner, Pengawas Industri Keuangan Non-Bank I di Otoritas Jasa Keuangan • Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) • Expert Staff to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, in the field of Financial Services and Capital Market Policy and Regulation • Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam LK) • Deputy Commissioner, Non-Bank Financial Industry Supervisor I at the Financial Services Authority • Chairman of the Board of Directors and concurrently Executive Director of the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank)
Jabatan Lainnya Other Positions	• Advisor PT Astra Sedaya Finance • Komisaris Independen PT Mega Central Finance • Komisaris Independen PT Dipo Star Finance • Komisaris PT Juara Capital Indonesia • Komisaris Indonesia Clearing House • Advisor to PT Astra Sedaya Finance • Independent Commissioner of PT Mega Central Finance • Independent Commissioner of PT Dipo Star Finance • Commissioner of PT Juara Capital Indonesia • Commissioner of Indonesia Clearing House
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-355/MBU/11/2020 dan 057/SK-DIR/CORP/BPUI/ XI/2020 tanggal 3 November 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-355/MBU/11/2020 and 057/SK-DIR/ CORP/BPUI/XI/2020 dated November 3, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	3 November 2020 - 2 November 2025 November 3, 2020 - November 2, 2025

Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia Age	69 tahun 69 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Depok
Riwayat Pendidikan Education Background	• *PhD in Economics*, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA • *MA in Economics*, Duke University, Durham, North Carolina, USA • S1 Ekonomi, Universitas Indonesia • PhD in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA • MA in Economics, Duke University, Durham, North Carolina, USA • Bachelor Degree in Economics, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) • Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) • Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia • Independent Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) • Commissioner of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) • Director General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Jabatan Lainnya Other Positions	• Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia • Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk • Komisaris PT Tambang Damai • President Commissioner of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia • Commissioner of PT TBS Energi Utama Tbk • Commissioner of PT Tambang Damai
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-80/MBU/03/2020 dated March 18, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	18 Maret 2020 - 17 Maret 2025 March 18, 2020 - March 17, 2025

Indah Anggoro Putri
Komisaris
Commissioner

Usia Age	55 tahun 55 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Riwayat Pendidikan Education Background	• *Master of Bussiness* di Queensland University of Technology, Australia • S1 Ilmu Sosial, Universitas Indonesia • Master of Business at Queensland University of Technology, Australia • Bachelor Degree in Social Science, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan • Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas • Kepala Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas • Kepala Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Bina Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri • Head of Foreign Cooperation Bureau, Secretariat General of Ministry of Manpower • Head of Legal and Foreign Cooperation, Directorate General of Training and Productivity • Head of Foreign Cooperation Subdivision, Directorate General of Training and Productivity Development • Head of Foreign Cooperation Subdivision, Directorate General of Domestic Training and Placement
Jabatan Lainnya Other Positions	• Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2021-sekarang) • Ketua Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS) (2021-sekarang) • Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) (2021-sekarang) • Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Periode 2024) • Director General of Industrial Relations Development and Social Security for Workers, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (2021-present) • Chairman of the National Wage Council (DEPENAS) (2021-present) • Deputy Chair of the National Tripartite Cooperation Institute (LKS Tripnas) (2021-present) • Member of the National Social Security Council (DJSN) (2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-113/MBU/04/2022 dan 005/KepSir-PS/BPUI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-113/MBU/04/2022 and 005/KepSir-PS/BPUI/IV/2022 dated April 28, 2022
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	28 April 2022 - 28 April 2027 April 28, 2022 - April 28, 2027

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Jhon Harlen Butar-Butar
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Ocke Kurniandi
Direktur Operasional
Director of Operations

Dewi Utari
Direktur SDM & Umum
Director of HC & General Affairs

Andy Samuel
Direktur Utama
President Director

Syah Amondaris
Direktur Bisnis Strategis
Director of Strategic Business

Diwe Novara
Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Develoopment

Tahun 2023, komposisi Direksi Asuransi Jasindo mengalami perubahan sesuai keputusan pemegang saham di luar RUPS, yaitu:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-222/MBU/08/2023 dan 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia yang mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bayu Rafisukmawan sebagai Direktur Keuangan dan Investasi terhitung sejak tanggal 3 April 2023 dan mengangkat Jhon Harlen Butar-Butar sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-304/MBU/11/2023 dan 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Linggarsari Suharso sebagai Direktur SDM dan Umum terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2023 dan mengangkat Dewi Utari sebagai Direktur SDM dan Umum.

In 2023, the composition of the Jasindo Insurance Board of Directors will change according to shareholder decisions outside the GMS, namely:

1. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-222/MBU/08/2023 and 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 dated August 1, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia which confirmed the honorable dismissal of Bayu Rafisukmawan as Director of Finance and Investment as of the date April 3, 2023 and appointed Jhon Harlen Butar-Butar as Director of Finance and Investment.
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-304/MBU/11/2023 and 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023 dated November 13, 2023 which confirmed the honorable dismissal of Linggarsari Suharso as Director of Human Resources and General Affairs effective October 5, 2023 and appointed Dewi Utari as Director of HR and General.

Andy Samuel
Direktur Utama
President Director

Usia Age	50 tahun 50 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• Pendidikan Asuransi, Glasgow Caledonian University Scotland, UK • S1 Ilmu Politik, Universitas Indonesia • Insurance Education at Glasgow Caledonian University Scotland, UK • Bachelor Degree in Political Science, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Utama di PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) • Komisaris dan Direktur di berbagai perusahaan • President Director of PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) • Commissioner and Director in various companies
Jabatan Lainnya Other Positions	-
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-306/MBU/09/2021 dan 09/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-306/MBU/09/2021 and 09/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/IX/2021 dated September 10, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	10 September 2021 - 9 September 2026 September 10, 2021 - September 9, 2026

Diwe Novara
Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Development

Usia Age	47 tahun 47 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Riwayat Pendidikan Education Background	• Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana • S1 Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya • Master of Management, Mercu Buana University • Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Sriwijaya University
Riwayat Pekerjaan Work Experience	*Group Head Oil & Gas* PT Asuransi Jasa Indonesia Group Head of Oil & Gas PT Asuransi Jasa Indonesia
Jabatan Lainnya Other Positions	Presiden Komisaris PT Asuransi Tokio Marine Indonesia President Commissioner of PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-79/MBU/03/2020 dated March 18, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	18 Maret 2020 - 17 Maret 2025 March 18, 2020 - March 17, 2025

Syah Amondaris
Direktur Bisnis Strategis
Director of Strategic Business

Usia Age	57 tahun 57 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• M.B.A (*International Management*), Institut Manajemen Prasetya Mulya • S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Jayabaya • M.B.A (International Management) at Prasetya Mulya Management Institute • Bachelor Degree in Economics, Jayabaya University
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Utama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Penjualan dan Distribusi PT Mandiri AXA General Insurance • President Director of the Financial Institution Pension Fund PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Director of Sales and Distribution of PT Mandiri AXA General Insurance
Jabatan Lainnya Other Positions	Komisaris Utama PT Asrinda Arthasangga President Commissioner of PT Asrinda Arthasangga
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-79/MBU/03/2020 dated March 18, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	18 Maret 2020 - 17 Maret 2025 March 18, 2020 - March 17, 2025

Ocke Kurniandi
Direktur Operasional
Director of Operations

Usia Age	55 tahun 55 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Riwayat Pendidikan Education Background	• S2 Matematika, Institut Teknologi Bandung • S1 Matematika, Institut Teknologi Bandung • Master of Mathematics, Bandung Institute of Technology • Bachelor Degree in Mathematics, Bandung Institute of Technology
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Deputi Direksi Bidang Aktuaria Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Deputy Director for Actuarial Affairs of the Health Social Security Administrator (BPJS)
Jabatan Lainnya Other Positions	Komisaris PT Asuransi Jasindo Syariah Commissioner of PT Asuransi Jasindo Syariah
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-257/MBU/11/2022 dan 016/KepSir-PS/BPUI/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-257/MBU/11/2022 and 016/KepSir-PS/BPUI/XI/2022 dated November 16, 2022
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	16 November 2022 - 15 November 2027 November 16, 2022 - November 15, 2027

Jhon Harlen Butar-Butar

Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Usia Age	46 tahun 46 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI • S1 Akuntansi, Universitas Indonesia • Master of Management, IPMI College of Management • Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Kepala Divisi Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Komisaris PT Sarana Jogya Ventura • *Head Finance Control, Accounting, Reporting, Treasury and Tax* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • *Audit Manager* Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Indonesia • Asisten Manajer Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Indonesia • Head of Accounting and Reporting Division PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Head of Finance Division PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Commissioner of PT Sarana Jogya Ventura • Head of Finance Control, Accounting, Reporting, Treasury and Tax PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Audit Manager of Grant Thornton Indonesia Public Accounting Firm • Assistant Manager of Ernst & Young Indonesia Public Accounting Firm
Jabatan Lainnya Other Positions	-
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-222/MBU/08/2023 dan 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-222/MBU/08/2023 and 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 dated August 1, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2028 August 1, 2023 – August 1, 2028

Dewi Utari
Direktur SDM & Umum
Director of HC & General Affairs

Usia Age	42 tahun 42 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• Magister Akuntansi di Universitas Indonesia pada 2007 • S1 Akuntansi dari STIE Swadaya pada 2006 • S1 Antropologi dari Universitas Indonesia pada 2004 • Master of Accounting at the University of Indonesia in 2007 • Bachelor Degree in Accounting at STIE Swadaya in 2006 • Bachelor Degree in Anthropology at the University of Indonesia in 2004
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• *Group Head Financial Planning & Parenting* PT Asuransi Jasa Indonesia • *Group Head Accounting & Tax* PT Asuransi Jasa Indonesia • *Group Head Strategic Management* PT Asuransi Jasa Indonesia • *Head of Tax* PT Asuransi Jasa Indonesia • Group Head Financial Planning & Parenting PT Asuransi Jasa Indonesia • Group Head Accounting & Tax PT Asuransi Jasa Indonesia • Group Head Strategic Management PT Asuransi Jasa Indonesia • Head of Tax PT Asuransi Jasa Indonesia
Jabatan Lainnya Other Positions	-
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-304/MBU/11/2023 dan 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023 tanggal 13 November 2023 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-304/MBU/11/2023 and 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023 dated November 13, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	6 November 2023 – 6 November 2028 November 6, 2023 – November 6, 2028

Linggarsari Suharso

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Depok
Riwayat Pendidikan Education Background	• Magister Sains (Psikologi), Universitas Indonesia • S1 Psikologi, Universitas Indonesia • Master of Science (Psychology), University of Indonesia • Bachelor Degree in Psychology, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur SDM dan Umum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk • *EVP Human Capital Management* PT Bank Permata Tbk • *Head of Human Capital* Badan Penyehatan Perbankan Nasional • Director of HR and General Affairs of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk • EVP Human Capital Management PT Bank Permata Tbk • Head of Human Capital at the Indonesian Bank Restructuring Agency
Jabatan Lainnya Other Positions	Komisaris PT Mitracipta Polasarana*) Commissioner of PT Mitracipta Polasarana *)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-255/MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-255/MBU/10/2018 dated October 5, 2018
Hubungan Afiliasi Affiliate Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, nor with the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan Term of Office	5 Oktober 2018 – 4 Oktober 2023 October 5, 2018 - October 4, 2023

Profil Pejabat Eksekutif

Senior Executive Profile

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Mahardyansyah Tanugra, SH, IPGDI, ANZIIF	*Group Head Oil & Gas*
2	Henky Yossefhian Marliandhi, SE, AAAIK, CRMP	*Group Head Direct I BUMN (PLT)*
3	Herman Prasojo, ST, MM, AAAIK, ANZIIF, CRGP	*Group Head Direct II BUMN*
4	Hardyan, ST, ANZIIF	*Group Head Banking & Financial Lines (PLT)*
5	Setiadi Imansyah, SE, MM, AAAIK	*Group Head Agriculture Health & Government Program Insurance (PLT)*
6	Lukky Wijaya, SE. Ak, MM, ANZIIF, CRMO	*Group Head Distribution Channel (PLT)*
7	Indrawan Sidharta, SE, AAAIK	*Group Head Underwriting Property (PLT)*
8	Mokhammad Krismara, ST, AAIK, CRGP	*Group Head Underwriting Energy, Marine & Aviation*
9	Franciscus Nanang Triana, SE, MM, AAAIK	*Group Head Underwriting Retail (PLT)*
10	Syahfiry Nasution, ST, MM, AAAIK, ANZIIF, CRGP	*Group Head Claim Property*
11	Erika Maulani, SH, M.Hum, AMII, AAAIK	*Group Head Claim Non Property*
12	Salastin Afriliyati, S.Si, MM, FSAI, CRGP	*Group Head Actuarial & Reinsurance*
13	Boy Prasetiyawan, SE, AWM, CRGP	*Group Head Accounting & Tax*
14	Raymond Immanuel, SE	*Group Head Financial Planning & Parenting (PPS)*
15	Haryadi Eko Trismianto, SE, CRGP	*Group Head Investment Operation Receivable Recovery & Treasury*
16	Muhamad Yusuf Nur Sumarno Putro, ST, MTI, AAAIK, CRGP	*Group Head Information Technology*
17	Dita Adritia, SE.Ak, MM, CHRP	*Group Head Human Capital*
18	Nena Ratty Ermila, S.SOS, M.SI, AAAIK, CRGP	*Group Head General Affairs*
19	Yulianto Indrapraja, B.Comp.Sc, SE, CRGP	*Group Head Risk Management (PLT)*
21	Rosanna Pasaribu, SH, CRGP	*Group Head Legal (PLT)*
21	Brellian Gema Widayana, ST	*Group Head Corporate Secretary*
22	Ika Dwinita Sofa, S.TP, MBA, AAIK, CRGP, QIA	*Group Head Internal Audit*
23	Isra Cahaya Permana, ST, AAIK	*Group Head Corporate Strategy (PLT)*

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition and Structure

Asuransi Jasindo adalah anak Badan Usaha Milik Negara dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Kepemilikan saham per 31 Desember 2023 adalah:

1. 1 saham seri A dwiwarna milik Negara Republik Indonesia
2. 424.999 saham Seri B milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Asuransi Jasindo is a subsidiary of State-Owned Enterprise of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Share ownership as of December 31, 2023, are:

1. 1 share of series A Dwiwarna owned by the State of the Republic of Indonesia
2. 424,999 shares of Series B owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2023 tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG (Indonesia Financial Group) yang memiliki 424.999 lembar saham seri B merupakan pemegang saham utama Asuransi Jasindo, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN yang memiliki 1 lembar saham seri A merupakan pemegang saham pengendali Asuransi Jasindo.

Share Ownership by Board of Commissioners and Directors

In 2023, there was no share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Major and Controlling Shareholders

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or IFG (Indonesia Financial Group) which owns 424,999 shares of series B is the major shareholder of Asuransi Jasindo, while the Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of SOE which owns 1 share of series A is the controlling shareholder of Asuransi Jasindo.

Entitas Anak Perusahaan

Subsidiary Entities

Per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki dua entitas anak usaha yaitu:

As of December 31, 2023, the Company has two subsidiaries, including:

No	Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address	Bidang Usaha Business Field	Tahun Pendirian Date of Establishment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Status Operasi Operation Status	Jumlah Aset per 31 Desember 2023 (Rp juta) Total Asset as of December 31, 2023 (Rp million)
1	PT Mitracipta Polasarana	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21 Kelurahan | Subdistrict Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat | Central Jakarta 10340	*General Contractor* dan *Property Management* General Contractor and Property Management	1994	88,30%	Telah Beroperasi	53.273
2	PT Asuransi Jasindo Syariah	Jl. Pintu Besar Utara No. 4, Kelurahan | Subdistrict Pinangsia, Kecamatan | District Taman Sari, Jakarta Barat | West Jakarta 11110	Asuransi Umum Syariah Sharia General Insurance	2016	96,50%	Telah Beroperasi	580.780

PT Mitracipta Polasarana

Alamat Address	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21, Kelurahan | Subdistrict Kebon Sirih Kecamatan | District Menteng, Jakarta Pusat | Central Jakarta 10340 Telepon | Telephone : (021) 390 2991 - 390 2992 Fax : (021) 390 9335 *E-mail* : mcp@mitracipta-polasarana.co.id
Landasan Hukum Legal Basis	Akta Notaris H. Azhar Alia, SH. Nomor 173 tanggal 24 November 1994 yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. Nomor 72 tanggal 23 Mei 2008 Notary Deed of H. Azhar Alia, SH. Number 173 dated November 24, 1994 which has been adjusted to the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as contained in the Notarial Deed of Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. Number 72 dated May 23, 2008

PT Mitracipta Polasarana bergerak di bidang *Property Management* dan *General Contractor.* Graha Jasindo yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat merupakan gedung kantor yang dimiliki sekaligus dikelola oleh PT Mitracipta Polasarana. Pada bidang *General Contractor,* PT Mitracipta Polasarana telah memiliki sejumlah pengalaman pada proyek pekerjaan sipil, arsitektur, interior, serta mekanikal, elektrikal, dan *plumbing*, baik sebagai *main contractor* maupun sebagai subkontraktor dari perusahaan konstruksi terkemuka seperti PT Hutama Karya (Persero) dan PT PP (Persero). Dalam menjalankan usahanya di bidang konstruksi, PT Mitracipta Polasarana dilengkapi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk klasifikasi bidang Mekanikal, Elektrikal dan Arsitektural dengan penggolongan kualifikasi dalam Gred - M1.

PT Mitra Cipta Polasarana operates in the Property Management and General Contractor sector. Graha Jasindo, which is located in the Menteng area, Central Jakarta, is an office building owned and managed by PT Mitra Cipta Polasarana. In the General Contractor sector, PT Mitra Cipta Polasarana has had a number of experiences in civil, architectural, interior, as well as mechanical, electrical and plumbing work projects, both as main contractor and as a subcontractor for leading construction companies such as PT Hutama Karya (Persero) and PT PP (Persero). In carrying out its business in the construction sector, PT Mitra Cipta Polasarana is equipped with a National Construction Services Business License for the classification of Mechanical, Electrical and Architectural fields with qualification classification in Grade - M1.

PT Asuransi Jasindo Syariah

Alamat Address	Jl. Pintu Besar Utara No. 4, Kelurahan | Subdistrict Pinangsia, Kecamatan | District Taman Sari, Jakarta Barat | West Jakarta 11110 Telepon | Telephone : (+62-21) (021) 6907454 (hunting) Email : mailto:asuransi@jasindosyariah.co.id
Pengurus Management	Komisaris | Commissioner : Iman Firmansyah Direksi | Directors : At Yaltha
Landasan Hukum Legal Basis	Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LLM. No. 119 tanggal 27 Januari 2016 Notarial Deed of Mala Mukti, S.H., LLM. No. 119 dated January 27, 2016

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah yang pertama kali terbentuk sebagai hasil *spin-off* dari Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan beroperasi sejak 01 Mei 2016 sesuai Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah. Pendirian PT Asuransi Jasindo Syariah ditujukan untuk perluasan segmen dan peningkatan penetrasi di industri asuransi umum syariah.

PT Asuransi Jasindo Syariah is a general insurance company with sharia principles which was first formed as a spin-off from the Takaful Business Unit (UUT) of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and has been operating since May 1, 2016 in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP 22/D.05/2016 dated March 30, 2016 concerning Granting of Business Licenses in the General Insurance Sector Using Sharia Principles. The establishment of PT Asuransi Jasindo Syariah is aimed at segment expansion and increasing penetration in the sharia general insurance industry.

Entitas Asosiasi

Associated Entity

No	Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham Share Ownership	Status Operasi Operation Status
1	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Sentral Senayan I, Lantai 3 | 3rd Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270	Asuransi Umum General Insurance	20%	Beroperasi Operate
2	PT Asrinda Arthasangga	Gedung | Building Sentra Pemuda Kav. 15-16 Jl. Pemuda No. 61 Jakarta 13220	Pialang Reasuransi Reinsurance Broker	11%	Beroperasi Operate
3	PT Reasuransi Maipark Indonesia	Multivision Tower, Lantai 8| 8th Floor, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta 12960	Pool Reasuransi Gempa Bumi Earthquake Reinsurance Pool	5,54%	Beroperasi Operate
4	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	World Trade Center (WTC) 6 Lantai 2 | 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920	Asuransi Umum General Insurance	2,25%	Beroperasi Operate

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in Associations

Hingga akhir tahun 2023, Asuransi Jasindo tercatat sebagai anggota asosiasi dan organisasi sebagai berikut:

- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI)
- Institute of Internal Auditors (IIA)

Until the end of 2023, Asuransi Jasindo is listed as a member of the following associations and organizations:

- General Insurance Association of Indonesia (AAUI)
- The Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
- Communication Forum for Internal Oversight Unit (FKSPI)
- Institute of Internal Auditors (IIA)

Kronologis Penerbitan Saham

Chronology of Share Issuance

Hingga akhir tahun 2023, saham perseroan tidak dicatatkan di bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham yang dapat disampaikan pada laporan ini.

Until the end of 2023, the company's shares were not listed on any exchange, so there is no information regarding the chronology of the share listing that can be submitted in this report.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance

Hingga akhir tahun 2023, Asuransi Jasindo tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

Until the end of 2023, Asuransi Jasindo did not issue securities, such as bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on the stock exchange in Indonesia or abroad. Therefore, there is no information related to the name of other securities, year of issuance of other securities, interest rate/reward of other securities, maturity date of other securities, offering value of other securities, name of the exchange where other securities are listed; and securities rating.

Akuntan Publik

Public Accountant

Auditor eksternal Perusahaan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam PER-01/MBU-/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 31 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 54.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/ PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) tentang Jasa Akuntan Publik, Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan oleh KAP dapat dilakukan paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut- turut.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit menentukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pemilihan Akuntan Publik melalui pengadaan bersama terlihat pada diagram dibawah ini:

The Company's external auditor is appointed by the General Meeting of Shareholders from the External Auditor candidates proposed by the Board of Commissioners in accordance with the provisions in PER-01/MBU-/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises Article 31 and Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies Article 54.

Referring to the Minister of Finance Regulation Number 17/ PMK.01/2008 Article 3 paragraph (1) concerning Public Accountant Services, the provision of General Audit Services for Financial Statements by a Public Accounting Firm can be carried out for a maximum of 6 consecutive financial years, while by a Public Accountant for a maximum of 3 consecutive financial years.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, determines the Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements and the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year ending in December 31, 2023, by referring to the applicable provisions.

The Mechanism for selecting a Public Accountant through joint procurement is shown in the diagram below:

Penetapan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Asuransi Jasindo untuk tahun buku 2023 berdasarkan arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SD.139/DMA/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun Buku 2022, bahwa penetapan Kantor Akuntan Publik dilakukan secara tersendiri berdasarkan pada usulan Dewan Komisaris dan dikoordinasikan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil RUPS tersebut, Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 melalui Surat Dewan Komisaris Nomor S-043/DK/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dengan mempertimbangkan surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor S-004/KA/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Berdasarkan keputusan tersebut, Direksi telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor SD.05/DOP/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.

Ruang Lingkup Pekerjaan Akuntan Publik

Berikut ini merupakan ruang lingkup pekerjaan Akuntan Publik:

1. Akuntan Publik mengaudit laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian Asuransi Jasindo dan Entitas Anak serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Akuntan Publik akan melakukan pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Asuransi Jasindo tahun buku 2023 berdasarkan PSA 62.
3. Akuntan Publik melakukan *review* atas Laporan Evaluasi Kinerja Asuransi Jasindo, termasuk evaluasi Rencana Kerja Anggaran, tingkat kesehatan, dan *Key Performance Indicator* (KPI) tahun buku 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 826/KMK.013/1992 tentang "Tingkat Kesehatan Perusahaan".

Appointment of Public Accountant

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to conduct an audit of Asuransi Jasindo's Financial Statements for the 2023 financial year based on the direction of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SD.139/DMA/VI/2023 dated June 27, 2023 regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Asuransi Jasa Indonesia for the 2022 Financial Year, that the establishment of a Public Accounting Firm is carried out separately based on the proposal of the Board of Commissioners and coordinated with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as Holding of State-Owned Enterprises Insurance and Guarantee.

As a follow-up to the results of the GMS, the Board of Commissioners has submitted recommendations on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the 2023 Financial Year through the Board of Commissioners Letter Number S-043/DK/XI/2023 dated November 6, 2023 taking into account the Audit Committee's letter to the Board of Commissioners Number S-004/ KA/X/2023 dated October 31, 2023.

Based on this decision, the Board of Directors has appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) and has reported it to the Financial Services Authority through Letter Number SD.05/DOP/I/2024 dated January 9, 2024.

Public Accountant Scope of Work

The following is the scope of work of a Public Accountant:

1. The Public Accountant audited the consolidated statements of financial position (balance sheet) of Asuransi Jasindo and its Subsidiaries as well as the consolidated profit and loss statements and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the year ended on December 31, 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. The Public Accountant will perform testing and reporting on compliance with laws and regulations and internal control of Asuransi Jasindo for the 2023 financial year based on PSA 62.
3. The Public Accountant will review the Asuransi Jasindo Performance Evaluation Report, including the evaluation of the Budget Work Plan, soundness level, and Key Performance Indicator (KPI) for the 2023 financial year in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 826/KMK.013/1992 concerning "Company Health Level".

Periode KAP dan Besaran Biaya Jasa

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang menangani Laporan Keuangan Perusahaan 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Public Accountant Firm Period and Service Fee

The Public Accountant Firm and Accountant that handling the Company's Financial Statements for the last 5 years, are as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm	Nama Akuntan (Perorangan) Name of Accountants (Individual)	Jasa Audit Audit Service	Biaya Fee	Opini Opinion
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | Partners (the Indonesian member firms of the PwC global network)	Herry Setiadie	Audit umum laporan keuangan dan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian internal General audit of financial statements and audit of regulatory compliance and internal controls	Rp4.350.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | Partners (the Indonesian member firms of the PwC global network)	Herry Setiadie	Audit umum laporan keuangan dan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian internal General audit of financial statements and audit of regulatory compliance and internal controls	Rp4.150.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | Partners (the Indonesian member firms of the PwC global network)	M. Yusuf Wibisana	Audit umum laporan keuangan dan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian internal General audit of financial statements and audit of regulatory compliance and internal controls	Rp3.000.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | Partners (the Indonesian member firms of the PwC global network)	Lucy Luciana Suhenda	Audit umum laporan keuangan dan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian internal General audit of financial statements and audit of regulatory compliance and internal controls	Rp2.337.500.000	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects
2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | Partners (the Indonesian member firms of the PwC global network)	Lucy Luciana Suhenda	Audit umum laporan keuangan dan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian internal General audit of financial statements and audit of regulatory compliance and internal controls	Rp2.475.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects

Jasa Audit Lain yang Diberikan

Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa audit lain kepada Asuransi Jasindo di tahun 2023.

Other Audit Services Provided

The Public Accountant Office did not provide any other audit services to Asuransi Jasindo in 2023.

Nama dan Alamat Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan

Name and Address of Company's Supporting Institutions/Professions

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 3 Notarial Deed Making Services Statement of Decisions of Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 3	13 Januari 2023 January 13, 2023	6.000.000
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 4 Notarial Deed Making Services Statement of Decisions of Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 4	13 Januari 2023 January 13, 2023	6.000.000
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 4 Notarial Deed Making Services Statement of Decisions of Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 4	13 Januari 2023 January 13, 2023	6.000.000
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 4 Services for Making Notarial Deeds Confirming Decree Statements of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 4	2 Februari 2023 February 2, 2023	6.000.000

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 2 Services for Making Notarial Deeds Confirming Decree Statements of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 2	6 Juli 2023 July 6, 2023	8.500.000
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 4 Services for Making Notarial Deeds Statement of Decisions of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 4	15 Agustus 2023 August 15, 2023	6.000.000
	Notaris Aliyah S. Azhar , S.H., M.Kn. Notary Aliyah S. Azhar, SH, M.Kn. Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10A Jakarta Pusat | Central Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 23 Services for Making Notarial Deeds Statement of Decisions of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 23	22 September 2023 September 22, 2023	5.500.000

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Notaris & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn. Notary & PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, M.Kn. Graha 415, Jl. Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | South Jakarta, DKI Jakarta	Jasa Pembuatan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Akta Nomor 4 Services for Making Notarial Deeds Statement of Decisions of the Minister of State-Owned Enterprises and the Main Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Deed Number 4	24 November 2023 November 24, 2023	6,500,000
Notaris Notary	Notaris/PPAT Evy Setianingsih,S.H.,M.Kn Komplek Ruko i-walk, Blok A No. 11 Perumahan Citraland NGK Jl. Ismail Malik, Mayang Mangurai Alam Barajo, Kota Jambi | Jambi City, Provinsi | Province Jambi	Pembaruan/Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan aset PT Asuransi Jasa Indonesia di Jalan Slamet Riyadi Nomor 007, RT. 010, RW. 00 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura, Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi Renewal/Extension of Building Use Rights Certificate for assets of PT Asuransi Jasa Indonesia on Jalan Slamet Riyadi Number 007, RT. 010, RW. 00 Solok Sipin District, Telanaipura Regency, Jambi Regency, Jambi Province	45 Hari Kerja (Terhitung Mulai Tanggal 14 Desember 2022-Januari 2023 45 Working Days (Starting from 14 December 2022-January 2023	170.000.000.00,-
	Notaris/PPAT Ilawati S.H.,M.Kn Jl. Tuanku Tambusai No. 59 Pekanbaru	Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan Aset Tanah dan Bangunan di Jl. Jend Sudirman No. 349, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Management of Certificates for Building Use Rights for Land and Building Assets on Jl. Jend Sudirman No. 349, Sumajiwa Subdistrict, Pekanbaru City District, Pekanbaru City, Riau Province	30 November 2022-Februari 2023 November 30, 2022-February 2023	105.000.000.00,-
	Notaris/PPAT M. Wary Trisatria Rosman, S.H., M.Kn. Jl. Cipta Karya No.19 D, Kelurahan | Subdistrict Sialang Munggu, Kecamatan | District Tuah Madani, Kota | City Pekanbaru, Riau	Penjualan atas Aset Tanah dan Bangunan di Jl. Jend Sudirman No. 349, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Sales of land and building assets on Jl. Jend Sudirman No. 349, Sumajiwa Subdistrict, Pekanbaru City District, Pekanbaru City, Riau Province	Desember 2022-Oktober 2023 December 2022-October 2023	152.444.750.00,-

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Notaris/PPAT Desy Susanti, S.H Jl. Sultan Agung No.10 Simpang Pulai, Jambi	Penjualan atas Aset PT Asuransi Jasa Indonesia No. 58/ Sungai Putri, Jambi Sales of Assets of PT Asuransi Jasa Indonesia No. 58/Sungai Putri, Jambi	Agustus-Desember 2023 August-December 2023	84.623.540
	Notaris/PPAT Hadijah, SH. Wisma Aria Lantai 1 | 1st Floor, Ruang | Room 103 Jl. HOS Cokroaminoto No.81 Menteng, Jakarta Pusat | Central Jakarta	Pembayaran Biaya Akta Kuasa Jual (SHGB No. 58/Sungai Putri/2023) Nomor 38, dan Biaya Akta Kuasa Jual (SHGB No.00457/Sumahilang/2023) No. 39 Payment of the Fee for the Power of Attorney Deed (SHGB No. 58/Sungai Putri/2023) Number 38, and the Fee for the Power of Sale Deed (SHGB No.00457/Sumaringan/2023) No. 39	Desember 2023 December 2023	5.000.000
	Notaris/PPAT Dr Lenny Mutiara Ambarita, S.H.,M.Kn., Jl. Parel Pasaribu No. 12 Siantar Estate Kecamatan Siantar | Siantar District, Kabupaten Simalungun | Simaulungun Subdistrict	Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Aset PT Asuransi Jasa Indonesia beralamat di Jl Mataram No. 26 Petisan Hulu, Medan Processing the Extension of the Certificate for Building Use Rights for Assets of PT Asuransi Jasa Indonesia is located at Jl. Mataram no. 26 Petisan Hulu, Medan	Agustus 2023-Mei 2024 August 2023-May 2024	60.000.000.00,-
	Notaris/PPAT Adi Akbar S.H.,M.Kn., Kota Tegal | Tegal City	Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 492 beralamat di Jl. Gajah Mada No.107 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal Processing of Building Use Rights Certificate Extension No. 492 is located at Jl. Gajah Mada No. 107 Pekauman, West Tegal, Tegal City	Juni 2023- Maret 2024 June 2023- March 2024	29.362.500.00,-
	Notaris/PPAT Reno Rizaldi Nalaprana S.H.,M.Kn., Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Sungai Raya Lestari 2, Nomor BB 5, Kelurahan Sungai Raya | Sungai Raya Subdistrict, Kecamatan Sungai Raya | Sungai Raya District, Kabupaten Kubu Raya | Kubu Raya Regency Kalimantan Barat | West Kalimantan	Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 72 atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia di Jl. Sultan Abdurrahman No. 23A Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat Processing of Building Use Rights Certificate Extension No. 72 in the name of PT Asuransi Jasa Indonesia on Jl. Sultan Abdurrahman No. 23A Bangkong River, Pontianak City District, Pontianak City West Kalimantan	November 2023-Januari 2024 November 2023-January 2024	95.000.000.00,-

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Notaris/PPAT Lilis Heryeni S.H., SP.I, M.Si., Jl. Amphibi No.12 Hamadi Angkatan Laut Jayapura, Papua	Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597 Aset PT Asuransi Jasa Indonesia di Jl. Komplek Perkantoran Pasifik Permai Blok B-16 Kelurahan Bhayangkara, Jayapura, Papua Processing of Building Use Rights Certificate Extension No. 597 Assets PT Asuransi Jasa Indonesia on Jl. Komplek Perkantoran Pasifik Permai Blok B-16 Bhayangkara Subdistrict, Jayapura, Papua	September-November 2023 September-November 2023	46.125.000.00,-
Retainer Lawyer	Kiagus Ahmad & Associates Menara Rajawali Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lantai 8 | 8th Floor, Jakarta Selatan | South Jakarta 12950	Jasa hukum penanganan permasalahan dan/atau isu hukum Pelayanan hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual Legal services for handling legal problems and/or issues Legal services in Intellectual Property Rights	17 Oktober 2022 s.d 17 Oktober 2023 October 17, 2022 to October 17, 2023	100.000.000
	Baraka Law Office Plaza 3 Pondok Indah Blok A, No.2 Lantai II | 2nd Floor Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan | South Jakarta 12310	Pelayanan Hukum Non Litigasi Pelayanan Hukum Litigasi Pelayanan Hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual Asset Tracing Non-Litigation Legal Services Litigation Legal Services Legal Services in Intellectual Property Rights Asset Tracing	31 Mei 2023 s.d 30 November 2023 May 31, 2023 to November 30, 2023	55.500.000
	Jhon Girsang & Associates SOHO Pancoran 17th Floor # N-1702 Jl. Letjend M.T. Haryono Kav. 2-3 Jakarta Selatan | South Jakarta	Jasa konsultasi bidang hubungan industrial Mempersiapkan, merancang, me*review* kontrak/Perjanjian bidang ketenagakerjaan Memberikan advis hukum terkait perselisihan hubungan industrial Melakukan proses penyelesaian masalah hukum melalui musyawarah, negosiasi sampai tingkat Triparti di Kantor Dinas maupun Suku Dinas Tenaga Kerja Republik indonesia Consulting services in industrial relations Prepare, design, review employment contract/ agreement Provide legal advice regarding industrial relations disputes Carry out the process of resolving legal issues through deliberation, negotiation up to the tripartite level at the Manpower Service Office and Sub-department of the Republic of Indonesia	6 Januari 2023 s.d 6 Januari 2024 January 6, 2023 to January 6, 2024	15.000.000

Lembaga/Profesi Institution/ Profession	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Penugasan Assignment Term	Biaya (Rp) Fee (IDR)
	Anwar Tumbelaka & Co Mayapada Tower 1 Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Lantai 8 | 8th Floor Jakarta 12920	Pelayanan Hukum Non Litigasi Pelayanan Hukum Litigasi Pelayanan Hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual Non-Litigation Legal Services Litigation Legal Services Legal Services in Intellectual Property Rights	3 Juli 2023 s.d 3 Juli 2024 July 3, 2023 to July 3, 2024	22.959.184
Konsultan Aktuaria Actuarial Consultant	Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal Menara 165, Jl. TB. Simatupang Kav 1, Lantai 7 | 7th Floor Cilandak Timur Jakarta Selatan | South Jakarta 12560	Penelaahan dan Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Aktuaris Tahun 2022 Review and Assessment of the Fairness of Presentation of the 2022 Actuarial Report	31 Mei 2023 s.d. 30 Juni 2023 May 31, 2023 to June 30, 2023	199.800.000
	Kantor Konsultan Aktuaria Halim dan Rekan Menara Standard Chartered Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lantai 18 | 18th Floor Jakarta Selatan | South Jakarta 12930	Pendampingan dan *Review* Perhitungan Cadangan Teknis 2023 Assistance and Review of 2023 Technical Reserve Calculations	12 Desember 2023 s.d. 15 April 2024 December 12, 2023 s.d. April 15, 2024	244.616.250
Pemeringkat Perusahaan Company Rating	PT Pemeringkat Efek Indonesia Equity Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lantai 30 | 30th Floor Unit A, E, F, dan G Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jakarta Selatan | South Jakarta	Jasa Pemeringkatan Dalam Negeri Domestic Rating	September 2023 September 2023	160.950.000,00

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Jaringan Operasional Perusahaan

List of Addresses of Subsidiaries and Operational Network Offices of the Company

Kantor Pusat Head Office	
PT Asuransi Jasa Indonesia	
Alamat Address	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No.21, RW.10, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng | Menteng District, Kota Jakarta Pusat | Central Jakarta City Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Capital Special Region 10340
Telepon Telephone	(021) 3924737, 3924748
Faksimili Facsimile	-
Contact Center	15000-73
E-mail	jasindo@jasindo.co.id
Website	www.jasindo.co.id

Entitas Anak Subsidiary Entity	
PT Mitracipta Polasarana	
Alamat Address	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21, RW. 10, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng | Menteng District, Kota Jakarta Pusat | Central Jakarta City Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Capital Special Region 10340
Telepon Telephone	(021) 390 2991 - 390 2992
Faksimili Facsimile	(021) 390 9335
Contact Center	
E-mail	Mitra-cp@dnet.ned.id
Website	http://www.mitracipta-polasarana.co.id
PT Asuransi Jasindo Syariah	
Alamat Address	Jl. Pintu Besar Utara No. 4, Jakarta Barat | West Jakarta, 11110
Telepon Telephone	(021) 6907454 (hunting)
Faksimili Facsimile	-
Contact Center	-
E-mail	mailto:marketing@jasindosyariah.co.id
Website	www.jasindosyariah.co.id

Sebaran Wilayah Operasional Perusahaan

Per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 1 Kantor Pusat, 30 *Representative Office* sebagaimana tabel berikut:

Distribution of the Company's Operational Area

As of December 31, 2023, the Company has 1 Head Office and 30 Representative Offices, as shown in the following table:

Kantor Pusat | Head Office

No	Kantor Office	Alamat Address	Telepon Telephone
1	Kantor Pusat Head Office	Graha Jasindo Jl. Menteng Raya Nomor 21, Kelurahan | Sub District Kebon Sirih, Kecamatan | District Menteng, Jakarta Pusat | Central Jakarta, 10340	021-3924737

Kantor Cabang | Representative Offices

No	Kantor Office	Alamat Address	Telepon Telephone
1	Jakarta	Grand Slipi Tower, Lobby Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Palmerah - Jakarta Barat | West Jakarta, 11480	021-29022245-48
2	Ambon	Jl. Dr. Sitanala No.43, Ambon	0911 - 352052, 315353
3	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.353, Balikpapan, 76115	0542 - 413086, 418344, 791462
4	Bandar Lampung	Jl. Raden Intan No. 84, Bandar Lampung, 35117	0721 - 262834, 240840
5	Bandung	Jl. Wastukancana No. 10, Bandung, 40117	022 - 4231890, 4233787, 4265517
6	Banjarmasin	Jl. Jend. A. Yani KM. 3,5 No. 137 C Banjarmasin, 70236	0511 - 3253072, 3252734, 3265062763
7	Batam	Jl. Imam Bonjol Blok J No. 160 B, Batam, 29444	0778 - 458727
8	Bogor	Jl. Jend. Sudirman No. 23, Bogor, 16121	0251 – 8327111, 8330637
9	Serang	Ruko Cipare Blok A 6 -7 Jl. Ahmad Yani No. 34, Serang, Banten 42117	0254 - 8483424, 84883433
10	Denpasar	Jl. Surapati No. 22, Denpasar, Bali, 80232	0361 - 235357, 263691
11	Jambi	Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 77, Jambi, 36122	0741 - 63160, 668566, 65593, 62384
12	Jayapura	Komplek Ruko Pasifik Permai Blok B No.16, Jayapura 99111	0967 - 531047, 5160650
13	Kendari	Jl. Abunawas No.2, Kec. Bende, Kadia, Kendari, 93117	0401 - 3121764
14	Kupang	Jl. Veteran No. 7 Kupang, NTT, 85228	0380 - 824635, 823982
15	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 132, Makassar, 90132	0411 - 873888, 875091, 873666
16	Manado	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 26, Manado, 95111	0431 - 863466, 862567
17	Mataram	Jl. Pejanggik No. 12 A, Pajang Barat, Mataram, NTB, 83126	0370 - 629422
18	Medan	Jl. Pulau Pinang No. 4, Medan, 20111	061 - 4553440, 4538683,4523759, 4522627
19	Padang	Jl. HR. Rasuna Said No. 89, RT. 1 RW. 1 Kel. | Subdistrict Rimbo Kaluang Kecamatan | District Padang Barat, 25114	0751 - 7055129, 7051632, 41855
20	Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 50, Palembang, 30135	0711 - 311219, 311521

Kantor Cabang | Representative Offices

No	Kantor Office	Alamat Address	Telepon Telephone
21	Palu	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 39, Palu, 94111	0451 - 421982, 423996
22	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 349, Pekanbaru, 28111	0761 - 35858, 35860
23	Pontianak	Jl. Sultan Abdurahman No. 23 A, Pontianak, 78116	0561 - 732446, 737925
24	Samarinda	Jl. Pulau Irian No. 1, Samarinda, 75113	0541 - 742511, 200856, 735425
25	Sampit	Jl. Jend. A. Yani No. 18, Sampit, Kalimantan Tengah | Central Kalimantan, 74322	0531 - 21141, 34265
26	Semarang	Jl. Sultan Agung No. 110 Candi Baru Semarang, 50231	024 - 8412202, 8413188
27	Solo	Jl. Slamet Riyadi No. 333, Solo, 57142	0271 - 741017, 741018, 712298
28	Sorong	Ruko Cendrawasih Blok 5, Jl. Basuki Rahmat KM.7,5 Depan Bandara | In front of Airport D.E.O. Sorong, Sorong - Papua Barat | West Papua	0951 - 322145, 334195, 334467
29	Surabaya	Jl. Walikota Mustajab No. 57, Surabaya	031 - 99244900, 99244800
30	Yogyakarta	Jl. Jend. Sudirman No. 61, Yogyakarta, 55225	0274 - 512178, 562509, 562826

04

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2023

National Economic Conditions in 2023

Perekonomian global kembali menghadapi tantangan dan ketidakpastian di tahun 2023. Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economics Outlook* yang diterbitkan pada Januari 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4%.

Terdapat sejumlah faktor dan risiko yang menyebabkan ekonomi global tumbuh melambat di tahun 2023. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah, distrupsi rantai pasok, tingkat inflasi yang tinggi, hingga kebijakan suku bunga tinggi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Untuk mengendalikan laju inflasi, *The Fed* mengambil kebijakan untuk mempertahankan *Federal Funds Rate* (FFR) pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Di 2023, *The Fed* tercatat beberapa kali menaikkan tingkat suku bunga acuan dari 4,25%-4,50% di akhir tahun 2022 menjadi 5,25%-5,50% di akhir tahun 2023. Demikian juga dengan Bank Sentral Eropa (ECB) yang tercatat menaikkan tingkat suku bunga pinjaman hingga ke level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,75%.

Fenomena *higher for longer* memicu *capital outflow* dari pasar keuangan di *emerging market* dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap hampir seluruh mata uang lainnya.

The global economy again faces challenges and uncertainty in 2023. The International Monetary Fund (IMF), in its World Economics Outlook report published in January 2024 projects global economic growth in 2023 at 3.1%, lower than the previous year's growth of 3.4%.

A number of factors and risks cause the global economy to grow at a slower pace in 2023. Prolonged geopolitical conflicts in Europe and the Middle East, supply chain disruptions, high inflation rates, and high interest rate policies serve as factors that greatly influence global economic growth.

To control the inflation rate, the Fed adopted a policy of maintaining the Federal Funds Rate (FFR) at a high level for a longer period of time (higher for longer). In 2023, the Fed was recorded to have raised its benchmark interest rate several times from 4.25%-4.50% at the end of 2022 to 5.25%-5.50% at the end of 2023. Similarly with the European Central Bank (ECB) which was recorded as raising loan interest rates to the highest level in history, namely 4.75%.

The higher for longer phenomenon triggers capital outflows from financial markets in emerging markets and strengthens the United States dollar exchange rate against almost all other currencies.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh solid meski juga mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% atau melambat dari 5,31% di tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disebabkan nilai ekspor yang turun menjadi USD258,82 miliar dari USD291,90 miliar di tahun 2022, sejalan dengan normalisasi harga komoditas di sepanjang 2023. Kendati demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global.

Di samping penurunan ekspor, konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,82%. Hal ini disebabkan oleh penurunan konsumsi transportasi akibat kenaikan harga BBM subsidi sejak akhir kuartal III-2022 dan penurunan konsumsi makanan dan minuman akibat kenaikan harga beberapa bahan pokok.

Kendati pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun ekonomi Indonesia relatif stabil di 2023. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional 2023 tercatat sebesar 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,51%. Hal tersebut salah satunya juga karena kebijakan BI yang menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menjadi 6,00% dari posisi akhir tahun lalu sebesar 5,50% untuk memastikan inflasi inti tetap terjaga. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia dengan menetapkan suku bunga acuan yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga global.

Di pasar keuangan, dana asing tercatat masuk ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp49,24 triliun. Dana tersebut sebagian besar disumbangkan oleh dana asing yang masuk ke pasar utang yaitu sebesar Rp62,56 triliun. Sedangkan di pasar saham mencatatkan dana keluar sebesar Rp13,32 triliun. Masuknya dana asing tersebut mendorong perbaikan nilai tukar rupiah sebesar 1,14% menjadi Rp15.390.

Amidst the slowing global economic conditions, the Indonesian economy remains able to grow solidly despite its slowing trend. Based on data from the Central Statistics Agency, in 2023 the Indonesian economy grew by 5.05% or slow down from 5.31% in 2022. The slowing down in Indonesia's economic growth is mainly due to the export value falling to USD258.82 billion from USD291.90 billion in 2022, in line with the normalization of commodity prices throughout 2023. Nevertheless, Indonesia's trade balance in 2023 still recorded a surplus of USD36.93 billion. This achievement shows that Indonesia's trade performance is maintained amidst the global economic slowdown.

Apart from the decline in exports, household consumption also slowed to 4.82%. This is due to a decrease in transportation consumption following the increase in subsidized fuel prices since the end of the III quarter of 2022 and a decrease in food and beverage consumption caused by the increase in the prices of several basic commodities.

Even though economic growth has slowed slightly, the Indonesian economy remains relatively stable in 2023. This stability is largely due to the successful efforts of the government and Bank Indonesia (BI) in maintaining a low inflation rate. According on BPS data, national inflation in 2023 was recorded at 2.61%, much lower than the previous year's rate of 5.51%. This reduction is also attributed due to BI's policy of increasing the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) to 6.00% from the position at the end of last year of 5.50% to ensure core inflation is maintained. These measures are taken to maintain the stability of the Indonesian financial market by setting a reference interest rate higher then the global interest rate.

In the financial market, foreign funds amounting to IDR49.24 trillion were recorded entering the Indonesian financial market. Most of these funds were contributed by foreign funds entering the debt market, amounting to IDR62.56 trillion. Meanwhile, the stock market recorded an outflow of IDR13.32 trillion. The influx of foreign funds prompted an improvement in the rupiah exchange rate by 1.14% to IDR15,390.

Kondisi Industri Asuransi Tahun 2023

Insurance Industry Condition in 2023

Tahun 2023, industri asuransi kembali mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pendapatan premi asuransi di sepanjang tahun 2023 mencapai Rp320,88 triliun, naik 3,02% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp311,48 triliun. Peningkatan pendapatan premi asuransi tersebut didukung oleh akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 20,89% menjadi Rp143,47 triliun. Namun demikian, pendapatan premi asuransi jiwa masih terkontraksi sebesar 7,99% menjadi Rp177,41 triliun.

Selain itu, secara umum permodalan di industri asuransi juga mengalami penguatan, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) yang di atas *threshold* masing-masing sebesar 457,98% dan 363,10%, jauh di atas *threshold* sebesar 120%.

Pendapatan *underwriting* asuransi umum tahun 2023 mencapai Rp56,68 triliun, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,29 triliun. Demikian juga dengan hasil investasi asuransi umum yang meningkat 32,63% menjadi Rp6,20 triliun dari tahun sebelumnya Rp4,68 triliun.

Total aset industri asuransi juga meningkat 6,03% menjadi Rp1.843,02 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.738,24 triliun, dengan investasi mencapai Rp1.533,30 triliun.

Namun demikian, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia saat ini masih terbilang sangat rendah. Menurut OJK, penetrasi asuransi baru mencapai 2,75% dari penduduk Indonesia yang artinya masih tergolong cukup rendah. Angka penetrasi asuransi Indonesia itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti, Malaysia, Thailand, maupun Singapura.

Masih rendahnya penetrasi asuransi tersebut bukan berarti menjadi persoalan yang buruk tetapi persoalan yang baik karena masih terdapat ruang perbaikan yang tidak terbatas. Karena itu, di tahun 2023, OJK secara resmi meluncurkan *Roadmap* Perasuransian 2023-2027. Peta jalan ini bertujuan untuk menjadi panduan perkembangan industri perasuransian di Indonesia.

Dengan peta jalan tersebut, semua pemangku kepentingan industri perasuransian nasional diharapkan dapat berkolaborasi dan melakukan langkah strategis untuk mewujudkan visi bersama untuk terwujudnya industri asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas keuangan.

In 2023, the insurance industry grew once again. According to data from the Financial Services Authority (OJK), accumulated insurance premium income throughout 2023 reached IDR320.88 trillion, an increase of 3.02% compared to the previous year of IDR311.48 trillion. The increase in insurance premium income was supported by accumulated general insurance and reinsurance premiums which grew by 20.89% to IDR143.47 trillion. However, life insurance premium income remain contracted by 7.99% to IDR177.41 trillion.

In addition, in general capital in the insurance industry has generally strengthened, with both the life insurance and general insurance industries recording Risk Based Capital (RBC) above the threshold of 457.98% and 363.10% respectively, far significantly surpassing the threshold of 120%.

General insurance underwriting income in 2023 reached IDR56.68 trillion, a significant increase from the previous year's of IDR42.29 trillion. Likewise, general insurance investment returns increased by 32.63% to IDR6.20 trillion from IDR4.68 trillion in the previous year.

Total insurance industry asset also increased by 6.03% to IDR1,843.02 trillion from the previous year of IDR1,738.24 trillion, with investment reaching IDR1,533.30 trillion.

However, the level of insurance penetration in Indonesia currently remains very low. According to OJK, insurance penetration has only reached 2.75% of the Indonesian population, which is still quite low. Indonesia's insurance penetration rate is much lower compared to neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Singapore.

The low level of insurance penetration does not mean to be bad issue but a good issue as there remains unlimited room for improvement. Therefore, in 2023, OJK officially launched the 2023-2027 Insurance Roadmap. This road map aims to guide the development of the insurance industry in Indonesia.

With this roadmap, all stakeholders in the national insurance industry are expected to be able to collaborate and take strategic steps to realize a shared vision of creating an insurance industry that is sound, efficient and with integrity, strengthening consumer and community protection, as well as supporting economic growth through market deepening, increased inclusion and financial stability.

Tinjauan Operasi Per Lini Usaha

Review of Operations Per Line of Business

Produk Perusahaan dibagi menjadi 15 (lima belas) lini usaha, yaitu Asuransi Pengangkutan, Asuransi Harta Benda, Asuransi *Aviation,* Asuransi Satelit, Asuransi Rekayasa, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Aneka, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kredit, Asuransi Keuangan, Asuransi Energi *Onshore,* dan Asuransi Energi *Offshore.* Sebagian besar pelanggan utama Perusahaan didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun Non BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Lini Usaha

1. Asuransi Pengangkutan memberikan jaminan atas kerugian finansial yang harus ditanggung pemilik barang dalam pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara.
2. Asuransi Harta Benda memberikan Jaminan atas kerugian/kerusakan harta benda, atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh antara lain kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, risiko kerusuhan dan huru-hara, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kerusakan pada tanaman padi diakibatkan oleh banjir, kekeringan, serangan hama tanaman, dan penyakit tanaman, asuransi ternak dan asuransi usaha budidaya udang.
3. Asuransi *Aviation* menawarkan produk-produk asuransi pesawat untuk memberikan jaminan perlindungan atas segala aktivitas penerbangan udara untuk risiko-risiko yang dijamin di dalam kondisi polis. Seperti risiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, *personal accident, loss of licence,* serta *ground handling liability*.
4. Asuransi Rekayasa memberikan jaminan dalam lingkup industri teknik meliputi asuransi *Contractor's All Risks* (CAR), *Erection All Risks* (EAR), *Electrical Equipment Insurance* (EEI), *Contractor's Plan and Machinery* (CPM), *Machinery Breakdown* (MB), *CPM Non Project* dan *Civil Eng Completed Risks*.
5. Asuransi Rangka Kapal memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan pendukungnya. Dengan jaminan yang mencakup kerugian karena kerusakan fisik maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
6. Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan proteksi atas kerugian karena kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan santunan terhadap pengemudi dan penumpangnya.
7. Asuransi Aneka memberikan jaminan risiko yang memberikan perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (*third party*).

The Company's products are divided into 15 (fifteen) business lines: Cargo Insurance, Property Insurance, Aviation Insurance, Satellite Insurance, Engineering Insurance, Marine Hull Insurance, Motor Insurance, Liability Insurance, Miscellaneous Insurance, Personal Accident Insurance, Health Insurance, Credit Insurance, Financial Insurance, Onshore Energy Insurance, Offshore Energy Insurance. Most of the Company's main customers are dominated by large companies, both State-Owned Enterprises as well as Non-BUMN spread throughout Indonesia.

Business Lines

1. Cargo Insurance covers financial losses that must be borne by the owner of the goods in transporting goods by land, sea, or air.
2. Property Insurance provides coverage for loss/damage to property, or insured interests, caused by fire, lightning, explosion, aircraft crashes and their smoke, risk of riots and riots, floods, earthquakes, landslides, damage to rice crops caused by floods, droughts, plant pests, and plant diseases, livestock insurance, and shrimp farming business insurance.
3. Aviation Insurance offers aircraft insurance products to protect all air flight activities from the risks guaranteed in the policy conditions, such as risks to the airframe, legal liability to third parties, personal accident, loss of license, and ground handling liability.
4. Engineering Insurance provides coverage within the scope of the engineering industry, including Contractor's All Risks (CAR), Erection All Risks (EAR), Electrical Equipment Insurance (EEI), Contractor's Plan and Machinery (CPM), Machinery Breakdown (MB), CPM Non-Project, and Civil Eng Completed Risks.
5. Marine Hull Insurance covers losses incurred due to accidents or consequences arising from shipping and supporting activities, including losses due to physical damage and legal liability to third parties.
6. Motor Insurance provides protection against losses due to damage or loss of motor vehicles, legal liability to third parties, and compensation for drivers and passengers.
7. Miscellaneous Insurance provides risk coverage that protects the insured against third-party lawsuits.

8. Asuransi Keuangan memberikan jaminan proteksi yang meliputi, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, *Custom Bond*, dan Kontra Bank Garansi.
9. Energi *Offshore* memberikan jaminan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aset-aset *property offshore* mulai dari sektor hulu sampai hilir yang meliputi *exploration, production* dan *construction*.
10. Asuransi Energi *Onshore* memberikan jaminan atas risiko yang timbul dari perminyakan yang terkait dengan aset-aset properti *onshore* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan *oil & gas* yang sedang beroperasi.
11. Asuransi Satelit memberikan jaminan asuransi terhadap risiko-risiko satelit pada saat *pre-launch, launch*, dan ketika satelit *in orbit.*
12. Asuransi Tanggung Gugat memberikan perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (*third party*) meliputi *Public Liability* (PL), *Employers Liability* (EL), *Professional Indemnity* (PI), *Comprehensive General Liability* (CGL), *Automobile Liability* (AL), *Credit Guarantee Insurance* (GI), *Export Credit, Fidelity Guarantee, Product Liability, Freight Forwarder Liability.*
13. Asuransi Kecelakaan Diri memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan, kecelakaan dalam penerbangan dan pelayaran yang mengakibatkan kematian, cacat tetap sebagian atau seluruh tubuh serta biaya perawatan/pengobatan, kecelakaan bagi siswa/pelajar/mahasiswa termasuk pengajar dan petugas administrasi, dan jaminan atas asuransi nelayan.
14. Asuransi Kesehatan memberikan manfaat bagi jaminan kesehatan yang komprehensif dan dikemas dalam model *indemnity* maupun *manage care*.
15. Asuransi Kredit memberikan jaminan dalam memberikan perlindungan kepada perbankan atas risiko kegagalan kreditur melaksanakan kewajibannya.

8. Financial Insurance provides protection guarantees, including Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, Custom Bond, and Counter Bank Guarantee.
9. Offshore Energy Insurance provides coverage for all activities related to offshore property assets ranging from upstream to downstream sectors, including exploration, production, and construction.
10. Onshore Energy Insurance covers risks from petroleum-related to onshore property assets and everything related to oil & gas operations.
11. Satellite Insurance provides insurance coverage against satellite risks during pre-launch, launch, and when the satellite is in orbit.
12. Liability Insurance provides protection for the insured against lawsuits from third parties, including Public Liability (PL), Employers Liability (EL), Professional Indemnity (PI), Comprehensive General Liability (CGL), Automobile Liability (AL), Credit Guarantee Insurance (GI), Export Credit, Fidelity Guarantee, Product Liability, Freight Forwarder Liability.
13. Personal Accident Insurance protects against risks caused by accidents, accidents in aviation and shipping resulting in death, permanent disability of part or all the body, treatment/medical expenses, accidents for students, including teachers and administrative officer, and guarantees for fishermen's insurance.
14. Health Insurance provides benefits for comprehensive health insurance and is packaged in indemnity and managed care models.
15. Credit Insurance assures protection to banks for the risk of failure of creditors to carry out their obligations.

Kinerja Pendapatan Premi

Kinerja pendapatan premi 2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Premium Income Performance

The 2023 premium income performance can be described in the following table:

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Lini Usaha Business Lines	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 Realization in 2023	Realisasi 2022 Realization in 2022	% terhadap RKAP 2023 % of the 2023 RKAP	% terhadap Tahun Lalu % of the Last Year
Pengangkutan Cargo	123.334	52.989	68.276	42,96	77,61
Harta Benda/Kebakaran Property/Fire	1.636.970	1.173.959	1.330.136	71,72	88,26
Aviasi/Rangka Pesawat Aviation/Airframe	119.925	204.111	310.135	170,20	65,81
Rekayasa Engineering	209.561	126.604	151.001	60,41	83,84
Rangka Kapal Marine Hull	423.788	275.376	166.427	64,98	165,46
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	179.367	130.228	168.673	72,60	77,21

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Lini Usaha Business Lines	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 Realization in 2023	Realisasi 2022 Realization in 2022	% terhadap RKAP 2023 % of the 2023 RKAP	% terhadap Tahun Lalu % of the Last Year
Aneka Miscellaneous	11.542	8.933	12.476	77,40	71,60
Asuransi Keuangan/Jaminan Financial Insurance/Bonding	44.540	60.532	65.640	135,90	92,22
Energi *Offshore* Offshore Energy	566.612	572.620	570.790	101,06	100,32
Energi *Onshore* Onshore Energy	40.146	44.421	39.619	110,65	112,12
Satelit Satellite	28.911	283.399	129.965	980,24	218,06
Tanggung Gugat Liability	51.906	40.356	40.007	77,75	100,87
Kecelakaan Accident	14.341	3.475	5.521	24,23	62,94
Kesehatan Health	548.998	350.334	275.072	63,81	127,36
Kredit Credit	-	(18.738)	(83.378)	-	22,47
Jumlah Total	3.999.942	3.308.598	3.250.359	82,72	101,79

Tinjauan Operasi Per Lini Usaha

COB yang memiliki kontribusi tertinggi adalah COB *Property*, *Energy Offshore, Health, Satellite* dan *Marine Hull*. Perolehan premi COB *Property* sebesar Rp1.173,96 miliar atau 71,72% dari anggaran serta turun 11,74% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar Rp1.330,14 miliar. Premi COB *Energy Offshore* sebesar Rp572,62 miliar atau 101,06% dari anggaran serta naik 0,32% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar Rp570,79 miliar. Premi COB *Health* sebesar Rp350,33 miliar atau 63,81% dari anggaran, serta naik 27,36% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar Rp275,07 miliar. Premi COB *Satellite* sebesar Rp283,40 miliar atau 980,24% dari anggaran serta naik 118,06% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar Rp129,97 miliar. Premi COB *Marine Hull* sebesar Rp275,38 miliar atau 64,98% dari anggaran serta naik 65,46% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar Rp166,43 miliar.

Review of Operations Per Business Line

The COBs that have the highest contribution are COB Property, Offshore Energy, Health, Satellite and Marine Hull. The COB Property premium processing amounted to IDR1,173.96 billion or 71.72% of the budget and decreased by 11.74% compared to production in 2022 of IDR1,330.14 billion. The COB Offshore Energy premium amounted to IDR572.62 billion or 101.06% of the budget and increased by 0.32% compared to production in 2022 of IDR570.79 billion. The COB Health premium was IDR350.33 billion or 63.81% of the budget, and increased by 27.36% compared to production in 2022 of IDR275.07 billion. The COB Satellite premium was IDR283.40 billion or 980.24% of the budget and increased by 118.06% compared to production in 2022 of IDR129.97 billion. The COB Marine Hull premium was IDR275.38 billion or 64.98% of the budget and increased by 65.46% compared to production in 2022 of IDR166.43 billion.

Sumber Pendapatan Premi 2023
Source of Premium Income in 2023

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Sumber Akuisisi Acquisition Source	2023		2022		Pertumbuhan Increase	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Direct	1.847.466	55,84	1.680.457	51,70	167.009	9,94
Koas Masuk Incoming Coinsurance	694.567	20,99	658.941	20,27	35.626	5,41
Broker	607.930	18,37	622.158	19,14	(14.228)	(2,29)
Agen Agent	120.584	3,64	254.316	7,82	(133.732)	(52,58)
Perbankan Banking	27.543	0,83	28.347	0,87	(804)	(2,84)
Online	3.679	0,11	10.368	0,32	(6.689)	(64,52)

Sumber Pendapatan Premi 2023
Source of Premium Income in 2023

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Sumber Akuisisi Acquisition Source	2023		2022		Pertumbuhan Increase	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Konsorsium Consortium	271	0,01	384	0,01	(113)	(29,43)
Leasing	6.558	0,20	(4.612)	(0,14)	11.170	242,19
Jumlah Total	**3.308.598**	**100**	**3.250.359**	**100,00**	**58.239**	**1,79**
BUMN State-Owned Enterprises	1.972.503	59,62	2.184.784	67,22	(212.281)	(9,72)
BUMS Private-Owned Enterprises	1.051.754	31,79	935.295	28,77	116.459	12,45
Perorangan Individuals	284.342	8,59	130.281	4,01	154.061	118,25
Lain-Lain Others	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah Total	**3.308.598**	**100,00**	**3.250.359**	**100,00**	**58.239**	**1,79**

Sumber Pendapatan Premi pada tahun 2023 masih didominasi oleh penutupan *direct* jika dilihat dari sumber akuisisi yang berkontribusi sebesar 55,84% dari total Pendapatan Premi. Jika dilihat dari sumber bisnis, kontribusi terbesar dari BUMN dan *Group* (anak perusahaan) sebesar 59,62% total Pendapatan Premi.

Asuransi Jasindo juga mendapatkan penugasan langsung dari pemerintah melalui Perlindungan Asuransi Jamkesmen, Asuransi Jamkestama, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Usaha Ternak Kerbau (AUTK). Asuransi Jasindo juga mendapatkan penugasan tambahan melalui perlindungan Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) sebagai bentuk dukungan dalam perlindungan terhadap aset negara dan memperbaiki perekonomian Indonesia.

Sources of Premium Income in 2023 is still be dominated by direct closings when viewed from sources of acquisitions which contribute 55.84% of total Premium Income. When viewed from business sources, the largest contribution comes from State-Owned Enterprises and Group (subsidiaries) amounting to 59.62% of total Premium Income.

Asuransi Jasindo also received direct assignments from the government through Jamkesmen Insurance Protection, Jamkestama Insurance, Rice Farming Business Insurance (AUTP), Cattle Livestock Business Insurance (AUTS), and Buffalo Livestock Business Insurance (AUTK). Asuransi Jasindo also received additional assignments through the protection of State Property Insurance (ABMN) as a form of support in protecting state assets and improving the Indonesian economy.

Perolehan Premi Penugasan Khusus Pemerintah Tahun 2023
Revenue from Government Special Assignment Premiums in 2023

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Lini Usaha Business Lines	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat (Jamkesmen) Health Insurance for Ministers and Officials (Jamkesmen)	171.050	142.742	28.308	19,83
Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) Main Health Insurance (Jamkestama)	109.457	98.126	11.331	11,55
Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) State Property Insurance	129.778	80.425	49.353	61,37
Asuransi Usaha Tani Padi Rice Farming Business Insurance	55.004	64.166	(9.162)	(14,28)
Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Cattle Livestock Business Insurance	4.000	15.216	(11.216)	(73,71)
Jumlah Total	**469.289**	**400.675**	**68.614**	**17,12**

Produksi premi dari Penugasan Khusus Pemerintah tahun 2023 terbesar diperoleh dari Asuransi Kesehatan untuk Menteri dan Pejabat atau disingkat Jamkesmen yaitu sebesar Rp171,05 miliar. Untuk pertumbuhan terbesar produksi premi dari penugasan khusus pemerintah berasal dari Asuransi Barang Milik Negara (ABMN), di mana naik sebesar 61,37% dibandingkan dengan perolehan premi tahun 2022.

The largest premium production from the Government's Special Assignments in 2023 was obtained from Health Insurance for Ministers and Officials or abbreviated as Jamkesmen, which amounted to IDR171.05 billion. The biggest growth in premium production from government special assignments came from State Property Insurance (ABMN), which increased by 61.37% compared to premium production in 2022.

Beban Klaim

Claim Expense

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in millions of Rupiah (unless otherwise stated)

Lini Usaha Business Lines	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 Realization in 2023	Realisasi 2022 Realization in 2022	% Terhadap RKAP 2023 % of the 2023 RKAP	% Terhadap Tahun Lalu % of the Last Year
Pengangkutan Cargo	36.678	39.171	15.556	106,80	251,82
Harta Benda/Kebakaran Property/Fire	912.421	493.172	758.730	54,05	65,00
Aviasi/Rangka Pesawat Aviation/Airframe	81.724	134.233	162.745	164,25	82,48
Rekayasa Engineering	71.354	60.275	46.017	84,47	130,98
Rangka Kapal Marine Hull	126.218	211.027	68.064	167,19	310,04
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	94.409	73.682	101.074	78,05	72,90
Aneka Miscellaneous	3.382	2.628	1.189	77,71	221,03
Asuransi Keuangan/Jaminan Financial Insurance/Bonding	22.911	143.187	89.670	624,97	159,68
Energi *Offshore* Offshore Energy	1.380.193	864.723	671.007	62,65	128,87
Energi *Onshore* Onshore Energy	2.567	20	(5.955)	0,78	(0,34)
Satelit Satellite	-	18.886	66.990	-	28,19
Tanggung Gugat Liability	20.296	23.684	5.114	116,69	463,12
Kecelakaan Accident	2.212	566	1.537	25,59	36,82
Kesehatan Health	419.250	290.184	276.221	69,22	105,06
Kredit Credit	452.314	259.376	1.499.175	57,34	17,30
Jumlah Total	**3.625.928**	**2.614.817**	**3.757.133**	**72,11**	**69,60**

Pencapaian Klaim Bruto 2023 kurang dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar 38,67%. Hal tersebut sejalan dengan pencapaian Pendapatan Premi yang juga kurang dari target 2023, di mana Perusahaan membukukan pencapaian sebesar 82,72% dari RKAP 2023. Mayoritas realisasi klaim bruto Perusahaan di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan RKAP yang ditetapkan, kecuali pada COB *Bonding*, COB Rangka Kapal, COB Aviation, COB Tanggung Gugat dan COB Pengangkutan yang realisasi *settle claim* di tahun 2023 melebihi dari RKAP.

Achievement of Gross Claims in 2023 is less than the predetermined RKAP of 38.67%. This is in line with the achievement of Premium Income which is also less than the 2023 target, where the Company recorded an achievement of 82.72% of the 2023 RKAP. The majority of the Company's realized gross claims in 2023 are lower than the stipulated RKAP, except for COB Bonding, COB Marine Hull, COB Aviation, COB Liability and COB Cargo whose realized settled claims in 2023 exceed the RKAP.

Profitabilitas (Hasil *Underwriting*)

Profitability (Underwriting Return)

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in millions of Rupiah (unless otherwise stated)

Lini Usaha Business Lines	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 Realization in 2023	Realisasi 2022 Realization in 2022	% Terhadap RKAP 2023 % of the 2023 RKAP	% Terhadap Tahun Lalu % of the Last Year
Pengangkutan Cargo	35.649	5.656	28.516	15,87	19,83
Harta Benda/Kebakaran Property/Fire	119.608	58.490	73.920	48,90	79,13
Aviasi/Rangka Pesawat Aviation/Airframe	9.944	7.814	25.817	78,58	30,27
Rekayasa Engineering	37.696	21.242	21.707	56,35	97,86
Rangka Kapal Marine Hull	112.173	(18.396)	(421)	(16,40)	4369,60
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	27.552	29.564	69.693	107,30	42,42
Aneka Miscellaneous	5.115	5.973	5.608	116,78	106,51
Asuransi Keuangan/Jaminan Financial Insurance/Bonding	(7.626)	88.643	(27.206)	1162,36	325,82
Energi *Offshore* Offshore Energy	58.986	67.329	55.828	114,14	120,60
Energi *Onshore* Onshore Energy	3.739	3.626	18.874	96,99	19,21
Satelit Satellite	861	7.674	5.504	891,60	139,43
Tanggung Gugat Liability	(153)	(3.508)	1.066	2287,26	(329,08)
Kecelakaan Accident	2.249	(3.285)	3.603	(146,05)	(91,17)
Kesehatan Health	65.099	25.321	(17.906)	38,90	141,41
Kredit Credit	(127.701)	(3.737)	(158.659)	2,93	2,36
Jumlah **Total**	**343.191**	**292.406**	**105.942**	**85,20**	**276,01**

Realisasi hasil *underwriting* 2023 kurang dari anggaran. Hal ini disebabkan pencapaian premi bruto yang juga masih di bawah anggaran yang disebabkan *key account* yang tidak berhasil didapatkan sesuai yang ditargetkan di tahun 2023. Namun, bila dibandingkan dengan tahun lalu, hasil *underwriting* tumbuh 176,01%.

Ke depannya, Perusahaan berkomitmen untuk memaksimalkan pertumbuhan hasil *underwriting* pada segmentasi korporasi dan menjaga *loss ratio* pada segmentasi ritel.

Realisasi hasil *underwriting* 2023 melebihi dari realisasi tahun 2022 disebabkan oleh pencapaian GWP yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, terdapat kontribusi lini bisnis Asuransi Kredit yang masih memberikan hasil negatif sebagai dampak proses restrukturisasi, serta pencapaian hasil *underwriting* dari lini bisnis Rangka Kapal yang bernilai negatif akibat dari beban klaim yang tinggi di tahun tersebut. Namun demikian, pencapaian realisasi GWP tahun 2023 mampu mencapai 82,63% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh para Pemegang Saham.

The realization of the 2023 underwriting return is less than the budget. This was due to the achievement of gross premiums which is also still below the budget due to key accounts not being successfully obtained as targeted in 2023. However, when compared to the last year, underwriting results grew by 176.01%.

Going forward, the Company is committed to maximizing the growth of underwriting results in the corporate segmentation and maintaining a loss ratio in the retail segmentation.

The realization of underwriting results in 2023 exceeds the realization in 2022 due to the achievement of better GWP compared to the last year. In addition, there was a contribution from the Credit Insurance business line which still gave negative results as a result of the restructuring process, as well as achievement of underwriting results from the Marine Hull business line which had a negative value due to high claims expenses in the year. However, the realization of GWP in 2023 was able to reach 82.63% of the 2023 RKAP target. This achievement cannot be separated from the support provided by the Shareholders.

Kinerja Anak Perusahaan

PT Mitracipta Polasarana

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Subsidiary Performance

PT Mitracipta Polasarana

The composition of shareholders as of December 31, 2023, is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Share	Persentase Kepemilikan % Ownership Percentage %	Modal Disetor (Rp jutaan) Paid-Up Capital (IDR million)
PT Asuransi Jasa Indonesia	30.869	88,30	30.869
PT Pembangunan Perumahan	1.631	4,67	1.631
PT Kopkar Jasindo	2.460	7,03	2.460
Jumlah **Total**	**34.960**	**100,00**	**34.960**

Kinerja Keuangan PT Mitracipta Polasarana

Financial Performance of PT Mitracipta Polasarana

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Lini Usaha Business Line	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Aset Lancar Current Asset	30.835	23.744	7.091	29,86
Aset Tidak Lancar Non-current Asset	22.439	25.661	(3.222)	(12,56)
Total Aset Total Asset	53.273	49.405	3.868	7,83
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	18.781	17.149	1.632	9,52
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	2.917	3.302	(385)	(11,66)
Total Liabilitas Total Liability	21.698	20.452	1.246	6,09
Ekuitas Equity	31.575	28.953	2.622	9,06
Pendapatan Usaha Operating Income	35.771	22.786	12.985	56,99
Beban Usaha Operating Expense	32.086	24.572	7.514	30,58
Pendapatan (Beban) Non Operasi Non-Operating Income (Expense)	472	2.023	(1.551)	(76,67)
Laba Bersih Net Profit	2.572	237	2.335	985,23

Melihat dari sisi pertumbuhan aset, PT Mitracipta Polasarana mencatat kenaikan nilai aset sebesar Rp3,86 miliar atau sebesar 7,83% dibandingkan nilai aset tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp12,77 miliar atau naik 814,42%, salah satunya disebabkan terdapat piutang sewa gedung untuk *tenant* PT Asuransi Jasa Indonesia untuk masa sewa 6 (enam) bulan ke depan (Januari s/d Juni 2024) pada bulan Desember 2023. Seiring dengan kenaikan tersebut, Total Liabilitas PT Mitracipta Polasarana juga meningkat sebesar Rp1,25 miliar atau setara 6,09% dari tahun 2022 sebesar Rp20,45 miliar menjadi Rp21,69 miliar di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang pajak sebesar Rp1,26 miliar (naik 168,18%), dampak atas pencatatan utang pajak sewa *tenant* PT Asuransi Jasa Indonesia serta juga dipengaruhi oleh kenaikan hutang lancar lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp3,09 miliar atau 76,99%.

Looking at the growth of asset, PT Mitracipta Polasarana recorded an increase in asset value of IDR3.86 billion or 7.83% compared to the asset value in 2022. This was influenced by an increase in trade receivables of IDR12.77 billion or an increase of 814.42%, one of which is due to building lease receivables for the tenant PT Asuransi Jasa Indonesia for the next 6 (six) month lease term (January to June 2024) in December 2023. Along with this increase, the Total Liability of PT Mitracipta Polasarana also increased by IDR1.25 billion or the equivalent of 6.09% from 2022 of IDR20.45 billion to IDR21.69 billion in 2023. This is due to an increase in tax payable of IDR1.26 billion (increase of 168.18%), the impact on the recording of tax payable of PT Asuransi Jasa Indonesia's tenant lease, and affected by an increase in other current debts in 2023 amounting to IDR3.09 billion or 76.99%.

Dari sisi laporan laba rugi, Pendapatan Usaha PT Mitracipta Polasarana meningkat sebesar Rp12,98 miliar atau 56,99% dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp22,79 miliar menjadi Rp35,77 miliar di tahun 2023. Kenaikan ini berpengaruh pada kenaikan Laba Bersih PT Mitracipta Polasarana di tahun 2023, meskipun pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan Beban Usaha yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp32,08 miliar di tahun 2023, dari sebelumnya Rp24,57 miliar di tahun 2022. Namun kenaikan pendapatan usaha di tahun 2023 masih lebih besar dibandingkan kenaikan beban sehingga kinerja perolehan laba Perusahaan pada tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan tahun 2022.

In terms of profit and loss statements, the Operating Income of PT Mitracipta Polasarana increased by IDR12.98 billion or 56.99% from the previous year in 2022 of IDR22.79 billion to IDR35.77 billion in 2023. This increase effected on the increase in Net Profit of PT Mitracipta Polasarana in 2023, although in 2023, the Operating Expense increased quite significantly, namely to IDR32.08 billion in 2023, from the previous year of IDR24.57 billion in 2022. However, the increase in operating income in 2023 was still greater than the increase in expenses, thus the Company's profit earning performance in 2023 remain better than in 2022.

PT Asuransi Jasindo Syariah

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PT Asuransi Jasindo Syariah

The composition of shareholders as of December 31, 2023, is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Share	Persentase Kepemilikan % Ownership Percentage %	Modal Disetor (Rp jutaan) Paid-Up Capital (IDR million)
PT Asuransi Jasa Indonesia	72.375	96,50	72.375
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jasindo	2.625	3,50	2.625
Jumlah Total	75.000	100,00	75.000

Kinerja Keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah

Financial Performance of PT Asuransi Jasindo Syariah

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Lini Usaha Business Line	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Investasi Investment	261.281	259.661	1.620	0,62
Aset Asset	580.720	567.878	12.842	2,26
Liabilitas Liabilities	518.879	515.793	3.086	0,60
Ekuitas Equity	61.841	52.085	9.756	18,73
Pendapatan Usaha Operating Income	88.653	97.922	(9.269)	(9,47)
Beban Usaha Operating Expense	85.097	85.474	(377)	(0,44)
Hasil Investasi Investment Return	10.124	8.776	1.348	15,36
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expense)	(1.073)	(2.343)	1.270	(54,20)
Laba Bersih Net Profit	9.463	14.499	(5.036)	(34,73)

Melihat dari sisi kenaikan jumlah aset PT Asuransi Jasindo Syariah, secara total aset naik sebesar Rp12,84 miliar atau sebesar 2,26% dari tahun 2022 sebesar Rp567,88 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan piutang kontribusi sebesar Rp16,39 miliar atau 32,97% atas perolehan kontribusi pada tahun 2023 serta kenaikan Investasi sebesar Rp1,62 miliar atau 0,62% dengan upaya tetap terus melakukan inisiatif yang sama seperti tahun lalu dengan mengoptimalisasikan penagihan piutang dalam rangka meningkatkan posisi Investasinya serta Total Liabilitas PT Asuransi Jasindo Syariah juga meningkat sebesar Rp3,09 miliar atau sebesar 0,60% dari tahun 2022 sebesar Rp515,79 miliar.

Dari sisi laporan laba rugi, Pendapatan Usaha PT Asuransi Jasindo Syariah menurun sebesar Rp9,27 miliar atau sebesar 9,47% dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp97,92 miliar menjadi Rp88,65 miliar di tahun 2023. Laba Bersih PT Asuransi Jasindo Syariah tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp5,04 miliar atau sebesar 34,73% dari sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp14,50 miliar menjadi Rp9,46 miliar di tahun 2023, hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat *single event* atas *buyback* obligasi TPS Food sehingga hanya berdampak *one time* saja yang menyebabkan pencairan CKPN TPS food sebesar Rp4,7 miliar.

Looking at the increase in the total assets of PT Asuransi Jasindo Syariah, total asset increased by IDR12.84 billion or 2.26% from 2022 of IDR567.88 billion. This was influenced by an increase in contribution receivables of IDR16.39 billion or 32.97% of the contribution earned in 2023 as well as an increase in Investment of IDR1.62 billion or 0.62% with continued efforts to carry out the same initiatives as the previous year by optimizing collection of receivables in order to increase its investment position and PT Asuransi Jasindo Syariah's Total Liability also increased by IDR3.09 billion or 0.60% from 2022 of IDR515.79 billion.

In terms of profit and loss statements, the Operating Income of PT Asuransi Jasindo Syariah decreased by IDR9.27 billion or 9.47% from the previous year 2022 of IDR97.92 billion to IDR88.65 billion in 2023. Net Profit of PT Asuransi Jasindo Syariah in 2023 also decreased by IDR5.04 billion or 34.73% from the previous year 2022 of IDR14.50 billion to IDR9.46 billion in 2023, this is due to a single event in 2022 for the buyback of TPS Food bonds thus impacting one time alone causing the disbursement of CKPN TPS food amounting to IDR4.7 billion.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Strategi Pemasaran

1. Fokus pada Segmen *High Priority*
   Tahun 2023 Perusahaan akan melakukan *refocusing* pada segmentasi korporasi sebagai *core competence*. Selanjutnya, Perusahaan membagi fokus bisnis dengan kategori *high priority* ke dalam 2 (dua) segmen yaitu segmen korporasi BUMN dan segmen korporasi Non BUMN.
2. Intensifikasi & Ekstensifikasi Penugasan & Program Pemerintah
   Sejalan dengan aspirasi dari pemegang saham, Perusahaan menargetkan agar Penugasan & Program Pemerintah dapat memberikan hasil yang *profitable* & *sustainable*.
3. Optimalisasi *Corporate Retail Business*
   Perusahaan akan membangun dan mempersiapkan *corporate retail business* melalui *worksite marketing* dan *cross selling* di ekosistem BUMN melalui kolaborasi antar direktorat bisnis serta dukungan dari tim teknologi informasi.
4. Penguatan *Support Business* melalui *Underwriting*, *Claim & Reinsurance Strategy*
   Perusahaan akan melakukan perbaikan proses *underwriting*, klaim dan strategi *reinsurance* di tahun 2023 guna mencapai hasil *underwriting* yang positif dan *underwriting* yang *prudent*.

Marketing Strategy

1. Focus on High Priority Segments
   In 2023 the Company will refocus on corporate segmentation as a core competency. Furthermore, the Company divides its business focus in the high priority category into 2 (two) segments, namely the BUMN corporate segment and the Non BUMN corporate segment.
2. Intensification & Extensification of Government Assignments & Programs
   In line with the aspirations of shareholders, the Company targets that Assignment & Government programs can provide profitable & sustainable results.
3. Optimization of Corporate Retail Business
   The company will build and prepare a corporate retail business through worksite marketing and cross selling in the BUMN ecosystem through collaboration between business directorates and support from the information technology team.
4. Strengthening Business Support through Underwriting, Claim & Reinsurance Strategy
   The company will improve its underwriting process, claims and reinsurance strategy in 2023 in order to achieve positive underwriting results and prudent underwriting.

Market Share

Market Share

Tabel *Market Share* Asuransi Jasindo Tahun 2023
Table of Asuransi Jasindo Market Share in 2023

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

COB	Premi Jasindo 2023 Jasindo Premium in 2023	Premi Industri Asuransi Umum 2023 General Insurance Industry Premium in 2023	*Market Share* Jasindo 2022 Jasindo Market Share in 2022	*Market Share* Jasindo 2023 Jasindo Market Share in 2023
Satelit Satellite	283	340	11,87	83,35
Energy-Offshore Offshore Energy	573	1.289	44,56	44,42
Aviation	204	1.371	23,97	14,89
Bonding	61	1.809	4,80	3,35
Marine Hull	275	2.591	7,71	10,63
Energy-Onshore Onshore Energy	44	287	17,53	15,48
Engineering	127	5.232	4,72	2,42
Property	1.174	26.489	5,07	4,43
Liability	40	3.957	1,13	1,02
Cargo	53	5.083	1,43	1,04
Kendaraan Motor Vehicle	130	19.497	0,93	0,67

Tabel *Market Share* Asuransi Jasindo Tahun 2023
Table of Asuransi Jasindo Market Share in 2023

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

COB	Premi Jasindo 2023 Jasindo Premium in 2023	Premi Industri Asuransi Umum 2023 General Insurance Industry Premium in 2023	*Market Share* Jasindo 2022 Jasindo Market Share in 2022	*Market Share* Jasindo 2023 Jasindo Market Share in 2023
Personal Accident + Health	354	9.468	3,29	3,74
Credit	(19)	22.338	(0,58)	(0,08)
Aneka Miscellaneous	9	4.115	0,31	0,22
Jumlah Total	3.309	103.867	3,61	3,19

Tabel Top 10 Penerimaan Premi PT Asuransi Jasa Indonesia
Table of Top 10 Premium Receipts of PT Asuransi Jasa Indonesia

Dalam jutaan rupiah | in million Rupiah

No	Perusahaan Company	Premi Dicatat 2023 Premium Recorded in 2023	Premi Dicatat 2022 Premium Recorded in 2022	*Growth*
1	SKK Migas	571.196	581.558	(1,78)
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	279.580	24.381	1046,71
3	PT Perusahaan Listrik Negara	171.050	142.742	19,83
4	Jamkesmen	129.867	80.425	61,48
5	PT Aneka Tambang Tbk	129.414	43.463	197,76
6	Jamkestama	118.237	120.357	(1,76)
7	PT Indonesia Power	109.457	98.126	11,55
8	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	106.522	69.659	52,92
9	Kementerian Pertanian Republik Indonesia (AUTP) Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia	82.970	236.872	(64,9)7
10	PT Pembangkitan Jawa Bali	75.554	39.705	90,29

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang penyajiannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of* PricewaterhouseCoopers) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 31 Desember 2023, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

This description of financial performance is prepared based on the Company's Financial Statements presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2023. The financial statements have been audited by the Public Accountant Firms of Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (a member firm of PricewaterhouseCoopers) with an unqualified opinion on the financial position of PT Asuransi Jasa Indonesia as of December 31, 2022. The results of its operations and its cash flows for the year then ended are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The discussion of the Company's financial performance is presented with due regard to the explanations in the notes to the Consolidated Financial Statements of the external auditors as an integral part of this Annual Report.

Posisi Keuangan / Financial Position

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Increase	%
Jumlah Aset **Total Asset**	**15.756.061**	**16.070.717**	**(314.656)**	**(1,96)**
Jumlah Liabilitas **Total Liability**	**12.715.495**	**13.194.190**	**(478.695)**	**(3,63)**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**3.040.565**	**2.876.528**	**164.037**	**5,70**

Posisi keuangan Asuransi Jasindo tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan, di mana jumlah aset dan Liabilitas Perusahaan mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain terdapat peningkatan Ekuitas sebesar 5,70%.

The financial position of Asuransi Jasindo in 2023 shows decrease, where the total Asset and Liability of the Company decreased, while on the other hand the Equity increased by 5.70%.

ASET / ASSET

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Investasi Investment	3.135.888	2.952.445	183.443	6,21
Kas & Bank Cash & Bank	599.627	1.206.610	(606.983)	(50,30)
Aset Reasuransi Reinsurance Agent	6.526.442	7.324.541	(798.099)	(10,90)
Lain-lain Other	5.494.104	4.587.122	906.982	19,77
Jumlah Aset **Total Asset**	**15.756.061**	**16.070.717**	**(314.656)**	**(1,96)**

Jumlah Aset Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.756,06 miliar, menurun Rp314,67 miliar atau 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.070 miliar. Penurunan tersebut dihasilkan dari penurunan Aset reasuransi.

As of December 31, 2023, the Total Asset of Asuransi Jasindo was recorded at IDR15,756.06 billion, a decrease of IDR314.67 billion or 1.96% compared to the previous year's IDR16,070 billion. This decrease was due to a reduction in reinsurance assets.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Kas Cash	539	368	171	46,49
Pihak Berelasi Related Parties				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	319.509	547.209	(227.700)	(41,61)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	149.961	292.185	(142.224)	(48,68)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.753	152.587	(131.834)	(86,40)
Bank-Bank Pembangunan Daerah	26.467	39.805	(13.338)	(33,51)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.101	19.582	(16.481)	(84,16)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -Unit Syariah	-	3.850	(3.850)	(100,00)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.529	2.550	(21)	(0,84)
PT Bank Perkreditan Rakyat	713	568	145	25,47
PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah	-	270	(270)	(100,00)
PT Bank Mandiri Taspen	232	-	232	-
Pihak Ketiga Third Parties				
Citibank N.A	300	1.955	(1.655)	(84,65)
Lainnya Others	7.520	215	7.305	3397,64
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	-	-	-
PT Bank Central Asia Syariah	2.482	5.000	(2.518)	(50,37)
PT Bank Central Asia Tbk	528	1.167	(639)	(54,77)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.365	3.287	78	2,37
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Syariah	912	3.304	(2.392)	(72,39)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.175	3.601	(426)	(11,83)
PT Bank KB Bukopin Syariah	19.700	4.000	15.700	392,50
PT Bank KB Bukopin Tbk	710	1.577	(867)	(54,95)
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	595	596	-	-
PT Bank Mega Syariah	1.000	2.000	(1.000)	(50,00)
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.000	10.078	(7.078)	(70,23)
PT Bank Neo Commerce Tbk	-	3.000	(3.000)	(100,00)
PT Bank OCBC NISP Tbk	10.000	10.780	(780)	(7,24)
PT Bank Panin Dubai Syariah	4.500	7.000	(2.500)	(35,71)
PT Bank Permata Tbk	2.070	4.050	(1.980)	(48,89)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	6.500	32.150	(25.650)	(79,78)
PT Bank UOB Buana Tbk	350	341	9	2,66
PT Bank Woori Saudara	9.114	53.524	(44.410)	(82,97)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	599.627	1.206.609	(606.972)	(50,30)

Saldo Kas dan Setara Kas per akhir tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp606,97 miliar atau turun 50,30% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian-penyelesaian klaim yang dilakukan oleh Perusahaan.

The balance of Cash and Cash Equivalents as of the end of 2023 decreased by IDR606.97 billion or 50.30% compared to the balance as of December 31, 2022. This was due to the settlement of claims made by the Company.

Investasi

Investment

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Deposito Berjangka Time Deposit	833.069	815.871	17.198	2,11
Efek Utang Debt Securities	1.676.646	1.427.234	249.412	17,48
Sukuk Sukuk	138.723	139.436	(713)	(0,51)
Reksa Dana Mutual Fund	174.022	258.850	(84.828)	(32,77)
Saham Equity Securities	1.119	2.256	(1.137)	(50,40)
Investasi Saham Investment in Shares	312.309	308.797	3.512	1,14
Jumlah Total	3.135.887	2.952.444	183.443	6,21

Posisi investasi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp183,45 miliar atau 6,21% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kenaikan Deposito sebesar Rp17,20 miliar
2. Kenaikan efek utang sebesar Rp249,41 miliar

The investment position as of December 31, 2023 increased by IDR183.45 billion or 6.21% compared to the balance as of December 31, 2022. This is due to several factors as follows:

1. Increase in deposits of IDR17.20 billion
2. Increase in debt securities of IDR249.41 billion

Aset Reasuransi

Reinsurance Asset

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan Unearned Premium Income	1.095.323	842.512	252.811	30,01
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Liability on Policy Future Benefits	457.587	541.536	(83.949)	(15,50)
Estimasi Klaim Estimated Claims	4.938.304	5.917.923	(979.619)	(16,55)
Penyisihan Ujrah Ujrah Reserve	35.227	22.569	12.658	56,09
Aset Reasuransi Reinsurance Asset	6.526.441	7.324.541	(798.100)	(10,90)

Terdapat penurunan nilai Aset Reasuransi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.526,44 miliar atau turun sebesar 10,90% dibandingkan tahun 2022.

As of December 31, 2023, the value of Reinsurance Asset decreased by IDR6,526.44 billion or a decrease of 10.90% compared to 2022.

LIABILITAS

LIABILITY

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Utang Klaim Claim Payable	579.174	298.877	280.297	93,78
Utang Reasuransi Commission Payable	1.450.399	1.153.571	296.828	25,73

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Utang Komisi Commission Payable	102.261	103.470	(1.209)	(1,17)
Utang Pajak Tax Payable	22.222	28.085	(5.863)	(20,88)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	101.550	112.411	(10.861)	(9,66)
Liabilitas Kontrak Asuransi Insurance Contract Liability	8.674.338	9.623.482	(949.144)	(9,86)
Utang Restrukturisasi Restructuring Debt	711.324	633.129	78.195	12,35
Pinjaman Subordinasi Subordinated Loan	250.000	250.000	0	0,00
Utang Lain-Lain Other Liabilities	793.416	962.160	(168.744)	(17,54)
Jumlah Liabilitas Total Liability	**12.715.495**	**13.194.190**	**(478.695)**	**(3,63**

Jumlah liabilitas Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp12.715,495,95 miliar, mengalami penurunan Rp478,69 miliar atau 3,63% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.194,19 miliar. penurunan tersebut yang terlihat jelas pada Liabilitas Kontrak asuransi.

As of December 31, 2023, the total liability of Asuransi Jasindo was recorded at IDR12,715.495.95 billion, a decrease of IDR478.69 billion or 3.63% compared to the previous year of IDR13,194.19 billion. This decrease was clearly visible in insurance contract liabilities.

Utang Klaim

Claim Payable

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Pihak berelasi Related Parties				
PT Pertamina (Persero)	181.957	-	181.957	-
PT Krakatau Steel Tbk	96.271	135	96.136	71211,85
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.953	52.534	9.419	17,93
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	37.851	89.256	(51.405)	(57,59)
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (AUTP) Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia	4.591	-	4.591	-
PT Pembangunan Perumahan, Tbk	2.601	-	2.601	-
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.585	2.585	0	0,00
PT Semen Tonasa	2.485	-	2.485	-
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2.199	578	1.621	280,45
Kejaksaan Republik Indonesia Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia	2.178	-	2.178	-
PT Telekomunikasi Selular	2.000	2.099	(99)	(4,72)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ministry of Health of the Republic of Indonesia	1.931	-	1.931	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.816	8.737	(6.921)	(79,21)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.676		1.676	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.624	1.164	460	39,52
PT Mandiri Tunas Finance	1.545	6.038	(4.493)	(74,41)
PT Krakatau Posco	1.377	1.403	(26)	(1,85)
Lainnya Others	29.527	62.213	(32.686)	(52,54)
Jumlah Total	**436.173**	**226.747**	**209.426**	**92,36**

Jumlah utang klaim Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp436.173 miliar, meningkat Rp209.426 miliar atau 92,36% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp226,75 miliar. Peningkatan terbesar Utang Klaim disebabkan oleh Klaim-Klaim besar terjadi di akhir tahun 2023, sehingga masih dalam proses penyelesaian.

As of December 31, 2023, the claim payable of Asuransi Jasindo was recorded at IDR436,173 billion, an increase of IDR209,426 billion or 92.36% compared to the previous year of IDR226.75 billion. The largest increase in Claim Payable was due to large Claims occurring at the end of 2023, thus it is still in the settlement process.

Liabilitas Kontrak Asuransi

Insurance Contract Liability

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Estimasi Klaim Estimated Claim	6.228.927	7.310.129	(1.081.202)	(14,79)
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan Unearned Premium Income	1.518.658	1.043.403	475.255	45,55
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Liability on Policy Future Benefits	849.099	1.203.405	(354.306)	(29,44)
Penyisihan Ujrah Ujrah Reserve	77.653	66.545	11.108	16,69
Jumlah Liabilitas Kontrak Asuransi Total Insurance Contract Liability	**8.674.338**	**9.623.482**	**(949.144)**	**(9,86)**

Jumlah liabilitas kontrak asuransi Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8.674,34 miliar, menurun Rp949,14 miliar atau 9,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.623,48 miliar. Penurunan terbesar ada pada estimasi klaim turun Rp1.081,20 miliar.

As of December 31, 2023, the total insurance contract liability of Asuransi Jasindo was recorded at IDR8,674.34 billion, a decrease of IDR949.14 billion or 9.86% compared to the previous year of IDR9,623.48 billion. The biggest decrease was in the estimated claim decrease of IDR1,081.20 billion.

EKUITAS

EQUITY

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Modal Disetor Paid-up Capital	425.000	425.000	0	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	495.097	439.007	56.090	12,78
Cadangan umum General reserve	1.553.095	1.553.095	0	0,00
Selisih kurs Foreign exchange difference	54.771	54.771	0	0,00
Keuntungan belum direalisasikan atas kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Unrealized gain on increase in fair value of available-for-sale marketable securities	28.200	31.911	(3.711)	(11,63)
Surplus revaluasi aset Asset revaluation surplus	1.166.514	1.183.597	(17.083)	(1,44)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings	297.012	297.012	0	0,00
Saldo rugi Loss balance	(984.983)	(1.113.077)	128.094	(11,51)
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.040.565	2.876.528	164.037	5,70

Jumlah ekuitas Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.040,57 miliar, meningkat Rp164,04 miliar atau 5,70% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.876,53 miliar. Kenaikan ini berasal dari peningkatan saldo laba.

As of December 31, 2023, the total equity of Asuransi Jasindo was recorded at IDR3,040.57 billion, an increase of IDR164.04 billion or 5.70% compared to the previous year of IDR2,876.53 billion. This increase came from an increase in retained earnings.

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income				
Pendapatan Premi Premium Income				
Premi Bruto Gross Premium	3.308.598	3.250.359	58.239	1,79
Premi Reasuransi Reinsurance Premium	2.195.511	2.411.020	(215.510)	(8,94)
Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan dan Manfaat Polis Masa Depan Decrease (Increase) in Unearned Premium Income and Policy Future Benefits	53.192	534.513	(481.321)	(90,05)
Pendapatan Premi – Neto Premium Income - Net	1.166.279	1.373.852	(207.573)	(15,11)
Beban *Underwriting* Underwriting Expense				
Beban klaim Claim Expense				
Klaim Bruto Gross Claim	2.614.817	3.757.133	(1.142.316)	(30,40)
Klaim Reasuransi Reinsurance Claim	1.682.209	1.686.084	(3.875)	(0,23)
Penurunan (Kenaikan) Manfaat Polis dan Estimasi Klaim Decrease (Increase) in Policy Benefits and Estimated Claim	104.998	889.231	(784.233)	(88,19)
Total Beban Klaim Total Claim Expense	827.610	1.181.818	(354.207)	(29,97)
Beban Komisi - Neto Commission Expense - Net	(47.573)	(64.750)	17.177	(26,53)
Beban *Underwriting* Lain - Neto Other Underwriting Expense - Net	145.641	203.451	(57.810)	(28,41)
Total Beban *Underwriting* Total Underwriting Expense	925.679	1.320.519	(394.840)	(29,90)
Hasil *Underwriting* Underwriting Return	240.601	53.333	187.267	351,13
Hasil Investasi Investment Return	221.365	473.113	(251.748)	(53,21)
Beban Usaha Operating Expense	399.058	464.488	(65.430)	(14,09)
Laba Usaha Operasional Operating Profit	62.908	61.958	950	1,53
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain – Neto Other Income/(Expense) - Net	49.879	229.183	(179.304)	(78,24)
Laba Sebelum Zakat Profit Before Zakat	112.787	291.141	(178.353)	(61,26)
Zakat Zakat	(315)	(472)	157	(33,23)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	112.472	290.669	(178.197)	(61,31)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	8.951	59.074	(50.124)	(84,85)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income For The Year	103.522	231.595	(128.073)	(55,30)

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss:				
Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	9.263	6.790	2.473	36,43
Surplus Revaluasi Revaluation Surplus	-	1.290.329	1.290.329	100,00
Selisih Nilai Kini URK Difference in Present Value of URK	-	-	-	-
Total Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Total Items That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss	8.139	1.296.185	(1.288.046)	(99,37)
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Items That Will Be Reclassified To Profit Or Loss:				
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Financial Assets Available for Sale	(4.765)	(17.508)	12.743	(72,78)
Kepemilikan Pada Entitas Asosiasi Ownership in Associated Entities	-	(14.843)	14.843	(100,00)
Total Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Total Items That Will Be Reclassified to Profit or Loss	(3.714)	(29.128)	25.415	(87,25)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	4.426	1.267.057	(1.262.631)	(99,65)
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Other Comprehensive Income For The Year After Tax	4.426	1.267.057	(1.262.631)	(99,65)
Total Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income	107.948	1.498.652	(1.390.704)	(92,80)

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023, kinerja keuangan Asuransi Jasindo secara umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja keuangan Perusahaan secara konsolidasian Tahun Buku 2023 disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp103,52 miliar atau 85,34% dari anggaran Tahun Buku 2023 sebesar Rp121,31 miliar dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Buku 31 Desember 2022 sebesar Rp231,59 miliar mengalami penurunan sebesar Rp128,07 miliar atau 55,30%. Penurunan laba terhadap tahun lalu sebesar Rp128,07 miliar terutama dikarenakan terdapat aksi korporasi di tahun 2022 atas Divestasi Inhealth dengan laba penjualan Rp25 miliar dan divestasi Tokio Marine dengan laba penjualan Rp261 miliar.

Amidst the various challenges faced throughout 2023, the financial performance of Asuransi Jasindo generally decreased compared to the previous year. The consolidated financial performance of the Company for the 2023 Financial Year is presented in a comprehensive income statement with the profit for the current year of IDR103.52 billion or 85.34% of the 2023 Financial Year budget of IDR121.31 billion and when compared with the realization for the Financial Year December 31, 2022 of IDR231.59 billion, it decreased by IDR128.07 billion or 55.30%. The decrease in profit compared to the previous year of IDR128.07 billion, was mainly due to corporate actions in 2022 regarding the Inhealth Divestment with a sales profit of IDR25 billion and the Tokio Marine divestment with a sales profit of IDR261 billion.

Pendapatan Premi - Neto

Pendapatan premi - neto yang dibukukan Asuransi Jasindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.166,28 miliar, turun Rp207,57 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.373,85 miliar. Penurunan pendapatan premi - neto tersebut utamanya disebabkan kenaikan cadangan Teknis sebesar Rp481,32 miliar dibandingkan tahun lalu.

Premium Income - Net

The net premium income recorded by Asuransi Jasindo in 2023 was recorded at IDR1,166.28 billion, a decrease of IDR207.57 billion from the previous year of IDR1,373.85 billion. The decrease in net premium income was mainly due to an increase in Technical reserves of IDR481.32 billion compared to last year.

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Premi Bruto Gross Premium	3.308.598	3.250.359	58.239	1,79
Premi Reasuransi Reinsurance Premium	(2.195.510)	(2.411.020)	215.510	(8,94)
Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan dan Manfaat Polis Masa Depan Decrease (Increase) in Unearned Premium Income and Policy Future Benefits	53.191	534.513	(481.322)	(90,05)
Premi Neto Net Premium	1.166.279	1.373.852	(207.573)	(15,11)

Premi bruto yang dibukukan Asuransi Jasindo tahun 2023 mencapai Rp3.308,60 miliar, naik 1,79% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.250,36 miliar. Peningkatan premi bruto tersebut disebabkan oleh keberhasilan dari *refocusing* pada segmentasi korporasi sebagai *core competence* Perusahaan

The gross premium recorded by Asuransi Jasindo in 2023 reached IDR3,308.60 billion, an increase of 1.79% from the previous year of IDR3,250.36 billion. This increase in gross premium was due to the success of refocusing on corporate segmentation as company core competency.

Selain itu, Penurunan pendapatan premi neto juga disebabkan turunnya premi reasuransi Asuransi Jasindo. Realisasi Premi Reasuransi Desember 2023 sebesar Rp2.195,51 miliar dengan pencapaian 89,88% terhadap RKAP 2023. Realisasi tersebut mengalami Penurunan sebesar Rp215,51 miliar jika dibandingkan dengan realisasi premi reasuransi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

In addition, the decrease in net premium income was also due to the decrease in Asuransi Jasindo's reinsurance premium. Realization of Reinsurance Premium in December 2023 amounted to IDR2,195.51 billion, achieving 89.88% of the 2023 RKAP. This realization decreased by IDR215.51 billion compared to the realization of reinsurance premium in the same period the previous year.

Penurunan terbesar pada COB *Property* dan COB *Aviation* sejalan dengan penurunan produksi premi COB tersebut. Sebagian besar Premi Reasuransi bersumber dari COB Korporasi yaitu COB *Property*, *Energy Offshore, Satellite* dan *Marine Hull*. Hal tersebut sesuai dengan arah bisnis Perusahaan yang akan fokus pada segmentasi korporasi.

The biggest decrease in COB Property and COB Aviation was in line with the decrease in the COB premium production. Most of the Reinsurance Premium come from COB Corporate, namely COB Property, Energy Offshore, Satellite and Marine Hull. This is in line with the Company's business direction to focus on corporate segmentation.

Beban Klaim

Claim Expense

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Klaim Bruto Gross Claim	2.614.817	3.757.133	(1.142.316)	(30,40)
Klaim Reasuransi Reinsurance Claim	1.682.209	1.686.084	(3.875)	(0,23)
Kenaikan Manfaat Polis dan Estimasi Klaim Increase in Policy Benefits and Estimated Claim	104.998	889.231	(784.233)	(88,19)
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expense	**827.610**	**1.181.818**	**(354.207)**	**(29,97)**

Jumlah beban klaim Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp827,61 miliar, turun Rp354,21 miliar atau 29,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.181,82 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya jumlah klaim bruto dari Rp3.757,13 miliar di tahun 2022 menjadi Rp2.614.82 miliar atau turun 30,40%.

The Company's total claim expense in 2023 was recorded at IDR827.61 billion, a decrease of IDR354.21 billion or 29.97% from the previous year of IDR1,181.82 billion. This decrease was mainly due to a decrease in the total gross claim from IDR3,757.13 billion in 2022 to IDR2,614.82 billion or a decrease of 30.40%.

Claim Recovery

Claim Recovery

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Pengangkutan Cargo	6.283	3.081	3.202	103,93
Harta Benda/Kebakaran Property/Fire	363.560	607.200	(243.640)	(40,13)
Aviasi/Rangka Pesawat Aviation/Airframe	131.121	155.045	(23.924)	(15,43)
Rekayasa Engineering	38.318	31.217	7.101	22,75
Rangka Kapal Marine Hull	100.298	23.586	76.712	325,25
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	-	0	-	
Aneka Miscellaneous	672	0	672	
Asuransi Keuangan/Jaminan Financial Insurance/Bonding	93.051	58.930	34.121	57,90
Energi *Offshore* Offshore Energy	851.416	669.602	181.814	27,15
Energi *Onshore* Onshore Energy	223	241	(18)	(7,46)
Satelit Satellite	18.799	66.684	(47.885)	(71,81)
Tanggung Gugat Liability	11.759	151	11.608	7687,53
Kecelakaan Accident	23	989	(967)	(97,72)
Kesehatan Health	61.222	47.647	13.575	28,49
Kredit Credit	5.463	21.710	(16.247)	(74,84)
Jumlah Total	**1.682.209**	**1.686.084**	**(3.875)**	**-0,23**

Jumlah *claim recovery* Asuransi Jasindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.682,21 miliar, menurun Rp3,88 miliar atau 0,23%% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.686,08 miliar. Penurunan paling signifikan berasal dari COB Harta Benda turun sebesar Rp243,64 miliar, COB *Satellite* turun sebesar Rp47,89 miliar, COB *Aviation* turun sebesar Rp23,92 miliar, dan COB Kredit turun sebesar Rp16,25 miliar.

As of December 31, 2023, the total claim recovery of Asuransi Jasindo was recorded at IDR1,682.21 billion, a decrease of IDR3.88 billion or 0.23% compared to the previous year of IDR1,686.08 billion. The most significant decrease came from COB Asset decreasing by IDR243.64 billion, COB Satellite by IDR47.89 billion, COB Aviation by IDR23.92 billion, and COB Credit by IDR16.25 billion.

Beban *Underwriting*

Jumlah beban *underwriting* Asuransi Jasindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp925,68 miliar, menurun Rp394,84 miliar atau turun 29,90% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,52 miliar. Penurunan beban *underwriting* tersebut disebabkan oleh penurunan Klaim Bruto Perusahaan

Underwriting Expense

The total underwriting expense of Asuransi Jasindo in 2023 was recorded at IDR925.68 billion, a decrease of IDR394.84 billion or 29.90% from the previous year of IDR1,320.52 billion. The decrease in underwriting expense was due to a decrease in the Company's Gross Claim.

Hasil *Underwriting*

Hasil *Underwriting* yang dibukukan Asuransi jasindo tahun 2023 sebesar Rp240,60 miliar, meningkat Rp187,27 miliar atau 351,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp53,33 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya Premi Bruto Perusahaan dan menurunnya Beban *Underwriting* dibandingkan tahun lalu.

Underwriting Return

Underwriting return recorded by Asuransi Jasindo in 2023 amounted to IDR240.60 billion, an increase of IDR187.27 billion or 351.13% from the previous year of IDR53.33 billion. This increase was due to an increase in the Company's Gross Premium and a decrease in Underwriting Expense compared to last year.

Pendapatan Investasi

Investment Income

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Penyertaan Langsung | Direct Participation	49.327	348.669	(299.342)	(85,85)
Hasil Obligasi | Bond Yield	112.266	73.991	38.275	51,73
Bunga Deposito | Deposit Interest	51.795	38.762	13.033	33,62
Hasil Reksa Dana | Mutual Fund Return	6.201	7.273	(1.072)	(14,74)
Saham | Share	(364)	80	(444)	(555)
Jumlah | Total	**172.797**	**390.739**	**(217.942)**	**(55,78)**

Tahun 2023, Asuransi Jasindo mencatat penurunan pendapatan investasi, yaitu menurun 53,21% menjadi Rp172,80 miliar dari Rp390,74 miliar di tahun 2022. Penurunan pendapatan investasi tersebut disebabkan *one of transaction* berupa Divestasi kepemilikan saham penyertaan pada PT Asuransi jiwa Inhealth Indonesia dan PT Tokio Marine Indonesia di tahun 2022.

In 2023, Asuransi Jasindo recorded a decrease in investment income, a decrease of 53.21% to IDR172.80 billion from IDR390.74 billion in 2022. The decrease in investment income was due to one of the transactions in the form of Divestment of investment share ownership in PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and PT Tokio Marine Indonesia in 2022.

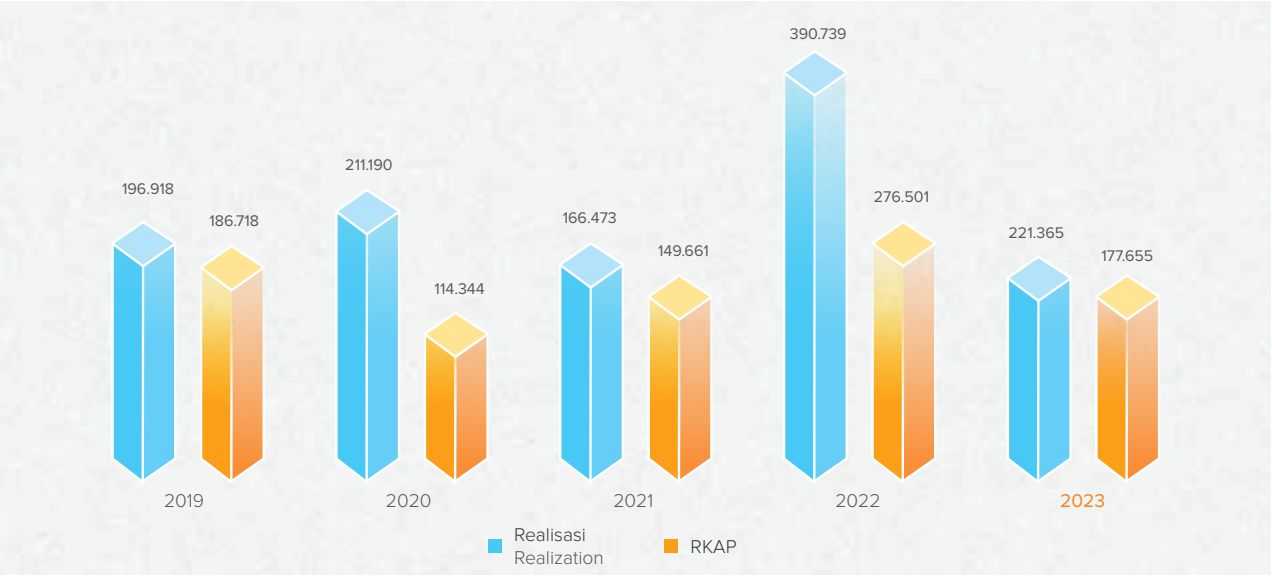

Beban Usaha

Jumlah beban usaha Asuransi Jasindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp399,06 miliar, menurun Rp65,43 miliar atau 14,09% dari tahun sebelumnya sebesar Rp464,49 miliar. Penurunan beban usaha terutama disebabkan oleh penurunan Penyisihan Piutang dan Biaya Pengelolaan Gedung Kantor sebesar 14,09% yang merupakan dampak dari kebijakan sentralisasi.

Operating Expense

The total operating expense of Asuransi Jasindo in 2023 was recorded at IDR399.06 billion, a decrease of IDR65.43 billion or 14.09% from the previous year of IDR464.49 billion. The decrease in operating expenses was mainly due to a decrease in Allowance for Receivables and Office Building Management Costs by 14.09% as a result of the centralization policy.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun 2023, Asuransi Jasindo membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp112,47 miliar, menurun Rp178,20 miliar atau turun 61,31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp290,67 miliar.

Profit Before Income Tax

In 2023, Asuransi Jasindo posted a profit before income tax of IDR112.47 billion, a decrease of IDR178.20 billion or 61.31% from the previous year of IDR290.67 billion.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan yang dibukukan Asuransi Jasindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp103,52 miliar, menurun Rp128,07 miliar atau turun 55,30% dari tahun sebelumnya sebesar Rp231,60 miliar.

Profit for the Current Year

The profit for the current year recorded by Asuransi Jasindo in 2023 was IDR103.52 billion, a decrease of IDR128.07 billion or 55.30% from the previous year of IDR231.60 billion.

Penghasilan Komprehensif

Total Penghasilan Komprehensif tahun 2023 adalah sebesar Rp107,95 miliar dan turun signifikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.498,65 miliar. Selisih penurunan total adalah sebesar Rp1.390,70 miliar atau 92,80%. Penghasilan komprehensif paling signifikan disebabkan oleh Laba bersih tahun berjalan.

Comprehensive Income

Total Comprehensive Income in 2023 was IDR107.95 billion and decreased significantly compared to 2022 of IDR1,498.65 billion. The difference in the total decrease was IDR1,390.70 billion or 92.80%. The most significant comprehensive income was due to net profit for the year.

ARUS KAS

CASH FLOW

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(555.897)	(470.169)	(85.728)	18,23
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	40.462	335.132	(294.670)	(87,93)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(91.248)	207.762	(299.010)	(143,92)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas Net Decrease in Cash and Cash Equivalents	(606.683)	72.725	(679.408)	(934,22)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.206.610	1.131.985	74.625	6,59
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	599.627	1.206.610	(606.983)	(50,30)

Jumlah kas dan setara kas Asuransi Jasindo pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp599,62 miliar, menurun dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp1.206,61 miliar. penurunan kas dan setara kas tersebut dapat dijelaskan berdasarkan aktivitas arus kas sebagai berikut:

Total cash and cash equivalents of Asuransi Jasindo at the end of 2023 was recorded at IDR599.62 billion, a decrease compared to the position at the beginning of the year of IDR1,206.61 billion. The decrease in cash and cash equivalents can be explained based on cash flow activities as follows:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp555,90 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di mana Asuransi Jasindo menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp470,17 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pembayaran-pembayaran Klaim oleh Perusahaan.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash flow used for operating activities in 2023 was recorded at IDR555.90 billion, which increased compared to the previous year where Asuransi Jasindo used cash for operating activities amounting to IDR470.17 billion. This increase was due to Claim payments by the Company.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp40,46 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya di mana Asuransi Jasindo memperoleh kas dari aktivitas investasi sebesar Rp335,13 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya aksi korporasi di tahun 2022 atas Divestasi Mandiri Inhealth dengan laba penjualan Rp25 miliar dan divestasi Tokio Marine Indonesia dengan laba penjualan Rp261 miliar.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash flow obtained from investment activities in 2023 was recorded at IDR40.46 billion, which decreased compared to the previous year where Asuransi Jasindo obtained cash from investment activities amounting to IDR335.13 billion. This decrease was due to corporate actions in 2022 regarding the Divestment of Mandiri Inhealth with a sales profit of IDR25 billion and the divestment of Tokio Marine Indonesia with a sales profit of IDR261 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp91,25 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp207,76 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembayaran Utang Restrukturisasi Asuransi Kredit adanya transaksi di tahun lalu atas penerimaan Pinjaman Subordinasi dari *Holding* Rp250,00 miliar.

Cash Flow from Financing Activities

Net cash flow used for financing activities in 2023 was recorded at IDR91.25 billion, which decreased compared to the previous year of IDR207.76 billion. This decrease was due to the payment of Credit Insurance Restructuring Debt, a transaction last year for the receipt of a Subordinated Loan from Holding of IDR250.00 billion.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debts and Collectability of Receivables

Kemampuan membayar utang suatu perusahaan asuransi tercermin dari tingkat kesehatan dan kolektibilitas Perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian, Asuransi Jasindo wajib mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 71/POJK.05/2016 untuk Perusahaan Asuransi. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi Perusahaan adalah tingkat Rasio Solvabilitas. Tahun 2023, Rasio Solvabilitas Asuransi Jasindo berada pada posisi positif. Rasio Solvabilitas positif tersebut disebabkan oleh kinerja perusahaan yang semakin membaik.

The ability to pay debts of an insurance company is reflected in the soundness level and collectability of the Company. As one of the insurance companies engaged in the field of loss insurance, Asuransi Jasindo must comply with the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia ("POJK") No. 71/POJK.05/2016 for Insurance Companies. One of the provisions that must be met by the Company is the level of Solvency Ratio. In 2023, Asuransi Jasindo Solvency Ratio was in positive position. The positive Solvency Ratio was due to the company increasingly improving performance.

Pada tanggal 31 Desember 2023, perhitungan Rasio Pencapaian Solvabilitas sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the Solvency Achievement Ratio calculation is as follows:

Keterangan Description	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022
Tingkat Solvabilitas Solvency Level		
Aset yang Diperkenankan Allowable Assets	13.438.521	13.720.332
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) Liabilities (except Subordinated Loan)	11.992.037	12.448.337
Jumlah Tingkat Solvabilitas Total Solvency Level	1.446.484	1.271.995
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) Minimum Risk Based Capital		
Risiko Kredit Credit Risk	369.960	337.122
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	12.139	21.748
Risiko Pasar Market Risk	70.469	85.610
Risiko Asuransi Insurance Risk	452.235	400.672
Risiko Operasional Operational Risk	4.361	5.514
Jumlah MMBR Total MMBR	909.165	850.666
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas Excess (Deficiency) of Solvency Level Limit	537.319	421.329
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)* Solvency Achievement Ratio (in %)*	159,10%	149,53%

* Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR | Total Solvency Level divided by Total MMBR

Kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang juga dapat dilihat dari rasio kinerja keuangan Perusahaan. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dapat dilihat dari rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio kas. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dapat dilihat dari rasio rentabilitas yang terdiri dari rasio pengembalian ekuitas (RO) dan rasio pengembalian aset (ROA).

The Company's ability to fulfill its obligations, both short and long term, can also be seen from the Company's financial performance ratios. The ability to meet short-term obligations can be seen from the liquidity ratio which consists of the current ratio and cash ratio. Meanwhile, the ability to fulfill long-term obligations can be seen from the profitability ratio which consists of the return on equity ratio (RO) and the return on assets ratio (ROA).

dalam % | in %

Uraian Description	2023	2022	Selisih
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	169,00	173,98	(4,98)
Rasio Kas Cash Ratio	86,83	107,11	(20,28)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Return on Equity (ROE) (%)*	3,55	12,14	(8,89)
Return on Assets (ROA) (%)*	0,71	1,93	(1,22)
Risk Based Capital (RBC)	159,10	149,57	9,53

Selain itu, kemampuan Perusahaan juga dinilai oleh lembaga pemeringkat independen. Tahun 2023, Asuransi Jasindo memperoleh peringkat/*rating* "idA/*Stable* (*Single* A/*Stable Outlook*)" dari PT Pefindo untuk periode 18 September 2023 hingga 1 September 2024.

Perusahaan asuransi dengan peringkat idA memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat dibandingkan perusahaan lainnya di Indonesia. Namun, perusahaan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan asuransi lain dengan peringkat yang lebih tinggi.

In addition, the Company's capabilities are also assessed by independent rating agencies. In 2023, Asuransi Jasindo received an "idA/Stable (Single A/Stable Outlook)" rating from PT Pefindo for the period September 18, 2023 to September 1, 2024.

Insurance companies with an idA rating have strong financial security characteristics compared to other companies in Indonesia. However, the company may be more likely to be affected by adverse changes in business conditions than other higher-rated insurers.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan yang mencakup Piutang *Direct*, Piutang Koasuransi, dan Piutang Reasuransi selama tahun 2023 adalah sebesar 64,62% atau Rp4.931,70 miliar. Kolektibilitas tersebut diukur dari saldo Piutang sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp3.414,40 miliar ditambah dengan pembentukan piutang selama tahun 2023 sebesar Rp5.823,61 miliar dibandingkan dengan pelunasan sebesar Rp4.931,70 miliar.

Receivables Collectibility Level

The Company's receivables collectibility level which includes Direct Receivables, Coinsurance Receivables and Reinsurance Receivables during 2023 was 64.62% or IDR4,931.70 billion. Collectibility is measured from the balance of Receivables up to 2022 of IDR3,414.40 billion plus the formation of receivables during 2023 of IDR5,823.61 billion compared to settlement of IDR4,931.70 billion.

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	s/d 2022 up to 2022	Jumlah Total
Direct	3.827,65	1.292,86	5.120,51
Koasuransi Coinsurance	297,09	554,29	851,38
Reasuransi Reinsurance	1.698,87	1.567,25	3.266,12
Jumlah **Total**	**5.823,61**	**3.414,40**	**9.238,01**

Berikut adalah rincian jumlah kolektibilitas setiap piutang dimaksud:

The following details the collectibility of each receivables:

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Kolektibilitas Collectibility	2023	% 2023	s/d 2022	% s/d 2022	Jumlah Total	% Jumlah % Total
Direct	2.182,97	87,23	957,74	77,31	3.140,72	84,02
Koasuransi Coinsurance	107,73	75,97	113,01	28,07	220,74	42,46
Reasuransi Reinsurance	1.027,80	60,50	542,44	34,61	1.570,24	48,08
Jumlah **Total**	**3.318,50**	**74,73**	**1.613,19**	**50,56**	**4.931,70**	**64,62**

Tabel tersebut menunjukkan pergerakan pelunasan setiap jenis piutang selama tahun 2023, baik atas piutang sampai dengan tahun 2022 maupun piutang yang terbentuk di tahun 2023, dengan tanpa memperhitungkan piutang belum jatuh tempo.

The table shows the movement of settlement of each type of receivables during 2023, both for receivables up to 2023 and receivables formed in 2023, excluding receivables that are not yet due.

Berdasarkan pencapaian kolektibilitas tersebut, saldo piutang gabungan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.306,31 miliar.

Based on this collectibility achievement, the combined receivables balance as of December 31, 2023 was IDR4,306.31 billion.

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	s/d 2022	Jumlah Total
Direct	1.644,67	335,11	1.979,78
Koasuransi Coinsurance	189,36	441,27	630,64
Reasuransi Reinsurance	671,07	1.024,81	1.695,88
Jumlah Total	**2.505,11**	**1.801,20**	**4.306,31**

Perusahaan akan meningkatkan jumlah kolektibilitas piutang pada tahun 2024 dengan cara mengoptimalkan penyelesaian saldo piutang yang telah berumur lama. Di sisi lain, Perusahaan akan menekan potensi penambahan piutang berumur lama, dengan melakukan intensifikasi penyelesaian piutang yang terbentuk pada tahun 2023.

The company will increase the collectibility of receivables in 2024 by optimizing the settlement of long-standing receivable balances. On the other hand, the Company will reduce the potential for any additional long-standing receivables, by intensifying the settlement of receivables formed in 2023.

Beberapa inisiatif yang akan diupayakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Strategi Bisnis
   a. *Customer engagement & strong relationship*;
   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penugasan dan program pemerintah;
   c. Penetrasi segmen *Small Medium Enterprise* (SME); dan
   d. Peningkatan *underwriting performance & reinsurance strategy*

2. Strategi *Enablers*
   a. Penguatan tata kelola & manajemen risiko;
   b. Penguatan infrastruktur IT & IT *business support*;
   c. Pelaksanaan *dry run* PSAK 74;
   d. Optimalisasi penagihan piutang & subrogasi;
   e. Mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul yang produktif dan berdaya saing; dan
   f. Optimalisasi kinerja Anak Perusahaan.

Some initiatives to be pursued in 2024 include:

1. Business Strategy
   a. Customer engagement & strong relationship;
   b. Intensification and extensification of government assignments and programs;
   c. Small Medium Enterprise (SME) segment penetration; and
   d. Increasing underwriting performance & reinsurance capacity

2. Eneblers Strategy
   a. Strengthening governance & risk management;
   b. Strengthening IT infrastructure & IT business support;
   c. Implementation of PSAK 74 dry run;
   d. Optimization of receivables collection & subrogation;
   e. Creating superior, productive and competitive Human Resources; and
   f. Optimizing Subsidiary performance.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Saham Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan besaran modal yang ditetapkan sebesar Rp1 triliun. Berdasarkan Akta Pendirian Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973 diubah terakhir dengan Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 15 November 2022.

Kepemilikan

1. 1 lembar saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia
2. 424.999 lembar saham Seri B milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Selain komponen modal tersebut di atas, dibentuk juga cadangan umum dan cadangan tujuan. Cadangan umum untuk mengatasi kekurangan dana akibat dari kegiatan operasional Perusahaan, sedangkan cadangan tujuan untuk belanja modal. Kedua cadangan tersebut akan terus ditingkatkan setiap tahunnya guna memperkuat struktur modal Perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan batas minimal modal disetor untuk perusahaan asuransi sebesar Rp100 miliar dengan tujuan untuk menyehatkan industri asuransi dan meningkatkan retensi perusahaan terhadap risiko yang dipertanggungkan. Kebijakan tersebut berdampak terjadinya konsolidasi pada industri asuransi ditandai dengan maraknya merger dan akuisisi untuk membentuk perusahaan asuransi yang lebih sehat.

Namun demikian, mengingat Perusahaan memiliki modal yang kuat maka tidak terpengaruh dengan adanya kebijakan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menaikkan batas minimum modal perusahaan asuransi dari Rp100 miliar menjadi Rp150 miliar. Peraturan ini berlaku untuk pendirian perusahaan asuransi baru. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Kebijakan Manajemen

Kebijakan manajemen untuk pembiayaan perusahaan dilaksanakan secara seimbang, yaitu dengan memanfaatkan sumber dana sendiri (ekuitas). Untuk memperkuat struktur modal yang berkaitan dengan kemampuan retensi Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, maka setiap tahun Perusahaan berusaha untuk meningkatkan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan. Hal ini terlihat dari peningkatan

The Company's shares are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia with a capital amount set at IDR1 trillion. Based on the Deed of Establishment of Notary Mohamad Ali No. 1 dated June 2, 1973 and last amended by the Notarial Deed of Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn Number 13 dated November 15, 2022.

Ownership

1. 1 share of series A Dwiwarna owned by Republik of Indonesia
2. 424,999 shares of series B owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

In addition to the above capital components, general and purpose reserves are also established. The general reserve is intended to overcome the shortage of funds resulting from the Company's operational activities, while the purpose reserve is for capital expenditure. Both reserves will continue to be increased annually to strengthen the Company's capital structure.

The Financial Services Authority regulation requires a minimum paid-up capital limit of IDR100 billion for insurance companies to strengthen the insurance industry and increase the company's retention of insured risks. The policy has resulted in consolidation in the insurance industry, characterized by the rise of mergers and acquisitions to form healthier insurance companies.

However, given that the Company has strong capital, the policy does not affect it. The Financial Services Authority (OJK) has increased the minimum capital limit for insurance companies from IDR100 billion to IDR150 billion. This regulation applies to the establishment of new insurance companies. It is stated in OJK Regulation (POJK) No. 67/2016 concerning Business Licensing and Institutionalization of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.

Management Policy

Management policy for financing the company is carried out in a balanced manner, namely by utilizing own funds (equity). To strengthen the capital structure related to the Company's retention ability in its operations, the Company tries to increase the General Reserve and Purpose Reserve every year. General Reserve and Purpose Reserve. It can be seen from the increase in the Company's total equity in the last

total ekuitas Perusahaan dalam lima tahun terakhir yang bersumber dari sebagian laba ditahan Perusahaan. Dengan modal Perusahaan sebesar Rp3.040.57 miliar, maka tingkat produktivitas modal Perusahaan tahun 2023 adalah:

five years sourced from a portion of the Company's retained earnings. With the Company's capital of IDR3,040.57 billion, the Company's capital productivity level in 2023 is:

Produktivitas Modal Capital Productivity	Premi Bruto Gross Premium	3.308.598	108,81%
	Jumlah Ekuitas Total Equity	3.040.565	

Pencapaian *Capital Productivity* Perusahaan sebesar 108,81% menggambarkan bahwa penggunaan modal Perusahaan cukup produktif dengan tetap menjaga nilai RBC sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh regulator. Selain tingkat permodalan, kapasitas reasuransi juga merupakan hal penting karena menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang menjadi bagiannya. Hal ini bergantung pada jaringan serta tingkat kepercayaan dari perusahaan reasuransi.

The Company's Capital Productivity achievement of 108.81% illustrates that the use of the Company's capital is quite productive while maintaining the RBC value as required by the regulator. In addition to the level of capital, reinsurance capacity is also important because it shows the Company's ability to fulfill the obligations that are part of it. It depends on the network and trust level of the reinsurance company.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Asuransi Jasindo tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi belanja modal dengan pihak mana pun.

Material Ties for Capital Investment

Throughout 2023, Asuransi Jasindo had no material ties for capital expenditure investment with any party.

Investasi Barang dan Modal yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir

Realisasi investasi barang modal pada tahun 2023 mengutamakan penambahan pada aktiva tidak berwujud sebagai bentuk pengembangan sistem teknologi informasi Asuransi Jasindo, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini:

Investment in Goods and Capital Realized in the Last Financial Year

The realization of investment in capital goods in 2023 prioritized the addition of intangible assets as a form of development of Asuransi Jasindo's information technology system, as reflected in the following table:

Uraian Description	RKAP 2023 (Rp juta) 2023 RKAP (IDR million)	Realisasi 2023 (Rp juta) Realization in 2023 (IDR million)	Terhadap RKAP 2023 % Over the 2023 RKAP %
Tanah & HGB HGB & Land	1.450	908	62,62
Bangunan Kantor Office Building	5.505	4.905	89,10
Bangunan Rumah Instansi Institution House Building	200	105	52,50
Mesin & Instalasi Machine & Installation	1.965	286	14,55
Inventaris Kantor Office Inventory	3.153	882	27,97
Inventaris Rumah Dinas Office House Inventory	330	83	25,15
Aset Tak Berwujud Intangible Asset	12.878	6.851	53,20
Properti Investasi Investment Property	2.800	1.539	54,96
Jumlah Total	**28.281**	**15.559**	**55,02**

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information and Facts that Occurred After the Date of the Accountant's Report

During 2023, there is no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya

Comparison Between the Target at the Beginning of the Financial Year and its Realization

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 Realization in 2023	Realisasi 2022 Realization in 2022	% Terhadap RKAP 2023 % of the 2023 RKAP	% terhadap Realisasi Tahun 2022 % of Realization in 2022
	a	b	c	d=b/a	e=b/c
Premi Bruto Gross Premium	3.999.942	3.308.598	3.250.359	82,72	101,79
Hasil *Underwriting* Underwriting Return	386.885	240.601	53.333	62,19	451,13
Hasil Investasi Investment Return	177.655	221.365	473.113	124,60	46,79
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	153.123	112.472	290.669	73,45	38,69
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	121.306	103.522	231.595	85,34	44,70
Total Aset Total Asset	15.938.547	15.756.061	16.070.717	98,86	98,04
Total Liabilitas Total Liability	13.052.461	12.715.496	13.194.190	97,42	96,37
Total Ekuitas Total Equity	2.886.086	3.040.565	2.876.528	105,35	105,70

Proyeksi Tahun 2024

Projections in 2024

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	RKAP 2024
Premi Bruto Gross Premium	5.619.151
Hasil *Underwriting* Underwriting Return	448.434
Hasil Investasi Investment Return	226.562
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	226.432
Total Aset Total Asset	15.393.912
Total Liabilitas Total Liability	11.999.801
Total Ekuitas Total Equity	3.394.111

Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, pembagian keuntungan dan besarnya dividen yang akan dibayarkan, diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividend Policy

According to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, dividend distribution is carried out based on the decision of the General Meeting of Shareholders and may only be distributed if the Company has a positive profit balance.

Based on the Company's Deed of Establishment, profit sharing and the amount of dividends to be paid are proposed by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders.

Kontribusi Terhadap Negara

Contribution to the Country

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Increase	
			Jumlah Total	%
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	32.743	25.605	7.138	27,88
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	399	1.329	(930)	(69,98)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	4.936	4.290	646	15,06
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	-	-	-	-
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	380	2.110	(1.730)	(81,99)
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	-	-	-	-
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Final Income Tax Article 4 Paragraph (2)	1.182	3.503	(2.321)	(66,26)
PPN Jasa Luar Negeri Foreign Service VAT	242	330	(88)	(26,67)
PPN WAPU VAT WAPU	25.123	27.715	(2.592)	(9,35)
Bea Meterai Komputerisasi Computerized Stamp Duty	812	1.107	(295)	(26,65)
PBB Land and Building Tax	-	1.482	-	-
Pajak Daerah Local Tax	-	-	-	-
STP Diterima Tahun 2023 dan 2022 STP Received in 2023 and 2022	13	1.718	(1.705)	(99,24)
SKP Diterima Tahun 2023 dan 2022 SKP Received in 2023 and 2022	-		-	-
Jumlah Total	65.829	69.189	(3.360)	(4,86)

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan

Asuransi Jasindo tidak menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen (ESOP/MSOP).

Employee and/or Management Share Ownership Program Implemented by the Company

Asuransi Jasindo has no employee and/or management share ownership program (ESOP/ MSOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada tahun 2023, Asuransi Jasindo tidak melakukan penawaran umum dalam bentuk apa pun, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pada laporan ini.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

In 2023, Asuransi Jasindo did not conduct any public offering of any kind, thus no information can be conveyed regarding the actual use of proceeds from the public offering in this report.

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/ Modal

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan penjualan aset.

Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring

In 2023, the Company sold assets.

Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information Containing Conflict of Interest

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2023, Asuransi Jasindo tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No.7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Asuransi Jasindo (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan *personnel* manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau *personnel* manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan

Material Transactions Containing Conflict of Interest

Throughout 2023, Asuransi Jasindo did not conduct any material transactions containing conflicts of interest.

Transactions with Affiliated Parties

In conducting its business activities, the Company conducts transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 regarding Related Party Disclosures and Bapepam and LK Regulation Number KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies", which are defined as follows:

Related parties are persons or entities related to Asuransi Jasindo (the reporting entity):

1. A person or close family member is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control of the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets any of the following:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, a subsidiary, and a subsequent subsidiary are related to the other entity);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   f. An entity controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
   g. The person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and

h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

h. The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or a parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Significant transactions entered into with related parties, whether or not entered into under the same conditions and terms as third parties, are disclosed in the financial statements.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan seluruh transaksi secara wajar (*Arm's Length*) sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perusahaan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah mendapat persetujuan dari Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris beserta Organ.

Fairness and Reasons for Transactions

Throughout 2023, the Company conducted all transactions on an arm's length basis according to normal commercial terms. The Company's transactions are carried out based on the Company's needs and free from conflicts of interest.

All transactions with related parties have been approved by the Board of Directors and known by the Board of Commissioners and its Organs.

Sifat Hubungan Berelasi

Terdapat sejumlah entitas yang berelasi dengan Asuransi Jasindo, di mana sifat hubungan berelasinya didasari atas hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI. Selain itu, Perseroan juga melakukan transaksi dengan entitas yang berada dalam pengendalian bersama.

Rincian lebih lanjut tentang transaksi berelasi atau transaksi material yang mencakup antara lain nama pihak berelasi, sifat/jenis hubungan serta transaksi mengacu pada Catatan 32 Laporan Keuangan Audited Tahunan Tahun 2023 pada Laporan Tahunan ini.

Nature of Relationship for Related Parties

Some entities are related to Asuransi Jasindo, where the nature of the relationship is based on the ownership relationship through the Government of Indonesia. In addition, the Company also conducts transactions with entities under common control.

Further details on related transactions or material transactions that include, among others, the names of related parties, nature/type of relationship, and transactions refer to Note 32 Annual Audited Financial Statements of 2023 in this Annual Report.

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Aset Asset				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	496.086	3,15	1.058.609	6,59
Deposito Berjangka Time Deposit	360.984	2,29	305.022	1,90
Efek Utang dan Dana Jaminan Debt Securities and Guarantee Funds	1.666.602	10,58	1.422.681	8,86
Sukuk Sukuk	132.723	0,84	88.166	0,55
Reksa Dana Mutual Fund	59.703	0,38	77.677	0,48

dalam jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) | in million Rupiah (unless stated otherwise)

Keterangan Description	2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Saham Share	1.691	0,01	2.480	0,02
Piutang Premi Premium Receivables	1.474.092	9,36	669.815	4,18
Piutang Reasuransi Reinsurance Receivables	122.031	0,77	90.415	0,56
Piutang Koasuransi Coinsurance Receivables	289.212	1,84	252.990	1,58
Liabilitas Liability				
Utang Klaim Claims Payable	436.173	3,44	232.038	1,78
Utang Reasuransi Reinsurance Debt	146.272	1,15	138.056	1,04
Utang Koasuransi Coinsurance Debt	225.899	1,78	155.990	1,18
Pinjaman Subordinasi Subordinated Loan	250.000	1,97	250.000	1,89
Utang Restrukturisasi Restructuring Debt	711.324	5,60	633.129	4,80
Pendapatan dan Beban Income and Expense				
Pendapatan Premi Premium Income	2.254.588	68,15	2.184.784	67,21
Beban Klaim Claim Expense	1.866.810	71,39	2.995.866	79,73

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Pada Tahun Buku Terakhir

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan dan perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 dan telah diterapkan pada laporan keuangan Perusahaan:

1. Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
2. Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
3. Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi dan penjelasannya;
4. Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" adiatentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
5. Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Penerapan standar akuntansi baru tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Changes in Accounting Policies Applied in the Last Financial Year

The following are financial accounting standards and changes to financial accounting standards that have been effective since January 1, 2023 and have been applied to the Company's financial statements:

1. Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies which changes the term "significant" to "material" and provides an explanation of material accounting policies;
2. Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding liability classification;
3. Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of "accounting estimates and their explanations;
4. Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets" is about results before intended use;
5. Amendment to PSAK 46: "Income Taxes" concerning Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from Single Transactions.

The implementation of these new accounting standards has no material impact on the Company's financial statements.

Prospek Usaha
Business Prospect

Penguatan ekonomi sepanjang tahun 2023 akan berperan penting dalam membentuk pijakan bagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Berdasarkan asumsi dasar makroekonomi, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh menjadi 5,2% dan tingkat inflasi yang semakin menurun menjadi 2,8% pada tahun 2024 selaras dengan kondisi ekonomi domestik yang masih terus mengalami perbaikan.

Kinerja bisnis Perusahaan di tahun 2023 mengalami tekanan akibat terdapat *loss* bisnis pada beberapa *key account* yang disebabkan dampak rasio solvabilitas Perusahaan yang berada di bawah ketentuan pada tahun 2022. Selain itu, kondisi pasar reasuransi sedang mengalami *hardening* serta terdapat penurunan kapasitas reasuransi dalam negeri yang membuat kapasitas reasuransi menjadi terbatas sehingga Perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan di antaranya dengan melakukan optimalisasi kinerja *underwriting* serta kapasitas reasuransi dalam rangka peningkatan kinerja keuangan Perusahaan.

The strengthening economy throughout 2023 will play an important role in establishing the basis for the rate of economic growth in 2024. Based on basic macroeconomic assumptions, the national economy is estimated to grow by 5.2% and the inflation rate will further decline to 2.8% in 2024 in line with continuously improving domestic economic conditions.

The Company's business performance in 2023 experienced pressure due to business losses in several key accounts resulting from the Company's solvency ratio being below the provisions in 2022. Additionally, the reinsurance market condition is experiencing hardening and a decline in domestic reinsurance capacity results in the reinsurance capacity to be limited, therefore the Company continuously makes improvements, including optimizing underwriting performance and reinsurance capacity in order to improve the Company financial performance.

Pada tahun 2024 Perusahaan berupaya meningkatkan *market position* di industri asuransi umum nasional melalui peningkatan *market share* di seluruh lini bisnis dengan tetap mempertimbangkan *risk appetite* Perusahaan dan tetap fokus pada peningkatan *market position* pada segmen korporasi sebagai *core competence* sehingga Perusahaan menargetkan kenaikan realisasi pendapatan premi sebesar Rp5,62 triliun di tahun 2024 di mana target pendapatan premi ini meningkat 69,86% dari realisasi pendapatan premi tahun 2023 yang sebesar Rp3,31 triliun.

Berdasarkan sasaran Perusahaan tahun 2024, Perusahaan akan fokus kepada tema yang telah ditetapkan yaitu: "*Growing and Expanding Our Business*" yang didukung oleh inisiatif-inisiatif strategi Perusahaan yang terbagi menjadi 2 strategi yaitu strategi bisnis dan strategi *enablers* yang akan dijalankan Perusahaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

1. Strategi Bisnis yang terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu:
   a. *Customer Engagement & Strong Relationship*
      Strategi untuk melakukan *re-engage key account customer* melalui strategi bisnis yaitu *customer engagement & strong relationship* dengan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:
      - Meningkatkan Penetrasi pada Ekosistem BUMN melalui *Joint Capacity* dan *Added Value* berupa *Risk Management Partnership*
      - Memaksimalkan Kerja Sama dengan Mitra Perbankan Khususnya HIMBARA
      - *Win Back Initiative*
      - Ekspansi *Channel* Broker dengan *Service Promise* berdasarkan SLA & *Tiering*
      - Mengembangkan Kerja Sama dengan Afiliasi IFG
   b. Intensifikasi & Ekstensifikasi Penugasan dan Program Pemerintah
      Perusahaan berupaya agar penugasan & program pemerintah dapat memberikan hasil yang *profitable* & *sustainable*. Beberapa program dan penugasan pemerintah di tahun 2024 antara lain:
      - Jamkesmen & Jamkestama
      - AUTP & AUTS/K
      - Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) (Harta Benda)
      - Asuransi Tembakau
      - Asuransi Tenaga Kerja Asing
   c. Penetrasi Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)
      Selain melakukan peningkatan penetrasi pada segmen korporasi *large account* dan *mid market*, Perusahaan akan melakukan peningkatan penetrasi pada segmen pasar kecil dan menengah dengan melakukan beberapa cara:
      - *Cross selling initiative* pada ekosistem BUMN
      - Memanfaatkan jaringan IFG sebagai *point of service*
      - Kerja sama pemasaran melalui *alternative distribution channel*

In 2024 the Company seeks to increase its market position in the national general insurance industry by expanding market share in all business lines while still considering the Company's risk appetite and remaining focused on enhancing market position in the corporate segment as a core competency, thus the Company targets an increase in realized premium income of IDR5.62 trillion in 2024, where the premium income target increases by 69.86% from the realized premium income in 2023 of IDR3.31 trillion.

Based on the Company's target for 2024, the Company will focus on the predetermined theme, namely: "Growing and Expanding Our Business" which is supported by the Company's strategic initiatives which are divided into 2 strategies, namely business strategy and enablers strategy that will be implemented by the Company to achieve the predetermined targets, including:

1. Business Strategy consisting of 4 (four) strategies, namely:
   a. Customer Engagement & Strong Relationship
      Strategy for re-engaging key account customer through business strategies, namely customer engagement & strong relationship by carrying out several initiatives as follows:
      - Increasing penetration into the SOE Ecosystem through Joint Capacity and Added Value in the form of Risk Management Partnership
      - Maximizing Collaboration with Banking Partners, Especially HIMBARA
      - Win Back Initiative
      - Broker Channel Expansion with Service Promise based on SLA & Tiering
      - Developing Collaboration with IFG Affiliates
   b. Intensification & Extensification of Government Assignments and Programs
      The Company seeks to ensure that the government assignments & programs can provide profitable & sustainable results. Several government programs and assignments in 2024 include:
      - Jamkesmen & Jamkestama
      - AUTP & AUTS/K
      - State Property Insurance (ABMN) (Property)
      - Tobacco Insurance
      - Foreign Employment Insurance
   c. Small Medium Enterprise (SME) Segment Penetration
      In addition to increasing penetration in the large account and mid market corporate segments, the Company will increase penetration in the small and medium market segments by using several methods:
      - Cross selling initiatives in the SOE ecosystem
      - Utilizing the IFG network as a point of service
      - Marketing cooperation through alternative distribution channels

- *Host to host* dengan HIMBARA dan mitra potensial untuk segmen SME
- Pembangunan *digital platform* untuk peningkatan layanan kepada segmen SME

d. Peningkatan *Underwriting Performance & Reinsurance Capacity*

Dalam rangka memaksimalkan perolehan laba Perusahaan, Perusahaan akan meningkatkan hasil *underwriting* dan pendapatan *underwriting* dengan cara meningkatkan *market share* serta *risk retention* atas lini bisnis yang merupakan *risk appetite* Perusahaan. Adapun inisiatif peningkatan *underwriting performance & reinsurance capacity* dilakukan oleh Perusahaan antara lain:

- *Customer risk profiling* melalui *risk management partnership*
- Pemenuhan kapasitas reasuransi untuk menunjang penetrasi bisnis
- Fokus pada peningkatan seleksi risiko berbasiskan *risk appetite*

2. Untuk mendukung strategi bisnis guna tercapainya target dan sasaran yang ditetapkan Perusahaan, perlu adanya strategi *enablers* yang terdiri dari (a) Penguatan Tata Kelola & Manajemen Risiko; (b) Penguatan Infrastruktur IT & IT *Business Support*; (c) Pelaksanaan *Dry Run* PSAK 74; (d) Optimalisasi Penagihan Piutang & Subrogasi; (e) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Produktif dan Berdaya Saing; dan (f) Optimalisasi Kinerja Anak Perusahaan.

3. Selanjutnya di tahun 2024 Perusahaan akan melaksanakan aksi korporasi yaitu konversi pinjaman subordinasi menjadi ekuitas yang diharapkan dapat mengoptimalkan kekuatan Perusahaan untuk bersaing dengan sehat di industri asuransi, sehingga target produksi dapat dicapai. Pelaksanaan aksi korporasi tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek tata kelola (*Good Corporate Governance*) kepatuhan, hukum, dan manajemen risiko yang berlaku.

- Host to host with HIMBARA and potential partners for the SME segment
- Development of a digital platform to improve services to the SME segment

d. Increasing Underwriting Performance & Reinsurance Capacity

In order to maximize the Company's profit, the Company will increase underwriting return and underwriting income by increasing market share and risk retention for business lines which constitute the Company's risk appetite. The initiatives to increase underwriting performance & reinsurance capacity carried out by the Company include:

- Customer risk profiling through risk management partnership
- Fulfillment of reinsurance capacity to support business penetration
- Focus on improving risk selection based on risk appetite

2. To support business strategies to achieve targets and objectives set by the Company, it is necessary to have an enablers strategy consisting of (a) Strengthening Governance & Risk Management; (b) Strengthening IT Infrastructure & IT Business Support; (c) Implementation of PSAK 74 Dry Run; (d) Optimization of Receivables Collection & Subrogation; (e) Creating superior, productive and competitive human resources; and (f) Optimizing Subsidiary Performance.

3. Furthermore, in 2024 the Company will carry out corporate action, namely the conversion of subordinated loans into equity, which is expected to optimize the Company's strength to compete fairly in the insurance industry, in order to achieve the production targets. The implementation of these corporate actions is carried out while prioritizing the applicable aspects of Good Corporate Governance, compliance, law and risk management.

05

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Asuransi Jasindo secara berkesinambungan terus mendorong pengelolaan karyawan yang tepat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi yang ditunjang dengan program pengembangan dan jalur karir yang pasti menjadi strategi utama Perusahaan untuk mempertahankan talenta terbaik yang dimilikinya.

Asuransi Jasindo continuously encourages proper employee management as part of efforts to realize the Company's vision and mission. Competency-based HR management supported by development programs and career paths is definitely the Company's main strategy to retain the best talent it has.

DEMOGRAFI KARYAWAN

Asuransi Jasindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam mencapai visi dan misi Perseroan. Di akhir tahun 2023, Asuransi Jasindo memiliki 630 karyawan, mengalami penurunan 20 karyawan atau 3,08% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2022 yaitu 650 karyawan.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Asuransi Jasindo has employees with a superior work culture who are the most valuable assets in achieving the Company's vision and mission. At the end of 2023, Asuransi Jasindo had 630 employees, a decrease of 20 employees or 3.08% compared to the number of employees as of December 31, 2022, i.e., 650 employees.

Jumlah Karyawan Asuransi Jasindo 2021-2023
Number of Employees of Asuransi Jasindo 2021-2023

Dalam Rp Juta | In Million Rupiah

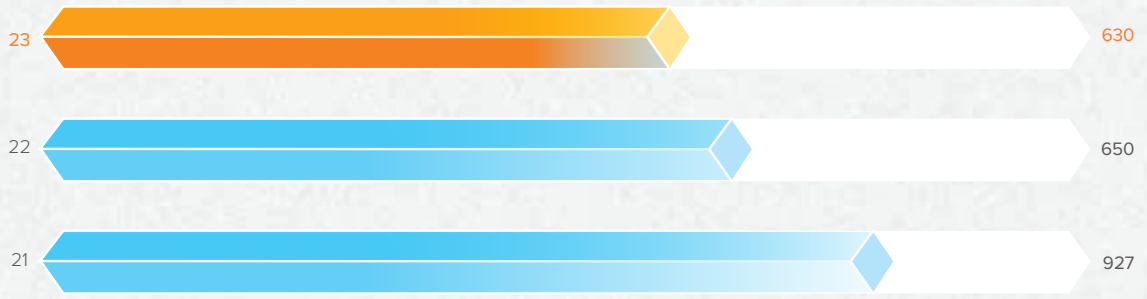

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian / Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Karyawan Tetap Permanent Employee	630	93%	650	94%	927	96%
Karyawan Kontrak Contract Employee	46	7%	39	6%	39	4%
Jumlah Total	**676**	**100%**	**689**	**100%**	**966**	**100%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin / Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pria Male	481	71%	481	74%	623	67%
Wanita Female	195	29%	169	26%	304	33%
Jumlah Total	**676**	**100%**	**689**	**100%**	**966**	**100%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia / Employee Composition Based on Age

Rentang Usia Age Range	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
<25 tahun <25 years-old	15	2,38%	4	0,62%	3	0,32%
25 - 30 tahun 25 - 30 years-old	72	11,43%	81	12,46%	136	14,67%
30 - 35 tahun 30 - 35 years-old	148	23,49%	148	22,77%	177	19,09%
35 - 40 tahun 35 - 40 years-old	101	16,03%	98	15,08%	158	17,04%
40 - 45 tahun 40 - 45 years-old	154	24,44%	170	26,15%	239	25,78%
45 - 50 tahun 45 - 50 years-old	119	18,89%	107	16,46%	146	15,75%
>50 tahun >50 years-old	21	3,33%	42	6,46%	68	7,34%
Jumlah Total	**630**	**100,00%**	**650**	**100,00%**	**927**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan / Employee Composition Based on Education

Pendidikan Education	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
S-2 I Master's degree	108	17,14%	114	17,54%	144	15,53%
S-1 I Undergraduate	465	73,81%	474	72,92%	659	71,09%
D III	57	9,05%	60	9,23%	101	10,90%
SLTA ISenior High School	0	0%	2	0,31%	23	2,48%
Jumlah Total	**630**	**100,00%**	**650**	**100,00%**	**927**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan / Employee Composition Based on Position Level

Level Jabatan Position Level	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
BOD-1	1	0,16%	32	4,92%	32	3,45%
BOD-2	35	5,56%	114	17,54%	111	11,97%
BOD-3	112	17,78%	123	18,92%	133	14,35%
BOD-4	121	19,21%	261	40,15%	417	44,98%
BOD-5	247	39,21%	120	18,46%	234	25,24%
Jumlah Total	**114**	**18,10%**	**650**	**100,00%**	**927**	**100,00%**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Asuransi Jasindo memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan karyawan secara terintegrasi dengan visi, misi, dan strategi Perusahaan.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Asuransi Jasindo views Human Resources (HR) as an important factor in supporting the Company's performance and sustainability. Therefore, the Company consitently manages and develops employees in an integrated manner with the Company's vision, mission, and strategy.

Perusahaan terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkala di berbagai sisi dan fungsi SDM, agar pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas dan berkompeten dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan arah pengembangan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

The company continues to pursue regular development and improvement across various aspects and functions of HR, ensuring the fulfillment of the requirements for skilled and competent HR in alignment with the company's work plan, budget, and long-term business development direction.

Organisasi Pengelola SDM

Group Sumber Daya Manusia (*Group* SDM) merupakan penanggung jawab pengelolaan SDM di Asuransi Jasindo. *Group* SDM berada di bawah supervisi Direktur Sumber Daya Manusia & Umum. *Group* SDM memiliki 3 (tiga) Unit yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Unit Manajemen Strategis SDM, Unit Manajemen Talenta dan Unit Layanan SDM. Selain itu juga terdapat fungsi *Human Capital Business Partner*.

HR Management Organization

The Human Resources Group (HR Group) is responsible for HR management at Asuransi Jasindo. The HR Group operates under the supervision of the Director of Human Resources & General Affairs. It comprises 3 (three) Units, each with distinct duties and responsibilities, yet collectively forming an inseparable entity. These units are the HR Strategic Management Unit, the Talent Management Unit, and the HR Services Unit. Moreover, there is also a Human Capital Business Partner function.

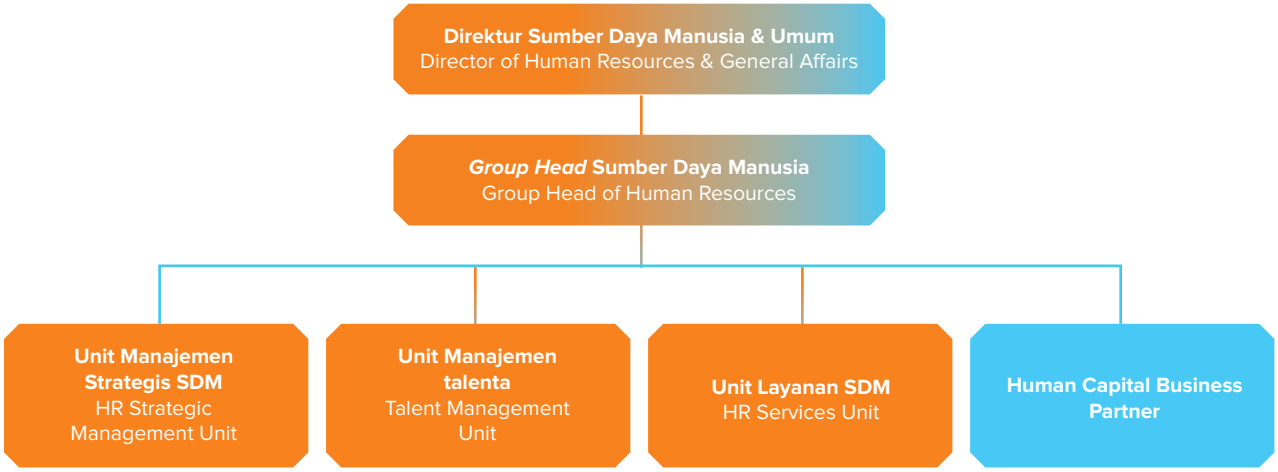

Unit Manajemen Strategis SDM

Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinir dan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, strategi dan kebijakan SDM, hubungan industrial dan sistem manajemen kinerja karyawan sesuai dengan sasaran dan strategi Perusahaan.

HR Strategic Management Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing activities consisting of HR planning, strategy, and policies, industrial relations and employee performance management systems in accordance with the Company's targets and strategies.

Unit Manajemen Talenta

Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinir dan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari rekrutmen, pengembangan karier, pengembangan kompetensi melalui pelatihan/pendidikan, pengelolaan talenta, mutasi dan pelaksanaan budaya Perusahaan sesuai dengan sasaran dan strategi Perusahaan.

Talent Management Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing activities consisting of recruitment, career development, competency development through training/education, talent management, the transfers and implementation of the Company's culture in accordance with the Company's targets and strategies.

Unit Layanan SDM

Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinir dan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari pengelolaan SDM meliputi remunerasi, *benefit*, dan *exit system* dan *Human Capital Information System* (HCIS) yang sejalan dengan sasaran dan strategi Perusahaan.

HR Services Unit

Responsible for planning, coordinating. and implementing activities consisting of HR management including remuneration, benefits, and exit systems and the Human Capital Information System (HCIS) which are in line with Company's goals and strategies.

Fungsi *Human Capital Business Partner* (HCBP)

Penghubung antara fungsi SDM dengan unit bisnis, unit operasional ataupun unit kerja lainnya guna mendorong peningkatan organisasi secara keseluruhan.

Program Kerja *Group* SDM Tahun 2023

Dalam rangka mendukung strategi yang dijalankan Perseroan di tahun 2023, *Group* SDM telah menjalankan program kerja tahun 2023. Program kerja tersebut antara lain:

1. Melaksanakan pengadaan bersama penyedia jasa konsultan dan melaksanakan penyusunan *roadmap* penyehatan Dana Pensiun;
2. Mengembangkan aplikasi *performance coaching* menjadi aplikasi *performance coaching* dan *career counseling*;
3. Melakukan *job matching* dalam rangka *salary survey* yang dilaksanakan oleh IFG bekerja sama dengan Willis Tower Watson;
4. Melakukan *review* dan penyesuaian *job description* pada jabatan *Group Head* dan *Head Of*;
5. Melakukan penyusunan kompetensi teknis (*hard competency*);
6. Melaksanakan program *individual development (coaching)* pada seluruh karyawan
7. Melakukan *review* dan pengkinian terhadap ketentuan yang terkait dengan Bidang SDM;
8. Melakukan proses hubungan industrial terkait dengan pelanggaran karyawan;
9. Melaksanakan kemitraan strategis dengan Serikat Karyawan;
10. Mengikuti program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) untuk peserta *Officer Development Program* (ODP) serta untuk pemenuhan karyawan disabilitas;
11. Melaksanakan Rekrutmen untuk pemenuhan karyawan disabilitas;
12. Melakukan *talent mapping* pada level BOD-1 dan BOD-2 pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan Perusahaan dan Anak Perusahaan dan sebagai implementasi program *talent mobility*;
13. Melakukan *assessment* untuk level BOD-1 dan BOD-2 untuk kepentingan *talent identification;*
14. Pemenuhan tenaga ahli bersertifikat sebagai penunjang pekerjaan guna upaya peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan di bidang *Information Technology* (IT), *Project Management Office* (PMO), SDM, *digital, actuary*, manajemen risiko, *internal audit*, dan lain-lain;
15. Melaksanakan HR *maturity assessment* untuk mengukur kelengkapan proses pengelolaan SDM dan kecukupan kebijakan, prosedur dan hal-hal terkait efektivitas implementasi kebijakan dan prosedur yang tersedia;
16. Evaluasi pelaksanaan program AKHLAK tahun 2022 dan penilaian unit terbaik dalam mengimplementasikan AKHLAK melalui program AKHLAK *Award* tahun 2022, serta pelaksanaan implementasi budaya AKHLAK tahun 2023;

Human Capital Business Partner (HCBP) Function

Liaison between the HR function and business units, operational units or other work units to encourage overall organizational improvement.

HR Group Work Program for 2023

In order to support the strategy implemented by the Company in 2023, the HR Group has implemented a work program for 2023. The work program includes :

1. To carry out procurement with consultant service providers and carry out the preparation of a roadmap for the restructuring of the Pension Fund;
2. To develop the performance coaching application into a performance coaching and career counselling application;
3. To carry out job matching in the context of a salary survey carried out by IFG in collaboration with Willis Tower Watson;
4. To review and adjust the job description for the Group Head and Head Of positions;
5. To develop technical competencies (hard competency);
6. To carry out individual development (coaching) programs for all employees;
7. To review and update provisions related to the HR sector;
8. To carry out industrial relations processes related to employee violations;
9. To carry out strategic partnerships with Labour Unions;
10. To participate in the BUMN Joint Recruitment or Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) program for Officer Development Program (ODP) participants and to fulfill disabled employees;
11. To carry out recruitment to meet disabled employees;
12. To carry out talent mapping at the BOD-1 and BOD-2 levels to fulfill HR needs according to the needs of the Company and Subsidiaries and as an implementation of the talent mobility program;
13. To carry out assessments for BOD-1 and BOD-2 levels for talent identification purposes;
14. The fulfillment of certified expert staff to support work in order to increase employee competency and performance in the fields of Information Technology (IT), Project Management Office (PMO), HR, digital, actuary, risk management, internal audit, etc.;
15. To carry out an HR maturity assessment to measure the completeness of the HR management process and the adequacy of policies, procedures, and matters related to the effectiveness of the implementation of available policies and procedures;
16. The evaluation of the implementation of the AKHLAK program in 2022 and the assessment of the best unit in implementing AKHLAK through the AKHLAK Award program in 2022, as well as the implementation of AKHLAK culture in 2023;

17. Pelaksanaan program Jasindo Milenial baik kegiatan yang mendukung BUMN Muda maupun Milenial IFG, serta kegiatan mandiri Milenial Jasindo;
18. Pelaksanaan program Srikandi Jasindo, baik kegiatan yang mendukung Srikandi BUMN maupun Srikandi IFG, serta kegiatan mandiri Srikandi Jasindo;
19. Melakukan *update* dan pelaporan terkait kepesertaan karyawan dalam BP Jamsostek, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan komersil dan asuransi jiwa kumpulan;
20. Menyelenggarakan program *employee engagement* dalam rangka meningkatkan semangat kolaborasi dan produktivitas karyawan;
21. Penyesuaian gaji sebagai dampak restrukturisasi gaji yang diimplementasikan mulai bulan Mei 2023;
22. Pemberian penghargaan masa kerja efektif karyawan pada saat HUT Asuransi Jasindo tahun 2023 berupa uang penghargaan, piagam penghargaan dan emas batangan logo Jasindo;
23. Mengikuti agenda *salary survey* bersama tahun 2023 untuk perusahaan asuransi diikuti oleh *Holding* dan Anak Perusahaan IFG serta diikuti oleh perusahaan asuransi lainnya;
24. Penunjukan *provider* asuransi Kesehatan komersial untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan beserta keluarga untuk periode 1 Agustus 2023 s.d. 31 Juli 2025;
25. Implementasi *Human Resource Information System* (Star SDM) aplikasi Star SDM Sunfish 5.4 menjadi Star SDM Sunfish 6 tanggal 19 September 2023 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan/manajemen sumber daya manusia secara bertahap dan untuk tahap awal implementasi untuk modul kehadiran/*time attendance* (pengajuan cuti, sakit, perjalanan dinas dan cuti besar), modul penggajian/*payroll* dan modul *reimbursemen*t;
26. Finalisasi penyusunan anggaran Group SDM untuk tahun 2024;
27. Melakukan pengadaan jasa Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) untuk melaksanakan perhitungan cadangan/ *liabilitas* sesuai ketentuan PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja tahun 2023;
28. Melakukan pengadaan jasa konsultan pajak untuk melakukan kajian dan membantu melaksanakan implementasi atas ketentuan pajak natura/kenikmatan tahun 2023;
29. Melakukan implementasi pajak natura/kenikmatan dan perubahan metode perhitungan pajak yang semula ditanggung menjadi ditunjang serta melakukan rekonsiliasi dan perhitungan pajak rampung/Desember 2023;
30. Melakukan pengadaan perpanjangan perpanjangan *subscription* aplikasi SunFish 6 untuk periode tahun 2024 selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024; dan
31. Melakukan *renewal*/perpanjangan polis asuransi jiwa kumpulan menggunakan PT Asuransi Jiwa IFG untuk periode tahun 2024 selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024.

17. The implementation of the Jasindo Millennial program, including activities that support Young BUMN and IFG Millennials, as well as Jasindo Millennial's independent activities;
18. The implementation of the Srikandi Jasindo program, both activities supporting Srikandi BUMN and Srikandi IFG, as well as Srikandi Jasindo's independent activities;
19. To carry out update and statement regarding employee participation in BP Jamsostek, BPJS Kesehatan, commercial health insurance and group life insurance;
20. To organize employee engagement programs in order to increase the spirit of collaboration and employee productivity;
21. Salary adjustments as a result of salary restructuring which will be implemented starting in May 2023;
22. Providing awards for employees' effective work experience at Asuransi Jasindo's anniversary in 2023 in the form of award money, award certificates, and gold bars with the Jasindo logo;
23. To participate in the 2023 joint salary survey agenda for insurance companies followed by IFG Holding and Subsidiaries and followed by other insurance companies;
24. The appointment of commercial health insurance providers for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees and their families for the period of August 1, 2023 to July 31, 2025;
25. The implementation of the Human Resource Information System (Star SDM) Star SDM Sunfish 5.4 application to become Star SDM Sunfish 6 on September 19, 2023, to increase the effectiveness of human resource management in stages and for the initial stage of implementation for the attendance / time attendance module (leave application, sickness, official travel, and long leave), payroll module and reimbursement module;
26. The finalization of HR Group budget preparation for 2024;
27. To procure the services of an Actuarial Consultant Office or Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) to carry out reserve / liability calculations in accordance with the provisions of PSAK 24 (revised 2013) regarding Employee Benefits in 2023;
28. To procure tax consultant services to conduct studies and assist in implementing the 2023 in-kind / pleasure tax provisions;
29. To implement in-kind / enjoyment tax and change the tax calculation method from originally borne to be supported as well as carry out reconciliation and final tax calculations / December 2023;
30. To procure an extension for the SunFish 6 application subscription for the period 2024 for 1 (one) year starting from January 1 to December 31, 2024; and
31. To renew/extend the group life insurance policy using PT Asuransi Jiwa IFG for the period 2024 for 1 (one) year starting from January 1 to December 31, 2024.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Asuransi Jasindo mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang komprehensif dan mencakup seluruh proses pengelolaan SDM dari perencanaan karyawan hingga mempersiapkan masa purnabakti karyawan.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Asuransi Jasindo has developed a comprehensive HR management system and covers the entire HR management process from employee planning to preparing for employee retirement.

Proses pengelolaan SDM di Asuransi Jasindo dilakukan secara berkesinambungan dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Perusahaan membuat perencanaan secara matang agar dalam perjalanannya program-program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik.

The HR management process at Asuransi Jasindo is carried out continuously and is linked to one another. The company makes careful planning so that the programs that have been designed can run well.

Salah satu program utama dalam pengelolaan SDM di Asuransi Jasindo saat ini adalah membangun organisasi yang lincah dan tangguh sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang diwarnai ketidakpastian. Perusahaan juga melakukan efisiensi dalam pengelolaan SDM, khususnya pada aspek biaya tenaga kerja.

One of the main programs in HR management at Asuransi Jasindo currently is to build an agile and resilient organization so that it is able to face various challenges amidst economic and business conditions that are characterized by uncertainty. The company also makes efficiency in managing human resources, especially in the aspect of labour costs.

Dalam proses pengelolaan SDM tersebut, program pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting bagi Perusahaan. Asuransi Jasindo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas karyawan melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi untuk meningkatkan *softskill* maupun *hardskill* terbuka bagi semua karyawan yang diimplementasikan melalui program *In house Training*, *Public Training* (dalam dan luar negeri), program sertifikasi profesional masing-masing bidang, serta beasiswa pendidikan formal maupun non formal.

In the HR management process, education and training programs are very important for the Company. Asuransi Jasindo is committed to improving the quality, capacity, and capability of employees through competency development programs organized through various education and training activities. Competency development to improve soft skills and hard skills is open to all employees and is implemented through in-house training programs, public training (domestic and overseas), professional certification programs for each field, as well as formal and non-formal educational scholarships.

Program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana pelatihan tahunan yang disusun berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA). Asuransi Jasindo memandang pengembangan kompetensi SDM sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan 163 program pendidikan dan pelatihan dengan total biaya pelatihan sebesar Rp2.631.240.566,-.

The training program is implemented in accordance with the annual training plan prepared based on the Training Need Analysis (TNA). Asuransi Jasindo views HR competency development as a long-term investment that will have a real impact on improving the Company's performance in the future.

Throughout 2023, the Company has implemented 163 education and training programs with a total training cost of IDR2,631,240,566.-.

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	PT Damier (Binus *Center* Bintaro)	*Training Data Processing with* Microsoft Excel Binus	5 Januari-2 Februari 2023 January 5-February 2, 2023
2	Ahli Asuransi *Learning Center*	Webinar *Understanding Marine Hull Insurance* Understanding Marine Hull Insurance Webinar	7 Januari 2023 January 7, 2023
3	PMLI (IPC *Learning and Consulting*)	*Workshop Design Thinking - Program* INVOLVE IFG Design Thinking Workshop - IFG INVOLVE Program	10-11 Januari 2023 January 10-11, 2023
4	*Digital Talent* BUMN SOE Digital Talent	Pijar Mahir *Live Class* - Memahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pijar Mahir Live Class - Understanding Personal Data Protection Regulations	13 Januari 2023 January 13, 2023
5	Yayasan Pendidikan Internal Auditor Internal Auditor Education Foundation	*Trends and Challenges Internal Audit in* 2023-2025	20 Januari 2023 January 20, 2023
6	ACFE Indonesia	*Educating Employees to Protect Your Organization from Identity Theft*	25 Januari 2023 January 25, 2023
7	IFG Corporate University - Daya Dimensi Indonesia	*Program Leadership Excellence Acceleration and Development* (LEAD1*)* Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD1) Program	25 Januari 2023 January 25, 2023
8	IFG Corporate University	Webinar *Legal Sharing Session* BUMN dan Aspek Keuangan Negara Legal Sharing Session Webinar for SOE and State Finance Aspects	26 Januari 2023 January 26, 2023
9	WTW	WTW *Ex Journey Complimentary Webinar*	27 Januari 2023 January 27, 2023
10	Ahli Asuransi *Learning Center* (AALC)	Kupas Tuntas Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Completely Review the Standard Indonesian Motor Vehicle Insurance Policy	28 Januari 2023 January 28, 2023
11	Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI FEUI Accounting Development Center	*Certified Professional Management Accountant (*CPAM) *Review*	28 Januari-13 Mei 2023 January 28-May 13, 2023
12	Mandiri *Group*	Mandiri Investment Forum 2023: *Prevailing Over Turbulence*	20 Februari 2023 February 20, 2023
13	Ahli Asuransi *Learning Center*	*Training* Dasar-Dasar Reasuransi Reinsurance Basics Training	4 Februari 2023 February 4, 2023
14	ACFE Indonesia	Program Sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE) Certified Fraud Examiner (CFE) Certification Program	6-10 Februari 2023 February 6-10, 2023
15	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP) Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Certification Program	6-9, 13 Februari 2023 February 6-9, 13, 2023
16	Daya Dimensi Indonesia	*Assessment Job Target* BOD BUMN SOE BOD Job Target Assessment	8-9 Februari 2023 February 8-9, 2023
17	Yayasan Pendidikan Internal Auditor Internal Auditor Education Foundation	Pelatihan *Internal Control* COSO-2013 (COSO) COSO-2013 Internal Control Training (COSO)	9-10 Februari 2023 February 9-10, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
18	BLMI dan FHCI BUMN BLMI dan FHCI SOE	*Chief Business Development Officers* (CBDO) *Innovation School*	10-11 Februari 2023 dan, 16, 17, 24, 29 Maret 2023 dan 5 April 2023 February 10-11, 2023 and March 16, 17, 24, 29, 2023, and April 5, 2023
19	IFG Corporate University	Pelatihan Pengenalan Dasar Reasuransi Reinsurance Basic Introduction Training	14 Februari 2023 February 14, 2023
20	SDG *Learning*	Pelatihan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Program Training	16 Februari 2023 February 16, 2023
21	Dentons Hanafiah Ponggawa; *Partner Law Firm*	Dentons HPRP Law*; Regulation Outlook 2023-Omnibus Law Sektor* Keuangan: Tantangan dan Antisipasi Dentons HPRP Law; Regulation Outlook 2023-Omnibus Law Financial Sector: Challenges and Anticipation	20 Februari 2023 February 20, 2023
22	AAUI	Pelatihan Asuransi Tanggung Gugat Accountability Insurance Training	24 Februari 2023 February 24, 2023
23	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Pelatihan Brevet A dan B Terpadu (Tatap Muka) Integrated Brevet A and B Training (Face to Face)	22 Februari 2023-10 April 2023 February 22, 2023-April 10, 2023
24	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Pelatihan Brevet C (Tatap Muka) Brevet C Training (Face to Face)	24 Februari 2023-31 Mei 2023 February 24, 2023-May 31, 2023
25	IFG Corporate University - Daya Dimensi Indonesia	*Program Leadership Excellence Acceleration and Development* (*LEAD*-1) - *Phase* 1A - *Personal Leadership Journey* Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Program - Phase 1A – Personal Leadership Journey	24-25 Februari 2023 February 24-25, 2023
26	Yayasan Pendidikan *Internal Auditor* Internal Auditor Education Foundation	Pelatihan Standar Audit Internal dan Kode Etik Profesi Training on Internal Audit Standards and Professional Code of Conducts	06-7 Maret 2023 March 6-7, 2023
27	UI *Leadership Development Center*	Indonesia *Leadership* Forum 2023	09-10 Maret 2023 March 9-10, 2023
28	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMP *Certified Risk Management Professional)* Risk Management Certification Program (CRMP Certified Risk Management Professional)	6-9 Maret 2023 dan 13-14 Maret 2023 March 6-9, 2023 and March 13-14, 2023
29	AAUI	Webinar *Capitalizing The Emerging Trends in Insurance Market* Coso-2013 (Coso) Capitalizing The Emerging Trends in Insurance Market Coso-2013 (Coso) Webinar	9 Maret 2023 March 9, 2023
30	Global Edukasi Infotama Solusi	*Training Information Technology Infrastructure Library* ITIL *(Include Certification)*	13-15 Maret 2023 March 13-15, 2023
31	Satu Jangkar	Seminar Asuransi *Marine Hull* dan Penanganan Klaim Seminar on Marine Hull Insurance and Claims Handling	15 Maret 2023 March 15, 2023
32	IFG Corporate University	Pelatihan PSAK 74: *Overview* dan Implementasi Sistem SAS PSAK 74 Training: The Overview and Implementation of SAS System	15-16 Maret 2023 March 15-16, 2023
33	AAMAI	Strategi Bisnis Asuransi di Era Penurunan Kapasitas Reasuransi dan Kenaikan Tarif Reasuransi Insurance Business Strategy in the Era of Declining Reinsurance Capacity and Rising Reinsurance Rates	20 Maret 2023 March 20, 2023
34	RAP Indonesia and LSPMR	Program Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko (CRGP/ *Certified Risk Governance Professional*) Risk Management Certification Extension Program (CRGP Certified Risk Governance Professional)	28-29 Maret 2023 March 28-29, 2023
35	IFG Corporate University	Pelatihan COBIT 2019 *Practices for IT Governance* COBIT 2019 Practices for IT Governance training	29-30 Maret 2023 March 29-30, 2023
36	SDG *Learning*	Pelatihan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Program Training	30 Maret 2023 March 30, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
37	IFG Corporate University	Implementasi *Core Values* AKHLAK sebagai Budaya Kerja Sehari-hari The Implementation of Core Values AKHLAK as a Daily Work Culture	31 Maret 2023 March 31, 2023
38	WTW	WTW's *Virtual Employee Experience Summit (Driving Value by Improving the Employee Experience*)	3 April 2023 April 3, 2023
39	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMO/*Certified Management Risk Officer*) Risk Management Certification Program (CRMO Certified Management Risk Officer)	10-12 April 2023, 14 April 2023 dan 3-6 April 2023, 10-11 April 2023 April 10-12, 2023, April 14, 2023, and April 3-6, 2023, April 10-11, 2023
40	PPM *Management*	*Training* dan Sertifikasi *Digital Marketing* (CDM) Digital Marketing (CDM) Training and Certification	11-14 April 2023 April 11-14, 2023
41	IFG Corporate University	Program Pelatihan *Corporate Learning Design and Implementation* Corporate Learning Design and Implementation Training Program	13-14 April 2023 April 13-14, 2023
42	JASINDO, RINDAM, STIMRA	Rangkaian Program *PreEntry* ODP (*inclass training, character building*, dan sertifikasi CGI) ODP Pre-Entry Program Series (in class training, character building, and CGI certification)	2-31 Mei 2023 May 2-31, 2023
43	LAN RI	Webinar Aktualisasi Pekerja Perempuan Dalam Menghadapi Tantangan Kepemimpinan Masa Depan Webinar on the Actualization of Women Workers in Facing Future Leadership Challenges	10 Mei 2023 May 10, 2023
44	AICLA	*Training Claims in a Post-pandemic World*, Bangkok	24-27 Mei 2023 May 24-27, 2023
45	Maipark	*Catastrophe Risk Management Lesson Learnt from* Tohoku Earthquake	10-13 Mei 2023 May 10-13, 2023
46	IFG Corporate University	*Global Leadership Program*	5-16 Juni 2023 June 5-16, 2023
47	Koran BUMN SOE Newspaper	*Workshop* Tata Cara Hapus Buku dan Pindah Tangan Aset Tetap BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Workshop on Procedures for Writing Off and Changing Hands of Fixed Assets of SOE and SOE Subsidiaries	25 Mei 2023 May 25, 2023
48	Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI)	Konferensi Asia Pacific *Satellite Communication System* Satellite Communication System Asia Pacific Conference	30-31 Mei 2023 May 30-31, 2023
49	IFG Corporate University	Pelatihan *Cyber Security Awareness for Business Professionals* Cyber Security Awareness for Business Professionals Training	29-30 Mei 2023 May 29-30, 2023
50	IFG Corporate University	Pelatihan *Service Excellence* Service Excellence Training	25-26 Mei 2023 May 25-26, 2023
51	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMO/*Certified Management Risk* Officer) Risk Management Certification Program (CRMO Certified Management Risk Officer)	22-24 Mei, 29 Mei 2023 May 22-24, May 29, 2023
52	RAP Indonesia and LSPMR	Program Perpanjangan *Sertifikasi Manajemen Risiko* (CRGP/*Certified Risk Governance Professional*) Risk Management Certification Extension Program (CRGP/Certified Risk Governance Professional)	15-16 Mei 2023 May 15-16, 2023
53	IFG (Indonesia Financial Group)	IFG Konferensi Nasional 2023 IFG National Conference 2023	16 Mei 2023 May 16, 2023
54	IFG Corporate University	*Training Powerful Public Speaking* Powerful Public Speaking Training	16-17 Mei 2023 May 16-17, 2023
55	PT Link Knowledge Academy (JM Anowar)	*Program Training For Trainer* Training Program For Trainer	9-11 Mei 2023 May 9-11, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
56	LSP GRC and SDG *Learning*	Program Professional GRC *Certification Exam for Advance Level Executive* (GRCE) Professional GRC Certification Exam for Advance Level Executive (GRCE) Program	11-17 Mei 2023 May 11-17, 2023
57	IFG Corporate University - Daya Dimensi Indonesia	Program *Leadership Excellence Acceleration and Development* (*LEAD*-1) - *Social Culture Program* Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Program - Social Culture Program	12-14 Mei 2023 May 12-14, 2023
58	Forum Humas BUMN SOE Public Relations Forum	BUMN *Communication Week* 2023: "*Communications in Digital World*" SOE Communication Week 2023: "Communications in Digital World"	5-6 Mei 2023 May 5-6, 2023
59	IFG Corporate University bekerja sama *Value Consult* IFG Corporate University collaborates with Value Consult	Pelatihan *Customer Loyalty and Relationship Management* Customer Loyalty and Relationship Management Training	4-5 Mei 2023 May 4-5, 2023
60	Ahli Asuransi *Learning Center* (AALC)	Seminar Electric *Vehicle Insurance: Best Practices from* Inter Electric Vehicle Insurance : Best Practices from Inter Seminar	4 Mei 2023 May 4, 2023
61	IFG Corporate University	Tutorial Ujian PAI subjek ASAI dan FSAI PAI Exam Tutorial for ASAI and FSAI subjects	May 2023
62	AAUI	The 7th AAUI *Young Manager Award* (AYMA) - *Technical and Coaching*	22 dan 26 Mei 2023 May 22 and 26, 2023
63	PPM *Management*	*Training* dan Sertifikasi *New Product Development Professional* (NPDP) New Product Development Professional (NPDP) Training and Certification	22-26 Mei 2023 May 22-26, 2023
64	Swiss Re	Swiss Re Webinar: Nat Cat and *Inflation - a perfect storm*	1 Juni 2023 June 1, 2023
65	Ikatan Akuntan Indonesia	*Workshop Navigating the Path to* IFRS 17 *Insurance Contract: Insight from* Malaysia's *Experience*	9 Juni 2023 June 9, 2023
66	IFG Corporate University	*Workshop* IT *Cyber Security* IT Cyber Security Workshop	20 Juni 2023 June 20, 2023
67	PPM *Management*	Pelatihan *Report Writing* Writing Report Training	26-27 Juni 2023 June 26-27, 2023
68	IFG Corporate University	*Workshop Design Thinking* - Program INVOLVE IFG (tahap 2) Design Thinking Workshop - INVOLVE IFG Program (stage 2)	26-27 Juni 2023 June 26-27, 2023
69	Ahli Asuransi *Learning Center*	Webinar "Memahami Klausul-Klausul Asuransi Konstruksi CAR dari Brokers dan Aplikasinya Jika Terjadi Klaim" "Understanding CAR Construction Insurance Clauses from Brokers and Their Application if There Is A Claim" Webinar	24 Juni 2023 June 24, 2023
70	Inosentius Samsul	Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen The Socialization of Consumer Personal Data Protection	16 Juni 2023 June 16, 2023
71	Ts. G. Sujenthiran Eng. Tech	*Sharing Knowledge* "*Insights to* AGI *Engineering* Wing"	13 Juni 2023 June 13, 2023
72	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuaries Association	Seminar Asia Pacific PAI-SOA *Joint Symposium* 2023 Asia Pacific Seminar PAI-SOA Joint Symposium 2023	20-23 Juni 2023 June 20-23, 2023
73	IFG Corporate University - Daya Dimensi Indonesia	Program *Leadership Excellence Acceleration and Development* (LEAD-1) - *Development Journey Program* Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Program - Development Journey Program	15-17 Juni 2023 June 15-17, 2023
74	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)	Pendidikan Sertifikasi AAPAI dan APAI AAPAI and APAI Certification Education	26 Juni-22 Agustus 2023 June 26-August 22, 2023
75	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)	Pendidikan dan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Manajerial	19-28 Juni 2023 June 19-28, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
76	Yayasan Pendidikan *Internal Auditor* (YPIA)	Pendidikan dan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Education and Certification	22 Mei-5 Juni 2023 May 22-June 5, 2023
77	IFG Corporate University - Jentera	Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Training in Preparing Policies and Regulations	20-22 Juni 2023 June 20-22, 2023
78	IFG Corporate University - PPM *Management*	Pelatihan *Negotiation Skill* Negotiation Skills Training	14-15 Juni 2023 June 14-15, 2023
79	SKK Migas	*The* 13th *Indonesia HR Summit* – Nusa Dua Convention Center, Denpasar, Bali	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023
80	IntiPesan	Pelatihan Komisaris Profesional Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Professional Commissioner Training to Become Competent and Responsible Commissioners	21-22 Juni 2023 June 21-22, 2023
81	IFG Corporate University - Talk Inc	Pelatihan *Effective Presentation Skill* Effective Presentation Skill Training	13-14 Juni 2023 June 13-14, 2023
82	IFG Corporate University - The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Pelatihan *Capital and Treasury Market Essentials* Effective Presentation Skills Training	8-9 Juni 2023 June 8-9, 2023
83	KSAKi	*Training and Gathering Top* 10 *Contributors* KSAK Training and Gathering of Top 10 KSAK Contributors	22-24 Juni 2023 June 22-24, 2023
84	IFG Corporate University - Yustinus Rinaldo Arianto	Pelatihan *Basic Understanding of Reinsurance Treaties* Basic Understanding of Reinsurance Treaties training	26-27 Juni 2023 June 26-27, 2023
85	dr. Nanda Putri Chintia (Siloam Hospital)	*Knowledge Sharing – Health Talk* Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara Knowledge Sharing – Health Talk The Importance of Early Detection of Breast Cancer	26 Juni 2023 June 26-27, 2023
86	MarkPlus Inc	Jakarta *Marketing Week* 2023	14-18 Juni 2023 June 14-18, 2023
87	BLMI and FHCI BUMN	*Chief Business Development Officers* (CBDO) *Innovation School*	5 Juli 2023 July 5, 2023
88	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation	Wisuda Gelar Profesi QIA Pengukuhan QIA dan Konferensi Auditor Internal QIA Professional Degree Graduation QIA Inauguration and Internal Auditor Conference	5-6 Juli 2023 July 5-6, 2023
89	Binus Center	*Workshop - Analysis and Reporting with Excel Dashboard*	6 Juli 2023 July 6, 2023
90	Perkumpulan ADPI ADPI Association	Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) / General Management Training for Pension Funds (MUDP)	3-6 Juli 2023 July 3-6, 2023
91	LKBH Asuransi Insurance LKBH	Seminar *Fraud* Asuransi antara Bisnis dan Kejahatan Insurance Fraud Seminar between Business and Crime	12 Juli 2023 July 12, 2023
92	Inixindo	*Training* dan *Examination* ISO 27001:2022 ISMS *Foundation*	6-7 Juli 2023 July 6-7, 2023
93	AAMAI	Webinar *How To Develop Risk Management Strategy In Operational* Level	6 Juli 2023 July 6, 2023
94	IFG Corporate University	Program *Kindness to Progress* IFG Kindness to Progress IFG Program	5-6 dan 26-28 Juli 2023 July 5-6 and 26-28, 2023
95	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMP/*Certified Risk Management Professional*)	10-13 Juli 2023 July 10-13, 2023
96	IFG Corporate University	*Inclass Session Phase* 3 - Program *LEAD*-1 Inclass Session Phase 3 LEAD-1 Program	20-21 Juli 2023 July 20-21, 2023
97	IFG Corporate University	*Sales Training Bootcamp: Boosting and Accelerating Performance*	20-21 Juli 2023 July 20-21, 2023
98	*Tax Forum* BUMN dan AAUI SOE and AAUI Tax Forum	Kupas Tuntas Praktis PMK-06/2023 Pajak Atas Natura Kenikmatan Completely Practical Review PMK-06/2023 Taxes on In kind Fringe Benefits	21 Juli 2023 July 21, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
99	*International Actuarial Research Conference and* PAI	*Workshop On Earthquake Catastrophe Risk Modeling and The* 2023 *International Actuarial Research Conference*	21-24 Juli 2023 July 21-24, 2023
100	Jasindo	Sharing Knowledge "*Attractive Engineering Claims and The Way Out*"	25 Juli 2023 July 25, 2023
101	Richard Pang (Marsh Specialty) and asindo	Acara Puncak 7th AAUI *Young Manager Award* (AYMA) tahun 2023 Peak event of the 7th AAUI Young Manager Award (AYMA) in 2023	25 Juli 2023 July 25, 2023
102	Jasindo	*Half Day Space Technical Training*	27 Juli 2023 July 27, 2023
103	IFG Corporate University bekerja sama dengan JBI IFG Corporate University collaborates with JBI	Pelatihan *Basic Financial Statement Analysis* Basic Financial Statement Analysis Training	27-28 Juli 2023 July 27-28, 2023
104	Jasindo	Sosialisasi UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan The Socialization of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector	1 Agustus 2023 August 1, 2023
105	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	Seminar Pendidikan Profesionalisme (A80) Periode 2 Professionalism Education Seminar (A80) Period 2	5 Agustus 2023 August 5, 2023
106	BLMI (BUMN *Leadership and amp*; Management Institute)	Sertifikasi BLMI GRC *Masterclass* - Pemeringkatan; Penerbitan Efek Bersifat Utang; Sukuk (EBUS) BLMI GRC Masterclass Certification - Ranking; The Issuance of Debt Securities; Sukuk (EBUS)	10 Agustus 2023 August 10, 2023
107	BLMI (BUMN *Leadership*; *Management Institute*)	Sertifikasi BLMI GRC *Masterclass* - Pre IPO; Post IPO BLMI GRC Masterclass Certification - Pre IPO; Post IPO	10 Agustus 2023 August 10, 2023
108	OJK *Institute*	*Training* Keuangan Berkelanjutan tahun 2023 Sustainable Finance Training in 2023	22-25 Agustus 2023 August 22-25, 2023
109	*Institute of Internal Auditors*	Webinar *Audit Report Writing Effectively* Audit Report Writing Effectively Webinar	23-24 Agustus 2023 August 23-24, 2023
110	IFG Corporate University bekerja sama dengan JBI IFG Corporate University collaborates with JBI	Pelatihan *Business Acumen for Organizational Success* Business Acumen for Organizational Success Training	29-30 Agustus 2023 August 29-30, 2023
111	Koran BUMN SOE Newspaper	*Workshop* Pengelolaan Hak Atas Tanah BUMN Dan Anak Perusahaan Pasca Pemberlakukan UU No. 6/2023 dan PP No. 18/2021 Workshop on Managing the Land Rights of SOE and Subsidiaries After the Implementation of Law Number 6/2023 and PP Number 18/2021	25 Agustus 2023 August 25, 2023
112	AAMAI	The 1st Indonesia Insurance Summit "*Stakeholders Transformation Towards Strengthen to The Insurance Industry*"	23-25 Agustus 2023 August 23-25, 2023
113	Lentera *Consulting*	*Change Leader* AKHLAK *Refreshment Training*	7-14 Agustus 2023 dan 8 dan 11 Agustus 2023 August 7-14, 2023 and August 8 and 11, 2023
114	Rumah Perubahan	Pelatihan ESG: *Long Term Value Creation and Sustainability Journey* ESG Training: Long Term Value Creation and Sustainability Journey	1-4 Agustus 2023 August 1-4, 2023
115	*Human Capital* Indonesia Forum	*Industrial and Employee Relation Conference* 2023	24-25 Agustus 2023 August 24-25, 2023
116	Asia Power Forum	*The 5th annual Asia Power Forum*	31 Agustus 2023 August 31, 2023
117	IFG Corporate University bekerja sama dengan JBI dan *Brainmatics* IFG Corporate University collaborates with JBI and Brainmatics	*Microsoft Excel and Microsoft Powerpoint Advanced Skills*	30-31 Agustus 2023 August 30-31, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
118	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Indonesian General Insurance Association	*Understanding Reinsurance*	30 Agustus 2023 August 30, 2023
119	Solusi Pro Medika	*Basic Knowledge* of *Health* Insurance	10-11 Agustus 2023 August 10-11, 2023
120	IFG Corporate University bekerja sama dengan JBI dan LSPMR IFG Corporate University collaborates with JBI and LSPMR	Pelatihan *Risk Management in Insurance Industry* Risk Management Training in Insurance Industry	21-22 Agustus 2023 August 21-22, 2023
121	Llyods dan APARI Llyods and APARI	*Rebuilding Confidence and Capacity in Indonesia for Sustainable Growth*	23-24 Agustus 2023 August 23-24, 2023
122	OJK *Institute*	Prakonvensi RSKKNI Bidang Perasuransian RSKKNI Pre-Convention in the Insurance Sector	3 Agustus 2023 August 3, 2023
123	Syakirsula *Institute*	*Executive Overview of Islamic Insurance*	29 Agustus 2023 August 29, 2023
124	Yayasan Pendidikan Internal Auditor	*Workshop Quality Assurance of Internal Audit Function*	07-08 September 2023 September 07-08, 2023
125	London *Corporate Training*	*Innovation and Change Management to Lead Transformations Programmer*	11-15 September 2023 September 11-15, 2023
126	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMP/*Certified Risk Management Professional*) Risk Management Certification Program (CRMP Certified Risk Management Professional)	11-14 September 2023 dan 18 September 2023 September 11-14, 2023 and September 18, 2023
127	CFCD *Foundation*	Training ESG and ISO 26000 "Konsep dan Inisiatif Dalam *Sustainability Business*" ESG and ISO 26000 Training "Concepts and Initiatives in Sustainability Business"	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
128	RAP Indonesia and LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMO/*Certified Management Risk* Officer) Risk Management Certification Program (CRMO Certified Management Risk Officer)	18- 20 September 2023 September 18-20, 2023
129	IFG Corporate University	*Workshop* API M*anagement* API Management Workshop	20 September 2023 September 20, 2023
130	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Indonesian General Insurance Association	PSAK 74 *Training Series*	18-19 September 2023 September 18-19, 2023
131	Kemnaker RI Indonesian Ministry of Manpower	*Workshop* Strategi Penyelesaian Perselisihan Kepentingan Pada Perusahaan BUMN/BUMD *Workshop on Strategies for Resolving Interest Disputes in SOE* *ROE Companies*	13-15 September 2023 September 13-15, 2023
132	P3IP	*Workshop* Ketenagakerjaan Nasional: PHK dan Penetapan Kompensasinya Berdasarkan Putusan Pengadilan, Dasar Hukum Serta *Statement* Umum Para Pihak National Employment Workshop: The Termination of Employment Relationship and the Determination of Compensation Based on Court Decisions, Legal Frameworks, and General Statements of the Parties	20-21 September 2023 September 20-21, 2023
133	OJK *Institute* FSA Institute	Webinar *Internet of Things* Internet of Things Webinar	14 September 2023 September 14, 2023
134	Srikandi BUMN	*Road to Zero* HPV - *Stronger Together with* Srikandi BUMN	15 September 2023 September 15, 2023
135	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)	Pendidikan Sertifikasi AAPAI dan APAI AAPAI and APAI Certification Education	06 Oktober 2023 October 06, 2023
136	IFG Corporate University	Pelatihan *Macroeconomics* 101 Macroeconomics 101 training	11 Oktober 2023 October 11, 2023
137	Asuransi Umum Indonesia Indonesian General Insurance	Pelatihan Bagi Tenaga Pemasar Asuransi Umum Training for General Insurance Marketers	17 Oktober 2023 October 17, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
138	Hukum *Online* Online Law	*Workshop Legal Due Diligence* sebagai Manajemen Risiko Bisnis yang Efektif Legal Due Diligence Workshop as Effective Business Risk Management	24 Oktober 2023 October 24, 2023
139	Kementrian BUMN SOE Ministry	*Workshop* Pengukuran SROI SROI Measurement Workshop	6 Oktober 2023 October 6, 2023
140	LPMK Widya Dharma Artha	*Workshop* Analisis Asuransi Pembangunan Kapal – *Builders' Risks Insurance as per Builders' risks* 1988 *and* MARCAR 2007 Shipbuilding Insurance Analysis Workshop – Builders' Risks Insurance as per Builders' risks 1988 and MARCAR 2007	29 November 2023 November 29, 2023
141	FHCI	*The 4th Indonesia Human Capital Summit* 2023	6-7 November 2023 November 6-7, 2023
142	IFG Corporate University	Program Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara State Loss Calculation Training Program	13-14 November 2023 November 13-14, 2023
143	LSPMR	Webinar "Cara Mudah Mengagregasikan Risiko Organisasi" "Easy Ways to Aggregate Organizational Risks" Webinar	3 November 2023 November 3, 2023
144	IFG Corporate University	*Business English Complete: English for Professionals*	24 November-14 Desember 2023 November 24-December 14, 2023
145	LSPMR dan RAP *Consulting* LSPMR and RAP Consulting	Program Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Program	7-8 dan 10 November 2023 November 7-8 and 10, 2023
146	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuaries Association	*Indonesian Actuaries Congress* 2023 - *Shaping Future Actuaries*	22-25 November 2023 November 22-25, 2023
147	Jasindo bekerja sama dengan CIAS Jasindo collaborates with CIAS	Webinar Inovasi & *Mindset Shifting* – "*Everyone Can Innovate*" Innovation & Mindset Shifting – "Everyone Can Innovate" Webinar	13 November 2023 November 13, 2023
148	Badan Riset dan Inovasi (BRIN)	Pelatihan Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Remote Sensing Technology Training	20-24 November 2023 November 20-24, 2023
149	Pusdiklatwas BPKP	Training Risk Management	28-29 November 2023 November 28-29, 2023
150	KMPlus *Consulting*	*Workshop Community Of Practice* (CoP) Community of Practice (CoP) Workshop	18 - 19 Desember 2023 December 18 – 19, 2023
151	KMPlus *Consulting*	*Workshop Strategic Knowledge Management* Strategic Knowledge Management Workshop	21, 22, 27 Desember 2023 December 21, 22, 27, 2023
152	IFG Corporate University	*Sharing Session* Peserta INVOLVE INVOLVE Participant Sharing Session	18 Desember 2023 December 18, 2023
153	IFG Corporate University	*Sequence Coaching Program I-Reverse* IFG *Corporate University*	20-21 Desember 2023 December 20-21, 2023
154	IFG Corporate University	*Training of Trainer Awareness & Understanding* AKHLAK *Batch* 1 IFG *Corporate University*	18 Desember 2023 December 18, 2023
155	IFG Corporate University	Program *LEAD*-1 *Batch* 2 - Sesi *Leaders Cafe* 1 LEAD-1 Program Batch 2 - Leaders Cafe Session 1	19 Desember 2023 December 19, 2023
156	LPPI	*Sustainable Finance Awareness*	29 Desember 2023, 3 Januari 2024 December 29, 2023, January 3, 2024
157	Toto Alfin Armojo, M.Kom Defender Nusa Semesta	Sosialisasi IT *Security Awareness* IT Security Awareness Socialization	29 Desember 2023 December 29, 2023
158	AAUI	HR *Networking* 2023	7-9 Desember 2023 December 7-9, 2023

No	Penyelenggara Organizer	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
159	LSPMR	Konferensi Nasional Profesi Manajemen Risiko IX-2023 "*Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges*" National Risk Management Professional Conference IX-2023 "Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges:	14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023
160	YPIA	Seminar Nasional Internal Audit: *Trusted Advisor*: *Navigating The New Frontier* dan Wisuda QIA National Internal Audit Seminar: Trusted Advisor: Navigating The New Frontier and QIA Graduation	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023
161	Markplus	Markplus *Conference* 2024	13 January 2023 January 13, 2023
162	RAP Indonesia & LSPMR	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMO/*Certified Risk Management Officer*) Risk Management Certification Program (CRMO/ Certified Risk Management Officer)	18-20 Desember 2023 December 18-20, 2023
163	IFG Corporate University	*Program Female - Phase Engage dan Phase Equip - Chapter* 2 Female Program - Engage Phase and Equip Phase - Chapter 2	4-5 Desember 2023 December 4-5, 2023

INTERNALISASI BUDAYA

Sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, Asuransi Jasindo menetapkan nilai nilai utama AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai budaya Perusahaan. Setiap nilai-nilai utama AKHLAK mewakili perilaku luhur yang wajib untuk diterapkan semua insan BUMN Indonesia, termasuk semua karyawan Asuransi Jasindo di dalam kehidupan profesional sehari-hari.

Internalisasi Budaya AKHLAK pada Tahun 2023 dilaksanakan mengacu pada AKHLAK *Culture Journey* dan Aspirasi Pemegang Saham Seri B serta *Roadmap* Internalisasi Budaya Asuransi Jasindo di mana masuk ke dalam tahap Pemanfaatan dan Penguatan Berkelanjutan.

Program Budaya AKHLAK Tahun 2023 mengusung tema "Jasindo *Rebound*" di antaranya:

1. **Program yang dilaksanakan Unit Kerja dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit (*Change Leader*) dan Transformer (*Change Agent*)**
   - *Together We Care*
     Team Sharing yang dikemas dalam berbagai aktivitas yang menarik dengan tujuan meningkatkan keterikatan dalam unit kerja, *improve knowledge* serta *review kinerja*.
   - *Performance Board*
     Unit kerja diminta untuk membuat visualisasi target kerja sekreatif mungkin yang digambarkan dalam media digital dan dilakukan *monitoring* rutin setiap bulannya
   - AKHLAK *Competition*
     Lomba membuat *tagline* AKHLAK dan video AKHLAK per masing-masing unit kerja

CULTURAL INTERNALIZATION

In accordance with the Circular Letter of the Minister of BUMN Number SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, Asuransi Jasindo establishes the main values of AKHLAK (Amanah/Trustworthy, Kompeten/Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Kolaboratif/Collaborative) as the Company's culture. Each of AKHLAK's main values represents noble behaviour that must be implemented by all Indonesian BUMN personnel, including all Asuransi Jasindo employees, in their daily professional lives.

AKHLAK Culture Internalization in 2023 will be carried out referring to the AKHLAK Culture Journey and Series B Shareholder Aspirations as well as the Asuransi Jasindo Culture Internalization Roadmap which is entering the Sustainable Utilization and Reinforcing stage.

The 2023 AKHLAK Cultural Program carries the theme "Jasindo Rebound" including:

1. **The program implemented by the Work Unit is coordinated by the Unit Leader (Change Leader) and Transformer (Change Agent)**
   - Together We Care
     Team Sharing is packaged in various interesting activities with the aim of increasing engagement in work units, improving knowledge, and reviewing performance.
   - Performance Board
     The work unit is asked to create visualizations of work targets as creative as possible depicted in digital media and carry out routine monitoring every month
   - AKHLAK Competition
     Competition to create AKHLAK taglines and AKHLAK videos for each work unit

2. **Program yang dilaksanakan *Group Human Capital* selaku Tim Pengelola Budaya**
   - *Knowledge Sharing*
     Merupakan Program *Sharing Session* terkait fungsi-fungsi di perusahaan yang akan diisi oleh *Subject Matter Expert* (SME) Asuransi Jasindo dan juga pembicara eksternal dalam rangka *update knowledge* bagi seluruh karyawan
   - *Care About Culture*
     Unit kerja mengikuti sesi konsultasi/*coaching* atas implementasi program AKHLAK dengan tingkat implementasi ≤ 70% dan dirasa masih kurang efektif berjalan pada tahun-tahun sebelumnya
   - *Innovation Time*
     Pelaksanaan *sharing session* kepada seluruh karyawan Asuransi Jasindo terkait Inovasi dengan tujuan untuk dapat menstimulus *innovation mindset*.
   - *Leaders Open Mic*
     Leaders selevel BOD/BOD-1 melakukan *sharing* pengalaman pribadi/pekerjaan yang dikaitkan dengan *core values* AKHLAK.

   - AKHLAK *Booster & Evaluation*
     a. *Culture Monitoring System*
        Sistem *Monitoring* Pelaksanaan Implementasi Budaya pada seluruh unit kerja.
     b. CA Ngobras
        Media diskusi bagi *Transformers* (*Change Agent*) dan *Group* SDM terkait perannya sebagai *Change Agent* untuk saling memotivasi serta memberikan masukan bagi pelaksanaan Program Implementasi Budaya AKHLAK kedepannya.
     c. *Change Leaders Refreshment Training*
        Program Pelatihan yang akan diberikan kepada *Change Leaders* dalam rangka *refreshment* dan *update* pengetahuan bagaimana menjadi *Role Model* dalam mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK dengan baik.
     d. Cecar AKHLAK
        Kuis-kuis dan *games* terkait *event* dikaitkan dengan AKHLAK.
     e. Penilaian KBI
        Penilaian KBI (*Key Behaviour Indicator*) dengan *key behaviour* AKHLAK yang menjadi bagian dari *performance management* karyawan, di mana bobot KBI adalah 20% dan KPI 80%.
     f. AKHLAK *Award* 2022
        Evaluasi atas pelaksanaan Program AKHLAK tahun 2021 dan penilaian unit terbaik dalam mengimplementasikan AKHLAK melalui Program AKHLAK *Award* tahun 2022.

2. **Program implemented by the Human Capital Group as the Cultural Management Team**
   - Knowledge Sharing
     This is a Sharing Session Program related to functions in the company which will be filled by Asuransi Jasindo's Subject Matter Expert (SME) and also external speakers in order to update knowledge for all employees
   - Care About Culture
     The work unit took part in consultation/coaching sessions regarding the implementation of the AKHLAK program with an implementation level of ≤ 70% and was felt to have been less effective in previous years.
   - Innovation Time
     The implementation of a sharing session with all Asuransi Jasindo employees regarding innovation with the aim of stimulating an innovation mindset.
   - Leaders Open Mic
     Leaders at BOD/BOD-1 level share personal/work experiences that are linked to the AKHLAK core values.

   - AKHLAK Booster & Evaluation
     a. Culture Monitoring System
        Culture Implementation Monitoring System in all work units.
     b. CA Ngobras
        Discussion media for Transformers (Change Agent) and HR Group regarding their role as Change Agent to motivate each other and provide input for the future implementation of the AKHLAK Culture Implementation Program.
     c. Change Leaders Refreshment Training
        Training Program that will be given to Change Leaders in the context of refreshing and updating knowledge on how to become a Role Model in implementing AKHLAK values well.

     d. Cecar AKHLAK
        Quizzes and games related to events are linked to AKHLAK.
     e. KBI Assessment
        KBI (Key Behavior Indicator) assessment with AKHLAK key behavior which is part of employee's performance management, in which the KBI weight is 20% and KPI 80%.
     f. AKHLAK Award 2022
        The evaluation of the implementation of the AKHLAK Program in 2021 and the assessment of the best unit in implementing AKHLAK through the AKHLAK Award Program in 2022.

Diharapkan dengan pelaksanaan program Implementasi Budaya AKHLAK 2023, nilai-nilai AKHLAK semakin kuat tertanam didalam diri seluruh Insan Jasindo serta bersama-sama bangkit mendukung peningkatan kinerja Asuransi Jasindo serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

It is hoped that with the implementation of the 2023 AKHLAK Culture Implementation program, AKHLAK values will become more firmly ingrained in all Insan Jasindo and together they will rise up to support Asuransi Jasindo's performance improvement and provide maximum contribution to the company.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Perusahaan senantiasa melaksanakan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan SDM unggul yang produktif dan berdaya saing. Salah satu bentuk strategi pengembangan talenta berupa upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan yang sejalan dengan kebutuhan dan tujuan Perusahaan, menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan atau keahliannya guna meningkatkan produktivitas Perusahaan, serta identifikasi *talent pool* untuk suksesi karyawan dengan kompetensi khusus yang mendukung kinerja Perusahaan dan pemenuhan posisi struktural. Berikut ini merupakan beberapa inisiatif dalam mendukung hal dimaksud:

1. Program Penyelarasan kebijakan pengelolaan SDM dengan *Holding*.
2. Pemenuhan sertifikasi tenaga ahli sesuai dengan peraturan regulator dan pemenuhan kompetensi pendukung lainnya.
3. Peningkatan produktivitas melalui pemenuhan SDM yang kompeten, pelaksanaan *talent management* dan *talent mobility*.
4. *Training* yang terstruktur untuk *hard skill*, *soft skill* dan *leadership* yang dilaksanakan baik secara mandiri oleh Perusahaan (Akademi) maupun secara berkoordinasi dengan IFG *Corporate University* (secara digital platform belajar.ifg.id ataupun metode belajar lainnya) sesuai tata kelola peran dan pengelolaan *Corporate University* pada level Akademi.
5. Peningkatan utilisasi *Human Resources Management System* (HRIS).

FUTURE HR DEVELOPMENT PLAN

The Company consistently undertakes efforts to develop Human Resources (HR) to create superior human resources that are productive and competitive. One form of talent development strategy involves efforts to enhance and develop employee competency in line with the Company's needs and objectives, placing employees according to their abilities or expertise to increase the Company's productivity, as well as identifying talent pools for employee succession with special competencies that support the Company's performance and the fulfilment of structural positions. The following are several initiatives to support this :

1. Alignment Program for HR management policies with Holding.
2. The fulfilment of expert certification in accordance with regulatory regulations and the fulfilment of other supporting competencies.
3. Increasing productivity through providing competent human resources, implementing talent management and talent mobility.
4. Structured training for hard skills, soft skills, and leadership which is carried out both independently by the Company (Academy) and in coordination with IFG Corporate University (digitally on the learn.ifg.id platform or other learning methods) in accordance with the role and management governance of Corporate University at the Academic level.
5. The increased utilization of the Human Resources Management System (HRIS).

Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Information Technology and Digitalization

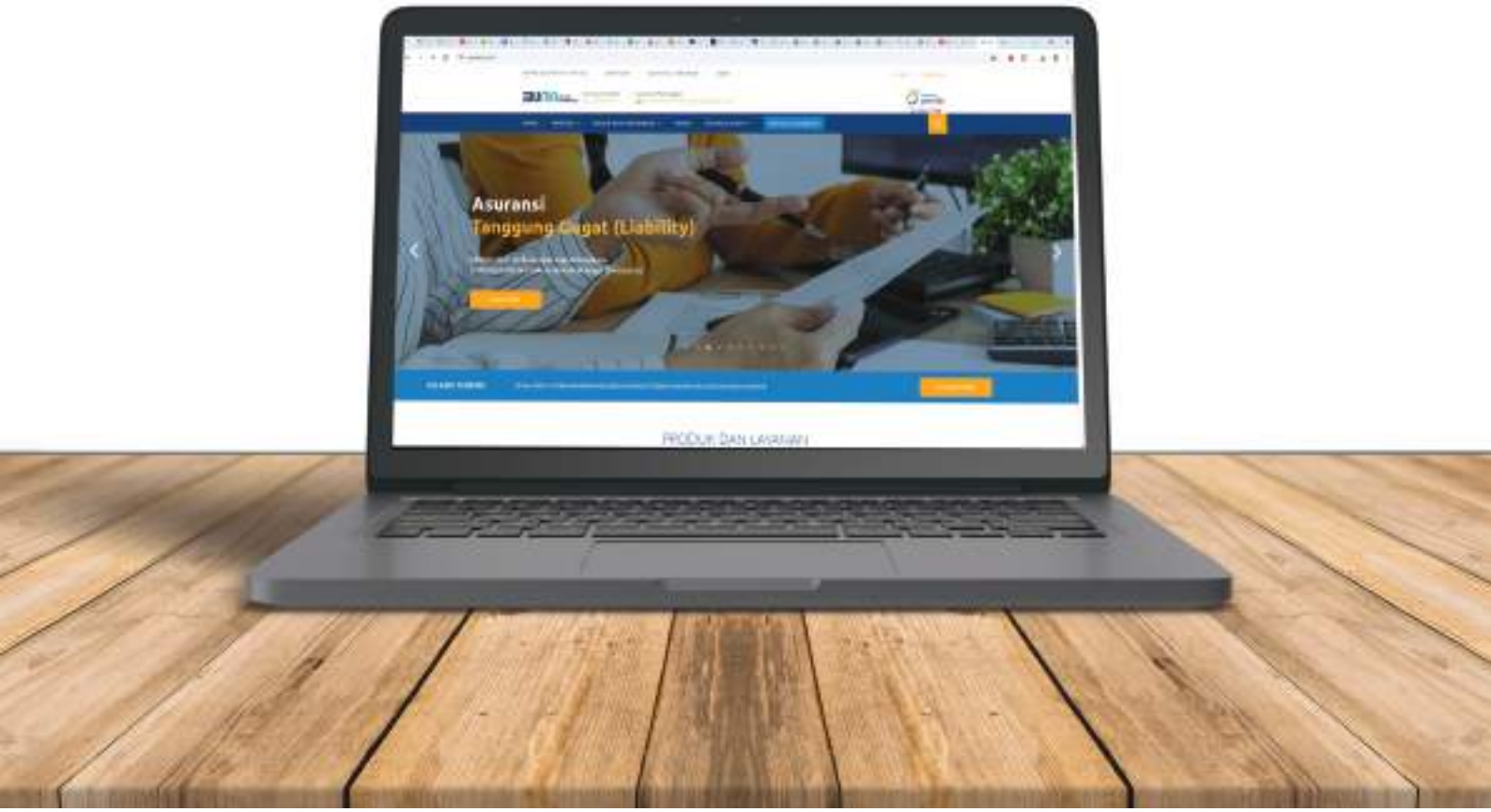

Pengembangan di bidang Teknologi Informasi dilakukan secara jangka panjang sesuai dengan *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) 2019-2023 dalam rangka peningkatan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan/mitra, serta manajemen informasi dengan berfokus pada model operasi yang terstandarisasi. Selain itu, dalam mendukung optimalisasi strategi *corporate retail,* dilakukan pengembangan dengan konsep eksternalisasi sistem. Di samping itu, Asuransi Jasindo juga melakukan implementasi ERP *(Enterprise Resource Planning)* dan laporan keuangan berbasis PSAK74 secara terintegrasi dengan *Holding* IFG.

Development in the field of Information Technology is carried out on a long-term basis in accordance with the 2019-2023 Information Technology Master Plan or Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) in the context of improving operational efficiency, customer / partner experience, and information management by focusing on a standardized operating model. Moreover, to support the optimization of corporate retail strategy, development has been carried out with the concept of system externalization. Furthermore, Asuransi Jasindo also implemented ERP (Enterprise Resource Planning) and financial statements based on PSAK74 in an integrated manner with IFG Holding.

ORGANISASI PENGELOLA TI

Penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi serta digitalisasi di Perusahaan dilakukan oleh *Group* Teknologi Informasi yang berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan dan Investasi. *Group* Teknologi Informasi terdiri 4 (empat) unit dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu Unit Perencanaan dan Arsitektur TI, Unit Kebijakan dan Prosedur TI, Unit Solusi Bisnis TI dan Unit Operasional TI. Selain itu, juga terdapat fungsi Sekuriti TI yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data dan informasi.

IT MANAGEMENT ORGANIZATION

Responsibility for the management and development of information technology and digitalization in the Company is carried out by the Information Technology Group which is under the supervision of the Director of Finance and Investment. The Information Technology Group consists of 4 (four) units with their respective duties and responsibilities, but which are interconnected with each other, i.e., the IT Planning and Architecture Unit, the IT Policy and Procedures Unit, the IT Business Solutions Unit, and the IT Operations Unit. Additionally, there is also an IT Security function which is responsible for ensuring data and information security.

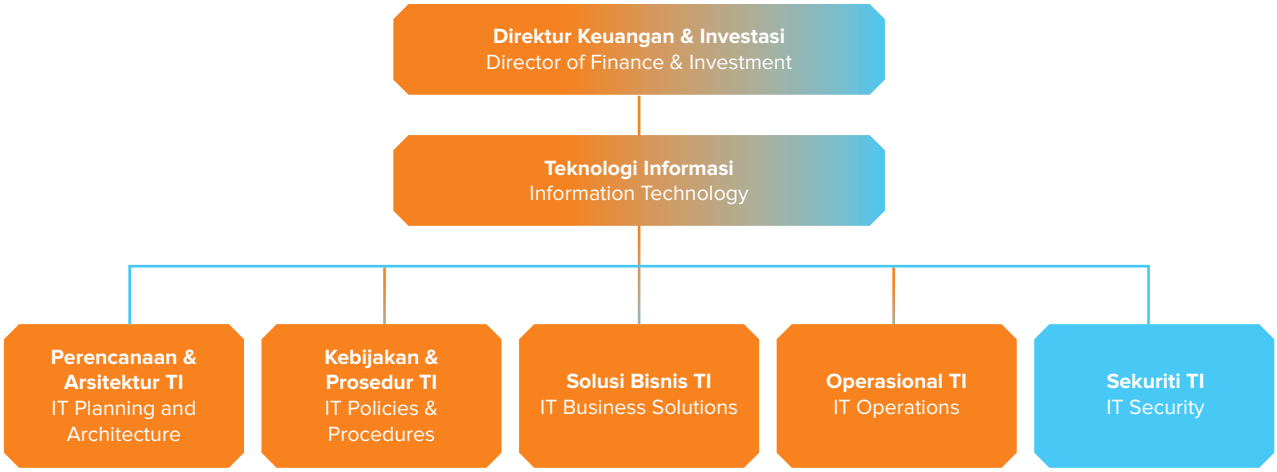

Unit Perencanaan & Arsitektur TI

Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan arsitektur perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan Visi Misi, Rencana Jangka Panjang, arahan manajemen, serta strategi bisnis Perusahaan. Unit ini juga menyusun dan meninjau kebutuhan teknologi informasi dari unit bisnis, melakukan kajian pengembangan teknologi informasi ke depan, melakukan pemantauan pelaksanaannya, serta melakukan evaluasi atas implementasi inisiatif teknologi informasi.

IT Planning & Architecture Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing activities that include of preparing the Information Technology Strategic Plan and the company's architecture to ensure alignment with the Company's Vision and Mission, Long Term Plan, management direction, and business strategy. This unit also prepares and reviews the information technology needs of business units, conducts studies on future information technology development, monitors its implementation, and evaluates the implementation of information technology initiatives.

Unit Kebijakan dan Prosedur TI

Bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan seperti penyusunan dan perbaikan kebijakan, prosedur, dan implementasi agar sesuai dengan standar tata kelola Teknologi Informasi dan standar pelayanan serta keamanan informasi berbasis ISO. Setiap implementasi dinilai secara berkala melalui penilaian maturitas, audit internal, dan audit eksternal.

IT Policy and Procedure Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing activities such as preparing and improving policies, procedures, and implementation to comply with Information Technology governance standards and ISO-based information security and service standards. Each implementation is assessed periodically through maturity assessments, internal audits, and external audits.

Unit Solusi Bisnis TI

Bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengembangan aplikasi TI sesuai dengan kebutuhan pengguna, perkembangan operasional, dan pertumbuhan perusahaan. Metodologi pengembangan aplikasi mengikuti pendekatan *Software Development Life Cycle* secara *waterfall* dan *agile*, disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi serta kesiapan sumber daya. Pengembangan aplikasi dilakukan secara *end to end*, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan implementasi, dengan perhatian khusus pada efektivitas, fungsionalitas, integrasi, dan keamanan.

IT Business Solutions Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing IT application development in accordance with user needs, operational developments, and company's growth. The application development methodology follows the waterfall and agile Software Development Life Cycle approach, adjusted to application needs and resource readiness. Application development is carried out end to end, from requirements analysis to testing and implementation, with special attention to effectiveness, functionality, integration, and security.

Unit Operasional TI

Bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan operasional teknologi informasi untuk memastikan kelancaran operasional aplikasi dan infrastruktur Perusahaan, termasuk pemeliharaan *data center* dan *data recovery center*, serta ketersediaan jaringan privat dan internet.

IT Operations Unit

Responsible for planning, coordinating, and implementing information technology operations to ensure the smooth operation of the Company's applications and infrastructure, including maintenance of the data centre and data recovery centre, as well as the availability of private networks and the internet.

Fungsi Sekuriti TI

Bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan keamanan operasional untuk melindungi aset Teknologi Informasi Asuransi Jasindo dari berbagai ancaman siber.

IT Security Function

Responsible for planning, coordinating, and implementing operational security activities to protect Asuransi Jasindo's Information Technology assets from various cyber threats.

Program Kerja Group TI Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan rangkaian program kerja bidang Teknologi Informasi, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang utama, yaitu aplikasi, infrastruktur, dan tata kelola, sebagai berikut:

IT Group Work Program for 2023

In 2023, the Company has implemented a series of work programs in the field of Information Technology, which are divided into 3 (three) main areas, i.e., applications, infrastructure, and governance, as follows:

Kelompok Group	Program Kerja Work Program
Pengembangan Aplikasi Development of Applications	**Implementasi PSAK 74** **The Implementation of PSAK 74** Pengembangan modul-modul pada aplikasi Utama Star Jasindo terkait dengan kebutuhan *granularity* data untuk PSAK74 The development of modules in the Utama Star Jasindo application related to data granularity requirements for PSAK74 **Implementasi Aplikasi Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)** **The Implementation of the Anti-Money Laundering Prevention of Terrorism Financing or Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Application** Implementasi aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi nasabah yang ada kemungkinan terkait/*suspect* dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme Implementation of an application used to detect customers who may be related/suspect of money laundering and terrorism financing **Implementasi *Robotic Process Automation* (RPA)** **The Implementation of Robotic Process Automation (RPA)** Merupakan pengembangan dari proses RPA tahun sebelumnya, dengan melakukan perubahan-perubahan parameter dengan tujuan untuk percepatan layanan dalam penerbitan polis This is a development of the previous year's RPA process, by making parameter changes with the aim of accelerating services in policy issuance **Pengembangan Sistem *Virtual Account*** **The Development of Virtual Account System** Aplikasi ini dipergunakan untuk transaksi *cash-in* dan *cash-out* di Perusahaan. Melengkapi *channel* sebelumnya, yaitu dengan Bank Mandiri dan Bank BRI, pada tahun 2023 dilakukan pengembangan dengan melakukan kerja sama dengan Bank BNI This application is used for cash-in and cash-out transactions at the Company. Complementing the previous channels, i.e., with Bank Mandiri and Bank BRI, in 2023 development will be carried out by collaborating with Bank BNI

Kelompok Group	Program Kerja Work Program
	Implementasi Aplikasi E-Marine **The Implementation of the E-Marine Application** Aplikasi ini dipergunakan untuk melakukan proses penutupan bisnis *Marine Cargo* dan terintegrasi dengan Aplikasi Utama Star Jasindo. Pada tahun 2023 dilakukan implementasi dengan tertanggung PT Antam, PT Semen Tonasa, PT Sungai Budi, PT Dahana dan Broker Asuransi KPN This application is used to carry out the process of closing the Marine Cargo business and is integrated with the Star Jasindo Main Application. In 2023, implementation will be carried out with the insured PT Antam, PT Semen Tonasa, PT Sungai Budi, PT Dahana, and KPN Insurance Brokers **Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP)** **The Development of Agricultural Insurance Information System Application or Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP)** Aplikasi ini dipergunakan untuk melakukan penutupan bisnis Asuransi Usaha Tani Padi sesuai pedoman umum 2023 yang terintegrasi dengan Aplikasi Utama Star Jasindo. This application is used to close the Rice Farming Insurance business according to the 2023 general guidelines which are integrated with the Star Jasindo Main Application. **Implementasi Aplikasi CRM** **The Implementation of CRM Application** Aplikasi ini dipergunakan untuk pencatatan aktivitas pemasaran yang terintegrasi dengan Aplikasi Utama Star Jasindo, dari proses *lead* sampai dengan *closing.* This application is used to record marketing activities that are integrated with the Star Jasindo Main Application, from the lead process to closing. **Pengembangan Aplikasi Utama Star Jasindo** **The Development of Star Jasindo Main Application** • Modul Akseptasi | Acceptance Module Perubahan *workflow approval* sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dalam melakukan penerbitan polis, standarisasi penyematan klausula, dan pembuatan polis *tailor made*. Changes to the approval workflow are related to changes in organizational structure in issuing policies, standardizing clause embeddings, and creating tailor made policies. • Modul Klaim | Claims Module Perubahan *workflow approval* sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dalam penyelesaian klaim, simplifikasi, integrasi dengan modul reasuransi, dan penambahan fitur *history* perubahan klaim. Changes to the approval workflow in connection with changes to the organizational structure in claims settlement, simplification, integration with the reinsurance module, and the addition of a claim change history feature. • Modul Keuangan | Financial Module Penambahan fitur otomasi validasi dan pengelompokan dalam proses pembayaran, pengembangan terkait perubahan kurs, dan integrasi dengan aplikasi Tarra e-Faktur. Added validation and grouping automation features in the payment process, developments related to exchange rate changes, and integration with the Tarra e-Faktur application. • *Enhancement* terkait Pajak | Enhancement related to Tax Penyesuaian formula sesuai Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan SE.08/AKP/VI/2022 tentang Pengukuhan Jasindo sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu juga dilakukan integrasi dengan aplikasi Tarra e-Faktur. The adjustment of the formula in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Tax Harmonization and SE.08/AKP/VI/2022 concerning the Confirmation of Jasindo as a Taxable Entrepreneur or Pengusaha Kena Pajak (PKP). Moreover, integration is also carried out with the Tarra e-Faktur application.
Infrastruktur Infrastructure	***Maintenance Hardware*, *Software*, dan *Support*** **Maintenance Hardware, Software, and Support** Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin perangkat keras *(hardware)* dan perangkat lunak *(software)* yang digunakan dalam lingkungan Perusahaan. Selain itu, juga mencakup pelayanan dukungan *(support)* untuk memastikan keandalan dan ketersediaan sistem serta aplikasi yang digunakan oleh para pengguna. This activity includes the routine maintenance of hardware and software used within the Company. Moreover, it also includes support services to ensure the reliability and availability of the systems and applications used by users. ***Colocation Data Center* dan *Data Recovery Center*** **Colocation Data Center and Data Recovery Center** Perusahaan menjaga ketersediaan layanan *Colocation Data Center* dan *Data Recovery Center* untuk menempatkan server, penyimpanan data, dan perangkat komputasi lainnya. Layanan ini penting untuk menjaga keandalan dan ketersediaan infrastruktur TI serta melakukan pemulihan data dalam situasi darurat The company maintains the availability of Colocation Data Center and Data Recovery Center services to place servers, data storage, and other computing devices. This service is important for maintaining the reliability and availability of IT infrastructure as well as performing data recovery in emergency situations

Kelompok Group	Program Kerja Work Program
	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi LAN/WAN **The Maintenance of LAN / WAN Communication Networks** Pemeliharaan jaringan komunikasi lokal *(LAN)* dan luas *(WAN)* dilakukan untuk memastikan konektivitas yang stabil dan cepat antara berbagai lokasi kantor Perusahaan. Hal ini mencakup pemantauan kinerja jaringan, penanganan gangguan, dan peningkatan kapasitas jaringan sesuai kebutuhan. The maintenance of local area (LAN) and wide area (WAN) communication networks is carried out to ensure stable and fast connectivity between various Company's office locations. This includes monitoring network performance, handling disruptions, and increasing network capacity as needed. **Pengelolaan Perangkat *Security*** Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan mengelola perangkat-perangkat keamanan seperti *firewall*, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Pengelolaan perangkat *security* meliputi konfigurasi, pemantauan kinerja, dan penanganan insiden keamanan. This activity aims to improve information security by managing security devices such as firewalls, antivirus, and intrusion detection systems. Security device management includes configuration, performance monitoring, and handling security incidents. ***Security Operation Center* (SOC)** Layanan SOC bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola sistem informasi, jaringan, dan data Perusahaan. Tim SOC fokus pada pendeteksian, analisis, dan respons terhadap insiden keamanan, serta melaksanakan kegiatan seperti *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan. SOC Services is responsible for monitoring and managing the Company's information systems, networks, and data. The SOC team focuses on detecting, analysing, and responding to security incidents, as well as carrying out activities such as Vulnerability Assessment and Penetration Testing to identify and address security vulnerabilities.
Tata Kelola TI IT Governance	***Upgrade* dan Resertifikasi ISO 27001:2022** **ISO 27001:2022 Upgrade and Recertification** Melaksanakan resertifikasi atas implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis ISO 27001 serta melakukan penyesuaian versi ISO 27001 dari ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022. Resertifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi standar keamanan informasi yang berlaku. To carry out the recertification of the implementation of the ISO 27001-based Information Security Management System or Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) and adjust the ISO 27001 version from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022. This recertification is necessary to ensure that the company remains compliant with the applicable information security standards. ***Assessment IT Maturity*** Melaksanakan *self assessment IT Maturity* berdasarkan COBIT 2019 untuk mengevaluasi tingkat kematangan TI Perusahaan. Fokus area yang dinilai mencakup 24 proses dengan penekanan pada area manajemen risiko TI. To carry out an IT Maturity self-assessment based on COBIT 2019 to evaluate the Company's IT maturity level. The focus areas assessed include 24 processes with an emphasis on the IT risk management area. ***IT Service Management* (ISO 20000)** Melaksanakan implementasi IT *Service Management* berbasis ISO 20000-1:2018 bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan TI kepada pengguna. Ini melibatkan standarisasi proses pengelolaan layanan TI, pemantauan kualitas layanan, dan diverifikasi melalui *audit surveillance* untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO. Implementing IT Service Management based on ISO 20000-1:2018 aims to improve the performance of IT services to users. This involves standardizing IT service management processes, monitoring service quality, and being verified through surveillance audits to ensure compliance with ISO standards.

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Asuransi Jasindo saat ini telah mempunyai *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) untuk periode tahun 2019-2023 yang dijadikan sebagai pedoman pengembangan Teknologi Informasi dengan menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan Teknologi Informasi selama 5 tahun. Guna menyelaraskan dengan tujuan bisnis, *Group* Teknologi Informasi Asuransi Jasindo memiliki visi "Menjadi *Reliable Business Partner* dan Memberikan Nilai Tambah bagi Bisnis melalui Penyediaan, Peningkatan, Pemanfaatan, dan Inovasi Layanan TI". Realisasi visi tersebut didukung oleh 3 misi utama yaitu:

- Mengadopsi teknologi digital industri asuransi;
- Memberikan layanan TI yang cepat, akurat, efisien, dan aman;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Asuransi Jasindo mengartikannya ke dalam 9 (sembilan) sasaran strategis TI melalui *IT Balanced Scorecard* yang memiliki 4 (empat) perspektif (*Business Contribution, User Orientation, Operational Excellence*, dan *Future Orientation*).

Berikut adalah kesembilan sasaran strategis tersebut:

INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN

Asuransi Jasindo currently has an Information Technology Master Plan or Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) for the 2019-2023 period which serves as a guideline for developing Information Technology by aligning business objectives with Information Technology objectives for 5 years. In order to align with business goals, the Asuransi Jasindo Information Technology Group has the vision of "Being a Reliable Business Partner and Providing Added Value to Business through Providing, Improving, Utilizing, and Innovating IT Services". The realization of this vision is supported by 3 main missions, which are :

- To adopt insurance industry digital technology;
- To provide fast, accurate, efficient, and secure IT services;
- To increase the effectiveness and efficiency of business processes.

To realize this vision and mission, Asuransi Jasindo defines it into 9 (nine) IT strategic targets through the IT Balanced Scorecard which has 4 (four) perspectives (Business Contribution, User Orientation, Operational Excellence, and Future Orientation).

The following are the nine strategic targets:

Business Contribution	• Digitalisasi • Digitalization
User Orientation	• Cepat, Akurat, Responsif • Penyediaan Layanan TI Strategis • Integrasi Proses Bisnis • Fast, Accurate, Responsive • The Provision of Strategic IT Services • Business Process Integration
Operational Excellence	• Peningkatan *Awareness* Pemanfaatan Layanan TI • Penguatan Infrastruktur & Keamanan TI • Peningkatan dan Tata Kelola Layanan TI • Increasing the Awareness of IT Service Utilization • Reinforcing IT Infrastructure & Security • IT Service Improvement and Governance
Future Orientation	• Peningkatan Kompetensi SDM & Budaya Teknologi • Pemanfaatan tren teknologi di industri asuransi • Increasing HR Competency & Technology Culture • The utilization of technology trends in the insurance industry

Berikut adalah realisasi program strategis TI untuk tahun 2023:

1. Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *engine* PSAK 74
   Sehubungan dengan dilakukannya implementasi ERP & PSAK74 terintegrasi, maka Perusahaan melakukan pengembangan Aplikasi Utama Star Jasindo dan melakukan integrasi dengan *Holding* IFG sesuai dengan tahapan dan *timeline* yang telah disepakati.
2. Pengembangan Aplikasi
   Melakukan pengembangan aplikasi dalam rangka *reengineering* proses bisnis yang ada, terutama untuk melanjutkan proses sentralisasi, simplifikasi dan percepatan layanan kepada semua *stakeholder*.

The following is the realization of the IT strategic program for 2023:

1. The Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) and PSAK 74 engine
   In connection with the implementation of integrated ERP & PSAK74, the Company developed the Star Jasindo Main Application and integrated it with IFG Holding in accordance with the agreed stages and timeline.
2. The Development of Application
   To carry out application development in the context of reengineering existing business processes, especially to continue the process of centralization, simplification, and acceleration of services to all stakeholders.

3. *Renewal Hardware*, *Software* dan *Support*
   Merupakan kegiatan rutin dalam *Group* Teknologi Informasi yang mendukung ketersediaan infrastruktur sistem/aplikasi, seperti perpanjangan lisensi, pemeliharaan perangkat keras, dan layanan dukungan lainnya.
4. Sistem *Planning* dan *Budgeting*
   Melaksanakan pengadaan dan pengembangan sistem informasi untuk penyediaan aplikasi *planning* dan *budgeting* serta *performance dashboard* manajemen.

5. Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi
   Melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola teknologi informasi dengan menyusun *master plan* Teknologi Informasi, melakukan *self assessment* atas penerapan tata kelola teknologi informasi *based on* COBIT 2019 di tahun 2023 serta tetap melaksanakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi dan sistem manajemen layanan teknologi informasi berdasarkan *best practice* ISO 27001 dan ISO 20000.

KEAMANAN SIBER DAN RENCANA PEMULIHAN BENCANA

Untuk meningkatkan keamanan siber, pada tahun 2023, Asuransi Jasindo telah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Kebijakan Keamanan Informasi berbasis ISO/IEC 27001:2022
   Menetapkan kebijakan ini untuk standarisasi sistem manajemen keamanan informasi, keamanan siber, dan pelindungan privasi. Kebijakan ini dievaluasi oleh auditor lembaga sertifikasi, dan perusahaan memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 pada bulan November 2023.
2. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)
   Perusahaan telah menetapkan pembentukan tim ini untuk menangani insiden keamanan siber, termasuk koordinasi dengan *Holding* IFG, pihak ketiga, dan pelaporan kepada regulator.
3. Prosedur Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan*
   Telah ditetapkan untuk menjaga kelangsungan layanan Teknologi Informasi saat terjadi bencana, serta rencana pemulihan. Penerapan *Disaster Recovery Plan* diuji setiap tahun melalui kegiatan *drilling test* dari *Data Center* ke *Disaster Recovery Center* serta *exercise* pelaksanaan *Disaster Recovery Plan*.

3. Renewal of Hardware, Software, and Support
   It is a routine activity in the Information Technology Group that supports the availability of system / application infrastructure, such as license renewal, hardware maintenance, and other support services.

4. Planning and Budgeting System
   To carry out the procurement and development of information systems to provide planning and budgeting applications as well as performance management dashboards.
5. Improved Information Technology Governance
   To carry out improvements and improvements in information technology governance by preparing an Information Technology master plan, conducting a self-assessment on the implementation of information technology governance based on COBIT 2019 in 2023 and continuing to implement the information security management system and information technology service management system based on ISO 27001 best practice and ISO 20000.

CYBER SECURITY AND DISASTER RECOVERY PLANNING

To improve cyber security, in 2023, Asuransi Jasindo has taken the following steps:

1. Information Security Policy based on ISO/IEC 27001:2022

   To establish this policy to standardize information security management systems, cyber security, and privacy protection. This policy was evaluated by certification body auditors, and the company obtained ISO/IEC 27001:2022 certification in November 2023.

2. The Establishment of a Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
   The company has determined the formation of this team to handle cyber security incidents, including coordination with IFG Holding, third parties, and reporting to regulators.

3. Procedures for Implementing the Disaster Recovery Plan
   It has been established to maintain continuity of Information Technology services when a disaster occurs, as well as recovery plans. The implementation of the Disaster Recovery Plan is tested every year through drilling test activities from the Data Centre to the Disaster Recovery Centre as well as exercises to implement the Disaster Recovery Plan.

TATA KELOLA TI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi wajib melaksanakan Tata Kelola TI. Untuk itu, penerapan Tata Kelola TI di Asuransi Jasindo disusun dengan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen
2. Prinsip Organisasi
3. Prinsip Data dan Informasi
4. Prinsip Aplikasi
5. Prinsip Teknologi
6. Prinsip Keamanan Informasi

Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui kebijakan yang berlaku untuk semua proses dan kegiatan Tata Kelola Teknologi Informasi di Asuransi Jasindo.

Pada tahun 2023, sesuai arahan *Holding*, proses evaluasi dan penilaian tingkat kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi dilaksanakan melalui kegiatan *self assessment* antara *Group* Teknologi Informasi dengan *Group* Satuan Pengawasan Internal. Hasil *score self assessment* atas penerapan tata kelola Teknologi Informasi masih melebihi batas minimal yang ditargetkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selain kegiatan di atas, beberapa penyesuaian juga telah dilaksanakan agar sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, pada tahun 2023, antara lain:

- Perubahan Kebijakan Keamanan Informasi;
- Perubahan susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- Penyusunan Kebijakan baru, yaitu Kebijakan Pelindungan Data Pribadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

IT GOVERNANCE

As regulated in the Minister of BUMN Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Board of Directors is obliged to implement IT Governance. Therefore, the implementation of IT Governance at Asuransi Jasindo is structured to include the following aspects :

1. Management Principles
2. Organizational Principles
3. Data and Information Principles
4. Application Principles
5. Technological Principles
6. Information Security Principles

These principles are implemented through policies that apply to all Information Technology Governance processes and activities at Asuransi Jasindo.

In 2023, in accordance with Holding's direction, the process of evaluating and assessing the maturity level of Information Technology Governance will be carried out through self-assessment activities between the Information Technology Group and the Internal Supervisory Unit Group. The results of the self-assessment score on the implementation of Information Technology governance still exceed the minimum limit targeted by the Ministry of State-Owned Enterprises. Apart from the activities above, several adjustments have also been implemented to comply with the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-2/MBU/03/2023, in 2023, including:

- Changes to Information Security Policy;
- Changes in the structure of the Information Technology Steering Committee members;
- The preparation of a new Policy, i.e., the Personal Data Protection Policy, in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

06

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pencapaian GCG Tahun 2023

GCG Achievements In 2023

Bagi Perseroan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada 03 Maret 2023, Perusahaan melakukan ratifikasi terhadap Peraturan tersebut kedalam Kebijakan Internal Perusahaan.

Disamping melakukan sosialisasi secara berkala terkait penetapan PER-02/MBU/03/2023, Perusahaan juga melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap Kebijakan Internal yang mengatur terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Kerja Sama, Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap, serta terkait dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (karyawan, pelanggan, regulator, mitra kerja/pemasok, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk menunjukan komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan melaksanakan penilaian secara berkala yang dilakukan setelah tahun buku berakhir. Pelaksanaan penilaian Tahun 2023 yang dilakukan oleh Jasa Penilai Independen, saat ini dalam tahap proses penilaian.

For the Company, Good Corporate Governance (GCG) is the principles that underlie the Company's management processes and mechanisms based on compliance with the applicable laws and regulations as well as a reflection of an ethical business world. With the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises on March 03, 2023, the Company ratified this Regulation into the Company's Internal Policy.

Apart from carrying out regular socialization regarding the stipulation of PER-02/MBU/03/2023, the Company also makes further adjustments to the Internal Policies which regulate the Procurement of Goods and Services, Cooperation Guidelines, Write-Off, and Change Hand of Fixed Assets, as well as related to the Assessment of the Company's Health Level.

The company is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in creating sustainable added value for the interests of shareholders, society at large, and various other stakeholders (employees, customers, regulators, work partners / suppliers, etc.) both in the short and long term.

To show commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the Company carries out regular assessments which are carried out after the financial year ends. The 2023 assessment carried out by the Independent Appraisal Service is currently in the assessment process stage.

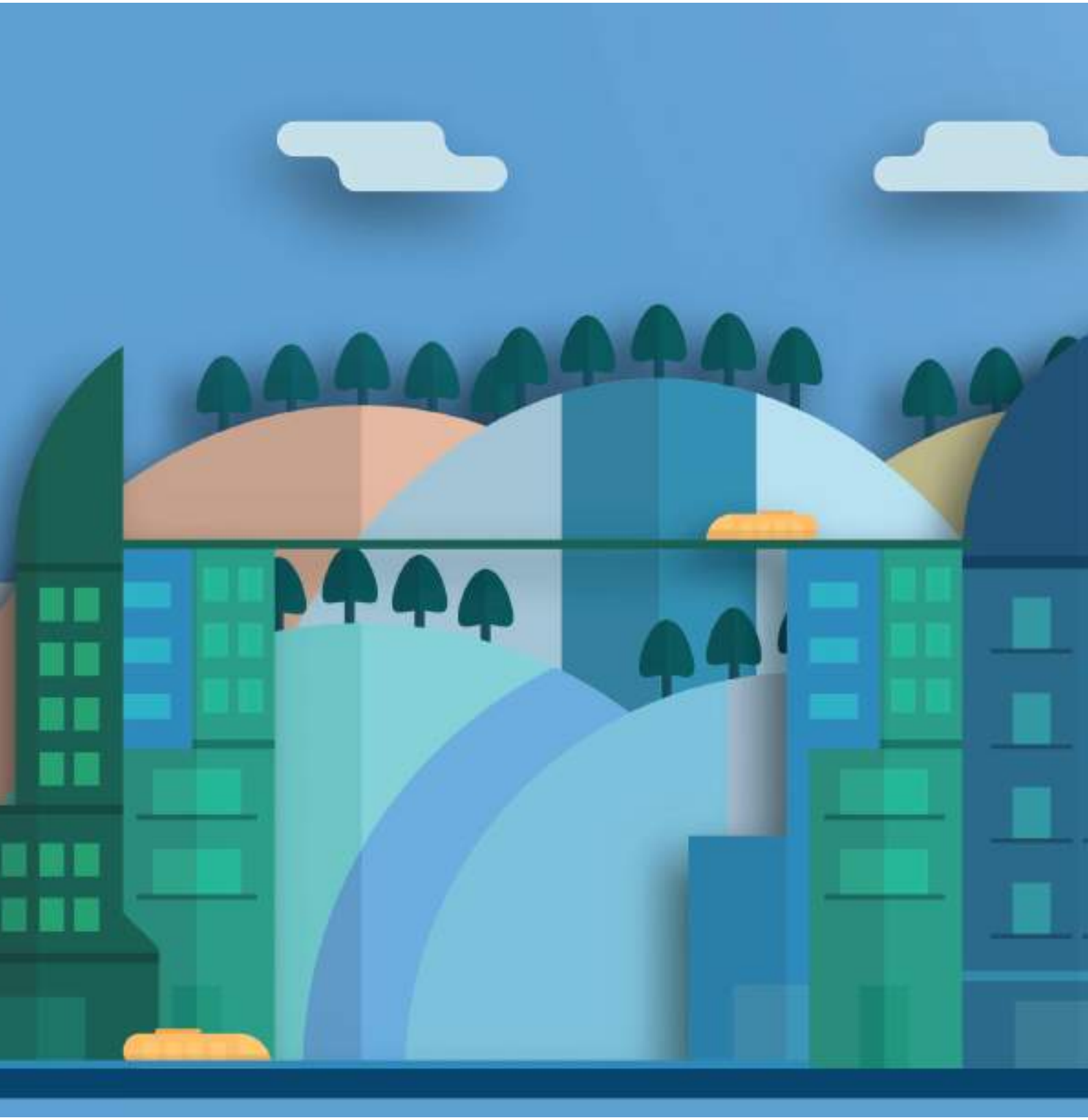

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment To Implementing Corporate Governance

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Asuransi Jasindo. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Asuransi Jasindo meyakini, penerapan GCG menjadi faktor yang sangat penting bagi Perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan bisnis di era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity*, dan *ambiguity*) ini.

Selain itu, bagi Asuransi Jasindo, penerapan GCG juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi pemegang saham namun juga segenap pemangku kepentingan.

Terlebih sebagai perusahaan yang bergerak di industri asuransi yang merupakan kegiatan usaha pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian, Asuransi Jasindo harus dapat memperoleh kepercayaan dari nasabah, mengingat kegiatan asuransi sangat terkait erat dengan pengumpulan dana masyarakat maka pemerintah selaku regulator melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar kepentingan masyarakat terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles has become an inseparable part of Asuransi Jasindo's operational activities. The company is committed to implementing GCG principles consistently and sustainably. Asuransi Jasindo believes that the implementation of GCG is a very important factor for the Company in facing economic and business dynamics in this VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) era.

Moreover, for Asuransi Jasindo, implementing GCG is also a step to increase value and sustainable long-term business growth not only for shareholders but also all stakeholders.

Furthermore, as a company operating in the insurance industry, which is a business activity that covers or protects an object from the threat of danger that could cause loss, Asuransi Jasindo must be able to gain the trust of customers, considering that insurance activities are closely related to collecting public funds, the government as the regulator carries out monitoring and guidance functions so that the interests of the community are protected in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Perusahaan dalam menerapkan tata kelola di lingkungan Perusahaan. Komitmen penerapan GCG ini tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun sebagai praktik yang praktiknya dilandasi oleh kesadaran pentingnya GCG di Perusahaan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Landasan Penerapan GCG

Penerapan GCG di Asuransi Jasindo mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* di Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
8. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-9/MBU/12/2019 tentang Penerapan Etika dan/atau Kepatutan Dalam Rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan tanggal 12 Desember 2019;
9. POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
11. Anggaran Dasar Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia.

Tujuan Penerapan GCG

Implementasi GCG di Perusahaan antara lain bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

To achieve this goal, a real commitment from the Company is needed in implementing governance within the Company. This commitment to implementing GCG is not only a matter of fulfilling applicable regulations but also a practice whose practice is based on awareness of the importance of GCG in the Company to uphold integrity in Ongoing Awaiting a healthy and sustainable business.

Foundation for Implementing GCG

The implementation of GCG at Asuransi Jasindo refers to a number of statutory regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments;
2. The Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning Insurance and its amendments;
3. The Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
4. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
6. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
8. The Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SE-9/MBU/12/2019 concerning the Implementation of Ethics and/or Appropriateness in the Context of Company's Management and Monitoring dated December 12, 2019;
9. POJK No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies;
10. Financial Services Authority Regulation No. 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies;
11. The Articles of Association of PT Asuransi Jasa Indonesia.

The Purpose of Implementing GCG

The Implementation of GCG in the Company aims, among other things, to:

1. Optimize the value of the Company for Stakeholders, especially policyholders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits;

2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif;
5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional;
6. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
7. Mencapai Visi dan Misi Perusahaan;
8. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko Perusahaan secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
9. Mendorong terciptanya budaya kerja Perusahaan ke arah yang lebih baik.

2. Improve Company's management in a professional, transparent, effective, and efficient manner;
3. Increase the compliance of Company;s Organs so that decision making and carrying out actions are based on high ethics, compliance with laws and regulations in the insurance sector, and awareness of the Company's social responsibility towards Stakeholders and environmental sustainability;
4. Create a company that is healthier, more reliable, trustworthy, and competitive;
5. Increase the Company's contribution to the national economy;
6. Improve a conducive climate for the development of national investment;
7. Achieve the Company's Vision and Mission;
8. Encourage and support the development, management of resources, and risk management of the Company in a more prudent, accountable, and responsible manner in line with GCG principles;
9. Encourage the creation of the Company's work culture in a better direction.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Principles of Good Corporate Governance

Transparansi

Prinsip transparansi/keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Transparency

The principle of transparency / openness, i.e., openness in the decision-making process and openness in disclosing and providing relevant information about the company, which is easily accessible to Stakeholders in accordance with statutory regulations as well as standards, principles and practices of healthy business operations.

Keterbukaan informasi tersebut meliputi pengungkapan kinerja Perusahaan tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diperbandingkan, pengungkapan proses pengambilan keputusan, dan pengawasan kualitas, efisiensi waktu dan biaya serta standarisasi. Kebijakan Perusahaan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut, Perusahaan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak terbatas pada informasi yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh seluruh *Stakeholders* sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Implementasi prinsip transparansi memungkinkan *Stakeholders* dapat melihat bagaimana Perusahaan dikelola, bagaimana proses pengambilan suatu keputusan, dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perusahaan.

Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Reasuradur dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif. Prinsip akuntabilitas menitikberatkan fungsi dan peran masing-masing organ dapat berjalan dengan baik, maka setiap Organ dan Insan Perusahaan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

Perusahaan memastikan adanya struktur, sistem dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

Perusahaan telah memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Insan Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (*corporate value*), sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta sistem *reward* and *punishment*.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

This information disclosure includes timely, complete, accurate, and comparable disclosure of the Company's performance, disclosure of the decision-making process, and quality monitoring, time and cost efficiency and standardization. Company's policies are made in writing and communicated to all Stakeholders who have the right to obtain information regarding this matter. The Company takes the initiative to disclose not only information required by Laws and Regulations, but also matters that are important for decision making by all Stakeholders in accordance with their functions and his/her position.

The implementation of the principle of transparency allows Stakeholders to see how the Company is managed, how the decision-making process is carried out, and how accountability is implemented for decisions made by the Company.

The disclosure of information does not reduce the Company's obligation to protect confidential information regarding the Company, Reinsurers, and Customers in accordance with statutory regulations.

Accountability

The principle of accountability, i.e., the clarity of functions and the implementation of the responsibilities of Company's Organs so that Company's performance can run transparently, fairly, effectively, and efficiently. The principle of accountability means that there is clarity in the function, implementation, and accountability of Company's Organs so that there is a balance of power and effective management of the Company. The principle of accountability emphasizes that the function and role of each organ can run well, so each Company's Organs and Person must have competence in accordance with their responsibilities and understand their role in implementing GCG.

The company ensures that there is a structure, system and Standard Operating Procedure (SOP) that can guarantee the implementation of a check and balance mechanism in achieving the Company's Vision, Mission and Goals.

The Company has formulated performance measures for all Company's Personnel based on agreed measures that are consistent with the Company's corporate values, business targets, and strategies as well as the reward and punishment system.

Responsibility

Responsibility, i.e., the conformity of Company's management with statutory regulations and ethical values as well as standards, principles, and practices for conducting a healthy insurance business.

Perusahaan bertanggung jawab dan bertindak untuk menjadi warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizen*) dengan mematuhi Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta berpegang pada prinsip kehati-hatian termasuk ketentuan yang berhubungan dengan perasuransian, ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, dan lain sebagainya.

The company is responsible and acts to be a good corporate citizen (Good Corporate Citizen) by complying with the applicable laws and regulations and adhering to the principle of prudence including provisions relating to insurance, employment, taxation, business competition, and so forth.

Kemandirian

Kemandirian, yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Prinsip kemandirian menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengawasi dan mengelola kegiatan Perusahaan terbebas dari tekanan atau pengaruh dari dalam maupun dari luar Perusahaan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat.

Independence

Independence, i.e., the condition of the Company being managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with statutory regulations and ethical values as well as standards, principles, and practices for conducting a healthy insurance business.

The principle of independence emphasizes that in carrying out the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Employees, or parties tasked with monitoring and managing the Company's activities they are free from pressure or influence from within or outside the Company that is not in line with the applicable statutory regulations and the principles of healthy corporate management.

Kesetaraan dan Kewajaran

Kesetaraan dan kewajaran, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat.

Prinsip keadilan diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Equality and Fairness

Equality and fairness, i.e., equality, balance, and justice in fulfilling the rights of Stakeholders arising based on agreements, laws and regulations and ethical values as well as standards, principles, and practices of healthy Company's management.

The principle of justice is implemented as justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. The company guarantees that every interested party (Stakeholders) will receive equal treatment without discrimination in accordance with the applicable laws and regulations.

Penanggung Jawab Implementasi GCG

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai penanggung jawab implementasi GCG dibantu Group Manajemen Risiko Perusahaan sebagai unit yang mengkoordinasi pelaksanaan tata kelola di Perusahaan.

Person in Charge for GCG Implementation

The Director of Human Resources and General Affairs as the person in charge for implementing GCG is assisted by the Corporate Risk Management Group as the unit that coordinates the implementation of governance in the Company.

Tugas dan tanggung jawab Group Manajemen Risiko Perusahaan adalah untuk:

1. Mengoordinasi penerapan GCG di perusahaan;
2. Memastikan pelaksanaan penilaian GCG Perusahaan;
3. Menyetujui rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian GCG Perusahaan;
4. Memonitor tindak lanjut hasil penilaian GCG;
5. Memonitor penerapan GCG secara konsisten di Group.

The duties and responsibilities of the Corporate Risk Management Group are to:

1. Coordinate the implementation of GCG in the company ;
2. Ensure the implementation of the Company's GCG assessment ;
3. Approve recommendations for follow-up to the results of the Company's GCG assessment ;
4. Monitor the follow-up to the GCG assessment results ;
5. Monitor the implementation of GCG consistently in the Group.

Internalisasi GCG

Agar prinsip GCG menjadi landasan utama bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan melakukan internalisasi terhadap Pedoman GCG Perusahaan, salah satunya dengan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi Pedoman *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan.

Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada pemahaman GCG dan peningkatan kesadaran serta kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa Perusahaan telah melaksanakan aktivitas bisnis sesuai prinsip-prinsip GCG.

Implementasi Pedoman GCG akan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi pedoman dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Perusahaan bagi satuan kerja maupun individu karyawan.

The Internalization of GCG

So that GCG principles become the main foundation for all Company's Personnel in carrying out their activities, the Company internalizes the Company's GCG Guidelines, one of which is by carrying out stages of socialization, implementation, and evaluation of the Good Corporate Governance Guidelines on an ongoing basis. The next stages of these activities will be carried out by the Compliance Function.

Socialization activities will be carried out to internal and external parties of the Company. Socialization to internal parties will focus on understanding GCG and increasing awareness and the need to implement GCG consistently. Socialization to external parties is aimed at providing confidence that the Company has carried out business activities in accordance with GCG principles.

The implementation of the GCG Guidelines will be carried out consistently and continuously, supported by periodic statements from each work unit regarding the implementation of the guidelines and linked to the reward and punishment system developed by the Company for work units and individual employees.

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanism

Struktur GCG

Sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG PT Asuransi Jasa Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang disebut sebagai organ utama. Selain itu, juga terdapat organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite dibawah Direksi sebagai Organ Pendukung Perusahaan. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

GCG Structure

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GCG structure of PT Asuransi Jasa Indonesia consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Committees under the Board of Commissioners and Committees under the Board of Directors as Supporting Organs Company. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is carried out systematically and continuously so that GCG principles as a reference in the Company's operational activities can run well.

Struktur GCG di atas menjelaskan ketiga organ Perusahaan yang masing-masing memiliki peran penting dalam penerapan GCG:

1. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja Perusahaan lebih baik.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang diberikan.
4. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
5. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris.
6. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masing-masing komite Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan

The GCG structure above explains the three Company's Organs, each of which has an important role in implementing GCG:

1. The GMS is a forum for shareholders who have authority that is not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners carries out adequate monitoring of the management carried out by the Board of Directors and provides advice so that the Company's performance is better.
3. The Board of Directors is fully responsible for managing the Company in accordance with the mandate given to it.
4. The Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.
5. The Board of Commissioners established an Audit Committee and Risk Monitoring Committee to assist and improve the monitoring function carried out by the Board of Commissioners.
6. In carrying out its duties and obligations, each committee of the Board of Commissioners works in accordance

ruang lingkup tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris juga dibantu Sekretaris Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pelaksanaan GCG mengikuti pola, sistem, hubungan dan proses sebagaimana terlihat dalam gambar di atas untuk menunjang aktivitas Perusahaan berjalan dengan baik. Pola mekanisme tersebut juga digunakan untuk memastikan efektivitas proses implementasi GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG.

Infrastruktur GCG

Pelaksanaan GCG dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan pedoman/kebijakan yang dimiliki Perusahaan sebagai acuan bagi organ perusahaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha Perusahaan. Asuransi Jasindo memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *soft structure* GCG antara lain:

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG *Code*) PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. *Board Manual* PT Asuransi Jasa Indonesia.
3. *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku) PT Asuransi Jasa Indonesia.
4. Audit *Committee Charter* (Piagam Komite Audit) PT Asuransi Jasa Indonesia.
5. Internal Audit *Charter* (Piagam Audit Internal) PT Asuransi Jasa Indonesia.
6. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan peraturan perundang-undangan PT Asuransi Jasa Indonesia.
7. Kebijakan Mekanisme Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Asuransi Jasa Indonesia.
8. Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia.
9. Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau pelanggaran (*Whistleblowing*) PT Asuransi Jasa Indonesia.
10. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Asuransi Jasa Indonesia.
11. Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi PT Asuransi Jasa Indonesia.
12. Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Asuransi Jasa Indonesia.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa di terapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu di *review* secara periodik seperti yang ada dalam tabel di atas. Komitmen berupa kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing tingkatan dalam organisasi untuk dijadikan acuan/landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perusahaan.

with the scope of duties and responsibilities of the committee as determined by the Decree of the Board of Commissioners.
7. The Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of the Board of Commissioners in order to assist in carrying out the duties of the Board of Commissioners.

GCG implementation follows the patterns, systems, relationships, and processes as seen in the picture above to support the Company's activities Ongoing Awaiting well. This mechanism pattern is also used to ensure the effectiveness of the GCG implementation process which is supported by the adequacy of GCG structure and infrastructure.

GCG Infrastructure

The implementation of GCG is carried out systematically and continuously by making the principles of corporate governance and guidelines/policies owned by the Company as a reference for Company's Organs in carrying out various Company's business activities. Asuransi Jasindo has various policies/guidelines in carrying out its functions and duties, which are called GCG soft structures, including:

1. PT Asuransi Jasa Indonesia's Good Corporate Governance (GCG Code) Guidelines.
2. PT Asuransi Jasa Indonesia's Board Manual.
3. PT Asuransi Jasa Indonesia's Code of Conduct.
4. PT Asuransi Jasa Indonesia's Audit Committee Charter.
5. PT Asuransi Jasa Indonesia's Internal Audit Charter.
6. PT Asuransi Jasa Indonesia's Legal Compliance Policy and statutory regulations.
7. PT Asuransi Jasa Indonesia's Conflict of Interest Mechanism Policy.
8. Policy Prohibiting Giving and Accepting Gifts or Bribes (Gratifications) within PT Asuransi Jasa Indonesia.
9. PT Asuransi Jasa Indonesia's Mechanism for Reporting Deviations or Violations (Whistleblowing).
10. PT Asuransi Jasa Indonesia's Reporting of the Assets of State Administrator.
11. PT Asuransi Jasa Indonesia's Information Classification and Management Policy.
12. PT Asuransi Jasa Indonesia's Guidelines for Implementing the Anti-Money Laundering or Anti Pencucian Uang (APU) and the Prevention of Terrorism Financing or Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Corporate Governance Mechanism

The Company's commitment to good corporate governance is outlined in a soft structure in the form of operational policies and procedures related to GCG which are always implemented in daily activities and are always reviewed periodically as in the table above. This commitment in the form of policy is communicated to all elements and each level in the organization to serve as a reference/foundation for implementing GCG principles within the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan Organ Perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi sepanjang hal tersebut sejalan dengan kepentingan Perusahaan.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, terdapat dua jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
   RUPST diselenggarakan setiap tahun, meliputi RUPST mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") dan RUPST mengenai persetujuan laporan tahunan. RUPST untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan Rancangan RKAP termasuk proyeksi laporan keuangan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam RKAP. Adapun RUPST untuk menyetujui laporan tahunan diadakan selambat-lambatnya pada bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan tahunan, usulan penggunaan laba bersih Perusahaan, serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
   RUPSLB diselenggarakan bila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, yaitu Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan sebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku. Permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a Company's Organs that has all authority not granted to the Board of Commissioners and the Board of Directors within the limits determined by the Articles of Association and the applicable laws and regulations. In holding the GMS, Shareholders have the right to obtain information relating to the Company from the Board of Commissioners and/or the Board of Directors as long as this is in line with the interests of the Company.

Referring to the Company's Articles of Association, there are two types of GMS, which are:

1. Annual GMS ("AGMS")
   The AGMS is held every year, including the AGMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") and the AGMS regarding the approval of the annual statement. The AGMS to approve the RKAP is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year and at that meeting the Board of Directors submits the RKAP Draft including projected financial reports and other matters that require approval from the GMS for the Company's interests which have not been included in the RKAP. The AGMS to approve the annual statement will be held no later than June after the close of the financial year concerned. At the Annual GMS, the annual statement, proposed use of the Company's net profit, and other matters that require approval from the GMS are discussed for the Company's interests.
2. Extraordinary GMS (EGMS)
   EGMS is held if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders, i.e., Series A Dwiwarna Shareholders or from 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total all shares issued by the Company with valid voting rights. The summons and holding of the EGMS are carried out in accordance with the Company's applicable Articles of Association. Requests for holding an EGMS by Shareholders or the Board of Commissioners are submitted to the Board of Directors by registered letter including the reasons.

Pemegang Saham

Shareholders

Hubungan Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
Relationship with Shareholders, Board of Commissioners & Board of Directors

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Perusahaan dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Negara Republik Indonesia.

Hak Pemegang Saham

Perlindungan terhadap hak Pemegang Saham dilakukan berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Adapun hak- hak Pemegang Saham meliputi namun tidak terbatas kepada:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur, agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan;
3. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
4. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki kewajiban:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2020 concerning the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the Company is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the State of the Republic of Indonesia.

Shareholder Rights

The protection of Shareholders' rights is carried out based on procedures in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and statutory regulations. The rights of Shareholders include but are not limited to:

1. The right to attend and vote at the GMS, based on the provisions, one share gives the holder the right to cast one vote;
2. The right to obtain material information in a timely and regular manner, to enable Shareholders to make decisions;
3. The right to receive a portion of the profits intended for Shareholders, in proportion to the number of shares they own;
4. Other rights based on the Articles of Association and statutory regulations.

Shareholder Obligations

Shareholders have obligations to:

1. Comply with the provisions of the Articles of Association and statutory regulations;
2. Not carry out monitoring and management activities of the Company carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors;

3. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di Industri Perasuransian;
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

Kewenangan RUPS

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Mekanisme pemanggilan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk dapat hadir dalam RUPS.
2. Materi/bahan RUPS tersedia bagi Pemegang Saham dan memungkinkan Pemegang Saham untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum RUPS diselenggarakan.
3. Penyelenggaran RUPS memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak suaranya.
4. RUPS harus dilaksanakan secara transparan dan *fair*.
5. RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh Perusahaan.
6. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS harus dibuat Risalah Rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang Peserta Rapat yang ditunjuk oleh rapat dan isinya sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan Keputusan RUPS, menjadi bukti sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
7. Penandatanganan ini tidak perlu jika Risalah Rapat tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.
8. Hasil RUPS harus diberitahukan kepada setiap Pemegang Saham.

3. Not exploit the Company for personal, family or business group interests in a spirit and manner that is contrary to statutory regulations and healthy practices in the Insurance Industry;
4. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS mechanism.

GMS Authority

1. Appoint and dismiss the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Provide decisions necessary to safeguard the Company's long-term and short-term business interests in accordance with statutory regulations and the Company's Articles of Association;
3. Provide approval to the Annual Statement including the ratification of the Financial Statement as well as the monitoring duties of the Board of Commissioners in accordance with statutory regulations and the Company's Articles of Association;
4. Make decisions through an open, fair, and accountable process;
5. Implement Good Corporate Governance in accordance with its authority and responsibilities.

Procedures for holding a GMS

Shareholders have the right to obtain a complete explanation and accurate information regarding the procedures that must be fulfilled in connection with holding a GMS in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

This complete explanation and information includes but is not limited to:

1. The summons mechanism follows the provisions in the Company's Articles of Association and allows Shareholders to attend the GMS.
2. GMS materials are available to Shareholders and enable Shareholders to study them in advance before the GMS is held.
3. Holding a GMS allows Shareholders to exercise their voting rights.
4. The GMS must be held transparently and fairly.
5. A GMS can only be held if attended by Shareholders representing at least more than 51% (fifty one percent) of the total number of shares with valid voting rights and which have been issued by the Company.
6. All matters discussed and decided at the GMS must be made into the Minutes of the Meeting and as ratification signed by the Chairman of the Meeting and by one of the Meeting Participants appointed by the meeting and the contents must at least include the time, agenda, participants, opinions developed at the GMS and GMS Resolutions, become valid evidence for all Shareholders and third parties.
7. This signing is not necessary if the Minutes of Meeting are prepared with Notarial Minutes.
8. The results of the GMS must be notified to each Shareholder.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Pada tahun 2023, Asuransi Jasindo menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

The Implementation of the 2023 GMS

In 2023, Asuransi Jasindo held 2 (two) GMS, which are:

No	Nama RUPST/RUPSLB Name of AGMS/EGMS	Tempat & Tanggal Place & Date
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 The Ratification of the 2023 Company's Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Jakarta, 30 Januari 2023 Jakarta, January 30, 2023
2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 The Approval of the Annual Statement and the Ratification of the Consolidated Financial Assessment for the 2022	Jakarta, 27 Juni 2023 Jakarta, June 27, 2023

Untuk seluruh RUPS yang diselenggarakan tahun 2023, mohon data berikut:

1. Waktu dan penyelenggaraan RUPS
2. Risalah rapat yang berisi agenda dan keputusan
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak-pihak terkait dalam RUPS
4. Jika ada RUPS sirkuler mohon data Surat Keputusannya
5. Tindak lanjut dari keputusan RUPS (jika ada)

For all GMS held in 2023, please request the following data:

1. The time and implementation of the GMS
2. The minutes of the meeting containing the agenda and decisions (attached)
3. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as related parties at the GMS
4. If there is a circular GMS, please request the Decision Letter Data
5. Follow-up to GMS decisions (if any)

Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Tahun 2022 Asuransi Jasindo menyelenggarakan RUPST sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun Buku 2020
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2021.

Seluruh keputusan RUPS tersebut telah direalisasikan di tahun 2022.

The Realization of Previous Year's GMS Decisions

In 2022, Asuransi Jasindo held 3 (three) AGMS, which are:

1. The Ratification of the 2022 Company's Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. The Approval of the Annual Statement and the Ratification of the Financial Statement of PT Asuransi Jasa Indonesia for the 2020 Financial Year
3. The Approval of the Annual Statement and the Ratification of the 2021 PT Asuransi Jasa Indonesia Financial Statement.

All GMS decisions have been implemented in 2022.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP"), RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan yaitu:

1. *Level Performance*, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. *Level Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
6. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia

The Board of Commissioners is a Company's Organs that has a monitoring function regarding the implementation of management carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners is also tasked with providing suggestions and advice to the Board of Directors in determining the direction of the Company's performance achievement goals and ensuring that Danareksa implements Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is carried out in the interests of the Company and in accordance with the Company's aims and objectives.

The monitoring function of the Board of Commissioners is realized in 2 (two) levels, which are:

1. Performance Level, i.e., the monitoring function where the Board of Commissioners provides direction and guidance to the Board of Directors and provides input to the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Conformance Level, i.e., in the form of carrying out monitoring activities at the next stage to ensure that advice has been implemented and that the provisions in the applicable laws and regulations and the Articles of Association are fulfilled.

Legal Framework

1. The Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
3. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
5. Financial Services Authority Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies;
6. The Articles of Association of PT Asuransi Jasa Indonesia

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan pada tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya dan *Board Manual* yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama No. SKB.04/SKB/XI/2022 tanggal 24 November 2022.

Board Manual Dewan Komisaris Asuransi Jasindo antara lain berisikan:

1. Fungsi
2. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan Dewan Komisaris
4. Etika Jabatan
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
6. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
9. Komite-Komite Dewan Komisaris
10. Sekretaris Dewan Komisaris
11. Hubungan Antara Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners's Work Guidelines and Regulations

In carrying out its roles and functions in the Company, the Board of Commissioners has references and work guidelines contained in the Company's Articles of Association on June 2, 1973 along with its amendments and the Board Manual which has been ratified through Joint Decision Letter No. SKB.04/SKB/XI/2022 dated November 24, 2022.

The Board Manual of the Board of Commissioners of Asuransi Jasindo contains, among other things:

1. Function
2. The Requirements and Composition of the Board of Commissioners
3. Introduction and Deepening Knowledge Program for the Board of Commissioners
4. Position Ethics
5. The Duties and Obligations of the Board of Commissioners
6. The Rights and Authorities of the Board of Commissioners
7. The Board of Commissioners' Meeting
8. The Evaluation of the Performance of the Board of Commissioners
9. The Committees of the Board of Commissioners
10. The Secretary to the Board of Commissioners
11. Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

The Term of Office of the Board of Commissioners

The members of the Board of Commissioners are appointed for a term of 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time.

Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai *Board Manual* Asuransi Jasindo, anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang.

Susunan Dewan Komisaris Asuransi Jasindo pada akhir tahun 2023 yaitu:

The Membership and Composition of the Board of Commissioners

In accordance with Asuransi Jasindo's Board Manual, there are at least 3 (three) members of the Company's Board of Commissioners and at least half of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. In 2023, there are 3 (three) members of the Company's Board of Commissioners.

The composition of the Asuransi Jasindo's Board of Commissioners at the end of 2023 is:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji Kepatuhan dan Kelayakan Fit & Proper Test	Periode Jabatan Term of Office
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner Concurrently	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-355/MBU/11/2020 dan 057/SK- DIR/CORP/BPUI/ XI/2020 tanggal 3 November 2020 The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-355/MBU/11/2020 and 057/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2020 dated November 3, 2020	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 97/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Ngalim Sawego Selaku Calon Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 28 Desember 2020 FSA's Board of Commissioners Decision Number KEP-97/KDK.05/2020 concerning the Results of the Feasibility Test of Mr. Ngalim Sawego as Candidate for President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia dated December 28, 2020	2020-2025
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-80/MBU/03/2020 dated March 18, 2020	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 45/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Ahmad Fuad Rahmany Selaku Calon Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 4 September 2020 The Decision of FSA Commissioner Board Number KEP- 45/KDK.05/2020 concerning the Results of the Feasibility Test of Mr. Ahmad Fuad Rahmany as Candidate for Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia on September 4, 2020	2020-2025
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-113/MBU/04/2022 dan 005/KepSir-PS/BPUI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Shareholders of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK-113/MBU/04/2022 and 005/KepSir-PS/BPUI/IV/2022 dated April 28, 2022	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-4/KDK.05/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Indah Anggoro Putri Selaku Calon Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia The FSA Board of Commissioners Decision Number KEP-4/KDK.05/2023 concerning the Results of the Feasibility Test of Ms. Indah Anggoro Putri as Candidate for the Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia	2022-2027

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Independent Commissioner

Independent Commissioners are the members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with the members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Company that could affect the person's ability to act independently.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan mengacu pada POJK No. 73/POJK.05/2016 dan *Board Manual*, yaitu:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pemegang Saham Perusahaan dalam bidang usaha yang sama.
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari suatu:
   a. Perusahaan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan;
   b. Perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan;
   c. Perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan/atau
   d. Perusahaan yang mengalami kerugian disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen

a. Komisaris Independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b. Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas pada huruf a di atas;
c. Komisaris Independen wajib membuat Laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan;
d. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

Criteria for Determining Independent Commissioners

The criteria for determining the Company's Independent Commissioners refer to POJK No. 73/POJK.05/2016 and Board Manual, which are :

1. Has no affiliation with the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Monitoring Board or Company Shareholders in the same business field.
2. Never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Monitoring Board or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in a Company or other company that has an affiliate relationship with the Company within the last 6 (six) years.
3. Never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or a member of the Sharia Monitoring Board of:
   a. Companies that are subject to sanctions for restrictions on business activities within a period of 3 (three) years prior to appointment;
   b. Companies in the financial services sector whose business licenses have been revoked due to violations within a period of 3 (three) years prior to appointment;
   c. Companies in the financial services sector or in the non-financial services sector that are declared bankrupt and have permanent legal force within a period of 5 (five) years prior to appointment; and/or
   d. Companies that experience losses due to errors or negligence within the period of 5 (five) years prior to appointment.

The Duties and Obligations of Independent Commissioners

a. The Independent Commissioner has the main task of carrying out a monitoring function to voice the interests of policyholders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits;
b. Companies are prohibited from dismissing Independent Commissioners because of the Independent Commissioner's actions in carrying out the duties in letter a above;
c. Independent Commissioners are required to make an Annual Statement regarding the implementation of their duties related to protecting the interests of policyholders, insureds, participants, and/or parties who are entitled to benefits, both regarding services and claim settlement, including statements regarding disputes that are in the process of being resolved at mediation bodies, agencies arbitration, or judicial bodies;
d. The Annual Statement as intended in letter c is part of the Board of Commissioners' statement and is included in the statement on the implementation of Good Corporate Governance;

e. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);
f. Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris;

g. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas membahas hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
h. Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usulan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris;

i. Dalam hal hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, menolak atau tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris yang menolak atau tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan, antara lain adalah:

1. Kebijakan Umum
   Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

   a. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;

e. The Annual Statement as intended in letter c above must be submitted in the form of physical (hard copy) and digital (soft copy) documents;
f. In the event that the Independent Commissioner assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors that are detrimental or have the potential to harm the interests of policyholders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits, the Independent Commissioner is obliged to propose holding a Board of Commissioners' Meeting;
g. The Board of Commissioners' meeting as referred to in letter f above discusses the results of the Independent Commissioner's assessment of policies or actions of the members of the Board of Directors that are detrimental or have the potential to harm the interests of policy holders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits;
h. In the event that other members of the Board of Commissioners are not willing to accept the proposal to hold a Board of Commissioners' Meeting as referred to in letter f above, the Independent Commissioner is obliged to report completely and comprehensively to the insurance business development and monitoring institution and copy it to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days from other members of the Board of Commissioners are unwilling to accept the proposal to hold a Board of Commissioners' Meeting;
i. In the event that the results of the decision of the Board of Commissioners' Meeting as referred to in letter f above, reject or disagree with the results of the Independent Commissioner's assessment of the policies or actions of the members of the Board of Directors which are detrimental or have the potential to harm the interests of policy holders, insureds, participants, and/or parties entitled to obtain benefits, the Independent Commissioner is obliged to report completely and comprehensively to the insurance business development and monitoring institution and copy it to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days from the decision of the Board of Commissioners' Meeting which rejects or disagrees with the results of the Independent Commissioner's assessment.

The Duties and Obligations of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as outlined in the Company's Articles of Association and Board Manual, include:

1. General Policy
   In connection with the implementation of the monitoring function and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the duties and/or obligations to:
   a. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and GMS decisions;

b. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perusahaan. Pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;

e. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
f. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan kepada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mengenai:

   i. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
   ii. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

g. Kewajiban pengungkapan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan baik pada awal menjabat maupun setiap terjadi perubahan;
h. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan;
j. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;

b. Have good faith, be careful, and responsible in carrying out monitoring duties and provide advice to the Board of Directors in the interests of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
c. Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties, especially the interests of policyholders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits;
d. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff regarding the management of the Company. Providing advice is carried out in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and is not intended for the interests of any particular party or group;
e. The members of the Company's Board of Commissioners are required to sign an Integrity Pact to comply with all statutory provisions and regulations relating to their authority and responsibilities;

f. The members of the Company's Board of Commissioners are required to disclose to the Company in which the members of the Board of Commissioners serve and include them in the Good Corporate Governance implementation statement regarding:
   i. the share ownership of 5% (five percent) or more in the company where the said member of the Board of Commissioners serves and/or in other companies domiciled at home and abroad; and

   ii. financial relationships and family relationships with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, the members of the DPS, and/or shareholders or equivalent of the Company where the member of the Board of Commissioners in question serves.
g. The disclosure obligation is submitted in the form of a statement both at the start of office and whenever changes occur;
h. Carry out monitoring duties on the Board of Directors' policies in carrying out the management of the Company including compliance with applicable laws and regulations, implementation of the Company's Long Term Plan or Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Company Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and GMS decisions;
i. Supervise the Board of Directors to ensure that the Board of Directors complies with the Company's internal regulations;
j. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff regarding the preparation of the Company's vision, mission and other strategic plans as regulated in the Articles of Association;

k. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk RJPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan RKAP;
l. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
m. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
n. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
o. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
p. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan;
q. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP;
r. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
s. Pembagian kerja anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Dewan Komisaris. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perusahaan;
t. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan;
u. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya;
v. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh serta melaporkan kepada OJK untuk pelanggaran dan kegiatan yang membahayakan perusahaan;
w. Melakukan *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris secara berkala;

k. Provide opinions and suggestions as well as approval regarding the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors. The approval of the RJPP is no later than 60 (sixty) days from the submission of the draft by the Board of Directors and 30 (thirty) days from the start of the new financial year for approval of the RKAP;
l. Carry out the research and review of statements from the Board of Directors and all staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together;
m. Research and examine statements from committees under the Board of Commissioners;
n. Follow developments in the Company's activities both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media and from other sources;
o. Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff;
p. Make efforts to ensure that the Board of Directors and their staff comply with statutory provisions and other regulations in managing the Company;
q. Prepare the Annual Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) for the Board of Commissioners which is an inseparable part of the RKAP;
r. Submit a statement on the monitoring tasks that have been carried out during the previous financial year to the GMS;
s. The division of work of the members of the Board of Commissioners is decided by the Board of Commissioners. To carry out its duties smoothly, the Board of Commissioners may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners based on the advice of Shareholders at the Company's expense;
t. Ensure that the Company's Annual Statement contains information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings and joint meetings with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other benefits received from the Company;
u. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from internal auditors, external auditors, the results of monitoring by the Board of Commissioners and/or the results of certain examinations by other audit institutions;
v. Report to Series A Dwiwarna Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance, accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken and report to the FSA for violations and activities that endanger the company;
w. Conduct regular self-assessments of the performance of the Board of Commissioners;

x. Menerapkan Tata Kelola melalui:
   i. pengawasan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (individu) ataupun Perusahaan Anak/konglomerasi keuangan (terintegrasi);
   ii. pengawasan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (individu) ataupun Perusahaan Anak/konglomerasi keuangan (terintegrasi).
y. Memantau dan memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Terkait dengan Aktivitas Perencanaan
   Dewan Komisaris diwajibkan menyusun RKAT dan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKAP sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. RKAT harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perusahaan menyerahkan RKAT ke Pemegang Saham.

   Penyusunan rencana kerja Dewan Komisaris meliputi:

   a. Penyusunan rencana kerja Dewan Komisaris meliputi:
   b. Rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat;
   c. Evaluasi atas kinerja *underwriting*;
   d. Evaluasi atas kinerja investasi;
   e. Evaluasi atas pengelolaan;
   f. Evaluasi atas pengendalian internal dan manajemen risiko;
   g. Pelaksanaan rapat;
   h. *Monitoring* dan evaluasi unit kerja, wilayah atau cabang, anak perusahaan;
   i. Pelatihan dan pengembangan;
   j. Anggaran dan biaya;
   k. Jadwal kegiatan;
   l. Usulan KPI Dewan Komisaris.

3. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
   Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
   a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS;
   b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS;
   c. Mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS;
   d. Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
   e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

x. Implementing Governance through:
   i. the monitoring of the implementation of good governance in every business activity and at all levels or stages of the organization (individual) or Subsidiary Companies/financial conglomerates (integrated);
   ii. the monitoring of the implementation of good governance in every business activity and at all levels or stages of the organization (individual) or subsidiary companies/financial conglomerates (integrated).
y. Monitor and ensure that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably.

2. Related to Planning Activities
   The Board of Commissioners is required to prepare RKAT and Key Performance Indicators (KPI) which are an inseparable part of RKAP as work guidelines in carrying out their duties and obligations. The RKAT must be submitted no later than 30 (thirty) days before the Company submits the RKAT to Shareholders.

   The preparation of the Board of Commissioners' work plan includes:
   a. Monitoring and advisory work plan;
   b. Supervisory and advisory work plan;
   c. The evaluation of underwriting performance;
   d. The evaluation of investment performance;
   e. The evaluation of management;
   f. The evaluation of internal control and risk management;
   g. The implementation of meetings;
   h. The monitoring and evaluation of work units, regions or branches, subsidiaries;
   i. Training and development;
   j. Budget and costs;
   k. The schedule of activities;
   l. The proposed KPI of the Board of Commissioners.

3. Related to the General Meeting of Shareholders
   In relation to the GMS, the Board of Commissioners has the duty and obligation to:
   a. Report and account for the activities and performance of the Board of Commissioners to the GMS;
   b. Report the performance of the Board of Directors to the GMS;
   c. Supervise the implementation of the RKAP and convey the results of the assessment and opinions to the GMS;
   d. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors;
   e. Follow developments in the Company's activities, and in the event that the Company shows signs of significant setbacks, immediately statement to the GMS accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken;

f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
g. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya;
h. Mengusulkan penunjukkan Auditor Eksternal kepada RUPS;
i. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

4. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Pendukung Dewan Komisaris. Sistem Nominasi dan Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

5. Terkait dengan Remunerasi Dewan Komisaris dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja, Wilayah dan/atau *Representative Office*

a. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
b. Kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus memperhatikan:
   i. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   ii. prestasi kerja individual;
   iii. kewajaran dengan peer group; dan
   iv. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
c. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
   i. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif apabila dibandingkan terhadap industri sejenis bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS;
   ii. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja dewan dan individu Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.

f. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company;
g. Provide responses to the Board of Directors' periodic statements (quarterly, annually) as well as at any time necessary regarding the Company's developments and statement the results of the implementation of their duties to Shareholders in a timely manner;
h. Propose the appointment of an External Auditor to the GMS;
i. Carry out other monitoring tasks determined by the GMS.

4. Related to the Nomination and Selection of the Board of Commissioners and the Board of Directors
The Board of Commissioners proposes a nomination and selection system for the prospective members of the Board of Commissioners and Directors, and submits it to the GMS for ratification. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners can be assisted by the Board of Commissioners Supporting Committee. The Nomination and Selection System for the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be implemented in such a way as to ensure the implementation of the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness.

5. Related to the Remuneration of the Board of Commissioners and the Performance Evaluation of Work Units, Regions, and/or Representative Offices
a. Companies are required to implement remuneration policies for the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and employees that encourage behaviour based on the principle of prudence (prudent behaviour) which is in line with the Company's long-term interests and fair treatment of policyholders, insureds, participants, and/or parties involved. entitled to benefits.
b. The Remuneration Policy as intended in paragraph (a) must pay attention to:
   i. the financial performance and fulfilment of the Company's obligations as regulated in the applicable laws and regulations;
   ii. individual work performance;
   iii. fairness with peer groups; and
   iv. the consideration of the Company's long-term goals and strategies.
c. The Board of Commissioners is obliged to:
   i. Propose a competitive remuneration system compared to similar industries for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS;
   ii. Propose a performance evaluation system for the board and individual members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS.

Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Pendukung Dewan Komisaris.

Penetapan remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

d. Dewan Komisaris wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja unit kerja, wilayah dan/atau *Representative Office* serta anak perusahaan.

6. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite di bawahnya. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga didorong untuk melaksanakan fungsi:

a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan serta memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi;
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Perusahaan;
d. Membentuk Komite Pemantau Risiko;
e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;

In carrying out this obligation, the Board of Commissioners can be assisted by the Board of Commissioners Supporting Committee.

The determination of the remuneration received by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of supervision of State-Owned Enterprises and its amendments.

d. The Board of Commissioners is obliged to monitor and evaluate the performance of work units, regions, and/or Representative Offices and subsidiaries.

6. Related to Risk Management
The Board of Commissioners has the obligation to carry out regular assessments and provide recommendations regarding risks and the implementation of risk management in the Company. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners can be assisted by lower committees. The Board of Commissioners plays an active role in monitoring the implementation of risk management carried out by the Board of Directors. Moreover, the Board of Commissioners is also encouraged to carry out the following functions:

a. Approve and evaluate risk management policies prepared by the Board of Directors. Evaluations are carried out at least 1 (one) time in 1 (one) year or at a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly influence the Company's business activities;
b. Evaluate the accountability of the Board of Directors at least once every 6 (six) months and provide direction for improvements to the implementation of risk management policies on a regular basis. The evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors manages the Company's activities and risks and ensures that risk management policies and processes are implemented effectively and integrated into the overall risk management process. In carrying out this evaluation, the Board of Commissioners formed a Risk Monitoring Committee whose task was to assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation of risk management prepared by the Board of Directors;
c. Evaluate and decide on requests from the Board of Directors relating to transactions and risk limits that require approval from the Board of Commissioners. These transactions and risk limits constitute business or operational activities that exceed the authority of the Board of Directors to carry out such matters, in accordance with the Company's internal policies and procedures;
d. Establish a Risk Monitoring Committee;
e. Evaluate risk management policies;

f. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas;
g. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi
Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

8. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:
a. Membentuk Komite Audit;
b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Group* Satuan Pengawasan Internal (SPI) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja *Group* SPI;
d. Memastikan *Group* SPI bekerja secara independen dan efektif;
e. Menerapkan strategi *anti fraud* dan mengawasi pelaksanaannya;
f. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal;
g. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
h. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan *best practice*.

9. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
a. Dewan Komisaris mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, konsisten, dan dengan cara yang efisien;
b. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;

f. Evaluate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of risk management policies and assess the tolerance that can be taken by the Company as intended in letter (b) above;
g. Evaluate and decide on requests from the Board of Directors relating to transactions that require approval from the Board of Commissioners.

7. Related to Business Ethics and Anti-Corruption
The members of the Board of Commissioners are prohibited from receiving, giving, or offering either directly or indirectly anything of value to or from government officials and/or other parties that can influence or as a reward for what they have done and other actions in accordance with the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners supports the efforts to eradicate corruption that have been launched by the Government.

8. Related to the Internal Control System
The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has the obligation to:
a. Establish an Audit Committee;
b. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit Unit Group (SPI) at least once every 1 (one) year;
c. Appoint an independent quality controller from an external party to review the performance of the SPI Group;
d. Ensure that the SPI Group works independently and effectively;
e. Implement anti-fraud strategies and monitor their implementation;
f. Review the effectiveness of the implementation of the External Auditor's duties, by assessing the Competency, Independence and scope of the External Auditor's duties;
g. Ensure that Internal Auditors, External Auditors and the Audit Committee have access to information regarding the Company necessary to carry out their duties;
h. Assess the accuracy of information prepared for other parties, especially in Annual Financial and Non-Financial Statements as well as Annual Statements which are adapted to best practices.

9. Related to Openness and Confidentiality of Information
a. The Board of Commissioners supervises that the Company discloses important information in the Annual Statement (including Financial Statements) to other parties in accordance with the applicable laws and regulations in an accurate, accountable, timely, consistent, and efficient manner;
b. The Board of Commissioners is responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information;

c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Dewan Komisaris memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan *best practice.*

10. Terkait Pelaksanaan Pengawasan/Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris
Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, pengawasan dan pemberian nasihat dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:
a. Pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir yaitu sistem dan prosedur promosi, mutasi serta demosi di Perusahaan;
b. Pengelolaan kebijakan mutu dan pelayanan;
c. Kepatuhan hukum Perusahaan dalam menjalankan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkomitmen dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati Perusahaan dengan pihak ketiga;
d. Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris;
e. Pengelolaan anak perusahaan dan perusahaan patungan, termasuk peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan dan perusahaan patungan;
f. Penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham serta usulan remunerasi Direksi;
g. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi;
h. Pengelolaan Sistem Akuntansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
j. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.

Pelaksanaan pengawasan/pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris antara lain dilakukan melalui:

1) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi;
2) Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;

c. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with the applicable laws and regulations;
d. The Board of Commissioners ensures that the Company discloses the implementation of Good Corporate Governance principles in the Annual Statement in accordance with best practice.

10. Regarding the Implementation of Monitoring/Providing Advice by the Board of Commissioners
Monitoring and providing advice are carried out in the interests of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives, and is not intended for the interests of certain parties or groups, such monitoring and providing advice includes but is not limited to:
a. Human resource management, especially regarding career management, i.e., systems and procedures for promotions, transfers, and demotions in the Company;
b. The management of quality and service policies;
c. The Company's legal compliance in implementing the Articles of Association and the applicable laws and regulations, as well as being committed to fulfilling obligations in accordance with the agreements the Company has agreed with third parties;
d. The effectiveness of the implementation of external audits and internal audits, as well as the implementation of reviews of complaints relating to the Company received by the Board of Commissioners;
e. The management of subsidiaries and joint ventures, including the role of the Board of Commissioners in appointing the Board of Commissioners and the Board of Directors of subsidiaries and joint ventures ;
f. The assessment of the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders as well as proposals for the Board of Directors' remuneration;
g. Information Technology Systems Management;
h. Accounting System Management and compliance with the applicable laws and regulations;
i. The management of the Procurement of Goods and Services;
j. Suggestions, hopes, problems, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) are submitted directly to the Board of Commissioners/Board of supervision or submitted by the Board of Directors.

The implementation of monitoring / providing advice by the Board of Commissioners is carried out, among other things, through:
1) Requesting written information from the Board of Directors regarding a problem that has occurred;
2) Providing opinions or directions in meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors or other meetings attended by the Board of Commissioners;

3) Mengunjungi *Group/Representative Office* tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perusahaan seperti *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif;
4) Memberikan persetujuan/tanggapan tertulis terkait Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahunan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
5) Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan oleh Direksi.

11. Terkait dengan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
    a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
    b. Melakukan pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris, ataupun melalui sarana informasi lainnya.

3) Visiting certain Group/Representative Offices in order to ensure that the Company's operations such as underwriting, claim payments, marketing, human resources (HR), finance and other aspects are Ongoing Awaiting effectively;
4) Providing written approval/response regarding the Company's Long Term Plan or Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), annual Company's Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) and other work plans as well as changes thereto in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
5) Providing responses to periodic statements provided by the Board of Directors.

11. Related to the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing or Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
    a. Monitoring the implementation of the Board of Directors' responsibilities regarding the implementation of the APU and PPT program;
    b. Conducting discussions related to Money Laundering and the Prevention of Terrorism Financing through meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, or through other information facilities.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugasnya memantau efektivitas program pengawasan kinerja Perusahaan, telah disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai berikut:

The Division of Duties of the Board of Commissioners

In order to carry out its duties to monitor the effectiveness of the Company's performance monitoring program, it has been agreed to divide the duties of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	a. Melaksanakan koordinasi serta membidangi seluruh tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris, termasuk bidang Pemasaran, Teknik, Pengembangan Cabang, Bisnis Strategis, Pengembangan Bisnis, dan Teknologi Informasi. b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi c. Ketua Komite Pemantau Risiko a. To carry out coordination and oversee all main tasks and functions of the Board of Commissioners, including Marketing, Engineering, Branch Development, Strategic Business, Business Development, and Information Technology. b. The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee c. The Chairman of the Risk Monitoring Committee
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioner	a. Membidangi tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris dalam lingkup Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan, termasuk proses pelaporan keuangan. b. Ketua Komite Audit a. In charge of the main duties and functions of the Board of Commissioners within the scope of Internal Control, Financial Management, including the financial reporting process. b. The Chairman of the Audit Committee

Adi Suryanto*	Komisaris Commissioner	a. Membidangi tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris dalam lingkup, Pengembangan Cabang, Pemasaran, Bisnis Strategis, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi a. In charge of the main duties and functions of the Board of Commissioners within the scope of Branch Development, Marketing, Strategic Business, Business Development and Information Technology b. Member of the Nomination and Remuneration Committee
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioner	a. Membidangi tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris dalam lingkup Hukum, *Good Corporate Governance*, dan Sumber Daya Manusia. b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi c. Anggota Komite Pemantau Risiko a. In charge of the main duties and functions of the Board of Commissioners within the scope of Law, Good Corporate Governance and Human Resources. b. Member of the Nomination and Remuneration Committee c. Member of the Risk Monitoring Committee

*Meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris diambil alih oleh Komisaris Utama
*Passed away on December 15, 2023. In connection with this, the duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners were taken over by the President Commissioner.

Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing- masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap;
6. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perusahaan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu terukur dan lengkap;
7. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota-

The Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

The creation of a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the most important things so that each of these organs can work according to their respective functions effectively and efficiently. In maintaining a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the following principles are implemented:

1. The Board of Commissioners respects the function and role of the Board of Directors in managing the Company as regulated in statutory regulations and the Company's Articles of Association;
2. The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policies;
3. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for;
4. Any informal working relationship can be carried out by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but can not be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence;
5. The Board of Commissioners has the right to obtain access to Company's information in a timely and complete manner;
6. The Board of Directors is obliged to ensure that information regarding the Company can be obtained by the Board of Commissioners in a timely, measurable, and complete manner;
7. The Board of Directors is responsible for submitting statements required by the Board of Commissioners periodically in accordance with the applicable regulations;
8. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is an institutional relationship in the sense that the Board of Commissioners and the Board of Directors are collective

anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan Direktur harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan Direktur lainnya

positions that represent all of its members so that every working relationship between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be known by other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Rapat internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Rapat Gabungan) yang dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris, serta dapat mengundang Komite-Komite dan karyawan atas izin Direksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan aspek operasional Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 4 (empat) kali rapat di antaranya dilakukan dengan mengundang Direksi;
2. Paling sedikit 1 (satu) kali rapat di antaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.

Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali rapat bersama Direksi. Adapun frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Meeting

Board of Commissioners Meeting Policy

The Board of Commissioners' Meeting is a meeting held by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' meeting consists of:

1. The internal meeting of the Board of Commissioners attended by the members of the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners;
2. Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Joint Meetings) which are attended by the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Corporate Secretary, and the Secretary of the Board of Commissioners, and can invite Committees and Employees with the permission of the Board of Directors to be asked for information regarding operational aspects of the Company.

The Board of Commissioners meetings are held periodically at least once every 1 (one) month, with the following conditions:

1. At least 4 (four) meetings of which are held by inviting the Board of Directors;
2. At least 1 (one) meeting of which is held by inviting an external auditor.

The members of the Board of Commissioners are required to attend at least 80% (eighty percent) of the total number of Board of Commissioners' meetings within a 1 (one) year period.

The Frequency of the Board of Commissioners' Meetings

In 2023, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) internal meetings of the Board of Commissioners and 12 (twelve) meetings with the Board of Directors. The frequency of attendance of the Board of Commissioners at meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meetings of Board of Commissioners			Rapat Bersama Direksi Joint Meetings with Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	12	12	100	12	12	100
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100	12	12	100

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meetings of Board of Commissioners			Rapat Bersama Direksi Joint Meetings with Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Adi Suryanto*	Komisaris Commissioner	11	11	100	9	9	100
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioner	12	12	100	9	9	100
Anton Mart Irianto**	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100	7	7	100

* meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023
** berhenti menjabat pada tanggal 23 Agustus 2023

* passed away on December 15, 2023
** ceases to serve on August 23, 2023

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	26 Januari 2023 January 26, 2023	*Update* Kinerja Anak Perusahaan Tahun 2022 Subsidiary Performance Update for 2022
2	28 Februari 2023 February 28, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Januari 2023 Company Performance Evaluation in January 2023
3	30 Maret 2023 March 30, 2023	Kinerja Perusahaan bulan Februari 2023 Company Performance in February 2023
4	2 Mei 2023 May 2, 2023	Evaluasi Kinerja Triwulan I/2023 Performance Evaluation Quarter I/2023
5	25 Mei 2023 May 25, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan April 2023 Company Performance Evaluation in April 2023
6	3 Juli 2023 July 3, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Mei 2023 Company Performance Evaluation May 2023
7	26 Juli 2023 July 26, 2023	Pembahasan Evaluasi Kinerja Semester I/2023 The Discussion of Performance Evaluation Semester I/2023
8	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Juli 2023 Company Performance Evaluation in July 2023
9	27 September 2023 September 27, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Agustus 2023 Company Performance Evaluation in August 2023
10	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan III/2023 The Discussion of Performance Evaluation Quarter III/2023
11	21 November 2023 November 21, 2023	Kinerja Perusahaan Oktober 2023 Company Performance in October 2023
12	28 Desember 2023 December 28, 2023	Kinerja Perusahaan November 2023 Company Performance in November 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi
Agenda for Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	26 Januari 2023 January 26, 2023	1. *Update Progress* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022; 2. *Update* Kinerja Anak Perusahaan Tahun 2022. 1. Update on Audit Progress of Financial Reports for Financial Year 2022; 2. Update on Subsidiary Performance in 2022.
2	26 Februari 2023 February 26, 2023	1. Evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 - 2024; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Januari 2023. 1. The Evaluation of the Company's Long Term Plan or Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 – 2024; 2. Company Performance Evaluation in January 2023.
3	30 Maret 2023 March 30, 2023	Kinerja Perusahaan bulan Februari 2023. Company Performance in February 2023.
4	2 Mei 2023 May 2, 2023	Evaluasi Kinerja Maret 2023 Performance Evaluation in March 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi
Agenda for Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5	25 Mei 2023 May 25, 2023	1. Evaluasi Kinerja Perusahaan April 2023; 2. Evaluasi Manajemen Risiko Perusahaan; 3. Evaluasi Kebijakan Sentralisasi. 1. Company Performance Evaluation in April 2023; 2. The Evaluation of Company Risk Management; 3. The Evaluation of Centralization Policy.
6	3 Juli 2023 July 3, 2023	1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Mei 2023; 2. Strategi Peningkatan Produktivitas dan Menjaga Integritas di Tahun Politik; 3. Update Persiapan PSAK 74; 4. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG. 1. Company Performance Evaluation in May 2023; 2. Strategy for Increasing Productivity and Maintaining Integrity in the Political Year; 3. Update on PSAK 74 Preparation; 4. IFG Financial Conglomerate Corporate Charter.
7	26 Juli 2023 July 26, 2023	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Semester I/2023; 2. Evaluasi Manajemen SDM Perusahaan; 3. Kunjungan Dewan Komisaris ke Balikpapan. 1. The Discussion of Performance Evaluation Semester I/2023; 2. The Evaluation of Company HR Management; 3. The Board of Commissioners visit to Balikpapan
8	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Juli 2023 2. Evaluasi Kinerja Cabang; 3. Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Modal 1. Company Performance Evaluation in July 2023 2. Branch Performance Evaluation; 3. The Evaluation of Goods and Services Procurement Policies and Capital Expenditures
9	27 September 2023 September 27, 2023	1. *Update* persiapan PSAK 74; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Agustus 2023; 3. Evaluasi Prinsip *Mutual Benefit* dalam Hubungan Kerja dengan Mitra Bisnis. 1. Update on preparation for PSAK 74; 2. Company Performance Evaluation in August 2023; 3. The Evaluation of Mutual Benefit Principles in Working Relationships with Business Partners.
10	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan III/2023; 2. Pembahasan RKAP 2024; 3. Persetujuan Laporan Triwulan III/2023. 1. The Discussion of Performance Evaluation for Quarter III/2023; 2. The Discussion of 2024 RKAP; 3. The Approval of the III/2023 Quarterly Report.
11	21 November 2023 November 21, 2023	1. Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Tanah dan Bangunan Kantor di Jalan Raya Darmo No. 24, Surabaya kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero); 2. Kinerja Perusahaan Oktober 2023 dan Prognosa Akhir Desember 2023; 3. Progress Penyelesaian dan Tindak Lanjut RPK; 4. Progress Persiapan Audit Laporan Keuangan 2023; 1. Application for Approval for the Write-Off and Change Hand of Fixed Assets in the Form of Land and Office Buildings on Jalan Raya Darmo No. 24, Surabaya to PT Bank Tabungan Negara (Persero); 2. Company Performance in October 2023 and Final Prognosis in December 2023; 3. The Progress of RPK Completion and Follow-up; 4. Progress on Preparation for the 2023 Financial Report Audit;
12	28 Desember 2023 December 28, 2023	1. *Kick-off* meeting ICOFR; 2. Kinerja Perusahaan November 2023 dan Prognosa Akhir Desember 2023; 3. Progress Audit Laporan Keuangan 2023; 4. Update RKAP 2024; 5. Lain-lain. 1. ICOFR kick-off meeting; 2. Company Performance in November 2023 and Final Prognosis in December 2023; 3. 2023 Financial Report Audit Progress; 4. Update RKAP 2024; 5. Others.

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan.

Tanggung jawab untuk melakukan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Company's Introduction Program

The Members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company.

The responsibility for carrying out the induction program lies with the Corporate Secretary or anyone who carries out the functions of Corporate Secretary.

Program pengenalan meliputi:
1. pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya;
3. keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, sehingga program pengenalan Perusahaan tidak dilaksanakan.

The induction program includes:
1. the implementation of Good Corporate Governance principles by the Company;
2. an overview of the Company relating to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. information relating to delegated authority, Internal Audit and External Audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as matters that are not permitted.

The Company's introduction program can take the form of a presentation, meeting, visit to the Company, review of documents, or other programs deemed appropriate by the Company.

In 2023, there aren't appointment of new members of the Board of Commissioners, so the Company introduction program aren't implemented.

Program Pendalaman Pengetahuan

Program Pendalaman Pengetahuan merupakan salah satu program penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program pendalaman pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan.

Tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti program pendalaman pengetahuan dengan rincian sebagai berikut:

In-depth Study Program

The In-depth Study Program is an important program so that the Board of Commissioners can always update information about the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the Board of Commissioners' duties. The Board of Commissioners is obliged to take part in In-depth study programs both at home and abroad to increase competence and knowledge.

In 2023, the Board of Commissioners has participated in an in-depth study program with the following details:

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Program	Waktu Period	Penyelenggara Organizer
Ngalim Sawego Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan Forum on Reinforcing Financial Services Sector Governance	9 Juni 2023 June 9, 2023	Dewan Audit, Otoritas Jasa Keuangan Audit Board, Financial Services Authority
	IFG *International Conference: Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19-20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
Ahmad Fuad Rahmany Komisaris Independen Independent Commissioner	Seminar Pencegahan *Fraud* di Perbankan dan Bagaimana Mengidentifikasi Pemalsuan Dokumen di Perbankan Melalui Grafonomi Seminar on Fraud Prevention in Banking and How to Identify Forged Documents in Banking Through Graphonomy	23 Maret 2023 March 23, 2023	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Agency (BSMR)
	IFG *International Conference: Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19 – 20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
Adi Suryanto* Komisaris Commissioner	*On Boarding Commissioner* Program Angkatan 5 On Boarding Commissioner Program Batch 5	20 Juli 2023 - 21 September 2023 July 20, 2023-September 21, 2023	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises
	IFG *International Conference: Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19 – 20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Program	Waktu Period	Penyelenggara Organizer
Indah Anggoro Putri Komisaris Commissioner	Konferensi Nasional 2023 "Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor *'Untapped Potential'* di Sektor Keuangan" National Conference 2023 "Towards a Sustainable Future: Exploring 'Untapped Potential' in the Financial Sector"	16 Mei 2023 May 16, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
Anton Mart Irianto** Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Become Competent and Responsible Commissioners	21-22 Juni 2023 June 21-22, 2023	Intipesan

* meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023
** berhenti menjabat pada tanggal 23 Agustus

* passed away on December 15, 2023
** ceases to serve on August 23, 2023

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap beberapa rencana yang ditetapkan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap beberapa hal yang menjadi bagian dari pengawasan Dewan Komisaris.

The Approval and Recommendation of the Board of Commissioners

Throughout 2023, the Board of Commissioners has given approval to several plans set by the Board of Directors. Moreover, the Board of Commissioners has also provided advice and recommendations on several matters which are part of the monitoring of the Board of Commissioners.

No	Nomor Surat Number of Letter	Tanggal Date	Perihal Subject
1	S-001/DK/I/2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	Tanggapan RKAP PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2023 Response to RKAP PT Asuransi Jasa Indonesia 2023
2	S-003/DK/I/2023	31 Januari 2023 January 31, 2023	Penyampaian Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 The Submission of Recommendations to the Board of Commissioners on the Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms for the 2022 Financial Year
3	S-004/DK/II/2023	6 Februari 2023 February 6, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester II Tahun 2022 PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia to the Report on the Realization of the 2022 Semester II Business Plan of PT Asuransi Jasa Indonesia
4	S-005/DK/II/2023	16 Februari 2023 February 16, 2023	Penyampaian Top 20% Talenta BoD-1 dan Hasil Evaluasi terhadap Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia The Submission of Top 20% of BoD-1 Talents and Evaluation Results for the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia
5	S-006/DK/II/2023	17 Februari 2023 February 17, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Usulan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia to the Proposal for Candidates for the Board of Commissioners of the Subsidiary PT Asuransi Jasa Indonesia
6	S-010/DK/III/2023	15 Maret 2023 March 15, 2023	Laporan Kinerja bulan Januari 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia Performance Report for January 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia
7	S-015/DK/V/2023	5 Mei 2023 May 5, 2023	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2022 The Submission of Report on the Monitoring Duties of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia for 2022
8	S-016/DK/V/2023	11 Mei 2023 May 11, 2023	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia The Proposed Appointment of a Public Accounting Firm or Kantor Akuntan Publik (KAP) to Implement Financial Report Audits and Implementation of the Annual Environmental Social Responsibility Program for Financial Year 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia
9	S-017/DK/V/2023	18 Mei 2023 May 18, 2023	Pertimbangan Peninjauan Remunerasi Direksi dan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia untuk Tahun 2023 Considerations for Reviewing the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia for 2023

No	Nomor Surat Number of Letter	Tanggal Date	Perihal Subject
10	S-018/DK/V/2023	19 Mei 2023 May 19, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Auditan Tahun Buku 2022 PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners to the Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year of PT Asuransi Jasa Indonesia
11	S-020/DK/V/2023	19 Mei 2023 May 19, 2023	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia Response to the Management Report for the First Quarter of 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia
12	S-021/DK/VI/2023	5 Juni 2023 June 5, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Usulan Calon Direksi Perusahaan Patungan PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia to the Proposal for Prospective Board of Directors of the Joint Venture Company of PT Asuransi Jasa Indonesia
13	S-022/DK/VI/2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun Buku 2022 The Proposed Decision of the General Meeting of Shareholders Approving the Annual Statement and Ratifying the Financial Statement of PT Asuransi Jasa Indonesia for the 2022 Financial Year
14	S-025/DK/VII/2023	6 Juli 2023 July 6, 2023	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP/KAP The Submission of Audit Committee Evaluation Results Report on the Implementation of Providing Audit Services on Annual Historical Financial Information by AP/KAP
15	S-027DK/VII/2023	27 Juli 2023 July 27, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester I Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners to the Management Report for the Second Quarter of 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia
16	S-029/DK/VIII/2023	9 Agustus 2023 August 9, 2023	Penyampaian Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penutupan Kantor Cabang Labuan Malaysia The Submission of Recommendations to the Board of Commissioners regarding the Plan to Close the Labuan Malaysia Branch Office
17	S-030/DK/VIII/2023	9 Agustus 2023 August 9, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners to the Management Report for the Second Quarter of 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia
18	S-031/DK/VIII/2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Persetujuan Penunjukan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah The Approval of the Appointment of the Director of Operations and Director of Finance of PT Asuransi Jasindo Syariah
19	S-033/DK/VIII/2023	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Penjualan Dua Aktiva Tetap kepada PT Jaminan Kredit Indonesia The Sale of Two Fixed Assets to PT Jaminan Kredit Indonesia
20	S-033A/DK/VIII/2023	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Persetujuan Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia The Approval of the Appointment of Corporate Secretary of PT Asuransi Jasa Indonesia
21	S-035/DK/VIII/2023	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan 2 (dua) Aktiva Tetap di Jambi dan Pekanbaru dengan Cara Penjualan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia The Write-off and Change Hand of 2 (two) Fixed Assets in Jambi and Pekanbaru by Sale to PT Jaminan Kredit Indonesia
22	S-037/DK/IX/2023	20 September 2023 September 20, 2023	Tindak Lanjut Temuan Satuan Pengawasan Internal (SPI), KAP dan Pemantauan Risiko Follow-up on Internal Audit Unit (SPI), KAP, and Risk Monitoring Findings
23	S-041/DK/X/2023	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pengadaan Perusahaan Pemeringkat The Procurement of Rating Companies
24	S-042/DK/XI/2023	1 November 2023 November 1, 2023	Persetujuan Surat Keputusan Direksi tentang Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Berwujud PT Asuransi Jasa Indonesia The Approval of the Board of Directors' Decision Letter regarding Cooperation in the Utilization of Tangible Fixed Assets of PT Asuransi Jasa Indonesia
25	S-043/DK/XI/2023	6 November 2023 November 6, 2023	Penyampaian Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 The Submission of Recommendations to the Board of Commissioners on the Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms for the 2023 Financial Year

No	Nomor Surat Number of Letter	Tanggal Date	Perihal Subject
26	S-044/DK/XI/2023	10 November 2023 November 10, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia The Response of the Board of Commissioners to the Management Report for the Third Quarter of 2023 of PT Asuransi Jasa Indonesia
27	S-046/DK/XI/2023	21 November 2023 November 21, 2023	Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Gedung Kantor Surabaya Darmo dengan Cara Penjualan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk The Write-off and Change Hand of Fixed Assets of the Surabaya Darmo Office Building by Sale to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
28	S-046/DK/XI/2023	21 November 2023 November 21, 2023	Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Gedung Kantor Surabaya Darmo dengan Cara Penjualan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk The Write-off and Change Hand of Fixed Assets of the Surabaya Darmo Office Building by Sale to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
29	S-049/DK/XII/2024	27 Desember 2023 December 27, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP PT Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2024 The Response of the Board of Commissioners to PT Asuransi Jasa Indonesia's RKAP for 2024
30	S-050/DK/XII/2023	29 Desember 2023 December 29, 2023	Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia The Submission of Evaluation Results to the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia
31	S-051/DK/XII/2023	29 Desember 2023 December 29, 2023	Penyampaian Selected Talent 20% Talenta BoD-1 The Submission of Selected Talent 20% BoD-1 Talent

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris melakukan pengawasan sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Manajemen Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham dan merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023. Berikut pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama Januari sampai dengan Desember 2023:

1. Jalannya kegiatan usaha di induk dan anak Perusahaan serta pelaksanaan mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada induk maupun mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah di anak Perusahaan dengan baik dan tuntas;
2. Manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan di induk dan anak Perusahaan untuk mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan *group* Perusahaan secara sehat;
3. Pengelolaan sumber daya, beban usaha dan belanja modal Perusahaan agar tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat, dan hati-hati dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan/atau aksi korporasi;
4. Pengelolaan kinerja anak Perusahaan untuk memastikan kecukupan kapasitas keuangan dan kemampuan memberikan nilai tambah kepada Perusahaan; dan
5. Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di Perusahaan dan anak Perusahaan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terbebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan *fraud*, penggunaan sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The Implementation of the Duties of the Board of Commissioners in 2023

The Board of Commissioners carries out monitoring in accordance with the Key Performance Indicator (KPI) which has been determined in the Management Contract of the Board of Commissioners with Shareholders which has been determined by the Shareholders and is part of the Company's 2023 Work Plan and Budget. The following is the monitoring which has been carried out by the Board of Commissioners during January until December 2023:

1. The Ongoing Awaiting of business activities in the parent and subsidiary companies as well as the implementation of mandates/assignments given by the Government to the parent company as well as mandates / assignments given by the Government to the subsidiaries properly and completely;
2. Risk management and corporate governance in the parent and subsidiary companies to be able to provide optimal contributions to improving the performance and healthy sustainability of the Company group;
3. The management of the Company's resources, operating expenses, and capital expenditure so that it continues to apply the principles of efficiency, accuracy, and prudence in planning and implementing work programs and/or corporate actions;
4. Managing the performance of subsidiaries to ensure adequate financial capacity and the ability to provide added value to the Company; and
5. Ensuring that all activities carried out in the Company and its subsidiaries always pay attention to the principles of good corporate governance, are free from actions that have the potential to give rise to fraud, using the Company's resources effectively and efficiently, and are in accordance with statutory provisions.

Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris melakukan *Management Walkthrough*/Kunjungan Lapangan sebagai berikut:

During 2023 the Board of Commissioners conduct Management Walkthroughs/Field Visits as follows:

No.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	*Representative Office* Representative Office	Tanggal Date
1	Ngalim Sawego	Solo	4 Mei 2023 May 4, 2023
2	Ngalim Sawego	Semarang	5 Mei 2023 May 5, 2023
3	Ngalim Sawego	Balikpapan	30 dan 31 Juli 2023 July 30 and 31, 2023
4	Ahmad Fuad Rahmany		
5	Adi Suryanto		
6	Indah Anggoro Putri		
7	Anton Mart Irianto		
8	Indah Anggoro Putri	Makassar	18 dan 19 Oktober 2023 October 18 and 19, 2023

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun Rapat Umum Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan remunerasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator Pencapaian Kinerja kepada Para Pemegang Saham.

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

The Performance Assessment of the Board of Commissioners

In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association as well as the General Meeting of Shareholders. Formal evaluation criteria are submitted openly to the members of the Board of Commissioners from the date of appointment.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and the performance of each Board of Commissioners individually are an integral part in determining remuneration and providing incentives for the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of each individual Board of Commissioners are one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the Board of Commissioners concerned. The results of the performance evaluation are a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

Key Performance Indicators for the Board of Commissioners are determined by the GMS based on proposals from the relevant Board of Commissioners. Performance Achievement Indicators are a measure of assessment of the successful implementation of duties and responsibilities for monitoring and providing advice by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the Articles of Association.

The Board of Commissioners is obliged to submit quarterly statements on the progress of the realization of Performance Achievement indicators to Shareholders.

The performance of the Board of Commissioners and the members of the Board of Commissioners is evaluated by Shareholders at the GMS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan penasihatan terhadap Direksi beserta jajarannya;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

The Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

Criteria for evaluating the individual performance of the members of the Board of Commissioners include the following:

1. The level of attendance at Board of Commissioners' meetings and meetings with existing committees;
2. Contribution in the monitoring and advisory process to the Board of Directors and their staff;
3. Involvement in certain assignments;
4. Compliance with the applicable laws and regulations and Company's policies;
5. Commitment to advancing the interests of the Government.

Realisasi target kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023
The Realization of the Board of Commissioners' performance targets for 2023

No	Indikator Indicator	Skor Realisasi Realization Score	Bobot Weight	Nilai Score
	2	3	4	5
1	Rapat Dewan Komisaris Internal dan Gabungan Internal and Joint Board of Commissioners' Meeting		20	
	A. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat A. Frequency of Meetings	1	20	20
2	Rapat Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham The Board of Commissioners' Meeting with Shareholders		20	
	B. Rata-Rata Kehadiran B. Average Attendance	1	20	20
3	Pemberian Persetujuan, Nasihat dan Saran, dan Laporan kepada Pemegang Saham Providing Approval, Advice, and Suggestions, and Reports to Shareholders		40	
	A. Persetujuan dan/atau Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi A. Approval and/or Response from the Board of Commissioners to the Board of Directors' Proposal	1	10	10
	B. Memberikan Nasihat atau Saran kepada Direksi B. Providing Advice or Suggestions to the Board of Directors	1	10	10
	C. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2023 C. The Preparation and Submission of the Board of Commissioners' 2023 Annual Work Plan and Budget	1	10	10
	D. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2023 D. The Preparation and Submission of the 2023 Board of Commissioners' Annual	0,5	10	5
4	Pembinaan Cabang/Perwakilan Branch/Representative Monitoring		10	
	Frekuensi Kunjungan Kerja atau Evaluasi Kantor Regional/Cabang The Frequency of Work Visits or the Evaluations of Regional/Branch Offices	1	10	10
5	Peningkatan Pengembangan Anggota Dewan Komisaris Increasing the Development of the Members of the Board of Commissioners		10	
	Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi The Implementation of the Competency Improvement	1	10	10
Jumlah Nilai Total Nilai				95

Realisasi KPI Individu Tahun 2023
Individual KPI Realization in 2023

No	Nama Name	Kehadiran Attendance			
		Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Gabungan Joint Meeting	
		Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
1	Ngalim Sawego	12	12	12	12
2	Ahmad Fuad Rahmany	12	12	12	12
3	Adi Suryanto	9	9	9	9
4	Indah Anggoro Putri	9	9	9	9
5	Anton Mart Irianto	7	7	7	7

No	Nama Name	Kunjungan ke Cabang Visits to Branch		Pengembangan Kompetensi Visits to Branch		% Kehadiran % Attendance	Total Nilai Individu Total Individual Score
		Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization		
1	Ngalim Sawego	3	3	1	1	100	100
2	Ahmad Fuad Rahmany	1	1	2	2	100	100
3	Adi Suryanto	1	1	1	1	100	100
4	Indah Anggoro Putri	2	2	1	1	100	100
5	Anton Mart Irianto	1	1	1	1	100	100

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris
The Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

No	Nama Komite Name of Committee	Nama Anggota Name of Member	Jabatan Position	Jumlah Rapat dalam Setahun Number of Meetings in a Year
1	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Ngalim Sawego	Ketua Chairman	18
		Alan Yazid	Anggota Member	
		Rahmi Nurjanah	Anggota Member	
2	Komite Audit Audit Committee	Ahmad Fuad Rahmany	Ketua Chairman	12
		Ahmad Syakir	Anggota Member	
		Bimo Wijayanto	Anggota Member	
3	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Ngalim Sawego	Ketua Chairman	1
		Indah Anggoro Putri	Anggota Member	
		Dita Adritia	Anggota Member	

Direksi

The Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perusahaan, Direksi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan eksternal baik dari Pemegang Saham maupun regulator, serta ketentuan internal mencakup Anggaran Dasar dan *Board Manual.*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
6. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Direksi memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan pada tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya dan *Board Manual* yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama No. SKB.04/SKB/XI/2022 tanggal 24 November 2022.

The Board of Directors is the Company's organ with authority and full responsibility for managing the Company for the interests of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives and representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors refers to Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, external regulations from both Shareholders and regulators, as well as internal regulations including the Articles of Association and Board Manual.

Legal Framework

1. The Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. The Regulation of the Minister of BUMN Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
4. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
5. Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies
6. The Articles of Association of PT Asuransi Jasa Indonesia

The Term of Office of the Board of Directors

The term of office of the members of the Board of Directors is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time.

Directors' Work Guidelines and Regulations

In carrying out their roles and functions in the Company, the Board of Directors has references and work guidelines as stated in the Company's Articles of Association on June 2, 1973, along with its amendments and the Board Manual which has been ratified through Joint Decision Letter Number SKB.04/SKB/XI/2022 dated November 24, 2022.

Board Manual Direksi Asuransi Jasindo antara lain berisikan:

1. Fungsi
2. Komposisi dan Persyaratan Direksi
3. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan Direksi
4. Independensi (Kemandirian) Direksi
5. Etika Jabatan
6. Tugas dan Kewajiban Direksi
7. Hak dan Wewenang
8. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi
9. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
10. Pendelegasian Wewenang di Antara Direktur Perusahaan
11. Pembagian Tugas Direksi
12. Rapat Direksi
13. Sekretaris Perusahaan
14. Satuan Pengawasan Internal
15. Komite Direksi
16. Penggunaan Saran Profesional

Asuransi Jasindo Board of Directors' Board Manual contains, among other things:

1. Function
2. The Composition and Requirements of the Board of Directors
3. The Board of Directors Introduction and In-depth Study Program
4. The Independence of the Board of Directors
5. Position Ethics
6. The Duties and Obligations of the Board of Directors
7. Rights and Authorities
8. The Determination of Company's Management Policies by the Board of Directors
9. Relationship with Subsidiaries and Affiliated Companies
10. The Delegation of Authority among Company's Board of Directors
11. The Division of the Board of Directors' Duties
12. The Board of Directors Meeting
13. Corporate Secretary
14. Internal Monitoring Unit
15. The Board of Directors Committee
16. The Use of Professional Advice

Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai *Board Manual* Asuransi Jasindo, anggota Direksi Perusahaan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Direktur Utama. Tahun 2023, anggota Direksi Perusahaan berjumlah 6 (enam) orang.

Susunan Direksi Asuransi Jasindo pada akhir tahun 2023 yaitu:

The Membership and Composition of the Board of Commissioners

According to the Asuransi Jasindo Board Manual, there are at least 3 (three) members of the Company's Board of Directors and one of them is the President Director. In 2023, there are 6 (six) members of the Company's Board of Directors.

The composition of the Asuransi Jasindo's Board of Directors at the end of 2023 is:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji Kepatuhan dan Kelayakan Fit & Proper Test	Periode Jabatan Term of Service
Andy Samuel	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-306/MBU/09/2021 dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 09/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/IX/2021 tanggal 10 September 2021 The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/09/2021 and the President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 09/SK-DIR/GMS-AP/BPUI/IX/2021 dated September 10, 2021	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-66/KDK.05/2021 tanggal 23 Desember 2021 The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-66/KDK.05/2021 dated December 23, 2021	2021-2026
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 The Decision of the Minister of SOE RI Number SK-79/MBU/03/2020 dated March 18, 2020	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-46/KDK.05/2020 tanggal 4 September 2020 The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-46/KDK.05/2020 dated September 4, 2020	2020-2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji Kepatuhan dan Kelayakan Fit & Proper Test	Periode Jabatan Term of Service
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-79/ MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 The Decision of the Minister of SOE RI Number SK-79/ MBU/03/2020 dated March 18, 2020	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-46/ KDK.05/2020 tanggal 4 September 2020 The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-46/ KDK.05/2020 dated September 4, 2020	2020-2025
Dewi Utari	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-255/ MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-304/MBU/11/2023 dan No. 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023 The Decision of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia Number SK-255/MBU/10/2018 dated October 5, 2018 The Decision of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia Number SK-304/MBU/11/2023 and Number 30/KepSir-PS/BPUI/XI/2023	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-7/KDK,05/2019 tanggal 15 Januari 2019 The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-7/ KDK,05/2019 dated January 15, 2019	2023-2028
Ocke Kurniandi	Direktur Operasional Director of Operations	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-257/ MBU/11/2022 dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 016/ KepSir-PS/BPUI/XI/2022, tanggal 16 November 2022 The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-257/MBU/11/2022 and the President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 016/KepSir-PS/ BPUI/XI/2022, dated November 16, 2022	Dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan In the process of the Financial Services Authority Feasibility Test	2022-2027
Jhon Harlen Butar – Butar	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-79/ MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 The Decision of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia Number SK-79/MBU/03/2020 dated March 18, 2020	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-51/KDK.05/2020 tanggal 4 September 2020 The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-51/KDK.05/2020 dated September 4, 2020	2020-2025

Independensi (Kemandirian) Direksi

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan

Directors' Work Guidelines and Regulations

In order for the Board of Directors to act as well as possible in the interests of the Company as a whole, the independence of the Board of Directors is an important factor that must be maintained. To maintain independence, the Company establishes the following provisions:

1. Apart from the Board of Directors, any other party is prohibited from acting or interfering in the management of the Company;
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors are prohibited from carrying out activities that could interfere with their independence in managing the Company

Tugas dan Kewajiban Direksi

1. Kebijakan Umum

   Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

   a. Sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya;
   b. Wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
   c. Mengelola Perusahaan dengan itikad baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan;
   d. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan standar operasional prosedur Perusahaan serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
   e. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten;
   f. Mematuhi tata peraturan internal Perusahaan;
   g. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan;
   h. Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
   i. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan;
   j. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
   k. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
   l. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
   m. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
   n. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
   o. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan berdasarkan anggaran dasar Perusahaan;
   p. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

The Duties and Obligations of the Board of Directors

1. General Policy

   The Board of Directors in carrying out their duties and obligations must always:

   a. As a Company's Organs with collegial duties and responsibilities, each member of the Board of Directors can carry out their duties and make decisions in accordance with their division of duties and authority;
   b. Must ensure effective, precise, and fast decision making and be able to act independently, not having interests that could interfere with his ability to carry out tasks independently and critically;
   c. Manage the Company in good faith in accordance with its authority and responsibility for the interests of the Company;
   d. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association, GMS decisions and the Company's standard operational procedures and ensure that all Company activities are in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association and GMS decisions;
   e. Implement Good Corporate Governance consistently;
   f. Comply with the Company's internal regulations;
   g. Carry out the management of the Company for the interests and objectives of the Company;
   h. Determine the Company's organizational structure complete with the implementation of its duties;
   i. Act as leader in the management of the Company;
   j. Maintain and manage the Company's assets;
   k. Take full responsibility in carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its goals and objectives;
   l. Represent the Company both inside and outside the court;
   m. Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner;
   n. Pay attention to input provided by the Board of Commissioners;
   o. Carry out all actions, both regarding the management and ownership of the Company's assets and bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, with restrictions based on the Company's articles of association;
   p. Must maintain a Special Register containing information regarding the share ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies as well as the date the shares were acquired;

q. Wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
r. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan;

s. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
t. Wajib menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
u. Wajib membentuk Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Aset Liabilitas, dan atau komite lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
   a. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:
      - Nama dan alamat Pemegang Saham;
      - Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, serta tiap-tiap klasifikasi saham apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
      - Jumlah yang disetor atas setiap saham;
      - Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia;
      - Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
      - Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
   b. Memberikan informasi material secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, konsisten dan bermanfaat yang memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan;
   c. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Pemegang Saham;
   d. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham apabila diminta oleh Pemegang Saham;
   e. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;

q. Must statement to the Company regarding his/her and/or his/her family's (wife/husband and children) share ownership in the Company and other companies, including any changes thereto;
r. One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person responsible for implementing and monitoring GCG in the Company;
s. Take full personal responsibility for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties;
t. Must establish an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets;

u. Must form an Investment Committee, Product Development Committee, Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee, and/or other committees in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Relationship with the General Meeting of Shareholders
   a. The Board of Directors is obliged to organize and keep a Register of Shareholders and documents related to the GMS in accordance with the provisions of the laws and regulations. The List of Shareholders contains:
      - Shareholder's name and address;
      - The amount, number, and date of acquisition of shares owned by the Shareholder, as well as each share classification if more than one share classification is issued;
      - Amount paid for each share;
      - The name and address of the individual or legal entity that has the right to pledge over shares or is the recipient of fiduciary security for shares, and the date of acquisition of the right to pledge or the date of registration of the fiduciary security;
      - Information on deposit of shares in forms other than money;
      - Other information deemed necessary by the Board of Directors.
   b. Providing accurate, accountable, timely, consistent, and useful material information that enables Shareholders to make decisions;

   c. Providing GMS materials to Shareholders which are provided free of charge to Shareholders;

   d. Providing GMS Minutes to Shareholders if requested by the Shareholders;
   e. Providing periodic statements according to the method and time in accordance with the applicable regulations as well as other statements whenever requested by Shareholders;

f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
g. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya;
h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
i. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa;
j. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
k. Meminta persetujuan RUPS apabila Perusahaan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya;
l. Meminta persetujuan RUPS apabila Perusahaan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perusahaan;
m. Meminta persetujuan RUPS apabila berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, masuk dalam kategori perbuatan Direksi yang memerlukan adanya persetujuan RUPS;
n. Mengajukan semua dokumen Perusahaan yang diperlukan dalam RUPS;
o. Membuat dan memelihara Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

3. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan tepat pada waktunya;
c. Mengupayakan tercapainya sasaran- sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP;
d. Menyiapkan pada waktunya RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan;
e. Mengupayakan tercapainya target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.

4. Terkait dengan Manajemen Risiko
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan;

f. Providing accountability and all information regarding the condition and Ongoing Awaiting of the Company, especially financial statements in the form of annual statements or other periodic statements in the manner and time specified in the Articles of Association and whenever requested by the GMS.
g. Signing the Annual Statement, in the event that a member of the Board of Directors does not sign the Annual Statement, the reasons must be stated;
h. Being accountable for the implementation of their duties to Shareholders through the GMS;
i. Summoning and holding an Annual GMS and/or Extraordinary GMS;
j. Announcing in 2 (two) Indonesian language daily newspapers published and widely/nationally circulated in the territory of the Republic of Indonesia regarding plans for merger, consolidation, takeover, separation, and change in the form of the Company's legal entity no later than 14 (fourteen) days before the summons for the GMS;
k. Requesting approval from the GMS if the Company wishes to buy back shares that have been issued, including the transfer;
l. Requesting approval from the GMS if the Company wishes to increase or decrease the amount of the Company's capital;
m. Requesting approval from the GMS if, based on the Company's articles of association, it falls into the category of actions of the Board of Directors that require approval from the GMS;
n. Submitting all required Company's documents at the GMS;
o. Creating and maintaining GMS Minutes and the Board of Directors' Meeting Minutes.

3. Related to Strategy and Work Plans
Preparing the Company's vision, mission, goals, strategy, and culture:
a. Striving for and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities;
b. Preparing Company's development plans on time;
c. Striving to achieve the long-term targets stated in the RJPP;
d. Preparing on time the RKAP which is an annual elaboration of the RJPP, to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
e. Striving to achieve short-term targets stated in the RKAP.

4. Related to Risk Management
a. Being responsible for implementing risk management policies and risk exposure taken by the Company;

b. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
c. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh *Group Head* Manajemen Risiko Perusahaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
e. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku;
f. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan secara berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
g. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya *Group* Manajemen Risiko Perusahaan;
h. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan untuk memastikan:
   - Keakuratan metodologi manajemen risiko;
   - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko;
   - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

5. Terkait dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi
   a. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan;
   b. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Developing written and comprehensive risk management policies and strategies including determining and approving overall risk limits, per risk type and per functional activity (business activity) of the Company. The preparation of risk management policies and strategies is carried out at least once a year or at a higher frequency in the event that there are changes in factors that significantly influence the Company's business activities;

c. Developing a risk management culture at all levels of the organization, including, among other things, adequate communication to all levels of the organization regarding the importance of effective internal control;
d. Being responsible for implementing risk management policies and risk exposure taken by the Company as a whole, including evaluating and providing direction for risk management strategies based on statements submitted by the Group Head of Company Risk Management and submitting accountability statements to the Board of Commissioners on a quarterly basis;

e. Evaluating and deciding on transactions that exceed the authority of Company officials one level below the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with the applicable internal policies and procedures;
f. Ensuring the increase in human resource competency related to the implementation of risk management, including through continuous education and training programs, especially those related to risk management systems and processes;

g. Ensuring that the risk management function has been implemented independently as reflected in, among other things, the existence of a Company Risk Management Group;
h. Carrying out periodic reviews with a frequency according to the Company's needs to ensure:

   - The accuracy of risk management methodology;
   - The adequacy of risk management information system implementation ;
   - The accuracy of policies, procedures, and the determination of risk limits.

5. Related to Business Ethics and Anti-Corruption
   a. Developing provisions governing reporting mechanisms for suspected irregularities in the Company;
   b. The members of the Board of Directors are prohibited from giving or offering or receiving, either directly or indirectly, anything of value to government officials and other parties who influence or as compensation for what they have done and other actions in accordance with the applicable laws and regulations.

6. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern
   Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan.

   Sistem Pengendalian Internal dapat yang efektif dapat:
   a. Memastikan seluruh aktivitas bisnis mematuhi peraturan perundang-undangan, pedoman *Good Corporate Governance* maupun kebijakan Perusahaan;
   b. Mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
   c. Menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya;
   d. Meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

   Sistem Pengendalian Intern harus dapat mendayagunakan informasi-informasi yang meliputi pada:
   a. Laporan Manajemen;
   b. Laporan Auditor Internal;
   c. Opini dan Laporan Auditor Eksternal;
   d. Laporan dan pendapat Aktuaris mengenai tingkat risiko dan premi;
   e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

   Pengendalian Internal terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:
   a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian;
   b. Identifikasi dan Penilaian Risiko;
   c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;
   d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;
   e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan.

   Terkait dengan kerangka pengendalian umum yang terdapat dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif yang mencakup:
   a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
      - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
      - Filosofi dan gaya manajemen;
      - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
      - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
      - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

6. Related to the Internal Control System
   An effective Internal Control System is an important component in management and is the basis for the Company's operational activities.

   An effective Internal Control System can:
   a. Ensure that all business activities comply with statutory regulations, Good Corporate Governance guidelines, and Company policies;
   b. Secure Company's investments and assets;
   c. Ensure the availability of reliable financial and managerial reporting;
   d. Increase the Company's compliance with the applicable laws and regulations;
   e. As well as reduce the risk of losses, irregularities, and the violations of prudential aspects.

   The Internal Control System must be able to utilize information which includes:
   a. Management Statements;
   b. Internal Auditor Statements;
   c. External Auditor Opinions and Statements;
   d. Actuary's statements and opinions regarding risk levels and premiums;
   e. Other matters deemed necessary.

   Internal Control consists of 5 (five) main elements which are interconnected with each other, which are as follows:
   a. Monitoring by Management and Control Culture;
   b. Risk Identification and Assessment;
   c. The Control Activities and Separation of Functions;
   d. Accounting, Information and Communication Systems;
   e. Monitoring Activities and Corrective Actions for Deviations / Weaknesses.

   In relation to the general control framework contained in the Internal Audit Function Implementation Standards, the Board of Directors is responsible for establishing an effective Internal Control System which includes:
   a. The Company's disciplined and structured internal control environment consists of:
      - Integrity, ethical values, and employee's competence;
      - Management philosophy and style;
      - The method used by management in carrying out its authority and responsibilities;
      - Organizing and developing human resources; and
      - Attention and direction provided by the Board of Directors.

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan;
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan;
e. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal termasuk fungsi Internal Audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

7. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, konsisten dan bermanfaat;
b. Informasi yang disampaikan berupa:
   - Informasi/data non publik yaitu informasi/data yang diberikan atau disampaikan untuk keperluan laporan pada otoritas moneter dan keuangan seperti Kementerian Keuangan juga antara intern unit baik yang bersifat reguler maupun insidentil;
   - Informasi/data publik yaitu informasi/data yang diberikan atau disampaikan sebagai laporan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi kewajiban rutin maupun yang bersifat keterbukaan informasi (insidentil).
c. Direksi harus mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*;

d. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direktur Perusahaan termasuk rahasia Perusahaan dan rahasia pemegang polis Perusahaan (Tertanggung) harus tetap dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok.

8. Terkait dengan Laporan-Laporan Perusahaan
Praktik *Good Corporate Governance* mensyaratkan dilakukannya pengungkapan secara akurat dan tepat waktu terhadap semua aspek yang berhubungan dengan Perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan Perusahaan.

b. Business risk assessment and management is a process for identifying, analysing, assessing, and managing relevant business risks;
c. Control activities, i.e., actions carried out in a process of controlling Company activities at each level and unit in the Company's organizational structure, including regarding authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of work performance, the division of tasks, and the security of Company's assets;
d. Information and communication system, i.e., a process of presenting statements regarding operational, financial activities, and compliance with the rules and regulations that apply to the Company;
e. Monitoring, i.e., the process of assessing the quality of the Internal Control System including the Internal Audit function at each level and unit of the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally.

7. Related to the Openness and Confidentiality of Information

a. The Board of Directors is obliged to disclose important information in the Annual Statement and Financial Statements to other parties in accordance with the applicable laws and regulations in an accurate, accountable, timely, consistent, and useful manner;

b. The information submitted is in the form of:
   - Non-public information/data, i.e., information/data provided or submitted for reporting purposes to monetary and financial authorities such as the Ministry of Finance as well as between internal units, both on a regular and incidental basis ;
   - Public information/data, i.e., information/data provided or submitted as a statement to Shareholders in order to fulfil routine obligations or in the nature of information disclosure (incidental).

c. The Board of Directors must disclose the extent to which the principles of Good Corporate Governance are implemented;
d. Confidential information obtained while serving as the Director of the Company, including Company's secrets and the secrets of the Company's policy holders (Insured), must be maintained in accordance with the applicable laws and regulations;
e. In terms of maintaining the confidentiality of Company's information, the Board of Directors is required to prioritize the interests of the Company rather than the interests of individuals or groups.

8. Related to Company's Statements
Good Corporate Governance practices require accurate, and timely disclosure of all aspects related to the Company, including the financial condition, performance, ownership, and management of the Company.

a. Laporan Tahunan.
b. Laporan Keuangan Perusahaan terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Triwulanan.

Laporan Keuangan Perusahaan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Hubungan dengan *Stakeholders*
   a. Memastikan terjaminnya hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pengguna jasa, pemasok, pelanggan dan *stakeholders* lainnya;
   b. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya;
   c. Memastikan Perusahaan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan;
   d. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
   e. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
   f. Dalam melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
   g. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/ *harassment*).

10. Terkait Sistem Akuntansi dan Keuangan
    a. Menyusun sistem akuntansi sesuai berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
    b. Memastikan keandalan data yang mencakup kelengkapan, akurasi, klasifikasi dan otorisasi yang memadai sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu, tepat guna dan bebas dari salah saji material.
    c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh.

a. Annual statement.
b. Company's Financial Statements consist of Annual Financial Statements, Mid-Annual Financial Statements, and Quarterly Statements.

The Company's Financial Statements are submitted to Shareholders and Regulators in accordance with the applicable regulations.

9. Relations with Stakeholders
   a. Ensuring that stakeholders' rights are guaranteed based on the applicable laws and regulations and/or agreements made by the Company with employees, service users, suppliers, customers, and other stakeholders;
   b. Ensuring the Company carries out its social responsibilities;
   c. Ensuring that the Company pays attention to the interests of various interested parties;
   d. Ensuring that the Company's assets and business locations and other facilities comply with the applicable laws and regulations regarding environmental preservation, occupational health, and safety;
   e. In hiring, determining salary levels, providing training, determining career paths, and determining other work requirements for employees, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, physical disability or other protected special circumstances. by statutory regulations;
   f. In entering into an agreement (PKB) with employees relating to employee income which is not required by or exceeds the provisions of statutory regulations, it must obtain approval from the GMS first;
   g. The Board of Directors is obliged to provide a work environment that is free from all forms of pressure (harassment).

10. Related to Accounting and Financial Systems
    a. Developing an accounting system based on the principles of the applicable Financial Accounting Standards.
    b. Ensuring data reliability which includes completeness, accuracy, classification, and adequate authorization so that financial statements are produced on time, are effective and free from material misstatement.
    c. Organizing and maintaining company's bookkeeping and administration to produce orderly bookkeeping, sufficient working capital with efficient capital costs, good and strong balance sheet structure.

Syarat minimum modal bagi perusahaan asuransi mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

11. Terkait dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

    a. Menetapkan Pedoman APU-PPT dan mengawasi pengkinian Pedoman APU- PPT agar sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
    b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
    c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
    d. Menyetujui program kerja Unit Kerja Khusus (UKK) dalam menerapkan APU-PPT;
    e. Memantau pelaksanaan tugas UKK;
    f. Memastikan bahwa Pedoman APU-PPT telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten;
    g. Menganalisa dan menyetujui laporan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh UKK kepada PPATK.
    h. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala;
    i. Terhadap hal-hal yang disebutkan sebelumnya Direksi dapat memberikan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
    Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Anggota Direksi dilarang:

    a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
    b. Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
    c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
    d. Memenuhi permintaan Pemegang Saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

Minimum capital requirements for insurance companies refer to Financial Services Authority Regulation Number 71/PFSA.05/2016 concerning the Financial Health of Insurance Companies and Reinsurance Companies as well as Financial Services Authority Circular Letter Number 24/PFSA.05/2017 concerning Guidelines for Calculating Risk-Based Minimum Capital Amounts For Insurance Companies and Reinsurance Companies.

11. Related to the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing or Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Program

    a. Establishing APU-PPT Guidelines and supervise the updating of APU-PPT Guidelines so that they are in line with changes and developments in products, services and technology in the financial services sector and in accordance with developments in Money Laundering and/or Terrorism Financing modes;
    b. Proposing strategic written policies and procedures regarding the implementation of the APU and PPT program to the Board of Commissioners;
    c. Establishing a special work unit and/or appoint officials responsible for implementing the APU and PPT programs;
    d. Approving the work program of the Special Work Unit or Unit Kerja Khusus (UKK) in implementing APU-PPT;
    e. Monitoring the implementation of UKK duties;
    f. Ensuring that the APU-PPT Guidelines have been implemented and implemented by the relevant work units consistently;
    g. Analysing and approving suspicious transaction statements that have been prepared by UKK to PPATK.
    h. Ensuring that all employees, especially employees from related work units and new employees, have attended training related to the implementation of APU and PPT programs on a regular basis;
    i. Regarding the matters mentioned previously, the Board of Directors can delegate authority in accordance with the applicable regulations.

12. Related to Other Duties and Obligations
    Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.

13. The members of the Board of Directors are prohibited from:

    a. Carrying out transactions that have a conflict of interest with the Company's activities;
    b. Taking advantage of his/her position in the Company for personal, family and/or other party interests which may harm or reduce the Company's profits;
    c. Taking and/or receiving personal benefits from the Company other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision; and
    d. Fulfilling Shareholder requests related to the Company's operational activities other than those stipulated in the GMS

Pembagian Tugas Direksi

Kebijakan Umum

1. Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara Direktur. Meskipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perusahaan (seluruh Direktur secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan karenanya wajib mengawasi pelaksanaannya.

2. Prosedur Terkait dengan Pembagian Tugas Direksi

   Job description merupakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap Direktur. Kewenangan menetapkan *job description* ada pada RUPS.

   Apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan maka penetapan *job description* dilakukan oleh Direksi sendiri melalui Surat Keputusan Direksi.

3. Direktur Utama

   Hak dan Wewenang

   a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
   b. Menetapkan wakil/kuasanya dengan menggunakan Surat Kuasa, atau surat penunjukkan kepada Direktur lain sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan Perusahaan maupun kepemilikan di anak perusahaan;
   d. Direktur Utama untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa. Wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
   e. Direktur Utama berhak menyelenggarakan Rapat Direksi setiap waktu apabila dipandang perlu.

   Tugas dan Fungsi

   a. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan;
   b. Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh;
   c. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan;
   d. Menerapkan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan
   e. Melakukan supervisi dan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh anggota Direksi;
   f. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

The Division of the Board of Directors' Duties

General Policy

1. The Board of Directors serves collectively, but to be more efficient and effective in carrying out their duties, tasks are divided among the Board of Directors. Even though there has been a division of duties, the Board of Directors as an organ of the Company (all Directors collectively) has the authority to manage tasks specifically entrusted to a Director and is therefore obliged to supervise their implementation.

2. Procedures related to the distribution of duties of the Board of Directors

   Job description is the division of duties, authority, and responsibilities of each Director. The authority to determine job descriptions rests with the GMS.

   If this authority is not exercised, the determination of the job description is carried out by the Directors themselves through a Board of Directors' Decision Letter.

3. President Director

   Rights and Authorities

   a. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court;
   b. Determining the representative/agent using a Power of Attorney, or a letter of appointment to another Director in accordance with the applicable regulations;
   c. Binding the Company to other parties and other parties to the Company, as well as carrying out all actions, both regarding the management of the Company and ownership in subsidiaries;
   d. The President Director for certain actions has the right to appoint one or more people as his/her representative or proxy by giving him/her authority over certain actions as regulated in a power of attorney. Such authority must be exercised in accordance with the Company's Articles of Association;
   e. The President Director has the right to convene a Board of Directors Meeting at any time if deemed necessary

   Duties and Functions

   a. Planning, developing, and establishing general Company's policies based on the principles of economy, effectiveness, and efficiency, in accordance with the Company's vision, mission, and objectives;
   b. Directing, developing, and establishing overall Company's management strategies;
   c. Controlling and evaluating all Company's activities;
   d. Applying governance principles in every Company's business activity;
   e. Monitoring and coordinating the activities and implementation of duties of all Board of Directors;
   f. Preparing the Company's Long Term Plan;

g. Menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
h. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
i. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
j. Menyelesaikan Laporan Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup;
k. Menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
l. Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendalian Intern;
m. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh *Group* Satuan Pengawasan Internal;
n. Memimpin dan memutuskan kegiatan yang bersifat strategis dalam kepengurusan dan pengembangan Perusahaan dengan pembatasan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.

Tanggung Jawab

a. Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. Direktur Utama bersama anggota Direksi lainnya bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
c. Melakukan supervisi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana tersebut di dalam kebijakan struktur organisasi perusahaan yang berlaku.

Direktur Bisnis Strategis

a. Direktur Bisnis Strategis bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Bisnis Strategis, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Merencanakan dan menetapkan kebijakan bisnis strategis untuk lini bisnis yang berada di Direktorat Bisnis Strategis;
   - Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusahaan bidang bisnis strategis;
   - Mengendalikan tercapainya kebijakan bisnis strategis yang telah ditetapkan

g. Submitting the Company's Long Term Plan which has been signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval;
h. Preparing the Company's Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;
i. Submitting the Company's Work Plan and Budget which have been signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval;
j. Completing the Annual Statement no later than 6 (six) months after the Company's financial year closes;
k. Submitting the signed Annual Statement to the GMS for approval;
l. Preparing general Internal Control System policies;
m. Must pay attention to and immediately take the necessary steps regarding everything stated in every audit statement prepared by the Internal Audit Unit Group;
n. Leading and deciding on strategic activities in the management and development of the Company with restrictions based on the Company's Articles of Association;
o. Carrying out other tasks determined by the GMS

Responsibilities

a. The President Director is fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court;
b. The President Director and other Board of Directors are fully personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties;
c. Monitoring work units under the monitoring of the President Director as stated in the applicable Company's Organizational structure policy.

Strategic Business Director

a. The Strategic Business Director is responsible for the overall implementation of the functions of the Strategic Business Directorate, which include but are not limited to:
   - Plan and establish strategic business policies for business lines in the Strategic Business Directorate;
   - Direct and coordinate the implementation of the Company's strategy in strategic business areas;
   - Control the achievement of strategic business policies that have been established

b. Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Strategis sebagaimana tersebut di dalam struktur organisasi Perusahaan yang berlaku;
c. Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam peraturan Perusahaan.

Direktur Pengembangan Bisnis

a. Direktur Pengembangan Bisnis bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Pengembangan Bisnis, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan bisnis untuk lini bisnis yang berada di Direktorat Pengembangan Bisnis;
   - Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusahaan untuk lini bisnis Direktorat Pengembangan Bisnis;
   - Mengendalikan tercapainya target Perusahaan untuk Direktorat Pengembangan Bisnis.
b. Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur Pengembangan Bisnis sebagaimana tersebut di dalam struktur organisasi Perusahaan yang berlaku;
c. Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam peraturan Perusahaan.

Direktur Operasional

a. Direktur Operasional bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Operasional, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Merencanakan dan menetapkan kebijakan di Direktorat Operasional;
   - Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusahaan pada Direktorat Operasional;
   - Mengendalikan tercapainya kebijakan Direktorat Operasional yang telah ditetapkan.
b. Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur Operasional sebagaimana tersebut di dalam Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku;

b. Supervise and professionally develop work units under the monitoring of the Strategic Business Director as stated in the applicable Company's Organizational structure;
c. Participate in preparing the Annual Statement, Company's Long Term Plan, and Company's Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;
d. Carry out other duties in the Board of Director's division of duties as determined by the President Director (based on the authority delegated by the GMS) and regulated in Company's regulations.

The Director of Business Development

a. The Director of Business Development is responsible for the overall implementation of the functions of the Directorate of Business Development, which include but are not limited to:
   - Plan and establish business development policies for business lines within the Business Development Directorate;
   - Direct and coordinate the implementation of the Company's strategy for the Business Development Directorate's business lines;
   - Control the achievement of Company's targets for the Business Development Directorate.
b. Supervise and professionally develop work units under the monitoring of the Director of Business Development as stated in the applicable Company's Organizational structure;
c. Participate in preparing the Annual Statement, Company's Long Term Plan and Company's Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;
d. Carry out other tasks in the Board of Director's division of duties as determined by the President Director (based on the authority delegated by the GMS) and regulated in Company's regulations.

The Director of Operations

a. The Director of Operations is responsible for the overall implementation of the Operations Directorate's functions, which include but are not limited to:
   - Plan and establish policies in the Directorate of Operations;
   - Direct and coordinate the implementation of the Company's strategy in the the Directorate of Operations;
   - Control the achievement of the established Operational Directorate policies.
b. Monitoring and professionally developing work units under the monitoring of the Director of Operations as stated in the applicable Company's Organizational Structure;

c. Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam peraturan Perusahaan.

Direktur Keuangan dan Investasi

a. Direktur Keuangan & Investasi bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat Keuangan & Investasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Merencanakan dan menetapkan kebijakan di Direktorat Keuangan & Investasi;
   - Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pada Direktorat Keuangan & Investasi;
   - Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah ditetapkan.
b. Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur Keuangan & Investasi sebagaimana tersebut di dalam struktur organisasi Perusahaan yang berlaku;
c. Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam peraturan Perusahaan.

Direktur SDM dan Umum

a. Direktur SDM & Umum bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi Direktorat SDM & Umum, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Merencanakan dan menetapkan kebijakan Perusahaan di Direktorat SDM & Umum;
   - Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusahaan di Direktorat SDM & Umum;
   - Mengendalikan tercapainya kebijakan di Direktorat SDM & Umum yang telah ditetapkan.
b. Melakukan perubahan struktur organisasi dan transformasi budaya Perusahaan, termasuk budaya *Governance, Risk, & Compliance*;
c. Meningkatkan ketersediaan talenta dalam rangka suksesi jabatan;
d. Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yang berada di bawah supervisi Direktur SDM & Umum sebagaimana tersebut di dalam struktur organisasi Perusahaan yang berlaku;

c. Participating in preparing the Annual Statement, Company's Long Term Plan, and Company's Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;

d. Carrying out other tasks in the Board of Director's division of duties as determined by the President Director (based on the authority delegated by the GMS) and regulated in Company's regulations.

Director of Finance & Investment

a. The Director of Finance & Investment is responsible for the overall implementation of the functions of the Directorate of Finance & Investment, which include but are not limited to:
   - Planning and establishing policies in the Finance & Investment Directorate;
   - Directing and coordinating strategy implementation in the Finance & Investment Directorate;
   - Controlling the achievement of established financial and reporting policies.
b. Monitoring and professionally developing work units under the monitoring of the Director of Finance & Investment as stated in the applicable Company's Organizational structure;
c. Participating in preparing the Annual Statement, Company's Long Term Plan and Company Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;
d. Carrying out other tasks in the Board of Director's division of duties as determined by the President Director (based on the authority delegated by the GMS) and regulated in Company's regulations.

The Director of HR & General Affairs

a. The Director of Human Resources & General Affairs is responsible for the overall implementation of the functions of the Directorate of Human Resources & General Affairs, which include but are not limited to:
   - Plan and establish Company's policies in the HR & General Directorate;
   - Direct and coordinate the implementation of the Company's strategy in the HR & General Directorate;
   - Control the achievement of established policies in the HR & General Directorate.
b. Carrying out changes to the organizational structure and transformation of the Company's culture, including Governance, Risk, & Compliance culture;
c. Increasing the availability of talent in the context of position succession;
d. Monitoring and professionally developing work units under the monitoring of the Director of Human Resources & General Affairs as stated in the applicable Company's Organizational structure;

e. Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam peraturan Perusahaan

e. Participating in preparing the Annual Statement, Company's Long Term Plan and Company's Work Plan and Budget which is an annual elaboration of the Company's Long Term Plan;

f. Carrying out other duties in the Board of Director's division of duties as determined by the President Director (based on the authority delegated by the GMS) and regulated in Company's regulations

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional atau rapat yang bersifat wacana. Direksi juga dapat mengadakan rapat di luar jadwal berdasarkan permintaan:

1. Seorang atau lebih Direktur;
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
3. Permintaan tertulis dari Pemegang Saham;

Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan kepada para anggota Direksi dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.

Frekuensi Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 31 (tiga puluh) kali Rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat bersama Dewan Komisaris. Adapun frekuensi kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

The Board of Directors' Meeting

The Board of Directors' Meeting Policy

The Board of Directors is obliged to hold regular Board of Directors' Meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month to discuss strategic, operational matters, or meetings in the nature of discourse. The Board of Directors may also hold unscheduled meetings upon request:

1. One or more Directors;
2. Written request from one or more members of the Board of Commissioners;
3. Written request from Shareholders;

Invitations to the Board of Directors' Meetings must be delivered to the members of the Board of Directors by any means no later than 3 (three) calendar days before the meeting or within a shorter time in urgent circumstances. If all members of the Board of Directors are present or represented, prior summons is not required.

The Frequency of Board of Directors' Meetings

Throughout 2023, the Board of Directors has held 31 (thirty) Board of Directors' meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Commissioners. The frequency of attendance of the Board of Directors at meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meeting			Rapat Bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Andy Samuel	Direktur Utama President Director	31	31	100	12	11	92
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	31	31	100	12	11	92
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	31	30	97	12	12	100
Ocke Kurniandy	Direktur Operasional Director of Operations	31	31	100	12	11	92
Bayu Rafisukmawan*	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	8	8	100	4	4	100
Jhon Harlen Butar Butar**	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	13	13	100	5	5	100

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meeting			Rapat Bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Linggarsari Suharso***	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	25	25	100	9	9	100
Dewi Utari****	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	4	4	100	3	3	100

* berhenti menjabat pada tanggal 3 April 2023
** mulai menjabat pada tanggal 1 Agustus 2023
*** berhenti menjabat pada tanggal 5 Oktober 2023
**** mulai menjabat pada tanggal 13 November 2023

* ceases office on April 3, 2023
** takes office on August 1, 2023
*** ceases office on October 5, 2023
**** takes office on November 13, 2023

Agenda Rapat Internal Direksi
Internal Board of Directors Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	4 Januari 2023 January 4, 2023	*Talent Mobility*
2	24 Januari 2023 January 24, 2023	*Talent mobility*
3	18 Januari 2023 January 18, 2023	1. Pedoman Penetapan Premi 2. Rapat Teknis Penetapan RKAP 2023 PT Asuransi Jasindo Syariah 3. Kinerja per Desember 2022 1. Guidelines for Determining Premiums 2. Technical Meeting to Determine the 2023 RKAP of PT Asuransi Jasindo Syariah 3. The performance as of December 2022
4	3 Februari 2023 February 3, 2023	Pembayaran Insentif Incentive Payments
5	9 Februari 2023 February 9, 2023	Mutasi dan promosi karyawan Employee's transfers and promotions
6	22 Februari 2023 February 22, 2023	1. *Update* audit PWC 2. *Update* progress audit rekomendasi OJK 3. Permohonan persetujuan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Berwujud 4. Tindak Lanjut Restrukturisasi Asuransi Kredit 2023 1. PWC audit update 2. The progress update of FSA's recommended audit 3. Request for approval for the issuance of a Board of Directors' Decision Letter concerning Guidelines for the Utilization of Tangible Fixed Assets 4. Follow-up to the 2023 Credit Insurance Restructuring
7	21 Maret 2023 March 21, 2023	1. *Update* audit PWC atas Laporan Keuangan 2022 2. Permohonan persetujuan atas cascading KPI Perusahaan ke seluruh Direksi 3. Realisasi KPI Korporat 2022 4. Pembahasan materi Rapat Kinerja Februari 2023 dengan BPUI 1. Update on PWC's audit of the 2022 Financial Statement 2. Request for approval of the Company's cascading KPI to all Board of Directors 3. The Realization of Corporate KPI 2022 4. The Discussion of material for the February 2023 Performance Meeting with BPUI
8	24 Maret 2023 March 24, 2023	1. Permohonan persetujuan atas *cascading* KPI Perusahaan ke seluruh Direksi 2. Jasindo Bangkit Run 10K & 5K 1. Request for approval of the Company's cascading KPI to all Board of Directors 2. Jasindo Bangkit Run 10K & 5K
9	5 April 2023 April 5, 2023	1. *Surrender of License* KC Labuan 2. Laporan dan Rencana Program AKHLAK 3. Pelaksana Tugas Direksi 1. The Surrender of License KC Labuan 2. AKHLAK Program Report and Plan 3. Acting Board of Directors
10	17 April 2023 April 17, 2023	1. *Cancel & Refund* BPD NTT 2. *Update* perihal *Officer Development Program* Angkatan I 2023 1. Cancel & Refund BPD NTT 2. Update regarding the Officer Development Program Batch I 2023

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	27 April 2023 April 27, 2023	1. Usulan penyesuaian gaji karyawan karena dampak implementasi sistem *grade* 2. Usulan tunjangan bagi karyawan *Group* Teknologi Informasi sebagai upaya *employee retention* 1. Proposed adjustments to employee salaries due to the impact of implementing the grade system 2. Proposed allowances for Information Technology Group employees as an employee retention effort
12	12 Mei 2023 May 12, 2023	Peringatan HUT Jasindo ke-50 The Commemoration of Jasindo's 50th anniversary
13	17 Mei 2023 May 17, 2023	Pembahasan Materi Rapat Kinerja April 2023 dengan BPUI The Discussion of April 2023 Performance Meeting Materials with BPUI
14	6 Juni 2023 June 6, 2023	1. Permohonan Persetujuan *Standard Operating Procedure* (SOP) Group MRP 2. Keputusan Kasus Pontianak 1. Request for Approval of the MRP Group Standard Operating Procedure (SOP). 2. Pontianak Case Decision
15	12 Juni 2023 June 12, 2023	Pengadaan Asuransi Kesehatan Periode 2023-2025 The Procurement of Health Insurance for the 2023-2025 Period
16	13 Juni 2023 June 13, 2023	1. Persetujuan *Draft* Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG Group 2. Pelaksana Tugas Direksi 1. The Approval of the Corporate Charter Draft of the IFG Group Financial Conglomerate 2. Acting Board of Directors
17	19 Juni 2023 June 19, 2023	Pengajuan Izin Prinsip Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia beserta Keluarga periode tahun 2023-2025 The Submission of Principle Permit to Procure Health Insurance Service Providers for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees of PT Asuransi Jasa Indonesia and their Families for the period 2023-2025
18	25 Juli 2023 July 25, 2023	1. Usulan Rekomendasi Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan Komersil 2. *Update case* Pontianak 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester I Tahun 2023 4. Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 1. Proposed Recommendations for Commercial Health Insurance Service Providers 2. Pontianak case update 3. 2023 Semester I Business Plan Realization Report 4. Quarter II Management Report 2023
19	7 Agustus 2023 August 7, 2023	1. Audit BPK (Progress Penyampaian Dokumen dan Persiapan Pemaparan) 2. Permohonan Izin Pelaksanaan Proses Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan 2 (Dua) Aktiva Tetap kepada PT Jamkrindo 1. BPK Audit (Progress of Document Submission and Presentation Preparation) 2. Application for Permit to Implement the Write-Off and Change Hand Process of 2 (Two) Fixed Assets to PT Jamkrindo
20	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Permohonan Izin Pelaksanaan Proses Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan 2 (Dua) Aktiva Tetap kepada PT Jamkrindo Application for Permit to Implement the Write-Off and Change Hand Process of 2 (Two) Fixed Assets to PT Jamkrindo
21	14 Agustus 2023 August 14, 2023	1. Profil dan Kinerja Perusahaan Penyertaan di bawah Dapen, YKK, dan Kopkar 2. Kebijakan Hierarki Peraturan Perusahaan 3. Pemenuhan Ketentuan PER-3/MBU/03/2023 terkait Rangkap Jabatan Anggota Direksi 1. The Profile and Performance of Participating Companies under Dapen, YKK, and Kopkar 2. Company's Regulatory Hierarchy Policy 3. The fulfilment of the provisions of PER-3/MBU/03/2023 regarding the concurrent positions of the members of the Board of Directors
22	22 Agustus 2023 August 22, 2023	*Case* Pontianak Pontianak Case
23	18 September 2023 September 18, 2023	1. Perubahan Proses Bisnis Pasca Reorganisasi 2. Pembahasan Perhitungan Opening Balance Sheet 3. *Case* Hukum: a. Dharma Lautan Utama, b. Ambon Natsepa, c. PT Lintas Teknologi Indonesia 1. Post-Reorganization Business Process Changes 2. The Discussion of Opening Balance Sheet Calculations 3. Legal Case : a. Primary Ocean Dharma, b. Ambon Natsepa, c. PT Lintas Teknologi Indonesia
24	27 September 2023 September 27, 2023	Pembahasan *Preliminary Opening Balance Sheet* The Discussion of Preliminary Opening Balance Sheet
25	2 Oktober 2023 October 2, 2023	1. *Progress* Tindak Lanjut Audit Internal dan *Internal Control Report* Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta Pemeriksaan BPK RI 2. Permohonan Persetujuan Pembebasan Denda Keterlambatan Pembayaran Sewa PT Asuransi Jasindo Syariah 1. The Progress of Internal Audit Follow-up and Internal Control Report Financial Statement for Financial Year 2022, as well as Audit of BPK RI 2. Application for the Approval of the Exemption of Fines for Late Payment of Rent for PT Asuransi Jasindo Syariah
26	16 Oktober 2023 October 16, 2023	1. Persetujuan *Early Warning Dashboard* KBUMN periode September 2023 2. *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia (Dapen Jasindo) 1. The Approval of the KBUMN Early Warning Dashboard for the period September 2023 2. Roadmap for the Restructuring Pension Funds of PT Asuransi Jasa Indonesia (Dapen Jasindo)

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
27	23 Oktober 2023 October 23, 2023	1. Persetujuan terkait Penyehatan Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia 2. Persetujuan *First Draft* RKAP Tahun 2024 1. Approval regarding Restructuring Pension Funds of PT Asuransi Jasa Indonesia 2. The Approval of the First Draft RKAP 2024
28	6 November 2023 November 6, 2023	*Talent Mobility*
29	13 November 2023 November 13, 2023	1. Permohonan Persetujuan Sewa Aset (Wisma LPPA Cisarua & Gedoeng Jasindo Kota Tua) 2. Permohonan Persetujuan Pembebasan Denda Keterlambatan Pembayaran Denda PT Asuransi Jasindo Syariah 1. Application for Asset Lease Approval (Wisma LPPA Cisarua & Gedoeng Jasindo Kota Tua) 2. Application for the Approval of the Exemption of Fines for the Late Payment of PT Asuransi Jasindo Syariah Fines
30	30 November 2023 November 30, 2023	1. Pembahasan *Draft* Kebijakan *Underwriting* Seluruh *Class of Business* 2. *Treaty Renewal* 2024 1. The Discussion of Underwriting Policy Draft for All Classes of Business 2. Treaty Renewal 2024
31	27 Desember 2023 December 27, 2023	Pengisian Pejabat Struktural The Filling of Structural Officials

Program Pengenalan Direksi

Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan.

Tanggung jawab untuk melakukan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan;
2. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.

Program Pendalaman Pengetahuan

Program Pendalaman Pengetahuan menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perusahaan di bidang perasuransian dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Ketentuan tentang Program Pendalaman Pengetahuan bagi Direksi sebagai berikut:

1. Program Pendalaman Pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi;

Board of Directors' Introductory Program

The Members of the Board of Directors who are appointed for the first time must be given an introductory program regarding the Company.

The responsibility for carrying out the induction program lies with the Corporate Secretary or anyone who carries out the functions of Corporate Secretary.

The introductory program includes:

1. The implementation of good corporate governance principles by the company;
2. An overview of the company relating to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and matters that are not permitted.

The Company's introductory program can take the form of a presentation, meeting, visit to the Company, review of documents, or other programs deemed appropriate by the Company.

In-depth Study Program

The In-depth Study Program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Company's core business in the insurance sector and always be ready to anticipate them for the Company's sustainability and progress.

Provisions regarding the In-depth Study Program for the Board of Directors are as follows:

1. The In-depth Study Program is implemented in order to increase the effectiveness of the Board of Directors;

2. Rencana untuk melakukan Program Pendalaman Pengetahuan harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
3. Setiap anggota Direksi yang mengikuti Program Pendalaman Pengetahuan seperti seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyiapkan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan;
4. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi;
5. Materi yang diterima dari Program Pendalaman Pengetahuan harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia apabila suatu saat dibutuhkan.

Tahun 2023, Direksi Asuransi Jasindo telah mengikuti Program Pendalaman Pengetahuan dengan rincian sebagai berikut:

2. The plan to implement the Knowledge Enhancement Program must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors;
3. Every Director who takes part in an In-depth study Program such as seminars and/or training is required to prepare a presentation to other Directors in order to share information and knowledge;
4. The relevant Board of Directors member is responsible for preparing a report on the implementation of the Knowledge Enhancement Program. This report is submitted to the Board of Directors;
5. The materials received from the Knowledge Enhancement Program must be neatly documented in a separate section. The responsibility for documentation lies with the Corporate Secretary and must be available whenever needed.

In 2023, the Board of Directors of Asuransi Jasindo has participated in Knowledge Deepening Program with details as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Program Pendidikan dan Pelatihan** Program Pendidikan dan Pelatihan	**Waktu** Waktu	**Penyelenggara** Penyelenggara
Andy Samuel Direktur Utama President Director	Seminar Internasional AAMAI: Strategi Bisnis Asuransi AAMAI International Seminar: Insurance Business Strategy	20 Maret 2023 March 20, 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
	Webinar Aktualisasi Pekerja Perempuan Dalam Menghadapi Tantangan Kepemimpinan Masa Depan Webinar on the Actualization of Internal Women Workers in Facing the Challenges of the Future Leadership	10 Mei 2023 May 10, 2023	LAN RI
	Konferensi Nasional 2023 "Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor *Untapped Potential* di Sektor Keuangan" 2023 National Conference "Towards a Sustainable Future: Exploring Untapped Potential in the Financial Sector"	16 Mei 2023 May 16, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	The 13th Indonesia HR Summit "Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action"	19 -20 Juni 2023 June 19 -20, 2023	The Indonesia HR Summit (IHRS)
	Indonesia Re *International Conference* (IIC) 2023	4 - 5 Juli 2023 July 4 - 5, 2023	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
	Webinar How to Develop Risk Management Strategy in Operation Level How to Develop Risk Management Strategy in Operation Webinar	6 Juli 2023 June 6, 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
	Webinar GCG Berbasis Referensi Praktik Terbaik Nasional & Global Terkini GCG Webinar Based on Latest National & Global Best Practice	16 Agustus 2023 August 16, 2023	PT Tugu Reasuransi Indonesia
	Indonesia Insurance Summit 2023: Stakeholders Transformation Towards Strengthen to The Insurance Industry	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
	IFG *International Conference 2023: Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 June 19 -20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	Webinar Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Webinar on Strengthening National Values	25 September 2023 September 25, 2023	IFG Corporate University Corpu dan Lemhanas
	The 27th Indonesia Rendezvous 2023	11 - 14 Oktober 2023 October 11 - 14, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Insurance Company Risk Management	15 Desember 2023 December 15, 2023	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Syah Amondaris Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	*Fundamental Governance, Risk, and Compliance For Executive*	17 - 18 Mei 2023 May 17 - 18, 2023	Strategic Development Group Consulting (SDG)
	IHRS - Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action	19 - 20 Juni 2023 June 16 - 20, 2023	The Indonesia HR Summit (IHRS) - SKK Migas
	GRCE - Governance, Risk, and Compliance Profesional Certification Body	6 Desember 2023 December 6, 2023	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
	GRC *Profesional Advance-Level Executive* (GRCE) - Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan *Governance, Risk and Compliance*	6 Desember 2023 December 6, 2023	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan dan Pelatihan	Waktu Waktu	Penyelenggara Penyelenggara
Diwe Novara Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Mandiri *Investment Forum 2023: Prevailing Over Turbulance*	1 Februari 2023 February 1, 2023	Bank Mandiri
	Chief Business Development Officers (CBDO) Innovation School	10 - 11 Februari 2023 dan 16, 17, 24, 29 Maret 2023 dan 5 April 2023 February 10-11, 2023 and March 16, 17, 24, 29, 2023, and April 5, 2023	BUMN *Leadership and Management Institute* (BMLI) dan Forum *Human Capital* Indonesia BUMN
	2023 9th AAUI International Insurance Seminar: Capitalizing The Emerging Trends In Insurance Market	9 Maret 2023 March 9, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
	IFG Konferensi Nasional 2023 IFG National Conference 2023	16 Mei 2023 May 16, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	Indonesia Re *International Conference* (IIC) 2023	4 - 5 Juli 2023 July 4 - 5, 2023	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
	GCG Berbasis Referensi Praktik Terbaik Nasional & Global Terkini GCG Reference Based on the Latest National & Global Best Practices	16 Agustus 2023 August 16, 2023	PT Tugu Reasuransi Indonesia
	IFG *International Conference 2023: Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19 - 20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
Ocke Kurniandy Direktur Operasional Director of Operations	Pelatihan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Program Training	16 Februari 2023 February 16, 2023	SDG Learning
	2023 9th AAUI International Insurance Seminar: Capitalizing The Emerging Trends In Insurance Market	9 Maret 2023 March 9, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Competency Certification Level 1	9 Maret 2023 March 9, 2023	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
	Swiss Re Webinar: Nat Cat & Inflation - A perfect storm	1 Juni 2023 June 1, 2023	Swiss Re
	Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 Forum on Strengthening Financial Services Sector Governance in 2023	8 - 10 Juni 2023 June 8 - 10, 2023	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Asia - Pacific PAI - *SOA Joint Symposium*	19 - 23 Juni 2023 June 19 - 23, 2023	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
	MAIPARK Geo-Ekskursi 2023 MAIPARK Geo-Excursion 2023	17 - 20 Juli 2023 July 17 - 20, 2023	PT Reasuransi Maipark Indonesia
	Workshop on Earthquake Catastrophe Risk Modelling dan The 2023 International Actuarial Research Conference	21 - 24 Juli 2023 July 21 - 24, 2023	IARC dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
	Seminar APARI: *Lloyd's International Insurance Conference and Market* APARI Seminar : Lloyd's International Insurance Conference and Market	23 - 24 Agustus 2023 August 23 - 24, 2023	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)
	Pelatihan *Executive Overview of Islamic* The Executive Overview of Islamic Training	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Syakirsula Institute
	Indonesia Re Technical Director Treaty Forum 2023 in Collaboration with AON	31 Agustus - 2 September 2023 August 31 - September 2, 2023	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
	IFG *International Conference 2023: Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19 - 20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	Rapat Koordinasi Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan di Lingkungan IFG Risk Management, Compliance and Policy Function Coordination Meeting within IFG	22 September 2023 September 22, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	The 27th Indonesia Rendezvous 2023	11 - 14 Oktober 2023 October 11 – 14, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
	Workshop Program Survei *Engineering* Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG SKKMIGAS - KKKS Periode 2021-2023 Workshop on Insurance Engineering Survey Program for Industrial Assets, Wells and LNG Assets SKKMIGAS - KKKS Period 2021-2023	17 - 19 Oktober 2023 October 17 – 19, 2023	Jasindo & SKKMIGAS
	Pendidikan Profesional Lanjutan Profesi Aktuaris Publik Tahun 2023 Advanced Professional Education for the Actuarial Profession in 2023	13 - 22 November 2023 November 13 – 22, 2023	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ministry of SOE of the Republic of Indonesia
	Indonesian Actuaries Congress 2023	22 - 24 November 2023 November 22-24, 2023	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan dan Pelatihan	Waktu Waktu	Penyelenggara Penyelenggara
Jhon Harlen Butar-Butar* Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	*CFO Gathering*	7 Agustus 2023 August 7, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
	Program Sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification Program	15 - 16 Agustus 2023 August 15 - 16, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	Sesi Phase 4a, Program Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) - Development Journey Program - Topik Pembelajaran: L*eading Strategically (Session 2)* Phase 4a Session, Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Program - Development Journey Program - Learning Topic : Leading Strategically (Session 2)	9 September 2023 September 9, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	Strategic Business Workshop: Restrukturisasi, Holdingisasi & Project Management Acceleration Strategic Business Workshop: Restructuring, Holdingization, & Project Management Acceleration	11 September 2023 September 11, 2023	Kementerian BUMN RI Ministry of SOE of the Republic of Indonesia
	GRC Masterclass Program 2023: Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN GRC Masterclass Program 2023: The Socialization of the Ranking of SOE & SOE Subsidiaries	14 September 2023 September 14, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	IFG *International Conference 2023: Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund*	19 - 20 September 2023 September 19 - 20, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	GRC Masterclass Program 2023: ESG For Boards - Governance of ESG	27 September 2023 September 27, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	GRC Masterclass Program 2023: GRC Integrated Information For Supervisionary Boards	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	GRC Masterclass Program 2023, Topik*: Pre IPO dan Post IPO* GRC Masterclass Program 2023, Topic : Pre IPO and Post IPO	8 Oktober 2023 October 8, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	GRC Masterclass Program 2023, Topik: Pemeringkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) GRC Masterclass Program 2023, Topic : The Rating and Issuance of Debt Securities & Sukuk (EBUS)	8 Oktober 2023 October 8, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	GRC Masterclass Program 2023: Joint Venture Between SOE and Private Sector	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	Sesi Phase 4b, Program Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) - Development Journey Program - Topik Pembelajaran: Hari Ke -1 - *Build Your Global Business,* Hari Ke -2 - *Coaching For Peak Performance* Phase 4b Session, Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Program - Development Journey Program - Learning Topics : Day 1 - Build Your Global Business, Day 2 - Coaching For Peak Performance	20 - 21 Oktober 2023 October 20 - 21, 2023	Indonesia Financial Group (IFG)
	GRC Masterclass Program 2023: CG Methodology and Environmental and Social Management System Methodology and Environmental and Social Management System	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Kementerian BUMN - BUMN *School of Excellence* Ministry of SOE - SOE School of Excellence
	CFO Gathering	13 Desember 2023 December 13, 2023	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Dewi Utari** Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Webinar Inovasi *& Mindset Shifting: Everyone Can Innovate* Innovation & Mindset Shifting : Everyone Can Innovate Webinar	13 November2023 December	Jasindo bekerja sama dengan CIAS
	Seminar Pelindungan Data Pribadi Personal Data Protection Seminar	19 Desember 2023 December	Kementerian BUMN RI

* mulai menjabat pada tanggal 1 Agustus 2023
** mulai menjabat pada tanggal 13 November 2023

* takes office on August 1, 2023
** takes office on November 13, 2023

Keputusan Direksi Tahun 2023

Keputusan Direksi selama tahun 2023 adalah mengenai hal-hal terkait pengelolaan Perusahaan.

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam hal ini, keputusan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi

Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perusahaan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Hasil pencapaian kinerja Direksi dapat terlihat pada tabel berikut ini:

The Board of Directors' Decisions in 2023

The Board of Directors' Decisions during 2023 are regarding matters related to the management of the Company.

The Board of Directors' decisions that require approval from the Board of Commissioners

In this case, the Board of Directors' decisions that need to be approved by the Board of Commissioners include:

1. To pledge fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. To establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation or Kerja Sama Operasi (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOT) , Build Transfer Operate (BTO), and other collaboration with a certain value or time period determined by the GMS;
3. To receive or provide medium / long term loans, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to the Company's subsidiaries with the provisions that the loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. To write off bad debts and dead inventory from the books;
5. To dispose movable fixed assets with an economic life which generally applies in industry in general is up to 5 (five) years;
6. To establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.

Board of Directors' Performance Assessment

Key Performance Indicators (KPI) which are used to measure the performance of the Company's Directors consist of the following 5 (five) perspectives:

1. Economic and Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Increased Investment
5. Talent Development

The results of the Board of Directors' performance achievements can be seen in the following table:

No	Kategori Category			Indikator KPI Jasindo Jasindo KPI Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Target KPI 2023 KPI Target 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Nilai 2023 Score 2023
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value to Indonesia	Finansial Financial	1a	Hasil *Underwriting* Underwriting Result	Pendapatan *Underwriting* - Beban *Underwriting* Underwriting Income - Underwriting Expenses	Rp (dalam jutaan) IDR (in million)	386.885	328.360	5,09
			1b	EBITDA (Konsolidasi) (Consolidation)	*Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated + Entities and Joint Venture*	Rp (dalam jutaan) IDR (in million)	194.711	161.325	3,31
			2	*Return On Equity* (ROE) (Konsolidasi) (Consolidation)	Laba Bersih Tahun Berjalan Average Total Equity	%	4,28	3,55	4,15
			3	*Risk Based Capital* (RBC)	Jumlah Tingkat Solvabilitas Induk/ Modal Minimum Berbasis Risiko Induk Total Parent Solvency Level/Minimum Risk-Based Capital	%	157,91	159,10	8,06

No	Kategori Category			Indikator KPI Jasindo Jasindo KPI Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Target KPI 2023 KPI Target 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Nilai 2023 Score 2023
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value to Indonesia	Operasional Operations	4	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan Timely completion of Financial Statement Audits in accordance with regulations	Penyelesaian audit laporan keuangan tahun 2022 paling lambat pada 31 Maret 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Completion of the audit of the 2022 financial statements no later than March 31, 2023 with an Unqualified Opinion (WTP)	Waktu Time	Tanggal 31 Maret 2023	Tanggal 31 Maret 2023	6,00
			5	Penguatan Manajemen Risiko Strengthening Risk Management	*Progress* Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran *Risk Maturity Index* di tahun 2022 Completion Progress of follow-up on recommendations for measuring Risk Maturity Index in 2022	%	100	100	5,00
			6a	*Collection rate* premi Premium collect rate	Total *outstanding* piutang premi dengan jangka waktu ≤2 bulan/*Total outstanding* piutang premi Total outstanding premium receivables with maturity ≤2 months/Total outstanding premium receivables	%	25	67,45	5,50
			6b	*Days Sales Outstanding (DSO)*	Total *Outstanding* piutang premi x 365/Total piutang premi baru dan lama Total Outstanding premium receivables x 365/Total new and old premium receivables	Hari Day	75	60	5,50
			7	Efektivitas Penugasan dan Program Pemerintah Effectiveness of Government Assignments and Programs	Peningkatan penyerapan jumlah Petani dan Peternak menjadi peserta asuransi dibandingkan tahun sebelumnya Increased absorption of the number of Farmers and Ranchers into insurance compared to the previous year	%	2,5	-4,63	0,00
	Sub Total Bobot Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Sub Total Weighted Economic and Social Value for Indonesia								42,61
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		8	Penyelesaian Fase 1 s.d. 3 (persiapan implementasi PSAK 74) Completion of Phase 1 to 3 (preparation for PSAK 74 implementation)	Persentase Implementasi PSAK fase 1 s.d 3 Percentage of PSAK Implementation phase 1 to 3	%	100	117	7,70
			9	*Combined Ratio* (Konsolidasi) (Consolidation)	*Loss Ratio* + *Expense Ratio*	%	98,64	103,21	7,65
	Sub Total Bobot Inovasi Model Bisnis Sub Total Weight of Business Model Innovation								15,35
C	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		10	Implementasi Sistem Konsolidasi Laporan Keuangan Terintegrasi dan MIS Terintegrasi *(Front End* dan *Back End)* Implementation of Integrated Financial Report Consolidation System and Integrated MIS (Front End and Back End)	*Progress* pemenuhan integrasi laporan keuangan dan dari *business driver indicator* yang telah ditetapkan Progress in fulfilling the integration of financial statements and business driver indicators that have been set.	%	100	140	5,50
			11	Pengembangan *Channel* Pemasaran Digital Development of Digital Marketing Channels	Peningkatan pendapatan premi melalui penggunaan aplikasi *E-marine* dibandingkan tahun lalu Increased premium income through the use of E-marine application compared to last year	%	10	415	4,40

No	Kategori Category		Indikator KPI Jasindo Jasindo KPI Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Target KPI 2023 KPI Target 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Nilai 2023 Score 2023
	Subtotal bobot Kepemimpinan Teknologi Subtotal weight of Technology Leadership							9,90
D	Peningkatan Investasi Increased Investment	12	*Yield on Investment*	Pendapatan Investasi/ Rata-rata Total Aset Investasi Investment Income/ Average Total Investment Assets	%	4,30	6,20	6,60
		13	Rasio Kecukupan Investasi Investment Adequacy Ratio	(Investasi+Kas dan Bank)/(Cadangan Teknis Retensi Sendiri+Utang Klaim Retensi Sendiri+Utang lain kepada tertanggung) (Investment+Cash and Bank)/(Self Retention Technical Reserve+Self Retention Claims Payable+Other payables to insured)	%	159,93	136,98	5,14
	Sub Total Bobot Peningkatan Investasi Sub Total Weight of Investment Increase							11,74
E	Pengembangan Talenta Talent Development	14a	Perempuan dan *Millenial* (<42 tahun) dalam *Top Talent* Women and Millennials (<42 years old) in Top Talent	(Jumlah **Top Talent* Perempuan) x 100%/Jumlah *Top Talent* (Jumlah **Top Talent Millenial*) x 100%/ Jumlah *Top Talent* (Number *Top Talent Female) x 100%/ Total Top Talent (Number *Top Millennial Talent) x 100%/Total Top Talent	%	100	134,62	4,40
		14b	Implementasi *Talent Mobility* Anggota *Holding* (BoD-1) Implementation of Talent Mobility for Holding Members (BoD-1)	Persentase BoD-1 Setara Anggota *Holding* yang mengalami *Talent Mobility* BoD-1 Percentage Equivalent Holding Members who experience Talent Mobility	%	10	15,38	4,40
		15a	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti dan *Career Path System* Completion of Roadmap for Restructuring Defined Benefit Pension Funds and Career Path System	Persentase Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Percentage of Completion of Roadmap for Restructuring Defined Benefit Pension Funds	%	100	100	4,00
		15b	Rasio pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of qualification fulfillment of Risk Management Organs	Rasio pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko = Jumlah personil Organ Pengelola Risiko yang memenuhi Kualifikasi/Jumlah personil seluruh Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ qualification fulfillment ratio = Number of Risk Management Organ personnel who meet the Qualifications / Number of all Risk Management Organ personnel	%	10	70	3,30
	Sub Total Bobot Pengembangan Talenta Talent Development Sub Total Weight							16,10
	Jumlah Bobot Total Weight							95,70

Pencapaian KPI Perusahaan tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik, yaitu sebesar 95,70 dari total maksimum skor sebesar 110. Pada tahun 2023, indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 13 dari 19 indikator dalam KPI Perusahaan. Pencapaian *Risk Based Capital* (RBC) sebesar 159,10% dari target 157,91% membuktikan bahwa Perusahaan tidak hanya mampu melampaui persyaratan minimum RBC dari OJK namun juga melampaui target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Untuk indikator yang belum mencapai target yaitu pada Efektivitas Penugasan dan Program Pemerintah dengan skor 0,00 yang disebabkan oleh Realisasi Jumlah Petani dan Peternak yang mengikuti AUTP pada tahun 2023 sebanyak 575.118 orang, sedangkan pada tahun 2022 jumlah petani dan peternak yang mengikuti AUTP/AUTSK sebanyak 603.011 orang. Turunnya keikutsertaan petani dan peternak dikarenakan adanya *refocusing* anggaran Kementerian Pertanian atas Bantuan Premi AUTP dari 1 Juta Ha menjadi 305.555 Ha dan AUTSK dari 100 ribu ekor menjadi 20 ribu ekor ternak. Selain itu, pada tahun 2023 Perusahaan melakukan beberapa mitigasi risiko antara lain perbaikan Pedum, melakukan seleksi lahan dan melakukan perbaikan T/C AUTSK.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilain kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Sedangkan penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS mengacu kepada indikator KPI Direksi di atas. Pencapaian kinerja berdasarkan KPI periode 2023 di atas dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS.

The achievement of the Company's KPI in 2023 shows good results, i.e., 95.70 out of a maximum total score of 110. In 2023, indicators that achieve the targets that have been set are 13 of the 19 indicators in the Company's KPI. The achievement of Risk Based Capital (RBC) of 159.10% of the target of 157.91% proves that the Company is not only able to exceed the minimum RBC requirements from the FSA but also exceeds the targets set by Shareholders.

For indicators that have not reached the target, i.e., the Effectiveness of Government Assignments and Programs with a score of 0.00 which is caused by the realization of the number of farmers and livestock breeders taking part in AUTP in 2023 of 575,118 people, while in 2022 the number of farmers and breeders taking part in AUTP/AUTSK is 575,118 people. 603,011 people. The decline in participation of farmers and breeders was due to the refocusing of the Ministry of Agriculture's budget on AUTP Premium Assistance from 1 Million Ha to 305,555 Ha and AUTSK from 100 thousand head of livestock to 20 thousand head of livestock. Moreover, in 2023 the Company will carry out several risk mitigations, including improving the General Guidelines, carrying out land selection and improving the AUTSK T/C.

Assessor

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by the GMS. Meanwhile, the performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners and the GMS refers to the Board of Directors' KPI indicators above. Performance achievements based on the KPI for the 2023 period above are accounted for by the Board of Commissioners and the Board of Directors at the GMS.

Transparansi dan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

The Transparency and Independence of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi Jasindo wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

In carrying out their functions, duties and responsibilities, the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Asuransi Jasindo are required to maintain independence and avoid all forms of conflicts of interest, whether for personal interests, groups, or certain groups.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi Jasindo (dan anggota keluarga) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan saham, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya.

The Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Asuransi Jasindo (and family members) have an obligation to report share ownership, both in the Company and in other companies.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Asuransi Jasindo Ownership of Asuransi Jasindo		Kepemilikan Saham Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies		
		Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage	Nama Perusahaan Name of Company	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioners	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioners	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors						
Andy Samuel	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Dewi Utari	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Ocke Kurniandi	Direktur Operasional Director of Operations	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Jhon Harlen Butar-Butar	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investments	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing Organ Perusahaan bersifat independen dan tidak saling mencampuri satu sama lain. Setiap anggota Direksi dapat bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja sebagai Organ Perusahaan yang masing-masing memiliki peran sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Hubungan keluarga dan kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham periode tahun 2023 sebagai berikut:

The Disclosure of Affiliate Relationships Between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major/Controlling Shareholders

In accordance with the applicable regulations, each Company's Organs is independent and does not interfere with each other. Each member of the Board of Directors can act independently in carrying out their functions and duties, both individually and collectively, solely in the interests of the Company. The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a working relationship as the Company's Organs, each of which has a role as a monitoring function and a management function of the Company.

The family and management relationships of other members of the Board of Directors with the fellow members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners and Shareholders for the period 2023 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder		Nama Perusahaan Name of Company		Jumlah Saham Number of Shares		Persentase Percentage			
		Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes	Ya Yes	Tidak Yes
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioners	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioners	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Andy Samuel	Direktur Utama President Director	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dewi Utari	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ocke Kurniandi	Direktur Operasional Director of Operations	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jhon Harlen Butar-Butar	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investments	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama;

2. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain;

3. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur pada BUMN, BUMD selama 2 (dua) periode berturut-turut dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan Perusahaan;
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
5. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Concurrent Position as Member of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations, the provisions for concurrent positions for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. The members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as the members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the members of the DPS in companies that have the same business field;
2. The members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions in other companies except as the members of the Board of Commissioners in 1 (one) other Insurance Company;
3. May not hold other positions as the Director of a SOE, ROE for 2 (two) consecutive periods and a Private Owned Enterprise or other position related to the management of the Company;
4. May not hold other positions as a political party administrator and/or legislative member candidate and/or legislative member, legislative member candidate or legislative member consisting of the candidates/members of the DPR, DPD, Level I DPRD, and Level II DPRD;
5. May not hold other positions which could give rise to a direct or indirect conflict of interest with the Company and/or which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations.

Adapun pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi Jasindo adalah sebagai berikut:

The disclosure of the dual positions of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Asuransi Jasindo is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain Position at Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Company/Other Agency
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Mega Central Finance
		Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Dipo Star Finance
		Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Juara Kapital Indonesia
		Komisaris Commissioner	PT Indonesia Clearing House
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
		Komisaris Independen Independent Commissioner	PT TBS Energi Utama Tbk
		Komisaris Commissioner	PT Tambang Damai
		Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Schroders Investment Management Indonesia
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioners	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Director General of Industrial Relations and Employment Social Security	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
Andy Samuel	Direktur Utama President Director	Komisaris Commissioner	PT Reasuransi MAIPARK

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain Position at Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Company/Other Agency
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Komisaris Commissioner	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	Komisaris Utama President Commissioner	PT Asrinda Arthasangga
Ocke Kurniandy	Direktur Operasional Director of Operations	Komisaris Commissioner	PT Asuransi Jasindo Syariah
John Harlen Butar-Butar	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investments	-	-
Dewi Utari	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affair	-	-

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan meyakini bahwa komposisi yang beragam sangat diperlukan untuk efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan saat ini telah mempertimbangkan aspek keberagaman baik dari sisi usia, latar belakang dan jenjang pendidikan dan pengalaman serta keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Policy Regarding Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company believes that a diverse composition is very necessary for the effectiveness of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The current composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has taken into consideration aspects of diversity both in terms of age, background, and level of education and experience and expertise of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Terakhir Last Education	Pengalaman Kerja Terakhir Recent Work Experience
Ngalim Sawego	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Laki-laki Male	68	• *Master of Science in Policy Economics*, University of Illinois Urbana-Champaign, USA • S1 Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia • Master of Science in Policy Economics, University of Illinois Urbana-Champaign, USA • Bachelor of Economic Law, University of Indonesia	• Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal • Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) • Deputi Komisioner, Pengawas Industri Keuangan Non-Bank I Otoritas Jasa Keuangan • Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) • Expert Staff of the Indonesian Minister of Finance for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation • Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam LK) • Deputy Commissioner, Non-Bank Financial Industry Supervisor I of the Financial Services Authority • Chairman of the Board of Directors and concurrently Executive Director of the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Terakhir Last Education	Pengalaman Kerja Terakhir Recent Work Experience
Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen Independent Commissioners	Laki-laki Male	69	• *PhD in Economics*, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA • *MA in Economics*, Duke University, Durham, North Carolina, USA • S1 Ekonomi, Universitas Indonesia • PhD in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA • MA in Economics, Duke University, Durham, North Carolina, USA • BA in Economics, University of Indonesia	• Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) • Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) • Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia • Independent Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) • Commissioner of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) • Director General of Taxes Ministry of Finance Republic of Indonesia
Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioners	Wanita Female	55	• *Master of Business*, Queensland University of Technology, Australia • S1 Ilmu Sosial, Universitas Indonesia • Master of Business, Queensland University of Technology, Australia • Bachelor of Social Science, University of Indonesia	• Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal • Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas • Kepala Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas • Kepala Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri, Ditjen Bina Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri • Head of Foreign Cooperation Bureau, Secretariat General • Head of Legal and Foreign Cooperation Section, DG Training and Productivity Development • Head of Foreign Cooperation Section, DG Training and Productivity Development • Head of Foreign Cooperation Section, DG of Training and Domestic Placement
Andy Samuel	Direktur Utama	Laki-laki Male	50	• Pendidikan Asuransi, Glasgow Caledonian University Scotland, UK • S1 Ilmu Politik, Universitas Indonesia • Insurance Education, Glasgow Caledonian University Scotland, UK • Bachelor of Political Science, University of Indonesia	• Direktur Utama PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) • Komisaris dan Direktur di berbagai perusahaan • President Director of PT IFG Life Insurance (IFG Life) • Commissioner and Director in various companies
Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis	Laki-laki Male	47	• Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana • S1 Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya • Master of Management, Universitas Mercu Buana • Bachelor of Mechanical Engineering, Sriwijaya University	*Group Head Oil & Gas* PT Asuransi Jasa Indonesia
Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis	Laki-laki Male	57	• MBA (*International Management*), Institut Prasetya Mulya • S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Jayabaya • MA in Economics, Duke University, Durham, North Carolina, USA • BA in Economics, University of Indonesia	• Direktur Utama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Penjualan dan Distribusi PT Mandiri AXA General Insurance • President Director of Pension Fund of Financial Institution of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Director of Sales and Distribution of PT Mandiri AXA General Insurance

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia (tahun)** Age (years old)	**Pendidikan Terakhir** Last Education	**Pengalaman Kerja Terakhir** Recent Work Experience
Ocke Kurniandi	Direktur Operasional	Laki-laki Male	55	• S2 Matematika, Institut Teknologi Bandung • S1 Matematika, Institut Teknologi Bandung • Master of Mathematics, Bandung Institute of Technology • Bachelor's Degree in Mathematics, Bandung Institute of Technology	Deputi Direksi Bidang Aktuaria Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Deputy Director for Actuarial Affairs of the Social Security Administration (BPJS) for Health
Jhon Harlen Butar – Butar	Direktur Keuangan dan Investasi	Laki-laki Male	46	• Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI • S1 Akuntansi, Universitas Indonesia • Master of Management, IPMI College of Management • Bachelor of Accounting, University of Indonesia	Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Head of Accounting and Reporting Division of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Dewi Utari	Direktur SDM dan Umum	Wanita Female	42	• S2 Akuntansi, Universitas Indonesia • S1 Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia • S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya • Master of Accounting, University of Indonesia • Bachelor of Social & Political Science, University of Indonesia • Bachelor of Accounting, College of Economics Swadaya	*Group Head Financial Planning & Parenting* PT Asuransi Jasa Indonesia

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Nomination and Remuneration Policy of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang Pemegang Saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Asuransi Jasindo harus memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai yang tertera pada ketentuan tersebut. Selain itu, Perusahaan juga menetapkan sejumlah kriteria bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, yaitu:

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan Komisaris.

Persyaratan tersebut mencakup persyaratan formal, yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan materiil, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan sebagai bagian dari *holding* Badan Usaha Milik Negara asuransi dan penjaminan.

1. Persyaratan Formal
   Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang:
   a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   b. Mampu bekerja sama sebagai anggota Dewan;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit;

Appointment and dismissal as well as determining the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are under the authority of Shareholders which is carried out through the GMS mechanism.

Procedure for the Nomination of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The process of appointing the prospective members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with the statutory regulations that regulate the procedures for appointing the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. The Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 03, 2023, concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. The Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises ;

All prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of Asuransi Jasindo must fulfil the formal and material requirements as stated in these provisions. Moreover, the Company also sets a number of criteria for the prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, which are:

Requirements for the Members of the Board of Commissioners

There are 2 (two) requirements that must be fulfilled by a prospective member of the Board of Commissioners.

These requirements include formal requirements, which are basic requirements stipulated by the applicable laws and regulations and material requirements, which are requirements tailored to the needs and nature of the Company's business as part of the state-owned insurance and guarantee holding company.

1. Formal Requirements
   The Board of Commissioners is an individual who :
   a. Able to carry out legal actions;
   b. Able to work together as a member of the Board;
   c. Never been declared bankrupt by the Court;
   d. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/the Board of supervision who was found guilty of causing a Limited Liability Company/Public Company to be declared bankrupt;

e. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
f. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menganalisa suatu masalah secara memadai dan independen;
g. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Persyaratan Materiil
Selain memenuhi kriteria persyaratan umum di atas, Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
a. Telah mendapat persetujuan dari OJK;
b. Memiliki pengetahuan di bidang perasuransian yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
c. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan sesuai dengan pembagian tugas dengan fokus area yang akan ditangani;
d. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. Memiliki dedikasi serta komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;
f. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
g. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
h. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan perasuransian dan pemegang polis; dan
i. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan perasuransian.

Bagi Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan formal dan materiil seperti tersebut di atas, juga berlaku syarat independensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta perubahannya.

e. Have integrity and a good reputation, that is, never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract and other acts that are detrimental to the company where the person concerned works or has worked;
f. Have the ability to consider and analyse a problem adequately and independently;
g. Have good morals;
h. Have a commitment to comply with the applicable laws and regulations;

2. Material Requirements
Apart from meeting the general requirements above, the Board of Commissioners is an individual who is required to fulfil the following special requirements:
a. Has received approval from FSA;
b. Have adequate knowledge in the insurance sector that is relevant to the position;
c. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company in accordance with the division of tasks with the focus area to be handled;
d. Understand company management issues related to one of the management functions;
e. Have dedication and commitment to provide adequate time;
f. Able to act in the interests of the Insurance Company and policy holders, insured, participants, and/or parties entitled to benefits;
g. Prioritize the interests of the Insurance Company and policy holders, insureds, participants, and/or parties entitled to benefits rather than personal interests;
h. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the interests of insurance companies and policy holders; and
i. Able to avoid abuse of authority to gain undue personal gain or cause losses to the insurance company.

For Independent Commissioners, apart from having to fulfil the formal and material requirements as mentioned above, the independence requirements as intended in the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance on SOE and FSA Regulation Number 73/PFSA.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and its amendments.

3. Persyaratan Lainnya
   Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris adalah:

   a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
   b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
   c. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
   d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
   f. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
   g. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Persyaratan Anggota Direksi

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Direktur. Persyaratan tersebut adalah persyaratan umum, yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan khusus, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan sebagai bagian dari *holding* BUMN asuransi dan penjaminan.

1. Persyaratan Umum
   Direksi adalah orang perseorangan yang:
   a. Merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
   b. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
   c. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
   d. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;

3. Other Requirements
   Other requirements for the members of the Board of Commissioners are:
   a. Not an official of a political party, and/or a member of the legislature and/or not currently Ongoing Awaiting as a candidate for member of the legislature; not a political party administrator and/or legislative candidate and/or legislative member;
   b. Not a candidate for Head/Deputy Regional Head and/or Head/Deputy Regional Head;
   c. Physically and mentally healthy (not currently suffering from an illness that could hinder the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners / Board of supervision), as proven by a health certificate from a doctor;
   d. Not currently occupying a position that has the potential to cause a conflict of interest with the Company unless signing a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Commissioners;

   e. Not currently holding a position that is prohibited from holding a position as a member of the Board of Commissioners unless he/sne signs a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Commissioners;

   f. Not serving as a member of the Board of Commissioners of the company concerned for 2 (two) consecutive periods;
   g. Prospective candidates for the members of the Board of Commissioners / Board of supervision who come from state administrators must report the State Administrator's Asset Statement or Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) for the last 2 (two) years as proven by the Proof of LHKPN Statement to the authorized institution.

Requirements for the Members of the Board of Directors

There are 2 (two) types of requirements that must be met by a prospective Director. These requirements are general requirements, which are basic requirements stipulated by the applicable laws and regulations and special requirements, which are requirements tailored to the needs and nature of the Company's business as part of the insurance and guarantee state-owned holding company.

1. General Requirements
   The Board of Directors are individuals who:
   a. Is an Indonesian citizen and domiciled in Indonesia;

   b. Have integrity and a good reputation, that is, never directly or indirectly involved in acts of manipulation and deviant practices, default, and other acts that are detrimental to the company where the person concerned works or has worked;

   c. Have the ability to develop business for the progress of the Company;
   d. Have dedication and devote full time to carrying out their duties;

e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir;
g. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi;
h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
i. Memiliki pengetahuan di bidang perasuransian yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
j. Memiliki pengalaman di bidang perasuransian;
k. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan;
l. Memenuhi persyaratan Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
m. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
n. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian lain;
o. Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari karyawan atau pejabat aktif lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian;

p. Perusahaan dilarang mengangkat mantan karyawan atau pejabat lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian menjadi anggota Direksi apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari lembaga tersebut kurang dari 1 (satu) tahun;

q. Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas dari suatu:

   - Perusahaan perasuransian yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan;
   - Perusahaan di bidang jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan;
   - Perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan/atau
   - Perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
   - Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

e. Physically and spiritually healthy (not currently suffering from an illness that could hinder the performance of their duties as a Director), as proven by a health certificate from a doctor;
f. Have a Taxpayer Identification Number (TIN) and have carried out the obligation to pay taxes for the last two years;
g. Have competence, i.e., ability and experience in fields that support the implementation of the duties and obligations of the Board of Directors;
h. Have to comply with the applicable laws and regulations and implement good corporate governance;
i. Have adequate knowledge of the insurance sector that is relevant to the position;
j. Have experience in the insurance sector;
k. Have the ability to carry out strategic management in the context of the company's development;
l. Fulfil the Feasibility Requirements imposed by the Financial Services Authority;
m. Able to carry out legal actions;
n. The members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions in other companies except as the members of the Board of Commissioners in 1 (one) other insurance company;
o. Companies are prohibited from appointing the members of the Board of Directors who come from the employees or active officials of the insurance business development and monitoring institutions;
p. Companies are prohibited from appointing former employees or officials of the insurance business development and monitoring institutions to become the members of the Board of Directors if the person concerned stops working at the institution for less than 1 (one) year;
q. Companies are prohibited from appointing the members of the Board of Directors who have previously been the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, or the members of the Board of supervision of:

   - Insurance companies that are subject to sanctions for restrictions on business activities within a period of 3 (three) years prior to appointment;
   - Companies in the financial services sector whose business licenses have been revoked due to violations within a period of 3 (three) years prior to appointment;
   - Companies in the financial services sector or in the non-financial services sector that are declared bankrupt and have permanent legal force within a period of 5 (five) years prior to appointment; and/or
   - Companies that experience losses due to errors or negligence within 5 (five) years prior to the appointment;

   - Companies are prohibited from appointing members of the Board of Directors who have not passed the feasibility test by the Financial Services Authority.

r. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonannya;
s. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Direktur lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
t. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur pada BUMN, BUMD selama 2 (dua) periode berturut-turut dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan Perusahaan;
u. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
v. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Direktur sesuai kebutuhan Perusahaan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi (apabila ada) untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS agar disahkan.

Proses Nominasi dan Pengangkatan Direksi

Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Dewan Komisaris dan Direksi yang terpilih telah memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan serta disetujui oleh seluruh Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan tidak melakukan proses penentuan pengangkatan Direksi karena seluruh Direksi di Perusahaan memperoleh penunjukan langsung dari Kementerian BUMN.

Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak manajemen, pakta integritas dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan RUPS.

r. Has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances within 5 (five) years prior to his/her candidacy;
s. There may be no blood-family relationships up to the third degree, either straight or sideways, or marital relationships (son-in-law or brother-in-law) with other Directors and/or the Members of the Board of Commissioners;
t. May not hold other positions as the Director of SOE, BUMD for 2 (two) consecutive periods and Private Owned Enterprises or other positions related to the management of the Company;
u. May not hold other positions as administrator of a Political Party and/or candidate for legislative members and/or legislative members, prospective legislative members, or legislative members consist of the candidates/members of the DPR, DPD, DPRD Level I, and DPRD Level II;
v. Must not hold other positions which could give rise to a direct or indirect conflict of interest with the Company and/or which conflict with the provisions of the applicable laws and regulations.

2. Special Requirements
Special requirements are the details of the competencies and other matters required for the Board of Directors according to the Company's needs. Special requirements are one of the substances of the nomination and selection system and procedures developed by the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration Committee (if any) to be subsequently submitted to the GMS for approval.

Nomination and Appointment Process for the Board of Directors

The selection of the prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out through a transparent selection and nomination process taking into account expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behaviour, and high dedication to advancing and developing the Company. The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS after going through a feasibility test. The elected Board of Commissioners and Board of Directors have fulfilled the company's terms and conditions and were approved by all Shareholders at the General Meeting of Shareholders. The Company does not carry out the process of determining the appointment of the Board of Directors because all Directors in the Company receive direct appointments from the Ministry of SOE.

The members of the Board of Directors are required to sign a management contract, integrity pact, and statement letter containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on the considerations of the GMS.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau
4. Sumber lain.

Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan akan melakukan penilaian terhadap bakal calon Dewan Komisaris dengan cara berikut:

1. Menilai daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dan dokumen pendukung;
2. Khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan;
3. Wawancara.

Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria 'Disarankan' atau 'Tidak Disarankan'. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Procedures for Appointing the Members of the Board of Commissioners

The sources of prospective candidates for the Board of Commissioners of SOE come from:

1. Former SOE Director;
2. Board of Commissioners/Board of Supervision of SOE;
3. Structural officials and functional government officials; or
4. Other sources.

The Ministry of SOE as the Company's Shareholder will carry out an assessment of prospective candidates for the Board of Commissioners in the following way:

1. Assessing curriculum vitae and supporting documents;
2. Specifically to assess integrity, it is carried out using a written statement from the candidate concerned;
3. Interview.

The assessment results are presented in the form of a qualitative narrative with the criteria 'Recommended' or 'Not Recommended'. The GMS/Minister can appoint candidates who have been declared to fulfil formal and other requirements and have been assessed using the 'Recommended' criteria to become a member of the Company's Board of Commissioners.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (*talent pool*) Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Uji Kepatutan dan Kepantasan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:

- Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
- Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.

Procedures for Appointing the Members of the Board of Directors

The GMS/Minister can appoint candidates proposed by the Succession Committee to become the members of the SOE Board of Directors. Succession management is the process of selecting SOE Directors from the Talent Pool of the Ministry of SOE or other sources determined by the Minister. Succession management is carried out by the Ministry of SOE through a Feasibility Test or Uji Kepatutan dan Kepantasan (UKK) mechanism by the Succession Committee and/or considering the results of assessments from Professional Institutions.

Determining someone to become a member of the SOE Board of Directors can be done through:

- The Decision of the Minister as GMS/capital owner if all SOE shares / capital are owned by the State; or
- GMS decisions or circular decisions of all shareholders, if not all shares are owned by the State.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Prosedur penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The income of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the GMS. The procedure for determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023.

The determination of income in the form of salary or Honorarium, Allowances, and Permanent facilities is carried out by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rate, company financial condition and capabilities, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya, ditentukan melalui RUPS berdasarkan kajian dan usulan Komite Nominasi & Remunerasi Perusahaan.

Procedures for Proposing and Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The determination of the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors each year is determined through the GMS based on studies and proposals from the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Skema Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Procedure Scheme for Determining Remuneration for the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan anggota Direksi terdiri dari:
   a. Gaji
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas;
   d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
   e. LTI (*long term incentive*).
2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. Honorarium;
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas;
   d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
   e. LTI (*long term incentive*).

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The remuneration structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 is as follows:

1. The income of the members of the Board of Directors consists of:
   a. Salary;
   b. Allowance;
   c. Facility;
   d. Incentives/Performance Incentives/Special Incentives; and
   e. LTI (Long Term Incentive).
2. The income of the members of the Board of Commissioners consists of:
   a. Honorarium;
   b. Allowance;
   c. Facility;
   d. Incentives/Performance Incentives/Special Incentives; and
   e. LTI (Long Term Incentive).

Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang dibayarkan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp31.148.029.129,- Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Total Nominal Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The amount of remuneration paid by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors during 2023 is IDR 31,148,029,129.- Remuneration in one year grouped into a range of income levels is as follows:

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners	Jumlah Direksi Number of Board of Directors
Di atas Rp2 miliar Above IDR2 billion	-	6
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Above IDR1 billion - IDR2 billion	5	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Above IDR500 million - IDR1 billion	-	-
Rp500 juta ke bawah IDR500 million and below	**6	-

** organ pendukung Dewan Komisaris
** the supporting organ of the Board of Commissioners

Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Supporting Organs Under The Board of Commissioners

Salah satu mekanisme yang digunakan Dewan Komisaris untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris agar berjalan dengan efektif sebagai bagian penerapan tata kelola yang baik, yaitu dengan membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Pembentukan Komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris adalah berdasarkan:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Organ Pendukung Dewan Komisaris di Perusahaan terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasihatan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Piagam Komite Audit dan Pedoman Kerja

Dalam menjalankan fungsi Komite Audit yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance,* Perusahaan menetapkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002/DK/ VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) yang merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas sebagai Komite Audit.

Piagam Komite Audit Asuransi Jasindo antara lain berisikan:

1. Pendahuluan
2. Keanggotaan Komite Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab

One of the mechanisms used by the Board of Commissioners to assist the monitoring function of the Board of Commissioners to run effectively as part of implementing good governance, is by forming committees under the Board of Commissioners. The formation of Committees under the coordination of the Board of Commissioners is based on:

1. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. The Regulation of the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. Financial Services Authority Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.

The supporting organs of the Board of Commissioners in the Company consist of the Board of Commissioners Secretariat, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee.

AUDIT COMMITTEE

In carrying out its monitoring duties and advisory functions, the Board of Commissioners is required to form an Audit Committee. The Audit Committee functions to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating audit planning and implementation to assess the adequacy of internal control including the financial reporting process.

Audit Committee Charter and Work Guidelines

In carrying out the Audit Committee's functions in accordance with Good Corporate Governance provisions, the Company stipulates the Board of Commissioners' Decision Letter Number SK.002/DK/VI/2020 dated June 2, 2020, concerning the Audit Committee Charter, which is a guideline for binding and regulating PT Asuransi Jasa Indonesia Audit Committee Members in carrying out activities as an Audit Committee.

The Asuransi Jasindo Audit Committee Charter contains, among other things:

1. Introduction
2. Audit Committee Membership
3. Duties and Responsibilities

4. Prosedur Kerja, Rapat, Pelaporan dan Penanganan Pengaduan
5. Penutup

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Komposisi Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, maksimal berjumlah 2 (dua) orang.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komposisi anggota Komite Audit Asuransi Jasindo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4. Work Procedures, Meetings, Reporting and Complaint Handling
5. Conclusion

Audit Committee Membership Requirements

Audit Committee members must meet the following requirements:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of monitoring/inspection;
2. Have no personal interests/relationships that could have a negative impact and conflict of interest on the Company
3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete the task;
5. One of the Audit Committee members must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one must understand the Company's industry/business.

Audit Committee Composition

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chair of the Audit Committee is a Member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner. The maximum number of the members of the Audit Committee who are not the members of the Board of Commissioners is 2 (two) people.

The term of office of Audit Committee members who are not the members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Board of Supervision to dismiss them at any time.

The composition of the members of the Asuransi Jasindo Audit Committee in 2023 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keterangan Description
Ahmad Fuad Rahmany	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.005/DK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 The Board of Commissioners Decision Letter Number SK.005/DK/XII/2020 Dated December 28, 2022	Sesuai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris According to the term of office of Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Ahmad Syakir	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/DK/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022 The Board of Commissioners Decision Letter Number 001/DK/I/2022 Dated January 28, 2022	2022 - 2025	Pihak Independen Independent Party
Bimo Wijayanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/DK/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 The Board of Commissioners Decision Letter Number 004/DK/VI/2022 Dated June 17, 2022	2022 - 2025	Pihak Independen Independent Party

Profil Anggota Komite Audit

The Profile of Audit Committee Members

Profil Ahmad Fuad Rahmany sebagai Ketua komite Audit dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Fuad Rahmany's profile as a Chairman of the Audit Committee can be seen in the Board of Commissioners' profile section

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia No. SK-80/MBU/03/2020 dated March 18, 2020
Periode Jabatan Term of Office	2020 - 2025

Ahmad Syakir
Anggota Komite Audit

Usia Age	53 tahun years-old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang
Riwayat Pendidikan Education Background	S1 Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Bachelor of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan Work History	• Audit Partner, 2011 *to current* KAP Mirawati Sensi Idris - *Moore Global Network Limited* (MGNL) • *Manager and Senior Manager*, 2006 - 2011 KAP Mirawati Sensi Idris (previously KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny) - MSIL • *Junior, Senior, Supervisor to Manager*, 1996 - 2006 Osman Ramli Satrio & Rekan - Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) • Audit Partner, 2011 to present KAP Mirawati Sensi Idris - Moore Global Network Limited (MGNL) • Manager and Senior Manager, 2006 - 2011 KAP Mirawati Sensi Idris (previously KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny) - MSIL • Junior, Senior, Supervisor to Manager, 1996 - 2006 Osman Ramli Satrio & Rekan - Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/DK/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia The Decision of the Board of Commissioners Number 001/DK/I/2022 dated January 28, 2022, concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Asuransi Jasa Indonesia
Periode Jabatan Term of Office	2022-2025

Bimo Wijayanto
Anggota Komite Audit

Usia Age	47 tahun
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Yogyakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• *Post-Doctoral fellowships*-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia *Awards at* NATSEM and DCID (*Duke Center for International Development*), Duke University, Durham, North Carolina, USA. • *National Centre for Social and Economic Modeling* (NATSEM), University of Canberra, Bruce, Canberra, Australia; PhD, *Economics*. *Scholarships*: Australian *Leaderships Award*. • University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australia; MBA, *Accounting & Finance*. • *Full Scholarships*: Australian *Development Scholarships* (ADS) • University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; B.Sc, *Accounting*. • Hiroshima University of Economics, Hiroshima, Japan; *Non-Degree* (*Exchange Student*), *Management. Full Scholarships: Association of International Education of Japan* (AIEJ) • Taruna Nusantara Senior High School

	• Post-Doctoral fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards at NATSEM and DCID (Duke Center for International Development), Duke University, Durham, North Carolina, USA. • National Centre for Social and Economic Modeling (NATSEM), University of Canberra, Bruce, Canberra, Australia; PhD, Economics. Scholarships: Australian Leaderships Award. • University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australia; MBA, Accounting & Finance. • Full Scholarships: Australian Development Scholarships (ADS) • University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; B.Sc, Accounting. • Hiroshima University of Economics, Hiroshima, Japan; Non-Degree (Exchange Student), Management. Full Scholarships: Association of International Education of Japan (AIEJ) • Taruna Nusantara Senior High School
Riwayat Pekerjaan Work History	• *Assistant Deputy for Strategic Investment in the Department of Mining and Investments Affairs in the Coordinating Ministry for* Maritime and Investments Affairs. *He led his team to coordinate, synchronize, oversee and debottleneck national strategic investment in the several sectors like pharmaceuticals and medical devices, green industrial estate, battery for electric vehicles, renewable energy, port management, metal upstream industry, defense industry and others.* (2020) • *Executive Office of the President as Senior Advisor from, and Senior Advisor at Executive Office of the President of the Republic of Indonesia* (2016-2020) • *Advisor in the Department of Analysis and Oversight of Priority Programmes Advisor at Executive Office of the President of the Republic of Indonesia* (2015-2016) • *A public sector professional in the Ministry of Finance Republic of Indonesia* (2002-2014) • Assistant Deputy for Strategic Investment in the Department of Mining and Investments Affairs in the Coordinating Ministry for Maritime and Investments Affairs. He led his team to coordinate, synchronize, oversee and debottleneck national strategic investment in the several sectors like pharmaceuticals and medical devices, green industrial estate, battery for electric vehicles, renewable energy, port management, metal upstream industry, defense industry and others. (2020) • Executive Office of the President as Senior Advisor from, and Senior Advisor at Executive Office of the President of the Republic of Indonesia (2016-2020) • Advisor in the Department of Analysis and Oversight of Priority Programmes Advisor at Executive Office of the President of the Republic of Indonesia (2015-2016) • A public sector professional in the Ministry of Finance Republic of Indonesia (2002-2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.004/DK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia Decree of the Board of Commissioners Number SK.004/DK/VI/2022 dated June 17, 2022 on the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Asuransi Jasa Indonesia
Periode Jabatan Term of Office	2022-2025

Independensi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Audit *Committee Charter* yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan aspek independensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Independence of Audit Committee Members

Members of the Audit Committee must be independent, objective and professional as regulated in the Audit Committee Charter which is updated periodically in accordance with applicable laws and regulations. Fulfillment of the audit committee's independence aspects is as follows:

Aspek Independensi Independence Aspect	Ahmad Fuad Rahmany	Ahmad Syakir	Bimo Wijayanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no share ownership relationship in company	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the fellow members of the Audit Committee	v	v	v
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Has no position as an administrator of a political party, official or government	v	v	v

Tugas Komite Audit

Komite Audit mendorong diterapkannya *Good Corporate Governance*, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris.

Tugas Komite Audit adalah:

1. Secara objektif dan profesional menjalankan tugas berdasarkan arahan Dewan Komisaris.
2. Secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Secara mandiri baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
4. Berdasarkan *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) yaitu pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan lingkupan kerjanya.
5. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa:
   - Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dengan jalan melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang diperlukan untuk menyimpulkan bahwa pengendalian intern telah memenuhi tujuannya.
   - Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standard auditing yang berlaku.
   - Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
   - Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memproses pemilihan Auditor Eksternal termasuk imbalan jasanya.
7. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern Perusahaan sebagai upaya penyempurnaan, pengendalian dan penciptaan iklim disiplin guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
8. Merekomendasi dan mendorong terbentuknya sistem pengendalian intern Perusahaan yang efektif, serta implementasinya.
9. Meningkatkan efektivitas fungsi audit intern maupun audit ekstern dengan cara menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Group Satuan Pengawasan Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan audit yang tidak memenuhi standar.
10. Memastikan bahwa prosedur *review* terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan telah berjalan dengan baik.

The Duties of the Audit Committee

The Audit Committee encourages the implementation of Good Corporate Governance, the establishment of an adequate internal control structure, improving the quality of financial disclosure and reporting and reviewing the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants.

The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners. The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the board of commissioners.

The duties of the Audit Committee are:

1. Objectively and professionally carrying out duties based on the direction of the Board of Commissioners.
2. Collectively in carrying out its duties, assisting the Board of Commissioners.
3. Independently both in carrying out his/her duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.
4. Based on the Audit Committee Charter, i.e., work guidelines that clearly define the roles and responsibilities of the Audit Committee and the scope of its work.
5. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in ensuring that :
   - Internal control is implemented effectively by evaluating various matters necessary to conclude that internal control has met its objectives.
   - Internal and external audits are carried out in accordance with the applicable auditing standards.
   - Follow-up actions on audit findings are carried out by management.
   - Financial statements are presented fairly in accordance with the applicable accounting principles.
6. Assisting the Board of Commissioners in processing the selection of External Auditors including compensation for their services.
7. Evaluating the Company's internal control system as an effort to improve, control, and create a disciplinary climate to minimize irregularities in the Company's management.
8. Recommending and encouraging the establishment of an effective Company internal control system, as well as its implementation.
9. Increasing the effectiveness of the internal audit and external audit functions by assessing the implementation of audit activities and audit results of the Internal Monitoring Unit and External Auditor Groups, to prevent the implementation and reporting of audits that do not meet standards.
10. Ensuring that the review procedures for all information released by the Company are Ongoing Awaiting well.

11. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan untuk menjaga kecukupan (*disclosure*) semua informasi yang material dalam Laporan Keuangan dan meningkatkan kualitas transparansi Laporan Tahunan Perusahaan.
12. Mengevaluasi kecukupan dan ketetapan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan serta menilai pelaksanaannya.
13. Melakukan identifikasi dan evaluasi/pengkajian atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas Komite Audit

Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:

- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya;
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan; dan
- Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Penyelenggaraan rapat intern anggota Komite Audit dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite dan melakukan rapat koordinasi dengan komite-komite lain di bawah pengawasan Dewan Komisaris secara berkala.

Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari Anggota Komite dengan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite dan pengambilan keputusan harus disetujui oleh mayoritas yang hadir. Seluruh Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dilakukan dengan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melangsungkan 18 (delapan belas) kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

11. Assisting the Board of Commissioners in providing input to maintain the adequacy (disclosure) of all material information in the Financial Statement and improve the quality of transparency of the Company's Annual Statement.
12. Evaluating the adequacy and provisions of the investment policy established by the Company and assess its implementation.
13. Identifying and evaluating/studying matters deemed important by the Board of Commissioners.
14. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners as long as they are within the scope of the Audit Committee's duties

The Board of Commissioners may also provide other assignments to the Audit Committee in the form of:

- Reviewing information regarding the Company as well as the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, management statements, and other information;
- Reviewing complaints related to the Company; and
- Others related to the duties of the Audit Committee.

Audit Committee Meeting

The internal meetings of Audit Committee members are held periodically at least 1 (one) time in a month to complete the Committee's Work Program and conduct coordination meetings with other committees under the monitoring of the Board of Commissioners regularly.

Audit Committee meetings are chaired by the Committee Chair. If the Committee Chair is absent, the meeting will be chaired by one of the Committee Members, attended by a majority of the Committee members and decision-making must be approved by the majority present. All meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus or made by majority vote.

Throughout 2023, the Audit Committee hold 18 (eighteen) meetings with the agenda and frequency of attendance as follows:

Frekuensi Kehadiran
The Frequency of Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Ahmad Fuad Rahmany	Ketua Chairman	18	18	100
Ahmad Syakir	Anggota Member	18	18.	100
Bimo Wijayanto	Anggota Member	18	18	100

Agenda Rapat
Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	11 Januari 2023 January 11, 2023	Usulan Rencana Kegiatan Audit Tahun 2023 Proposed Audit Activity Plan for 2023
2	18 Januari 2023 January 18, 2023	Uji Tuntas Dana Pensiun: Pertemuan dengan Konsultan Pension Fund Due Diligence : Meeting with Consultant
3	19 Januari 2023 January 19, 2023	Uji Tuntas Dana Pensiun: Pertemuan dengan KBUMN Pension Fund Due Diligence: Meeting with KSOE
4	26 Januari 2023 January 26, 2023	*Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan IFG The Kick off Meeting Audit of Financial Statements for Financial Year 2022 with IFG
5	28 Februari 2023 February 28, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Januari 2023 The Analysis of Financial Statements for January 2023
6	30 Maret 2023 March 30, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Februari 2023 The Analysis of Financial Statements for February 2023
7	2 Mei 2023 May 2, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Maret 2023 The Analysis of Financial Statements for March 2023
8	10 Mei 2023 May 10, 2023	Pemaparan Hasil Audit Internal Triwulan I/2023 The Presentation of Internal Audit Results for Quarter I/2023
9	25 Mei 2023 May 25, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan April 2023 The Analysis of Financial Statements for April 2023
10	3 Juli 2023 July 3, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Mei 2023 The Analysis of Financial Statements for May 2023
11	20 Juli 2023 July 20, 2023	Pemaparan Group Satuan Pengawasan Internal Triwulan II Tahun 2023 The Presentation of the Internal Audit Unit Group for Quarter II of 2023
12	26 Juli 2023 July 26, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Juni 2023 The Analysis of Financial Statements for June 2023
13	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Juli 2023 The Analysis of Financial Statements for July 2023
14	27 September 2023 September 27, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Agustus 2023 Company Performance Evaluation for August 2023
15	20 Oktober 2023 October 20, 2023	Rapat Pemaparan Laporan Hasil Audit Triwulan III dan RKAT 2024 The Presentation Meeting of Third Quarter Audit Results Statement and 2024 RKAT
16	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan III/2023 The Discussion of Performance Evaluation Quarter III/2023
17	21 November 2023 November 21, 2023	Kinerja Perusahaan Oktober 2023 Company's Performance in October 2023
18	28 Desember 2023 December 28, 2023	Kinerja Perusahaan November 2023 Company's Performance in November 2023

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari kegiatan usaha Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit. Program peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Audit Committee Competency Development Program

The competency improvement program is carried out by the Audit Committee so that it can always follow and update information about the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the Audit Committee's duties. The competency improvement program that Audit Committee members will participate in in 2023 can be seen in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pengembangan Kompetensi Competence Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Period and Place
Ahmad Fuad Rahmany Ketua Komite Audit Chairman of Audit Commitee	Seminar Pencegahan *Fraud* di Perbankan dan Bagaimana Mengidentifikasi Pemalsuan Dokumen di Perbankan Melalui Grafonomi Seminar on Fraud Prevention in Banking and How to Identify Document Forgery in Banking Through Graphonomy	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	23 Maret 2023 March 23, 2023
Ahmad Fuad Rahmany Ketua Komite Audit Chairman of Audit Commitee	IFG International Conference: "*Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*".	Indonesia Financial Group (IFG)	19-20 September 2023, ShangriLa, Jakarta September 19-20, 2023, ShangriLa, Jakarta
Bimo Wijayanto Anggota Komite Audit Member of Audit Commitee	Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan Reinforcing the Governance and Integrity of Financial Reporting	Deputi Bidang Keuangan & Manajemen Risiko, KBUMN,	26 September 2023, Hotel Ambarukmo, Yogyakarta September 26, 2023, Ambarukmo Hotel, Yogyakarta

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

a. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
b. Besaran dan jenis penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat terdiri dari:
   - Honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
   - Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
   - Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun minimal sebesar 1 (satu) kali honorarium.
c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
d. Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Audit Committee Remuneration Policy

a. The income of Audit Committee Members is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities.
b. The amount and type of income of Audit Committee members as referred to in letter a above may consist of:
   - Maximum honorarium of 20% (twenty percent) of the salary of the Company's President Director;
   - Health facilities in the form of inpatient care, outpatient care, and medicines for those concerned, excluding families; and
   - The holiday allowance which is paid once in 1 (one) year is a minimum of 1 (one) times the honorarium.
c. The Members of the Board of Commissioners who are the Chair / Members of the Audit Committee are not given additional income from this position other than income as the Members of the Board of Commissioners.
d. The Audit Committee is prohibited from receiving income other than the income referred to in letter b.

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Audit Committee Work Implementation Statement

No.	No Laporan dan Tanggal Statement Number and Date	Perihal Subject
1	No. 003/KA/VII/2023, 26 Juli 2023 Number 003/KA/VII/2023, July 26, 2023	Laporan Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia Semester I Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia Audit Committee Statement Semester I 2023
2	No. 006/KA/XII/2023, 28 Desember 2023 Number 006/KA/XII/2023, December 28, 2023	Laporan Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia Semester II Tahun 2023 PT Asuransi Jasa Indonesia Audit Committee Statement Semester II 2023

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam mengkaji Sistem Manajemen Risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Piagam Komite Pemantau Risiko dan Pedoman Kerja

Dewan Komisaris telah mengesahkan Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/DK/VI/2020 tentang *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Pemantau Risiko) PT Asuransi Jasa Indonesia.

Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain berisikan:

a. Definisi
b. Pendahuluan
c. Visi dan Misi
d. Kedudukan dan Tanggung Jawab
e. Fungsi
f. Tugas
g. Wewenang
h. Hubungan Kerja
i. Keanggotaan
j. Rapat
k. Remunerasi
l. Pelaporan
m. Kode Etik
n. Penutup

Keanggotaan

Anggota Komite Pemantau Risiko harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki kemampuan, pengalaman, kualifikasi serta kapasitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas;
2. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolegial profesional, efektif, dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

RISK POLICY COMMITTEE

The Risk Policy Committee functions to assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation of risk management prepared by the Board of Directors and assessing the risk tolerance that can be taken by the Company.

Moreover, the Risk Policy Committee is also a facilitator for the Board of Commissioners in reviewing the Risk Management System prepared by the Board of Directors and assessing the risk tolerance that can be taken by the Company.

Risk Policy Committee Charter and Work Guidelines

The Board of Commissioners has approved the Risk Policy Committee Charter as a guide for implementing the duties of the Risk Policy Committee, which was most recently approved based on Board of Commissioners Decision Number 003/DK/VI/2020 concerning the Risk Policy Committee Charter of PT Asuransi Jasa Indonesia.

The Risk Policy Committee Charter includes, among other things :

a. Definition
b. Introduction
c. Vision and mission
d. Position and Responsibilities
e. Function
f. Task
g. Authority
h. Work relationship
i. Membership
j. Meeting
k. Remuneration
l. Reporting
m. Code of Conducts
n. Conclusion

Membership

The members of the Risk Policy Committee must meet the following requirements:

1. Have the ability, experience, qualifications, and other capacities required to carry out their duties;
2. The Risk Policy Committee works in a professional, effective, and efficient collegial manner by prioritizing consensus deliberation in the decision making process;
3. The term of office of the members of the Risk Policy Committee who are not Commissioner is a maximum of 3 (three) years and can be re-extended for 1 (one) time for a 2 (two) year term of office, without reducing the Commissioner right to dismiss at any time.
4. Must provide sufficient time to carry out their duties.

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Risiko terdiri atas seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota; Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko Asuransi Jasindo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Composition of the Risk Monitoring Committee

The Chairman and Members of the Risk Policy Committee are appointed and dismissed by the Commissioner and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS); The membership composition of the Risk Policy Committee consists of an Independent Commissioner as Chairman and member and 2 (two) members; The composition of the members of the Asuransi Jasindo's Risk Policy Committee in 2023 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keterangan Description
Ngalim Sawego	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.006/DK/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Board of Commissioners Decree Number SK.006/DK/IX/2021 dated September 27, 2021	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of the Commissioner	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Anton Mart Irianto*	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.007/DK/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Board of Commissioners Decree Number SK.007/DK/XII/2022 dated December 30, 2022	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of the Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Indah Anggoro Putri	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.003/DK /IX/2023 tanggal 14 September 2023 Board of Commissioners Decree Number SK.003/DK/IX/2023 dated September 14, 2023	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of the Commissioner	Komisaris Commissioner
Alan Yazid	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002/DK/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 Board of Commissioners Decree Number SK.002/DK/II/2021 dated February 5, 2021	2021-2024	Pihak Independen Independent Party
Rahmi Nurjanah	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.009/DK/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Board of Commissioners Decree Number SK.009/DK/XII/2021 dated December 31, 2021	2021-2024	Pihak Independen Independent Party

* berhenti menjabat pada tanggal 23 Agustus 2023, digantikan oleh Indah Anggoro Putri
* resigned from office on August 23, 2023, replaced by Indah Anggoro Putri

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

The Profile of Risk Policy Committee Members

Profil Ngalim Sawego sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris Ngalim Sawego's profile as the Chairman of the Risk Policy committee can be seen in the Board of Commissioners' profile section	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework on Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.006/DK/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Board of Commissioners Decree No. SK.006/DK/IX/2021 dated September 27, 2021
Periode Jabatan Term of Office	2020 - 2025

Profil Indah Anggoro Putri sebagai Anggota komite Pemantau Risiko dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris Indah Anggoro Putri's profile as a member of the Risk Monitoring Committee can be seen in the profile section of the Board of Commissioners	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework on Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK 003/DK /IX/2023 tanggal 14 September 2023 Board of Commissioners Decree No. Decree 003/DK /IX/2023 dated September 14, 2023
Periode Jabatan Term of Office	2022 - 2027

Alan Yazid
Anggota Komite Pemantau Risiko

Usia Age	55 tahun | years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA *Master of Business Admin* (MBA) *major in*: MIS, Intl. Bus., and Operations Mgt.(1996) • Northern Territory University, Darwin, Northern Territory, Australia *Bachelor of Business majoring in Accounting and minor in Law*. (1994) • Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA Master of Business Admin(MBA) major in: MIS, Intl. Bus., and Operations Mgt.(1996) • Northern Territory University, Darwin, Northern Territory, Australia Bachelor of Business majoring in Accounting and minor in Law. (1994)
Riwayat Pekerjaan Work History	• Komite *Audit Reliance Multifinance* (2022-sekarang) • Komisaris *Fintech* Bantusaku (2022-sekarang) • Ketua GRC *Professional Association* (2022-sekarang) • *Deputy Chairman of Indonesia* GRC *Professional Association*, Jakarta. (2021-sekarang) • *Working Group* GRC *member for Indonesian Banking industry*, OJK. (2019-sekarang) • *Formulation team Risk Management Certification Standard for* (IKNB), OJK. (2018-sekarang) • *Formulation team Risk Management Certification Standard for Bankers*, OJK. (2017-sekarang) • *Board Certification member of* Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Jakarta. (2015-sekarang) • *Vice President/Head* IFRS *Implementation*, Indonesia Eximbank, Jakarta. (2012-2015) • Reliance Multifinance Audit Committee (2022-present) • Fintech Commissioner Bantusaku (2022-present) • The Chairman of the GRC Professional Association (2022-present) • The Risk Monitoring Committee member of PT Jasindo (Persero), Jakarta. (2021-present) • The Deputy Chairman of Indonesia GRC Professional Association, Jakarta. (2021-present) • Working Group GRC member for Indonesian Banking industry, FSA. (2019-present) • Formulation team Risk Mgt Certification Standard for (IKNB), FSA. (2018-present) • Formulation team Risk Mgt Certification Standard for Bankers, FSA. (2017-present) • The Board Certification member of the Risk Management Certification Body or Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Jakarta. (2015-present) • Vice President / Head IFRS Implementation, Indonesia Eximbank, Jakarta. (2012-2015)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002/DK/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Jasa Indonesia The Decision of the Board of Commissioners Number 002/DK/II/2021 dated February 5, 2021, concerning the Dismissal and Appointment of the Members of the Risk Policy Committee of PT Asuransi Jasa Indonesia
Periode Jabatan Term of Office	2021 - 2024

Rahmi Nurjanah
Anggota Komite Pemantau Risiko

Usia Age	44 tahun | years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• Sertifikasi Manajemen Risiko BSMR level 5 (update 2023) • *Master degree at* University of Technology Sydney (2005 - 2007) • *Bachelor degree at* University of Indonesia (1998 - 2002) • Risk Management Certificate of BSMR level 5 (update 2023) • Master degree at University of Technology Sydney (2005 - 2007) • Bachelor degree at University of Indonesia (1998 - 2002)

Riwayat Pekerjaan Work History	• *Associate Senior Consultant & Trainer* (2020-Sekarang)) • Asesor Kompetensi LSP Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan - Lisensi BNSP (Sekarang) • PT Bank KB Bukopin sebagai: *Strategic Talent for Transformation and Project Management* (2020-2021) • *Risk Management & Project Manager for* Kookmin Bank (2018-2020) • *Operational Risk Manager* (2017-2019) • HR *Learning Manager* (2015-2017) • *Assessment & Individual Development Plan Team Leader* (2014-2015) • *Senior staff in* HR *Learning* & HR *Policy* (2010-2014) • Dosen (2002-2010) • Associate Senior Consultant & Trainer (2020-Present)) • LSP Governance, Risk & Compliance Competency Assessor - BNSP License (Now) • PT Bank KB Bukopin as: Strategic Talent for Transformation and Project Management (2020-2021) • Risk Management & Project Manager for Kookmin Bank (2018-2020) • Operational Risk Manager (2017-2019) • HR Learning Manager (2015-2017) • Assessment & Individual Development Plan Team Leader (2014-2015) • Senior staff in HR Learning & HR Policy (2010-2014) • Lecturer (2002-2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.009/DK/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Jasa Indonesia Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK. 009/DK/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Jasa Indonesia
Periode Jabatan Term of Office	2021-2024

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan aspek independensi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The Independence of Risk Policy Committee's Members

The Members of the Risk Policy Committee must be independent, objective, and professional as regulated in the Risk Policy Committee Charter which is updated periodically in accordance with the applicable laws and regulations. Fulfillment of the Risk Monitoring Committee's independence aspects is as follows:

Aspek Independensi Independence Aspect	Ngalim Sawego	Alan Yazid	Rahmi Nurjanah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no share ownership relationship in company	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the fellow members of the Audit Committee	v	v	v
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Has no position as an administrator of a political party, official or government	v	v	v

Tugas Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko secara umum adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan menilai kualitas penerapan manajemen risiko dan profil risiko Perusahaan yang dikelola Direksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Pemantau Risiko melakukan kegiatan:

1. *Review* dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang sekurang-kurangnya mencakup Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*), Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Framework*), Proses Manajemen Risiko (*Risk Process*), dan Sistem Pengendalian Risiko (*Risk Control System*);
2. *Review* dan Evaluasi menyeluruh terhadap Profil Risiko Perusahaan, termasuk Risiko Inheren dan kecukupan manajemen pengendaliannya;
3. *Review* dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan serta kesesuaian dalam penerapannya. Termasuk dalam hal ini adalah kejelasan dan kesesuaian *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limits* perusahaan;
4. *Review* dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan organisasi dan/atau fungsi- fungsi organisasi yang mengelola manajemen risiko serta kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan manajemen risiko perusahaan;
5. *Review* dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan proses manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko;
6. Pemantauan dan review terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko;
7. Berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi, serta mitigasi dampak risiko;
8. Koordinasi implementasi dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen *Enterprise Risk Management* (ERM);
9. Pengukuran efektivitas masing-masing komponen ERM yang diterapkan Perusahaan;
10. Lain-Lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

The Duties of the Risk Policy Committee

The general duty of the Risk Policy Committee is to assist the Commissioners in monitoring and assessing the Quality of Risk Management Implementation and the Company's Risk Profile managed by the Board of Directors.

To carry out these duties, the Risk Policy Committee carries out activities:

1. The comprehensive review and evaluation of the adequacy of the Quality of the Corporate Risk Management Implementation which at least includes Risk Governance, Risk Management Framework, Risk Management Process, and Risk Control System;
2. The comprehensive review and evaluation of the Company's Risk Profile, including Inherent Risk and the adequacy of its management controls;
3. The comprehensive review and evaluation of the adequacy of the Corporate Risk Management policies and strategies as well as their suitability in implementation. This includes the clarity and suitability of the company's risk appetite, risk tolerance, and risk limits;
4. The comprehensive review and evaluation of the adequacy of the organization and/or organizational functions that manage risk management as well as the adequacy of the quantity and quality of human resources in implementing corporate risk management;
5. The comprehensive review and evaluation of the adequacy of the risk management process which includes identification, measurement, monitoring and control processes, as well as the adequacy of the risk management information system;
6. Monitoring and review of risk management reports and other reports related to risk management implementation;
7. Various potential risks faced by the Company, carrying out analysis and evaluation, as well as mitigating the impact of risks;
8. The coordination of the implementation and monitoring of the effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) component;
9. Measuring the effectiveness of each ERM component implemented by the Company;
10. Others determined by the Board of Commissioners based on the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS decisions.

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko di atas, dijabarkan ke dalam bentuk laporan kepada Komisaris untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
6. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib hadir dalam setiap rapat. Dalam setiap rapat, jika dipandang perlu dapat mengundang pihak lain seperti *Group Head* MRP, Sekretaris Perusahaan, *Group Head* SPI, dan *Group Head/Head of* terkait lainnya dan auditor eksternal.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melangsungkan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

The implementation of the Risk Policy Committee activities above is described in the form of a statement to the Commissioner to:

1. Assist the Board of Commissioners in conducting periodic evaluations and reviews of risk management policies and providing opinions to the Board of Commissioners in providing recommendations or approval for risk management policies;
2. Assist the Board of Commissioners in reviewing and evaluating the responsibilities of the Board of Directors relating to business relationships or business activities that must receive recommendations for approval from the Board of Commissioners ;
3. Assist the Board of Commissioners in evaluating and analysing each proposal from the Board of Directors related to investment cooperation, capital participation, the establishment of joint ventures, the establishment of subsidiaries, the disposal of company's assets, and other activities of the Company to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners;
4. Assist the Board of Commissioners in evaluating and reviewing the Company's Work Plan and Budget or Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Company's Business Plan, and Company's Long Term Plan to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners;
5. Assist the Board of Commissioners in monitoring the main risks faced by the Company and ensure that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
6. Provide input to the Board of Commissioners in order to improve and develop Company's Risk Management policies;
7. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Risk Policy Committee Meeting

The Risk Policy Committee holds meetings at least 1 (one) time every month. The members of the Risk Policy Committee must attend every meeting. At each meeting, if deemed necessary, other parties can be invited, such as the MRP Group Head, Corporate Secretary, SPI Group Head, and other related Group Heads / Heads and external auditors.

Throughout 2023, the Risk Policy Committee will hold 12 (twelve) meetings with the following agenda and frequency of attendance:

Frekuensi Kehadiran
Frequency of Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Ngalim Sawego	Ketua Chairman	12	12	100
Anton Mart Irianto*	Anggota Member	8	8	100
Indah Anggoro Putri	Anggota Member	4	4	100
Alan Yazid	Anggota Member	12	12	100
Rahmi Nurjanah	Anggota Member	12	12	100

* Berhenti menjabat pada tanggal 23 Agustus 2023, digantikan oleh Indah Anggoro Putri
* Resigned from office on August 23, 2023, replaced by Indah Anggoro Putri

Agenda Rapat
Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	28 Februari 2023 February 28, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Januari 2023 The Analysis of Financial Statements for January 2023
2	30 Maret 2023 March 30, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Februari 2023 The Analysis of Financial Statements for February 2023
3	2 Mei 2023 May 2, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Maret 2023 The Analysis of Financial Statements for March 2023
4	10 Mei 2023 May 10, 2023	Pemaparan Hasil Audit Internal Triwulan I/2023 The Presentation of Internal Audit Results for Quarter I/2023
5	25 Mei 2023 May 25, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan April 2023 The Analysis of Financial Statements for April 2023
6	3 Juli 2023 July 3, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Mei 2023 The Analysis of Financial Statements for May 2023
7	26 Juli 2023 July 26, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Juni 2023 The Analysis of Financial Statements for June 2023
8	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Analisa Laporan Keuangan Bulan Juli 2023 The Analysis of Financial Statements for July 2023
9	27 September 2023 September 27, 2023	Evaluasi Kinerja Perusahaan Agustus 2023 Company Performance Evaluation for August 2023
10	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan III/2023 The Discussion of Performance Evaluation Quarter III/2023
11	21 November 2023 November 21, 2023	Kinerja Perusahaan Oktober 2023 Company's Performance in October 2023
12	28 Desember 2023 December 28, 2023	Kinerja Perusahaan November 2023 Company's Performance in November 2023

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari kegiatan usaha Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Program peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Risk Policy Committee Competency Development Program

The competency improvement program is carried out by the Risk Policy Committee so that it can always follow and update information about the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the Risk Policy Committee's duties. The competency improvement program that members of the Risk Policy Committee will participate in in 2023 can be seen in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
Ngalim Sawego	Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan Forum for Strengthening Financial Services Sector Governance	Dewan Audit, Otoritas Jasa Keuangan Audit Board, Financial Services Authority	9 Juni 2023 , Hotel Mahalaya Solo, Jateng June 9, 2023, Hotel Mahalaya Solo, Central Java.
	IFG International Conference: "*Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*".	Indonesia Financial Group (IFG)	19-20 September 2023, Jakarta September 19-20, 2023, Jakarta
Anton Mart Irianto	Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Becomes Competent and Responsible Commissioner	Intipesan	21-22 Juni 2023, Hotel Mulia Senayan Jakarta June 21-22, 2023, Hotel Mulia Senayan Jakarta
Alan Yazid	Pelatihan BLMN GRC *Masterclass: Risk Management Effectiveness Evaluation* BLMN GRC Masterclass Training: Risk Management Effectiveness Evaluation	Keasdepan Manajemen Risiko dan Kepatuhan KBUMN dan Pijar Mahir Future Risk Management and Compliance of KSOE and Pijar Mahir	7 September 2023 September 7, 2023
Rahmi Nurjanah	Pelatihan BLMN GRC *Masterclass: Risk Management Effectiveness Evaluation* BLMN GRC Masterclass Training: Risk Management Effectiveness Evaluation	Keasdepan Manajemen Risiko dan Kepatuhan KBUMN dan Pijar Mahir Future Risk Management and Compliance of KSOE and Pijar Mahir	7 September 2023 September 7, 2023

Kebijakan Remunerasi Komite Kebijakan Risiko

1. Besarnya penghasilan untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain penghasilan tersebut.
2. Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Anggaran Komite Pemantau Risiko disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan prioritas kegiatan yang dilakukan sesuai kemampuan Perusahaan dan aspek kewajaran.

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Kebijakan Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko. Implementasi tersebut dilaksanakan melalui evaluasi atas strategi pengelolaan risiko, sistem dan kebijakan serta kebijakan kontrol intern, metodologi dan infrastruktur pendukung PT Asuransi Jasindo. Komite Pemantau Risiko juga melakukan *monitoring* potensi risiko secara korporasi yang dihadapi Perusahaan dan pengendalian yang dilakukan, yang mencakup risiko-risiko kredit, asuransi, pasar, likuiditas, operasional, hukum,

Risk Policy Committee Remuneration Policy

1. The amount of honorarium for the members of the Risk Policy Committee who are not the members of the Board of Commissioners is determined by the Commissioner taking into account the Company's capabilities, a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's salary and they are not permitted to receive any other income other than this honorarium.
2. The Chairman of the Risk Policy Committee who is an Independent Commissioner is not given additional income other than income as a member of the Commissioner.
3. The Risk Policy Committee's budget is prepared by taking into account the Risk Policy Committee's Work Plan and the priority of activities carried out in accordance with the company's capabilities and fairness aspects.

Risk Policy Committee Work Implementation Statement

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility to assist and facilitate the Commissioners in carrying out their duties and monitoring functions on matters related to risk monitoring. This implementation is carried out through evaluation of risk management strategies, systems, and policies, as well as internal control policies, methodology, and supporting the infrastructure of PT Asuransi Jasindo. The Risk Monitoring Committee also monitors potential corporate risks faced by the Company and the controls carried out, which include credit, insurance, market, liquidity, operational, legal, compliance, strategy, reputation risks, and

kepatuhan, strategi, risiko reputasi dan ditambahkan risiko reasuransi, mengingat PT Asuransi Jasindo juga mengelola risiko tersebut. Komite Pemantau Risiko juga melakukan tinjauan atas konsistensi antara kebijakan pengelolaan risiko perusahaan dengan pelaksanaannya.

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan atas strategi-strategi usaha dan potensi risiko Perusahaan, melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan pelaksanaanya, serta melakukan tinjauan kinerja unit pengelolaan risiko yang secara keseluruhan diselaraskan dengan pilar penerapan manajemen risiko yang efektif yaitu *Risk Governance, Risk Framework, Risk Management Process dan Internal Quality System.* Kemudian, hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko tidak hanya melakukan pertemuan secara internal, namun juga berdiskusi dengan Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga melakukan pertemuan dengan satuan kerja manajemen risiko (SKMR) perusahaan serta *risk taking unit* (RTU), secara umum berdiskusi terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan dan menyampaikan arahan dari Dewan Komisaris untuk memastikan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan sudah dilengkapi dengan analisa manajemen risiko dan didukung infrastruktur pendukung manajemen risiko yang efektif dan memadai dengan memperhatikan aspek tata kelola yang baik. Mengenalkan dan mengembangkan budaya risiko di lingkungan perusahaan juga menjadi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Asuransi Jasindo memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK.003/DK/IV/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Asuransi Jasa Indonesia.

added reinsurance risks, considering PT Asuransi Jasindo also manage these risks. The Risk Monitoring Committee also reviews the consistency between the company's risk management policies and their implementation.

During 2023, the Risk Monitoring Committee has monitored the Company's business strategies and potential risks, evaluated risk management policies and their implementation, and carried out a performance review of the risk management unit which is overall aligned with the pillars of implementing effective risk management, i.e., Risk Governance, Risk Framework, Risk Management Process, and Internal Quality System. Then, the results of the monitoring are submitted to the Board of Commissioners.

Furthermore, during 2023, the Risk Monitoring Committee doesn't only hold internal meetings, but also discuss with the Board of Commissioners. Moreover, the Risk Monitoring Committee also held meetings with the company's risk management work unit or Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) and Risk Taking Unit (RTU), generally discussing the company's risk management and conveying direction from the Board of Commissioners to ensure that the company's business and operational activities are equipped with risk management analysis and supported by effective and adequate risk management supporting infrastructure by paying attention to aspects of good governance. Introducing and developing a risk culture within the company is also the implementation of the Risk Monitoring Committee's duties during 2023.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee functions to assist the Board of Commissioners in providing recommendations regarding systems and procedures for assessing, selecting, and/or replacing the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Executive Officers of the Company to the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee also evaluates remuneration policies based on the Company's performance, risks, fairness, targets, and long-term strategies.

Nomination and Remuneration Committee Charter

Asuransi Jasindo has a Nomination and Remuneration Committee Charter stipulated in the Decision of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK.003/DK/IV/2022 dated April 1, 2022, concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Asuransi Jasa Indonesia.

Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Mempunyai integritas, objektivitas dan etika yang tinggi mengikuti yang lain dan di paling akhir baru;
2. Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam pengetahuan dan pengalaman yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang asuransi umum;
3. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*;
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama/anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Sekretaris, yang merupakan anggota aktif namun tanpa hak suara (*non-voting member*).

Requirements for Nomination and Remuneration Committee Membership

1. Possessing high integrity, objectivity, and ethics following the others and at the very end new;
2. Possessing high competence in adequate knowledge and experience including the provisions, regulations, and legislation that apply in the field of general insurance;
3. Understanding the concept of human resource management comprehensively and possessing the knowledge of the provisions of remuneration and/or nomination systems as well as succession plans;
4. Being able to act independently, i.e., being able to carry out duties professionally without conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and healthy corporate principles;
5. Being able to work together and communicate effectively.

The Composition of the Nomination and Remuneration Committee

The Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Commissioner and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS) ; The membership composition of the Nomination and Remuneration Committee consists of an Independent Commissioner as Chairman and member, 2 (two) members and 1 (one) Secretary. The composition of the members of the Asuransi Jasindo's Nomination and Remuneration Committee in 2023 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keterangan Description
Ngalim Sawego	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.003/DK/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Board of Commissioners Decree Number SK.003/DK/II/2021 dated February 17, 2021	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of Commissioner	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Adi Suryanto*	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002/DK/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Board of Commissioners Decree Number SK.002/DK/III/2022 dated March 28, 2022	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of Commissioner	Komisaris Commissioner
Indah Anggoro Putri	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/DK/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 Board of Commissioners Decree Number SK.001/DK/II/2023 dated January 31, 2023	Sesuai masa jabatan Komisaris According to the term of office of Commissioner	Komisaris Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keterangan Description
Marina Puspadewi**	Sekretaris Secretary	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002/DK/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Board of Commissioners Decree Number SK.002/DK/III/2022 dated March 28, 2022	2023	*Group Head* SDM Group Head of HR
Dita Adritia	Sekretaris Secretary	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002A/DK/IX/2023 tanggal 2 September 2023 Board of Commissioners Decree Number SK.002A/DK/IX/2023 dated September 2, 2023	2023	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002A/DK/IX/2023 tanggal 2 September 2023 Board of Commissioners Decree No. SK.002A/DK/IX/2023 dated September 2, 2023

* Adi Suryanto meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023
** Berhenti menjabat pada tanggal 1 September 2023, digantikan oleh Dita Adritia
* Adi Suryanto passed away on December 15, 2023
** Ceased office on September 1, 2023, replaced by Dita Adritia

Profil Anggota Nominasi dan Remunerasi

The Member Profile of Nomination and Remuneration Commitee

Profil Ngalim Sawego sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Ngalim Sawego's profile as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Board of Commissioners' profile section

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework on Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.003/DK/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Board of Commissioners Decree No. SK.003/DK/II/2021 dated February 17, 2021
Periode Jabatan Term of Office	2020 - 2025

Profil Indah Anggoro Putri sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Indah Anggoro Putri's profile as a member of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the profile section of the Board of Commissioners

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework on Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/DK/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 Board of Commissioners Decree No. SK.001/DK/II/2023 dated January 31, 2023
Periode Jabatan Term of Office	2022 - 2027

Dita Adritia Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi	
Usia Age	46 tahun | years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	• S1, Ekonomi Akuntansi, Univ. Sumatera Utara (USU), Indonesia (2023) • S2, Magister Manajemen SDM, Universitas Padjajaran, Indonesia (2023) • Bachelor Degree, Accounting Economics, Univ. North Sumatera (USU), Indonesia (2023) • Master Degree, Master of Human Resources Management, Padjadjaran University, Indonesia (2023)
Riwayat Pekerjaan Work History	• *Head Human Capital*, PT Asuransi Etiqa Indonesia (April 2020 - Agustus 2023) • *Head Human Capital*, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Februari 2017 - Maret 2023) • *Head Resourcing*, PT Bank Maybank Indonesia (Oktober 2013 - Februari 2017) • HR *Executive Manager*, Asuransi Cigna Indonesia (Mei 2012 - Oktober 2013) • HR *Department Head*, PT Bank Mega Syariah Indonesia (Juni 2008 - April 2012) • Head Human Capital, PT Asuransi Etiqa Indonesia (April 2020 - August 2023) • Head Human Capital, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (February 2017 - March 2023) • Head Resourcing, PT Bank Maybank Indonesia (October 2013 - February 2017) • HR Executive Manager, Cigna Indonesia Insurance (May 2012 - October 2013) • HR Department Head, PT Bank Mega Syariah Indonesia (June 2008 - April 2012)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002A/DK /IX/2023 tanggal 2 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Indonesia Board of Commissioners Decree No. SK.002A/DK /IX/2023 dated September 2, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Indonesian Jasa Insurance Limited Company
Periode Jabatan Term of Office	2023

Independensi Anggota Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan aspek independensi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The Independence of Nomination and Remuneration Members

The Members of the Nomination and Remuneration Committee must be independent, objective, and professional as regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter which is updated periodically in accordance with the applicable laws and regulations. Fulfillment of the independence aspects of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Aspek Independensi Independence Aspect	**Ngalim Sawego**	**Adi Suryanto**	**Indah Anggoro Putri**	**Marina Puspadewi**	**Dita Adritia**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	v	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	v	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no share ownership relationship in company	v	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the fellow members of the Audit Committee	v	v	v	v	v
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Has no position as an administrator of a political party, official or government	v	v	v	v	v

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Di akhir kalimat pakai; (titik koma), poin terakhir baru. - samakan dengan yang lain;
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum sumber daya manusia;
4. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi;
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
6. Memiliki *database* dan *talent pool* calon-calon anggota Direksi;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
8. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan regulator;
10. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance*;

Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.

Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:

a. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
c. Menghadiri rapat;
d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif; dan
e. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Sekretaris Komite merupakan anggota aktif namun tanpa hak suara (*non-voting member*). Tugas utama Sekretaris Komite adalah menyiapkan data dan informasi serta mengadministrasikan seluruh kegiatan komite termasuk menyiapkan laporan masing-masing komite kepada Dewan Komisaris.

The Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The Committee is tasked and responsible for carrying out the following matters:

1. To develop concepts and analyses related to the function of the Nomination and Remuneration Committee;
2. To assist the Board of Commissioners in providing recommendations regarding the number of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. To assist the Board of Commissioners in determining general human resources policies;
4. To recommend the approval of changes to the organizational structure up to one level below the Board of Directors;
5. To assist the Board of Commissioners in obtaining and analysing data on prospective Directors from the talent pool of officials one level below the Board of Directors;
6. Maintain a database and talent pool for the prospective members of the Board of Directors;
7. To evaluate remuneration policies and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   a. Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners for submitted to the General Meeting of Shareholders.
   b. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
8. To prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
9. To provide recommendations regarding the prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners and submit them to the General Meeting of Shareholders and regulators;
10. To provide recommendations regarding independent parties who will become the members of the Audit Committee and the Risk Monitoring and Good Corporate Governance Committee;

The Committee Chair is tasked and responsible for coordinating the implementation of Committee meetings and proposing agendas and meeting materials;

Committee members have duties and responsibilities in:

a. Holding regular meetings;
b. Studying the meeting material first;
c. Attending meetings;
d. Contributing and playing an active role;
e. Preparing a minutes of meetings (secretary).

The Committee Secretary is an active member but without voting rights (non-voting member). The main task of the Committee Secretary is to prepare data and information as well as administer all committee activities including preparing reports for each committee to the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib hadir dalam setiap rapat.

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi melangsungkan 4 (empat) kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least 1 (one) time every month. The members of the Nomination and Remuneration Committee must attend every meeting.

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee will hold 4 (four) meetings with the following agenda and attendance frequency:

Frekuensi Kehadiran
Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Ngalim Sawego	Ketua Ketua	4	4	100
Adi Suryanto*	Anggota Anggota	4	4	100
Indah Anggoro Putri	Anggota Anggota	4	4	100
Marina Puspadewi**	Sekretaris Sekretaris	3	3	100
Dita Adritia	Sekretaris Sekretaris	1	1	100

* Adi Suryanto meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023
** Berhenti menjabat pada tanggal 1 September 2023, digantikan oleh Dita Adritia
* Adi Suryanto passed away on December 15, 2023
** Ceased office on September 1, 2023, replaced by Dita Adritia

Agenda Rapat
Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	6 Januari 2023 January 6, 202	*Talent Mapping* 2023
2	10 April 2023 April 10, 2023	Remunerasi Direksi dan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia The Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia
3	14 Agustus 2023 August 14, 202	Direksi anak perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia The Board of Directors of the subsidiary PT Asuransi Jasa Indonesia
4	18 Desember 2023 December 18, 2023	Masa tugas personil organ-organ Dewan Komisaris The term of office for the members of the Board of Commissioners

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

The competency improvement program is carried out by the Nomination and Remuneration Committee so that it can always follow and update information about the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee. The competency improvement program that members of the Nomination and Remuneration Committee will participate in in 2023 can be seen in the following table.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program

The competency improvement program is carried out by the Nomination and Remuneration Committee so that it can always follow and update information about the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee. The competency improvement program that members of the Nomination and Remuneration Committee will participate in in 2023 can be seen in the following table.

No	Dewan Komisaris/Organ Dewan Komisaris Board of Commissioner / Board of Commissioners Organ	*Workshop*/Seminar/*Training* Workshop/Seminar/Training	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Ngalim Sawego	Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan Forum for Strengthening Financial Services Sector	Dewan Audit, Otoritas Jasa Keuangan Audit Board, Financial Services Authority	9 Juni 2023 , Hotel Mahalaya Solo, Jateng June 9, 2023, Hotel Mahalaya Solo, Central Java
		IFG *International Conference: Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*	Indonesia Financial Group (IFG)	19-20 September 2023, ShangriLa Jakarta September 19-20, 2023, ShangriLa Jakarta
2	Adi Suryanto	*On Boarding Commissioner* Program Angkatan 5 On Boarding Commissioner Program Batch 5	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises	20 Juli 2023 - 21 September 2023 July 20, 2023 - September 21, 2023
		IFG *International Conference: Shaping the Foundations for sustainable and Resilient Insurance and Pension Fund*	Indonesia Financial Group (IFG)	19-20 September 2023, Jakarta September 19-20, 2023, Jakarta
3	Indah Anggoro Putri	Konferensi Nasional 2023 "Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor *'Untapped Potential'* di Sektor Keuangan" National Conference : "Towards a Sustainable Future : Exploring 'Untapped Potential' in the Financial Sector"	Indonesia Financial Group (IFG)	16 Mei 2023, Hotel JS Luwansa Jakarta May 16, 2023, Hotel JS Luwansa Jakarta.

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Besarnya penghasilan untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain penghasilan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan prioritas kegiatan yang dilakukan sesuai kemampuan perusahaan dan aspek kewajaran.

Nomination and Remuneration Committee Remuneration Policy

1. The amount of honorarium for the members of the Nomination and Remuneration Committee who are not the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities, a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's salary and they are not permitted to receive any other income other than this honorarium.
2. The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee who is an Independent Commissioner is not given additional income other than income as a member of the Board of Commissioners.
3. The Nomination and Remuneration Committee budget is prepared by taking into account the Nomination and Remuneration Committee Work Plan and the priority of activities carried out in accordance with the company's capabilities and fairness aspects.

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Penyampaian Top 20% Talenta BoD-1 dan Hasil Evaluasi terhadap Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia
2. Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Usulan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia
3. Penyampaian Persetujuan Dewan Komisaris atas Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia/PT Jasindo
4. Pertimbangan Peninjauan Remunerasi Direksi dan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia untuk Tahun 2023
5. Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia atas Usulan Calon Direksi Perusahaan Patungan PT Asuransi Jasa Indonesia
6. Penyampaian Persetujuan Dewan Komisaris atas Penunjukan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah
7. Penyampaian Persetujuan Dewan Komisaris atas Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia

Nomination and Remuneration Committee Work Implementation Report

1. The submission of the Top 20% of BoD-1 Talents and Evaluation Results for the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia
2. The submission of the Response of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia on the Proposal of Candidates for the Board of Commissioners of the Subsidiary PT Asuransi Jasa Indonesia
3. The submission of Board of Commissioners Approval for the Appointment of Acting Director of Finance and the Investment of PT Asuransi Jasa Indonesia/PT Jasindo
4. Considerations for Reviewing the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia for 2023
5. The submission of the Response of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia to the Proposal of Prospective Directors of the PT Asuransi Jasa Indonesia Joint Venture Company
6. The submission of Approval to the Board of Commissioners for the Appointment of the Director of Operations and the Director of Finance of PT Asuransi Jasindo Syariah
7. The submission of Approval to the Board of Commissioners for the Appointment of the Corporate Secretary of PT Asuransi Jasa Indonesia

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of The Board of Commissioners

Sekretariat Dewan Komisaris adalah organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan beranggotakan staf Sekretariat Dewan Komisaris.

Prinsip Dasar

1. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
   a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan bumn;
   b. Memiliki integritas yang baik;
   c. Memahami fungsi kesekretariatan; dan
   d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
2. Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.
4. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN/perusahaan lain;
   b. Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada BUMN/perusahaan lain;
   c. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan
   d. Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.

The Secretariat of the Board of Commissioners is a supporting organ established and responsible to the Board of Commissioners. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners and consists of staff from the Secretariat of the Board of Commissioners.

Basic principles

1. The Secretary of the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Board of Commissioners by taking into account the following requirements:
   a. Understanding the management, monitoring, and development systems of soe;
   b. Possessing good integrity;
   c. Understanding secretarial functions; and
   d. Possessing the ability to communicate and coordinate well.
2. The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.
3. The Secretary to the Board of Commissioners comes from outside the Company.
4. The Secretary of the Board of Commissioners and the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners may not serve as:
   a. The member of the Board of Commissioners at SOE/other companies;
   b. The secretary/staff of the Secretariat of the Board of Commissioners at SOE/other companies;
   c. Other committee members at the Company; and
   d. Committee members at SOE/other companies.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Hari Mochamad Rochim Sekretaris Dewan Komisaris	
Usia Age	53 tahun years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Riwayat Pendidikan Education Background	S1 Universitas Widya Gama, Malang (1995) Bachelor's Degree at Widya Gama University, Malang (1995)

Riwayat Pekerjaan Employment History	• Pengendali Sub Kelompok Kementerian BUMN, (2020-sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2019-2021) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI (2013-2018) • Kepala Sub Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIb-2, Kementerian BUMN (2019-2020 • Kepala Sub Bidang *Monitoring* dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I, Kementerian BUMN (2017-2019) • Kepala Sub Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ia-2, Kementerian BUMN (2015-2017) • Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ia, Kementerian BUMN (2014-2015) • Kepala Sub Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Ia, Kementerian BUMN (2010-2014) • Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perkebunan II.B, Kementerian BUMN (2006-2019) • The Sub-Group Controller of the Ministry of SOE, (2020-present) • The Board of Commissioners' Secretary of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2019-2021) • The Board of Commissioners' Secretary of PT Perkebunan Nusantara XI (2013-2018) • The Head of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Sub-Sector IIb-2, the Ministry of SOE (2019-2020 • The Head of Monitoring and Evaluation Sub-Division of Social and Environmental Responsibility Program I, the Ministry of SOE (2017-2019) • The Head of Financial Services Sub-Sector, Survey Services and Consultants Ia-2, the Ministry of SOE (2015-2017) • The Head of Forestry Business Sub-Sector Ia, the Ministry of SOE (2014-2015) • The Head of Restructuring and Business Development Sub Division Ia, the Ministry of SOE (2010-2014) • The Head of Sub-Division of Governance and Risk Management for Plantation Businesses II.B, the Ministry of SOE (2006-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor SR-33/DSI-MBU/01/2023 tanggal 6 Januari 2021 The Letter of Deputy for Human Resources, Technology and Information Number SR-33/DSI-MBU/01/2023 dated January 6, 2021

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tugas pokok untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
   c. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
   d. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, Risalah Rapat maupun dokumen lainnya;
   e. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   f. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
   g. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas lain berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   c. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
   d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;

The Duties of the Board of Commissioners' Secretary

1. The Board of Commissioners' Secretary has the main duty of assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties in the form of:
   a. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners;
   b. Preparing the Minutes of Board of Commissioners' Meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
   c. Submitting the minutes of meetings to interested parties;
   d. Administering the Board of Commissioners' documents, including incoming letters, outgoing letters, the minutes of meetings and other documents;
   e. Preparing a draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
   f. Preparing draft reports for the Board of Commissioners;
   g. Carrying out other duties of the Board of Commissioners
2. Apart from carrying out the duties as intended in point 1 above, the Board of Commissioners' Secretary carries out other duties in the form of:
   a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance;
   b. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
   c. Coordinating committee members, if necessary, in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
   d. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties;

e. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
   - Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya;
   - Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya;
   - Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pada Tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris tidak mengikuti Pengembangan Kompetensi.

Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris

1. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
2. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. Honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
   b. Tunjangan terdiri dari:
      - tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium per bulan;
      - tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
   c. Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga;
   d. Jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa produksi (bonus) terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
   e. Asuransi purna jabatan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium Sekretaris Dewan Komisaris dan fasilitas pakaian kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

3. Sekretaris Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud pada butir 2.
4. Pajak atas penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditanggung Perusahaan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi Sekretaris Dewan Komisaris dan jasa produksi (bonus) bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris.

e. Following up every decision of the Board of Commissioners in the following manner:
   - Recording every decision made in decision-making forums and the person in charge;
   - Monitoring and checking the stages of progress in implementing the results of meeting decisions, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners;
   - Making efforts to encourage the implementation of follow-up actions to meeting decisions, considerations, opinions, suggestions, and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant person in charge

3. In the context of orderly administration and implementation of good corporate governance, the Board of Commissioners' Secretary must ensure that documents for carrying out activities as referred to in point 1 are stored properly in the Company.

The Development of the Board of Commissioners' Secretary

In 2023, the Board of Commissioners' Secretary doesn't participate in Competency Development.

The Income of the Board of Commissioners' Secretary

1. The income of the Board of Commissioners' Secretary is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities.
2. The amount and type of income of the Board of Commissioners' Secretary consists of:
   a. The maximum honorarium is 15% (fifteen percent) of the salary of the President Director of the Company;
   b. Benefits consist of:
      - the transportation allowance of 20% (twenty percent) of the monthly honorarium;
      - holiday allowance which is paid once in 1 (one) year in the amount of 1 (one) times the honorarium.
   c. Health facilities in the form of inpatient care, outpatient care, and medicines for the person concerned, excluding family;
   d. Production services (bonuses) can be given to the Board of Commissioners' Secretary in an amount not exceeding the lowest production services (bonus) received by an official 1 (one) level below the Board of Directors.
   e. Post-service insurance is a maximum of 25% (twenty five percent) of the honorarium for the Board of Commissioners' Secretary and work clothing facilities taking into account the Company's financial capabilities.
3. The Board of Commissioners' Secretary is prohibited from receiving other income other than as referred to in point 2.
4. Taxes on the income of the Board of Commissioners' Secretary and the Board of Commissioners' Secretariat Staff are borne by the Company, except for production services (bonuses) for the Board of Commissioners' Secretary and production services (bonuses) for the Board of Commissioners' Secretariat Staff.

Susunan Komite Berdasarkan Bagan

Composition of Committees Based on Chart

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh organ baik yang bersifat struktural maupun ad-hoc dalam bentuk komite. Hingga akhir tahun 2023, organ pendukung Direksi Asuransi Jasindo terdiri dari Komite Talenta, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Investasi, Komite Manajemen Aset Liabilitas, Komite Peneliti Karyawan, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by organs both structural and ad-hoc in the form of committees. Until the end of 2023, the supporting organs of the Asuransi Jasindo's Board of Directors consist of the Talent Committee, Risk Management Committee, Product Development Committee, Investment Committee, Asset Liability Management Committee, Employee Research Committee, Information Technology Steering Committee, Corporate Secretary and Internal Monitoring Unit.

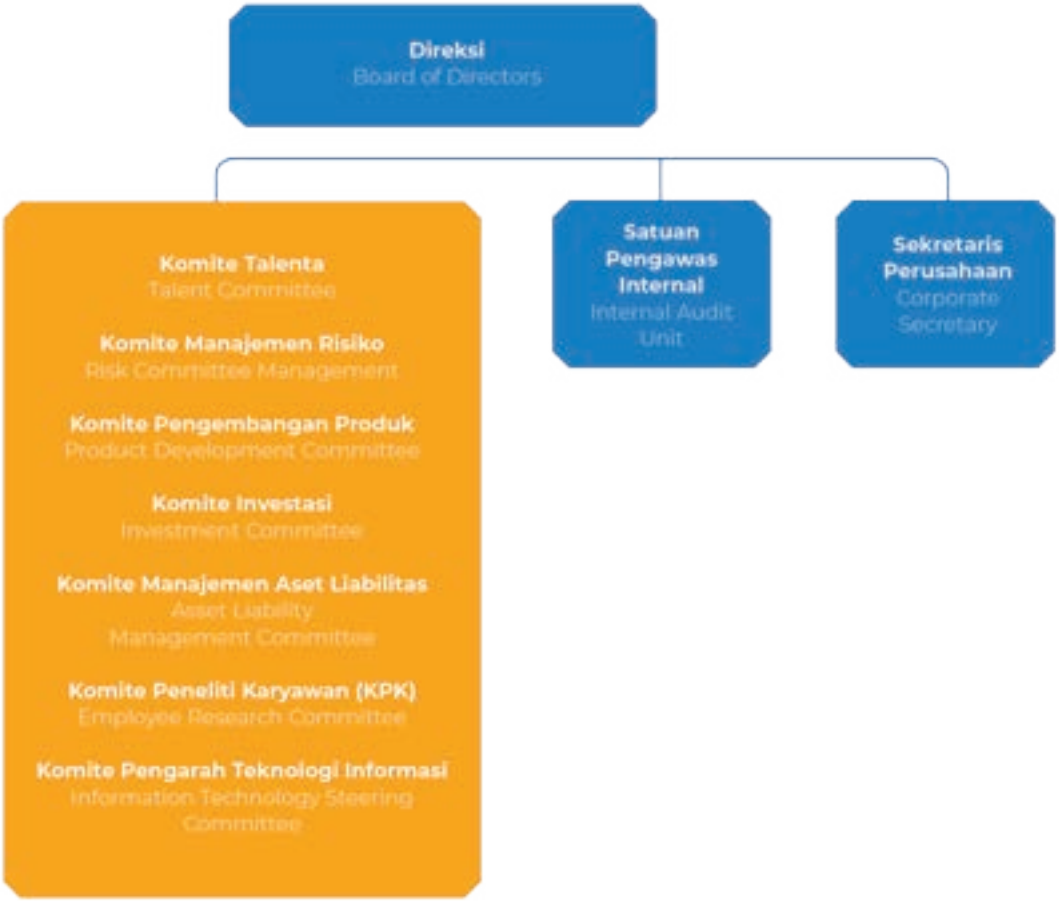

Komite Talenta

Komite Talenta adalah sebuah komite yang dibentuk perusahaan untuk menjalankan fungsi manajemen talenta yang terdiri atas seleksi, klasifikasi, pembinaan/pengembangan, penugasan (*talent mobility*) dan retensi talenta.

Tugas Komite Talenta antara lain:

1. Menjalankan proses manajemen talenta untuk masing-masing posisi jabatan;
2. Menetapkan proses klasifikasi/*mapping* talenta berdasarkan 6 (*six*) *boxes*;
3. Menetapkan program pengembangan talenta;
4. Menyusun pelaksanaan penugasan para talenta;
5. Menjalankan program retensi talenta.

Talent Committee

The Talent Committee is a committee formed by the company to carry out talent management functions consisting of selection, classification, coaching / development, assignment (talent mobility) and talent retention.

The duties of the Talent Committee include:

1. Carrying out the talent management process for each position;
2. Establishing a talent classification/mapping process based on 6 (six) boxes;
3. Establishing talent development programs;
4. Arranging the implementation of talent assignments;
5. Ongoing Awaiting a talent retention program.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, paling sedikit memuat:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko;
2. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko; dan
3. Penetapan kebijakan dan/atau hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Komite Manajemen Risiko, paling sedikit beranggotakan separuh dari jumlah anggota Direksi dan pejabat struktural terkait. Salah satu anggota Direksi yang dimaksud merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the authority and responsibility to provide recommendations to the Board of Directors, including at least:

1. The preparation of policies, strategies, and guidelines for implementing risk management;
2. Improvements or adjustments to the implementation of risk management based on the results of the evaluation of risk management implementation; and
3. The determination of policies and/or matters related to business decisions that deviate from normal procedures.

The Risk Management Committee consists of at least half of the members of the Board of Directors and related structural officials. One of the members of the Board of Directors in question is a member of the Board of Directors who is in charge of the risk management function.

Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk dibentuk dengan maksud dan tujuan membantu Direksi, khususnya yang membawahi Pengembangan Produk, dalam bentuk pemberian pendapat, penilaian dan saran serta rekomendasi kepada Direksi atas pengembangan produk serta rencana strategi yang akan dilakukan secara independen dan objektif, yang tidak bersifat mengikat Direksi Perusahaan dan juga memonitor dan mengevaluasi kinerja produk.

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah melakukan penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan dan strategi produk Perusahaan. Tugas tersebut paling sedikit memuat:

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produksi asuransi; dan
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya .

Komite Pengembangan Produk paling sedikit terdiri dari anggota Direksi yang membawahi fungsi pengembangan produk, fungsi operasional, dan fungsi keuangan, serta *Group Head* yang membawahi pengembangan produk, dan Aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan.

Product Development Committee

The Product Development Committee was formed with the aim and purpose of assisting the Board of Directors, especially those in charge of Product Development, in the form of providing opinions, assessments, and suggestions as well as recommendations to the Board of Directors regarding product development and strategic plans which will be carried out independently and objectively, which is not binding on the Company's Board of Directors and also monitor and evaluate product performance.

The duty of the Product Development Committee is to implement and regulate all of the Company's product development and strategy. This duty includes at least:

1. Preparing a strategic plan for the development and marketing of insurance products as part of the strategic plan for the Company's business activities;
2. Evaluating the suitability of new insurance products to be marketed with the strategic plan for insurance product development and marketing; and
3. Evaluating the performance of insurance products and proposing the changes or discontinuation of their marketing.

The Product Development Committee consists of at least the members of the Board of Directors who oversee product development functions, operational functions, and financial functions, as well as the Group Head who oversees product development, and the Company Actuary or Company experts.

Komite Investasi

Komite Investasi bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam pengelolaan investasi. Tugas tersebut mencakup:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi dan memonitor penerapan kebijakan dan strategi investasi berdasarkan rekomendasi dari komite manajemen aset liabilitas;

Investment Committee

The Investment Committee is tasked with providing advice and recommendations to the Board of Directors in managing investments. These duties include:

1. formulating investment policies and strategies and monitoring the implementation of investment policies and strategies based on recommendations from the asset liability management committee ;

2. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap pedoman, rencana-rencana investasi yang akan dilaksanakan dan/atau rekomendasi strategi pengelolaan investasi aset dan *risk appetite* dari komite manajemen aset liabilitas;

3. Melakukan *review* atas rencana atau pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Direksi, termasuk penilaian terhadap RKAP dan RJPP yang terkait dengan investasi.

Komite Investasi paling sedikit beranggotakan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengelolaan investasi, serta *Group Head* yang membawahi fungsi pengelolaan investasi, manajemen risiko, dan Aktuaris Perusahaan. Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengelolaan investasi bertindak sebagai ketua komite.

Komite Manajemen Aset Liabilitas

Komite Manajemen Aset Liabilitas bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Direksi terhadap segala hal yang terkait dengan pengelolaan aset liabilitas kepada Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi, meliputi:

1. Melakukan analisa secara komprehensif terhadap aset dan liabilitas perusahaan;
2. Melakukan identifikasi terhadap aset dan liabilitas perusahaan yang berpotensi menjadi risiko perusahaan, baik risiko likuiditas, risiko investasi, dan risiko operasional lainnya;
3. Memberikan rekomendasi strategi pengelolaan aset, dan *risk appetite* agar sesuai dengan karakteristik liabilitas berdasarkan profil liabilitas;
4. Memberikan rekomendasi strategi pengelolaan aset investasi agar sesuai dengan karakteristik liabilitas perusahaan (*liability driven investment*);
5. Memberikan *input* dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan manajemen lebih lanjut.

Komite Manajemen Aset Liabilitas paling sedikit terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi yang membawahi bidang keuangan atau investasi dan bidang operasional, serta *Group Head* yang membawahi fungsi investasi, keuangan, manajemen risiko, akuntansi, klaim, dan aktuaria/tenaga ahli Perusahaan. Anggota Direksi yang membawahi bidang operasional bertindak sebagai ketua komite.

Komite Peneliti Karyawan (KPK)

KPK melakukan tugasnya dengan meneliti setiap pelanggaran berat karyawan dengan hasil risalah rapat sebagai bahan rekomendasi yang ditujukan kepada Direksi, ditandatangani oleh ketua atau anggota yang ditunjuk. Hasil keputusan rapat disampaikan oleh KPK kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan Direksi dalam memberikan keputusan untuk memberikan putusan sanksi disiplin pelanggaran berat yang sifatnya mendesak.

2. Providing suggestions and recommendations on guidelines, investment plans to be implemented and/or recommendations for asset investment management strategies and risk appetite from the asset liability management committee;
3. Reviewing investment plans or implementation carried out by the Board of Directors, including assessing the Company's RKAP and RJPP related to investment.

The Investment Committee consists of at least the members of the Board of Directors who oversee the investment management function, as well as the Group Head who oversees the investment management, risk management and Company Actuary functions. The members of the Board of Directors who oversee the investment management function act as committee chairs.

Asset Liability Management Committee

The Asset Liability Management Committee is tasked with providing an independent professional opinion to the Board of Directors on all matters relating to the management of assets and liabilities to the Board of Directors, as well as identifying matters that require the attention of the Board of Directors, including:

1. Carrying out a comprehensive analysis of the company's assets and liabilities;
2. Identifying company's assets and liabilities that have the potential to become company's risks, including liquidity risk, investment risk and other operational risks;
3. Providing recommendations for asset management strategies and risk appetite to suit the characteristics of liabilities based on the liability profile;
4. Providing recommendations for investment asset management strategies to suit the characteristics of the company's liabilities (liability driven investment);
5. Providing input and recommendations in making further management decisions.

The Asset Liability Management Committee consists of at least 2 (two) members of the Board of Directors who oversee the financial or investment and operational fields, as well as the Group Head who oversees the investment, finance, risk management, accounting, claims and actuarial / expert functions of the Company. The members of the Board of Directors who are in charge of operational areas act as committee chairs.

Employee Research Committee or Komite Peneliti Karyawan (KPK)

The KPK Committee carries out its duties by examining every serious employee violation with the results of the minutes of the meeting as recommendation material addressed to the Board of Directors, signed by the chairman or appointed member. The results of the meeting decisions are conveyed by the Corruption Eradication Committee to the Board of Directors as material for consideration by the Board of Directors in making decisions to impose urgent disciplinary sanctions for serious violations.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang bertanggung jawab memastikan penerapan sistem teknologi informasi sejalan dengan rencana strategis Perusahaan serta meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Tugas tersebut mencakup:

a. Memberikan masukan dalam perspektif makro terhadap rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang penerapan TI perusahaan yang dibuat oleh *Group* Teknologi Informasi;
b. Melakukan evaluasi atas realisasi rencana kerja *Group* Teknologi Informasi sebagai *group* yang melakukan implementasi TI melalui upaya sebagai berikut:
   - Mereviu efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalisir risiko atas investasi Perusahaan pada sektor TI;
   - Mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil proyek-proyek TI yang telah disetujui dan dilaksanakan dengan rencana strategis TI;
   - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek TI agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati;
   - Memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran pelaksanaan proyek-proyek TI;
   - Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara TI dan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perusahaan;
   - Memantau efektivitas alokasi sumber daya TI yang dimiliki Perusahaan.
c. Melaksanakan pemantauan atas kinerja TI, untuk selanjutnya dapat memberikan saran dan masukan sekaligus menentukan skala prioritas pengerjaan inisiatif TI yang dapat diimplementasikan Perusahaan untuk menunjang operasional serta penyediaan informasi yang layak bagi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen;
d. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap usulan kebutuhan atau perubahan teknologi dan aplikasi serta atas hasil analisis dan evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c;
e. Memberikan rekomendasi dan memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Komite Pengarah Teknologi Informasi beranggotakan minimal 2 (dua) anggota Direksi dan pejabat struktural terkait. Anggota Direksi yang membawahi bidang teknologi informasi bertindak sebagai ketua komite.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is the committee responsible for ensuring that the implementation of information technology systems is in line with the Company's strategic plan while increasing the Company's competitive advantage through the appropriate use of information technology. These duties include:

a. Providing input from a macro perspective to the short-term and long-term work plans for the company's IT implementation created by the Information Technology Group;
b. Evaluating the realization of the Information Technology Group work plan as a group implementing IT through the following efforts:
   - Reviewing the effectiveness of strategic steps to minimize the risks of the Company's investment in the IT sector;
   - Evaluating the level of conformity of the results of IT projects that have been approved and implemented with the IT strategic plan;
   - Monitoring and evaluating the implementation of IT projects so that they are in accordance with the agreed project plan;
   - Monitor and evaluate the realization of IT project implementation budgets;
   - Monitor and evaluate the suitability between IT and management information system needs and the needs of the Company's business activities;
   - Monitor the effectiveness of the Company's IT resource allocation.
c. Carrying out monitoring of IT performance, to further provide suggestions and input as well as determine the priority scale for working on IT initiatives that can be implemented by the Company to support operations and provide appropriate information for management decision making needs;
d. Providing recommendations to the Board of Directors regarding proposed needs or changes in technology and applications as well as on the results of analysis and evaluation as stated in letters a, b, and c;
e. Providing recommendations and monitor efforts to resolve various IT-related problems that can not be resolved by user work units and IT administration effectively, efficiently, and on time.

The Information Technology Steering Committee consists of a minimum of 2 (two) members of the Board of Directors and related structural officials. The members of the Board of Directors who are in charge of information technology act as committee chairs.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memperlancar hubungan antar organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan sangat menyadari pentingnya peran Sekretaris Perusahaan, sehingga untuk mendukung peran tersebut Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Corporate Secretary has a very important role in facilitating relations between Company's Organs, the relationship between the Company and its stakeholders and fulfilling the provisions of the applicable laws and regulations. The Company is very aware of the importance of the role of the Corporate Secretary, so to support this role the Company has appointed the Corporate Secretary as an official one level below the Board of Directors. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Brellian Gema Widayana, ST, CRMP Sekretaris Perusahaan	
Usia Age	31 tahun | years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education History	S1 - Teknik Industri, Universitas Telkom (2010-2014) Bachelor's Degree - Industrial Engineering, Telkom University (2010-2014)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• *Head of Project Management* (2021) • *Group Head Corporate Strategy* (2022) • *Group Head Corporate Secretary* (2023-Sekarang) • Head of Project Management (2021) • Group Head Corporate Strategy (2022) • Group Head Corporate Secretary (2023-Present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework for Appointment	Surat Keputusan Direktur PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK.212/ DMA.SDM/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Decree of the Director of PT Asuransi Jasa Indonesia Number SK.212/ DMA.SDM/VIII/2023 dated August 2, 2023

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan di Asuransi Jasindo dapat dilihat pada gambar berikut:

Corporate Secretary Organizational Structure

The organizational structure of the Corporate Secretary at Asuransi Jasindo can be seen in the following figure:

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (*investor relation*) yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan *stakeholders* (*public relation*) yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan masyarakat;
4. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance officer*);
5. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi/secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
6. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
7. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perusahaan.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Direksi dan dan membuat Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi;
2. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus;
3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham;
4. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS;
5. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
6. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
7. Menyelenggarakan rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
8. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
9. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.

The Main Duties of the Corporate Secretary

1. Providing services to the public for any information required by investors (investor relations) relating to the condition of the Company;
2. Providing services to the public for any information required by stakeholders (public relations) relating to the condition of the Company;
3. Being a liaison officer or contact person between the Company and the community;
4. Ensuring compliance with statutory regulations (compliance officer);
5. Providing information required by the Board of Commissioners and the Board of Directors/periodically and/or at any time if requested;
6. Administering and storing company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and Minutes of the Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners' meetings and GMS;
7. The functions of the Corporate Secretary can be held concurrently by the Company's Director.

Apart from carrying out the main functions mentioned above, the Corporate Secretary carries out the following duties:

1. Attending the Board of Directors' Meetings and preparing the Minutes or the Minutes of the Board of Directors' Meetings;
2. Creating and regularly updating Special Lists;
3. Creating and periodically updating the Shareholder Register;
4. Being responsible for organizing the GMS;
5. Preparing the necessary materials related to the Board of Directors' routine statements / activities which will be submitted to external parties;
6. Preparing the necessary materials relating to matters that require a decision from the Board of Directors regarding the management of the Company;
7. Organizing meetings within the Board of Directors, both routine and non-routine;
8. Following up on every decision of the Board of Directors by recording every decision made in decision-making forums and those responsible for it and monitoring and checking the progress of implementing meeting results;
9. Carrying out secretarial activities within the Board of Directors and the Company as well as their administration.

Realisasi Program Kerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Group Sekretaris Perusahaan

Membawahi 2 (dua) unit yang terdiri dari unit Hubungan Masyarakat (Humas), unit Protokoler & Sekretariat. Realisasi program kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2023 antara lain:

1. Pembongkaran sekaligus Pembuatan/Pemasangan Kembali *Pylon Sign/Channel Letter/Signage* di Kantor Cabang yang terkena relokasi (Banjarmasin, Solo, Makassar, Palembang, Padang)
2. Melengkapi kebutuhan *marketing kit* untuk keperluan pengajuan produk ke OJK, revisi pedoman dan petunjuk pelaksanaan komunikasi pemasaran, serta distribusi souvenir untuk berbagai kegiatan bersama relasi.
3. Pengelolaan *Contact Center* dengan *monitoring* pelaksanaannya.
4. Pengelolaan hasil dari *Media Monitoring* yang digunakan untuk keperluan menangkap berita dan isu-isu terkini terkait dengan Asuransi Jasindo
5. Melaksanakan publikasi rutin dan *media monitoring*. Adapun rilis Perusahaan rutin dikeluarkan dan di-*publish* di berbagai media, yaitu perihal:
   - Jasindo dan Kementerian BUMN Dukung Sertifikasi Guru di Maluku dan Nusa Tenggara
   - RBC Jasindo Kembali Positif, Ini Catatan dari Pengamat Asuransi
   - Jasindo Perkuat Segmentasi Korporasi di 2023
   - Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jasindo Bantu Renovasi Asrama Putri HKBP
   - Jasindo Proteksi Pengunjung F1 Powerboat Danau Toba dengan Asuransi
   - Tingkatkan Kesadaran Berolahraga, Jasindo Gelar Jalan Sehat di Riau dan Lampung
   - Jasindo Kembali Menggelar Literasi Keuangan di 2023
   - Sah! RBC Jadi 149,57 Persen Jasindo Optimistis Perusahaan Berkembang Pesat
   - Asuransi Jasindo Lepas Pemudik 2023 di Istora Senayan
   - Mobil Sehat Asuransi Jasindo Layani Masyarakat serta Pelajar di Jawa Tengah
   - Pembayaran Klaim Kapal PT Timah 24M
   - Asuransi Jasindo Mendukung Program Inkubasi Mitra Unggulan 2023
   - Asuransi Jasindo Terapkan Sistem Terintegrasi GRC untuk Meningkatkan Perlindungan Polis Pemegang Polis
   - Asuransi Jasindo Rayakan Ulang Tahun ke-50 dengan Kegiatan Mengajar dan Berbagi Inspirasi di SDN 1 Cikoneng, Puncak – Bogor
   - Jasindo Kunjungi Anak-Anak Penderita Kanker dan Adakan Donor Darah
   - Asuransi Jasindo Kembali Dipercaya Lindungi Aset Krakatau Steel
   - Asuransi Jasindo Bayarkan Klaim Rp10,3 Miliar kepada Semen Tonasa

The Realization of the 2023 Corporate Secretary Work Program

Corporate Secretary Group

Monitoring 2 (two) units consisting of the Public Relations (PR) unit, Protocol & Secretariat unit. The realization of the work program up to the fourth quarter of 2023 includes:

1. Dismantling and preparing/reinstalling Pylon Sign/ Channel Letter/Signage at Branch Offices affected by relocation (Banjarmasin, Solo, Makassar, Palembang, Padang)
2. Completing marketing kit requirements for product submissions to the FSA, the revision of guidelines and instructions for implementing marketing communications, as well as the distribution of souvenirs for various activities with relations.
3. Contact Centre management by monitoring its implementation.
4. The management of Media Monitoring results which are used to capture the latest news and issues related to Asuransi Jasindo
5. Carrying out routine publications and media monitoring. The Company's releases are routinely issued and published in various media, which are regarding:
   - Jasindo and the Ministry of SOE Supporting Teacher Certification in Maluku and Nusa Tenggara
   - RBC Jasindo Returns Positive, This is a Note from an Insurance Observer
   - Jasindo Strengthens Corporate Segmentation in 2023
   - Supporting improving the quality of education, Jasindo helps renovate the HKBP girls' dormitory
   - Jasindo Protects F1 Powerboat Lake Toba Visitors with Insurance
   - Increase Awareness of Exercise, Jasindo Holds Healthy Walks in Riau and Lampung
   - Jasindo Holds Financial Literacy Again in 2023
   - Confirmed! RBC Reaches 149.57 Percent, Jasindo Optimistic about Rapid Company Growth
   - Asuransi Jasindo Releases Homecomers 2023 at Istora Senayan
   - Mobil Sehat Asuransi Jasindo Serves the Community and Students in Central Java
   - The Payment of PT Timah Ship Claim 24M
   - Asuransi Jasindo Supports the 2023 Leading Partner Incubation Program
   - Asuransi Jasindo Implements GRC Integrated System to Increase Policy Protection for Policyholders
   - Asuransi Jasindo Celebrates its 50th Anniversary with Teaching Activities and Sharing Inspiration at SDN 1 Cikoneng, Puncak – Bogor
   - Jasindo Visits Children Suffering from Cancer and Holds Blood Donations
   - Asuransi Jasindo is Trusted Again to Protect Krakatau Steel's Assets
   - Asuransi Jasindo Pays Claims of IDR10.3 Billion to Semen Tonasa

- Jalani Tata Kelola Yang Baik, Jasindo Raih Penghargaan Top GRC
- Mau Klaim Asuransi Tani Padi? Begini Langkah-langkahnya
- Asuransi Jasindo Mendukung Skema *Pooling Fund* Bencana untuk Meningkatkan Proteksi Barang Milik Negara
- Asuransi Jasindo Bayar Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rp1,1 Miliar
- Jasindo Proteksi Sirkuit Mandalika dengan Asuransi
- Mobil Sehat Asuransi Jasindo Kembali Hadir di Surabaya dan Probolinggo
- Asuransi Jasindo Pastikan Keberlanjutan Program Taman Baca di Ciamis
- AAUI Surakarta Menggelar *Podcast* Bincang Sore Spesial Hari Asuransi
- Bulan Inklusi Keuangan, Asuransi Jasindo Sosialisasi dan Tebar Diskon
- Jasindo Perkuat Ekonomi Indonesia Melalui Transformasi
- Lindungi Aset Negara, Asuransi Jasindo dan Konsorsium Beri Layanan Terbaik

6. Pembuatan dan Penyampaian *Sustainability Report* Tahun 2023 ke OJK melalui *e-reporting*.
7. Pembuatan *Annual Report* Perusahaan Tahun 2023
8. Pelaksanaan *Media Gathering* yang diadakan di Jakarta dengan topik Jasindo Perkuat Segmentasi Korporasi di 2023, dihadiri oleh Direktur Bisnis Strategis pada tanggal 9 Februari 2023.
9. Pelaksanaan kegiatan *Kick-Off Meeting* Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2023 pada tanggal 2-4 Februari 2023
10. Pelaksanaan Rangkaian Perayaan HUT Asuransi Jasindo ke-50 sepanjang Bulan Mei-Juni 2023.
11. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Asuransi Kinerja Asuransi Jasindo Tahun 2023 pada tanggal 16-18 November 2023.
12. Pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan Literasi Keuangan ke Kelompok Kegiatan (Poktan) Tani, Siswa dan Mahasiswa di Wilayah Indonesia.

- Implementing Good Governance, Jasindo Wins Top GRC Award
- Wanting to claim Rice Farmer Insurance? Here are the steps
- Asuransi Jasindo Supports the Disaster Pooling Fund Scheme to Increase Protection of State Property
- Asuransi Jasindo Pays Rice Farming Business Insurance Claims (AUTP) IDR 1.1 Billion
- Jasindo Protects the Mandalika Circuit with Insurance
- Asuransi Jasindo Healthy Cars are Back in Surabaya and Probolinggo
- Asuransi Jasindo Ensures the Sustainability of the Reading Park Program in Ciamis
- AAUI Surakarta Holds Special Afternoon Talk Podcast on Insurance Day
- On Financial Inclusion Month, Jasindo Insurance Conducts Outreach and Offers Discount
- Jasindo Strengthens Indonesia's Economy Through Transformation
- Protecting State Assets, Asuransi Jasindo and the Consortium Provide the Best Service

6. The Preparation and Submission of the 2023 Sustainability Report to FSA via e-reporting.
7. The development of the Company's Annual Report for 2023
8. Media Gathering Event, held in Jakarta discussing about how Jasindo Strengthening Corporate Segmentation in 2023, attended by the Director of Strategic Business on February 9, 2023.
9. Kick-Off Meeting Company Budget Work Plan for 2023 on February 2nd - 4th, 2023
10. 50th Asuransi Jasindo Anniversary Celebration Series throughout May-June 2023.
11. The implementation of Insurance Performance Evaluation activities for Asuransi Jasindo Performance in 2023 on November 16-18, 2023.
12. 9 (Nine) Financial Literacy activities for Farmer Activity Groups (Poktan), Students and College Students in the Indonesian Region.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development Program

Nama Name	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Date
Brellian Gema Widayana, ST, CRMP	Program Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMP) Certified Risk Management Professional	6 - 9 Maret 2023 & 13-14 Maret 2023 March 6 - 9, 2023 & March 13 - 14, 2023
	Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen The Socialization of Consumer Personal Data Protection	16 Juni 2023 June 16, 2023
	Change Leader AKHLAK *Refreshment Training*	7 - 14 Agustus 2023 August 7 - 14, 2023
	Webinar Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Webinar on Strengthening National Values	25 September 2023 September 25, 2023
	Program *LEAD-1 Batch* 2 - Sesi *Leaders Cafe* 1 LEAD-1 Program Batch 2 - 1st Leaders Cafe Session	19 Desember 2023 December 19, 2023

Satuan Pengawasan Internal

Internal Monitoring Unit

Perusahaan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik. Di samping itu, pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sudah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

The Company has developed an Internal Control System so that it can function effectively in safeguarding the Company's investments and assets and maintaining good performance. In addition, internal control is built to improve the integrated control function (integrated control system), both between the Company and its Subsidiaries. This is necessary to ensure that operational activities are carried out well and can increase added value for the Company through effective implementation of risk management and Good Corporate Governance (GCG) principles.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. SKB.03/SKB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Maksud dan tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah menjadi dasar audit internal untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan jasa *assurance* dan *advisory*.

Hal-hal yang diatur dalam Piagam Audit Internal mencakup:

1. Visi, Misi, Strategi dan Ruang Lingkup Aktivitas Group Satuan Pengawasan Internal
2. Struktur dan Kedudukan Group Satuan Pengawasan Internal, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Pelarangan Rangkap Jabatan Group Head Satuan Pengawasan Internal
3. Persyaratan dan Kode Etik Auditor Internal
4. Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab
5. Hubungan *Group* Satuan Pengawasan Internal
6. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter has been ratified through Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners No. SKB.03/SKB/VIII/2022 dated August 31, 2022. The purpose and objective of preparing the Internal Audit Charter is to become the basis for internal audit to carry out duties and authority in carrying out assurance and advisory services.

Matters regulated in the Internal Audit Charter include

1. Vision, Mission, Strategy, and Scope of Activities of the Internal Monitoring Unit Group
2. Structure and Position of the Internal Audit Unit Group, Appointment and Dismissal, and Prohibition of Concurrent Positions of Group Head of the Internal Audit Unit
3. Requirements and Code of Conducts for Internal Auditors
4. Authority, Duties and Responsibilities
5. Internal Audit Unit Group Relations
6. Quality Assurance and Improvement Program

Visi dan Misi Audit Internal

Visi

Menjadi Audit Internal yang profesional, independen dan objektif serta berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Misi

1. Menjalankan fungsi asuransi untuk memastikan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada proses-proses operasional dan kegiatan bisnis lainnya dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, ketentuan, dan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memberikan jasa *advisory* untuk membantu manajemen dan *auditee* dalam mencapai sasarannya serta menjadi mitra kerja yang kompeten.

Internal Audit Vision and Mission

Vision

Becoming a professional, independent and objective Internal Audit and act as a strategic partner and trusted advisor to achieve the Company's goals.

Mission

1. To carry out the assurance function to ensure that internal control, risk management, implementation of Good Corporate Governance (GCG) in operational processes and other business activities within the company are Ongoing Awaiting in accordance with company objectives, provisions and regulations or applicable laws;
2. To provide advisory services to assist management and auditees in achieving their targets and becoming competent work partners.

Kode Etik Auditor Internal

Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku Auditor Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter* No. SKB.03/SKB/VIII/2022). Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan diberikannya sanksi terhadap auditor berupa peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/atau diberhentikan dari Perusahaan.

Standar Perilaku

1. Integritas Auditor Internal:
   a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab;
   b. Harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Tidak boleh dengan sengaja/secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan Perusahaan atau profesi;
   d. Harus mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
2. Objektivitas Auditor Internal:
   a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apa pun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan;
   b. Tidak boleh menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya;
   c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengganggu tata kelola Perusahaan.
3. Kerahasiaan Auditor Internal:
   a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya;
   b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Perusahaan.
4. Kompetensi Auditor Internal:
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan standar praktik profesional audit internal;
   c. Meningkatkan kompetensi secara terus- menerus.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)

SPI dipimpin oleh seorang *Group Head* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Struktur dan Kedudukan *Group* Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Struktur Organisasi Perusahaan telah menjelaskan posisi fungsi audit internal berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Adapun struktur *Group* Satuan Pengawasan Internal digambarkan sebagai berikut:

Internal Auditor Code of Conducts

The Code of Conducts regulates the basic principles of Internal Auditor behaviour as stated in the Internal Audit Charter (Internal Audit Charter No. SKB.03/SKB/VIII/2022). The violations of the Code of Conducts can result in sanctions being imposed on the auditor in the form of a warning, dismissal from audit duties and/or dismissal from the Company.

Standards of Conduct

1. Internal Auditor Integrity :
   a. Must carry out their work honestly, seriously and responsibly;
   b. Must comply with applicable laws and regulations;
   c. Must not intentionally/knowingly be involved in illegal activities or carry out activities that could discredit the Company or profession;
   d. Must support the achievement of Company goals.
2. Internal Auditor Objectivity:
   a. May not participate in any activity or relationship that could, or could reasonably be expected to, impede fair assessment. This includes any activity or relationship that results in a conflict of interest;
   b. Must not accept anything that could, or could reasonably be expected to, impair his or her professional judgment;
   c. Must disclose all material facts known to him, which if not disclosed could disrupt the Company's governance.
3. Internal Auditor Confidentiality:
   a. Must be careful in using and safeguarding information obtained while carrying out their duties;
   b. Must not use information to obtain personal gain that is contrary to the law or detrimental to the Company's objectives.
4. Internal Auditor Competency:
   a. Carry out tasks according to the knowledge, skills and experience possessed;
   b. Carry out audits in accordance with internal audit professional practice standards;
   c. Continuously improve competence.

Structure and Position of the Internal Monitoring Unit (SPI) Group

SPI is led by a Group Head who is appointed and dismissed by the President Director with approval from the Board of Commissioners.

Structure and Position of the Internal Monitoring Unit (SPI) Group

The Company's Organizational Structure has explained the position of the internal audit function and is directly responsible to the President Director. The structure of the Internal Monitoring Unit Group is described as follows:

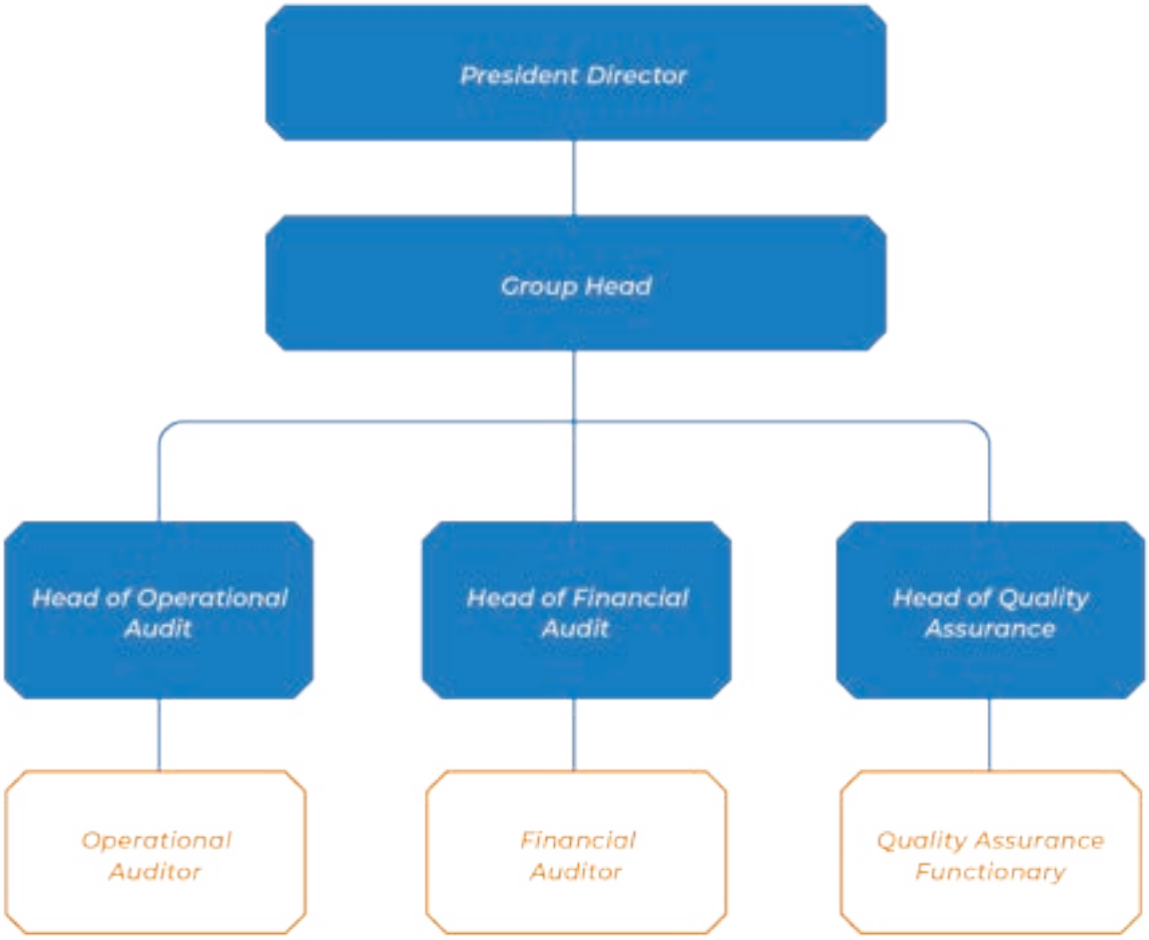

Hubungan kerja Internal Audit dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. *Internal Relationship*
   a. *Group Head* Satuan Pengawasan Internal wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.
   b. *Group Head* Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
   c. *Group Head* Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
   d. *Group Head* Satuan Pengawasan Internal membawahi *Head of Operational Audit, Head of Financial Audit, Head of Quality Assurance* dan *staff Auditor Internal*.
2. *External Relationship*
   a. Hubungan dengan auditor eksternal, yaitu memastikan bahwa data telah memenuhi kriteria, yaitu *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*.
   b. Hubungan dengan Komite Audit.
   c. Hubungan dengan pihak luar lainnya, yaitu dengan Satuan Pengawasan Internal afiliasi, Satuan Pengawasan Internal Anak Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit bersama dan *technical assistance* yang diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.
   d. Hubungan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku *Holding* khususnya dalam penetapan pedoman strategis Perusahaan pada bidang internal audit.

Matters regulated in the Internal Audit Charter include

1. Internal Relationships
   a. The Group Head of the Internal Monitoring Unit is required to obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out its actions, duties and functions.
   b. The Group Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
   c. The Group Head of the Internal Audit Unit statements directly to the President Director.
   d. The Group Head of the Internal Audit Unit supervises the Head of Operational Audit, Head of Financial Audit, Head of Quality Assurance and Internal Auditor staff.
2. External Relationships
   a. Relationship with external auditors, namely ensuring that the data meets the criteria, namely accurate, reliable, timely, consistent and useful.
   b. Relationship with the Audit Committee.
   c. Relationships with other external parties, namely with affiliated Internal Monitoring Units, Subsidiary Internal Monitoring Units in the form of coordinating the implementation of joint audits and technical assistance as regulated in a cooperation agreement.
   d. Relationship with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as Holding, especially in determining the Company's strategic guidelines in the field of internal audit.

Profil *Group Head* Satuan Pengawasan Internal

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan telah mempunyai seorang *Group Head* yang memimpin *Group* Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan pada pasal 1 diatur Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama, sedangkan pasal 2 huruf d angka 5 diatur salah satu pihak utama dimaksud adalah Auditor Internal. Mengacu pada ketentuan dimaksud dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 247/NB.11/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Ika Dwinita Sofa selaku Calon Auditor Internal PT Asuransi Jasa Indonesia.

Profile of Group Head of Internal Monitoring Unit

In accordance with SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company has a Group Head who leads the Internal Monitoring Unit Group who is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism by approval from the Board of Commissioners.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 27/PFSA.03/2016 dated July 22, 2016 concerning Capability and Conformity Assessment for the Main Parties of Financial Services Institutions in article 1 stipulates that Prospective Main Parties must obtain approval from the FSA before carrying out their actions, duties and functions as Main Parties, while article 2 letter d number 5 stipulates that one of the main parties referred to is the Internal Auditor. Referring to the provisions referred to and based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-247/NB.11/2022 dated April 25, 2022, concerning the Results of the Feasibility Test, Ms. Ika Dwinita Sofa as Candidate for Internal Auditor of PT Asuransi Jasa Indonesia.

Ika Dwinita Sofa, S.TP, MBA, AAIK, CRGP, QIA
Group Head Satuan Pengawasan Internal

Usia Age	44 tahun years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Pertanian, Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Agriculture, Master of Business Administration
Riwayat Pekerjaan Employment History	• *Group Head* Satuan Pengawasan Internal PT Asuransi Jasa Indonesia (2022 - sekarang) • *Special Function Finance* (2021 - 2022) • *Group Head* Manajemen Strategi (2020 - 2021) • *Group Head* Asuransi Pertanian, Mikro dan Program Pemerintah (2019 - 2020) • Kepala Divisi Agri dan Mikro (2017 - 2019) • Kepala Unit Usaha Pertanian dan Mikro (2016 - 2017) • Kepala Sub Divisi Klaim Non Kendaraan Bermotor (2014 -2016) • Kepala Sub Divisi *Property* dan *Cargo* (2014) • Kepala Unit Teknik Kantor Cabang Jakarta S. Parman (2010 - 2014) • *Junior Specialist - Underwriting* pada *Group Underwriting Non Marine* (2006 - 2010) • Staf pada *Group* Pemasaran dan Pengembangan Usaha Korporasi (2002 - 2006) • Group Head Internal Monitoring Unit PT Asuransi Jasa Indonesia (2022 - present) • Special Function Finance (2021 - 2022) • Group Head of Strategy Management (2020 - 2021) • Group Head of Agricultural Insurance, Micro and Government Programs (2019 - 2020) • Head of Agri and Micro Division (2017 - 2019) • Head of Agricultural and Micro Business Unit (2016 - 2017) • Head of Non-Motor Vehicle Claims Sub Division (2014 -2016) • Head of Property and Cargo Sub Division (2014) • Head of Engineering Unit, Jakarta Branch Office, S. Parman (2010 - 2014) • Junior Specialist - Underwriting in the Non-Marine Underwriting Group (2006 - 2010) • Staff in the Corporate Marketing and Business Development Group (2002 - 2006)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Framework for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK.842/DMA.SDM/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 The Board of Directors' Decision Letter Number SK.842/DMA.SDM/VII/2022 dated August 22, 2022

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Pegawai Satuan Pengawasan Intern

Pada tahun 2023 jumlah pegawai Satuan Pengawasan Internal sebanyak 10 (sepuluh) orang (termasuk *Group Head*) yang terdiri dari:

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Pegawai Satuan Pengawasan Intern

In 2023 the number of Internal Audit Unit employees will be 10 (ten) people (including the Group Head) consisting of:

No	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Terakhir Recent Education	Sertifikasi Certification
1	Ika Dwinita Sofa, S.TP, MBA, AAIK, CRGP, QIA	*Group Head*	Strata 2 Master Degree	AAIK, CRGP, QIA
2	Ir. Harry B. Saputra, MM, AAAIK, ANZIIF, ICMou	*Head of Operational Audit*	Strata 2 Master Degree	AAAIK, ANZIIF, ICMou
3	Irma Alfitri, SE, M.Ak, AWM, QIA	*Head of Financial Audit*	Strata 2 Master Degree	AWM, QIA
4	Rosida Manalu, ST, AAIK, ACII, ICMou	*Head of Quality Assurance*	Strata 1 Bachelor Degree	AAIK,. ACII, ICMou
5	M. Kaniksma K.P, S.Si, AAAIK	*Senior Analyst of Financial Audit Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	AAAIK
6	Kornelia Zontarini Egok, SE	*Junior Analyst of Operational Audit Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	-
7	Ferry Herma Jatnika, SS, ANZIIF	*Junior Analyst of Operational Audit Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	ANZIIF
8	Wimpi Zico Alfando, SE	*Junior Analyst of Quality Assurance Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	-
9	Rizki Amelia, SE	*Staff of Financial Audit Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	-
10	Muhammad Azhimi Akbar, SE	*Senior Officer of Operational Audit Unit*	Strata 1 Bachelor Degree	-

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Satuan Pengawasan Internal

Perusahaan telah menetapkan *Internal Audit Charter* sebagai pedoman Internal Audit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. *Internal Audit Charter* di antaranya mengatur tentang Fungsi, tugas, tanggung jawab serta wewenang Internal Audit. Berikut fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Internal Audit:

Fungsi Audit Internal:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direktur Utama dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif
2. Melakukan Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan mendampingi pelaksanaan audit oleh auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

Tugas dan Tanggung Jawab *Group* Satuan Pengawasan Internal:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit;

The Functions, Duties and Responsibilities and Authorities of the Internal Audit Unit

The Company has established an Internal Audit Charter as a guideline for Internal Audit in carrying out its operational activities. The Internal Audit Charter regulates the functions, duties, responsibilities and authority of Internal Audit. The following are the functions, duties and responsibilities and authority of Internal Audit:

Internal Audit Function:

1. Becoming an independent appraiser whose role is to assist the President Director in effectively securing the Company's investments and assets
2. Evaluating the effectiveness of the implementation of internal control, risk management and corporate governance processes, in accordance with statutory regulations and company policies;
3. Conducting inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, information technology and other activities;
4. Coordinating with the Audit Committee and assist the implementation of audits by external auditors so that a smooth audit process can be achieved.

The Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit Group:

1. To assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out monitoring by operationally explaining the planning, implementation and monitoring of follow-up audit results;

2. Menyusun RKAT berbasis Risiko dan/atau pertimbangan profesional lainnya secara tahunan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan sumber daya manusia dan perencanaan biaya audit. Usulan RKAT disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk memperoleh pertimbangan dan saran sebelum mendapat persetujuan Direktur Utama;
3. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati di RKAT atau penugasan di luar RKAT;
4. Melakukan evaluasi, pemantauan, dan jasa konsultasi atas praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal perusahaan (termasuk di dalamnya pengendalian internal terhadap pelaporan Keuangan);
5. Melaksanakan audit, memberikan penilaian atas efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis yang diaudit, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
7. Melaporkan pelaksanaan aktivitas Audit Internal sesuai dengan RKAT kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap triwulan;
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Audit Internal kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Audit Eksternal kepada Direktur Utama, dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian mutu secara independen (Standar Profesional Audit Internal) dalam ruang lingkup kerja *Group* Satuan Pengawasan Internal untuk meyakini kesesuaiannya dengan peraturan internal serta standar praktik profesional audit internal;
11. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Internal dan sistem Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
12. Membantu Komite Audit dalam mengevaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kewenangan *Group* Satuan Pengawasan Internal:

1. Melaksanakan audit secara berkala;
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal, baik informasi internal perusahaan maupun informasi dari pihak ketiga (*vendor, customer, regulator*, dan lain-lain);
3. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Auditor Eksternal dan pihak eksternal lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal;

2. To prepare risk-based RKAT and/or other professional considerations on an annual basis, including human resource requirements and audit cost planning. RKAT proposals are submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee to obtain considerations and suggestions before receiving approval from the President Director;
3. To implement work plans in accordance with the scope agreed in the RKAT or assignments outside the RKAT;
4. To carry out evaluation, monitoring and consulting services on the practice of implementing Good Corporate Governance, Risk Management and Internal Control of the company (including internal control over Financial reporting);
5. To carry out audits, provide assessments of the effectiveness and efficiency of the audited business processes, and provide recommendations for relevant improvements;
6. To prepare an audit statement and submit the statement to the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee;
7. To report the implementation of Internal Audit activities in accordance with the RKAT to the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee every quarter;
8. To monitor, analyze and statement on the implementation of follow-up on Internal Audit recommendations to the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee;
9. To monitor, analyze and statement on the implementation of follow-up recommendations from the External Audit to the President Director and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee;
10. To develop a program to independently evaluate the effectiveness of quality control (Internal Audit Professional Standards) within the scope of work of the Internal Audit Unit Group to ensure its conformity with internal regulations and internal audit professional practice standards;
11. To test and evaluate the implementation of Internal Control and Risk Management systems in accordance with Company policy;
12. To assist the Audit Committee in evaluating the performance of the Public Accounting Firm (KAP).

The Authority of Internal Monitoring Unit Group

1. To carry out regular audits;
2. To access all relevant information about the company related to the duties and functions of the Internal Audit Unit, both internal company information and information from third parties (vendors, customers, regulators, etc.);
3. To communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee;
4. To coordinate and communicate with the External Auditor and other external parties related to the duties and functions of the Internal Audit Unit;

5. Mengadakan rapat secara berkala dan/atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
6. Dalam hal pelaksanaan audit atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Satuan Pengawasan Internal dapat menggunakan tenaga ahli baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan;
7. Melakukan aktivitas investigasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit sebelumnya atau sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham atau pengaduan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* di perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Dapat melakukan *digital forensic* terhadap seluruh data dan informasi pegawai yang tidak terbatas pada *handphone, personal computer* (PC), dan laptop, melakukan analisis rekening koran bank dan melaksanakan poligraf;
9. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal.

Pelaksanaan Kegiatan *Group* Satuan Pengawasan Internal

Realisasi Pelaksanaan kegiatan Group Satuan Pengawasan Internal selama tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terealisasinya 21 (dua puluh satu) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2023 yang terdiri dari 15 (lima belas) *Audit Assurance*, 2 (dua) audit tematik dan 4 (empat) evaluasi triwulanan.
2. Terealisasinya pemberian jasa *advisory* dengan memberikan 9 (sembilan) *review* terhadap penyusunan Kebijakan/Pedoman/SOP maupun pandangan terhadap permasalahan operasional;
3. Pelaksanaan penugasan *counterpart* beberapa audit eksternal, yaitu penyampaian laporan final atas Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan, audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PriceWaterhouseCoopers/PwC), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
4. Terlaksananya Pengembangan CACM, AMS terintegrasi Fase 1 dan 2, *Assessment* Mandiri IACM dan Penyelarasan SOP dengan Pedoman Strategis
5. Terlaksananya pelaporan hasil audit TW I-TW IV Tahun 2023 kepada Divisi SKAI, Direktur Utama dan Komite audit.
6. Terlaksananya audit Non RKAT tahun 2023, penugasan dari manajemen sebanyak 7 (tujuh) laporan.
7. Terlaksananya *improvement program* atas fasilitasi *Whistleblowing System* (WBS) terintegrasi dengan *Holding*.
8. Terlaksananya program pengembangan profesional auditor internal, baik melalui pendidikan bersertifikasi, seminar/webinar/*workshop* dan pelatihan yang diikuti oleh pejabat dan staf Satuan Pengawasan Internal.

5. To hold regular and/or incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
6. In the case of carrying out audits or other tasks that require special expertise, the Internal Audit Unit can use experts both from within the company and from outside the company;
7. To carry out investigative activities as a follow-up to the implementation of previous audits or according to requests from the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholders or complaints that indicate fraud and violations of the company's code of conduct in accordance with the applicable regulations;
8. Can carry out digital forensics on all employee data and information, not limited to cell phones, personal computers (PCs) and laptops, analyze bank statements and carry out polygraphs;
9. To coordinate with External Auditors

The Implementation of Internal Monitoring Unit Group Activities

The realization of the implementation of Internal Monitoring Unit Group activities during 2023 can be presented as follows:

1. The realization of 21 (twenty one) Annual Audit Work Programs (PKAT) in 2023 consisting of 15 (fifteen) Assurance Audits, 2 (two) thematic audits and 4 (four) quarterly evaluations.
2. The realization of providing advisory services by providing 9 (nine) reviews of the preparation of Policies/Guidelines/SOPs as well as views on operational problems;
3. Carrying out counterpart assignments for several external audits, i.e., the submission of the final statement on the Direct Audit of the Financial Services Authority, the audit of the 2023 Fiscal Year Financial Statement by the Public Accounting Firm KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PriceWaterhouseCoopers/PwC), and the Republic of Indonesia Financial Audit Agency (BPK RI).
4. The implementation of CACM Development, integrated AMS Phases 1 and 2, IACM Independent Assessment and Alignment of SOPs with Strategic Guidelines
5. The implementation of reporting of TW I-TW IV 2023 audit results to the SKAI Division, President Director and Audit Committee.
6. The implementation of the Non-RKAT audit in 2023, assignment from management for 7 (seven) statements.
7. The implementation of an improvement program to facilitate an integrated Whistleblowing System (WBS) with Holding.
8. The implementation of professional development programs for internal auditors, either through certified education, seminars/webinars/workshops and training attended by Internal Audit Unit officials and staff.

Tanggung Jawab *Group Head* Satuan Pengawasan Internal

1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor kebijakan serta rencana kerja terkait kegiatan Audit Internal *Holding* dan/atau Anggota *Holding*;
2. Membuat dan mengusulkan Piagam Audit Internal (PAI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris *Holding*, serta mengevaluasi PAI secara berkala;
3. Membuat RKAT berbasis risiko, pengawasan, dan melakukan *review* atas RKAT Menyusun, melakukan *review*, dan/atau melakukan evaluasi Pedoman Strategis Audit Internal yang akan diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
4. Melaksanakan pemeriksaan kinerja operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikannya sesuai RKAT untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan praktik tata kelola, termasuk pelaksanaan audit khusus sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit lain sebelumnya atau sesuai permintaan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris/ Komite Audit;
5. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
6. Melakukan evaluasi dan review atas praktik tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal;
7. Memberikan konsultasi terkait kegiatan usaha Perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam memperbaiki kegiatan operasional;
8. Sebagai pendamping Auditor Eksternal namun tidak terbatas kepada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9. Melakukan pembinaan terhadap karyawan pada *Group* Satuan Pengawasan Internal;
10. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit;
11. Melaporkan hasil aktivitas pekerjaan *Group* Satuan Pengawasan Internal kepada Direktur Utama secara berkala.

The Responsibilities of the Group Head of the Internal Audit Unit

1. To create, implement and monitor policies and work plans related to Internal Audit activities of Holding and/or Holding Members;
2. To create and propose an Internal Audit Charter (PAI) to the Holding's Board of Directors and Board of Commissioners, and evaluate the PAI periodically;
3. To create risk-based RKAT, supervise, and carry out reviews of the RKAT. To prepare, review, and/or evaluate the Internal Audit Strategic Guidelines that will be implemented in the Company and Subsidiaries;
4. To carry out operational and financial performance audits, assess control, management and implementation and provide recommendations for improvements in accordance with the RKAT to improve internal control activities, risk management and governance practices, including carrying out special audits as a follow-up to other previous audits or as requested President Director and/or Board of Commissioners/Audit Committee;
5. To monitor follow-up on audit results, both internal and external;
6. To evaluate and review good corporate governance (GCG) practices, risk management and internal control;
7. To provide consultations regarding the Company's business activities related to governance, risk management and internal control in improving operational activities;
8. As a companion to the External Auditor, but not limited to audits by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI), the Financial and Development Audit Agency (BPKP), and the Financial Services Authority (FSA);
9. To provide guidance to employees in the Internal Audit Unit Group;
10. To complete all pending work and complete follow-up audit findings;
11. To report the results of the work activities of the Internal Audit Unit Group to the President Director periodically.

Rapat Satuan Pengawasan Internal

Dalam pelaksanaan kegiatannya *Group* Satuan Pengawasan Internal aktif melakukan komunikasi dan Pertemuan berkala dengan Direksi serta Dewan Komisaris/Komite Audit untuk meminta arahan serta penyampaian hasil kegiatan yang dilakukan. Adapun pertemuan berkala tersebut selama tahun 2023, terdiri dari:

- Pertemuan dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali
- Pertemuan dengan Komisaris dan/atau Komite Audit sebanyak minimal 4 (empat) kali, terkait pemaparan laporan audit Triwulan I-IV tahun 2023

Internal Monitoring Unit Meeting

In carrying out its activities, the Internal Audit Unit Group actively carries out communication and regular meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners/Audit Committee to request direction and deliver the results of the activities carried out. The periodic meetings during 2023 consist of:

- Meetings with the Board of Directors 12 (twelve) times
- Meetings with the Commissioners and/or Audit Committee at least 4 (four) times, regarding the presentation of the audit statement for Quarters I-IV 2023

Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit

Untuk memastikan kinerja audit internal telah berjalan sesuai dengan fungsinya, Satuan Pengawasan Internal melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh *Group* Satuan pengawasan Internal. Pada Tahun 2021, telah dilakukan *assessment* terhadap kapabilitas Satuan Pengawasan Internal menggunakan kerangka *Internal Audit Capability Model* (IACM) dengan Penilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan asesmen tersebut, kapabilitas Satuan Pengawasan Internal telah memenuhi Level 3 dengan catatan. Group Satuan Pengawasan Internal telah melakukan penilaian dan validasi dalam rangka memenuhi level 3 (tiga) dari Total 145 (seratus empat puluh lima) pernyataan dan hasil validasi adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) pernyataan atau dengan persentase 95,86%. Rekomendasi perbaikan untuk pemenuhan Level 3 dari 6 (enam) elemen penilaian serta telah disampaikan kepada Direktur Utama melalui Memorandum Nomor 0376/SPI/IX/2023 pada tanggal 06 November 2023.

Selain itu, telah dilakukan evaluasi kinerja *Group* oleh Direksi dengan melihat tingkat pencapaian (realisasi) Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) atas audit yang dilaksanakan serta penugasan-penugasan lainnya dari Direksi. Pada tahun 2023 PKAT dan penugasan lain telah tercapai seluruhnya. Selanjutnya Laporan pelaksanaan Program kerja *Group* Satuan pengawasan Internal serta penugasan lainnya telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Internal Audit Unit Performance Evaluation

To ensure that internal audit performance is Ongoing Awaiting according to its function, the Internal Audit Unit carries out an assessment of the quality assurance program and improvement of the internal oversight function carried out by the Internal Audit Unit Group. In 2021, an assessment was carried out on the capabilities of the Internal Audit Unit using the Internal Audit Capability Model (IACM) framework with assessors from the Financial and Development Monitoring Agency (BPKP). Based on this assessment, the Internal Audit Unit's capabilities have met Level 3 with notes. The Internal Monitoring Unit Group has carried out assessment and validation in order to fulfil level 3 (three) out of a total of 145 (one hundred forty-five statements) and the validation results are 139 (one hundred thirty-nine) statements or a percentage of 95.86%. Recommendations for improvement for the fulfilment of Level 3 of 6 (six) assessment elements and has been submitted to the President Director via Memorandum Number 0376/SPI/IX/2023 on November 06, 2023.

In addition, the Group's performance evaluation has been carried out by the Board of Directors by looking at the level of achievement (realization) of the Annual Audit Work Plan (RKAT) for audits carried out as well as other assignments from the Board of Directors. In 2023, PKAT and other assignments have been fully achieved. Furthermore, statements on the implementation of the Internal Monitoring Unit Group work program and other assignments have been submitted to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan risiko terhadap kebutuhan Perusahaan untuk mencapai targetnya dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian internal dalam kegiatan operasional merupakan wujud komitmen manajemen untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal mendukung pencapaian tujuan kinerja, meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Internal

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian Internal dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur terdiri dari:
   a. Integritas, Nilai Etika dan Kompetensi Karyawan Integritas selalu mendapat perhatian dari Jajaran Manajemen yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Direksi dan Komisaris, serta saat serah terima jabatan struktural baik di *Head Office* maupun di *Representative Office*. Standar Nilai Etika sebagai landasan moral bagi seluruh Pejabat, Staff dan Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam melaksanakan aktivitasnya telah disusun dan disosialisasikan secara rutin serta dituangkan dalam sebuah buku panduan *Code of Conduct* Perusahaan menetapkan sistem kompetensi yang cukup ketat bagi seluruh karyawan sebagai syarat untuk mendapatkan promosi.
   b. Cara yang Ditempuh Manajemen dalam Melaksanakan Kewenangan dan Tanggung Jawabnya Dalam menjalankan Wewenang dan Tanggung Jawabnya, Manajemen selalu berpegangan pada aturan yang berlaku, baik aturan dari internal perusahaan maupun aturan dari eksternal sebagaimana tertuang dalam *Board Manual*.
   c. Pengorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perusahaan mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan secara rutin melakukan pengembangan kemampuan karyawan melalui pendidikan, seminar, *workshop* dan menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan terpercaya.

The internal control system aims to assist management in managing and controlling risks towards the Company's needs to achieve its targets while continuing to implement GCG principles and comply with the applicable laws and regulations.

The implementation of an internal control system in operational activities is a manifestation of management's commitment to increasing the Company's compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of correct, complete and timely financial statements and management statements, as well as meeting the efficiency and effectiveness of business activities in accordance with the vision, mission and goals of the Company. The internal control system supports the achievement of performance goals, increases value for stakeholders, minimizes the risk of loss and maintains compliance with the applicable laws and regulations.

The Scope of Internal Control Systems

The scope of the Internal Control System in the Company includes:

1. The internal control environment within the company which is implemented in a disciplined and structured manner consists of:
   a. Integrity, Ethical Values and Employee Competencies Integrity always receives attention from the Management Board as marked by the signing of an Integrity Pact between the Directors and Commissioners, as well as during the handover of structural positions both at the Head Office and at the Representative Office. Ethical Value Standards as a moral foundation for all Officers, Staff and Employees of PT Asuransi Jasa Indonesia in carrying out their activities have been prepared and socialized regularly and outlined in a Code of Conduct guidebook. The Company establishes a fairly strict competency system for all employees as a condition for obtaining promotions.
   b. Methods used by Management in Carrying out its Authority and Responsibilities In carrying out its Authority and Responsibilities, Management always adheres to the applicable rules, both internal company rules and external rules as stated in the Board Manual.
   c. The Organization and Development of Human Resources The company manages human resources in accordance with company needs and regularly develops employee capabilities through education, seminars, workshops and collaborating with several trusted educational institutions.

d. Perhatian dan Arahan yang Diberikan oleh Direksi selalu memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan dan info yang berhubungan dengan perusahaan serta memberikan arahan bagi Jajaran Manajemen dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menilai pengelolaan risiko yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan. Hasil dari identifikasi dan analisis risiko tersebut digunakan sebagai dasar penanganan risiko. Risiko yang relevan dengan pelaporan Keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi dan secara *negative* mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data Keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam Laporan Keuangan.
3. Aktivitas Pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai:
   a. Kewenangan Pengambilan keputusan bisnis baik bagi Pejabat di *Head Office* maupun di *Representative Office* telah diatur oleh Perusahaan.
   b. Otorisasi Setiap unit dilingkungan Perusahaan memiliki batasan (*limit*) yang berbeda untuk memberikan otorisasi.
   c. Verifikasi dan Rekonsiliasi Untuk mendapatkan informasi dan sudut pandang yang sama baik antara sesama unit didalam perusahaan maupun antara Perusahaan dengan Rekan Bisnis, maka secara rutin dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi.
   d. Penilaian atas Prestasi Kerja Perusahaan menerapkan penilaian Kinerja, baik Kinerja Unit maupun Kinerja Individu sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment*.
   e. Pembagian Tugas kepada masing-masing Unit Kerja dilakukan sesuai dengan *Job Description* dari masing-masing unit.
   f. Keamanan atas Aset Perusahaan Perusahaan selalu melakukan upaya-upaya untuk menjamin keamanan dan aset Perusahaan.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan oleh Perusahaan dengan menerbitkan laporan secara tepat waktu dan layak saji. Pelaporan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun ke Pemegang Saham meliputi laporan atas kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku lainnya.
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan. *Monitoring* dilakukan terhadap temuan audit internal dengan tindak lanjut hingga permasalahan dinyatakan tuntas, dan *monitoring* terhadap temuan audit eksternal dengan penyampaian tindak lanjut atas

d. Attention and Direction Given by the Board of Directors The Board of Directors always pays serious attention to developments and information relating to the company and provides direction to the Management in overcoming the obstacles faced.

2. The review of business risk management (risk assessment), i.e., a process for identifying, analyzing and assessing risk management that is relevant to the company's business activities. The results of risk identification and analysis are used as a basis for risk management. Risks relevant to financial reporting include internal and external events and circumstances that may occur and negatively affect the company's ability to record, process, summarize and statement financial data consistent with management's assertions in the financial statements.
3. Control Activities, i.e., actions carried out in a process of controlling Company activities at levels and units in the Company's organizational structure, including regarding:
   a. Business decision-making authority for both Head Office and Representative Office officials has been regulated by the Company.
   b. Authorization Each unit within the Company has different limits for providing authorization.
   c. Verification and Reconciliation To obtain the same information and points of view both between fellow units within the company and between the Company and Business Partners, verification and reconciliation are routinely carried out.
   d. Assessment of Work Performance The Company applies Performance assessments, both Unit Performance and Individual Performance as the basis for providing Rewards and Punishments.
   e. Distribution of Tasks The distribution of tasks to each Work Unit is carried out in accordance with the Job Description of each unit.
   f. Security of Company Assets The Company always makes efforts to ensure the security and assets of the Company.
4. Information and Communication System, i.e., a process of presenting statements regarding operational, financial activities, as well as compliance and adherence to statutory provisions by the Company by publishing statements in a timely and presentable manner. Statements addressed to the Financial Services Authority and Shareholders include statements on the Company's compliance with other applicable laws and regulations.
5. Monitoring, i.e., the process of assessing the quality of the internal control system, including the Internal Audit function at each level and unit in the Company's organizational structure. Monitoring is carried out on internal audit findings with follow-up until the problem is declared resolved, and monitoring of external audit findings by delivering follow-up on the results of external

hasil temuan audit eksternal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. *Monitoring* berkelanjutan dilaksanakan selama kegiatan operasional perusahaan berjalan, sedangkan evaluasi terpisah lingkup dan frekuensi pelaksanaannya sesuai hasil penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan berkelanjutan.

audit findings according to the specified time. Continuous monitoring is carried out during the company's operational activities, while a separate evaluation of the scope and frequency of implementation is based on the results of risk assessments and the effectiveness of continuous monitoring procedures.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO-ERM

Proses penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dilakukan sesuai dengan *framework* dari COSO-ERM dan pihak Internal Audit melakukan *review* pada aktivitas Perusahaan dan bertanggung jawab terhadap Manajemen Senior. Internal Audit melakukan identifikasi terhadap risiko Perusahaan, dengan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal pada perusahaan, dan menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan audit pada Perusahaan.

Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan oleh audit internal didasarkan pada beberapa konsep sebagai berikut:

1. Memahami *risk universe* atau cakupan risiko yang terdapat pada suatu entitas, termasuk di dalamnya jumlah risiko yang dapat diaudit pada perusahaan serta mengetahui estimasi tingkat risiko berdasarkan tingkatan probabilitas dan tingkatan signifikansinya.
2. Melakukan proses identifikasi pada kebutuhan akan audit internal dari sekian banyak risiko Perusahaan yang dapat diaudit. Meskipun perusahaan dianggap memiliki risiko rendah atas ketidaksesuaian penerapan Pengendalian Internal, tetapi jika pihak Komite Audit/Manajer Senior meminta untuk dilakukan audit pada risiko tersebut, maka pihak auditor internal akan melakukan audit sesuai permintaan dan melaporkan hasil pelaksanaan audit tersebut.

Terdapat tiga tahapan dalam menentukan tingkat kepentingan pada risiko Perusahaan untuk dilakukan audit. Ketiga tahapan tersebut adalah:

1. Menentukan kebutuhan akan audit pada risiko Perusahaan, dengan melakukan penilaian pada risiko tersebut. Semakin tinggi hasil penilaian menunjukan semakin tinggi kebutuhan pelaksanaan audit pada risiko tersebut.
2. Menentukan tingkat signifikansi jika pada risiko terkait memang akan dilakukan audit. Tingkat signifikansi berdasarkan hasil pemeringkatan merupakan keputusan bersama dari para auditor. Semakin tinggi hasil pemeringkatan, semakin tinggi tingkat signifikansinya.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan audit kemungkinan pada risiko yang bersangkutan. Semakin banyak faktor yang dapat menghambat, semakin rendah probabilitas tingkat keberhasilan pelaksanaan audit internal.

Langkah selanjutnya dari proses identifikasi adalah mengembangkan program audit yang didasarkan pada berbagai macam risiko yang menjadikan data dalam pelaksanaan internal audit.

The Conformity of the Internal Control System with COSO-ERM

The process of preparing the Annual Audit Work Plan (RKAT) is carried out in accordance with the COSO-ERM framework and the Internal Audit party reviews the Company's activities and is responsible for Senior Management. Internal Audit identifies the Company's risks, by measuring the level of effectiveness of the implementation of internal control in the company, and determining factors that can influence the level of success in carrying out audits in the Company.

The preparation of the Annual Audit Work Plan by internal audit is based on several concepts as follows:

1. Understanding the risk universe or scope of risks contained in an entity, including the number of risks that can be audited in the company as well as knowing the estimated risk level based on the level of probability and level of significance.
2. Carrying out an identification process for the need for internal audit of the many company risks that can be audited. Even though the company is considered to have a low risk of non-compliance with the implementation of Internal Control, if the Audit Committee / Senior Manager requests an audit of this risk, the internal auditor will conduct an audit as requested and statement the results of the audit.

There are three stages in determining the level of importance of the Company's risks for audit. The three stages are:

3. Determining the need for an audit of the Company's risks, by assessing these risks. The higher the assessment results indicate the higher the need for an audit on that risk.
4. Determining the level of significance if the related risk will indeed be audited. The level of significance based on the ranking results is a joint decision of the auditors. The higher the ranking result, the higher the level of significance.
5. Identifying factors that could hinder the successful implementation of a possible audit of the risk in question. The more factors that can hinder, the lower the probability of success in carrying out an internal audit.

The next stage in the identification process is to develop an audit program that is based on various risks that become data in the implementation of internal audits.

Berdasarkan pada berbagai macam kebutuhan risiko yang akan diaudit, maka selanjutnya dilakukan penyusunan program audit, rencana pelaksanaan audit secara umum, yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam pelaksanaan audit pada risiko yang ada. Program Audit yang telah disusun diajukan ke *Group Head* Satuan Pengawasan Internal dan didiskusikan bersama *Head of Operational Audit* dan *Head of Financial Audit* untuk mempertimbangkan rencana audit secara umum.

Based on the various types of risk needs to be audited, an audit program and general audit implementation plan are then carried out, which are used as a basis or reference in carrying out audits on existing risks. The Audit Program that has been prepared is submitted to the Group Head of the Internal Audit Unit and discussed with the Head of Operational Audit and Head of Financial Audit to consider the general audit plan.

Melakukan analisa guna memperhitungkan kebutuhan akan sumber daya, waktu dan durasi dalam pelaksanaan audit. Analisa ini akan mengacu pada kemampuan dan pengalaman dari fungsi internal audit yang terdapat pada Perusahaan.

Carrying out analysis to calculate the need for resources, time and duration in carrying out the audit. This analysis will refer to the capabilities and experience of the internal audit function in the Company.

Berdasarkan pada kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh internal audit saat ini, diharapkan juga untuk mengembangkan beberapa alternatif pada perencanaan internal audit agar dapat meng-*cover* seluruh risiko yang dapat dilakukan audit. Mengingat adanya kemungkinan keterbatasan sumber daya, sehingga proses audit tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Based on the current abilities and capabilities of internal audit, it is also hoped that several alternatives can be developed in internal audit planning so that they can cover all risks that can be audited. Considering the possibility of limited resources, the audit process can not be completed on time.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan audit internal dari sekian banyak risiko yang dimiliki, dan menentukan risiko manakah yang harus dilaksanakan audit dan mana yang tidak perlu atau tidak mendesak untuk dilakukan audit. Pengambilan keputusan untuk menentukan perlu atau tidaknya audit dilakukan, mengukur tingkat signifikansi pelaksanaan audit dan menentukan faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan internal audit pada risiko terkait dilakukan karena *Group* Satuan Pengawasan Internal memiliki misi melaksanakan audit internal yang berbasis risiko (*risk based audit*).

The Company has the ability to identify the need for carrying out internal audits from the many risks they have, and determine which risks must be audited and which ones do not need to be audited or are not urgent. Decision making to determine whether an audit is necessary or not, measuring the level of significance of the audit implementation and determining factors that could hinder the implementation of internal audits on related risks is carried out because the Internal Audit Unit Group has a mission to carry out risk-based internal audits.

Pada lingkup manajemen risiko, *Group* Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan. Secara lebih spesifik, bentuk dari aktivitas yang dijalankan oleh *Group* Satuan Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT).
2. Penetapan Tim Audit.
3. Perencanaan (Penyusunan Audit Program).
4. Penyusunan *Desk* Audit.
5. *Opening Meeting*.
6. Pelaksanaan audit.
7. Pengumpulan bukti, wawancara, dan lainnya.
8. Penyusunan Laporan.
9. *Closing Meeting*.
10. Penyusunan Laporan Hasil Audit Final ke Direktur Utama.
11. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit

In the scope of risk management, the Internal Audit Unit Group has the task of ensuring that risks managed by the Company have been identified, analyzed, evaluated, handled, monitored and communicated. More specifically, the forms of activities carried out by the Internal Audit Unit Group are as follows:

1. Preparation of Annual Audit Work Plan (RKAT).
2. Determination of the Audit Team.
3. Planning (Preparation of Audit Program).
4. Preparation of Audit Desk.
5. Opening Meeting.
6. Implementation of audits.
7. Evidence collection, interviews, etc.
8. Preparation of Statements.
9. Closing Meeting.
10. Preparation of Final Audit Results Statement to the President Director.
11. Monitoring Follow-up Audit Results

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan evaluasi untuk menguji efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan, Perusahaan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

Internal Control System Evaluation

In conducting an evaluation to test the effectiveness of the Internal Control System implemented, the Company takes the following steps:

1. Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan memenuhi kriteria *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*.
2. Memastikan bahwa semua elemen pada Perusahaan taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset Perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, penggunaan sumber daya dijalankan secara efektif dan efisien serta pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatasasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasional antara lain meliputi pengelolaan risiko, pengadaan, pembelian dan lain sebagainya.
5. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatasasan dan kualitas tugas manajemen operasi pada Anak Perusahaan atas perintah Direktur Utama Perusahaan selaku Kuasa Pemegang Saham Anak Perusahaan dan seizin Komisaris Anak Perusahaan terkait.
6. Memastikan bahwa semua proses bisnis dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.
7. Monitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan.
8. Memonitor kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
9. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola Perusahaan sudah di identifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan.
10. Menyusun Laporan Pengendalian Internal sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.

Agar proses evaluasi dan *monitoring* terhadap penerapan aktivitas operasional berbasis risiko, Perusahaan juga telah memiliki komite/tim dan unit di bawah supervisi Direksi, sehingga setiap kebijakan yang diambil Direksi telah mempertimbangkan risiko dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris/ Komite Audit

Berdasarkan hasil evaluasi tahunan atas efektivitas sistem pengendalian intern di Perusahaan, menunjukan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan dinilai secara umum memadai.

1. Ensuring that the information or data managed and reported meets the criteria of accurate, reliable, timely, consistent and useful.
2. Ensuring that all elements of the Company comply with the applicable policies, procedures, regulations and legislation.
3. Ensuring that the security and utilization of the Company's assets run as they should, the use of resources is carried out effectively and efficiently and the achievement of targets is in accordance with the plans that have been set.
4. Conducting audits, evaluations and consultations regarding capability, effectiveness, compliance and quality of implementation of operational management tasks, including risk management, procurement, purchasing and so forth.
5. Conducting audits, evaluations and consultations regarding the capability, effectiveness, compliance and quality of operational management tasks in Subsidiaries on the orders of the Company's President Director as the Subsidiary's Shareholder Agent and with the permission of the Commissioner of the relevant Subsidiary.
6. Ensuring that all business processes within the Company meet accountability aspects.
7. Monitoring compliance with policies supporting the implementation of the Company's Good Corporate Governance (GCG).
8. Monitoring compliance with laws and other regulations that apply to the Company.
9. Ensuring that risks managed by the Company have been identified, analyzed, evaluated, handled, monitored and communicated.
10. Preparing an Internal Control Statement at least once a year to ensure the effectiveness of the internal control system.

In order to evaluate and monitor the implementation of risk-based operational activities, the Company also has committees / teams and units under the monitoring of the Board of Directors, so that every policy taken by the Board of Directors has considered risk and reflects the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles.

The Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners/Audit Committee

Based on the results of the annual evaluation of the effectiveness of the Company's internal control system, it shows that the Company's internal control system is generally considered adequate.

Manajemen Risiko
Risk Management

Manajemen Risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan perusahaan, Untuk itu sebagai salah satu entitas sangat menyadari bahwa pengelolaan risiko Perusahaan secara korporat, merupakan hal yang utama untuk keberlangsungan usaha dan peningkatan kinerja.

Perusahaan merasa perlu membangun suatu sistem penerapan manajemen risiko yang terintegrasi untuk memberikan jaminan yang wajar tercapainya target KPI Perusahaan dengan maksimal deviasi yang merupakan *risk appetite* Perusahaan. Penerapan manajemen risiko pada tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan periodik oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Arsitektur Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan. Arsitektur pedoman penerapan manajemen risiko disusun berdasarkan SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 *Risk Management – Guidelines* dengan tetap mematuhi regulasi terkait penerapan manajemen risiko baik yang berasal dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan lainnya yang mengikat Perusahaan.

Risk Management is an inseparable part of company management. Therefore, as an entity, it is very aware that corporate risk management is the main thing for business continuity and performance improvement.

The Company feels the need to build an integrated risk management implementation system to provide reasonable guarantees of achieving the Company's KPI targets with a maximum deviation which is the Company's risk appetite. The implementation of risk management in 2023 has been carried out effectively and periodically by the Board of Directors and Board of Commissioners.

Risk Management Implementation Guidelines Architecture

The implementation of effective risk management is supported by a framework that includes risk management policies and procedures as well as clearly defined risk limits in line with the Company's vision, mission and business strategy. The architecture of risk management implementation guidelines is prepared based on SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines while still complying with regulations related to the implementation of risk management both originating from the Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE), Regulations of the Financial Services Authority (FSA), and other provisions that bind the Company.

Arsitektur pedoman penerapan manajemen risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1. Prinsip Manajemen Risiko,
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan
3. Proses Manajemen Risiko.

The risk management implementation guidelines architecture consists of 3 (three) main components, which are:

1. Risk Management Principles,
2. Risk Management Framework, and
3. Risk Management Process.

Gambar Arsitektur Manajemen Risiko ISO 31000:2018
Picture of ISO 31000:2018 Risk Management Architecture

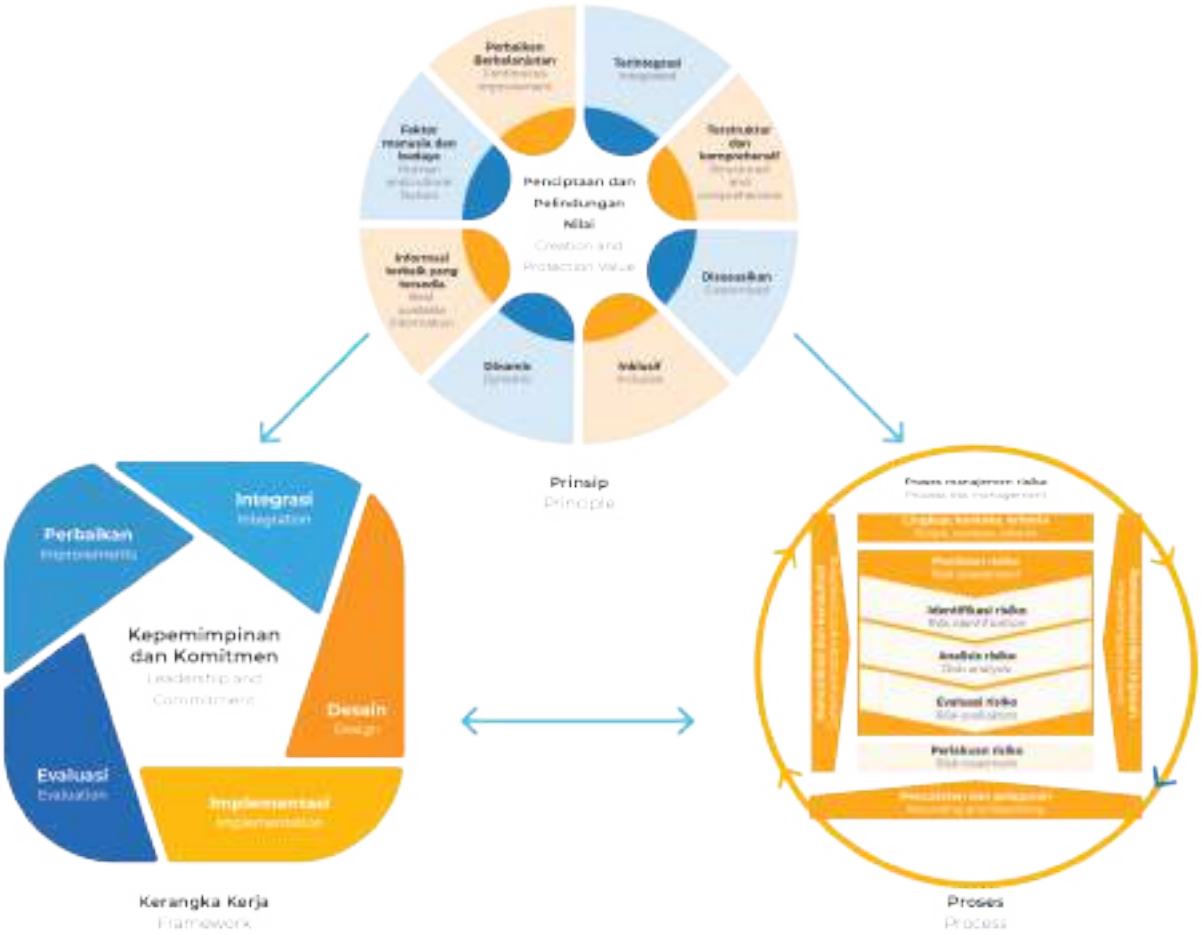

Kebijakan manajemen risiko termasuk kebijakan untuk masing-masing risiko mengacu kepada pedoman/Kebijakan/prosedur manajemen risiko *Holding* dan didokumentasikan secara memadai, dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, dilakukan kaji ulang secara berkala dan selalu diperbaharui untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko Perusahaan.

Risk management policies including policies for each risk refer to the Holding's risk management guidelines / policies / procedures and are adequately documented, communicated to all employees, reviewed periodically and updated to accommodate changes in factors that impact the Company's risks.

Kebijakan masing-masing risiko yang disusun bersifat:

1. Relevan dengan jenis risiko yang telah ditentukan, baik risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari hari Perusahaan;
2. Menjabarkan hubungan antara batas toleransi Perusahaan, regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan risiko; dan
3. Menjelaskan hubungan antara manajemen risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini Perusahaan.

The policies for each risk prepared are:

1. Relevant to the type of risk that has been determined, both risks related to strategy and related to the Company's daily operations;
2. Describing the relationship between the Company's tolerance limits, regulations regarding funding, and risk supervising methods; and
3. Explaining the relationship between risk management and the Company's objectives, strategies and current conditions.

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, Pedoman, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perusahaan didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi limit risiko, memperhatikan *risk appetite, risk tolerance*, dan strategi Perusahaan secara keseluruhan.

1. Prinsip Manajemen Risiko
   Prinsip manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan dan melindungi Perusahaan dari potensi risiko yang dihadapi, serta memberikan panduan berkaitan dengan karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Kerangka kerja membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi Perusahaan. Proses melibatkan penerapan aktivitas manajemen risiko yang sistematis mulai dari penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria, identifikasi risiko, penilaian risiko, perlakuan risiko hingga komunikasi dan konsultasi risiko.

   Prinsip memberikan fondasi dasar penerapan sistem manajemen risiko yang diimplementasikan di dalam Perusahaan melalui kerangka kerja untuk menjalankan proses manajemen risiko.

   Prinsip-prinsip manajemen risiko yang bersifat mendasar dan menyeluruh agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan efisien, yaitu:
   a. Terintegrasi
      Manajemen risiko adalah bagian integral dari seluruh kegiatan Perusahaan. Perusahaan menentukan akuntabilitas manajemen risiko dan peran pengawasan dalam organisasi menjadi bagian yang integral dari tata kelola organisasi.
   b. Terstruktur dan Komprehensif
      Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif perlu diterapkan untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Perusahaan memastikan manajemen risiko telah diimplementasikan secara terstruktur, tepat waktu dan komprehensif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
   c. Disesuaikan
      Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan secara proporsional sesuai dengan konteks eksternal dan internal Perusahaan yang terkait dengan sasaran-sasaran Perusahaan yang meliputi:
      i. Pemahaman atas organisasi dan konteksnya
         Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko, Perusahaan mempertimbangkan faktor internal (antara lain: visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, struktur organisasi, dan lain-lain) dan faktor eksternal (antara lain: politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum, dan lain-lain).
      ii. Mengartikulasikan komitmen manajemen risiko
         Direksi menunjukkan komitmennya dengan mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan, sasaran, *risk appetite* dan akan dievaluasi jika terjadi perubahan jajaran manajemen, kebijakan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau arahan manajemen.

In order to control risk effectively, the Company's guidelines, policies and procedures are based on risk management strategies and are equipped with risk limits, taking into account risk appetite, risk tolerance and the Company's overall strategy.

1. The Principles of Risk Management
   Risk management principles aim to create and protect the Company from the potential risks it faces, as well as providing guidance regarding the characteristics of effective and efficient risk management. The framework helps integrate risk management into Company activities and functions. The process involves implementing systematic risk management activities starting from establishing scope, context and criteria, risk identification, risk assessment, risk treatment to risk communication and consultation.

   The principles provide the basic foundation for implementing a risk management system implemented within the Company through a framework for carrying out the risk management process.

   The principles of risk management that are fundamental and comprehensive so that the implementation of risk management can run effectively and efficiently, i.e.,:
   a. Integrated
      Risk management is an integral part of all Company activities. The company determines risk management accountability and the role of supervision within the organization to be an integral part of organizational governance.
   b. Structured and Comprehensive
      A structured and comprehensive approach needs to be applied to obtain consistent and comparable results. The company ensures that risk management has been implemented in a structured, timely and comprehensive manner in accordance with predetermined policies.
   c. Customized
      The risk management framework and processes are adjusted proportionally according to the Company's external and internal context related to the Company's targets which include:

      i. Understanding of the organization and its context
         In preparing the risk management framework, the Company considers internal factors (including: vision, mission, Company values, organizational structure, etc.) and external factors (including: political, economic, social, technology, environment, law, etc.).

      ii. Articulating risk management commitment The Board of Directors shows its commitment by articulating it in the form of policies, targets, risk appetite and will be evaluated if there are changes in management ranks, policies, the Company's Long-Term Plan (RJPP) or management direction.

iii. Menetapkan peran, otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas Perusahaan Penerapan tata kelola manajemen risiko Perusahaan dilakukan dengan mengadopsi konsep model tata kelola risiko tiga lini.

d. Inklusif
Keterlibatan *stakeholders* secara memadai dan tepat waktu yang memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Prinsip ini bila diterapkan akan meningkatkan kesadaran mengenai arti penting manajemen risiko dan kualitas proses manajemen risiko.

e. Dinamis
Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang sejalan dengan perubahan konteks eksternal dan internal Perusahaan. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, merumuskan, dan merespon perubahan-perubahan atas peristiwa tersebut secara memadai dan tepat waktu. Manajemen memberikan arahan atas penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan guna memastikan keselarasan dengan sasaran Perusahaan.

f. Informasi Terbaik yang Tersedia
Masukan yang digunakan dalam manajemen risiko didasarkan pada informasi historis dan informasi terkini, serta ekspektasinya di masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhatikan keterbatasan dan ketidakpastian terkait informasi yang dimaksud. Informasi risiko sebaiknya disajikan tepat waktu, jelas, dan dapat diakses oleh *stakeholders* terkait. Sistem informasi manajemen risiko mendukung ketersediaan informasi secara lengkap, akurat, informatif serta dapat diandalkan untuk mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

g. Faktor Manusia dan Budaya
Perilaku dan budaya sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek manajemen risiko di setiap tahapan dan tingkatan proses. Perusahaan memastikan kecukupan sumber daya manusia untuk implementasi proses manajemen risiko. Dalam hal ini, Perusahaan melaksanakan sosialisasi/training, serta komunikasi internal secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan meningkatkan budaya risiko Perusahaan.

h. Perbaikan Berkelanjutan
Manajemen risiko perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Perusahaan mempertimbangkan hasil penilaian *risk maturity*, baik secara mandiri atau independen, penilaian *risk culture*, hasil pelaksanaan audit operasional, audit sistem manajemen dan audit lainnya untuk menyempurnakan strategi manajemen risiko dan meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko. Secara umum, perbaikan yang dilakukan meliputi dua hal yaitu:

iii. Determine the Company's role, authority, responsibility and accountability. Implementation of the Corporate Risk Management governance is carried out by adopting the concept of a three-line risk governance model.

d. Inclusive
Adequate and timely involvement of stakeholders that allows their knowledge, views and perceptions to be taken into account. When implemented, this principle will increase awareness regarding the importance of risk management and the quality of the risk management process.

e. Dynamic
Risks can appear, change, or disappear in line with changes in the Company's external and internal context. Risk management anticipates, detects, formulates and responds to changes in these events adequately and in a timely manner. Management provides direction on the implementation of risk management by considering the Company's risk appetite and risk tolerance to ensure alignment with the Company's targets.

f. Best Information Available
The input used in risk management is based on historical and current information, as well as expectations for the future. Risk management explicitly takes into account the limitations and uncertainties related to the information in question. Risk information should be presented timely, clearly and accessible to relevant stakeholders. The risk management information system supports the availability of complete, accurate, informative and reliable information to support the effectiveness of the risk management process.

g. Human and Cultural Factors
Behaviour and culture greatly influence all aspects of risk management at every stage and level of the process. The Company ensures adequate human resources for the implementation of the risk management process. In this case, the Company carries out socialization / training, as well as continuous internal communication to improve human resource capabilities and improve the Company's risk culture.

h. Continuous Improvement
Risk management needs to be improved continuously through a learning process and experience. The company considers the results of risk maturity assessments, either independently or independently, risk culture assessments, results of operational audits, management system audits and other audits to perfect risk management strategies and increase the maturity of risk management implementation. In general, the improvements carried out include two things, i.e.,:

i. Adaptasi
Pemantauan dan penyesuaian kerangka kerja manajemen risiko secara tepat waktu dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
ii. Perbaikan Berkesinambungan
Pengembangan rencana dan langkah perbaikan dilakukan terus-menerus agar berkontribusi menguatkan manajemen risiko.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Dalam kerangka kerja Manajemen Risiko, Perusahaan memasukkan umpan balik (*feedback loop*) berdasarkan informasi yang tepat dan berkualitas, proses manajemen dan penilaian objektif, memungkinkan pengambilan tindakan yang diperlukan pada secara tepat waktu untuk merespon perubahan profil risiko. Kerangka kerja manajemen risiko digunakan untuk membantu pengelolaan risiko secara efektif di seluruh kegiatan operasional Perusahaan. Kerangka kerja memastikan bahwa informasi yang lengkap dan memadai dari proses manajemen risiko yang akan dilaporkan serta sebagai dasar dalam pembuatan keputusan.

Pengembangan kerangka kerja manajemen risiko, terdiri dari:
a. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen bahwa penerapan manajemen risiko sudah diimplementasikan di setiap kegiatan Perusahaan.
b. Integrasi Manajemen risiko harus terintegrasi ke dalam setiap kegiatan Perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
c. Desain Meliputi pemahaman tujuan aktivitas, pemahaman Perusahaan dan proses bisnis serta konteksnya, penetapan pedoman manajemen risiko, akuntabilitas, dan proses integrasi manajemen risiko ke dalam kegiatan, alokasi sumber daya, dan penetapan mekanisme pelaporan.
d. Implementasi Penerapan manajemen risiko dalam seluruh aktivitas Perusahaan, termasuk pengambilan keputusan dan perubahan konteks internal dan eksternal dengan memadai.
e. Evaluasi Mengukur kinerja kerangka manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan.
f. Perbaikan Perusahaan secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal.

3. Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu pemilik risiko dalam mengelola peluang dan ancaman bagi ketercapaian sasaran secara terukur dan terkendali. Secara umum, kerangka proses manajemen risiko Perusahaan sebagai berikut:

i. Adaptation
Supervising and adapting the risk management framework in a timely manner to changes in the internal and external environment.
ii. Continuous Improvement
Planning the development and improvement measures are carried out continuously to contribute to strengthening risk management.

2. The Principles of Risk Management
In the Risk Management framework, the Company incorporates feedback loop based on appropriate and quality information, management processes and objective assessments, enabling the necessary actions to be taken in a timely manner to respond to changes in the risk profile. The risk management framework is used to help manage risk effectively throughout the Company's operational activities. The framework ensures that complete and adequate information from the risk management process will be reported as a basis for decision making.

The development of a risk management framework, consisting of:
a. Leadership and Commitment Management must show leadership and commitment that risk management has been implemented in every Company's activity.
b. Integration Risk management must be integrated into every Company's activity to support the achievement of Company's goals.
c. Design Includes understanding activity objectives, understanding Company and business processes and their context, establishing risk management guidelines, accountability, and processes for integrating risk management into activities, resource allocation, and establishing reporting mechanisms.
d. Implementation The implementation of risk management in all Company's activities, including adequate decision making and changes in internal and external context.
e. Evaluation Periodically measure the performance of the risk management framework against objectives, implementation plans, indicators and expected behaviour.
f. Improvement The Company continuously monitors and adapts its risk management framework to address external and internal changes.

3. Risk Management Process
The risk management process is a series of systematic steps to assist risk owners in managing opportunities and threats to achieve targets in a measurable and controlled manner. In general, the Corporate Risk Management process framework is as follows:

a. Penetapan komunikasi dan konsultasi melalui pengawasan aktif Direksi dan Komisaris serta penetapan tugas dan tanggung jawab dalam organ manajemen risiko.
b. Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria yang dituang dalam dokumen kebijakan dengan mempertimbangkan sasaran, aktivitas, faktor internal dan eksternal Perusahaan.
c. Pelaksanaan proses identifikasi risiko untuk menangkap potensi risiko.
d. Pelaksanaan analisis risiko untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya melalui proses pengukuran risiko.
e. Pelaksanaan evaluasi risiko dengan melaksanakan proses pemantauan risiko mendukung keputusan dan rencana tindak lanjut.
f. Pelaksanaan perlakuan risiko sebagai langkah pengendalian risiko.
g. Memantau dan meninjau risiko untuk memastikan efektivitas desain dan implementasi proses manajemen risiko secara keseluruhan, dengan dukungan sistem pengendalian internal dan sistem informasi manajemen risiko.
h. Melaksanakan dokumentasi dan pelaporan risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dan eskalasi informasi kepada pemangku kepentingan. Perusahaan memastikan keseluruhan informasi/risiko terdata dalam suatu sistem informasi manajemen risiko yang dapat menyediakan perbandingan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

a. Determining communication and consultation through active supervision of the Board of Directors and Commissioners as well as determining duties and responsibilities in risk management organs.
b. Determining the scope, context and criteria outlined in the policy document by considering the Company's targets, activities, internal and external factors.
c. The implementation of the risk identification process to capture potential risks.
d. Carrying out risk analysis to understand the nature of risk and its characteristics through the risk measurement process.
e. Carrying out risk evaluation by carrying out a risk supervising process supports decisions and follow-up plans.
f. The implementation of risk treatment as a risk control measure.
g. Monitoring and reviewing risks to ensure the effectiveness of the design and implementation of the overall risk management process, with the support of the internal control system and risk management information system.
h. Implement risk documentation and reporting to support appropriate decision making and information escalation to stakeholders. The company ensures that all information/risks are recorded in a risk management information system which can provide a comparison of realization with predetermined targets.

Pilar Manajemen Risiko

Dalam pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko Perusahaan dilakukan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang menjadi pilar manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup evaluasi terhadap:
   a. Kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris; dan
   b. Kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup namun tidak terbatas pada:
   a. Penerapan manajemen risiko agar memadai dan sesuai dengan karakteristik, kompleksitas serta profil risiko Perusahaan.
   b. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
   c. Memberikan arahan yang jelas dalam penerapan manajemen risiko.
   d. Melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.
   e. Mengembangkan budaya manajemen risiko di Perusahaan.
   f. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan manajemen risiko pada masing-masing fungsi.

Risk Management Pillar

In measuring the quality of the Corporate risk management implementation, an assessment is carried out on 4 (four) aspects which are the pillars of risk management, which are:

1. The active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners includes the evaluation of:
   a. Adequate active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners; and
   b. Adequate implementation of the authority and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

   Matters that need to be considered in implementing active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners include but are not limited to:
   a. The implementation of risk management to be adequate and in accordance with the Company's characteristics, complexity and risk profile.
   b. Understanding well the types and levels of risks inherent in the Company's business activities.
   c. Providing clear direction in implementing risk management.
   d. Actively monitoring and mitigating risks.
   e. Developing a risk management culture in the Company.
   f. Determining clear duties and responsibilities in implementing risk management in each function.

g. Menetapkan dan menjaga kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan struktur organisasi yang memadai, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif.
h. Mendukung penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit di Perusahaan.
i. Bertanggung jawab terhadap penilaian risiko dan permodalan.
j. Menjaga penerapan manajemen risiko Perusahaan dilakukan secara terintegrasi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko mencakup evaluasi terhadap:
   a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (ris*k tolerance*);
   b. Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
   c. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
   d. Kecukupan penetapan limit risiko.

   Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Perusahaan. Prosedur manajemen risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko menggambarkan hubungan antara *risk tolerance* Perusahaan, kebutuhan modal yang dipersyaratkan, modal sendiri, dan proses serta metode pemantauan risiko. Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, *risk appetite* dan *risk tolerance*, profil risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan tentang praktik Perusahaan yang sehat. Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta di *review* secara berkala untuk mengakomodasi perubahan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap:
   a. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
   b. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko; dan
   c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

   Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perusahaan melakukan

g. Determining and maintaining the adequate quantity and quality of human resources and an adequate organizational structure, to support the implementation of effective risk management.
h. Support the implementation of risk management in each unit in the Company.
i. Responsible for risk and capital assessment.
j. Maintaining the implementation of the Corporate Risk Management in an integrated manner.

2. The adequacy of policies, procedures, and determination of risk limits includes the evaluation of:
   a. The formulation of the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance);
   b. Risk management strategy that is in line with the level of risk to be taken and risk tolerance;
   c. The adequacy of risk management policies and procedures; and
   d. The adequacy of risk limit determination.

   Policies and procedures related to risk management are written directions for implementing risk management in line with the Company's vision, mission and business strategy. Risk management procedures are procedures or mechanisms for implementing risk management policies, including policies for identifying, measuring, controlling and supervising risks. Policies and procedures related to risk management describe the relationship between the Company's risk tolerance, required capital requirements, own capital, and risk supervising processes and methods. Policies and procedures related to risk management are designed and implemented by taking into account the characteristics and complexity of business activities, risk appetite and risk tolerance, risk profiles as well as applicable laws and regulations regarding healthy company practices. Policies and procedures related to risk management are adequately documented and communicated to all employees and reviewed periodically to accommodate changes.

3. The adequacy of the risk identification, measurement, control and supervising processes as well as the adequacy of the risk management information system includes evaluation of:
   a. Adequacy of risk identification, measurement, supervising and control processes;
   b. Adequate quantity and quality of human resources to support the effectiveness of the risk management process; And
   c. Adequacy of the risk management information system.

   The identification, measurement, control and supervising of risks are the main parts of the risk management implementation process. Risk identification is proactive, covers all of the Company's business activities and is carried out in order to analyze the sources and possible risks and their impacts. Companies carry out risk

pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam pemantauan proses manajemen risiko, Perusahaan menetapkan Group Manajemen Risiko Perusahaan untuk melakukan pemantauan tingkat, tren, dan arah risiko. Perusahaan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, Perusahaan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko yang dibangun Perusahaan sejak tahun 2022 berupa aplikasi sistem *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) terintegrasi yang telah dilakukan pengembangan serta *application programming interface* (API) dengan sistem i-ERM IFG di tahun 2023.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh mencakup evaluasi terhadap:
   a. Kecukupan sistem pengendalian internal; dan
   b. Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.

Proses penerapan manajemen risiko dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal dan efektif. Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Perusahaan yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit.

Model Tata Kelola Risiko

Perusahaan menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) dalam melaksanakan pengelolaan risiko. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam *three lines model* adalah sebagai berikut:

a. Lini pertama sebagai Unit Pemilik Risiko, merupakan Unit Kerja yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis;
b. Lini kedua sebagai Unit Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan, merupakan Unit Kerja yang mengukur, memantau, dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan; dan
c. Lini ketiga sebagai *Group* Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan Unit Kerja yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.

measurements in accordance with the characteristics and complexity of business activities. The effectiveness of implementing risk management needs to be supported by risk control by considering the results of risk measurement and supervising. In supervising the risk management process, the Company establishes a Corporate Risk Management Group to monitor the level, trend and direction of risk. The Company develops a risk management information system that is tailored to the characteristics and complexity of the Company's business activities, to support the process of identifying, measuring, controlling and supervising risks.

In order to support the process of identifying, measuring, controlling and supervising risks, the Company develops a risk management information system that is tailored to the characteristics, activities and complexity of the Company's business activities. The risk management information system that the Company has built since 2022 is an integrated Governance, Risk & Compliance (GRC) system implementation which has been developed as well as an implementation programming interface (API) with the IFG i-ERM system in 2023.

4. A comprehensive internal control system includes evaluation of:
   a. The adequacy of the internal control system ; and
   b. The adequacy of reviews by independent parties within the Company, both by the work unit that handles risk management and by the work unit that handles internal audit.

The risk management implementation process is equipped with a reliable and effective internal control system. Companies are required to implement an effective internal control system for risks inherent in the implementation of business activities at all levels of the Company's organization. The implementation of a reliable and effective Company's internal control system is the responsibility of all units.

Risk Governance Model

The company applies a three-line risk governance model in implementing risk management. The functions and roles of each line in the three lines model are as follows:

a. The first line, as the Risk Owner Unit, is the Work Unit that directly identifies and manages risks in business processes;
b. The second line, as the Risk Management Unit and Compliance Unit, is a Work Unit that measures, monitors and treats risks in aggregate, develops the Corporate Risk Management methodology and policies; and
c. The third line as the Internal Monitoring Unit Group (SPI) is a Work Unit that ensures governance and risk control are implemented effectively by the Company.

Gambar Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini
Picture of Three Lines Risk Governance Model

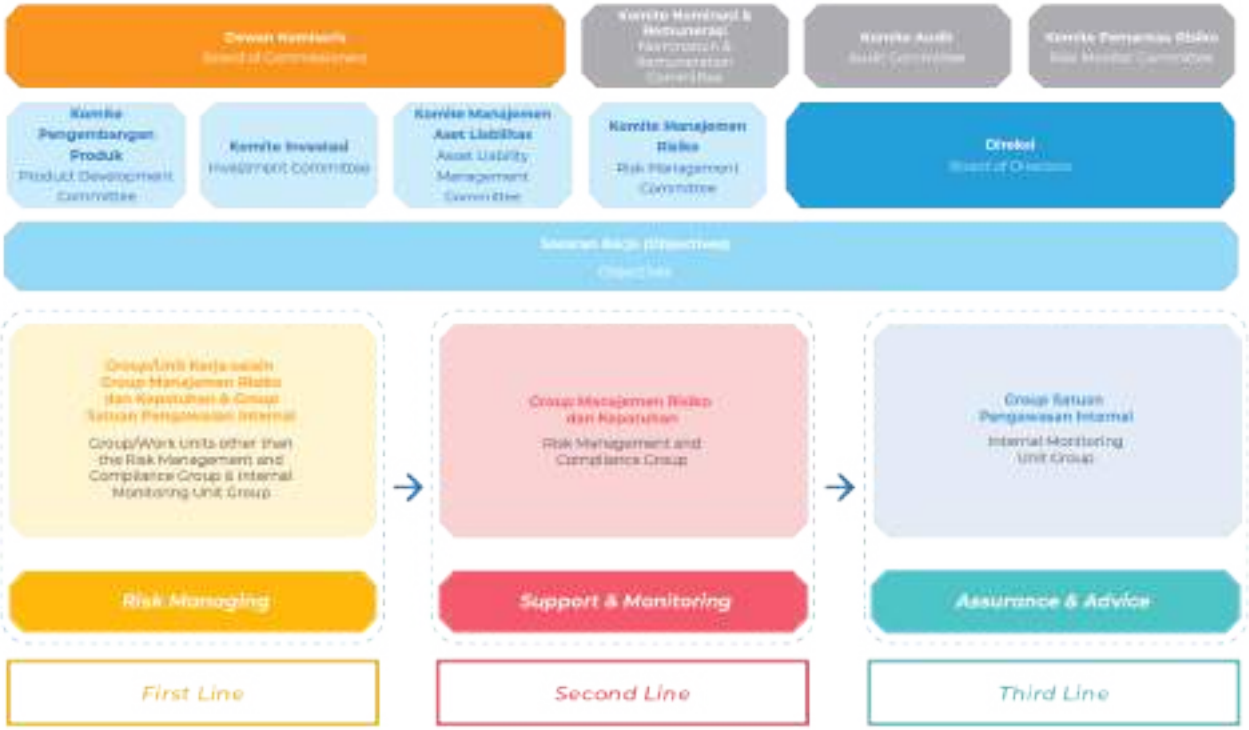

Organ Pengelola Risiko

Organ pengelola Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan terdiri dari:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Direktur yang Membidangi Fungsi Keuangan;
4. Direktur yang Membidangi Fungsi Manajemen Risiko;
5. Komite Audit;
6. Komite Pemantau Risiko (KPR);
7. *Group* Manajemen Risiko & Kepatuhan;
8. *Group* Satuan Pengawasan Internal (SPI); dan
9. Unit Pemilik Risiko (*Risk Owner*).

Risk Management Organs

The Risk management organ in implementing Risk Management in the Company consists of:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Director in charge of Financial Functions;
4. Director in charge of Risk Management Functions;
5. Audit Committee;
6. Risk Supervising Committee (KPR);
7. Risk Management & Compliance Group;
8. Internal Monitoring Unit Group (SPI) ; and
9. Risk Owner Unit.

Risiko Utama Perusahaan

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap risiko utama Perusahaan selama tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Company's Main Risks

The Company monitors the Company's main risks during 2023 with the following results:

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Nama Risiko (*Risk Event*) Name of Risk (Risk Event)	Penyebab Cause	Dampak Impact	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Risiko Strategis	Laba Anak Perusahaan (AJS) tidak mencapai target anggaran	1. Kenaikan Beban Usaha Pemasaran Perusahaan 2. Realisasi pencapaian Premi Bruto yang belum mencapai target	1. Menurunnya laba dan berpotensi memperburuk Kesehatan Keuangan Perusahaan secara konsolidasi 2. Kinerja tidak tercapai 3. Menurunnya laporan keuangan konsolidasi	1. *Monitoring* atas program kerja dan inisiatif strategis dalam RKAP 2023. 2. (AJS) Melakukan optimalisasi bisnis melalui *channel broker* yang memiliki portofolio sesuai dengan *business appetite* Jasindo Syariah. 3. Mengatur pengelolaan dana sesuai *cash budget*.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Nama Risiko (*Risk Event*) Name of Risk (Risk Event)	Penyebab Cause	Dampak Impact	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
2	Risiko Likuiditas	Hasil Investasi tidak mencapai target anggaran	Penempatan instrumen investasi yang tidak maksimal	1. Menurunnya laba Perusahaan 2. Menurunnya tingkat solvabilitas Perusahaan	1. Optimalisasi Likuiditas dengan implementasi strategi *Liability Driven Investment* (LDI). 2. *Rebalancing* portofolio investasi yang memiliki kinerja kurang optimal.
3	Risiko Likuiditas	Tidak terjualnya aset tetap	1. Kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih 2. Proses penjualan aset tidak sesuai rencana yang ditetapkan	1. Tidak tercapainya RBC minimum sesuai POJK 71/2016 2. Hilangnya kesempatan memperoleh Hasil Investasi sesuai target Perusahaan 3. Potensi menurunnya nilai aset yang tidak ditempati	1. Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap PT Asuransi Jasa Indonesia dari Para Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2023. 2. Pelaksanaan Penjualan Aset dan Pelaksanaan Penandatanganan AJB atas Tanah dan Gedung Kantor Pekanbaru tanggal 14 Desember 2023. 3. Pelaksanaan Penjualan Aset dan Pelaksanaan Penandatanganan AJB Tanah dan Gedung Kantor Jambi tanggal 21 Desember 2023.
4	Risiko Strategis	Tidak terdapat peningkatan *current* ekosistem BUMN	1. Strategi Bisnis tidak fokus pada sasaran 2. Kurangnya penetrasi segmentasi Nasabah BUMN 3. Terdapat persyaratan tender yang tidak dapat dipenuhi	Tidak tercapainya target kinerja Perusahaan	1. Melakukan pemetaan *account Holding*, Anak, Cucu BUMN. 2. Memastikan *renewal account* sesuai dengan T&C terbaik. 3. Memastikan *account* BUMN mendapatkan *backup* kapasitas dari *underwriter*. 4. Mendorong *Underwriter* mendapatkan T&C dan kapasitas sebelum jangka waktu berakhir.
5	Risiko Kepatuhan	Terdapatnya sanksi dari OJK atas tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas minimum	Inisiatif strategis tidak mencapai target pemenuhan tingkat solvabilitas	1. Potensi mendapatkan sanksi pengawasan intensif/pengawasan khusus 2. Keberlangsungan usaha terganggu	Pelaksanaan alternatif Inisiatif strategis untuk memenuhi tingkat solvabilitas.
6	Risiko Hukum	Tuntutan hukum dari Tertanggung	1. Tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian klaim dengan Tertanggung 2. Tidak berjalannya proses pemasaran ketentuan yang berlaku	1. Potensi munculnya berita negatif terhadap Perusahaan 2. Menurunnya kepercayaan tertanggung kepada Perusahaan 3. Meningkatnya biaya litigasi	1. Meningkatkan komunikasi yang intensif dengan *Representative Office*, Unit terkait, tertanggung ataupun pihak lain dalam penyelesaian penanganan perkara atau pendampingan hukum. 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap Kebijakan Perusahaan terkait penjelasan polis asuransi kepada pemegang polis/ tertanggung.
7	Risiko Likuiditas	Ketidaksesuaian perhitungan proporsi restrukturisasi Asuransi Kredit terhadap dampak kenaikan RBC	1. Simulasi perhitungan proporsi restrukturisasi Asuransi Kredit berbeda dengan realisasi, sehingga terdapat deviasi	Tidak tercapainya RBC minimum sesuai POJK 71/2016	1. Mengupayakan mitra Perbankan untuk pelaksanaan *cancel & refund* agar terjadi penurunan Cadangan Klaim dan potensi penambahan klaim yang akan datang. 2. Kajian atas mekanisme kerja sama baru dalam restrukturisasi asuransi kredit

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Nama Risiko (*Risk Event*) Name of Risk (Risk Event)	Penyebab Cause	Dampak Impact	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
8	Risiko Asuransi	Terdapat penempatan reasuransi yang tidak melengkapi persyaratan *recovery*	1. Tidak diatur secara tegas jangka waktu pembayaran *recovery* dan jenis dokumen pendukung pada saat penempatan reasuransi 2. Tidak mendapatkan *backup* reasuransi yang memiliki persyaratan *rating* 3. Reasuradur mengalami kebangkrutan/pailit	1. Peningkatan piutang reasuransi atas *recovery* klaim 2. Menurunnya *cashflow* Perusahaan 3. Berpotensi tidak tertagihnya piutang reasuransi	Pengkinian ketentuan penempatan reasuransi fakultatif yang menjadi salah satu bagian dari *underwriting guideline*, dan ditindaklanjuti dengan sosialisasi *Underwriting Guidelines* kepada tim *underwriting* dan *Group* bisnis.
9	Risiko Strategis	Kegagalan pelaksanaan Program Penugasan Pemerintah	1. Pelaksanaan Program Penugasan Pemerintah yang tidak tepat 2. Izin produk tidak disetujui oleh OJK 3. Berkurangnya peserta Program Penugasan Pemerintah 4. Penerima subsidi Anggaran tidak menjalankan kewajibannya	1. Realisasi Pendapatan Premi Bruto tidak tercapai 2. Menurunnya reputasi kinerja Perusahaan	1. Memastikan program berjalan sesuai ketentuan regulasi (Peraturan Menteri/Petunjuk Teknis/SOP). 2. Melakukan Koordinasi dengan Kementan terkait optimalisasi serapan AUTP dengan PT Pupuk Indonesia. 3. Forum *Group Discussion* terkait Pedoman bantuan premi/Pedum AUTP & AUTSK 2024 bersama Direktorat PSP, Pangan, Hukum, Hortikultura, Keswan Kementan bersama *Group* PKP, *Underwriting* ritel, Klaim *Property*. 4. Penandatanganan PKS adendum kontrak payung bersama Kemenkeu dan Pelaksanaan penandatangan Kontrak Payung ABMN 2023/2025 tanggal 21 Desember 2023. 5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan adanya persetujuan atas kenaikan iuran premi dan Penerbitan surat penunjukan dari DSP kemenkeu nomor S-317/PB.7/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal penugasan badan penyelenggara program jamkespimpri tahun 2024.
10	Risiko Kredit	Tidak tertagihnya piutang premi dan *recovery* klaim reasuransi	1. Ketidaksesuaian data Perusahaan dengan data tertanggung 2. Tidak diatur secara tegas jangka waktu pembayaran *recovery* dan jenis dokumen pendukung pada saat penempatan reasuransi 3. Tertanggung, koasuradur, atau reasuradur mengalami kebangkrutan/pailit	1. Tidak tercapainya RBC minimum sesuai POJK 71/2016 2. Menurunnya *cash flow* perusahaan 3. Potensi terjadinya *dispute* klaim 4. Peningkatan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	1. Pemetaan *outstanding* piutang reasuransi untuk mengidentifikasi status piutang layak tagih atau terkendala. 2. Melakukan optimalisasi penagihan piutang premi dan *outstanding* klaim.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Nama Risiko (Risk Event) Name of Risk (Risk Event)	Penyebab Cause	Dampak Impact	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Strategic Risk	Subsidiary Profit (AJS) not achieving budget targets	1. Company's Marketing Business Expenses 2. The realization of Gross Premium achievement which has not reached the target	1. Declining profits and the potential to worsen the Company's financial health on a consolidated basis 2. Performance is not achieved 3. Decreased consolidated financial statements	1. The monitoring of work programs and strategic initiatives in the 2023 RKAP. 2. (AJS) Optimizing business through broker channels that have a portfolio in line with Jasindo Syariah's business appetite. 3. Arranging fund management according to the cash budget.
2	Liquidity Risk	Investment Results not reaching the budget target	The non-maximum placement of investment instruments that are not maximum	1. Decreasing in Company profits 2. Decreasing in the company's level of company solvency	1. Optimizing liquidity by implementing the Liability Driven Investment (LDI) strategy. 2. Rebalancing investment portfolios that have less than optimal performance
3	Liquidity Risk	Non-sale of fixed assets	1. Property market conditions have not fully recovered 2. The asset sales process is not appropriate	1. Not achieving minimum RBC according to PFSA 71/2016 2. Loss of opportunity to obtain investment returns according to the Company's targets 3. Potential decline in the value of unoccupied assets	1. The approval of the Write-Off and Change Hand of Fixed Assets of PT Asuransi Jasa Indonesia from the Shareholders on December 7, 2023. 2. The implementation of Asset Sales and the Implementation of AJB Signing of Land and Office Buildings in Pekanbaru on December 14, 2023. 3. The implementation of Asset Sales and Signing of the Jambi Land and Office Building AJB on December 21, 2023.
4	Strategic Risks	There is no increase in the current SOE ecosystem	1. Business strategy does not focus on targets 2. Lack of segmentation penetration of SOE customers 3. There are tender requirements that cannot be fulfilled.	Company's performance targets are not achieved.	1. Carrying out mapping of SOE Holding, Children and Grandchildren accounts. 2. Ensuring account renewal is in accordance with the best T&C. 3. Ensuring that SOE accounts receive capacity backup from the underwriter 4. Encouraging Underwriters to obtain T&C and capacity before the term ends.
5	Compliance Risk	There are sanctions from the FSA for not meeting the minimum solvency level	Strategic initiatives do not achieve the target of meeting the solvency level	1. Potential for intensive supervision/special supervision sanctions 2. Business continuity is disrupted. Implementation of alternative strategic initiatives to meet solvency levels.	The implementation of alternative strategic initiatives to meet solvency levels.
6	Legal Risk	Legal claims from the Insured	1. Failure to reach a claim settlement agreement with the Insured 2. The marketing process of the applicable provisions is not Ongoing Awaiting.	1. Potential for negative news to emerge regarding the Company 2. Decreased trust of the insured in the Company 3. Increased litigation costs	1. Increased intensive communication with Representative Offices, related units, insured persons or other parties in resolving case handling or legal assistance. 2. Increased compliance with Company Policy regarding explanation of insurance policies to policy holders/insured.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Nama Risiko (Risk Event) Name of Risk (Risk Event)	Penyebab Cause	Dampak Impact	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
7	Liquidity Risk	Inconsistency in calculating the proportion of Credit Insurance restructuring with the impact of an increase in RBC	1. The simulation of the calculation of the proportion of Credit Insurance restructuring is different from the realization, so there is a deviation	Not achieving the minimum RBC in accordance with PFSA 71/2016	1. Encouraging Banking partners to implement cancels & refunds so that there is a decrease in Claim Reserves and the potential for additional claims in the future. 2. Study of new cooperation mechanisms in credit insurance restructuring
8	Insurance Risk	There are reinsurance placements that do not fulfil the recovery requirements	1. The recovery payment period and types of supporting documents are not clearly regulated at the time of reinsurance placement 2. Not getting reinsurance backup that has rating requirements 3. Reinsurers experiencing bankruptcy	1. Increase in reinsurance receivables from claim recoveries 2. Decrease in the Company's cash flow 3. Potential uncollectibility of reinsurance receivables	Updating provisions for placing facultative reinsurance, which is part of the underwriting guidelines, and followed up with socialization of the Underwriting Guidelines to the underwriting team and business groups.
9	Strategic Risks	Failure to Implement the Government Assignment Program	1. Improper Implementation of the Government Assignment Program 2. Product permits are not approved by FSA 3. Reduced Government Assignment Program participants 4. Budget subsidy recipients do not carry out their obligations	1. Realization of Gross Premium Income is not achieved 2. Deterioration of the Company's performance reputation	1. Ensuring that the program runs in accordance with regulatory provisions (Ministerial Regulations/ Technical Instructions/SOP). 2. Coordinating with the Ministry of Agriculture regarding optimizing AUTP absorption with PT Pupuk Indonesia. 3. Group Discussion Forum regarding the 2024 AUTP & AUTSK premium assistance guidelines / Guidelines with the Directorate of PSP, Food, Law, Horticulture, Animal Husbandry of the Ministry of Agriculture together with the PKP Group, Retail Underwriting, Property Claims. 4. Signing of the PKS addendum to the umbrella contract with the Ministry of Finance and implementation of the signing of the 2023/2025 ABMN Umbrella Contract on 21 December 2023. 5. Coordinating with the Ministry of Finance which resulted in approval of the increase in premium contributions and the issuance of a letter of appointment from the Ministry of Finance's DSP number S-317/PB.7/2023 dated 29 December 2023 regarding the assignment of the 2024 Jamkespimpri program organizing body.
10	Credit Risk	Uncollectibility of premium receivables and recovery of reinsurance claims	1. Unconformity between Company's data and insured data 2. The recovery payment period and types of supporting documents are not clearly regulated when reinsurance is placed 3. The insured, co-insurer or reinsurer experiences bankruptcy	1. Minimum RBC is not achieved according to PFSA 71/2016 2. Decreased company cash flow 3. Potential for claim disputes 4. Increase in the value of Allowance for Impairment Losses (CKPN)	1. Mapping outstanding reinsurance receivables to identify the status of receivables that are collectible or problematic. 2. Optimizing the collection of premium receivables and outstanding claims.

Peta Risiko *Current* Desember 2023

Current Risk Map December 2023

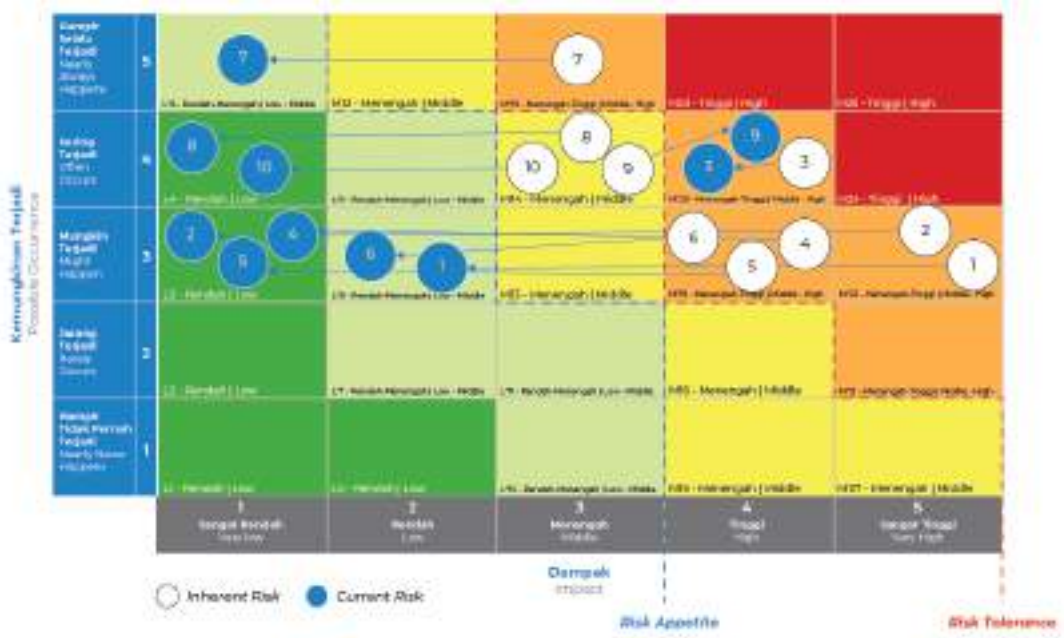

Berikut pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya:

The following is the implementation of risk and cost treatment:

No.	Jenis Risiko Types of Risk	Nama Risiko (*Risk Event*) Risk Name (Risk Event)	Perlakuan Treatment		Realisasi Biaya Mitigasi (Rp juta) Mitigation Cost Realization (IDR million)
			Opsi Option	Realisasi Realization	
1	Strategis Strategic	Laba Anak Perusahaan (AJS) tidak mencapai target anggaran Subsidiary profit (AJS) did not reach budget target	*Reduce*	Laba sampai dengan Desember 2023 tercapai 104,24% (Rp8,97 miliar) dari target sebesar Rp8,61 miliar Profit until December 2023 achieved 104.24% (IDR8.97 billion) of the target of IDR8.61 billion	
2	Likuiditas Liquidity	Hasil Investasi tidak mencapai target anggaran Investment returns did not reach the budget target	*Reduce*	Hasil investasi sampai dengan Desember 2023 tercapai 118,38% dari anggaran dengan Hasil Investasi sebesar Rp213,07 miliar Investment return until December 2023 was achieved 118.38% of the budget with Investment Return of IDR213.07 billion	
3	Likuiditas Liquidity	Tidak terjualnya aset tetap Non-sale of fixed assets	*Reduce*	Rasio Likuiditas per Desember 2023 sebesar 111,53% Liquidity Ratio as of December 2023 amounted to 111.53%	1.616,73
4	Strategis Strategic	Tidak terdapat peningkatan *current* ekosistem BUMN There is no increase in the current ecosystem of SOEs	*Reduce*	Pertumbuhan ekosistem BUMN sampai dengan Desember 2023 sebesar 78,26% - Desember 2022: BUMN I = 15; BUMN II = 8; Total 23 - Desember 2023: BUMN I = 25; BUMN II = 16; Total 41 SOE ecosystem growth until December 2023 amounted to 78.26% - December 2022: SOE I = 15; SOE II = 8; Total 23 - December 2023: SOE I = 25; SOE II = 16; Total 41	
5	Kepatuhan Compliance	Terdapatnya sanksi dari OJK atas tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas minimum There are sanctions from OJK for not meeting the minimum solvency level	*Accept*	Tidak Terdapat Surat/Sanksi Peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Denda Administratif No Warning Letter/Sanction from Financial Services Authority regarding Administrative Fines	

No.	Jenis Risiko Types of Risk	Nama Risiko (*Risk Event*) Risk Name (Risk Event)	Perlakuan Treatment		Realisasi Biaya Mitigasi (Rp juta) Mitigation Cost Realization (IDR million)
			Opsi Option	Realisasi Realization	
6	Hukum Legal	Tuntutan hukum dari Tertanggung Lawsuits from the Insured	*Reduce*	Total nilai gugatan materiil sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp77,81 miliar Total value of material claims up to December 2023 amounted to IDR77.81 billion	7.982,60
7	Likuiditas Liquidity	Ketidaksesuaian perhitungan proporsi restrukturisasi Asuransi Kredit terhadap dampak kenaikan RBC Discrepancy in the calculation of the proportion of Credit Insurance restructuring to the impact of RBC increase	*Reduce*	Rasio Solvabilitas per Desember 2023 sebesar 148,89% Solvency Ratio as of December 2023 amounted to 148.89%	
8	Asuransi Insurance	Terdapat penempatan reasuransi yang tidak melengkapi persyaratan *recovery* There are reinsurance placements that do not complete the recovery requirements	*Reduce*	Pertumbuhan Hasil *Underwriting* sampai dengan Desember 2023 sebesar 25,78% Underwriting result growth until December 2023 of 25.78%	
9	Strategis Legal	Kegagalan pelaksanaan Program Penugasan Pemerintah Failure to implement the Government Assignment Program	*Reduce*	Realisasi Premi Bruto dari Asuransi Program Penugasan Pemerintah sampai dengan Desember 2023 tercapai sebesar 80,60% dari anggaran Realization of Gross Premiums from Government Assigned Insurance Program up to December 2023 achieved 80.60% of the budget.	
10	Kredit Legal	Tidak tertagihnya piutang premi dan recovery klaim reasuransi Kegagalan dalam melaksanakan Program Penugasan Pemerintah	*Reduce*	Persentase piutang di atas 60 hari Aset Yang Tidak Diperkenankan (AYTD) sampai dengan Desember 2023 tercapai sebesar 48,94% The percentage of receivables above 60 days of Unallowable Assets (AYTD) until December 2023 was achieved at 48.94%.	
Jumlah Biaya Total Cost					9.599,33

Laporan Manajemen Risiko Insidental

Selama tahun 2023 tidak terdapat kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis Perusahaan. Namun demikian, terdapat penyusunan kajian manajemen risiko terkait proses bisnis maupun aksi korporasi, antara lain:

1. Kajian persiapan *surrender of license Branch Office* Labuan;
2. Kajian persiapan implementasi Asuransi Perlindungan Petani Tembakau;
3. Kajian pengadaan Tenaga Pelaksana Asuransi Pertanian Program Pemerintah dan Tenaga Administrasi Pemasaran Perbankan;
4. Kajian Penjualan 2 (Dua) Aktiva Tetap ke Jamkrindo;
5. Kajian evaluasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
6. Kajian persiapan implementasi Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri; dan
7. Kajian Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Komisaris, Direksi, Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia Beserta Keluarga;
8. Kajian Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Mesin dan Inventaris Kantor PT Asuransi Jasa Indonesia;

Incidental Risk Management Statement

During 2023 there will be no abnormal conditions that could result in extraordinary losses or cessation of the Company's business processes. However, there are preparations for risk management studies related to business processes and corporate actions, including:

1. Review of preparations for surrender of license Labuan Branch Office;
2. Study of preparations for the implementation of Tobacco Farmer Protection Insurance;
3. Study of the procurement of Government Program Agricultural Insurance Implementing Personnel and Banking Marketing Administration Personnel;
4. Review of Sales of 2 (Two) Fixed Assets to Jamkrindo;
5. Evaluation study of Cattle/Buffalo Livestock Business Insurance;
6. Study of preparations for the implementation of Health Insurance for the Leaders of Indonesian Representatives Abroad; And
7. Study of Procurement of Health Insurance Service Providers for Commissioners, Directors, Employees of PT Asuransi Jasa Indonesia and Their Families;
8. Study of the Write-Off and Change Hand of Fixed Assets, Machinery and Inventory of the PT Asuransi Jasa Indonesia Office;

9. Kajian Pengembangan *Dashboard Cash Management*/ DCM;
10. Kajian Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Gedung Kantor Surabaya Darmo Dengan Cara Penjualan Kepada PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), Tbk;
11. Kajian Pengadaan *Manage Service Server Data Warehouse & Database Development* STAR;
12. Kajian Pengajuan Perubahan TC dan *Rate Jasindo Travel Insurance*;
13. Kajian Pelaksanaan Penyesuaian Limit Kewenangan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap.

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari implementasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Bagi Perusahaan, penerapan manajemen risiko menjadi salah satu kunci dalam merespons dinamika eksternal yang berkembang dengan pesat.

Sampai dengan tahun 2023, pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan melibatkan seluruh organ Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga seluruh karyawan. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan manajemen risiko pada Perusahaan selama tahun 2023 telah dilakukan secara optimal terlihat dengan adanya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan risiko dengan mekanisme yang sejalan dengan ketentuan regulator.

Sesuai dengan regulasi, penerapan manajemen risiko dilakukan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Efektivitas kerangka manajemen risiko tersebut selalu dievaluasi secara berkala dan disosialisasikan di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan senantiasa memastikan memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting yang terdapat pada penilaian kecukupan penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Selama tahun 2023, pengelolaan manajemen risiko telah dilakukan secara optimal dan efektif sesuai unsur-unsur penting tersebut, namun demikian dalam penilaian profil risiko yang mendukung tingkat kesehatan Perusahaan masih diperlukan perbaikan terutama pada pencapaian kinerja seperti realisasi Premi, Laba, dan *Loss Ratio*. Selain

9. Cash Management/DCM Dashboard Development Study;
10. Study of the Write-Off and Change Hand of Fixed Assets of the Surabaya Darmo Office Building by Sale to PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), Tbk;
11. Study of Procurement of Manage Service Server Data Warehouse & Database Development STAR;
12. Study of Implementation for Changes to Jasindo Travel Insurance's TC and Rate;
13. Study of the Implementation of Adjustments to the Authority Limits for Write-Offs and Change Hands of Fixed Assets.

The Evaluation of Risk Management Implementation

The implementation of risk management is part of the implementation of compliance with statutory regulations and the principle of prudence in carrying out business activities. For the Company, implementing risk management is one of the keys to responding to rapidly developing external dynamics.

Until 2023, risk management in the Company involves all Company's Organs from the Board of Commissioners and Directors to all employees. Through the implementation of appropriate risk management, it is hoped that we can protect the Company and create added value for all stakeholders. Risk management at the Company during 2023 has been carried out optimally as seen by the commitment of all stakeholders to carry out risk management with mechanisms that are in line with regulatory provisions.

In accordance with regulations, risk management is implemented as a series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control risks arising from all of the Company's business activities. The effectiveness of the risk management framework is always evaluated periodically and socialized within the organization to create a good risk culture. The implementation of risk management in the Company always ensures that it has and implements the important elements contained in assessing the adequacy of risk management implementation, which are:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits;
3. Adequacy of risk identification, measurement, control and supervising processes as well as risk management information systems; and
4. Comprehensive internal control system.

During 2023, risk management has been carried out optimally and effectively according to these important elements, however, in assessing the risk profile that supports the Company's health level, improvements are still needed, especially in performance achievements such as the realization of Premiums, Profits and Loss Ratios. In addition,

itu, proses manajemen risiko dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dilakukan secara sinergi oleh *Group* Manajemen Risiko dengan seluruh *business unit* sebagai *risk taking unit* antara lain melalui pembuatan kajian, pengelolaan *risk register* dan pembuatan laporan profil risiko yang dilakukan secara berkala. Pengelolaan manajemen risiko terkait pengelolaan piutang selama tahun 2023 juga terus dioptimalkan melalui penyusunan mitigasi risiko yang efektif.

Sesuai ketentuan Aspirasi Pemegang Saham (APS) tahun 2024, bahwa penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) yang menggunakan periode observasi tahun 2023, baru dilakukan tahun 2024 setelah terbitnya laporan keuangan *audited* tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan penilaian RMI. Selanjutnya, Perusahaan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran RMI di tahun 2022 yang telah menjadi *key performance indicator* (KPI) dengan realisasi 100%. Manajemen ke depannya mendapat acuan yang dapat diterapkan pada Perusahaan dan anak usahanya dalam rangka *continuous improvement* di bidang manajemen risiko. Secara keseluruhan, selama tahun 2023, penerapan manajemen risiko di Perusahaan telah dilakukan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kompleksitas yang dihadapi Perusahaan, tentunya juga dalam rangka memenuhi ketentuan regulator. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko pada tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan periodik oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Sistem Manajemen Risiko Perseroan dinilai telah memadai.

the risk management process of identification, measurement, supervising and control is carried out in synergy by the Risk Management Group with all business units as risk taking units, including through conducting studies, managing risk registers and preparing risk profile statements which are carried out periodically. Risk management related to receivables management during 2023 will also continue to be optimized through the preparation of effective risk mitigation.

In accordance with the provisions of the 2024 Shareholder Aspirations (APS), the Risk Maturity Index (RMI) assessment, which uses the 2023 observation period, will only be carried out in 2024 after the publication of the 2023 audited financial statement. Thus, in 2023, the Company doesn't carry out an RMI assessment. Furthermore, the Company followed up on recommendations for measuring RMI in 2022 which has become a key performance indicator (KPI) with 100% realization. In the future, management will receive a reference that can be applied to the Company and its subsidiaries in the context of continuous improvement in the field of risk management. Overall, during 2023, the implementation of risk management in the Company has been carried out optimally in accordance with the conditions and complexities faced by the Company, of course also in order to comply with regulatory requirements. Supervision of the implementation of risk management in 2023 has been carried out effectively and periodically by the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of the Risk Management System

Based on assessments carried out by the Board of Directors and Board of Commissioners, the Corporate Risk Management System is considered adequate.

Perkara Penting dan Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Important Cases and Legal Cases Faced by The Company

Rekapitulasi Perkara Litigasi Tahun 2023 (per Desember 2023)

1. Perkara Perdata, terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara penanganan hukum, sebagai berikut:

The Recapitulation of Litigation Cases in 2023 (as of December 2023)

1. Civil Cases, there are 22 (twenty-two) legal cases, as follows:

No.	Perkara Perdata Civil Case	Tanggal Gugatan Masuk Entry Lawsuit Date	Status Status
1	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 122/PDT.G/2018/PN Jmr atas nama Ervan Dedy Kurniawan LOB: Asuransi Jasindo Graha Legal action at the cassation level at the Supreme Court regarding the decision of the Jember District Court Number: 122/PDT.G/2018/PN Jmr on behalf of Ervan Dedy Kurniawan LOB: Asuransi Jasindo Graha	19 Desember 2019 December 19, 2019	Menang Putus tanggal 13 November 2023 Win Dismissed on November 13, 2023
2	PT Mitra Bina Selaras mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: No. 442/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel LOB: Asuransi Jiwa Kredit (Keagenan) PT Mitra Bina Selaras filed a lawsuit through the South Jakarta District Court with Case Number : No.442/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel LOB : Asuransi Jiwa Kredit (Agency	30 Mei 2022 May 30, 2022	Menang Putus tanggal 9 Maret 2023 Win Dismissed on March 9, 2023
3	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Banding Nomor: 335/PDT/2022/PT DKI Jo. Putusan Tingkat Pertama Nomor: 233/Pdt.G/2020/PN Jkt atas nama PT Tata Guna Pratama LOB: Asuransi Keuangan Legal action at the cassation level at the Supreme Court regarding appeal decision number: 335/PDT/2022/PT DKI Jo. First Level Decision Number: 233/Pdt.G/2020/PN Jkt on behalf of PT Tata Guna Pratama LOB: Financial Insurance	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassation Decision
4	PT Maju Lancar Sentosa Abadi mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST LOB: Asuransi *Marine Hull* PT Maju Lancar Sentosa Abadi filed a lawsuit through the Central Jakarta District Court with Case Number: 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST LOB: Asuransi Marine Hull	14 Oktober 2022 October 14, 2022	Menang Putus tanggal 8 Maret 2023 Win Dismissed on March 8, 2023
5	PT Ambon Natsepa mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Nomor: 259/Pdt.G/2022/PN. Amb LOB: Asuransi Gempa Bumi PT Ambon Natsepa filed a lawsuit through the Ambon District Court with Case Number: 259/Pdt.G/2022/PN. Amb LOB: Earthquake Insurance	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Kalah Putus tanggal 18 April 2023 Defeated Dismissed on April 18, 2023
6	PT Sawitomas mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Manokwari dengan Perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN.Mnk LOB: Asuransi Kebakaran PT Sawitomas filed a lawsuit through the Manokwari District Court with Case Number: 65/Pdt.G/2022/PN.Mnk LOB: Fire Insurance	24 November 2022 November 24, 2022	Menang Putus tanggal 17 Oktober 2023 Win Dismissed on October 17, 2023
7	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Perkara Nomor: 557/PDT/2022/PT BDG Jo. 335/PDT.G/2021/PN.Bdg dengan Nomor Perkara: 97/Pdt.KS/2022/PN.BDG atas nama PT Bank Mandiri (Persero) LOB: Asuransi Keuangan Legal action at cassation level at the Supreme Court regarding case decision number: 557/PDT/2022/PT BDG Jo. 335/PDT.G/2021/PN.Bdg with Case Number: 97/Pdt.KS/2022/PN.BDG on behalf of PT Bank Mandiri (Persero) LOB: Financial Insurance	29 Desember 2022 December 29, 2022	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassation Decision

No.	Perkara Perdata Civil Case	Tanggal Gugatan Masuk Entry Lawsuit Date	Status Status
8	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Perkara Nomor: 249/2022/PDT/PT Mdn. Jo. 679/Pdt.G/2020/PN.MDN dengan Nomor Perkara: 182/PDT/Kasasi/PN Mdn atas nama PT Summit Oto Finance LOB: Asuransi Kendaraan Bermotor Legal action at cassation level at the Supreme Court regarding case decision number: 249/2022/PDT/PT Mdn. Jo. 679/Pdt.G/2020/PN.MDN with Case Number: 182/PDT/Kasasi/PN Mdn on behalf of PT Summit Oto Finance LOB: Motor Vehicle Insurance	30 Desember 2022 December 30, 2022	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassation Decision
9	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Perkara Nomor: 557/PDT/2022/PT BDG Jo. 335/PDT.G/2021/PN.Bdg dengan Nomor Perkara: 99/Pdt.KS/2022/PN.BDG atas nama Pejabat Pembuat Komitmen LIPI LOB: Asuransi Keuangan Legal action at cassation level at the Supreme Court regarding case decision number: 557/PDT/2022/PT BDG Jo. 335/PDT.G/2021/PN.Bdg with Case Number: 99/Pdt.KS/2022/PN.BDG on behalf of the LIPI Commitment Making Officer LOB: Financial Insurance	2 Januari 2023 January 2, 2023	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassation Decision
10	PT BPR Millenia mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Manado dengan Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Mnd LOB: Asuransi Jiwa Kredit PT BPR Millenia filed a lawsuit through the Manado District Court with Case Number: 90/Pdt.G/2023/PN.Mnd LOB: Credit Life Insurance	8 Februari 2023 February 8, 2023	Menang Putus tanggal 17 Juli 2023 Win Dismissed on October 17, 2023
11	Upaya Hukum Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta atas Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST atas nama PT Maju Lancar Sentosa Abadi LOB: Asuransi *Marine Hull* Legal Remedies at the Appeal Level at the Jakarta High Court regarding the Decision in Case Number: 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST on behalf of PT Maju Lancar Sentosa Abadi LOB: Asuransi Marine Hull	28 Maret 2023 March 28, 2023	Menang Putus Tanggal 25 Juli 2023 Win Dismissed on July 25, 2023
12	Upaya Hukum Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Ambon atas Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2022/PN. Amb atas nama PT Ambon Natsepa LOB: Asuransi Gempa Bumi Legal Remedies at the Appeal Level at the Ambon High Court regarding Decision Number: 259/Pdt.G/2022/PN. Amb on behalf of PT Ambon Natsepa LOB: Earthquake Insurance	2 Mei 2023 May 2, 2023	Kalah Putus tanggal 17 Juli 2023 Defeated Dismissed on July 17, 2023
13	Gugatan Pembatalan Putusan BANI PT Lintas Teknologi Indonesia Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst LOB: *Professional Indemnity* Lawsuit for Cancellation of Decision from BANI PT Lintas Teknologi Indonesia Number: 45072/IX/ARB-BANI/2022 through the Central Jakarta District Court with Case Number: 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst LOB: Professional Indemnity	15 Mei 2023 May 15, 2023	Kalah Putus tanggal 18 Juli 2023 Defeated Dismissed on July 18, 2023
14	Upaya Hukum Banding di Mahkamah Agung atas Putusan Gugatan Pembatalan Putusan BANI PT Lintas Teknologi Indonesia dengan Nomor Perkara: 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst LOB: *Professional Indemnity* Legal action to appeal to the Supreme Court regarding the decision of the lawsuit to annul the decision of BANI PT Lintas Teknologi Indonesia with case number: 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst LOB: Professional Indemnity	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Dicabut tanggal 1 November 2023 Revoked on November 1, 2023
15	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Perkara Nomor: 38/PDT/2023/PT.AMB Jo. 259/Pdt.G/2022/PN. Amb dengan Perkara Nomor: 27 K/Pdt.G/2023PN Amb atas nama PT Ambon Natsepa LOB: Asuransi Gempa Bumi Legal action at cassation level at the Supreme Court regarding case decision number: 38/PDT/2023/PT.AMB Jo. 259/Pdt.G/2022/PN. Amb with Case Number: 27 K/Pdt.G/2023PN Amb on behalf of PT Ambon Natsepa LOB: Earthquake Insurance	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassasion Decision

No.	Perkara Perdata Civil Case	Tanggal Gugatan Masuk Entry Lawsuit Date	Status Status
16	Uzly Lailbarokah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Perkara Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Rbi LOB: Asuransi Jiwa Kredit Uzly Lailbarokah filed a lawsuit through the Raba Bima District Court with Case Number: 47/Pdt.G/2023/PN Rbi LOB: Credit Life Insurance	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Berjalan Proses Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat Ongoing Process of Letters of Evidence from the Defendant and Co-Defendants
17	PT Nurfa Anugrah Raya mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM LOB: Asuransi Keuangan Nurfa Anugrah Raya filed a lawsuit through the East Jakarta District Court with Case Number: 530/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM LOB: Financial Insurance	3 Oktober 2023 October 3, 2023	Berjalan Agenda Penetapan Bersama jadwal sidang E-Court Ongoing Joint Determination Agenda for E-Court hearing schedule
18	PT Sediah Bina Bersama mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 984/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL LOB: Asuransi Oil & Gas - *Offshore & Onshore Property* PT Sediah Bina Bersama filed a lawsuit through the South Jakarta District Court with Case Number: 984/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL LOB: Oil & Gas Insurance - Offshore & Onshore Property	11 Oktober 2023 October 11, 2023	Dicabut Pada tanggal 14 November 2023 Revoked on November 14, 2023
19	Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Perkara Nomor: 444/PDT/2023/PT DKI Jo. 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST dengan Nomor Perkara: 134/Srt.Pdt. Kas/2023/PN.Jkt.Pst atas nama PT Maju Lancar Sentosa Abadi LOB: Asuransi *Marine Hull* Legal action at the cassation level at the Supreme Court regarding the decision in case number: 444/PDT/2023/PT DKI Jo. 603/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST with Case Number: 134/Srt.Pdt. Kas/2023/PN.Jkt.Pst on behalf of PT Maju Lancar Sentosa Abadi LOB: Asuransi Marine Hull	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Berjalan Menunggu Putusan Kasasi Ongoing Awaiting Cassation Decision
20	PT Satra Energia International mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst LOB: Asuransi Keuangan PT Satra Energia International filed a lawsuit through the Central Jakarta District Court with Case Number: 736/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Pst LOB: Financial Insurance	8 November 2023 November 8, 2023	Dicabut Pada tanggal 12 Desember 2023 Revoked On December 12, 2023
21	Upaya Hukum Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas Putusan Nomor: 1128.K/PDT/2013 Jo. Nomor: 275/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor: 88/PDT.G/2010/PN.JKT.Utr atas nama PT Vinici Inti Lines LOB: Asuransi *Marine Cargo* Legal Remedies at the Supreme Court for Judicial Review Number: 1128.K/PDT/2013 Jo. Number: 275/PDT/2012/PT.DKI Jo. Number: 88/PDT.G/2010/PN.JKT.Utr on behalf of PT Vinici Inti Lines LOB: Asuransi Marine Cargo	28 November 2023 November 28, 2023	Berjalan Proses Penyerahan Kontra Memori Kasasi Ongoing Process for Submitting Counter-Memorandum of Cassation
22	PT Sediah Bina Bersama mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 1159/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel LOB: Asuransi Oil & Gas - *Offshore & Onshore Property* PT Sediah Bina Bersama filed a lawsuit through the South Jakarta District Court with Case Number: 1159/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel LOB: Oil & Gas Insurance - Offshore & Onshore Property	1 Desember 2023 December 1, 2023	Berjalan Proses Sidang Pertama (Legalitas) Ongoing First Hearing Process (Legality

2. Perkara Pidana, terdapat sebanyak 4 (empat) perkara penanganan hukum, sebagai berikut:

2. Criminal cases, there are 4 (four) legal handling cases, as follows:

No.	Perkara Pidana Criminal Case	Tanggal Gugatan Masuk Entry Lawsuit Date	Status Status
1	Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst atas nama Budi Tjahjono Case Number: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst on behalf of Budi Tjahjono dated	11 Januari 2023 January 11, 2023	Putus 27 Juli 2023 Dismissed July 12, 2023
2	Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst atas nama Solihah Case Number: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst on behalf of Solihah	11 Januari 2023 January 11, 2023	Putus 12 Juli 2023 Dismissed July 12, 2023
3	Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn atas nama Daniel Turnip Case Number: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn on behalf of Daniel Turnip	14 Maret 2023 March 14, 2023	Putus 17 Juli 2023 Dismissed July 17, 2023
4	Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn atas nama Yuhda Hartas Case Number: 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn on behalf of Yuhda Hartas	14 Maret 2023 March 14, 2023	Putus 17 Juli 2023 Dismissed July 17, 2023

3. Perkara PKPU/Pailit terdapat sebanyak 11 (sebelas) pendampingan hukum, sebagai berikut:
   a. Pailit sebanyak 6 (enam) perkara pendampingan hukum sebagai berikut:

3. In PKPU/Bankruptcy cases there are 11 (eleven) legal assistance, as follows:
   a. Bankruptcy as many as 6 (six) legal assistance cases as follows:

No.	Perkara Pailit Bankruptcy Case	Tanggal Surat Masuk Document Entry Date	Status Status
1	PT Muara Griya Lestari (dalam Pailit) Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2019 PT Muara Griya Lestari (in Bankruptcy) Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number: 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dated June 18, 2019	18 Juni 2019 June 18, 2019	(Selesai) Menunggu Proses pemberesan harta pailit dan sudah mendapatkan Daftar Piutang Tetap (DPT) (Settled) Waiting for the bankruptcy estate settlement process and have received the DPT
2	PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit) Pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg tanggal 16 April 2021 jo No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg PT Berkat Manunggal Jaya (in Bankruptcy) Commercial Court at Semarang District Court Number: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg dated April 16, 2021 in conjunction with No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg	16 April 2021 April 16, 2021	(Selesai) Menunggu Proses pemberesan harta pailit dan sudah mendapatkan Daftar Piutang Tetap (DPT) (Settled) Waiting for the bankruptcy estate settlement process and have received the DPT
3	PT Istaka Karya (Persero) (dalam Pailit) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt. Sus- Pembatalan Perdamaian/ 2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal jo Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst PT Istaka Karya (Persero) (in Bankruptcy) Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number: 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst date jo Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2012 /PN Niaga Jkt.Pst	12 Juli 2022 July 12, 2022	(Selesai) Menunggu Proses pemberesan harta pailit dan sudah mendapatkan Daftar Piutang Tetap (DPT) (Settled) Waiting for the bankruptcy estate settlement process and have received the DPT
4	PT Telehouse Engineering (dalam Pailit) Putusan Pengadilan Nomor: 29/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN.Niaga Jkt.Pst Jo Nomor: 210/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst PT Telehouse Engineering (in Bankruptcy) Court Decision Number: 29/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN.Niaga Jkt.Pst Jo Number: 210/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst	15 September 2022 September 15, 2022	(Selesai) Menunggu Proses pemberesan harta pailit dan belum mendapatkan DPT (Settled) Waiting for the bankruptcy estate settlement process and have received the DPT

No.	Perkara Pailit Bankruptcy Case	Tanggal Surat Masuk Document Entry Date	Status Status
5	PT Friendship Asia Raya (dalam Pailit) Pengadilan Niaga pada PN Surabaya Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 04 Oktober 2022 PT Friendship Asia Raya (in Bankruptcy) Commercial Court at Surabaya District Court Number: 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga. Sby dated October 04, 2022	12 Oktober 2022 October 12, 2022	(Selesai) Menunggu Proses pemberesan harta pailit dan sudah mendapatkan Daftar Piutang Tetap (DPT) (Settled) Waiting for the bankruptcy estate settlement process and have received the DPT
6	PT Tritama Niaga Berjaya (dalam Pailit) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 379/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 14 November 2023 PT Tritama Niaga Berjaya (in Bankruptcy) Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number: 379/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst dated November 14, 2023	14 November 2023 November 14, 2023	Berjalan Proses Penyampaian Tagihan Ongoing Invoice Submission Process

b. PKPU sebanyak 5 (lima) perkara pendampingan hukum sebagai berikut:

b. PKPU as many as 5 (five) legal assistance cases as follows:

No.	Perkara PKPU Perkara PKPU	Tanggal Surat Masuk Tanggal Surat Masuk	Status Status
1	PT Polowijo Gosari (Dalam PKPU) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Perkara Nomor: 91/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. PT Polowijo Gosari (In PKPU) Surabaya Commercial Court Decision in Case Number: 91/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.	23 Desember 2022 December 23, 2022	Homologasi tanggal 20 Oktober 2023 Homologation dated September 25, 2023
2	PT Amarta Karya (Persero) (Dalam PKPU) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 284/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst. PT Amarta Karya (Persero) (In PKPU) Decision of the Central Jakarta Commercial Court in Case Number: 284/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst.	29 Desember 2022 December 29, 2022	Homologasi tanggal 25 September 2023 Homologation dated September 25, 2023
3	PT Polowijo Graha Niaga (Dalam PKPU) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Sby. PT Polowijo Graha Niaga (In PKPU) Surabaya Commercial Court Decision in Case Number: 10/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Sby.	9 Maret 2023 March 9, 2023	Homologasi tanggal 12 September 2023 Homologation dated September 12, 2023
4	PT Tritama Niaga Berjaya (Dalam PKPU) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 379/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. PT Tritama Niaga Berjaya (In PKPU) Decision of the Central Jakarta Commercial Court in Case Number: 379/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt.	10 April 2023 April 10, 2023	Dinyatakan Pailit tanggal 14 November 2023 Declared Bankrupt on November 14, 2023
5	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., Putusan pengadilan Niaga Makassar dengan Perkara Nomor: No.9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., Decision of the Makassar Commercial Court in Case Number: No.9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Mks.	5 September 2023 September 5, 2023	PKPU dicabut tanggal 13 Oktober 2023 PKPU will be revoked on October 13, 2023

4. Perkara BANI, terdapat sebanyak 4 (empat) perkara sebagai berikut:

4. BANI cases, there are 4 (four) cases as follows:

No.	Perkara Arbitrase Perkara Arbitrase	Tanggal Surat Masuk Tanggal Surat Masuk	Status Status
1	PT Lintas Teknologi Indonesia - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta - Perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 LOB: *Professional Indemnity* PT Lintas Teknologi Indonesia - Indonesian National Arbitration Board (BANI) Jakarta - Case Number: 45072/IX/ARB-BANI/2022 LOB: Professional Indemnity	6 Oktober 2022 October 6, 2022	Kalah Putus tanggal 15 Agustus 2023 Lose Dismissed on August 15, 2023
2	PT Dharma Lautan Utama - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya - Perkara Nomor: 63/ARB/BANI-SBY/I/23 LOB: Asuransi *Oil Pollution* PT Dharma Lautan Utama - Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya - Case Number: 63/ARB/BANI-SBY/I/23 LOB: Oil Pollution Insurance	12 Januari 2023 January 12, 2023	Kalah Putus tanggal 8 September 2023 Lose Dismissed on September 8, 2023

No.	Perkara Arbitrase Perkara Arbitrase	Tanggal Surat Masuk Tanggal Surat Masuk	Status Status
3	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Palembang - Perkara Nomor: 24/II/ARB-BANI-PLG/2023 LOB: Asuransi Jiwa Kredit PT Bank Pembangunan Daerah of South Sumatera and Bangka Belitung - Indonesian National Arbitration Board (BANI) Palembang - Case Number: 24/II/ARB-BANI-PLG/2023 LOB: Credit Life Insurance	21 Februari 2023 February 21, 2023	Kalah Putus tanggal 27 Maret 2023 Lose Dismissed on March 27, 2023
4	PT Global Karai Energi – Arbitrase Adhoc – Perkara Nomor: 006/Arb-Ad-hoc/VII-2023 LOB: PAR + Munich Re + *Business Interruption* PT Global Karai Energi – Adhoc Arbitration – Case Number: 006/Arb-Ad-hoc/VII-2023 LOB: PAR + Munich Re + Business Interruption	4 Juli 2023 July 4, 2023	Menang Putus tanggal 16 November 2023 Win Dismissed on November 16, 2023

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

No.	Sanksi Sanction	Alasan Sanksi Reason for Sanction	Dampak Impact	Status Status
1	Sanksi Peringatan Pertama - Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) (Surat OJK No S-196/NB.112/2023 tanggal 30 Maret 2023) First Warning Sanction - Direct Inspection Result Report (LHPL) (OJK Letter No S-196/NB.112/2023 dated March 30, 2023)	Perusahaan melanggar dalam menyampaikan pelaksanaan rekomendasi yang melewati jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam LHPL The company violates the implementation of recommendations that are past the due date as stipulated in the LHPL.	Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama The company is subject to administrative sanctions in the form of a letter first warning	Sanksi peringatan pertama akan dicabut 7 hari sejak surat diterbitkan The first warning sanction will be revoked 7 days after the letter is issued
2	Denda Administratif (Surat OJK Nomor S-440/NB.112/2023 tanggal 16 Juni 2023) Administrative Fines (OJK Letter Number S-440/NB.112/2023 dated June 16, 2023)	Perusahaan terlambat dalam menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan Triwulan I The Company was late in submitting the First Quarter Complaint Service Report.	Perusahaan dikenakan denda administratif sebesar Rp5.100.000 The Company was subject to an administrative fine of IDR5,100,000.	Denda telah dibayar The fine has been paid

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Company's Information and Data Access

Asuransi Jasindo memberikan kemudahan akses informasi terkait aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan dan senantiasa memperbarui informasi secara berkala. Penerapan keterbukaan informasi baik secara internal dan eksternal senantiasa dilakukan Perusahaan sebagai wujud komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa, "keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik", dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG.

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, maka seluruh akses untuk mendapatkan informasi Perusahaan dibuka semaksimal mungkin. Berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi yang digunakan Perusahaan, antara lain:

1. *Annual Report*
   Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Asuransi Jasindo provides stakeholders with easy access to information related to the Company's activities and performance and continues to update information regularly. The Company always implements information disclosure both internally and externally as a form of commitment to implementing GCG principles. This refers to Law No. 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information which states that, "public information disclosure is a means of optimizing public supervision of the administration of the State and other Public Agencies and everything that has an impact on the public interest", and as an implementation of GCG principles.

In order to support the commitment to implementing information disclosure, all access to Company information is opened as much as possible. Various means that function as channels for disclosing information used by the Company include:

1. Annual Statement
   The Company discloses financial information, important information, and other matters relating to the Company in the Annual Statement and Financial Statements which refer to the Ministry of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

2. *Website* Perusahaan dan Portal BUMN
   Website Perusahaan www.jasindo.co.id yang telah dibangun sejak tahun 2006, merupakan media bagi Asuransi Jasindo membuka seluas-luasnya akses kepada publik untuk mendapatkan data dan informasi penting Perusahaan. Data dan informasi penting tersebut antara lain berupa: struktur organisasi, jaringan *Branch Office* dan Kantor Penjualan, produk asuransi dan layanan klaim, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Program Kemitraan & Bina Lingkungan, penghargaan yang diperoleh Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan, kebijakan GCG serta akses kepada *Whistleblowing System*. Informasi penting Perusahaan dapat pula diakses melalui Portal BUMN dengan alamat www.bumn.go.id/jasindo. Untuk menunjang informasi, kegiatan dan data terkini yang dapat diakses, Perusahaan melakukan update data dimaksud secara berkala.
3. Media Cetak
   Perusahaan menyampaikan informasi dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan di surat kabar nasional. Selain surat kabar, Perusahaan juga memanfaatkan surat kabar nasional, *company profile*, brosur dan buletin sebagai sarana penyampaian informasi.
4. Media Sosial
   Perusahaan menyadari pentingnya media sosial dalam memberikan citra yang positif dan menjangkau berbagai kalangan *stakeholders*.

   Media sosial yang dimiliki Perusahaan antara lain adalah:
   Twitter : @JasindoID
   Facebook Fanpage : Asuransi Jasindo
   Instagram : @jasindo.id

5. Korespondensi dengan Unit Terkait
   Publik dapat mengakses informasi langsung melalui:
   Telepon: 021-3924737, 3924748.
   E-mail: contactcenter@asuransijasindo.co.id
   Representative Office tersebar di seluruh Indonesia.
   Contact Center: 1500073

6. Korespondensi dengan Pemegang Saham dan Regulator

2. Company's Website and SOE's
   The Company's website www.jasindo.co.id, which has been built since 2006, is a medium for Asuransi Jasindo to provide the widest possible access to the public to obtain important Company data and information. This important data and information includes: organizational structure, Branch Office and Sales Office networks, insurance products and claims services, Corporate Social Responsibility activities and Partnership & Environmental Development Programs, awards received by the Company, Annual Statements and Company Financial Statements, policies GCG and access to the Whistleblowing System. Important Company information can also be accessed via the SOE Portal at www.bumn.go.id/jasindo. To support the latest information, activities and data that can be accessed, the Company updates the data regularly.

3. Printed Media
   The company conveys information in the form of news and publications of financial statements in national newspapers. Apart from newspapers, the Company also utilizes national newspapers, company profiles, brochures and bulletins as a means of conveying information.
4. Social Media
   The Company realizes the importance of social media in providing a positive image and reaching various stakeholder groups.

   The social media owned by the Company include:
   Twitter : @JasindoID
   Facebook Fanpage: Asuransi Jasindo
   Instagram : @jasindo.id

5. Correspondence with Related Units
   The public can access information directly through:
   Telephone: 021-3924737, 3924748.
   E-mail: contactcenter@bisnisjasindo.co.id
   Representative Offices are spread throughout Indonesia.
   Contact Center: 1500073

6. Correspondence with Shareholders and Regulators

Pemegang Saham Shareholders	**Surat Masuk** Incoming Letters	**Surat Keluar** Outgoing Letters
Kementerian BUMN Ministry of SOEs	47	35
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	175	44

7. Proses pemeringkatan Perusahaan dilakukan dengan tujuan:
   a. Sebagai salah satu alat ukur kinerja dan kesehatan keuangan Perusahaan,
   b. Mendapatkan informasi tentang posisi Perusahaan yang objektif dibandingkan dengan perusahaan lain,
   c. Meningkatkan kepercayaan para kreditur dan *stakeholder* Perusahaan terhadap kemampuan keuangan Perusahaan,
   d. Sebagai referensi yang handal bagi pemodal (jika ada) untuk mengambil keputusan bisnis.

   Dalam rangka proses pemeringkatan Perusahaan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat tingkat nasional yaitu Pefindo, Perusahaan memberikan akses keterbukaan informasi selama proses pemeringkatan tersebut, termasuk pada kegiatan *management meeting* dengan Direksi. Pada kesempatan ini, lembaga pemeringkat kondisi Perusahaan secara terbuka, baik dari sisi keuangan, teknis maupun non teknis. Atas hasil dari penilaian dan Analisa dari Lembaga Pemeringkat tersebut, di tahun 2023 Perusahaan telah mendapat pengakuan kecukupan dan kemampuan dalam beroperasi dengan hasil idA *stable outlook.*

8. *Press Release*
   Press Release dikeluarkan Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi, berita, ataupun kegiatan-kegiatan Perusahaan. Sepanjang tahun 2023. Perusahaan telah melakukan *press release* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali perihal:
   Januari
   - Jasindo dan Kementerian BUMN Dukung Sertifikasi Guru di Maluku dan Nusa Tenggara
   - RBC Telah Penuhi Ketentuan OJK, Jasindo Optimistis Bisnisnya Bangkit*
   - RBC Jasindo Kembali Positif, Ini Catatan dari Pengamat Asuransi*

   Februari
   - Jasindo Perkuat Segmentasi Korporasi di 2023*
   - Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jasindo Bantu Renovasi Asrama Putri HKBP*
   - Jasindo Proteksi Pengunjung F1 *Powerboat* Danau Toba dengan Asuransi*
   - Tingkatkan Kesadaran Berolahraga, Jasindo Gelar Jalan Sehat di Riau dan Lampung*

   Maret
   - Jasindo Kembali Menggelar Literasi Keuangan di 2023

   April
   - "Sah! RBC Jadi 149,57% Jasindo Optimistis Perusahaan Berkembang Pesat"
   - Asuransi Jasindo Lepas Pemudik 2023 di Istora Senayan
   - Mobil Sehat Asuransi Layani Masyarakat serta Pelajar di Jawa Tengah
   - Pembayaran Klaim Kapal PT Timah 24 Miliar

7. The Company ranking process is carried out with the aim of:
   a. As a tool for measuring the Company's financial performance and health,
   b. To obtain objective information about the Company's position compared to other companies,
   c. To increase the confidence of the Company's creditors and stakeholders in the Company's financial capabilities,
   d. As a reliable reference for investors (if any) to make business decisions.

In the framework of the Company's rating process carried out by the national level rating agency, namely Pefindo, the Company provides access to open information during the rating process, including at management meetings with the Board of Directors. On this occasion, the rating agency openly rated the Company's condition, both from a financial, technical and non-technical perspective. Based on the results of the assessment and analysis from the Rating Agency, in 2023 the Company has received recognition of its adequacy and ability to operate with idA stable outlook results.

8. Press Releases
   Press Releases issued by the Company aim to provide information, news or Company activities. Throughout 2023. The Company has issued press releases 29 (twenty nine) times regarding:

   January
   - Jasindo and the Ministry of BUMN Support Teacher Certification in Maluku and Nusa Tenggara
   - RBC has complied with OJK requirements, Jasindo is optimistic that its business will recover*
   - RBC Jasindo Returns Positive, This is a Note from an Insurance Observer*

   February
   - Jasindo Strengthens Corporate Segmentation in 2023*
   - Supporting improving the quality of education, Jasindo helps renovate the HKBP girls' dormitory*
   - Jasindo Protects F1 Powerboat Lake Toba Visitors with Insurance*
   - Increase Awareness of Exercise, Jasindo Holds Healthy Walks in Riau and Lampung*

   March
   - Jasindo Holds Financial Literacy Again in 2023

   April
   - "Legal! RBC Becomes 149.57% Jasindo is Optimistic that the Company is Growing Rapidly"
   - Asuransi Jasindo Releases Homecomers 2023 at Istora Senayan
   - Healthy Car Insurance Serves the Community and Students in Central Java

Mei
- Asuransi Jasindo Mendukung Program Inkubasi Mitra Unggulan 2023
- Asuransi Jasindo Terapkan Sistem Terintegrasi GRC untuk Meningkatkan Perlindungan Polis Pemegang Polis

Juni
- Asuransi Jasindo Rayakan Ulang Tahun ke-50 dengan Kegiatan Mengajar dan Berbagi Inspirasi di SDN 1 Cikoneng, Puncak – Bogor
- Jasindo Kunjungi Anak-Anak Penderita Kanker dan Adakan Donor Darah

Juli
- Asuransi Jasindo Kembali Dipercaya Lindungi Aset Krakatau Steel

Agustus
- Asuransi Jasindo Bayarkan Klaim Rp10,3 Miliar kepada Semen Tonasa

September
- Jalani Tata Kelola Yang Baik, Jasindo Raih Penghargaan Top GRC
- Mau Klaim Asuransi Tani Padi? Begini Langkah-langkahnya
- Asuransi Jasindo Mendukung Skema *Pooling Fund* Bencana untuk Meningkatkan Proteksi Barang Milik Negara
- Asuransi Jasindo Bayar Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rp1,1 Miliar

Oktober
- Jasindo Proteksi Sirkuit Mandalika dengan Asuransi
- Mobil Sehat Asuransi Jasindo Kembali Hadir di Surabaya dan Probolinggo
- Asuransi Jasindo Pastikan Keberlanjutan Program Taman Baca di Ciamis
- AAUI Surakarta Menggelar Podcast Bincang Sore Spesial Hari Asuransi
- Bulan Inklusi Keuangan, Asuransi Jasindo Sosialisasi dan Tebar Diskon
- Jasindo Perkuat Ekonomi Indonesia Melalui Transformasi

Desember
- Lindungi Aset Negara, Asuransi Jasindo dan Konsorsium Beri Layanan Terbaik

- PT Timah Ship Claim Payment 24 Billion

May
- Asuransi Jasindo Supports the 2023 Leading Partner Incubation Program
- Asuransi Jasindo Implements GRC Integrated System to Increase Policy Protection for Policyholders

June
- Asuransi Jasindo Celebrates its 50th Anniversary with Teaching Activities and Sharing Inspiration at SDN 1 Cikoneng, Puncak – Bogor
- Jasindo Visits Children Suffering from Cancer and Holds Blood Donations

July
- Asuransi Jasindo is Trusted Again to Protect Krakatau Steel's Assets

August
- Asuransi Jasindo Pays Claims of IDR 10.3 Billion to Semen Tonasa

September
- Implementing Good Governance, Jasindo Wins Top GRC Award
- Want to claim Rice Farmer Insurance? Here are the steps
- Asuransi Jasindo Supports the Disaster Pooling Fund Scheme to Increase Protection of State Property
- Asuransi Jasindo Pays Rice Farming Business Insurance Claims (AUTP) IDR 1.1 Billion

October
- Jasindo Protects the Mandalika Circuit with Insurance
- Asuransi Jasindo's Healthy Cars are Back in Surabaya and Probolinggo
- Asuransi Jasindo Ensures the Sustainability of the Reading Park Program in Ciamis
- AAUI Surakarta Holds Special Afternoon Talk Podcast on Insurance Day
- Financial Inclusion Month, Asuransi Jasindo's Socialization and Discount Distribution
- Jasindo Strengthens Indonesia's Economy Through Transformation

December
- Protect State Assets, Asuransi Jasindo and the Consortium Provide the Best Service

Diseminasi Informasi

Dalam rangka keterbukaan informasi, Perusahaan secara aktif melakukan pemahaman dan edukasi produk asuransi kepada Pemangku Kepentingan khususnya *customer* korporasi melalui program diseminasi produk asuransi.

Tujuan dilakukan program diseminasi ini adalah untuk menginformasikan kepada publik tentang manfaat pentingnya asuransi serta untuk mengetahui lebih jauh tentang produk-produk asuransi kerugian apa saja yang dijamin oleh Perusahaan.

Perusahaan telah merealisasikan 9 (sembilan) kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat yaitu:

1. Literasi Keuangan untuk siswa-siswi SMK Mahardika
2. BUMN *Goes to Campus*
3. Literasi Keuangan untuk Peternak Kabupaten Subang
4. Literasi Keuangan untuk Peternak Kota Lampung
5. Literasi Keuangan untuk Penyuluh Pertanian Kabupaten Bekasi
6. Literasi Keuangan untuk Peternak Kabupaten Sinjay
7. Podcast Bincang Sore Spesial Hari Asuransi bersama TA Radio Solo
8. Literasi Keuangan untuk Penyuluh Pertanian Kabupaten Seruyan dan Youtube
9. Tribun Palu: Ternak & Tani Aman bersama Jasindo

Information Dissemination

In the context of information disclosure, the Company actively carries out understanding and education of insurance products to Stakeholders, especially corporate customers through insurance product dissemination programs.

The aim of this dissemination program is to inform the public about the important benefits of insurance and to find out more about what loss insurance products are guaranteed by the Company.

The company has implemented 9 (nine) activities to increase financial literacy among consumers and/or the public, namely:

1. Financial Literacy for Mahardika Vocational School students
2. BUMN Goes to Campus
3. Financial Literacy for Subang Regency Farmers
4. Financial Literacy for Lampung City Farmers
5. Financial Literacy for Bekasi Regency Agricultural Extension Officers
6. Financial Literacy for Farmers in Sinjay Regency
7. Insurance Day Special Afternoon Talk Podcast with TA Radio Solo
8. Financial Literacy for Seruyan District Agricultural Extension and YouTube
9. Palu Tribune: Safe Livestock & Farming with Jasindo

Kode Etik
Code of Conducts

Perusahaan menyusun *Code of Conduct* sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan. *Code of Conduct* juga merupakan bentuk usaha Perusahaan dalam menegakkan Etika Bisnis dan Etika Kerja. *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja segenap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai visi dan misi Perusahaan.

Keberadaan dan Komitmen Penerapan *Code of Conduct* Perusahaan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.05/SKB/XI/2022 tanggal 24 November 2022. Sebagai pedoman yang dinamis, *Code of Conduct* akan selalu dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) Perusahaan merupakan salah satu bentuk komitmen penerapan GCG Perusahaan yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan wajib dihindari bagi insan Perusahaan dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan dan kehidupan sehari-hari.

Sebagai upaya menegakkan kode etik berbisnis, Perusahaan secara aktif tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan bisnis dan menjaga integritas tertinggi. Selain itu *Code of Conduct* juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

Upaya Penegakan Kode Etik (*Code of Conduct*)

Dalam upaya penegakan *Code of Conduct*, maka tahap pertama yang dilakukan Perusahaan adalah melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada Insan Perusahaan melalui sarana informasi dan komunikasi intranet ataupun internet. Selain itu, buku saku *Code of Conduct* juga telah disampaikan kepada Insan Perusahaan bersamaan dengan penyampaian Lembar Pernyataan Kepatuhan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang harus ditandatangani. *Whistleblowing System* disediakan sebagai media pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

Insan Perusahaan yang melanggar ketentuan *Code of Conduct* akan dikenakan sanksi, yang dikategorikan dalam:

1. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis;
2. Sanksi sedang, yaitu berupa tunda kenaikan gaji, tunda kenaikan pangkat dan tidak boleh menduduki jabatan struktural selama 1 s/d 3 tahun;

The Company has prepared a Code of Conduct as a behavioral guideline for all Company Personnel. The Code of Conduct is also a form of the Company's efforts to uphold Business Ethics and Work Ethics. The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's business ethics and voluntary work ethics of all Company Personnel which are prepared to influence, shape, regulate and implement appropriate behavior, so that the Company's vision and mission are achieved.

The existence and commitment to implementing the Company's Code of Conduct is regulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors Number SKB.05/SKB/XI/2022 dated November 24, 2022. As a dynamic guideline, the Code of Conduct will always be reviewed periodically and continuously in accordance with the dynamics of the current business environment.

The Company's Business Ethics and Work Ethics Guidelines (Code of Conduct) are a form of commitment to implementing the Company's GCG which contains things that must be implemented and must be avoided by Company personnel in terms of business ethics and work ethics, both in carrying out the Company's operational activities and in daily life.

In an effort to uphold the code of business ethics, the Company actively complies with laws and regulations relating to business and maintains the highest integrity. Apart from that, the Code of Conduct also regulates procedures for the behavior of the Company's Board of Commissioners, Directors and Employees towards Stakeholders based on healthy and ethical corporate principles.

Code of Conduct Enforcement Efforts

In efforts to enforce the Code of Conduct, the first stage carried out by the Company is to socialize the Code of Conduct to Company Personnel through intranet or internet information and communication facilities. Apart from that, the Code of Conduct pocket book has also been delivered to Company Personnel along with the delivery of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines Compliance Statement Sheet which must be signed. The Whistleblowing System is provided as a reporting medium if a violation of the Code of Conduct occurs.

Company's personnel who violate the provisions of the Code of Conduct will be subject to sanctions, which are categorized as:

1. Light sanctions, i.e., in the form of a verbal warning and a written warning;
2. Moderate sanctions, i.e., in the form of delaying salary increases, delaying promotions and not being allowed to hold structural positions for 1 to 3 years;

3. Sanksi berat, yaitu berupa turun golongan/pangkat, skorsing, dilaporkan kepada yang berwajib dan diberhentikan.

Jumlah pelanggaran kode etik/penyimpangan internal Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut:

3. Severe sanctions, i.e., in the form of being demoted from class/rank, suspension, being reported to the authorities and being dismissed.

The Number of Code of Conducts violations/internal deviations for 2018-2023 as in the following table:

No	Nama Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus yang dibawa dari tahun lalu Cases brought from last year	1	-	-	-	-	-
2	Kasus penyimpangan yang masuk Incoming deviation cases	-	4	17	14	23	2
3	Kasus yang telah diselesaikan Cases brought to the following year	1	1	17	14	19	2
4	Kasus yang dibawa ke tahun berikut Settled Cases	-	3	-	-	4	4
5	Kasus yang telah ditindaklanjuti internal Internally followed-up cases	-	-	17	14	23	6
6	Kasus telah ditindaklanjuti pihak berwajib Authorities followed-up cases	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data di atas, selama tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus yang masuk dan kesemuanya telah diselesaikan.

Based on the data above, during 2023 there were 2 (two) cases submitted and all of them have been resolved.

Hal-Hal yang Diatur dalam Kode Etik (*Code of Conduct*)

Sebagai sebuah perusahaan asuransi, Perusahaan sangat mementingkan unsur kepercayaan sebagai komitmen kepada pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan standar etika bisnis yang menjadi acuan dalam berinteraksi dengan Pemangku Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pemegang saham, karyawan, tertanggung, pesaing, pemasok, mitra bisnis, kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, media massa, anak Perusahaan dan organisasi profesi.

Selain itu, hal-hal yang diatur juga dalam *Code of Conduct* antara lain:

1. Pemberian donasi terkait dengan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya;
2. Pencegahan praktik nepotisme di Perusahaan;
3. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan dan *stakeholders* lainnya;
4. Pengaturan terkait hak atas kekayaan intelektual;
5. Gratifikasi;
6. Kepatuhan terhadap perundang-undangan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Dalam kaitannya dengan etika kerja, *Code of Conduct* Perusahaan juga mengatur cara Insan Perusahaan bersikap, berperilaku, berinteraksi dan melakukan proses kerja dengan pihak di dalam maupun di luar Perusahaan. Beberapa hal penting yang diatur terkait Etika Perilaku antara lain: Integritas dan komitmen, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, hubungan kerja antar Insan Perusahaan, lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, perbuatan asusila, kerahasiaan informasi Perusahaan, perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan, benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), *insider trading*, pengaturan imbalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, keterlibatan aktivitas politik, sosial serta citra Perusahaan.

Matters Regulated in the Code of Conduct

As an insurance company, the Company places great importance on the element of trust as a commitment to customers. To realize this, the Company applies business ethics standards which become a reference in interacting with Stakeholders, both directly and indirectly, including shareholders, employees, insured, competitors, suppliers, business partners, creditors, investors, government, society, mass media, subsidiaries and professional organizations.

Moreover, matters also regulated in the Code of Conduct include:

1. Providing donations is related to the Company's responsibility towards the surrounding environment;
2. The prevention of nepotism practices in the Company;
3. Providing equal opportunities to employees and other stakeholders;
4. Regulations related to intellectual property rights;
5. Gratification;
6. Compliance with legislation and Health and Safety Environment (HSE).

In relation to work ethics, the Company's Code of Conduct also regulates how Company personnel act, behave, interact and carry out work processes with parties inside and outside the Company. Several important matters that are regulated regarding Ethics of Conduct include: Integrity and commitment, compliance with laws and regulations, working relationships between Company Personnel, a work environment that is free from discrimination, immoral acts, confidentiality of Company information, protection and use of Company assets, conflicts interests, insider trading, reward arrangements, abuse of narcotics and illegal drugs, involvement in political and social activities and the Company's image.

Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen

Perusahaan memberikan perhatian serius pada Integritas, yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pernyataan Komitmen oleh pejabat struktural, baik di *Head Office* maupun di *Branch Office*, saat serah terima jabatan dan rapat koordinasi setiap tahun.

Selain itu, pernyataan komitmen oleh karyawan ditandai dengan penyampaian Lembar Pernyataan Kepatuhan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang harus ditandatangani bersamaan dengan diterimanya buku saku *Code of Conduct*.

Integrity Pact and Statement of Commitment

The Company pays serious attention to Integrity, which is marked by the signing of an Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as a Statement of Commitment by structural officials, both at the Head Office and at the Branch Office, during the handover of positions and coordination meetings every year.

In addition, an employee's statement of commitment is marked by the submission of a Declaration of Compliance with Business Ethics and Work Ethics Guidelines which must be signed at the same time as receiving the Code of Conduct's pocket book.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan *Code of Conduct*

Evaluasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan *Code of Conduct* bertujuan untuk mengukur seberapa jauh efektivitas implementasi Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan dalam setiap aktivitas Perusahaan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala kepada Insan Perusahaan. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan *Code of Conduct* ini juga dapat dilihat dari pelanggaran kode etik, tidak adanya pengaduan yang masuk dari *stakeholders* secara langsung atau melalui *Whistleblowing System*.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, *Code of Conduct* Perusahaan akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

Evaluation of the Effectiveness of Implementing the Code of Conduct

Evaluation of the Effectiveness of Implementation of the Code of Conduct aims to measure the effectiveness of the implementation of the Company's Business Ethics and Work Ethics in every Company activity. This evaluation is carried out periodically for Company's Personnel. The evaluation of the effectiveness of implementing the Code of Conduct can also be seen from violations of the Code of Conducts, the absence of complaints received from stakeholders directly or through the Whistleblowing System.

As a dynamic guideline, the Company's Code of Conduct will be reviewed periodically and continuously in accordance with the dynamics of the business environment. However, in every change, the Company will not sacrifice existing values for the sake of short-term profits.

Internal Disputes Resolution (IDR)

Dalam kaitannya dengan etika bisnis dan mengingat pemahaman masyarakat tentang asuransi termasuk hak-hak mereka atas perlindungan konsumen masih cukup rendah, maka perlu dilakukan upaya-upaya khusus dan bersama oleh pelaku industri asuransi dalam rangka memastikan perlindungan bagi konsumen.

Salah satunya adalah dengan menyusun Standar Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Internal pada Perusahaan Asuransi ("Standar Pelayanan"), sebagai bagian dari edukasi kepada konsumen. Ruang lingkup Standar Pelayanan ini mencakup penanganan pengaduan secara internal Perusahaan yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Perusahaan.

Hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Pelayanan ini adalah:

1. Permohonan pembayaran klaim asuransi yang tengah diproses oleh Perusahaan Asuransi sesuai ketentuan Polis;
2. Penolakan pembayaran klaim asuransi oleh Perusahaan Asuransi yang disepakati oleh Konsumen; dan

Internal Disputes Resolution (IDR)

In relation to business ethics and considering that the public's understanding of insurance, including their rights to consumer protection, is still quite low, it is necessary to make special and joint efforts by insurance industry players in order to ensure protection for consumers.

One of them is by preparing Service Policy Standards and Internal Complaint Resolution for Insurance Companies ("Service Standards"), as part of consumer education. The scope of this Service Standard includes handling internal complaints from the Company relating to consumer dissatisfaction caused by losses and/or potential financial losses to consumers which are suspected to be due to the Company's errors or negligence.

Matters that are not included in the scope of this Service Standards are:

1. Request for insurance claim payment that is being processed by the Insurance Company in accordance with the Policy provisions;
2. Refusal of insurance claim payment by the Insurance Company as agreed by the Consumer; and

3. Penyelesaian pengaduan atau sengketa yang telah atau sedang diproses melalui pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan adalah sebagai berikut:

3. Settlement of complaints or disputes that have been or are being processed through the courts or Alternative Dispute Resolution Institutions.

IThe Complaint Service and Resolution Mechanism is as follows:

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah sarana pelaporan tindakan penyimpangan atau pelanggaran/pengungkapan perbuatan yang melawan hukum/perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan dimaksud dilakukan secara rahasia.

The Whistleblowing System is a means of reporting irregularities or violations/disclosure of unlawful acts/unethical/immoral acts or other acts that could be detrimental to the company committed by company's employees or leaders to the heads of other organizations or institutions who can take action regarding these violations. The disclosure in question is carried out confidentially.

Untuk menunjukkan bukti komitmen penerapan GCG, Perusahaan mendesain mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Manfaat penerapan WBS adalah untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, sehingga dapat menjadi fondasi bagi Perseroan untuk menjalankan evaluasi hingga tindak lanjut yang dibutuhkan di masa mendatang. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah atau potensi kerugian Perseroan akibat sebuah pelanggaran. Tentunya, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas bagi pelapor.

To show proof of commitment to implementing GCG, the Company designed a Whistleblowing System (WBS) mechanism. The benefit of implementing WBS is to develop a well-managed violation reporting system, so that it can become a foundation for the Company to carry out evaluations and follow-up actions required in the future. WBS is also part of the early detection mechanism (early warning system) for possible problems or potential losses to the Company due to a violation. Of course, the WBS guarantees protection and confidentiality of identity for the whistleblower.

Berikut adalah tata cara pelaporan penyimpangan atau Pelanggaran:

The following are the procedures for reporting deviances or violations:

Website	https://jasindo.co.id/layanan_nasabah/whistle/form
Surat Mail	• **Pelanggaran Karyawan | Employee's Violation:** PT Asuransi Jasa Indonesia Group Satuan Pengawas Internal PT Asuransi Jasa Indonesia Group Internal Supervisory Unit Gedung | Building Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta • **Pelanggaran Group Satuan Pengawasan Internal | Internal Supervising Unit Group Violations:** Direktur Utama | President Director PT Asuransi Jasa Indonesia Graha Jasindo Building Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta • **Pelanggaran Direksi | Board of Directors' violations:** Komisaris Utama | President Commissioner PT Asuransi Jasa Indonesia Gedung | Building Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta • **Pelanggaran Dewan Komisaris | Board of Commissioners' violation:** Direktur Utama | President Director PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga 18th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 atau | or Asisten Deputi Asuransi dan Jasa lainnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Assistant Deputy for Insurance and Other Services Ministry of State-Owned Enterprises Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta
E-mail	mailto:whistleblowing@asuransijasindo.co.id
SMS & WA	0811-977-6222

1. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Karyawan
   Dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis yang dilakukan kepada *Group* Satuan Pengawas Internal Memasukan laporan ke kotak pengaduan yang berada di lingkungan perusahaan, atau:
   a. Mengirimkan laporan melalui *e-mail* dengan alamat: whistleblowing@asuransijasindo.co.id atau
   b. Menyampaikan laporan melalui SMS atau Whatsapp ke nomor 08119776222 atau
   c. Mengirimkan laporan melalui pos/kurir ke alamat: PT Asuransi Jasa Indonesia *Group* Satuan Pengawasan Internal Menara MTH, Jl. Letjen M.T. Haryono No. 10, Jakarta
   d. Laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.
2. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran *Group* Satuan Pengawasan Internal
   Dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Utama dengan cara:
   a. Mengirimkan laporan melalui *e-mail* dengan alamat: dirut@asuransijasindo.co.id atau
   b. Mengirimkan laporan melalui pos/kurir ke alamat: Yth Direktur Utama, PT Asuransi Jasa Indonesia Graha Jasindo Jln. Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat.
   c. Laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.
3. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Direksi

   Dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan cara:
   a. Mengirimkan laporan melalui pos/kurir yang ditujukan kepada: Yth Komisaris Utama, PT Asuransi Jasa Indonesia, Graha Jasindo Jln. Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat. Hanya dibuka oleh Komisaris Utama.
   b. Laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.
4. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Dewan Komisaris
   Dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan cara:
   a. Mengirimkan laporan melalui pos/kurir yang ditujukan kepada: Yth Direktur Utama PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga 18th Floor Jl. Jend, Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.
   b. Laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan telah mempunyai sistem pelaporan yakni WBS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 04/SKB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Asuransi Jasa

1. Reporting Employee Deviations or Violations
   This is done by submitting a written report to the Internal Supervisory Unit Group. Submitting the report into the complaint box located within the company, or:

   a. Sending a report via e-mail to the address: whistleblowing@asuransijasindo.co.id or
   b. Submitting a report via SMS or Whatsapp to number 08119776222 or
   c. Sending a report by post/courier to the address: PT Asuransi Jasa Indonesia Group Internal Supervising Unit MTH Tower, Jl. Lt. Jen. M.T. Haryono No. 10, Jakarta
   d. The report is accompanied by supporting documents as evidence of irregularities or violations.

2. Reporting Deviations or Violations of the Internal Supervising Unit Group
   This is done by submitting a written report to the President Director by:
   a. Sending a report via e-mail to the address: dirut@ dirut@asuransijasindo.co.id or
   b. Submitting a report by post/courier to the address: Attn. President Director, PT Asuransi Jasa Indonesia Graha Jasindo Jln. Menteng Raya No. 21, Central Jakarta.
   c. The report is accompanied by supporting documents as evidence of irregularities or violations.

3. Reporting Deviations or Violations by the Board of Directors
   This is done by submitting a written statement by:

   a. Sending a report by post/courier addressed to: Attn. President Commissioner, PT Asuransi Jasa Indonesia, Graha Jasindo Jln. Menteng Raya No. 21, Central Jakarta. Only opened by the President Commissioner.
   b. The report is accompanied by supporting documents as evidence of irregularities or violations.

4. Reporting of irregularities or violations by the Board of Commissioners
   This is done by submitting a written report by:

   a. Send a report by post/courier addressed to: Attn. President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga 18th Floor Jl. Jend, Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.
   b. The report is accompanied by supporting documents as evidence of irregularities or violations.

The Determination of Violation Reporting System Guidelines

The company has a reporting system, i.e., WBS, as regulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors No. 04/SKB/VII/2020 dated July 30, 2020, concerning the Mechanism for Reporting Deviations or Violations (Whistleblowing System) of PT Asuransi Jasa

Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan atas pemahaman WBS kepada karyawan, disimpulkan bahwa sebagian besar insan Perusahaan telah memahami keberadaan dan fungsi WBS pada Perusahaan.

Ruang Lingkup *Whistleblowing System*

Penyimpangan atau pelanggaran yang dilaporkan adalah penyimpangan pelanggaran yang terkait dengan:

1. Etika Bisnis dan Etika Kerja
2. Peraturan Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
4. Peraturan Hukum atau Perundang-undangan Perasuransian
5. Anggaran Dasar
6. Perjanjian/Kontrak
7. Rahasia Perusahaan
8. Ketentuan Mengenai Transaksi Benturan Kepentingan
9. Penyimpangan dan Pelanggaran lain yang material atau signifikan

Perlindungan bagi Pelapor

Tim pengelola WBS memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran, guna menjamin keamanan pihak pelapor dan keluarga. Pelapor yang ingin identitasnya tetap dirahasiakan diberi jaminan, kecuali proses hukum atas laporan menuntut identitas pelapor dibuka. Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; serta
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pelaporan penyimpangan atau pelanggaran mulai dari proses pelaporan, diprosesnya pelaporan oleh tim dan keterlibatan Direksi serta Komisaris sampai kepada keputusan dari suatu laporan, dilakukan berdasarkan skema berikut:

Indonesia. Based on the evaluation that has been carried out on employees' understanding of the WBS, it is concluded that the majority of Company employees understand the existence and function of the WBS in the Company.

Scope of Whistleblowing System

Reported deviations or violations are violations related to:

1. Business Ethics and Work Ethics
2. Company's Regulations
3. Collective Labor Agreement (CLA)
4. Legal Regulations or Insurance Legislation
5. Articles of Association
6. Agreement / Contract
7. Company's Confidentiality
8. Provisions Regarding Conflict of Interest Transactions
9. Deviations and other violations that are material or significant

Protection for Whistleblowers

The WBS management team provides protection for those reporting violations, to ensure the safety of the reporting party and their families. Whistleblowers who wish to remain anonymous are given guarantees, unless the legal process for the statement demands that the identity of the whistleblower be disclosed. A whistleblower will receive standard protection from the Company against detrimental treatment such as:

1. Unfair dismissal;
2. Demotion of position or rank;
3. Harassment or discrimination in all forms; as well as
4. Adverse records in his personal data file.

Violation Reporting Mechanism

The mechanism for reporting deviations or violations starting from the reporting process, the processing of the reporting by the team and the involvement of the Directors and Commissioners up to the decision on a report, is carried out based on the following scheme:

1. Perusahaan menerima setiap pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditujukan secara tertulis melalui *web/E-mail* resmi.
2. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin Perusahaan dan Perusahaan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut.
3. Terhadap Laporan yang disampaikan akan dipilah terlebih dahulu untuk dapat ditetapkan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
4. Apabila Laporan ditindaklanjuti maka investigasi terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Group of Internal Audit*.
5. *Group of Internal Audit* melaksanakan proses investigasi berupa audit khusus dan hasil investigasi dilaporkan kepada Direksi dengan menyampaikan Laporan Hasil Audit Khusus berupa kajian dan rekomendasi.
6. Berdasarkan Laporan tersebut Direksi akan menetapkan tindak lanjutnya.
7. Investigasi terhadap laporan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi diselesaikan oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Whistleblowing System telah disosialisasikan kepada *stakeholders* secara langsung, melalui *website* dan portal internal Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi bahwa setiap *stakeholder* memiliki media dengan akses yang mudah untuk menyampaikan laporan penyimpangan/pelanggaran dan sistem pelaporan pelanggaran yang dikelola secara independen.

Pihak Pengelola Pelaporan

Efektif per tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Keputusan Bersama No. SKB.004/SKB/VII/2020 *Group* Satuan Pengawasan Internal mendapat penunjukan untuk *Group* Satuan Pengawasan Internal mendapat penunjukan untuk menindaklanjuti laporan yang diterima dalam sistem pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System*, di mana sebelumnya pelaksanaan dilakukan oleh Tim Investigasi untuk Penyelesaian Pelanggaran (TIuPP).

WBS IFG Integritas

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero (BPUI) selaku *Holding* Indonesia *Financial Group* (Holding IFG) dan seluruh Anggota *Holding* IFG (termasuk Jasindo) memahami makna penting implementasi tata kelola perusahaan. Dalam meningkatkan nilai-nilai perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, *Holding* IFG dan seluruh Anggota Holding IFG bekerja sama dengan pihak independen, PT Deloitte Advis Indonesia (Deloitte), mengajak seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta mengawasi aktivitas perusahaan, yaitu dengan meluncurkan IFG Integritas.

1. The Company accepts any reports of irregularities or violations that are addressed in writing via the official web/E-mail.
2. The Company guarantees the confidentiality of the identity of the whistleblower and the Company will provide strict sanctions for those who violate the principle of confidentiality.
3. The reports submitted will be sorted first to determine whether they will be followed up or not followed up.
4. If the report is followed up, an investigation into the irregularities or violations committed by the Group of Internal Audit will be carried out.
5. The Group of Internal Audit carries out an investigation process in the form of a special audit and the results of the investigation are reported to the Board of Directors by submitting a Special Audit Results Report in the form of studies and recommendations.
6. Based on the report, the Board of Directors will determine follow-up actions.
7. Investigation of reports of irregularities or violations committed by the Board of Directors is completed by the Audit Committee and reported to the Board of Commissioners.

Whistleblowing System Socialization

The Whistleblowing System has been socialized to stakeholders directly, through the Company's website and internal portal. The implementation of socialization aims to provide information that each stakeholder has media with easy access to submit reports of irregularities/violations and a violation reporting system that is managed independently.

Reporting Management Party

Effective as of July 30, 2020, as regulated in the Addendum to Joint Decision No. SKB.004/SKB/VII/2020 The Internal Supervision Unit Group received an appointment for the Internal Supervision Unit Group to follow up on reports received in the Whistleblowing System, in which previously implementation was carried out by the Investigation Team for Resolving Violations (TIuPP).

WBS IFG Integritas

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero (BPUI) as Holding Indonesia Financial Group (Holding IFG) and all Holding IFG Members (including Jasindo) understand the importance of implementing corporate governance. In improving company values into business behavior and ethics that are in accordance with corporate governance principles, IFG Holding and all IFG Holding Members collaborate with an independent party, PT Deloitte Advis Indonesia (Deloitte), inviting all employees and stakeholders others to participate in supervising company activities, i.e., by launching IFG Integritas.

IFG Integritas adalah sistem pelaporan pelanggaran independen yang dikelola secara profesional oleh Deloitte yang memberikan Anda kesempatan untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran apapun yang terjadi di lingkungan kerja, baik secara anonim maupun tidak anonim.

Jenis Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah:
1. KKN
2. Penyimpangan pada benturan kepentingan/konflik kepentingan
3. Memberikan dan/atau menerima gratifikasi dan atau penyuapan
4. Tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial bagi PT BPUI (Persero) atau IFG
5. Pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran hukum, ketentuan perundang-undangan, & peraturan internal PT BPUI (Persero) atau IFG

Media Pelaporan IFG Integritas
1. *Website*: https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas
2. Saluran Telepon **+62 21 50886181**
3. Saluran Faksimili **+62 21 50886182**
4. ***E-mail*** wbsifg@tipoffs.info
5. **Surat IFG Integritas** PO Box 2781 JKP 10027
6. **SMS dan WhatsApp +62 812 2356 2277**

Jumlah Pengaduan Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

Terdapat 10 (sepuluh) Pengaduan yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dan semua pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pengaduan yang dilaporkan bersifat material (terkait pembayaran klaim, tuntutan hukum dan klaim ditolak), sedangkan pengaduan melalui *contact center* kurang material (terkait pelayanan *Representative Office* dan pengadaan *Spare Part* yang lama).

IFG Integritas is an independent whistleblowing system professionally managed by Deloitte that gives you the opportunity to report any fraud or violations that occur in the work environment, both anonymously and non-anonymously.

The types of alleged violations that can be reported are:
1. KKN
2. Deviations regarding conflicts of interest/conflicts of interest
3. Giving and/or receiving gratification and/or bribery
4. Fraud that can cause financial or non-financial losses for PT BPUI (Persero) or IFG
5. Violation of the Code of Conducts and/or violation of law, statutory provisions, & internal regulations of PT BPUI (Persero) or IFG

IFG Integritas Reporting Media
1. Website: https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas
2. Telephone Line **+62 21 50886181**
3. Facsimile Line **+62 21 50886182**
4. **E-mail** wbsifg@tipoffs.info
5. **IFG Integritas Letter** PO Box 2781 JKP 10027
6. **SMS and WhatsApp +62 812 2356 2277**

Number of Complaints in 2023 and Follow-up

There are 10 (ten) Complaints received through the FSA Consumer Protection Portal Implementation (APPK) and all complaints have been followed up in accordance with the provisions. The complaints reported are material (related to claim payments, lawsuits and rejected claims), while complaints via the contact center are less material (related to Representative Office services and old spare part procurement).

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

The Procurement of Goods and/or Services

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Perusahaan telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Asuransi Jasa Indonesia yang disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.032/DMA/XI/2022 yang berlaku sejak tanggal 30 November 2022, sebagai bentuk implementasi terhadap prinsip transparansi dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Prosedur dan Proses Pengadaan

Prosedur dan proses pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan jenis, sifat dan nilai barang dan/atau jasa dan metode/sistem pengadaan yang paling cocok dengan barang dan/atau jasa yang bersangkutan, maka ditentukan metode pengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, persetujuan pejabat yang berwenang dan sistem kontrak yang digunakan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan metode:

1. Pengadaan Langsung
2. Penunjukan Langsung
3. Tender/Seleksi Terbatas
4. Tender/Seleksi Umum

Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Perjanjian Kerja sama (PKS), dilakukan oleh Pejabat yang memberikan persetujuan izin prinsip pengadaan barang dan/atau jasa, atau *Group Head* sepanjang usulan rekomendasi pemenang dari Panitia Pengadaan telah disetujui oleh Direktur Bidang/Direktur Utama/Rapat Direksi.

Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan membentuk Panitia Pengadaan yang bersifat *ad hoc*. Untuk nilai pengadaan di atas Rp5.000.000.000,00, pelaksanaan pengadaan akan didampingi oleh Tim Pendampingan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibentuk oleh Perusahaan, agar pelaksanaan pengadaan berjalan transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme secara profesional untuk kepentingan Perusahaan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pengadaan barang dan/atau jasa antara lain sebagai berikut:

1. Menandatangani Pakta Integritas;
2. Melakukan proses kualifikasi untuk metode Tender/Seleksi Umum (sesuai kondisi);
3. Menyusun, meneliti dan/atau menetapkan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa;

Goods and/or Services Procurement Policy

The Company has established Policies and Procedures for the Procurement of Goods and/or Services for PT Asuransi Jasa Indonesia which are approved in Directors' Decision No. SK.032/DMA/XI/2022 which is effective from November 30, 2022, as a form of implementation of the principle of transparency in the process of Procurement of Goods and/or Services.

Procurement Procedures and Process

Procurement procedures and processes are carried out by considering and paying attention to the type, nature and value of goods and/or services and the procurement method/system that is most suitable for the goods and/or services concerned, then determine the procurement method, bid submission system, bid evaluation, official approval. authorities and the contract system used.

Procurement of goods and/or services can be carried out using the following methods:

1. Direct Procurement
2. Direct Appointment
3. Limited Tender/Selection
4. Tender/General Selection

The signing of the Work Order (SPK) and/or Cooperation Agreement (PKS), is carried out by the Official who gives approval in principle for the procurement of goods and/or services, or the Group Head as long as the proposed winning recommendation from the Procurement Committee has been approved by the Field Director/President Director/Board of Directors Meeting.

The process of Procurement of Goods and/or Services is carried out by forming an ad hoc Procurement Committee. For procurement values above IDR5,000,000,000.00, the procurement implementation will be accompanied by a Goods and/or Services Procurement Assistance Team formed by the Company, so that the procurement implementation is transparent and free from practices of corruption, collusion and nepotism in a professional manner for the benefit of the Company , while remaining guided by the applicable provisions.

Duties and Responsibilities of the Goods and/or Services Procurement Committee include the following:

1. Signing the Integrity Pact;
2. Carrying out the qualification process for the Tender/General Selection method (according to conditions);
3. Preparing, researching, and/or determining procurement documents for goods and/or services;

4. Menyampaikan surat permintaan penawaran kepada Peserta (untuk metode Penunjukan Langsung dan Tender/Seleksi Terbatas) atau membuat pengumuman pengadaan (untuk metode Tender/Seleksi Umum);
5. Memberikan penjelasan/*aanwijzing* mengenai dokumen pengadaan, dan membuat Berita Acara Penjelasan (sesuai kebutuhan);
6. Melaksanakan pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi dan/atau penawaran, dan membuat Berita Acara;
7. Melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan/atau penawaran, menetapkan urutan calon pemenang pengadaan (untuk metode Tender/Seleksi Terbatas atau Tender/Seleksi Umum) dan membuat Berita Acara hasil evaluasi;
8. Melakukan klarifikasi (apabila diperlukan), *Reverse Auction* dan/atau negosiasi harga (sesuai kondisi tertentu);
9. Membuat laporan dan rekomendasi mengenai hasil pengadaan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia barang dan/atau jasa;
10. Membuat pengumuman pemenang dan disampaikan kepada Peserta (untuk metode Tender/Seleksi Terbatas atau Tender/Seleksi Umum);
11. Menjawab sanggah dan sanggah banding (apabila ada);
12. Membuat surat penunjukan Penyedia barang dan/atau jasa.

Kode Etik Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada *stakeholders* eksternal untuk menjadi vendor/rekanan Perusahaan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau Jasa, pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan barang dan/atau jasa harus mematuhi etika pengadaan. Untuk menghindari benturan kepentingan dan *insider trading*, maka Panitia pengadaan dan Peserta yang terlibat setiap proses pengadaan, harus menandatangani pakta integritas.

Berikut ini merupakan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan metode Tender Umum pada tahun 2023:

1. Pengadaan Perbaikan dan Perkuatan Struktur Gedung Jasindo
2. Pengadaan Jasa Penyedia Asuransi Kesehatan Periode 2023 -2025
3. Pengadaan Penyedia Jasa Jaringan VPN IP MPLS

4. Submitting a letter requesting offers to Participants (for the Direct Appointment and Limited Tender/Selection methods) or make a procurement announcement (for the General Tender/Selection method);
5. Providing explanations/aanwijzing regarding procurement documents, and prepare Explanatory Minutes (as needed);
6. Carrying out the entry and opening of qualification documents and/or offers, and prepare Minutes;
7. Evaluating qualification documents and/or bids, determine the order of potential procurement winners (for Limited Tender/Selection or General Tender/Selection methods) and prepare Minutes of evaluation results;
8. Carrying out clarification (if necessary), Reverse Auction and/or price negotiation (according to certain conditions);
9. Making statements and recommendations regarding procurement results to officials who have the authority to determine providers of goods and/or services;
10. Making a winner announcement and submitting it to Participants (for Limited Tender/Selection or General Tender/Selection methods);
11. Responding to objections and objections to appeals (if any);
12. Making a letter of appointment as provider of goods and/or services.

Code of Conducts Regarding the Procurement of Goods and/or Services

The Company provides equal opportunities to external stakeholders to become vendors / partners of the Company in accordance with applicable criteria and conditions. In every procurement of goods and/or services, the parties involved in the process of procuring goods and/or services must comply with procurement ethics. To avoid conflicts of interest and insider trading, the procurement committee and participants involved in each procurement process must sign an integrity pact.

The following is the procurement of goods and/or services carried out using the Public Tender method in 2023:

1. Procurement of repairs and strengthening of the Gedoeng Jasindo structure
2. Procurement of Health Insurance Provider Services for the 2023-2025 Period
3. Procurement of MPLS IP VPN Network Service Providers

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)

Dasar acuan utama penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) adalah POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Pada tahun 2023, Perusahaan telah menetapkan SKB.01/SKB/XII/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 13 Desember 2023 sebagai dasar acuan pelaksanaan APU PPT di Perusahaan.

Pada tahun 2023, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2020-2024 yang mencakup 5 (lima) strategi, di antaranya:

1. Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko;
2. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
3. Meningkatan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
4. Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko;
5. Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata pemusnah massal. Keempat, menguatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di mana dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi: "Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan mengenali nasabah. Serta Pasal 31 yang berbunyi: "Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelapor bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK."

The main reference basis for implementing the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU-PPT) program is PFSA Number 8 of 2023 concerning Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector. In 2023, the Company has established SKB.01/SKB/XII/2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction at PT Asuransi Jasa Indonesia dated 13 December 2023 as a reference basis for implementing APU PPT in the Company.

In 2023, the National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of TPPU (TPPU Committee) established the National Strategy for Anti-Money Laundering and Terrorist Financing for 2020-2024 which includes 5 (five) strategies, including:

1. To increase the private sector's ability to detect indications or potential for TPPU, TPPT and funding for the proliferation of weapons of mass destruction by paying attention to risk assessments;
2. To increase efforts to prevent the occurrence of TPPU and TPPT by paying attention to risk assessments;
3. To increase the effectiveness of eradicating TPPU and TPPT by paying attention to risk assessments;
4. To optimize asset recovery by paying attention to risk assessment;
5. To increase the effectiveness of targeted financial sanctions in order to disrupt terrorist activities, terrorists, terrorist organizations and the proliferation of weapons of mass destruction. Fourth, strengthen coordination and cooperation between government agencies and/or private institutions.

The Financial Services Authority (FSA) has the mandate to supervise the implementation of the APU PPT program based on Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU) where in Article 18 paragraph (1) and paragraph (4) reads: "The Supervisory and Regulatory Agency (LPP) establishes the principle provisions for recognizing Service Users (customers) and carrying out supervision Compliance of the Reporting Party in implementing customer recognition. As well as Article 31 which reads: "Supervision of compliance with reporting obligations for the Reporting Party is carried out by the LPP and/or PPATK."

Selain itu, berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) diatur bahwa Pasal 12 "LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK." Pasal 14 "Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang."

Melalui penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang berstandar internasional, diharapkan PJK dapat melakukan kegiatannya secara lebih sehat dan lebih berdaya saing global sehingga pada akhirnya akan lebih mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan secara nasional. PT Asuransi Jasa Indonesia (selanjutnya disebut Asuransi Jasindo) adalah anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (selanjutnya disebut PT BPUI), yang bergerak di bidang Jasa Asuransi Umum, terdaftar dan diawasi oleh Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Sebagai komitmen untuk memerangi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU & PPT), PT Asuransi Jasa Indonesia telah memenuhi standar yang tinggi untuk mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan mematuhi (i) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan (iii) Peraturan yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaksanaan APU, PPT, & PPPSPM di Perusahaan dikoordinasi oleh Group Manajemen Risiko Perusahaan. Sebagai bentuk kepatuhan Laporan pelaksanaan APU PPT & PPPSPM, Perusahaan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pengkinian data APU & PPT tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2023 dan Laporan Rencana Pengkinian Data APU & PPT Tahun 2024 pada tanggal 28 Desember 2023. Penerapan program APU & PPT dilaksanakan di seluruh unit bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen

Moreever, based on Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing (TPPT) stipulates that Article 12 "LPP stipulates principle provisions for recognizing Financial Services Users, including Financial Services Users related to criminal acts of terrorist financing, while the provisions referred to are regulated separately by LPP and must be implemented by PJK." Article 14 "Supervision of PJK compliance with the obligation to report Suspicious Financial Transactions related to Terrorism Financing is carried out by the authorized PPATK and LPP."

By implementing the APU and PPT program in the financial services sector with international standards, it is hoped that PJK can carry out its activities in a healthier and more globally competitive manner so that in the end it will further encourage the growth of the financial services industry nationally. PT Asuransi Jasa Indonesia (hereinafter referred to as Asuransi Jasindo) is a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (hereinafter referred to as PT BPUI), which operates in the field of General Insurance Services, registered and supervised by the Ministry of SOE, Ministry of Finance, Services Authority Finance (FSA) and Bank Indonesia. As a commitment to combating money laundering and terrorist financing (APU & PPT) activities, PT Asuransi Jasa Indonesia has met high standards to prevent and combat criminal acts of money laundering and terrorist financing by complying with (i) Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, (ii) Financial Services Authority Regulations (PFSA) and (iii) Regulations issued by the Financial Transaction Statements and Analysis Center (PPATK).

The implementation of APU, PPT, & PPPSPM in the Company is coordinated by the Corporate Risk Management Group. As a form of compliance with the APU PPT & PPPSPM implementation statement, the Company has submitted the 2022 APU & PPT Data Update Realization Statement to the Financial Services Authority on January 31, 2023 and the 2024 APU & PPT Data Update Plan Statement on December 28, 2023. The implementation of the APU program & PPT is implemented in all PT Asuransi Jasa Indonesia business units and is reported regularly to management.

Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Policy

Kebijakan Anti Korupsi

Sejalan dengan program pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dicanangkan oleh pemerintah, Asuransi Jasindo selaku Badan Usaha Milik Negara menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya usaha yang bersih dari adanya praktik-praktik tersebut. Pengendalian terhadap gratifikasi yang dikuatkan melalui SKB.06/SKB/XIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Melarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Perusahaan dapat memberikan hadiah untuk kepentingan promosi dan donasi/sumbangan untuk kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
3. Dilarang menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Dilarang menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain dengan cara memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran dari pihak ketiga.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi Perusahaan merupakan penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Anti-Corruption Policy

In line with the program to eradicate Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices launched by the government, Asuransi Jasindo as a State-Owned Enterprise is at the forefront in creating a business culture that is free from these practices. Control over gratuities is strengthened through SKB.06/SKB/XIII/2020 dated August 24, 2020, concerning the Policy Prohibiting Giving and Receiving Gifts or Bribes (Gratifications) within PT Asuransi Jasa Indonesia.

This commitment is realized by always paying attention to the following signs:

1. Prohibiting giving or promising, either directly or indirectly, gifts to parties connected with the Company, where the gift is known or reasonably suspected to influence or move the parties to do or not do something in their position which is contrary to their obligations.
2. Companies can provide prizes for promotional purposes and donations/contributions for corporate social responsibility purposes in accordance with applicable regulations by prioritizing the principle of accountability.
3. It is prohibited to accept gifts from any party, who is known and reasonably suspected that the gift was given to motivate him to do or not do something in his/her position that is contrary to his obligations.
4. It is prohibited to receive compensation for the performance of duties and obligations, including by deducting or taking part of the payment amount from third parties.

Gratification Control

Company's gratification control is an elaboration of the following statutory regulations:

1. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
2. Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting.
3. Supreme Court Regulation (Perma) Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.

Dalam mengimplementasikan regulasi dimaksud, Perusahaan telah melakukan internalisasi peraturan yaitu:

1. Menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.006/SKB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Larangan Gratifikasi, Penyuapan, dan Pemerasan PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. Menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.01/SKB/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Asuransi Jasa Indonesia.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama dimaksud Perusahaan menetapkan larangan Insan Perusahaan untuk:

1. Memberikan dan menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada penyelenggara negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Menerima apa pun yang tidak sah dari stakeholders dengan maksud untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Perusahaan, meminta hadiah, entertainment atau dalam bentuk lainnya.

Agar larangan tersebut dapat terimplementasikan secara efektif pada setiap aktivitas, Perusahaan telah mengumumkan di media massa dan web Perusahaan bahwa Perusahaan tidak menerima maupun memberi hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parsel, dan sejenisnya dalam kesempatan apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada Hari Raya Keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu Perusahaan telah menyediakan tata laksana pelaporan gratifikasi, penyuapan dan atau pemerasan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dalam Whistleblowing System (WBS) yang bisa diakses secara bebas oleh semua Stakeholders.

Berkaitan dengan gratifikasi, pada tahun 2023, terdapat penanganan dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pembayaran komisi terhadap agen asuransi fiktif PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Sesuai dengan prinsip kesamaan di depan hukum dan praduga tak bersalah, Asuransi Jasindo menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

In implementing the regulations in question, the Company has internalized the regulations, i.e.,:

1. Stipulating a Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors No. SKB.006/ SKB/VIII/2020 dated August 24, 2020, concerning Prohibition of Gratification, Bribery and Extortion of PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. Stipulating a Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors No. SKB.01/SKB/ VII/2020 dated July 23, 2020, concerning Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016 PT Asuransi Jasa Indonesia.

In accordance with the Joint Decision, the Company prohibits Company Personnel from:

1. Giving and promising, either directly or indirectly, gifts, bribes and the like to state officials, business partners and other parties connected with the Company, where the gift is known or reasonably suspected to be used to influence and mobilize these parties doing or not doing something in his/her position that is contrary to his obligations.
2. Accepting anything illegal from stakeholders with the intention of providing personal gain and harming the Company's interests, asking for gifts, entertainment or other forms.

So that this prohibition can be implemented effectively in every activity, the Company has announced in the mass media and on the Company's website that the Company does not accept or give gifts, including but not limited to gifts, parcels and the like on any occasion, including and not limited to Sunday. Religious Raya, both directly and indirectly. In addition, the Company has provided procedures for reporting gratification, bribery and/or extortion committed by Company Personnel in the Whistleblowing System (WBS) which can be accessed freely by all Stakeholders.

Regarding gratuities, in 2023, there will be handling of alleged corruption cases by the Corruption Eradication Commission (KPK). This case is related to the alleged corruption case in commission payments to the fictitious insurance agent PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). In accordance with the principle of equality before the law and the presumption of innocence, Asuransi Jasindo handed over the handling of the case to the competent authority, i.e., the Corruption Eradication Commission (KPK).

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Organizers' Wealth Statement (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang- undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di mana penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN melalui alamat www.elhkpn.kpk.go.id. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Basic Principles of State Officials' Asset Statements

As a State-Owned Enterprise, the Company is obliged to comply with binding laws and regulations. One form of statutory regulation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation to statement the assets of state administrators (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials' Assets determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Officials' Assets, where submission of LHKPN via the e-LHKPN implementation via the address www.elhkpn.kpk.go.id. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out steps or efforts to prevent corruption, including through registration and examination of LHKPN. Apart from that, Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every administrator is obliged to statement and declare his assets before and after assuming office and be willing to have his/her assets checked before and after taking office. In and as regulated in Article 2 Paragraph 7 of Law no. 28 of 1999 that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Board of Commissioners, Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (SOE) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan.

Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2023

Kebijakan pelaporan LHKPN pada PT Asuransi Jasindo diatur dalam surat keputusan Direksi No. SK.22/DMA/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat PT Asuransi Jasa Indonesia beserta adendumnya.

Pada periode pelaporan LHKPN tahun 2023, jumlah wajib lapor LHKPN PT Asuransi Jasa Indonesia adalah sejumlah 38 orang. Masa pelaporan LHKPN sesuai dengan instruksi dari KPK adalah tanggal 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya. Adapun hingga 31 Maret 2023, jumlah wajib lapor yang telah menyelesaikan kewajibannya sejumlah 38 orang.

Selama masa pengisian LHKPN periode 2023, Perusahaan bekerja sama dengan IFG dan KPK untuk menyelenggarakan sosialisasi pengisian LHKPN bagi wajib lapor Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan kemudahan pengisian LHKPN. Selain itu, *Group* SDM secara aktif selalu mengingatkan wajib lapor melalui berbagai media seperti *E-mail* dan flyer serta turut aktif mendampingi wajib lapor yang membutuhkan bantuan dalam melakukan pengisian LHKPN.

The LHKPN examination submitted to the Corruption Eradication Committee aims to create State Administrators who adhere to the general principles of state administration that are free from the practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every State Official is required to statement his assets via the LHKPN form which has been provided by the Corruption Eradication Commission to be filled in honestly, correctly and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate and assess all amounts, types and values of the Assets reported, correctly, quickly and precisely, accurate and responsible.

Legal and Regulatory Framework for Implementing LHKPN in Companies

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as a basis for viewing LHKPN implementation within the Company.

The Legal Framework is:

1. Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 dated 3 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
4. KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Officials' Assets

Transparency of LHKPN for Company Officials in 2023

The LHKPN reporting policy at PT Asuransi Jasindo is regulated in Directors' Decision No. SK.22/DMA/VII/2020 dated 10 July 2020 concerning Reporting of State Officials' Assets for PT Asuransi Jasa Indonesia Officials and its addendum.

In the 2023 LHKPN reporting period, the number of people required to reportLHKPN for PT Asuransi Jasa Indonesia is 38 people. The LHKPN reporting period in accordance with instructions from the KPK is January 1 to March 31 each year. As of March 31 2023, the number of mandatory reports who have completed their obligations is 38 people.

During the 2023 LHKPN filling period, the Company is collaborating with IFG and KPK to organize socialization on filling out the LHKPN for those required to statement to the Company. The implementation of socialization is expected to increase the timeliness and ease of filling out the LHKPN. Apart from that, the HR Group actively always reminds mandatory reporting through various media such as e-mail and flyers and actively assists mandatory reporting who need assistance in filling out the LHKPN.

Pedoman LHKPN Perusahaan dan Pelaksanaannya

Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan, Direksi menetapkan Surat Keputusan No. SK-22/DMA/VII/2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat PT Asuransi Jasa Indonesia yang di dalamnya mengatur bahwa:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural 1 tingkat di bawah Direksi baik yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia wajib menyampaikan laporan LHKPN.
2. Pejabat wajib menyampaikan LHKPN pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
   a. Pengangkatan sebagai pejabat pada saat pertama kali menjabat.
   b. Pengangkatan kembali sebagai pejabat setelah berakhirnya masa jabatan/pensiun.
   c. Berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai pejabat.
   d. Laporan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pertama kali diangkat.
3. Pemutakhiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilakukan apabila:
   a. Penyelenggara Negara mengalami Mutasi, Promosi dan mengakhiri masa Jabatan (Pensiun).
   b. Penyelenggara Negara meninggal dunia (dibuat oleh ahli waris).
   c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang terakhir telah berusia 2 tahun.
   d. Unit/koordinator LHKPN di perusahaan secara berkala memberi pemberitahuan atau pengingat dalam penyampaian LHKPN.

Sebagai wujud komitmen dalam penerapannya, Pejabat Perusahaan telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dan telah melakukan pemutakhiran pada saat terjadi mutasi jabatan dan pada saat jatuh tempo. Unit/koordinator LHKPN di Perusahaan secara berkala memberi pemberitahuan atau pengingat dalam penyampaian LHKPN. Sebagai wujud komitmen dalam penerapannya, Pejabat Perusahaan telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dan telah melakukan pemutakhiran pada saat terjadi mutasi jabatan dan pada saat jatuh tempo.

Company's LHKPN Guidelines and Implementation

As a form of commitment to preventing corruption within the Company, the Board of Directors issued Decision Number SK-22/DMA/VII/2020 concerning Reporting the Assets of State Officials of PT Asuransi Jasa Indonesia Officials which regulates that:

1. The Board of Commissioners, Directors and Structural Officials 1 level below the Directors, both inside and outside the organizational structure of PT Asuransi Jasa Indonesia, are required to submit LHKPN statements.
2. Officials are required to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission, i.e., when:
   a. Appointment as an official when you first take office.
   b. Reappointment as an official after the end of the term of office/retirement.
   c. End of term of office/retirement as an official.
   d. The statement is submitted no later than 3 (three) months after it was first appointed.
3. Updating the State Officials' Assets Statement is carried out if:
   a. State officials experience transfers, promotions and end of term of office (retirement).
   b. The State Administrator dies (made by the heirs).
   c. The last State Officials' Wealth Statement is 2 years old.
   d. The LHKPN unit/coordinator in the company periodically provides notifications or reminders when submitting the LHKPN.

As a form of commitment to its implementation, Company Officials have submitted the LHKPN to the Corruption Eradication Commission and have updated it when a position transfer occurs and when it is due. The LHKPN unit/coordinator in the Company periodically provides notifications or reminders when submitting the LHKPN. As a form of commitment to its implementation, Company Officials have submitted the LHKPN to the Corruption Eradication Commission and have updated it when a position transfer occurs and when it is due.

Alur Penyampaian e-LHKPN
Submission Flow of e-LHKPN

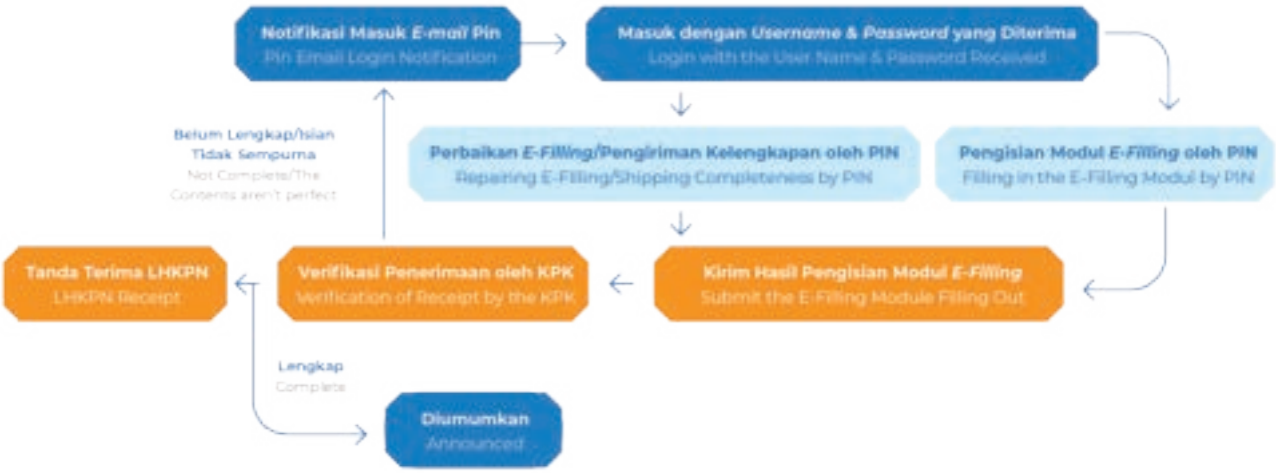

Pengungkapan Praktik Bad Governance

Disclosure of Bad Governance Practices

Perseroan berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan memenuhi seluruh regulasi yang terkait dengan aktivitas Perusahaan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Baik Perseroan maupun organ yang berada di dalamnya yaitu organ inti perusahaan dan organ pendukung dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak pernah melakukan praktik *bad corporate governance*.

The Company is committed to implementing good Corporate Governance by complying with all regulations related to the Company's activities and carrying out its obligations well. Neither the Company nor the organs within it, i.e., the company's core organs and supporting organs in carrying out their operational activities, have ever carried out bad corporate governance practices.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak pernah mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities that Pollute the Environment

Until the end of 2023, the Company has never received any reports regarding the Company's activities that pollute the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Asuransi Jasindo merupakan perusahaan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap tahun Perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran dan juga pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak badan maupun pajak-pajak lainnya.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligations

Asuransi Jasindo is a company that complies with laws and regulations, including tax matters. Every year the Company fulfills its tax payment and reporting obligations, both income tax, corporate tax and other taxes.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Berbagai informasi, analisa dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Coopers/PWC)

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Inconsistency in the Presentation of Annual Statements and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

Various information, analysis and discussion of performance in this annual statement refers to the Company's Financial Statement for the years ending 31 December 2022 and 31 December 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm AP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Coopers/PWC)

Financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, i.e., the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association.

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kasus hubungan industrial yang berkaitan dengan buruh atau karyawan.

Cases Related to Workers and Employees

Throughout 2023, there will be no industrial relations cases related to workers or employees.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan keuangan Asuransi Jasindo belum menyajikan pengelompokkan (segmen) jenis usaha/produk yang dihasilkan sebagai bentuk pelaporan segmen operasi.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

Asuransi Jasindo's financial statements do not yet present groupings (segments) of the types of business/products produced as a form of operating segment reporting.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Asuransi Jasindo baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan untuk tahun 2023.

Perkembangan Penerapan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Asuransi Jasindo telah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Sejak pertama kali Perusahaan menyatakan komitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten, hingga akhir tahun 2023 sudah terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Di Tahun 2023 Perusahaan telah mengadopsi *framework Governance, Risk Management, & Compliance* (GRC) dibuktikan dengan telah ditetapkannya Tim Pembangunan Integritas Sistem *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi antara pengelolaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara berkelanjutan.

Compatibility of Annual Statement Books and Digital Annual Statements

Asuransi Jasindo's Annual Statement, whether submitted to shareholders, stakeholders or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Statement booklet which printed and published for 2023.

Development of GCG Implementation

The implementation of GCG within Asuransi Jasindo has experienced very significant developments. Since the Company first stated its commitment to implement GCG consistently, until the end of 2023 there have been very significant developments. In 2023, the Company has adopted the Governance, Risk Management, & Compliance (GRC) framework as evidenced by the establishment of a Governance, Risk, and Compliance (GRC) System Integrity Development Team to develop an integrated system between Governance, Risk Management and Compliance management on an ongoing basis.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is left blank intentionally.

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Asuransi Jasindo memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan mendorong praktik-praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnis melalui pengelolaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Selain itu, sebagai perusahaan yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asuransi Jasindo juga mengikuti arahan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan secara konsisten menjalankan program TJSL untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, pelestarian terhadap lingkungan, pemberdayaan berbasis masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Asuransi Jasindo has a strong commitment to maintain business continuity and create long-term value for all stakeholders. This commitment is realized one of which by encouraging sustainable practices in all business lines through Environmental, Social and Governance (ESG) management.

In addition, as a company that is part of a State-Owned Enterprise (SOE), Asuransi Jasindo also follows directions from the Ministry of SOE as a shareholder, to implement the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, as regulated in the Ministerial Regulation of SOE PER-1/ MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

The company consistently carries out the TJSL program to create community economic independence, preserve the environment, community-based empowerment, and contribute directly to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) targets.

Landasan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan program TJSL Jasindo berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. ISO 26000 SR:2010 *Guidance on Social Responsibility*.
5. Pedoman Internal Perusahaan.

Program TJSL Jasindo dilaksanakan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak program sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program. Oleh karena itu, Asuransi Jasindo melakukan pengelolaan program TJSL melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan.

Foundation for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs

The implementation of the Jasindo TJSL program is based on the following statutory regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.
3. Ministerial Regulation of SOE PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.
4. ISO 26000 SR:2010 Guidance on Social Responsibility.
5. Internal Company Guidelines.

The Jasindo TJSL program is implemented systematically and in an integrated manner to ensure implementation, achievement of success, and management of program impacts following the priorities and/or achievement of program objectives. Therefore, Asuransi Jasindo manages the TJSL program through the following stages:

1. Planning;
2. Implementation;
3. Supervision; and
4. Reporting.

Tahapan Pengelolaan Program TJSL Asuransi Jasindo
Stages of Management of the Asuransi Jasindo TJSL Program

Tujuan Program TJSL

Pelaksanaan program TJSL Jasindo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
2. Memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar Perusahaan.

TJSL Program Objectives

The Jasindo TJSL program implementation as stated in the Ministerial Regulation of SOE PER-1/MBU/03/2023 aims to:

1. Provide benefits for economic development, social development, environmental development as well as legal and governance development for the Company;
2. Contribute to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, directed and measurable in impact and can be held responsible; and
3. Foster micro and small businesses to make them more resilient and independent, as well as the communities surrounding the Company.

Prinsip Serta Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi acuan agar penerapan program TJSL dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL sesuai dengan prioritas dan rencana kerja, yaitu:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perusahaan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Principles and Objectives of the Social and Environmental Responsibility Program

Based on the Ministerial Regulation of SOE, 4 (four) principles serve a reference for the TJSL program to be implemented systematically and integrated to ensure the implementation and achievement of success of the TJSL Program by priorities and work plans, namely:

1. Integrated, namely based on risk analysis and business processes related to stakeholders;
2. Directed, namely having a clear direction to achieve the Company's goals;
3. Measurable impact, namely having contribution and providing benefits that result in change or added value for stakeholders and the Company; and
4. Accountability, namely accountable to avoid any potential abuse and irregularities.

Pilar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023, program TJSL Jasindo dilaksanakan berdasarkan pilar utama sebagai berikut:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Main Pillars of TJSL Jasindo

In line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023, the Jasindo TJSL program is implemented based on the following main pillars:

1. Social, to fulfill basic human rights fairly and equally to improve welfare for the entire community;
2. Environment, for sustainable management of natural resources and the environment to support all life;
3. Economy, to achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships; and
4. Law and governance, to create legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance to create security stability and achieve a state based on law.

Strategi Pelaksanaan Program TJSL

Asuransi Jasindo melaksanakan program TJSL dengan senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional. Strategi yang disusun dalam pelaksanaan program TJSL adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program TJSL dilakukan dengan berdasar pada asas efisiensi dan efektivitas agar penyaluran dana tepat guna dan tepat sasaran dengan memperhatikan hal-hal seperti:
   a. Dampak dan risiko dari aktivitas Perusahaan
   b. Kebutuhan dan potensi yang timbul
   c. Keunggulan dan kearifan lokal
   d. Orientasi keberlangsungan dan dampak yang diharapkan
   e. Fokus dan arah pembangunan berkelanjutan

TJSL Program Implementation Strategy

Jasindo Insurance implements the TJSL program by consistently respecting and considering stakeholder expectations and complying with applicable laws and consistent with international behavioral norms. The strategy developed in implementing the TJSL program is as follows:

1. TJSL Program is planned based on the efficiency and effectiveness principles so that the distribution of funds is appropriate and on target by paying attention to matters such as:
   a. Impact and risks of the Company activities
   b. Emerging needs and potential
   c. Local excellence and wisdom
   d. Sustainability orientation and expected impact
   e. Focus and direction of sustainable development

2. Keterlibatan karyawan pada pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan komitmen Jasindo terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ditanamkan pada seluruh unit kerja.
3. Program TJSL yang dijalankan dapat mendukung bisnis Perusahaan melalui peningkatan pendapatan premi, mitigasi terjadinya klaim dan membangun *brand image* Perusahaan.

Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan keseluruhan Program TJSL di lingkup Asuransi Jasindo dilakukan oleh Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berada di bawah *Group* Umum dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM dan Umum.

Perencanaan Program TJSL

Perencanaan program TJSL mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam melakukan perencanaan program TJSL, Perusahaan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga pendistribusiannya dapat efisien dan tepat sasaran.

Asuransi Jasindo juga fokus pada keterlibatan pegawai dalam kegiatan sosial kemasyarakatan baik di sekitar unit kerja maupun di sekitar area tempat tinggal pegawai. Melalui keterlibatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN, selama tahun 2023 Asuransi Jasindo telah merealisasikan program TJSL sebesar Rp7,36 miliar yang terdiri dari:

1. **Program TJSL PUMK** sebesar **Rp3,97 Miliar** bersumber dari dana pengembalian bergulir (*revolving*) yang disalurkan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
2. **Program TJSL Non-PUMK CID** yang dijalankan oleh unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/*Community Involvement and Development* (CID) yang sumber dananya berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, yaitu sebesar **Rp1,56 Miliar;** dan
3. **Program TJSL Non-PUMK NON-CID** yang dijalankan di luar unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/ *Community Involvement and Development* (Non-CID) di mana sumber dananya dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, yaitu sebesar **Rp1,83 Miliar.**

Adapun rincian capaian atas kontribusi dan dukungan Jasindo pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2. Involving employees in the implementation of social activities is Jasindo commitment to Social and Environmental Responsibility (TJSL) which is instilled in all work units.
3. The TJSL program implemented can support the Company's business by increasing premium income, mitigating claims and building the Company's brand image.

Social and Environmental Responsibility Management Structure

The overall implementation of the TJSL Program within Jasindo Insurance is carried out by the Social and Environmental Responsibility Unit which is under the General Group and is directly responsible to the Director of Human Resources and General Affairs.

TJSL Program Planning

TJSL program planning refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. In planning the TJSL program, the Company pays attention to the efficiency and effectiveness principles in order for the distribution be efficient and on target.

Asuransi Jasindo also focuses on employee involvement in social activities both around the work unit and around the employee's residence area. This involvement hopefully can grow a sense of empathy and concern for the surrounding environment.

Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program in 2023

As mandated in the Ministerial Regulation of SOE, during 2023 Asuransi Jasindo has realized a TJSL program amounting to IDR7.36 billion consisting of:

1. **TJSL PUMK program** amounting to **IDR3.97 billion** sourced from revolving repayment funds channeled through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
2. **CID Non-PUMK TJSL Program** run by the Community Involvement and Development (CID) unit of which funding source comes from the company budget calculated as costs, of **IDR1.56 billion;** and
3. **Non-PUMK NON-CID TJSL program** implemented outside the Community Involvement and Development (Non-CID) unit of which the funding source comes from the company budget calculated as costs, of **IDR1.83 billion.**

The details of Jasindo's contribution and support to the Sustainable Development Goals (SDG) during 2023 are as follows:

Capaian atas Dukungan Jasindo pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2023
Achievements of Jasindo's Support for the 2023 Sustainable Development Goals (SDG).

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG)	Capaian Jasindo Jasindo Achievements	Jumlah Total (Rp | IDR)
1	TPB 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 2 (Zero Hunger)	• Bantuan 150 paket sembako bagi masyarakat terdampak bencana alam • Bantuan 2.300 paket sembako bagi masyarakat pra sejahtera • Assistance of 150 basic food packages for communities affected by natural disasters • Assistance of 2,300 basic food packages for underprivileged communities	349.738.858
2	TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera) SDG 3 (Good Health and Well-Being)	• Bantuan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat korban bencana alam • Pelaksanaan program Mobil Sehat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur • Program Jalan Sehat Bersama BUMN di 5 kota • Program khitan massal • Program donor darah • IFG Festival Harmony • Pemberian vaksin *booster* COVID-19 kepada pegawai Jasindo • Free medical examination and treatment assistance for people affected by natural disasters • Implementation of the Health Car program in Central Java and East Java • Healthy Walk Program with SOE in 5 cities • Mass circumcision program • Blood donation program • IFG Festival Harmony • Providing COVID-19 booster vaccines to Jasindo employees	1.395.221.940
3	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) SDG 4 (Quality Education)	• Bantuan mobiler Asrama Puteri HKBP Medan • Bantuan 250 paket perlengkapan sekolah • Renovasi sekolah di Labuan Bajo dan PAUD Komodo Center • Bantuan proyektor dan alat permainan edukatif di Labuan Bajo • Bantuan 100 buku dan perlengkapan belajar di Taman Baca Jasindo Ciamis • Bantuan 800 Al-Quran di Jawa Barat • Literasi Asuransi – Labuan Bajo *Youth Festival* • Sosialisasi Asuransi, *Bullying* dan Kurikulum Merdeka Belajar • Program Anak Sehat Indonesia • Program Pendidikan Kewirausahaan yang diberikan kepada 445 peserta didik • Bantuan dana pendidikan bagi 24 siswa/i dari keluarga pra sejahtera • Mobile assistance for the HKBP Medan Girls' Dormitory • Assistance of 250 packages of school supplies • Renovation of schools in Labuan Bajo and PAUD Komodo Center • Assistance of projectors and educational game equipment in Labuan Bajo • Donation of 100 books and study equipment at Jasindo Ciamis Reading Park • Assistance of 800 Al-Qurans in West Java • Insurance Literacy – Labuan Bajo Youth Festival • Dissemination of Insurance, Bullying and Independent Learning Curriculum • Indonesian Healthy Children Program • Entrepreneurship Education Program provided to 445 students • Educational financial assistance for 24 students from underprivileged families	557.814.164
4	TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak) SDG 6 (Clean Water and Sanitation)	Pembuatan 1 unit sarana air bersih di Desa Aikprapa NTT Construction of 1 unit of clean water facilities in Aikprapa Village, NTT	25.000.000
5	TPB 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) SDG 8 (Decent Work & Economic Growth)	• Bantuan 2 unit Traktor di Kab. Tabanan - Bali • Bantuan 1 unit Traktor dan 6 unit Sprayer di Kab. Katingan - Kalimantan Tengah • Penanggulangan hama tikus di Kab. Luwu Utara – Sulawesi Selatan • Bantuan 5 unit mesin kapal dan alat tangkap di Tanjung Lesung – Pandeglang • Program Kurasi dan Inkubasi yang diberikan kepada 99 mitra binaan • Pelatihan IFG Mabarpreneur kepada 32 UMKM • Penyaluran dana PUMK kepada BRI sebesar Rp3.97 miliar • Control of rat pests in North Luwu Regency – South Sulawesi • Assistance of 5 units of ship engines and fishing equipment in Tanjung Lesung – Pandeglang • Curation and Incubation Program provided to 99 fostered partners • IFG Mabarpreneur training for 32 MSMEs • Distribution of PUMK funds to BRI amounting to IDR3.97 billion	4.530.450.000

Capaian atas Dukungan Jasindo pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2023
Achievements of Jasindo's Support for the 2023 Sustainable Development Goals (SDG).

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG)	Capaian Jasindo Jasindo Achievements	Jumlah Total (Rp | IDR)
6	TPB 11 (Kota & Permukiman yang Berkelanjutan SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)	• Renovasi 5 unit sarana ibadah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur • Bantuan sarana dan prasarana di Kel. Cipinang-Jakarta Timur dan Kab. Malang-Jawa Timur • Program Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Likupang, Sulawesi Utara • Renovation of 5 units of worship facilities in the DKI Jakarta, West Java and East Nusa Tenggara areas • Assistance of facilities and infrastructure in Cipinang Subdistrict – East Jakarta and Malang Regency – East Java • Integrated Waste Management Program in Likupang, North Sulawesi	325.000.000
7	TPB 15 (Ekosistem Darat) SDG 15 (Life on Land)	• Penanaman 2.050 bambu di Labuan Bajo • Penanaman 600 bibit pohon non mangrove di wilayah Jakarta dan sekitarnya • Program Olah Sampah Likupang • Program Literasi Sampah Plastik dan Kreasi Daur Ulang Sampah Labuan Bajo • Program Bersih Pantai di 4 lokasi • Bantuan 75 tong sampah dan 50 *wallsign* di Labuan Bajo • Planting 2,050 bamboos in Labuan Bajo • Planting 600 non-mangrove tree seedlings in Jakarta and surrounding areas • Likupang Waste Processing Program • Plastic Waste Literacy Program and Waste Recycling Creations in Labuan Bajo • Beach Clean Program in 4 locations • Donation of 75 trash cans and 50 wall signs in Labuan Bajo	25.000.000
8	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh) SDG 16 (Peace, Justice & Strong Institutions)	Pelaksanaan *Risk Maturity Assessment* Implementation of Risk Maturity Assessment	157.200.000
		TOTAL	7.365.424.962

PILAR SOSIAL – PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
SOCIAL PILLAR – IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

Mendorong pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Encourage the quality fulfillment of basic human rights fairly and equally to improve welfare for the entire community

JASINDO MENGAJAR

Kegiatan Jasindo Mengajar tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka *pra-event* HUT Jasindo ke-50. Selain *sharing knowledge*, dilakukan pemberian bantuan berupa berbagai perlengkapan sekolah kepada para siswa SD peserta Jasindo Mengajar. Kegiatan ini juga merupakan bentuk keterlibatan seluruh pegawai di mana pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja di seluruh Indonesia.
Jasindo Mengajar activity in 2023 was held as a pre-event for Jasindo's 50th anniversary. Apart from sharing knowledge, assistance was provided in the form of various school supplies to elementary school students participating in Jasindo Mengajar. This activity is also a form of involvement of all employees where its implementation is carried out by employees from various work units throughout Indonesia.

MOBIL SEHAT JASINDO

Mobil Sehat Jasindo telah memberikan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis serta literasi dan edukasi di berbagai wilayah Pulau Jawa sejak tahun 2021. Pelaksanaan Mobil Sehat juga melibatkan unit kerja di wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan *engagement* dengan mitra bisnis dan *branding* Jasindo. Tahun 2023, Mobil Sehat Jasindo melaksanakan kegiatannya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Mobil Sehat Jasindo has been providing health services in the form of free examinations and treatment as well as literacy and education in various regions of Java Island since 2021. The implementation of Health Car also involves work units in certain areas in order to increase engagement with business partners and branding of Jasindo. In 2023, Mobil Sehat Jasindo carried out its activities in the East Java and Central Java regions.

TEBUS IJAZAH | REDEEM HIGH SCHOOL DIPLOMA

Tebus Ijazah merupakan program yang menyasar para siswa yang telah selesai menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas/setara namun tidak dapat memperoleh ijazah sehubungan dengan belum diselesaikannya kewajiban administrasi selama menjalani proses kegiatan belajar mengajar karena terkendala biaya. Pada Tahun 2023, penerima manfaat pada program ini sebanyak 11 (sebelas) orang di mana seluruhnya berasal dari wilayah Tangerang – Banten.
Redeem Diploma is a program that targets students who have completed high school/equivalent education but are unable to obtain a diploma due to outstanding administrative obligations during the teaching and learning process due to financial issues. In 2023, this program was provided to 11 (eleven) beneficiaries, all of whom come from the Tangerang - Banten area.

PILAR LINGKUNGAN – PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PILLAR – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PRESERVATION

Mendorong pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan
Encourage sustainable management of natural resources and the environment to support all life

RENOVASI RUMAH IBADAH | HOUSE OF WORSHIP RENOVATION

Selama tahun 2023, Jasindo telah memberikan bantuan pembangunan dan renovasi terhadap 5 (lima) unit sarana ibadah yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
- Masjid Jami Al Muqorrobin – DKI Jakarta
- Gereja St. Yohanes Stasi Doka – Nusa Tenggara Timur
- Masjid Sabilul Khoirot Albahjah – Jawa Barat
- Musholla Nurul Falah – DKI Jakarta
- Musholla Al Hikmah – DKI Jakarta

During 2023, Jasindo has provided construction and renovation assistance to 5 (five) units of worship facilities spread across several regions in Indonesia.
- Al Muqorrobin Jami Mosque – DKI Jakarta
- St. Yohanes Stasi Doka Church – East Nusa Tenggara
- Sabilul Khoirot Albahjah Mosque – West Java
- Nurul Falah Prayer Room – DKI Jakarta
- Al Hikmah Prayer Room – DKI Jakarta

SARANA AIR BERSIH | CLEAN WATER FACILITIES

Pembangunan sarana air bersih dilakukan di Desa Aikprapa, Kab. Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan 10 perusahaan BUMN di mana wilayah ini mengalami kekeringan akibat dampak El Nino berkepanjangan. Melalui pembangunan sarana air bersih diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air bagi 309 KK.
Construction of clean water facilities was carried out in Aikprapa Village, East Lombok Regency – West Nusa Tenggara involving 10 state-owned companies where this area suffered from drought due to the prolonged impact of El Nino. The construction of clean water facilities hopefully can fulfill the water needs for 309 families.

PENANAMAN POHON | TREE PLANTING

Selama tahun 2023, Jasindo telah melakukan kegiatan penanaman pohon di beberapa wilayah Indonesia.
- Penanaman 2.050 tanaman bambu di Labuan Bajo dalam rangka IFG Labuan Bajo Marathon 2023; dan
- Penanaman 600 bibit pohon non mangrove di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan seluruh pegawai Jasindo di kantor pusat.

During 2023, Jasindo has carried out tree planting activities in several regions of Indonesia.
- Planting 2,050 bamboo plants in Labuan Bajo for the IFG Labuan Bajo Marathon 2023; and
- Planting 600 non-mangrove tree seedlings in the Jakarta area and surrounding areas involving all Jasindo employees at the head office.

PILAR EKONOMI – PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
ECONOMIC PILLAR – DEVELOPMENT OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE)

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang usaha, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan
Encouraging quality economic growth through sustainable business opportunities, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships

PELATIHAN DAN PEMBINAAN UMK | MSE TRAINING AND COACHING

Selama tahun 2023, Jasindo telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 132 UMK melalui beberapa program.
- Pelatihan pengolahan ikan melalui kegiatan IFG Mabarpreneur kepada 32 UMK di Labuan Bajo; dan
- Program pelatihan, kurasi dan inkubasi kepada 100 UMK yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

During 2023, Jasindo has provided training and coaching to 132 MSEs through several programs.
- Fish processing training through IFG Mabarpreneur activities for 32 MSEs in Labuan Bajo; and
- Training, curation and incubation programs for 100 MSEs from various regions in Indonesia.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | AGRICULTURAL TOOLS AND EQUIPMENT

Jasindo memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan pertanian dalam rangka mendukung program asuransi penugasan pemerintah khususnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) baik dari segi pengembangan bisnis maupun mitigasi risiko.
- 9 unit *Cultivator* di Jawa Tengah, Jambi dan Bali
- 1 unit Traktor dan 6 unit *sprayer* di Kalimantan Tengah
- Racun pembasmi hama di Sulawesi Selatan

Jasindo provided agricultural equipment and supplies to support the government-assigned insurance program, specifically the Rice Farming Insurance (AUTP), in terms of both business development and risk mitigation.
- 9 Cultivator units in Central Java, Jambi and Bali
- 1 Tractor unit and 6 sprayer units in Central Kalimantan
- Pest exterminator poison in South Sulawesi

MESIN KAPAL DAN ALAT TANGKAP IKAN | SHIP ENGINE AND FISHING EQUIPMENT

Bantuan 5 unit mesin kapal jukung dan perlengkapan alat tangkap ikan diberikan kepada para nelayan di wilayah Tanjung Lesung, Pandeglang – Banten di mana sebelumnya pada tahun 2021 Jasindo juga telah memberikan 8 unit kapal jukung di wilayah ini untuk membantu para nelayan terdampak bencana tsunami.
Assistance of 5 units of jukung boat engines and fishing equipment was provided to fishermen in the Tanjung Lesung area, Pandeglang – Banten, where previously in 2021 Jasindo had also provided 8 units of jukung boats in this area to help fishermen affected by the tsunami disaster.

Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023

Social and Environmental Responsibility Program Performance in 2023

Kontribusi Jasindo pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagi Asuransi Jasindo, keberlanjutan merupakan bagian dari komitmen Jasindo dalam mewujudkan visi dan misi, serta untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, Asuransi Jasindo berupaya untuk tetap konsisten dalam meningkatkan dukungan pada capaian. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang salah satunya diimplementasikan melalui pelaksanaan Program TJSL baik yang dilaksanakan oleh Unit TJSL (*Community Involvement & Development*/ CID) maupun yang dilaksanakan oleh unit di luar unit TJSL (Non-CID). Asuransi Jasindo senantiasa berupaya untuk mendukung inisiatif pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan skala global yang tertuang dalam rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan.

Jasindo Contribution to Sustainable Development Goals

For Asuransi Jasindo, sustainability is part of its commitment to realize its vision and mission and to create a better future for all stakeholders. Therefore, Asuransi Jasindo strives to remain consistent in increasing support for the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), one of which is implemented through the TJSL Program implementation both implemented by the TJSL Unit (Community Involvement & Development/CID) and units outside the TJSL unit (Non-CID). Asuransi Jasindo always strives to support initiatives to achieve Sustainable Development Goals as part of efforts to meet global-scale sustainable development targets contained in the formulation of Sustainable Development Goals (SDGs), including 17 goals.

Program TJSL Prioritas

Sejalan dengan perannya sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan, Program TJSL Jasindo diselaraskan dengan *corporate objective* dan dilaksanakan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain diharapkan dapat meningkatkan *corporate image* dan *corporate business*, Program TJSL Asuransi Jasindo juga ditujukan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Asuransi Jasindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang berbagai program yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Priority TJSL Program

In line with its role as one of the companies engaged in insurance and guarantee, Jasindo TJSL Program is aligned with corporate objectives and implemented in a directed, structured, and sustainable manner. In addition to being expected to improve corporate image and business, Asuransi Jasindo TJSL Program is also intended to positively impact society and the environment, oriented towards the Sustainable Development Goals.

Asuransi Jasindo is committed to innovating in designing various programs that positively impact society and the environment.

Program *Creating Share Value*

Salah satu pelaksanaan Program TJSL yang dilaksanakan oleh Asuransi Jasindo adalah dengan menerapkan pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) sebagai bagian dari strategi Asuransi Jasindo untuk meningkatkan nilai-nilai kompetitif dan mendukung proses bisnis Asuransi Jasindo yang secara bersamaan dapat memberikan nilai manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan.

Creating Share Value Program

One of the implementations of the TJSL Program carried out by Asuransi Jasindo is by applying the Creating Shared Value (CSV) approach as part of Asuransi Jasindo strategy to increase competitive values and support Asuransi Jasindo business processes which can simultaneously provide social and economic benefits to society, and the environment.

Program TJSL Kolaborasi

Program TJSL Kolaborasi merupakan program yang dilaksanakan bersama-sama dengan BUMN lainnya maupun Kementerian BUMN dengan harapan capaian nilai manfaat yang diberikan akan lebih besar dan bantuan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Collaborative TJSL Program

The Collaborative TJSL Program is a program that is carried out jointly with other SOEs and the Ministry of SOE with the hope that the value of the benefits provided will be greater and that the assistance provided can reach more people.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Micro and Small Enterprises Funding (MSE Funding) Program

Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2023

Perwujudan kontribusi Asuransi Jasindo dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan juga diimplementasikan melalui Program Pendanaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Program PUMK merupakan bentuk dari kegiatan TJSL yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat. Pelaksanaan program PUMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMK agar lebih tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan program PUMK mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Implementation of the Micro and Small Enterprises Funding (MSE Funding) Program in 2023

Asuransi Jasindo contribution to supporting the government in sustainable development is also implemented through the Funding Program for Micro and Small Enterprises (MSE Funding). The MSE Funding program is a form of TJSL activity that is more directed towards improving the quality of life of the surrounding community by fostering micro and small enterprises formed within the community. The implementation of the MSE Funding program aims to provide easy access to capital for micro and small enterprises and provide guidance to improve the ability of MSEs to be more resilient and independent.

The implementation of the MSE Funding program refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

Dana Program PUMK Jasindo tahun 2023 bersumber dari:

1. Pengembalian pinjaman Mitra Binaan;
2. Saldo dana Program PUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun sebelumnya;
3. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program PUMK.

Program Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2023

Asuransi Jasindo senantiasa memberikan pembinaan kepada mitra binaan yang merupakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil agar mereka dapat meningkatkan tata kelola usahanya menuju kepada tata kelola yang lebih baik dan menghasilkan *benefit* yang terus meningkat sehingga dapat menjadi pendorong pergerakan ekonomi di wilayah lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan mitra binaan menjadi bagian dari program penyaluran dana TJSL yang dijalankan. Penyaluran dana pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mitra binaan.

Informasi Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Mengacu pada Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit atas Laporan Keuangan Program PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers) Nomor: 00712/2.1025/AU.2/08/1804-3/0/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Jasindo MSE Funding Program funds in 2023 are sourced from:

1. Loan repayment of fostered partners;
2. The balance of MSE Funding Program funds allocated until the end of the previous year;
3. Loan administration services/margins/profit sharing, deposit interest, and/or current account services from MSE Funding Program funds.

Micro and Small Enterprises Development Program in 2023

Asuransi Jasindo continues to guide its fostered partners, who are micro and small enterprise actors, to improve their business governance towards better governance and generate increasing benefits to become drivers of economic movement in their neighborhoods.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, fostered partner development funds are part of the TJSL fund distribution program. The distribution of this coaching fund is directed to increase the capacity of the fostered partners.

Information on Financial Reports for Micro and Small Business Funding Programs

Referring to Article 33 Paragraph 2 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs, the annual MSE Funding Program financial report must be audited by a public accounting firm. The audit of the MSE Program Financial Report for the financial year ended on December 31, 2023 has been carried out by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the Pricewaterhouse Coopers network) Number: 00712/2.1025/AU.2/08/1804-3/0/IV/2024 dated April 26, 2024 with an opinion that the financial statements present fairly in all material respects, in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) for Entities Without Public Accountability (ETAP).

2023

Laporan Tahunan

Annual Report

asuransi jasindo

A member of IFG

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Kantor Pusat | Head Office
Graha Jasindo, Jl. Menteng Raya No. 21, RW. 10,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat | Central Jakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon | Telephone: +6221 3024737
Contact Center: 1500073
contactcenter@asuransijasindo.co.id
www.jasindo.co.id